KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta ridho-Nya, **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019** yang merupakan amanat konstitusional telah dapat diselesaikan. Penyusunan LPPD Tahun 2019 ini merupakan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolak ukur dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta permasalahan dan solusinya. Dengan demikian laporan ini berisi gambaran kinerja pelaksanaan pemerintahan yang merupakan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2019.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kabupaten Klaten sudah berupaya secara optimal. Saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan kinerja sangat kami harapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala upaya yang telah kami laksanakan dapat mewujudkan Kabupaten Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Berdaya Saing*** dan senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha dari Allah SWT. Amin.

Klaten, Maret 2020

BUPATI KLATEN

Hj. SRI MULYANI

DAFTAR ISI

Kata pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Lampiran v

Daftar Gambar dan Tabel vi

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Klaten 1

B. Gambaran umum Daerah..... 2

C. Kondisi Geografis Daerah 3

D. Gambaran Umum Demografis 5

E. Kondisi Ekonomi 11

F. Indikator Kinerja Makro..... 18

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 26

A. Visi dan Misi..... 26

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah..... 27

C. Prioritas Daerah 55

BAB III

URUSAN KONKUREN,FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 58

A. UrusanKonkuren..... 58

a) Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... 58

I. Urusan Pendidikan..... 58

II. Urusan Kesehatan..... 68

III. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 78

IV. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 84

V. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 87

VI. Urusan Sosial..... 95

b) Ringkasan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar..... 99

I. Urusan Tenaga Kerja..... ... 99

II. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak..... 101

III. Urusan Pangan..... 104

IV. Urusan Lingkungan Hidup 107
V. Urusan Administrasi Kependudukan
Dan Catatan Sipil..... 111
VI. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 115
VII. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana..... 118
VIII. Urusan Perhubungan..... 122
IX. Urusan Komunikasi dan Informatika..... 125
X. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah..... 129
XI. Urusan Penanaman Modal 133
XII. Urusan Kepemudaan dan Olahraga..... 138
XIII. Urusan Statistik..... 140
XIV. Urusan Kebudayaan..... 142
XV. Urusan Perpustakaan..... 144
XVI. Urusan Kearsipan..... 146
XVII. Urusan Persandian..... 149

c) Ringkasan Urusan Pilihan..... 151
I. Urusan Kelautan dan Perikanan..... 151
II. Urusan Pariwisata..... 153
III. Urusan Pertanian..... 156
IV. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral..... 159
V. Urusan Perdagangan..... 161
VI. Urusan Perindustrian..... 164
VII. Urusan Transmigrasi 167

B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH..... 169
I. Urusan Administrasi Pemerintahan..... 169
II. Urusan Pengawasan..... 177
III. Urusan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan 180
IV. Urusan Keuangan..... 186
V. Urusan Kepegawaian..... 190

C. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM..... 194
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI 197

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2019..... 198

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN 204

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN..... 216
A. Kerjasama Antar Daerah..... 216
B. Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga..... 227
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah..... 248
D. Pembinaan Batas Wilayah..... 252
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 258
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum..... 264

BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 271
A. Urusan Pendidikan..... 271
B. Urusan Kesehatan..... 283
C. Urusan Pekerjaan Umum..... 294
D. Urusan Perumahan 303
E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... 311
F. Urusan Sosial..... 321

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 325
A. Target Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi..... 326
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... 333
C. Akuntabilitas Anggaran..... 446
D. Efektivitas Sumber Daya 469

BAB IX

PENUTUP..... .487

DAFTAR LAMPIRAN

- **LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN**
- **LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN**
- **LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN**
- **LAMPIRAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1:
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2019 15

Gambar 1.2:
Perkembangan PDRB (dalam triliun rupiah) di Kab.Klaten
Tahun 2017 – 2019..... 15

Gambar 1.3:
Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten (dalam %)
di Kabupaten Klaten tahun 2015 -2019..... 19

Gambar1.4
Perkembangan antar waktu jumlah penduduk Miskin
di Kab.Klaten tahun 2015 – 2019 20

Gambar1.5
Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) %
Kabupaten Klaten tahun 2015 – 2019 20

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
di Kab. Klaten tahun 2015-2019..... 21

Gambar 1.6
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2019 21

Gambar 1.7
Perkembangan PDRB (dalam triliun rupiah) di Kab.Klaten
Tahun 2017 – 2019..... 22

Gambar 1.8
PDRB Per Kapita Klaten 2017-209(dalam juta rupiah)..... 24

Gambar 1.9
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) dalam juta rupiah
menurut jenis Kelamin di Kab. Klaten pada tahun 2017-2019 24

Gambar 8.1
Peringkat Kinerja Progresif..... 332

Gambar 8.2
Peringkat Kinerja Regresif..... 333

Gambar 8.3
Angka Kelulusan (AL) tahun 2015-2019 336

Gambar 8.4
Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas
di Kabupaten KlateN tahun 2015-2019 337

Gambar 8.5
Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS
Tahun 2015-2019..... 339

Gambar 8.6
Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2019. 339

Gambar 8.7
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2019. 344

Gambar 8.8
Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2019. 344

Gambar 8.9
Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2019. 345

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2019 2

Tabel 1.2
Luas Wilayah Per-Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2019 3

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan
Tahun 2027-2019 6

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis Kelamin
Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 6

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Usia
Tahun 2019 7

Tabel 1.6
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Tahun 2019 8

Tabel : 1.7
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten Tingkat Pendidikan
tahun 2019..... . 10

Tabel : 1.8
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019(juta Rupiah) 16

Tabel : 1.9
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019(juta Rupiah)..... 17

Tabel 1.10
Kondisi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 – 2019
di Kab. Klaten 18

Tabel : 1.11
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019 (juta Rupiah) 22

Tabel : 1.12
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019 (juta Rupiah)..... 23

Tabel : 1.13
Gini ratio di jawa Tengah dan Indonesia tahun 2017-2019..... 25

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Klaten 28

Tabel 2.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten..... 35

Tabel:3.1
Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan Tahun 2019 59

Tabel 3.2
Data Pegawai Pelaksanaan Urusan Pendidikan 65

Tabel 3.3
Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan tahun 2019 66

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan 68

Tabel 3.5
Data Pegawai Urusan Kesehatan 73

Tabel 3.6
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan KesehatanTahun 2019... .. 74

Tabel 3.7
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan tahun 2019 77

Tabel 3.8
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2019..... 78

Tabel 3.9
Data Kepegawaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80

Tabel 3.10
Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 81

Tabel 3.11
Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ... 84

Tabel 3.12
Data pegawai urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 85

Tabel 3.13
Permasalahan dan solusi urusan perwaskim tahun 2019 86

Tabel 3.12
Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat 87

Tabel 3.15
Data pegawai urusan ketentraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat 89

Tabel 3.16
Permasalahan dan soluli urusan ketertiban ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 91

Tabel 3.17
Capaian kinerja urusan social tahun 2019 95

Tabel 3.18
Data pegawai urusan social 97

Tabel 3.19
Permasalahan dan solusi urusan social tahun 2019..... 98

Tabel 3.20
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan tenaga kerja..... 99

Tabel 3.21
Data pegawai pelasksana urusan tenaga kerja 100

Tabel 3.22
Permasalahan dan solusi urusan tenaga kerja tahun 2019 101

Tabel 3.23
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak tahun 2019..... 102

Tabel 3.24
Data pegawai urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak..... 102

Tabel 3.25
Permasalahan dan solusi pelaksanaan program
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak..... 103

Tabel 3.26
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan pangan tahun 2019 104

Tabel 3.27
Data pegawai urusan pangan 105

Tabel 3.28
Permasalahan dan solusi urusan pangan tahun 2019..... 106

Tabel 3.29
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan lingkungan
hidup tahun 2019..... 107

Tabel 3.30
Data pegawai urusan lingkungan hidup 109

Tabel 3.31
Permasalahan dan solusi urusan lingkungan hidup tahun 2019..... 110

Tabel 3.32
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan administrasi
kependudukan dan catatan sipil..... 111

Tabel 3.33
Data pegawai urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil 112

Tabel 3.34
Permasalahan dan solusi urusan Adm. Kependudukan
dan capil tahun 2019 113

Tabel 3.35
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan pemberdayaan
masyarakat desa tahun 2019 115

Tabel 3.36
Data pegawai urusan pemberdayaan masyarakat desa..... 116

Tabel 3.37
Permasalahan, solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan
programurusan pemberdayaan masyarakat desa..... 117

Tabel 3.38
Penghargaan / prestasi urusan pemberdayaan masyarakat
desa tahun 2019..... 117

Tabel 3.39
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana tahun 2019 118

Tabel 3.40
Data pegawai urusan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana..... 120

Tabel 3.41
Permasalahan dan solusi urusan pengendalian penduduk
dan keluarga berencana tahun 2019 121

Tabel 3.42
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan perhubungan
Tahun 2019..... 122

Tabel 3.43
Data pegawai urusan perhubungan..... 123

Tabel 3.44
Permasalahan dan solusi pelaksanaan urusan perhubungan
tahun 2019..... 124

Tabel 3.45
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan komunikasi
Dan informatika 125

Tabel 3.46
Data pegawai urusan komunikasi dan informatika..... 126

Tabel 3.47
Permasalahan dan solusi pelaksanaan urusan komunikasi
Dan informatika tahun 2019 128

Tabel 3.48
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan koperasi,
usaha kecil dan menengah tahun 2019 129

Tabel 3.49
Data pegawai urusan koperasi, usaha kecil dan menengah 130

Tabel 3.50
Pemersalahan dan solusi urusan koperasi, usaha kecil
dan menengah tahun 2019..... 131

Tabel 3.51
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan penanaman
Modal tahun 2019 133

Tabel 3.52
Data pegawai urusan penanaman modal 134

Tabel 3.53
Permasalahan dan solusi urusan penanaman modal..... 135

Tabel 3.54
Prestasi / penghargaan pelaksanaan program urusan penanaman
Modal tahun 2019 137

Tabel 3.55
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan kepemudaan
Dan olahraga tahun 2019..... 138

Tabel 3.56
Data pegawai pelaksana urusan kepemudaan dan olah raga 139

Tabel 3.57
Permasalahan dan solusi urusan kepemudaan dan
olahraga tahun 2019 140

Tabel 3.58
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan statistic tahun 2019 141

Tabel 3.59
Data pegawai urusan statistik 141

Tabel 3.60
Permasalahan dan solusi urusan statistik..... 142

Tabel 3.61
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan kebudayaan tahun 2019.... 142

Tabel 3.62
Data pegawai urusan kebudayaan..... 143

Tabel 3.63
Permasalahan dan solusi urusan kebudayaan tahun 2019 144

Tabel 3.64
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan perpustakaan
Tahun 2019..... 144

Tabel 3.65
Data pegawai urusan perpustakaan 145

Tabel 3.66
Permasalahan dan solusi urusan perputakaan..... 146

Tabel 3.67
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan kearsipan tahun 2019 147

Tabel 3.68
Data pegawai urusan kearsipan..... 147

Tabel 3.69
Permasalahan dan solusi urusan kearsipan tahun 2019 148

Tabel 3.70
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan persandian tahun 2019 149

Tabel 3.71
Data pegawai urusan persandian 150

Tabel 3.72
Permasalahan dan solusi urusan persandian tahun 2019 151

Tabel 3.73
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan kelautan
dan perikanan tahun 2019 151

Tabel 3.74
Data pegawai urusan kelautan dan perikanan..... 152

Tabel 3.75
Permasalahan dan solusi urusan kelautan dan perikanan tahun 2019 153

Tabel 3.76
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan pariwisata
Tahun 2019 154

Tabel 3.77
Data pegawai urusan pariwisata..... 154

Tabel 3.78
Permasalahan dan solusi pelaksanaan urusan pariwisata tahun 2019..... 155

Tabel 3.79
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan pertanian 156

Tabel 3.80
Data pegawai urusan pertanian..... 157

Tabel 3.81
Permasalahan dan solusi pelaksanaan urusan pertanian tahun 2019..... 158

Tabel 3.82
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan energi dan sumber
daya mineral tahun 2019..... 159

Tabel 3.83
Permasalahan dan solusi pelaksanaa urusan ESDM tahun 2019 160

Tabel 3.84
Indikator kinerja dan capaian kinerja urusan perdagangan tahun 2019 .. 161

Tabel 3.85
Data pegawai urusan perdagangan..... 162

Tabel 3.86
Permasalahan dan solusi urusan perdagangan tahun 2019 163

Tabel 3.87
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan perindustrian tahun 2019.. 164

Tabel 3.88
Data pegawai urusan industri..... 165

Tabel 3.89
Permasalahan dan solusi urusan perindustrian tahun 2019 166

Tabel 3.90
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan transmigrasi tahun 2019 ... 167

Tabel 3.91
Data pegawai urusan transmigrasi 167

Tabel 3.92
Permasalahan, solusi, dan rencana tindak lanjut urusan
Transmigrasi tahun 2019 168

Tabel 3.93
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan pemerintahan
fungsi penunjang si bidang administrasi pemerintahan tahun 2019 169

Tabel 3.94
Data pegawai urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi
pemerintah 173

Tabel 3.95
Permasalahan dan solusi urusan pemerintahan fungsi penunjang di
Bidang administrasi pemerintahan 174

Tabel 3.96
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan pemerintahan fungsi
penunjang di bidang pengawasan tahun 2019..... 177

Tabel 3.97
Data pegawai urusan pemerintah fungsi pengawasan 178

Tabel 3.98
Permasalahan, solusi, dan rencana tindak lanjut urusan pemerintahan
Fungsi penunjang di bidang pengawasan 179

Tabel 3.99
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan pemerintahan fungsi
penunjang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan
tahun 2019..... 180

Tabel 3.100
Data pegawai urusan perencanaan..... 182

Tabel 3.101
Permasalahan dan solusi urusan penelitian dan pengembangan..... 185

Tabel 3.102
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan pemerintahan fungsi
Penunjang di bidang keuangan tahun 2019 186

Tabel 3.103
Data pegawai urusan pemerintah fungsi penunjang keuangan..... 187

Tabel 3.104
Permasalahan, solusi, dan rencana tindak lanjut pelaksanaan
urusan pemerintahan fungsi penunjang di bidang keuangan 188

Tabel 3.105
Indicator kinerja dan capaian kinerja urusan pemerintahan fungsi
penunjang di bidang kepegawaian tahun 2019 190

Tabel 3.106
Data pegawai urusan kepegawaian 190

Tabel 3.107
Permasalahan dan solusi pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi
Penunjang di bidang kepegawaian 192

Tabel 3.108
Capaian kinerja urusan pemerintahan umum (KEBANGPOL) 194

Tabel 3.109
Data pegawai urusan pemerintahan umum (KESBANGPOL)..... 195

Tabel 3.110
Permasalahan dan solusi pelaksanaan urusan pemerintahan umum
(KESBANGPOL)..... 196

Tabel 4.1
Pelaksanaan Program Prioritas Nasional berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP tahun 2019) yang didukung
oleh Program Pemerintah Daerah pada tahun 2019..... 198

Tabel 5.1
Hasil pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima
dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten klaten dari
kementrian tenaga kerja Republic indonesia..... 207

Tabel 5.2
Hasil pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dinas pertanian
Ketahanan pangan dan perikanan kabupaten klaten dari kementrian
Pertanian Republik indonesia 208

Tabel 5.3
Data Pegawai Pelaksana Tugas Pembantuan
Bidang Tenaga Kerja..... 213

Tabel 5.4
Data Pegawai Pelaksana Tugas Pembantuan
Bidang Pertanian 214

Tabel 5.5
Permasalahan dan solusi pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2019.... 213

Tabel 6.1
Permasalahan yang terjadi diwilayah perbatasan dan solusi dalam
menyelesaikan masalah..... 254

Tabel 6.2
Data Kejadian Bencana yang ditangani BPBD Kabupaten Klaten
Tahun 2019 258

Tabel 6.3
Dampak Bencana tahun 2019 di Kabupaten Klaten 258

Tabel 6.4
Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Klaten 260

Tabel 6.5
Rekapitulasi data hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit
masyarakat (PEKAT) oleh satpol PP kabupaten klaten
tahun 2016 - 2019..... 264

Tabel 6.6
Rekapitulasi hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit
masyarakat (PEKAT) jenis minuman keras/beralkohol
tahun 2014-2019..... 265

Tabel 6.7
Data Pegawai Satpol PP dan Kesbangpol..... 267

Tabel 7.1.a
Target Pencapaian SPM urusan Pendidikan..... 272

Tabel 7.1.b
Realisasi SPM urusan Pendidikan tahun 2019 272

Tabel 7.1.c
Anggaran mendukung SPM Pendidikan Tahun 2019 274

Tabel 7.1.d
Keadaan PNS Dan PTT Dinas Pendidikan Tahun 2019 280

Tabel 7.1.e
Keadaan PNS menurut pangkat/golongan Dinas Pendidikan
Tahun 2019 280

Tabel 7.1.f
Keadaan PNS pegawai berdasarkan eselonering Dinas Pendidikan
Tahun 2019 281

Tabel 7.2.a
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2019 283

Tabel 7.2.b
Realisasi SPM Bidang Kesehatan tahun 2019 284

Tabel 7.2.c
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Ksehatan Tahun 2019..... 285

Tabel 7.2.d
Jenis dan Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Tahun 2019 289

Tabel 7.3.a
Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum..... 294

Tabel 7.3.b
Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum..... 295

Tabel 7.3.c
Alokasi Anggaran SPM Pekerjaan Umum 295

Tabel 7.3.d
Jumlah Keseluruhan Pegawai Disperwaskim 297

Tabel 7.3.e
Sebaran pegawai berdasarkan Golongan Pendidikan Disperwaskim 298

Tabel 7.3.f
Sebaran pegawai berdasarkan Jabatan dan Status Kepegawaian
Disperwaskim 298

Tabel 7.3.g
Sebaran pegawai berdasarkan Golongan ruang
Disperwaskim 299

Tabel 7.3.h
Sebaran pegawai berdasarkan Jabatan Struktural (eselon)
Disperwaskim 299

Tabel 7.3.i
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Dalam pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum 300

Tabel 7.4.a
Target Pencapaian SPM Perumahan 304

Tabel 7.4.b
Realisasi Pencapaian SPM Perumahan 304

Tabel 7.4.c
Alokasi Anggaran SPM Perumahan 305

Tabel 7.4.d
Jumlah Keseluruhan Pegawai Disperwaskim 307

Tabel 7.4.e
Sebaran pegawai berdasarkan Golongan Pendidikan Disperwaskim 307

Tabel 7.4.f
Sebaran pegawai berdasarkan Jabatan dan Status Kepegawaian
Disperwaskim 308

Tabel 7.4.g
Sebaran pegawai berdasarkan Golongan ruang
Disperwaskim 308

Tabel 7.4.h
Sebaran pegawai berdasarkan Jabatan Struktural (eselon)
Disperwaskim 309

Tabel 7.4.i
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Dalam pelaksanaan SPM Perumahan 309

Tabel 7.5.a
Target Pencapaian SPM Urusan kebakaran
dan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum 312

Tabel 7.5.b
Target Pencapaian SPM Urusan bencana 313

Tabel 7.5.c
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibunlinmas yang dikerjakan
Satpol PP 313

Tabel 7.5.d
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibunlinmas yang dikerjakan
BPBD 314

Tabel 7.5.e
Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibunlinmas yang dikerjakan
Satpol PP 315

Tabel 7.5.f
Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibunlinmas yang dikerjakan
BPBD 316

Tabel 7.5.g
Personil Satpol PP Tahun 2019 317

Tabel 7.5.h
Jumlah Pegawai BPBD Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 318

Tabel 7.5.i
Jumlah Pegawai BPBD Menurut Pendidikan 318

Tabel 7.5.j
Permasalahan dan solusi pelaksanaan SPM Trantibunlinmas 318

Tabel 7.6.a
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial tahun 2019 321

Tabel 7.6.b
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kab. Klaten tahun 2019 322

Tabel 7.6.c
Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Kab. Klaten Tahun 2019 322

Tabel 8.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif 325

Tabel 8.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif 326

Tabel 8.3
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah
Kab. Klaten tahun 2019 326

Tabel 8.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikannon formal 333

Tabel 8.5
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019 335

Tabel 8.6
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019 335

Tabel 8.7
Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang
Pendidikan di Kabupaten KlatenTahun 2015-2019 336

Tabel 8.8
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang
Pendidikan di Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2019 338

Tabel 8.9
Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2
danBersertifikatMenurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019..... 338

Tabel 8.10
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs
Ke SMA/MA/SMK Kabupaten KlatenTahun 2015-2019 339

Tabel 8.11
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
Tahun 2015-2019 340

Tabel 8.12
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran KinerjaMeningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian,
Angka Kesakitan dan Kecacatan 342

Tabel 8.13
Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan
dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019..... 343

Tabel 8.14
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*) 347

Tabel 8.15
Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 347

Tabel 8.16.
Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya
di Kabupaten Klaten Tahun 2015–2019.....347

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Klaten

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah Daerah Otonom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pejabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala Corps Pamong Praja yang sehari-harinya diserahi tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan medebewind, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam corps Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi pada satu tempat. Kemudian untuk menyempurnakan struktur Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

B. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY. Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Adapun Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten tahun 2019

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	Prambanan	16	-
2	Gantiwarno	16	-
3	Wedi	19	-
4	Bayat	18	-
5	Cawas	20	-
6	Trucuk	18	-
7	Kalikotes	7	-
8	Kebonarum	7	-
9	Jogonalan	18	-
10	Manisrenggo	16	-
11	Karangnongko	14	-
12	Ngawen	13	-
13	Ceper	18	-
14	Pedan	14	-
15	Karangdowo	19	-
16	Juwiring	19	-
17	Wonosari	18	-
18	Delanggu	16	-
19	Polanharjo	18	-
20	Karanganom	19	-
21	Tulung	18	-
22	Jatinom	17	1
23	Kemalang	13	-
24	Klaten Selatan	11	1
25	Klaten Tengah	3	6
26	Klaten Utara	6	2
	Jumlah	**391**	**10**

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten tahun 2019

C. Kondisi Geografis Daerah

1. Batas Administrasi

Kabupaten Klaten terletak antara $7^{0}32`19"$ Lintang Selatan sampai $7^{0}48`33"$ Lintang Selatan dan antara $110^{0}26`14"$ Bujur Timur sampai $110^{0}47`51"$ Bujur Timur. Dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

2. Luas Wilayah

Luas wilayah keseluruhan seluas 65.556 ha (655,56 km^2) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya seluas 3.254.412 ha. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Klaten per kecamatan dapat diihat pada tabel berikut :

Tabel: 1.2
Luas Wilayah Per-Kecamatan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2019

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM^2)
1	Prambanan	24,43
2	Gantiwarno	25,64
3	Wedi	24,38
4	Bayat	39,43
5	Cawas	34,47
6	Trucuk	33,81
7	Kalikotes	12,98
8	Kebonarum	9,67
9	Jogonalan	26,70
10	Manisrenggo	26,96
11	Karangnongko	26,74
12	Ngawen	16,97
13	Ceper	24,45
14	Pedan	19,17
15	Karangdowo	29,23
16	Juwiring	29,79
17	Wonosari	31,14
18	Delanggu	18,78
19	Polanharjo	23,84
20	Karanganom	24,06
21	Tulung	32,00
22	Jatinom	35,53
23	Kemalang	51,66
24	Klaten Selatan	14,43
25	Klaten Tengah	8,92
26	Klaten Utara	10,38
	Jumlah	**655,56**

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten tahun 2019

Dari tabel diatas Kecamatan Kemalang merupakan kecamatan yang terluas mencapai 7,88% dari luas wilayah Kabupaten Klaten, sedangkan

Kecamatan Klaten Tengah merupakan kecamatan yang paling sempit yaitu hanya 1,36% dari luas wilayah Kabupaten Klaten.

3. Topografi Kabupaten Klaten

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan–kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
3. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan : Juwiring, Karangdowo dan Cawas
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
3. Wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

4. Iklim di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28–

30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20–25 km/jam.

5. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

6. Jenis Tanah di Kabupaten Klaten

Jenis tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:

1. Litosol :
   Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.
2. Regosol Kelabu:
   Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, TulungdanJatinom.
3. Grumusol Kelabu Tua :
   Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua :
   Bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
5. Regosol Coklat Kekelabuan:
   Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

D. Gambaran Umum Demografis

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebanyak 1.323.609 jiwa. dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 659.481 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 664.128 jiwa. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Klaten bisa dilihat dalam tabel 1.3

Tabel:1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan Tahun 2017 – 2019

NO	KECAMATAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	PRAMBANAN	52.112	52.662	52.824
2	GANTIWARNO	41.060	40.609	40.696
3	WEDI	54.068	54.681	54.507
4	BAYAT	64.680	65.148	65.649
5	CAWAS	60.047	61.359	60.690
6	TRUCUK	79.409	80.740	81.715
7	KEBONARUM	20.532	20.910	20.935
8	JOGONALAN	59.808	61.117	61.237
9	MANISRENGGO	43.245	44.181	44.373
10	KARANGNONGKO	37.371	38.247	38.096
11	CEPER	66.196	66.963	67.619
12	PEDAN	48.592	48.831	48.990
13	KARANGDOWO	46.144	45.176	45.256
14	JUWIRING	60.953	60.686	61.155
15	WONOSARI	64.494	64.760	64.770
16	DELANGGU	43.917	43.248	43.661
17	POLANHARJO	42.886	42.783	42.969
18	KARANGANOM	47.102	47.585	47.602
19	TULUNG	55.386	55.283	55.419
20	JATINOM	61.475	61.905	62.312
21	KEMALANG	39.467	39.721	40.064
22	NGAWEN	46.697	46.697	47.368
23	KALIKOTES	37.877	37.943	38.116
24	KLATEN UTARA	48.315	48.416	49.265
25	KLATEN TENGAH	42.361	42.264	42.634
26	KLATEN SELATAN	44.518	44.965	45.687
TOTAL		**1.308.712**	**1.316.880**	**1.323.609**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020

2) Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per-Kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam tabel 1.4

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per-Kecamatan di Kabupaten Klaten

NO	KECAMATAN	LAKILAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Prambanan	26.124	26.700	52.824
2	Gantiwarno	20.249	20.447	40.696
3	Wedi	27.110	27.397	54.507
4	Bayat	32.978	32.671	65.649
5	Cawas	30.093	30.597	60.690
6	Trucuk	41.088	40.627	81.715
7	Kebonarum	10.305	10.630	20.935
8	Jogonalan	30.671	30.566	61.237
9	Manisrenggo	21.937	22.436	44.373
10	Karangnongko	18.900	19.196	38.096
11	Ceper	33.852	33.767	67.619
12	Pedan	24.513	24.477	48.990

NO	KECAMATAN	LAKILAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
13	Karangdowo	22.459	22.797	45.256
14	Juwiring	30.515	30.640	61.155
15	Wonosari	32.316	32.454	64.770
16	Delanggu	21.756	21.905	43.661
17	Polanharjo	21.238	21.731	42.969
18	Karanganom	23.689	23.913	47.602
19	Tulung	27.654	27.765	55.419
20	Jatinom	31.204	31.108	62.312
21	Kemalang	19.984	20.080	40.064
22	Ngawen	23.769	23.599	47.368
23	Kalikotes	19.074	19.042	38.116
24	Klaten Utara	24.483	24.782	49.265
25	Klaten Tengah	20.877	21.757	42.634
26	Klaten Selatan	22.643	23.044	45.687
	TOTAL	**659.481**	**664.128**	**1.323.609**

3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2019 berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Usia Tahun 2019

No.	USIA	JUMLAH (Jiwa)
1	0 – 4 tahun	82.978
2	5 - 9 tahun	93.370
3	10 - 14 tahun	96.118
4	15 - 19 tahun	95.183
5	20 - 24 tahun	92.450
6	25 – 29 tahun	90.600
7	30 – 34 tahun	91.131
8	35 – 39 tahun	105.159
9	40 – 44 tahun	99.556
10	45 – 49 tahun	92.870
11	50 – 54 tahun	92.154
12	55 – 59 tahun	78.887
13	60 – 64 tahun	65.589
14	65 – 69 tahun	50.076
15	70 - 74 tahun	34.149
16	75 tahun ke atas	63.339
Jumlah		**1.323.609**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020

4) Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

Komposisi penduduk Kabupaten Klaten dilihat dari jenis pekerjaannya sangat beragam, tabel 1.6 berikut menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2019 berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel : 1.6
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten
berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	227.670
2	Mengurus Rumah Tangga	133.677
3	Pelajar/Mahasiswa	244.965
4	Pensiunan	15.468
5	Pegawai Negeri Sipil	18.120
6	Tentara Nasional Indonesia	1.704
7	Kepolisian RI	1.674
8	Perdagangan	12.461
9	Petani/Pekebun	25.389
10	Peternak	757
11	Nelayan/Perikanan	33
12	Industri	466
13	Konstruksi	292
14	Transportasi	507
15	Karyawan Swasta	121.272
16	Karyawan BUMN	4.747
17	Karyawan BUMD	506
18	Karyawan Honorer	4.027
19	Buruh Harian Lepas	353.401
20	Buruh Tani/Perkebunan	35.143
21	Buruh Nelayan/Perikanan	111
22	Buruh Peternakan	205
23	Pembantu Rumah Tangga	464
24	Tukang Cukur	96
25	Tukang Listrik	105
26	Tukang Batu	2.259
27	Tukang Kayu	4.069
28	Tukang Sol Sepatu	46
29	Tukang Las/Pandai Besi	375
30	Tukang Jahit	2.632
31	Tukang Gigi	21
32	Penata Rias	179
33	Penata Busana	28
34	Penata Rambut	66
35	Mekanik	785
36	Seniman	305
37	Tabib	21
38	Paraji	24

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
39	Perancang Busana	18
40	Penterjemah	9
41	Imam Mesjid	15
42	Pendeta	124
43	Pastor	36
44	Wartawan	80
45	Ustadz/Mubaligh	66
46	Juru Masak	57
47	Promotor Acara	1
48	Anggota DPR-RI	0
49	Anggota DPD	1
50	Anggota BPK	2
54	Presiden	0
58	Wakil Presiden	0
62	Anggota Mahkamah Konstitusi	0
63	Anggota Kabinet/Kementerian	1
64	Duta Besar	0
65	Gubernur	0
66	Wakil Gubernur	0
67	Bupati	1
68	Wakil Bupati	0
69	Walikota	0
70	Wakil Walikota	0
71	Anggota DPRD Provinsi	3
72	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	46
73	Dosen	710
74	Guru	10.462
75	Pilot	1
76	Pengacara	56
77	Notaris	56
78	Arsitek	34
79	Akuntan	13
80	Konsultan	79
81	Dokter	515
82	Bidan	689
83	Perawat	1.473
84	Apoteker	166
85	Psikiater/Psikolog	9
86	Penyiar Televisi	1
87	Penyiar Radio	5

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
88	Pelaut	416
89	Peneliti	18
90	Sopir	2.847
91	Pialang	7
92	Paranormal	12
93	Pedagang	22.380
94	Perangkat Desa	2.576
95	Kepala Desa	382
96	Biarawati	28
97	Wiraswasta	54.726
98	Lainnya	11.418
JUMLAH		**1.323.609**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020

5) Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, penduduk Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.7

Tabel : 1.7
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak/Belum Sekolah	233.194
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	141.815
3.	Tamat SD/Sederajat	290.845
4.	SLTP/Sederajat	210.553
5.	SLTA//Sederajat	354.714
6.	Diploma I/II	8.247
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	24.792
8.	Diploma IV/Strata I	56.276
9.	Strata II	3.006
10.	Strata III	167
JUMLAH		**1.323.609**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020

E. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Potensi Pertanian

Potensi kawasan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 28.949 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar berada di seluruh Kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:

A. Potensi Kawasan peruntukan hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) hektar meliputi kecamatan:Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, dan Wonosari.

B. Potensi Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih1.080 (seribu delapan puluh) hektar terdiri atas komoditas:
   a. Kelapa deres meliputi Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Wedi.
   b. Kapuk meliputi Kecamatan Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan Tulung.
   c. Kopi meliputi Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Tulung dan Manisrenggo.
   d. Tembakau rajangan dan asepan meliputi Kecamatan Bayat, Ceper, Gantiwarno, Jatinom,Jogonalan, dan Kemalang.
   e. Tembakau Virginia meliputi Kecamatan Pedan dan Trucuk.
   f. Tembakau Vorsternland meliputi Kecamatan Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Utara, dan Wedi.
   g. Cengkeh meliputi Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo dan Tulung.
   h. Tebu meliputi Kecamatan Bayat, Ceper, Pedan, Jatinom, Gantiwarno, Jogonalan dan Prambanan.

C. Potensi Pengembangan kawasan luasan kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Wedi, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Prambanan dan Tulung.

D. Potensi Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) hektar ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).

2) **Potensi Perikanan**

Potensi Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

A. Potensi Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap.
   Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap, yang tersebar di seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.

B. Potensi Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya.
   Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:
   - Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat;
   - Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan dan Tulung.

C. Potensi Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem kewilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditasi ikan nila meliputi Kecamatan Karanganom, Polanharjo, Tulung , Ngawen, Klaten Selatan dan Kebonarum.

3) **Potensi Wisata**

Potensi wisata yang ada di Kabupaten Klaten sebenarnya sangat beragam. yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata yang bisa menarik para wisatawan, lokal, regional maupun manca negara. Adapun potensi wisata yang ada di Kabupaten Klaten yang sangat beragam dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain :

A. Potensi pariwisata budaya meliputi;
   a) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan.
   b) Candi Merak berada di Kecamatan Karangnongko;
   c) Museum Gula Jawa Tengah berada di Kecamatan Jogonalan.
   d) Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yaqowiyu berada di Kecamatan Jatinom;
   e) Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Kecamatan Bayat.
   f) Makam Ki Ageng Ronggowarsito berada di Kecamatan Trucuk.
   g) Makam Ki Ageng Perwito berada di Kecamatan Wonosari.
   h) Keunikan lokal desa wisata meliputi desa :
      1. Desa Wisata Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan;
      2. Desa Wisata Melikan Kecamatan Wedi;
      3. Desa Wisata Duwet Kecamatan Ngawen;

4. Desa Wisata Soran Kecamatan Ngawen;
5. Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo;
6. Desa Wisata Plawikan Kecamatan Jogonalan;
7. Desa Wisata Jimbung Kecamatan Kalikotes;
8. Desa Wisata Krakitan Kecamatan Bayat;
9. Desa Wisata Pokak Kecamatan Ceper; dan
10. Desa Wisata lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

B. Potensi pariwisata alam meliputi:
   a) Deles Indah berada di Kecamatan Kemalang;
   b) Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul berada di Kecamatan Bayat; dan
   c) Kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat.

C. Potensi pariwisata buatan.
   1. Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan Bayat;
   2. Obyek Wisata Mata Air Cokro (OMAC), Pemandian Lumban Tirto, Umbul Pelem dan Pemancingan Janti berada di Kecamatan Tulung;
   3. Pemandian Umbul Ponggok dan Umbul Manten berada di Kecamatan Polanharjo;
   4. Pemandian Jolotundo berada di Kecamatan Karanganom; dan
   5. Pemandian Tirtomulyono dan Pemandian Tirtomulyani berada di Kecamatan Kebonarum.

4) **Potensi Industri**

Industri merupakan salah satu pendukung perekonomian di suatu daerah, dengan banyaknya industri maka perekonomian di suatu daerah akan semakin meningkat. Sehingga sektor industri ini perlu didorong agar berkembang yang mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Di Kabupaten sektor industri sebagai basis ekonomi untuk sektor industri manufaktur berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang terbesar berada di Kecamatan Ceper, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Wedi, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Jogonalan.

Untuk industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Kecamatan Polanharjo dan Kecamatan Karanganom. Industri kertas dan percetakan terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. Industri kayu dan *furniture* terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring dan Klaten Utara.

Kawasan potensial sentra industri logam terdapat di Kecamatan Ceper, Polanharjo, Karanganom, Delanggu, Wonosari dan Jatinom.

Sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan: Prambanan, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen, Gantiwarno, Trucuk, Jogonalan, Karangnongko, Kemalang, Tulung, Bayat, Pedan, Karangdowo, Wonosari, Jatinom Klaten Utara dan Ceper. Sentra industri gerabah terdapat di Kecamatan : Wedi, Bayat, Wonosari, Klaten Tengah, Pedan, dan Kalikotes.

Industri Lurik, merupakan salah satu industri yang beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Produk lurik ternyata untuk trend mode saat ini sudah mulai digemari tidak hanya oleh warga Klaten saja, namun lurik juga sudah mulai digemari oleh masyarakat di luar Kabupaten Klaten. Kecamatan Pedan, Bayat, Trucuk, Juwiring, Karangdowo dan Cawas merupakan salah satu sentra industri lurik ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) ini, sehingga sering terkenal dengan sebutan lurik Pedan, dan diharapkan di tahun-tahun mendatang lurik bisa menjadi salah satu icon dari Kabupaten Klaten sebagai salah satu ciri khasnya.

Sentra industri mebel terdapat di Kecamatan: Klaten Utara, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen, Ceper dan Kalikotes. Adapun sentra industri konveksi terdapat di Kecamatan Jogonalan, Wedi, Klaten Selatan, Pedan, Ngawen, Ceper, Karangdowo, dan Delanggu.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan setiap sektornya. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2019 digunakan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Klaten tahun 2019 sebesar 5,57 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dengan pertumbuhan 5,47 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi (%) di Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2019

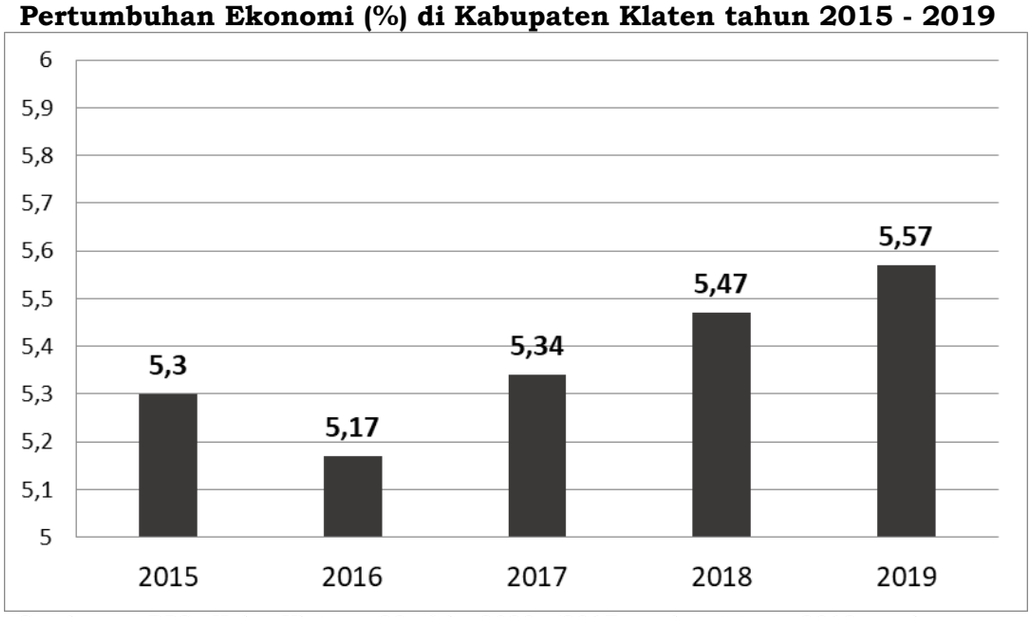

Sumber : BPS Kab. Klaten, 28 feb 2020 (2017=angka tetap, 2018=angka sementara, 2019=angka sangat sementara)

PDRB Klaten terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 39,79 triliun rupiah, naik sekitar 7,6 persen dari tahun 2018 yang sebesar 36,99 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 tahun 2019 sebesar 27,83 triliun rupiah, naik sekitar 5,57 persen dari tahun 2018 yang sebesar 26,36 triliun rupiah. PDRB Klaten dari tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.2
Perkembangan PDRB (dalam triliun rupiah) di Kab. Klaten

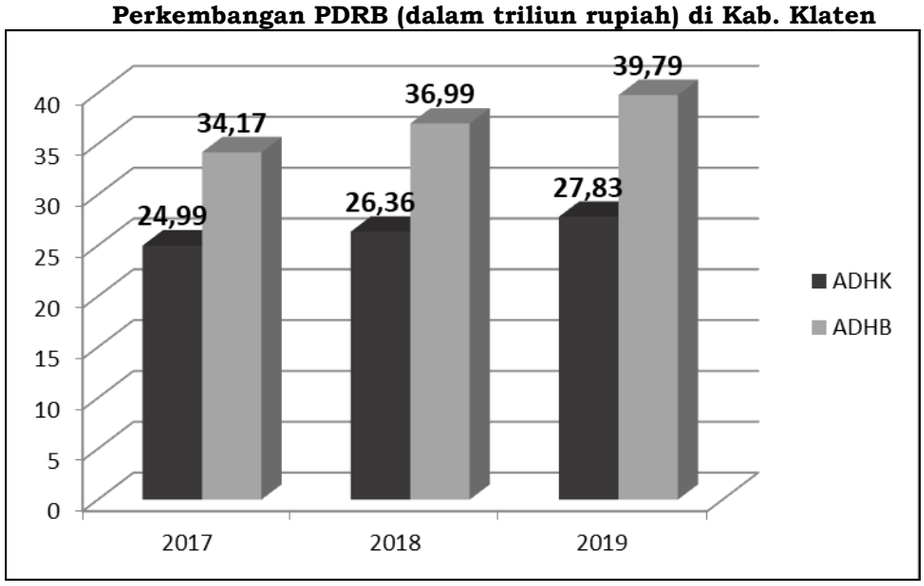

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 28 februari 2020
2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara

PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah) dapat dilihat dalam tabel 1.8

Tabel 1.8
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.845.097,06	2.908.070,61	2.943.761,34
Pertambangan dan Penggalian	664.166,20	685.313,55	706.900,93
Industri Pengolahan	8.504.714,04	9.013.718,21	9.601.710,72
Pengadaan Listrik dan Gas	44.249,82	47.094,12	49.644,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.826,81	13.532,60	14.308,02
Konstruksi	1.531.575,76	1.635.233,26	1.745.775,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.531.078,43	4.719.954,10	4.923.412,16
Transportasi dan Pergudangan	597.101,45	625.692,51	656.720,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	944.707,06	1.018.074,62	1.098.344,48
Informasi dan Komunikasi	1.026.807,26	1.147.054,83	1.282.866,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	857.588,05	887.591,04	915.313,03
Real Estate	382.324,67	401.354,47	420.057,59
Jasa Perusahaan	83.734,52	90.076,27	96.931,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	610.862,34	631.265,14	641.455,60
Jasa Pendidikan	1.607.474,21	1.720.401,03	1.842.721,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	282.328,51	307.894,68	336.313,36
Jasa lainnya	466.467,08	508.328,89	553.417,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	24.993.103,27	26.360.649,93	27.829.653,91

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 28 FEBRUARI 2020
2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara

Adapun PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.9
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.880.677,98	4.085.464,24	4.206.652,77
Pertambangan dan Penggalian	1.112.144,57	1.177.376,22	1.245.553,58
Industri Pengolahan	12.446.837,51	13.611.869,50	14.726.080,24
Pengadaan Listrik dan Gas	50.784,96	55.741,58	58.861,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.143,63	14.964,95	16.371,66
Konstruksi	2.094.601,40	2.333.361,55	2.552.697,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.631.766,56	6.000.014,15	6.430.015,48
Transportasi dan Pergudangan	690.596,13	729.681,82	779.971,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.180.067,24	1.284.456,54	1.404.195,46
Informasi dan Komunikasi	1.119.938,75	1.252.092,63	1.419.789,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.175.828,75	1.259.961,03	1.321.513,91
Real Estate	444.310,49	477.618,78	509.514,95
Jasa Perusahaan	115.088,85	126.797,73	139.716,72
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	844.376,28	882.410,22	908.656,78
Jasa Pendidikan	2.379.643,26	2.606.214,15	2.881.198,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	409.870,96	452.676,88	495.228,51
Jasa lainnya	584.142,53	642.768,49	703.188,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**34.174.819,85**	**36.993.470,46**	**39.799.207,15**

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 28 FEBRUARI 2020
2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara

F. Indikator Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, IPM Klaten mencapai 75,29, meningkat 0,5 poin dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 74,79.

Selama periode 2018 - 2019, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 76,68 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2018. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 13,2 tahun, atau meningkat 0,07 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,31 tahun, atau meningkat 0,07 tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat mencapai 12,074 juta rupiah pada tahun 2019, meningkat Rp 336 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten pada tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel 1.10

Tabel 1.10
Kondisi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018-2019
di Kabupaten Klaten

UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran (Rp. 000)		IPM		PENINGKATAN
2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018 - 2019**
76,67	76,68	13,13	13,2	8,24	8,31	11.738	12.074	74,79	75,29	**0,5**

KET
UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

b. Angka Kemiskinan

Kondisi umum kemiskinan Kabupaten Klaten merupakan gambaran mengenai fakta dan permasalahan yang ada pada kondisi capaian dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, yaitu persentase penduduk miskin (Po) dan jumlah penduduk miskin.

1. Persentase Penduduk Miskin

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.3

Gambar 1.3
Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten (dalam %)
Tahun 2015 – 2019

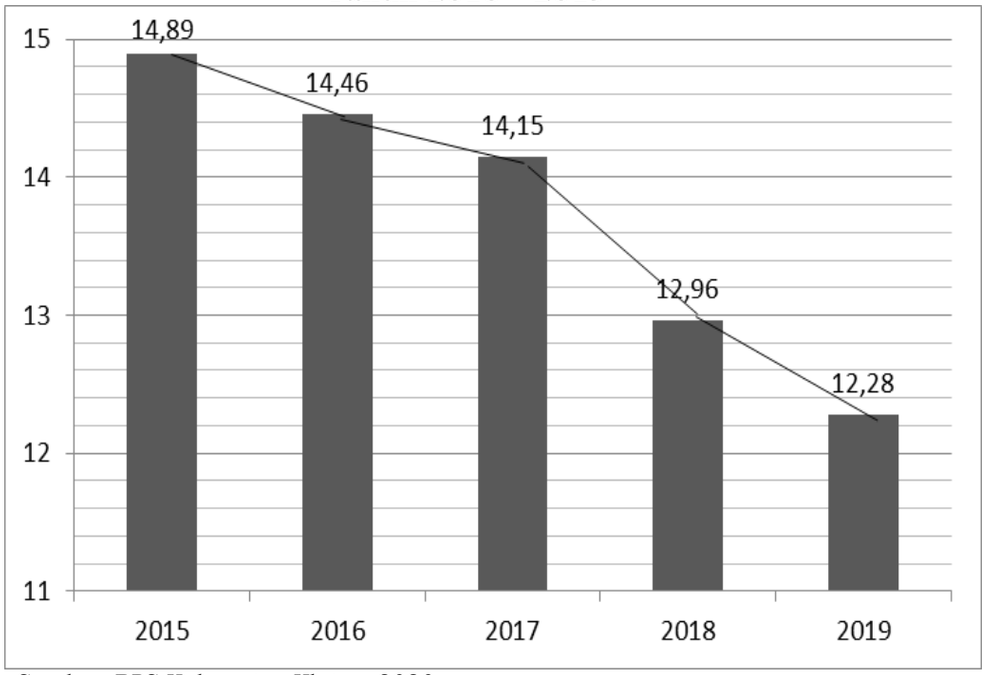

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2020

Pada Gambar diatas ditunjukkan posisi relatif Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 12,28%. Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten mengalami penurunan (kinerja positif), dari sebesar 12,96% pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,28% pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,68% selama 1 (satu) tahun. Jika dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari 14,89% di tahun 2015 menjadi 12,28% di tahun 2019 atau turun sebesar 2,61%.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif). Dalam rentang waktu 2015-2019, dari sebanyak 172.300 jiwa pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebanyak 144.140 jiwa pada tahun 2019 atau turun sebanyak 28.160 jiwa. Sementara untuk 1 (satu) tahun terakhir jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten juga mengalami penurunan dari 151.730 jiwa pada tahun 2018 menjadi 144.140 jiwa pada tahun 2019 atau turun sebesar 7.590 jiwa selama 1 (satu) tahun terakhir. Untuk melihat perkembangan antar waktu jumlah penduduk Miskin pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dalam Gambar 1.4

Gambar 1.4
Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Klaten tahun 2015 – 2019

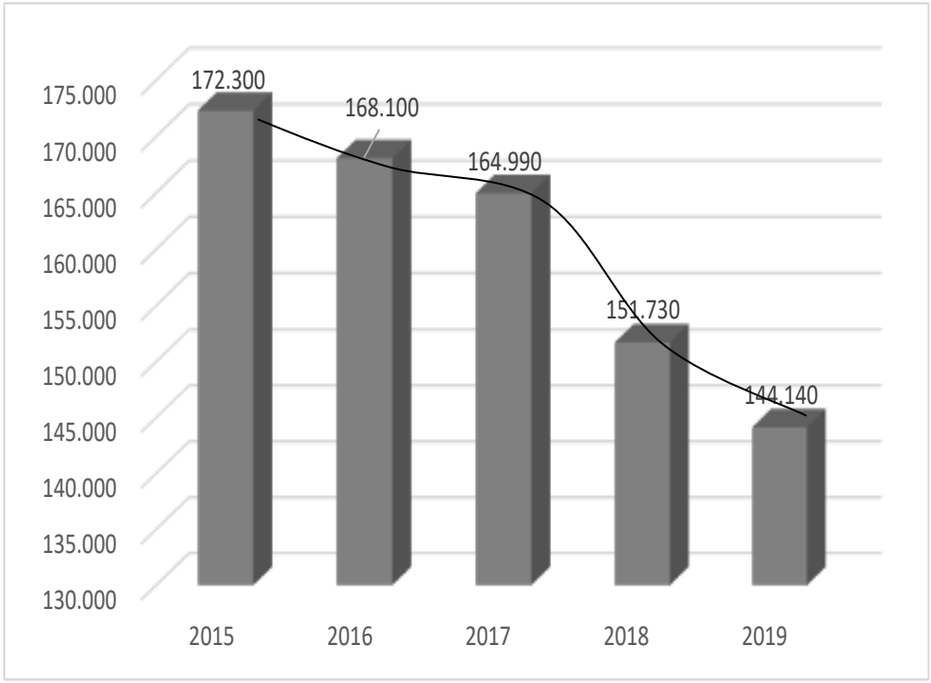

Sumber : BPS Kab. Klaten 2020

c. Angka Pengangguran

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten KLaten pada tahun 2019 sebesar 3,55% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 sebesar 68,79. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada tahun 2015 – 2019 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam gambar 1.5

Gambar 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
di Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2019

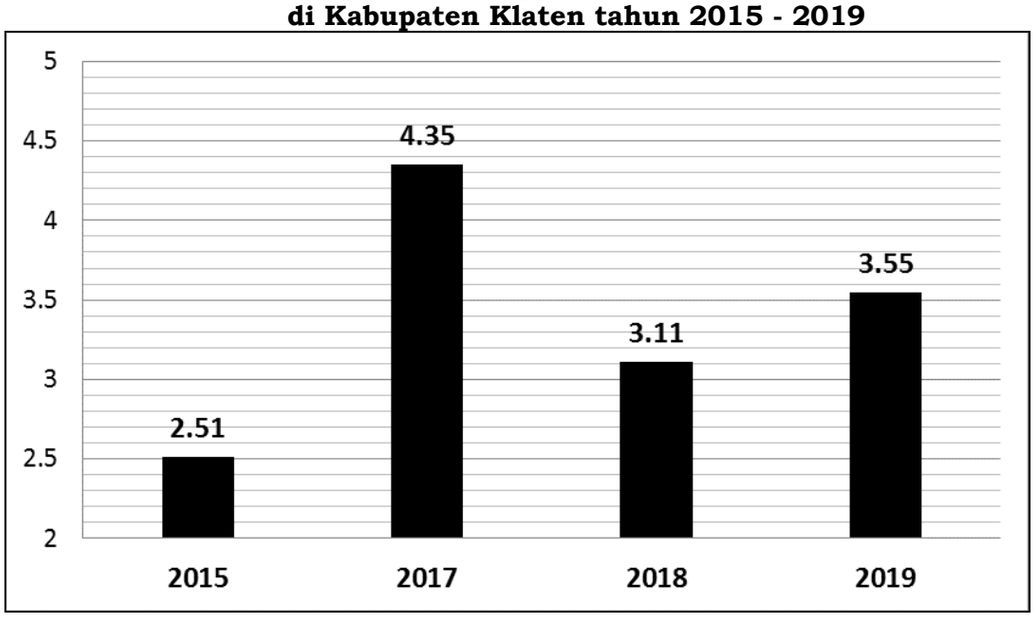

Sumber : BPS Prov Jawa Tengah 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
di Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2019

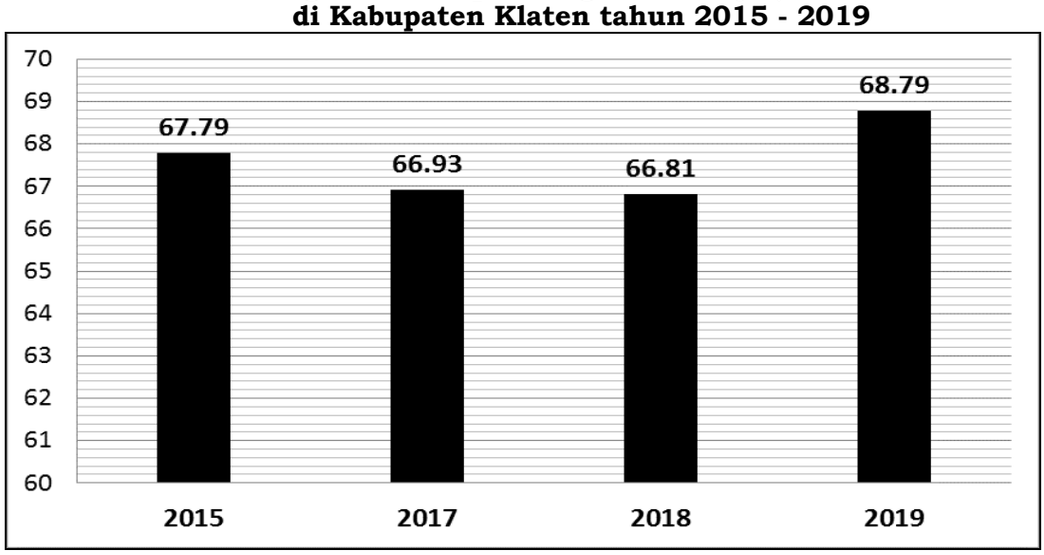

Sumber : BPS Prov Jawa Tengah 2020

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan setiap sektornya. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2019 digunakan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Klaten tahun 2019 sebesar 5,57 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dengan pertumbuhan 5,47 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam gambar 1.6

Gambar 1.6
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018

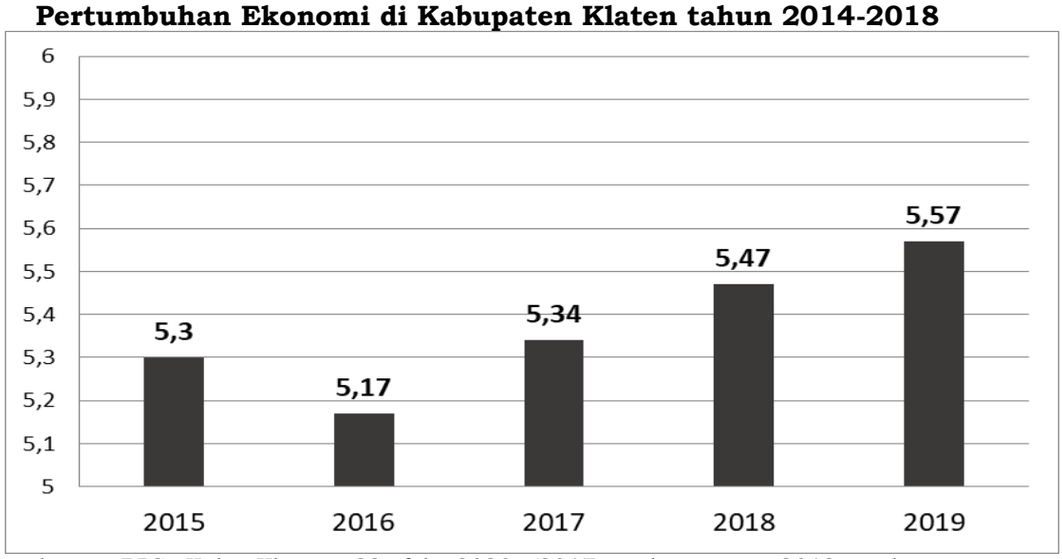

Sumber : BPS Kab. Klaten, 28 feb 2020 (2017=angka tetap, 2018=angka sementara, 2019=angka sangat sementara)

PDRB Klaten terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 39,79 triliun rupiah, naik sekitar 7,6 persen dari tahun 2018 yang sebesar 36,99 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 tahun 2019 sebesar 27,83 triliun rupiah, naik sekitar 5,57 persen dari

tahun 2018 yang sebesar 26,36 triliun rupiah. PDRB Klaten dari tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.7
Perkembangan PDRB (dalam triliun rupiah) di Kab. Klaten

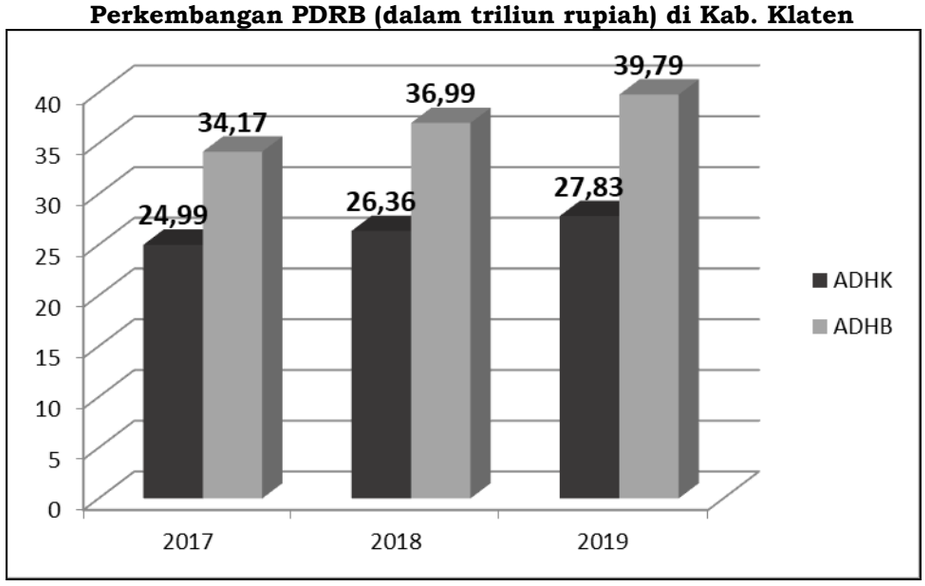

Sumber : BPS Kab. Klaten, 28 feb 2020 (2017=angka tetap, 2018=angka sementara, 2019=angka sangat sementara)

PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah) dapat dilihat dalam tabel 1.11

Tabel 1.11
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.845.097,06	2.908.070,61	2.943.761,34
Pertambangan dan Penggalian	664.166,20	685.313,55	706.900,93
Industri Pengolahan	8.504.714,04	9.013.718,21	9.601.710,72
Pengadaan Listrik dan Gas	44.249,82	47.094,12	49.644,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.826,81	13.532,60	14.308,02
Konstruksi	1.531.575,76	1.635.233,26	1.745.775,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.531.078,43	4.719.954,10	4.923.412,16
Transportasi dan Pergudangan	597.101,45	625.692,51	656.720,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	944.707,06	1.018.074,62	1.098.344,48
Informasi dan Komunikasi	1.026.807,26	1.147.054,83	1.282.866,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	857.588,05	887.591,04	915.313,03
Real Estate	382.324,67	401.354,47	420.057,59
Jasa Perusahaan	83.734,52	90.076,27	96.931,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	610.862,34	631.265,14	641.455,60

Lapangan Usaha	2017	2018	2019
Jasa Pendidikan	**1.607.474,21**	**1.720.401,03**	**1.842.721,54**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	**282.328,51**	**307.894,68**	**336.313,36**
Jasa lainnya	**466.467,08**	**508.328,89**	**553.417,66**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**24.993.103,27**	**26.360.649,93**	**27.829.653,91**

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 28 FEBRUARI 2020
2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara

Adapun PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2018 (juta Rupiah) dapat dilihat dalam tabel 1.12

Tabel 1.12
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.880.677,98	4.085.464,24	4.206.652,77
Pertambangan dan Penggalian	1.112.144,57	1.177.376,22	1.245.553,58
Industri Pengolahan	12.446.837,51	13.611.869,50	14.726.080,24
Pengadaan Listrik dan Gas	50.784,96	55.741,58	58.861,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.143,63	14.964,95	16.371,66
Konstruksi	2.094.601,40	2.333.361,55	2.552.697,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.631.766,56	6.000.014,15	6.430.015,48
Transportasi dan Pergudangan	690.596,13	729.681,82	779.971,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.180.067,24	1.284.456,54	1.404.195,46
Informasi dan Komunikasi	1.119.938,75	1.252.092,63	1.419.789,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.175.828,75	1.259.961,03	1.321.513,91
Real Estate	444.310,49	477.618,78	509.514,95
Jasa Perusahaan	115.088,85	126.797,73	139.716,72
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	844.376,28	882.410,22	908.656,78
Jasa Pendidikan	2.379.643,26	2.606.214,15	2.881.198,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	409.870,96	452.676,88	495.228,51
Jasa lainnya	584.142,53	642.768,49	703.188,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**34.174.819,85**	**36.993.470,46**	**39.799.207,15**

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 28 FEBRUARI 2020
2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara

e. Pendapatan Per Kapita

Perhitungan Pendapatan Per Kapita tidak dilaksanakan oleh BPS Provinsi Jawa Tengan maupun BPS Klaten, sehingga data Pendapatan Per Kapita menggunakan pendekatan PDRB Per Kapita dan pengeluaran Per Kapita. Pada tahun 2019 PDRB perkapita di Klaten sebesar 33,87 juta rupiah naik sekitar 7,25 persen dari tahun 2018 yang sebesar 31,58 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan tiap tahun, dari 22,5 juta rupiah di tahun 2018 menjadi 23,68 juta rupiah di tahun 2019 atau meningkat sebesar 5,24 persen. Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Klaten dari tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam gambar 1.8

Gambar 1.8
PDRB Perkapita Klaten, 2017 – 2019 (dalam juta rupiah)

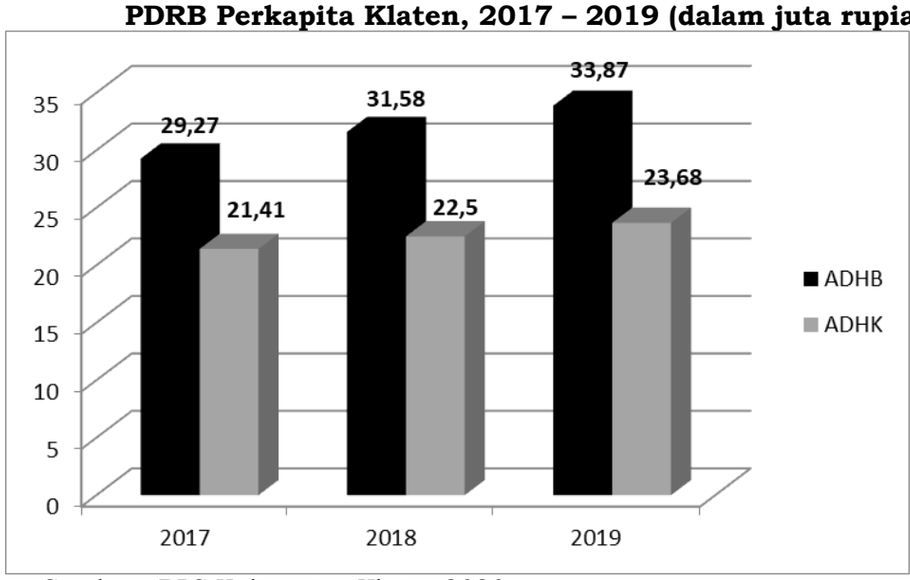

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2020
2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara

Adapun Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam gambar 1.9

Gambar 1.9
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP) dalam juta rupiah
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 – 2019

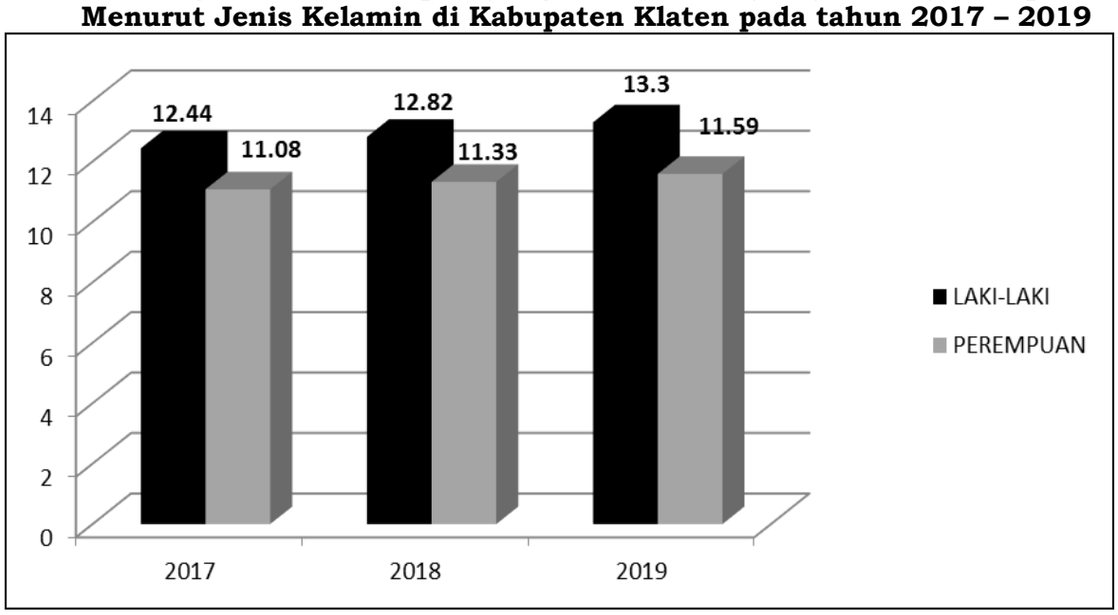

Sumber : BPS Prov Jawa Tengah tahun 2020

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Penghitungan Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) mengunakan pendekatan ketimpangan Pengeluaran. Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,361. Angka ini naik sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,357, dan turun jika dibandingkan gini ratio maret 2018 yang sebesar 0,378. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,383, naik dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,377 dan turun jika dibandingkan gini ratio Perkotaan pada Maret 2018 Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,318, naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 dan turun jika dibandingkan gini ratio bulan maret 2018 yang sebesar 0,400. Kondisi Gini Ratio selama tahun 2017 – 2019 di Jawa Tengah dan Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 1.13

Tabel 1.13
Gini Ratio di Jawa Tengah dan Indonesia tahun 2017 - 2019

GINI RATIO	PERKOTAAN				
	2017		2018		2019
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)
JAWA TENGAH	0.386	0.383	0.400	0.377	0.383
INDONESIA	0.407	0.404	0.401	0.391	0.392
GINI RATIO	**PEDESAAN**				
	2017		2018		2019
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)
JAWA TENGAH	0.327	0.323	0.336	0.315	0.318
INDONESIA	0.320	0.320	0.324	0.319	0.317
GINI RATIO		**PERKOTAAN + PEDESAAN**			
	2017		2018		2019
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)
JAWA TENGAH	0.365	0.365	0.378	0.357	0.361
INDONESIA	0.393	0.391	0.389	0.384	0.382

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah**: "MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING"**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. ***Klaten***, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. ***Maju,*** yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. ***Mandiri,*** yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri,tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. ***Berdaya saing,*** yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaandan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

B. Srategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan dikaloborasikan dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, program lintas OPD dan program kewilayahan.

Untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan Kepala Daerah, diuraikan di dalam tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pelaksanannya. Masing-masing misi ketercapaiannya diterjemahkan kedalam berbagai tujuan yang dirinci kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai ditetapkan strategi pencapaiannya. Secara keseluruhan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian misi tertuang di dalam tabel 2.1 dan Arah Kebijakan Daerah untuk mencapai Misi tertuang dalam tabel 2.2.

TABEL 2.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

KABUPATEN KLATEN

VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
I.	**Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya**		
	1 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wajib belajar sembilan tahun dengan memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai kualitas pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sesuai Standar Nasional Pendidikan
	2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai syarat Standar Pelayanan Minimal untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita yang akan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
		b. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	
	3. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKSMeningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	a. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial
	4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	a. Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE sehingga memperkecil akngka kelahiran dan peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB)

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	5 Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Memberikan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana olahraga bagi pemuda untuk peningkatan prestasi pemuda
		b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Melibatkan masyarakat didalam penyelenggaraan event-event seni dan budaya di daerah serta pelestarian benda, situs dan cagar budaya
	6. Meningkatkan minat baca masyarakat	a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Mengembangkan budaya baca bagi masyarakat melalui pembinaan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan
II	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**		
	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Melakukan pembinaan kompetensi ASN, menegakan kedisiplinan, dan pemberian kompensasi
		b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan inventarisasi aset daerah.
		c. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Menjamin fasilitasi lembaga legislasi daerah agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal
		d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
	2. Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	a. Meningkatnya tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penataan dan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan.

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	3. Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan mendorong pelaksanaan tata kelola administrasi desa yang sesuai ketentuan
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi di pemerintahan kabupaten Klaten
		b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, memperluas kerjasama, memastikan batas wilayah, pelaksanaan pemerintah kecamatan yang berkualitas, dan memperluas cakupan layanan telekomunikasi, serta penyediaan data statistik daerah
		c. Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Melakukan penataan pengelolaan pembentukan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan yang direncanakan
		d. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi atau kesenjangan antara target dan relaisasi pembangunan
		e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Melakukan pelaksanaan penyediaan barang dan jasa secara elektronik
		f. Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Memberikan pesan dan informasi kepala daerah yang akurat ke masyarakat melalui media dan fasilitasi keprotokolan kepala daerah
		g. Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Melakukan koordinasi pelaksanaan bidang sumberdaya alam, pengembangan ekonomi dan usaha daerah
		h. Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
III.	**Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal**		
	1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Menjamin ketersediaan bahan pangan dan perbaikan mutu konsumsi pangan
			Melakukan pembinaan dan fasilitasi didalam proses produksi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
			Meningkatkan pemantauan bidang pertanian
	2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat pedesaan didalam menerapkan teknologi tepat guna dan fasilitasi terbentuknya BUMDes
	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan	Melakukan pengembangan kemitraan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran destinasi wisata serta meningkatkan daya tarik obyek wisata
		b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pengembangan keunggulan kompetitif dan satuan pendukung sektor usaha kecil menengah (UKM), pembinaan kelembagaan UKM dan pedagang kaki lima, serta memberikan perlindungan konsumen
		c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Mendorong tumbuhnya inovator-inovator di masyarakat dan penerapan hasil litbang/inovasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah
		d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Peningkatan promosi potensi usaha di kabupaten Klaten untuk meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja serta fasilitasi dan informasi kebutuhan tenaga kerja
		b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Penyelesaian terhadap sengketa dan permasalahan antara tenaga kerja dan pengusaha
	5. Meningkatkan daya saing produk industri daerah	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Mengembangkan kemampuan teknologi industri bagi industri kecil menengah untuk mendapatkan ISO dan SNI serta standar produk manufaktur dan SVLK untuk IKM meubel
IV.	**Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat**		
	1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan, jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah serta peningkatan pengelolaan persampahan
		b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai dan kelengkapan keselamatan jalan di ruas jalan kabupaten Klaten
		c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi, penerangan jalan bagi perumahan dan permukiman serta meningkatkan pembangunan rumah tidak layak huni
V.	**Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah**		
	1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Melakukan perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan sesuai konsep tata ruang serta memperbaiki pengelolaan ruang terbuka hijau

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Memperluas cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh investor dengan melibatkan masyarakat terdampak dan memperluas cakupan pemantauan kualitas udara dan air
	2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Melakukan fasilitasi dan pembinaan untuk menjadi desa tangguh bencana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan yang terlatih tanggap bencana
VI.	**Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian**		
	1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Memberikan wawasan kebangsaan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan sosial
	2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Memberikan fasilitasi kedesa-desa dibidang sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan agar lebih aktif menjaga pelestarian adat dan budaya
	3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Memberikan rasa ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan memperluas cakupan perlindungan, pelayanan bencana kebakaran, dan mempersingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran, serta penegakan perda dan perkada konsistn
VII.	**Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak**		
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	a. Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Memberikan pembinaan Kelembagaan Pengarusatamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) agar lebih kuat, mendorong peran serta perempuan didalam pembangunan dan memberikan perlindungan dan hak terhadap perempuan dan anak

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VIII.	**Meningkatkan kapasitas pelayanan publik**		
	1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Memberikan pelayanan yang selalu ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang layanan perhubungan, perijinan investasi, dan administrasi kependudukan
		b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	
		c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	a. Pengembangan ketransmigrasian	Memberikan pemahaman dan pengertian tentang ketransmigrasian serta melakukan pengembangan lokasi atau wilayah penempatan transmigrasi

Tabel 2.2
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KLATEN

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
MISI - 1						
1.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun
	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik sekolah dasar	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik sekolah dasar	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik SMP	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik PAUD	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik PAUD
2.	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa
		Penyusunan Perbub Kesehatan Ibu dan anak	Sosialisasi Perbub Kesehatan ibu dan anak	Monitoring dan evaluasi Penerapan Perbub KIA	Monitoring dan evaluasi Penerapan Perbub KIA	Monitoring dan evaluasi Penerapan Perbub KIA
	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar
		Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur
		Fasilitasi pembentukan Pos pembinaan Terpadu Penyakit tidak menular (Posbindu PTM)	Optimasilasasi Pelaksanaan Posbindu	Optimasilasasi Pelaksanaan Posbindu	Optimasilasasi Pelaksanaan Posbindu	Optimasilasasi Pelaksanaan Posbindu

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia
	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita
	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita
	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita
	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader
	Penyusunan Perda HIV	Sosialisasi Regulasi/Perda HIV	Penerapan Perda HIV	Penerapan Perda HIV	Penerapan Perda HIV	Penerapan Perda HIV
3.	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
4.	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Meningkatkan dan mengembangkan nilai–nilai luhur berdasar pada kearifan lokal	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah
	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional
	3. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya, situs dan benda cagar budaya	2. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya, situs dan benda cagar budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya
	Sinergitas program kegiatan olahraga dengan dinas terkait dan organisasi keolahragaan	Inventarisasi dan pemetaan cabang olahraga potensial	Pembinaan cabang olahraga potensial	Pembibitan dan pembinaan atlet usia dini	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif
	Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja	Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah faham radikalisme	Peningkatan prestasi pemuda	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengembangkan kepemimpian dan kepeloporan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengembangkan kepemimpian dan kepeloporan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengembangkan kepemimpian dan kepeloporan
5.	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa
	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan
MISI - 2						
1.	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial
	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional
	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis
	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS
			Peningkatan Kompetensi Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan
	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya
	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat
	Peningkatan kelancaran penjaringan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjaringan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjaringan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjaringan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjaringan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjaringan gaji PNS
	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
2.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah
	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
3.	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah
4.	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi
	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah
	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah
	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa
5.	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa
	-	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa
6.	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
7.	Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel
	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah
	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
8.	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan/Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan/Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan/Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
9.	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air
	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan
10.	Menyusun kebijakan terkait dengan kerukunan beragama, meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Menyusun kebijakan terkait dengan kerukunan beragama, meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
11.	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
	Penguatan terhadap pengawasan internal sinergi pemeriksanaan dan pengawasan intern	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal
MISI - 3						
1.	Meningkatkan ketersediaan energi dan protein per kapita	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah
	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas
	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular
2.	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Fasilitasi pembentukan LED BUMDes	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LED BUMDes	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LED BUMDes dalam pengklasifikasian	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LEM, LED BUMDes dalam pengklasifikasian	Fasilitasi pembinaan LEM, LED BUMDes dalam pengklasifikasian	Fasilitasi pembinaan LEM, LED BUMDes dalam pengklasifikasian
	Fasilitasi kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan
3.	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan
	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan
4.	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal
	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan
	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat
5.	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang aplicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang aplicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang aplicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang aplicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang aplicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang aplicable di masyarakat

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
6.	Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal	Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga atas pengimplementasian Rencana Umum Penanaman Penanaman Modal	Meriview Rencana Umum Penanaman Modal	Meningkatkan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum dan kepastian lahan usaha	Memantapkan peningkatan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum dan kepastian lahan usaha	Memantapkan peningkatan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum dan kepastian lahan usaha
	Melaksanaan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Meningkatkan fungsi Koordinasi antar lembaga atas pengimplementasian Rencana Umum Penanaman Penanaman Modal	Mengembangkan strategi promosi yang terarah,fokus, dan inovatif	Meningkatkan kegiatan promosi investasi berskala nasional	Meningkatkan kegiatan promosi investasi berskala nasional
		Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga dalam rangka pengembangan potensi daerah	Menyusun profil potensi dan peluang investasi			
7.	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja
	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja
	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
8.	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri
MISI - 4						
1.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah
	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten
3.	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
4.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat
5.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah
6.	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat
MISI - 5						
1.	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan
2.	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri
	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil
	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat
	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3
	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan
	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan
	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten
	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim
				Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)	Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)	Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat
	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH
	Peningkatan peran serta lembaga/sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan
	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat
3.	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana
	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana
MISI - 6						
1.	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Delanggu	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di wilayah rentan permasalahan sosial eks Tubup Kota	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Jatinom	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Pedan	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Gondang Winangun	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Gondang Winangun
2.	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik
3.	Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM
	-	Penyusunan Regulasi, sosialisasi dan pembentukan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pembinaan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pendampingan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pendampingan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pendampingan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK
	Penguatan kapasitas posyandu dan KPMD	Penguatan kapasitas posyandu dan KPMD	Penguatan kapasitas posyandu, KPMD dan LK Lainnya	Penguatan kapasitas posyandu, LKMD, KPMD dan LK lainnya	Penguatan kapasitas posyandu, LKMD, KPMD dan LK lainnya	Penguatan kapasitas posyandu, LKMD, KPMD dan LK lainnya
4.	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral
5.	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai
	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat
MISI - 7						
1.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan

No	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
2.	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak

NO	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	MISI -8					
1.	Menyusun Standar Pelayanan	Penyempurnaan Standar Pelayanan	Mengembangkan pelayanan perizinan on line	Pemantapan Pelayanan perizinan On Line	Pemantapan Pelayanan perizinan On Line	Pemantapan Pelayanan perizinan On Line
2.	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan
	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal
	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)

NO	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan
3.	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik
4.	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi

C. Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan pentahapan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Arah kebijakan yang ditempuh mempertimbangkan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan tingkat Provinsi dan Pusat yang kemudian dirumuskan kedalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019, yaitu :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran melalui upaya :
   a. Pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan) melalui pemberian beasiswa miskin, pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, penanganan perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan dan peningkatan akses jamban keluarga yang layak, penyediaan layanan akses listrik bagi keluarga kurang mampu;
   b. Jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rumah tangga miskin;
   c. Pemberdayaan ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM;
   d. Penumbuhkembangan wirausaha baru dalam rangka menciptakan lapangan kerja mandiri berbasis usaha kecil menengah;
   e. Penyelenggaraan kursus dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat usia angkatan kerja yang belum bekerja.
2. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri dan UKM serta koperasi, dengan fokus pada :
   a. Peningkatan kualitas, kuantitas dan produktifitas pertanian/perkebunan;
   b. Peningkatan kualitas, kuantitas dan produktifitas perikanan dan peternakan;
   c. Peningkatan kualitas dan produktifitas perdagangan;
   d. Peningkatan daya tarik dan daya saing kepawirisataan;
   e. Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, Industri Kecil Menengah, koperasi dan UKM;
   f. Peningkatan dan pengembangan investasi daerah.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan fokus pada :
   a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan, jembatan, drainase;
   b. irigasi) yang menjadi kewenangan, daerah rawan bencana, perbatasan antar wilayah;

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan, permukiman dan utilitas (air minum, sanitasi, air limbah) yang berbasis masyarakat dan penyediaan layanan akses listrik;
d. Peningkatan kinerja dan kesadaran masyarakat dalam penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
e. Peningkatan sarana prasarana perhubungan dalam rangka mendukung keselamatan jalan serta pengembangan sistem transportasi.

4. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan fokus pada:
   a. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, formal dan non formal melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan kelas, pengadaan sarana prasana pembelajaran;
   b. Penguatan sekolah-sekolah perbatasan;
   c. Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mempunyai kompetensi;
   d. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
   e. Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
   f. Penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi masyarakat;
   g. Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kesehatan;
   h. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas pembantu (Pustu), revitalisasi poliklinik desa (Polindes), pengadaan alat kesehatan;
   i. Pemerataan kualifikasi tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan rumah sakit, sertifikasi tenaga kesehatan, optimalisasi tenaga kesehatan di tingkat desa.
5. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi, dengan fokus pada :
   a. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi pelayanan;
   b. Peningkatan koordinasi dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah melalui optimalisasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) serta forum komunikasi lintas instansi vertikal;
   c. Peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintah;
   d. Penguatan pengawasan untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme melalui implementasi rencana aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan, optimalisasi satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saberpungli);
   e. Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media elektronik ataupun media langsung;

f. Penguatan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur pemerintahan serta pengembangan kapasitas dan kualitas pegawai ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Klaten;
g. Penguatan dan penataan organisasi perangkat daerah melalui penataan tatalaksana yang meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang efektif dan efisien, terukur yang mengarah pada prinsip-prinsip good governance dan clean governance.
h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan;
i. Penataan peraturan dan produk hukum daerah melalui jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) serta sosialiasi produk hukum daerah; pengawasan dan penanganan pelanggaran peraturan daerah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
j. Percepatan pelaksanaan Tindaklanjut atas hasil pemeriksaan;

6. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :
   a. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
   b. Peningkatan kinerja dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
   c. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
   d. Pengendalian kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan
   e. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan.
   f. Pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana;
   g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan resiko bencana dan penyediaan logistik kebutuhan penanggulangan bencana.
7. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan, dengan fokus pada :
   a. Perlindungan lahan pangan berkelanjutan (sawah lestari);
   b. Pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis teknologi;
   c. Pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
   d. Pemenuhan sarana prasarana produksi pertanian;
   e. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
   f. Pembangunan dan pengisian lumbung pangan masyarakat;
   g. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ternak dan perikanan;
   h. Efisiensi pemanfaatan energi; peningkatan pemanfaatan energi alternatif dan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat *konkuren* atau urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

a. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

I. Urusan Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional sehingga dalam implementasinya juga menjadi prioritas pembangunan di daerah. Pemenuhan atas hak dasar yaitu pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan komplek. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidak-tidaknya selama 9 tahun.

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan pendidikan antara lain : Dinas Pendidikan, TK Negeri Kabupaten, SD Negeri, SMP/SLTP Negeri se-Kabupaten, Dinas Pendidikan Kecamatan dan SKB Cawas.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pendidikan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam **Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019**

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Program
Urusan Pendidikan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	43.631	49.140	112,6
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92,79	90,33	97,3
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,85	98,54	101
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	91,33	98,31	108
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	87,24	88,30	101
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	68,62	73,05	106
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	88,68	98,58	111
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,01	150*
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,13	0,05	161*
	*Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Angka Kelulusan SD/MI	%	98,67	99,99	101,3
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	98,15	99,14	101

	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	69,1	68,25	98,8
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	91,4	88,89	97,3
	Tersedianya Satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimun 3 Km untuk SD/MI, dan 6 Km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman	%	100	738	738
	Jumlah peserta dalam Rombel SD/MI ≥ 32 siswa, dan SMP/MTS ≥ 36 siswa didukung ketersediaan ruang kelas untuk setiap Rombel dengan kelengkapan papan tulis, ada 1 meja dan kursi untuk setiap siswa	SD	24	689	2.870,80
		SMP	3	113	3.766,70
	Setiap SD/MI tersedia buku teks pelajaran : matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan dengan ketentuan satu siswa - satu bukuteks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan.	SD	159	716	450,3
		SMP	42	100	238,1
	Setiap SD/MI tersedia alat peraga IPA: Model tubuh, bola dunia (globe), alat optik, dan kit IPA.	Sekolah	141	503	356,7

	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Setiap SD/MI tersedia 100 judul buku untuk pegangan dan 10 buku referensi, dan untuk SMP/MTs tersedia 200 judul buku untuk pegangan dan 20 buku referensi.	SD	416	696	167,3
		SMP	90	97	107,8
	Setiap SMP/MTS ada Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan 36 meja dan kursi, alat demonstrasi dan papan eksperimen	Sekolah	16	84	525
	Setiap SMP/MTS tersedia buku teks pelajaran, dengan ketentuan satu siswa - satu buku teks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan.	Sekolah	42	100	238,1
	Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan selama 34 minggu/tahun, dengan ketentuan :	SD	325	769	236,6
		SMP	76	112	147,4
	Kelas 1 - 2 18 jam/minggu				
	Kelas 3 24 jam/minggu				
	Kelas 4 - 6 27 jam/minggu				
	Kelas 7 - 9 27 jam/minggu				
	Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	SD	760	772	101,6
		SMP	103	115	111,7
	Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Musyawarah Berbasis Sekolah (MBS).	SD	760	771	101,4
		SMP	103	112	108,7
	Setiap SD/Mi dan SMP/MTs ada ruangan guru dilengkapi dengan 1 meja dan kursi untuk satu guru, dan untuk SMP/MTS ada ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruangan guru.	SD	439	625	142,4
		SMP	56	113	201,8

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,73	99,66	99,9
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	0,23	0,43	186,96
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid	guru/murid	1:15	1 : 13	97,3
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1 : 15	1:14	98,7
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1 : 15	1:12	96
	Jumlah guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	guru	1.421	1.650	116,1
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	guru/murid/kls	1:34	1:28	93,6
	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	82,97	87,07	104,9
	Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98,67	99,19	100,5
	Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	93,95	97,1	103,4
	Setiap SMP/MTs 70% gurunya harus lulusan S1/D-4, dan 35%nya sudah harus bersertifiket	Sekolah	85	92	108,2

	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Setiap SD/Mi ada 1 orang guru dengan mengajar 32 siswa, dan ada 6 orang guru untuk setiap Satuan Pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru.	Sekolah	552	689	124,8
	Setiap SMP/MTS ada 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran	Sekolah	73	96	131,5
	Setiap SD/MI harus ada 2 orang guru dengan jenjang kelulusan S1/D-4, dan 2 orang guru diantaranya sudah harus bersertifikat	Sekolah	710	723	101,8
	Setiap guru tetap wajib mengajar 37,5 jam/minggu	SD	483	749	155,1
		SMP	65	115	176,9
	Setiap SMP/MTs ada seorang guru dengan kualifikasi akademik S1/D-4 dan bersertifikat untuk mata pelajaran: Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan.	Sekolah	65	83	127,7
	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SD/MI harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.	Sekolah	637	739	116
	Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SMP/MTs harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.	Sekolah	81	98	121

	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Disetiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.	%	100	100	100
	Setiap guru harus menyusun RKP dalam melaksanakan kegiatan untuk membantu Satuan Pendidikan	SD	670	773	115,4
		SMP	98	114	116,3
	Setiap pengawas wajib melakukan kunjungan ke semua sekolah minimal satu kali setiap bulan, dengan waktu 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	693	740	106,8
		SMP	106	101	95,3
	Setiap guru wajib menerapkan Rencana Kerja Pembelajaran (RKP)	SD	693	773	111,5
		SMP	106	114	107,5
	Setiap guru wajib mengembangkan dan menerapkan program penilaian pendidikan	SD	693	773	111,5
		SMP	106	115	108,5
	Setiap Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi kelas, minimal 2 kali per semester	SD	693	765	110,4
		SMP	106	109	102,8
	Setiap guru wajib sampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala sekolah	SD	693	773	111,5
		SMP	106	115	108,5
	Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan hasil UAS, ulangan kenaikan kelas (UKK) kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan.	%	100	115	115

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,7	99,66	99,9
Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	88,68	98,58	111
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	Penyediaan pendanaan biaya operasi sekolah	siswa	145.256	141.060	97,1

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Data Kepegawaian Urusan Pendidikan

1.	**Jumlah Pegawai**		:	6132	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SD	:	4	Orang
	b)	SLTP	:	89	Orang
	c)	SLTA	:	462	Orang
	d)	Diploma	:	617	Orang
	e)	S- 1	:	4758	Orang
	f)	S- 2 / S-3	:	202	Orang
				6132	
3.	**Golongan**				
	a)	Golongan I	:	59	Orang
	b)	Golongan II	:	332	Orang
	c)	Golongan III	:	2647	Orang
	d)	Pengatur Muda Tk I	:	3094	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	18	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	5750	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pendidikan Pada tahun 2019 yaitu Dinas Pendidikan, TK Negeri Kabupaten, SD Negeri se-Kabupaten, SMP/SLTP Negeri se-Kabupaten dan SKB Cawas. Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.168.536.917.390,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.147.600.277.021,- atau sebesar 87,6%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.862.343.432.621 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.692.841.232.344,- atau sebesar 80,34%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Pendidikan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan selama tahun 2019 beserta solusi yang telah ditempuh dalam mengatasi permasalahan dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terjadi kekosongan Kepala Sekolah khususnya di SD Negeri, per Desember 2019 sebanyak 184 SD Negeri yang tidak memiliki Kepala Sekolah definif	Terhadap SD Negeri yang tidak ada Kepala Sekolahnya, sementara waktu diampu oleh Kepala Sekolah dari sekolah lain	Diadakan seleksi dan diklat penguatan calon Kepala Sekolah
2	Kekurangan guru kelas untuk SD Negeri	Sekolah mengangkat Guru Wiyata Bhakti dengan SK Kepala Sekolah	Mengusulkan formasi CPNS ke instansi terkait untuk mengisi kekurangan guru kelas di SD Negeri
3	SD Negeri tidak memiliki tenaga administrasi untuk mengerjakan administrasi Laporan BOS dan Asset, sehingga guru terbebani dengan tugas tugas penyelesaian administrasi pelaporan BOS/Asset, padahal tugas utama guru adalah mengajar	Pengerjaan Pelaporan BOS/Asset dikerjakan oleh guru	Mengusulkan pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) Pengadministrasian Umum di SD Negeri

9) Inovasi dan Prestasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan pada tahun 2019, terdapat inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan Program "Buku Matur Jujur". Inovasi tersebut ditujukan untuk membentuk budaya baru dengan cara berbeda, yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), dengan sekolah sebagai lokomotif. Sebagai penghubung tri pusat pendidikan, dibutuhkan sarana yang mudah, murah, fleksibel, dengan anak difasilitasi oleh media untuk berani menulis dan mengungkapkan kejujuran terhadap apa yang telah dilakukan, dirasakan dan dilihat. Inovasi tersebut juga mendorong anak untuk aktif menulis dan mengembangkan budaya literasi sejak dini. Selain inovasi tersebut pada tahun 2019, dalam penyelenggaraan program urusan Pendidikan terdapat prestasi Nasional yang diperoleh siswi Ladyza Thirlita Gloria Depatris dalam kategori Juara I Gambar Bercerita dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) yang diselenggarakan Kementrian Pendidikan.

II. Urusan Kesehatan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan antara lain : Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Bagian Kesra dan Kecamatan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kesehatan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Upaya Kesehatan Masyarakat hamil	Cakupan Pelayanan Ibu (K4)	%	98	93,27	95,17
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	83	83,28	100,3
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	%	100	99,99	100,0
	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	%	99	97,55	98,5
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)	%	99	97,79	98,78
	Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani	%	83	56,03	67,5
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	99,4	98,07	98,6
	Angka kelangsungan hidup bayi	%	992	989,67	99,8
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	97	95,77	98,7
	Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	100	100
	Cakupan BBLR	%	5,06	5,7	112,6
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten	%	100	100	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	99	99	100,0
Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	%	58	100	172,4
	Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100	100,0
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat	%	100	100	100,0
	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100,0
	Kebijakan Yang Dibuat	Jumlah/ Buah	7	9	128,6
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	75,7	80	105,7
	Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan	%	20	19	95,0
	Proporsi Posyandu Mandiri	%	49	46	93,9
	Persentase Desa Didampingi SMD MMD	%	100	100	100,0
Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100,0
	% Ibu hamil mendapatkan tablet Fe	%	98	93,34	95,2
	Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif	%	80	82,15	102,69
	Cakupan Balita Stunting	%	27	8,3	*169,26
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Cakupan Balita Wasting	%	10,5	7,3	130,48
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Cakupan Balita Underweight	%	18,1	3,9	178,45
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)	%	2,5	1,77	128
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Partisipasi Posyandu (D/S)	%	85	82,6	97,18

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	100
	Cakupan desa *open defication free* (ODF)	%	100	100	100,0
	Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja	%	30	97,8	326
	Persentase penggunaan jamban	%	100	100	100
	Persentase penggunaan air bersih	%	100	100	100
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	42	49,22	117,19
	Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100,0
	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC (SPM Kesehatan baru 2019, orang terduga TBC)	%	100	49,22	49,22
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100,0
	Cakupan desa /kelurahan Universal Chlid immunication (UCI)	%	100	100	100,0
	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100,0
	Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	Kasus	148	136	91,9
	Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	80	87,6	109,5
	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn	%	70	76	108,6
	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	%	90	83,78	93,1
	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun	%	100	320	320,0
	Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100	100,0
	Discharded Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	96	96,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam	%	100	100	100,0
	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam	%	100	100	100,0
	Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi	%	100	100	100,0
	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	93	88,27	94,9
	Cakupan Bias C/DT/TD	%	98	98	100,0
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	%	90	50	55,56
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Diabetis mellitus	%	70	129	180
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Gangguan jiwa berat	%	100	93,14	93,14
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka kesakitan	%	100	47,98	152,02
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Akreditasi Puskesmas & RSUD	%	20,59	20,59	100,0
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin					
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	11	220,0
	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	%	98	100	102,0
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	%	86	98	113,95
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	%	100	100	100,0
	Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu	%	100	100	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/30.000 pend	0,29	0,87	300,0
	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 pend	0,22	0.70	318,0
Pengadaan, dan Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	% Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	%	3	8,9	296
	Ratio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk	/1.000 pend	1,38	1,68	121,96
	% obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	%	76	56,43	74,25
Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	%	100	95,38	95,38
	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	95,38	95,38
Manajemen Informasi dan regulasi Kesehatan	Rata-rata % anggaran kesehatan dalam APBD	%	11,8	10,8	98,18
	Persentase pengelolaan SIMRS (sistem informasi manajemen rumah sakit)	%	100	100	100,0
Pelayanan kesehatan	LOS	hari	5	3,42	131,6
	Capaian = (2 x target) – realisasi / target x 100%				
	Persentase jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasien	%	30	30,6 (per mil)	98
	Capaian = (2 x target) – realisasi / target x 100% (data yang ada di atas merupakan satuan per mil bukan persen)				
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	%	65	69,3	106,6
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase peserta sarasehan dan senam lansia	%	98,00	100,00	102,0
Peningkatan Derajat Kesehatan	NDR (Net Dealt Rate) angka kematian . 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	< 25	10,75	tercapai
	GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	< 45	30,6	tercapai

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Data Pegawai Urusan Kesehatan

1.	**Jumlah Pegawai**		:	1268	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SD	:	7	Orang
	b)	SLTP	:	32	Orang
	c)	SLTA	:	178	Orang
	d)	Diploma	:	718	Orang
	e)	S- 1	:	313	Orang
	f)	S- 2 / S-3	:	20	Orang
				1268	
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Juru	:	5	Orang
	b)	Juru Tk I	:	5	Orang
	c)	Pengatur Muda	:	13	Orang
	d)	Pengatur Muda Tk I	:	28	Orang
	e)	Pengatur	:	164	Orang
	f)	Pengatur Tk I	:	182	Orang
	g)	Penata Muda	:	192	Orang
	h)	Penata Muda Tk I	:	164	Orang
	i)	Penata	:	191	Orang
	j)	Penata Tk I	:	257	Orang
	k)	Pembina	:	55	Orang
	l)	Pembina Tk I	:	12	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	53	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	884	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Kesehatan Pada tahun 2019 yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, Bagian Kesra dan Kecamatan. Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.214.710.872.447,52 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.177.805.813.817,68 atau sebesar 82,81%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.118.915.162.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.99.571.302.447,- atau sebesar 83,73%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Kesehatan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan kesehatan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan selama tahun 2019 beserta solusi yang telah ditempuh dalam mengatasi permasalah dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Permasalahan dan Solusi
pelaksanaan Urusan Kesehatan tahun 2019

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Intervensi pelayanan kesehatan yang optimal sejak remaja untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi, pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi	Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita
2	Masih tingginya stunting	intervensi spesifik (intervensi kesehatan pada semua siklus kehidupan, mulai remaja, wanita usia subur, ibu hamil, bayi, ibu menyusui, balita, anak pra sekolah, anak sekolah, dll) dan intervensi sensitif (BPNT, PKH, BPJS, bantuan bibit, pembangunan kawasan pemukiman, dll)	pelayanan kesehatan pada semua siklus kehidupan serta koordinasi perbaikan gizi dengan sektor non kesehatan
3	Masih banyaknya penduduk miskin yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	Alokasi 37,5% dari Pajak Rokok untuk menjamin Penduduk Kabupaten Klaten sudah sepenuhnya di realisasikan untuk mengcover per 1 Januari 2020 sebanyak 75.825 dan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Klaten sudah mencapai 90,71 % penduduk sudah masuk Program JKN/KIS.	Peserta di prioritas penduduk miskin Non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang mempunyai penyakit katastropik.
4	Belum optimalnya pelayanan kesehatan	Pemerataan tenaga ahli kesehatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas pembantu	Peningkatan kualitas SDM dan pemerataan tenaga kesehatan
5	Belum terpenuhinya kecukupan asupan pangan dan gizi masyarakat karena pola asuh dan pola makan yang belum benar	Upaya perbaikan gizi keluarga, pembinaan dan kewaspadaan pangan dan gizi	Pemenuhan gizi keluarga

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
6	Rendahnya persentase Dana Desa yang digunakan untuk mendukung program kesehatan	-Advokasi kepada Kepala Desa untuk pemihakan program kesehatan	-Advokasi kepada Kepala Desa untuk pemihakan program kesehatan
7	Forum Kesehatan Desa (FKD) tidak aktif	-Mengaktifkan kembali FKD	-Mengaktifkan kembali FKD
8	Belum ada MoU antara Dinas Kesehatan/ Puskesmas dengan sektor swasta, BUMN/BUMD tentang penanganan masalah kesehatan	-Advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait	-Advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait
9	Rendahnya persentase CSR perusahaan di bidang kesehatan	-Advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait	-Advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait
10	Rendahnya kader kesehatan remaja di sekolah/ pesantren karena yang dilatih sudah lulus	-Pelatihan secara kontinyu pada siswa kelas 1	-Pelatihan secara kontinyu pada siswa kelas 1
11	Belum aktifnya kegiatan Saka Bakti Husada (SBH) di kwaran yang sudah terbentuk	-Pertemuan koordinasi (camat, kapus, ka.UPTD pendidikan, kepala sekolah, petugas promkes)	-Pertemuan koordinasi (camat, kapus, ka.UPTD pendidikan, kepala sekolah, petugas promkes)
12	Baru terdapat 8 kwaran Saka Bakti Husada (SBH), yaitu Klaten selatan, Ngawen, Klaten Utara, Wonosari, Ceper, Prambanan, Karangdowo, Jogonalan	-Pengukuhan pengurus kwaran	-Pengukuhan pengurus kwaran
13	Pembina Saka Bakti Husada (SBH) baik di Kabupaten maupun Kwaran belum memiliki pamong saka yang berkompeten karena belum mengikuti Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML)	- Usulan untuk mengikutsertakan Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML)bagi Pamong Saka melalui provinsi maupun Kemenkes	- Usulan untuk mengikutsertakan Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML) bagi Pamong Saka melalui provinsi maupun kemenkes

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
14	Organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk kesehatan baru yg berasal dari ormas keagamaan	-Sosialisasi, Advokasi dan pembuatan Mou	-Sosialisasi, Advokasi dan pembuatan Mou
15	Belum semua Puskesmas melakukan survey PHBS total populasi	-Menggerakkan keder, ormas, tomas, anggota SBH untuk melakukan survey PHBS di masing-masing tatanan	-Menggerakkan keder, ormas, tomas, anggota SBH untuk melakukan survey PHBS di masing-masing tatanan
16	Belum adanya kebijakan tertulis tentang PHBS	-Pembuatan produk hukum (Perbup/ SK/ Surat Edara) tentang PHBS	-Pembuatan produk hukum (Perbup/ SK/ Surat Edara) tentang PHBS
17	Anggaran kegiatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) Minim /kurang	Menggunakan perjalanan dinas dalam daerah dari kegiatan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu)	Usulan penambahan anggaran
18	Pengetahuan masyarakat tentang Program Matur Dokter masih rendah	Pembentukan kader matur dokter di masing-masing desa	Sosialisasi tentang matur dokter di tiap kawedanan
19	Masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang belum menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terpadu (SISRUTE) untuk merujuk pasien	Pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia)	Pengembangan SDM dan monitoring pelaksanaan penggunaan aplikasi SISRUTE
20	SDM PSC Matur Dokter Dinas Kesehatan masih kurang	Memaksimalkan SDM yang tersedia	Mengusulkan penambahan SDM
21	Ruangan *Public Service Center* (PSC) kurang memadai	Pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) ruang *Public Service Center* (PSC) Kab Klaten	Pembangunan ruang *Public Service Center* (PSC)
22.	Keterlambatan pencairan klaim BPJS	Percepatan Pembayaran	Mengajukan surat penagihan ke BPJS
23.	Menumpuknya antrian pasien saat berobat ke Rumah Sakit Daerah	Perbaikan Sistem Informasi Manajemen RS	Perbaikan SIM RS dengan menambah e-resep dan e-rekam medik

9) Inovasi dan Prestasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan, terdapat beberapa inovasi dan terobosan yang dilaksanakan pelaksana Urusan Kesehatan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat. Inovasi dan terobosan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan tahun 2019

No	Nama Inovasi	Deskripsi singkat
1.	Matur Dokter	Merupakan Inovasi Bupati Klaten di bidang Kesehatan Untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan melalui aplikasi di android secara gratis. Matur Dokter merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119. Jenis-jenis layanan : 1. Gawat Darurat Kesehatan 24 jam 2. Konsultasi kesehatan 3. Info Sehat 4. Tips Kesehatan 5. Berita Sehat 6. Forum Sehat 6. Informasi Kamar Tidur Kosong di RS 7. Pelayanan Ambulance Aplikasi Matur Dokter : Diunduh dari Play Store Handphone Android, whatsapp : 0822 60000 910, Telepon : 0822 60000 910 (0272 3391 330), email : maturdokter@gmail.com instagram : maturdokterkabklaten, facebook: maturdokterkabklaten dan Twitter : maturdokterkabklaten
2.	SIMBAT (Sistem Informasi Manajemen Obat)	Sistem Informasi Management Obat Puskesmas digunakan untuk mempermudah penatausahaan persediaan obat di Puskesmas
3.	SIMPUS GIZKIA	Aplikasi di 34 puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan data-data pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak
4.	SIMPUS	Aplikasi di 34 puskesmas untuk manajemen pelayanan kesehatan dari pendaftaran sampai penerimaan obat
5.	SIPANDA (Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Asset dan ATK) Berbasis Web (Simpanda.bagaswaras.com)	Aplikasi ini berisi semua kegiatan/pelayanan yang ada di RSD Bagas Waras mulai dari keluar masuk ATK beserta laporannya, Keluhan, data kunjungan dan lain-lain sesuai user yang membutuhkan dengan adminnya berada di IT.
6.	Sim Rusa Saras (Sistem Informasi Manajemen RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten). Berbasis Desktop.	Aplikasi berisi semua kegiatan/pelayanan RS.

Selain inovasi di atas, pada tahun 2019 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kesehatan yang diperoleh RSD Bagas Waras dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik. Penghargaan yang diperoleh terkait Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori " Baik " Tahun 2019.

III. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	61,49	69,33	112,8
	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	81,32	82,47	101
Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Prosentase layanan Drainase (Perwaskim)	%	71,2	98,89	138,9
Peningkatan Prasarana dan Sarana Kebinamargaan	Jumlah alat berat laik operasi	unit	4	31	775
	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia	%	100,00	100,00	100,0
Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0,00	0,14	Tidak tercapai
Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	62,50	62,50	100,0
Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	desa/kel.	401	401	100
	Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	66%	66%	100
	persentase Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	%	65,13	2,1	3,21

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pemanfaatan Ruang	Prosentase Peningkatan Pelayanan Ketataruangan	%	35%	35%	100,0
Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan gedung	Pembangunan Gedung Pemerintah	paket	5	13	260
	persentase gedung kantor dan non kantor yang terbangun	%	83,61	100	119,6
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	28,00	33,47	119,5
Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik	%	78,86	56,87	72,12
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase volume jalan yang dipelihara	%	66,33	56,67	85,4
	Volume rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	m2	4500	17.000	377,78
Penataan Trotoar Jalan	Prosentase rasio trotoar yang tertata	%	57,58	58,19	101,1
Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih	%	91,37	80,16	87
	Prosentase layanan Air Limbah	%	94,37	97,82	103

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Data Kepegawaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.	**Jumlah Pegawai**		:	307	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SD	:	32	Orang
	b)	SLTP	:	58	Orang
	c)	SLTA	:	145	Orang
	d)	Diploma	:	15	Orang
	e)	S- 1	:	45	Orang
	f)	S- 2	:	12	Orang
3.	**Golongan**				
	a)	Golongan I	:	67	Orang
	b)	Golongan II	:	160	Orang
	c)	Golongan III	:	72	Orang
	d)	Golongan IV	:	8	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	28	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	2	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program Urusan Wajib pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh beberapa perangkat Daerah. Perangkat Daerah tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kelurahan. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.228.868.921.464,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.184.116.292.221,- atau sebesar 80,44%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 24.094.477.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.877.583.801,- atau sebesar 78,34%

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang serta solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Permasalahan dan Solusi
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
DINAS PU DAN PR			
1	Cakupan obyek penanganan infrastruktur (jalan dan jembatan) tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran	Mapping/pemetakan penanganan kerusakan berdasarkan skala prioritas	Penyusunan database kerusakan infrastruktur (jalan dan jembatan)
2	Belum terpenuhinya ketersediaan luasan RTH publik sesuai aturan	Pembangunan RTH publik baru	Penegakkan aturan terkait RTH sesuai dengan Perda RTRW
3	Masih minimnya jaringan PJU terpasang di jalan-jalan Kabupaten	Mengusulkan surat keputusan (SK) Bupati tentang lokasi dan alokasi PJU	Mencari alternatif sumber dana lain selain APBD misal dari DAK atau Bankeu Propinsi
4	Belum tersedianya database kerusakan jaringan irigasi Kabupaten	Koordinasi dengan para mantri pengairan yang tersebar di 5 UPTD	Mengusulkan kegiatan penyusunan database kerusakan jaringan irigasi di Renja OPD tahun 2020
5	Masih minimnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Menggunakan pihak ketiga untuk menyusun Perda rencana detail tata ruang (RDTR)	Mengusulkan kegiatan penyusunan Perda rencana detail tata ruang (RDTR) di Renja OPD tahun 2020

DINAS PERWASKIM			
I	**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**		
1	Data titik genangan air yang belum ada, kewenangan saluran drainase yang terpisah-terpisah karena asset	Dilaksanakan pendataan titik-titik genangan dan berkoordinasi dengan para pihak untuk langkah penangangannya (permasalahan asset)	Melaksanakan pembangunan dengan mengambil data-data titik genangan sesuai dari hasil rekomendasi dari hasil pendataan tersebut (terkait dimensi & buangan akhir)

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
2	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan drainase di kabupaten klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi, pendataan dan penyusunan masterplan drainase di kabupaten klaten 2 Perlunya koordinasi rutin antar stajeholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base 3 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	1 Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataan lanjutan (di 22 kecamamatan lainnya) sebagai data awal potensi dan permasalahan drainase di kabupaten klaten 2 Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua) 3 Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data
II	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**		
	Pengeboran sumur dibeberapa wilayah seperti di kec. Bayat mengalami kendala tanah keras	Mencari pihak ke -3 yang mempunyai kapasitas mumpuni baik alat maupun SDM dalam pengeboran	Fasilitaor lapangan dan dinas teknis mendata pihak ke-3 yang mempunyai kapasitas baik dan meminta untuk mempresentasikan terlebih dahulu mengenai kemampuan alat, SDM dan paket pekerjaan
	Beberapa desa mengalami pengunduran waktu karena belum bisa mencairkan dana yang disebabkan belum adanya rekening dalam APBDes untuk transfer dana dari APBD	Pihak desa terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama dengan pihak ke-3	Ada sosialisasi terlebih dahulu untuk desa yang mendapat program PAMSIMAS dan tata cara penganggarannya
	Pencairan dana DAK yang memakan waktu dan ada jeda antara pelaksanaan dana tahap seblumnya dengan pencairan tahap berikutnya (Verifikasi dr inspektorat) & Kesiapan tenaga desa dalam pelaksanaan yang kurang	Memperpendek waktu pencairan dari tahap sebelum dan berikutnya & mempersiapkan tenaga untuk pelaksanaan di desa	Melaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pencairan & meningkatkan SDM BKM (pelatihan) dalam pelaksanaan fisik di desa
	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan air minum di kabupaten klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi dan pendataan sebagai data awal potensi dan permasalhan air minum di kabupaten klaten 2 Perlunya koordinasi rutin antar stageholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base 3 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	1 Telah disusun pendataan potensi dan permasalahan air minum di kabupaten klaten 2 Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua) 3 Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan sanitasi di kabupaten klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi dan pendataan sebagai data awal potensi dan permasalhan sanitasi di kabupaten klaten 2 Perlunya koordinasi rutin antar stajeholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base 3 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	1 Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataan lanjutan (di 22 kecamamatan lainnya) sebagai data awal potensi dan permasalahan sanitasi di kabupaten klaten 2 Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua) 3 Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data
III	**Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung**		
1	Belum maksimalnya peran konsultan dilapangan	Memberikan masukan kepada BLP untuk lebih baik dalam memilih konsultan	Memaksimalkan peran konsultan baik konsultan supervisi maupun manajemen kontruksi untuk lebih aktif dan kritis dilapangan
2	Masih terbatasnya SDM dari dinas	Memaksimalkan tenaga ahli dan mengusulkan penambahan SDM	Memaksimalkan tenaga ahli dan mengefektifkan waktu pengawasan dilapangan
3.	Tidak ada database bangunan gedung pemerintah di kabupaten klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi, pendataan dan penyusunan database/leger bangunan gedung pemerintah di kabupaten klaten 2 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	1 Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataanleger bangunan gedung pemerintah di kabupaten klaten 2 Memaksimalkan peran konsultan baik konsultan supervisi maupun manajemen kontruksi untuk lebih aktif dan kritis dilapangan
IV	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**		
1	Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas serta kapasitas dari SDM yang belum sepenuhnya mengerti akan tupoksinya masing-masing	Mengusulkan penambahan SDM serta mengikut sertakan SDM dalam diklat-diklat mengenai IMB	Mengikut sertakan SDM dalam diklat-diklat mengenai pengendalian pemanfaatan tata ruang, IMB dan turunannya
2	Pelaksanaan IMB belum sesuai SOP	Membaca kembali SOP dan mengimplementasikan dilapangan	Membuat SOP dalam media-media yang mudah difahami, dilihat dan diingat

IV. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanaan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Prosentase Rumah Layak Huni	%	97,53	95,57	98,0
Pengembangan Perumahan	Jumlah pengembangan PSU (perumahan)	unit/blok	5	3	60,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam tabel 3.12

Tabel 3.12
Data Pegawai Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.	**Jumlah Pegawai**		:	43	0rang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SD	:	2	Orang
	b)	SLTP	:	2	Orang
	c)	SLTA	:	14	Orang
	d)	Diploma	:	1	Orang
	e)	S- 1	:	17	Orang
	f)	S- 2 / S-3	:	7	Orang
				43	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Juru Muda	:	0	Orang
	b)	Juru Muda Tk I	:	0	Orang
	c)	Juru	:	1	Orang
	d)	Juru Tk I	:	0	Orang
	e)	Pengatur Muda	:	3	Orang
	f)	Pengatur Muda Tk I	:	3	Orang
	g)	Pengatur	:	2	Orang
	h)	Pengatur Tk I	:	2	Orang
	i)	Penata Muda	:	3	Orang
	j)	Penata Muda Tk I	:	11	Orang
	k)	Penata	:	8	Orang
	l)	Penata Tk I	:	6	Orang
	m)	Pembina	:	2	Orang
	n)	Pembina Tk I	:	2	Orang
	o)	Pembina Utama Muda	:	0	Orang
	p)	Pembina Utama Madya	:	0	Orang
	r)	Pembina Utama	:	0	Orang
				43	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	10	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	3	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Wajib pelayanan Dasar Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.5.709.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.442.841.192,- atau sebesar 77,81%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.562.226.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.110.782.605,- atau sebesar 87,32%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan Dasar Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Permasalahan dan Solusi Urusan Perwaskim tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Kekurangan Sarpras Kantor	Dilaksanakan pendataan Sarpras kantor	Pengadaan Sarpras perkantoran
2.	Belum adanya kendaraan Operasional untuk IMB dan RTLH	Pengusulan Pengadaan Kendaraan Operasional	Pengadaan Kendaraan Operasional
3.	Anggaran untuk Rusunawa belum teranggarkan karena belum adanya kegiatan	Pengusulan Anggaran untuk Rusunawa belum teranggarkan karena belum adanya kegiatan	Penganggaran kegiatan untuk Rusunawa
4.	Database Perumahan tentang RTLH yang belum akurat	Dilaksanakan pendataan yang detail dan akurat	Maintenance data dan update data jika sudah ada database yang akurat
5.	Belum terlaksananya kegiatan penyerahan PSU (Pra Sarana Umum) perumahan yang dibangun pengembang kepada Pemerintah Kabupaten	Dibentuk tim verifikasi dan regulasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut	Memulai kegiatan penyerahan PSU (Pra Sarana Umum) pada Tahun Anggaran 2020
6.	Tingkat hunian RUSUNAWA yang belum optimal dan permasalahan pembayaran sewa hunian	Sosialisasi yang lebih intens untuk mempromosikan RUSUNAWA dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penghuni rusunawa	Menyebarkan pamflet RUSUNAWA, sosialisasi di kecamatan, dan menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku

V. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Satpol PP

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Anggota korsik yang terlatih	%	100	100	100
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	100,0
	Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	96	94	97,9
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan masyrakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	%	96	89,63	93,4
	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	31	100	322

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	prosentase keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal yang terpelihara	%	49	100	204
	Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba	%	4	14,28	*170
	Capaian Kinerja negative, rumus = (2x target – realisasi) / target x 100%				
	Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana	%	100	100	100,0
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	91,75	91,60	99,8
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	91,50	91,00	99,5
Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu	%	5	12	240,0
	Prosentase ormas aktif yang terbina	%	85	85	100,0
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan	%	10	10	100,0
Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih	%	13	30	230

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.15
Data Pegawai Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SATPOL PP					
1.	**Jumlah Pegawai**		:	61	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a	SD	:	1	Orang
	b	SLTP	:	6	Orang
	c	SLTA	:	33	Orang
	d	Diploma - 3	:	2	Orang
	e	S - 1	:	14	Orang
	f	S - 2/ S-3	:	5	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a	Pengatur Muda (II/a)	:	5	Orang
	b	Pengatur Muda Tk (II/b)	:	7	Orang
	c	Pengatur (II/c)	:	2	Orang
	d	Pengatur Tk I (II/d)	:	3	Orang
	e	Penata Muda (III/a)	:	2	Orang
	f	Penata Muda Tk I (III/b)	:	22	Orang
	g	Penata (III/c)	:	9	Orang
	h	Penata Tk I (III/d)	:	7	Orang
	i	Pembina (IV/a)	:	3	Orang
	j	Pembina Tk I (IV/b)	:	1	Orang
4.	**Jumlah Pejabat Struktural**		:	13	Orang
5.	**Jumlah Pejabat Fungsional**		:	-	Orang

KESBANGPOL					
1.	**Jumlah Pegawai**		:	14	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SLTA	:	5	Orang
	b)	Diploma	:		Orang
	c)	S- 1	:	3	Orang
	d)	S- 2 / S-3	:	6	Orang

3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Penata Muda Tk I	:	6	Orang
	b)	Penata	:		Orang
	c)	Penata Tk I	:	4	Orang
	d)	Pembina	:	3	Orang
	e)	Pembina Tk I	:	1	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	5	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	0	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Program urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dan Satpol PP. Urusan Wajib pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.630.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.031.623.898,- atau 90,97%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.008.427.000,- Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.027.078.681,- atau sebesar 85,9%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan selama tahun 2019 beserta Solusi dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Permasalahan dan Solusi Urusan Ketertiban Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih banyaknya Warnet yang belum berijin	Diadakan Operasi , Sosialisasi dan Penyuluhan	Di adakan Sosialisasi dan Penyuluhan Perda N0.14 tahun 2013 tentang Warnet
2	Masih adanya Kafe dan Karaoke yang belum berijin	Operasi rutin dan pembinaan bersama instansi terkait	Satpol PP, Disbudparpora dan KPT melakukan upaya pembinaan kepada pengusaha kafesecara intensif ; Perlunya diterbitkan Perda/Perbub yang mengatur tentang Pendirian Usaha Warnet dan sejenisnya atau merevisi Perda No. 19 Tahun 2002.
3	Masih banyak Mini Market berjaringan yang operasionalnya (jam buka) menyalahi aturan	Operasi rutin dan pembinaan bersama instansi terkait	Satpol pp melakukan pembinaan dengan mendatangi langsung Toko modern mini market berjaringan untuk mendata kelengkapan ijin mini market dan menegur mini market yang jam operasionalnya menyalahi perda
4	Pedagang kaki Lima masih banyak yang menyalahi tempat dan jam buka untuk berjualan	Pembinaan bersama Disperindagkop dan instansi lainnya	Satpol PP berkoordinasi dengan DPU dan Disperindagkop untuk segera melakukan upaya penempatan PKL di tempat tersendiri (dibuatkan Tempat Khusus) untuk berjualan
5	Masih banyaknya pemasangan reklame liar	Operasi dan pembinaan bersama instansi terkait	Satpol PP secara rutin melakukan penertiban reklame yang melanggar perda K3 dan perda penyelenggaran reklame.
6	Masih banyaknya WTS, Pengemis, Gelandangan dan orang terlantar	Pembinaan dan operasi rutin penertiban WTS, Pengemis, Gelendangan dan Orang Terlantar	Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengoptimalkan tempat penampungan
7	Masih kurangya Personil Satpol PP	Perekrutan THL	Mengoptimalkan anggota untuk Operasional
8	Masih kurangnya sarana dan prasarana (Mobil untuk Operasional)	di buat jadwal supaya tidak berbenturan penggunaan mobil operasional	Mengajukan Pengadaan sarana dan Prasarana (mobil operasional)
9	Kelembagaan Pemadam Kebakaran di kabupaten klaten masih di tingkat seksi belum mampu secara optimal untuk memenuhi pelayanan dasar.	Perlunya peningkatan kelembagaan pemadam kebakaran untuk bisa sejajar dengan penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar lainya.	Mengusulkan peningkatan kelembagaan pemadam kebakaran untuk bisa sejajar dengan penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar lainya.
10	Kurangnya koordinasi antar instansi/dinas tekait pencegahan, pengendalian, inpeksi dan penanggulangan kebakaran.	Peningkatan koordinasi, dan keterlibatan aparatur pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran.	Di adakannya koordinasi antar instansi/dinas tekait pencegahan, pengendalian, inpeksi dan penanggulangan kebakaran.
11	Kurangnya jumlah unit kendaraan operasional pemadam kebakaran untuk menjangkau wilayah kabupaten klaten (401 desa).	Perlunya penambahan kendaraan operasional Pemadam kebakaran,	penambahan kendaraan operasional Pemadam kebakaran, Idealnya untuk Kabupaten Klaten masih kurang 5 unit mobil pompa, 2 unit mobil rescue, 2 mobil komando, dan 4 mobil suply)

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
12	Masih kurangnya peralatan pemadam (alat pelindung diri : baju, sepatu, Helm, Jaket+Celana Tahan Panas, Sarung Tangan, Sepatu Boot dan Masker Full Face)	Perlunya penambahan Alat Pelindung Diri bagi Personil Pemadam kebakaran.	Penambahan Alat Pelindung Diri bagi Personil Pemadam kebakaran.
13	Masih kurangnya peralatan rescue, untuk melaksanakan tugas-tugas penyelamatan.	Perlunya terpenuhinya peralatan rescue untuk menunjang tugas-tugas penyelamatan.	Mengusulkan penambahan pengadaan peralatan rescue untuk menunjang tugas-tugas penyelamatan.
14	Jumlah personil pemadam kebakaran yang sangat sedikit dan secara kapasitas masih perlu ditingkatkan kualifikasinya.	Perlu penambahan pesonil pemadam kebakaran diiringi dengan peningkatan kapasitas anggota pemadam kebakaran.	Perlu penambahan pesonil pemadam kebakaran (THL)
15	Kesejahteraan anggota (THL) pemadam kebakaran yang masih minim, dengan resiko pelaksanaan tugas yang cukup tinggi.	Perlunya peningkatan kesejahteraan dan pemberian tunjangan resiko kerja bagi petugas pemadam kebakaran	Perlunya peningkatan kesejahteraan dan pemberian tunjangan resiko kerja bagi petugas pemadam kebakaran
16	Jumlah pos pemadam yang hanya 1, tidak bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten, sehingga standar respon time yang 7 km dalam 15 menit seringkali tidak terpenuhi.	Untuk menjangkau wilayah Kabupaten di perbatasan diadakannya Kerjasama dengan Pemadam Kebakaran Kabupaten tetangga untuk mengatasi wilayah perbatasan	Penambahan Pos Pemadam Kebakaran di daerah, sesuai kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) kabupaten Klaten (Th 2011) untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten setidaknya harus ada 13 Pos pemadam kebakaran.
17	Hidran kota yang ada di wilayah kabupaten klaten sebagian besar sudah rusak dan tidak berfungsi dengan baik.	Hidran Kota yang sudah ada diperlukan pemeliharaan dan diperlukan penambahan hidran di wilayah kecamatan yang belum ada hidran sebagai sumber air untuk pemadam kebakaran.	Perlunya penambahan hidran di wilayah kecamatan
18	Banyaknya laporan penanganan tawon dan binatang lainya sehingga petugas bekerja cukup ekstra dan kewalahan dalam pelayanannya.	Perlu tambahan personil dan peralatan yang memadai untuk operasi tangkap tawon, animal rescue dan penanganan hewan lainya.	Perlunya tambahan personil dan peralatan yang memadai untuk operasi tangkap tawon, animal rescue dan penanganan hewan lainya.serta pembentukan dan pelatihan Relawan
19	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan sebagian warga masyaraat Klaten dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Perlunya kesadaran masyarakat /sosialisasi tentang bahaya tawon dan untuk antisipasinya perlunya pemberdayaan satuan relawan dan dalam penanganan diperlukan keterlibatan instansi terkait (SAR, tenaga medis dan para ahli).	sosialisasi tentang bahaya tawon dan untuk antisipasinya perlunya pemberdayaan satuan relawan dan dalam penanganan diperlukan keterlibatan instansi terkait (SAR, tenaga medis dan para ahli).

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
20	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan kebakaran Kebakaran.	Perlu dibentuk Satlakar (Satuan Relawan Relawan Kebakaran)	Perlu dibentuk dan diadakan pelatihan Satlakar (Satuan Relawan Relawan Kebakaran)
21.	Status kelembagaan yang belum jelas mempengaruhi beban kerja tugas pokok fungsi yang diemban Kantor Kesbangpol Kabupaten Klaten	Mengusulkan segera dibentuk Badan Kesbangpol sebagai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019	Memantau dan melakukan persiapan kelembagaan berbentuk badan
22.	Keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan program kegiatan yang dipengaruhi oleh kelemahan perencanan anggaran dan kekosongan jabatan.	Mengusulkan pengisian pejabat baru yang kompeten di bidangnya serta meningkatkan pengendalian pelaksanaan program kegiatan	Memperbaiki time schedule dan meningkatkan kapasitas perencanaan
23.	Kekurangan inventarisasi data variabel yang mendukung indeks demokrasi daerah.	Perlunya peningkatan koordinasi pokja Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Klaten	Membuat mapping program dan aksi
24.	Kekurangan pegawai yang ahli di bidang ilmu teknologi (IT) sehingga belum memiliki data maupun informasi berbasis teknologi.	Mengusulkan penambahan pegawai yang ahli di bidang ilmu teknologi (IT)	Menugaskan THL bidang administrasi untuk melaksanakan tugas di bidang IT
25.	Belum tersusunnya Peraturan daerah sesuai tugas pokok fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik	Mengusulkan penambahan pegawai yang ahli di bidang ilmu teknologi (IT)	Menugaskan THL bidang administrasi untuk melaksanakan tugas di bidang IT

9) Prestasi dan Inovasi

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2019, Kantor Kesbangpol seabagai salah satu pelaksana program urusan tersebut mendapat penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia atas prestasi Partisipasi Aktif Pemilu Serentak tahun 2019.

Selain prestasi/Penghargaan tersebut terdapat inovasi yang dkembangkan dalam pelaksanaan program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. ***Satpol PP Go To School***

   Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di seluruh wilayah Kab. Klaten. Maka dapatlah dilihat betapa luasnya cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan-permasalahan pelanggaran perda terjadi merata di seluruh wilayah Kabupaten Klaten yang semuanya harus segera ditangani dan diatasi. Salah satu upaya untuk mencegah terjadi pelanggaran perda adalah memberikan pendidikan kesadaran hukum secara dini kepada masyarakat. Sasaran konkret upaya tersebut adalah personil Satpol PP terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi pentingya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan hukum. Target jangka pendeknya supaya pelajar tertib dalam bersekolah dengan tidak membolos dan mematuhi aturan sekolah.

2. *Damkar Go To School*

   Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana lainnya, pengevakuasian sarang tawon, menanggulangi pohon tumbang, dan sebagainya. Pemadam kebakaran juga ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebakaran dan cara menanggapinya. Dalam rangka sosialisasi dan pendidikan kebakaran, Damkar Kab. Klaten terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan simulasi kepada warga sekolah terhadap pencegahan, penyelamatan, dan layanan response time penanggulangan kebakaran.

VI. Urusan Sosial

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial pada tahun 2019 adalah Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Satpol PP, Bagian Kesra, BPBD dan Kecamatan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan sosial beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang sosial dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan penanganan PMKS	%	44,78	62,26	139
Pemberdayaan fakir Miskin, Komonitas Adat terpencil (CAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	98	62,26	63,53
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	26	2,88	11,1
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	%	**1,1**	0,13	11,8
	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	100,0
	Prosentase Organisasi /lembaga yang terfasilitasi	%	90	100	111

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Keagamaan	Prosentasi Kehadiiran Masyarakat	%	90	90	100
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase kehadiran pengunjung makam yang bersejarah	%	100	100	100
	Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	%	28	16,12	57,6
Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100,0
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100,0
	Persentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana	%	100	100	100,0
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	96	100	104,1
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	%	100	100	100,0
Penyelenggaran Penanggulangan Bencana	Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	orang	225	225	100,0
	Jumlah Desa Tangguh Bencana	desa	2	2	100,0
	Sekolah Sungai	Komunitas	3	3	100,0
	Sekolah Siaga Bencana	Sekolah	15	15	100,0
Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Kawasan Bencana	%	100	100	100
Peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Persentase kehadiran peserta sosialisasi	%	80	90	112,5

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.18
Data Pegawai Urusan Sosial

1.	Jumlah Pegawai		:	33	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan				
	a)	SD	:	1	Orang
	b)	SLTA	:	7	Orang
	c)	Diploma 3&4	:	4	Orang
	d)	S- 1	:	15	Orang
	e)	S- 2	:	6	Orang
3.	Pangkat dan Golongan				
	a)	Pengatur Muda	:	1	Orang
	b)	Pengatur Muda Tk I	:	3	Orang
	c)	Pengatur	:	1	Orang
	d)	Pengatur Tk I	:	2	Orang
	e)	Penata Muda Tk I	:	5	Orang
	f)	Penata	:	7	Orang
	g)	Penata Tk I	:	6	Orang
	h)	Pembina	:	3	Orang
	i)	Pembina Tk I	:	4	Orang
	j)	Pembina Utama Muda	:	1	Orang
4.	Jml Pejabat Struktural		:	8	Orang
5.	Jml Pejabat Fungsional		:	13	Orang
	JML		:	33	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Satpol PP, Bagian Kesra, BPBD dan Kecamatan. Urusan Wajib pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 30.153.502.340,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp**.**24.839.779.508,- atau 82,37%. Adapun Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.371.243.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.256.133.327,- atau sebesar 79,23%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Sosial disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan sosial kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib di bidang Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Desa belum begitu paham pentingnya pemutakhiran data warga miskin	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Peningkatan Kapasitas SDM Operator Desa
2.	Seringnya pergantian operator data di tingkat desa.	sosialisasi dan himbauan agar operator konsisten dan terlalu sering dilakukan pergantian	Penetapan Operator Desa
3.	masih ada desa yang belum membentuk TKPKDes.	Sosialisasi peran dan fungsi TKPKDes	Pembentukan TKPKDes dengan SK Kepala Desa
4.	Tupoksi operator desa masih banyak (Menghandle banyak pekerjaan)	Himbauan agar distribusi pekerjaan di ratakan	Pemerataan Distribusi Pekerjaan

b. Ringkasan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar

I. Urusan Tenaga Kerja

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Tenaga kerja pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan tenaga kerja beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar di Bidang Tenaga Kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	%	1.795	971,58	54,1
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	81*	117,2
	*data berasal dari Disperinaker Kab. Klaten berdasarkan perhitungan menggunakan data kependudukan dari Disdukcapil				
	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,05	1,00	95,2
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	58	59,26	102,2
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	80,00	66,67	83,3
	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	‰	*6,10*	*10,06*	164,9
Peningkatan Kesempatan Kerja	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99,00	92,12	93,1
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25,30	17,27	68,26

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat dalam tabel 3.21

Tabel 3.21
Data Pegawai Pelaksana Urusan Tenaga Kerja

1.	Jumlah Pegawai		:	10	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan				
	a)	S- 1	:	9	Orang
	b)	S- 2 / S-3	:	1	Orang
3.	Pangkat dan Golongan				
	a)	Penata Muda Tk I	:	1	Orang
	b)	Penata	:	2	Orang
	c)	Penata Tk I	:	4	Orang
	d)	Pembina	:	1	Orang
	e)	Pembina Tk I	:	2	Orang
4.	Jml Pejabat Struktural		:	2	Orang
5.	Jml Pejabat Fungsional		:		Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.879.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.760.093.074,- atau 86,5%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Tenaga Kerja disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan tenaga kerja kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar Tenaga kerja pada tahun 2019 dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Permasalahan dan Solusi urusan tenaga kerja tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Kesulitan mencari peserta yang akan dilatih dalam kegiatan Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Koordinasi dengan para Kepala Desa di Desa daerah miskin untuk mengirimkan peserta	Setelah kita koordinasikan dengan kepala desa kita laksanakan survey untuk mengetahui kondisi peserta
2	Masih Kurangnya Informasi Pekerjaan Kepada Pencari Kerja	Sosialisasi Lowongan Pekerjaan Ke Desa - Desa	Menyebarluaskan Lowongan Kerja Ke Sosial Media
3	Tidak Sesuainya Pencari Kerja Dengan Lowongan Pekerjaan Yang Ada	Memberikan Pelatihan - Pelatihan Ketrampilan Untuk Siap Kerja	Pembangunan Balai Latihan Kerja
4	Masih Ada Perusahaan yang Belum Melaksanakan UMK	Melakukan Pembinaan Dan Sosialisasi Kepada Perusahaan - Perusahaan	Melakukan Pembinaan, Sosialisasi Dan Pemantauan Pelaksanaan UMK di Perusahaan - Perusahaan

II. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel 3.23

Tabel 3.23
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Produk Kebijakan PUG dan Anak	dokumen	10	5	50
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	%	65	60	92,3
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	rasio	4,90	0,57	188
	*Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Rasio perempuan korban kekerasan	rasio	1,40	3,36	-(40)*
	*Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
Peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	%	100	11,7	11,7

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.24
Data Pegawai Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

1.	Jumlah Pegawai		:	5	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan				
	a)	SLTA	:	1	Orang
	b)	S- 1	:	2	Orang
	c)	S- 2	:	2	Orang
3.	Pangkat dan Golongan				
	a)	Penata Muda Tk I	:	1	Orang
	b)	Penata	:	2	Orang
	c)	Penata Tk I	:	1	Orang
	d)	Pembina	:	1	Orang
4.	Jml Pejabat Struktural		:	3	Orang
5.	Jml Pejabat Fungsional		:		Orang

	JML	:	5	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.695.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.615.876.580,- atau sebesar 88,6%

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak beserta solusi dan rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak	Mengoptimalkan semua OPD untuk membuat Perencanaan & Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan mengoptimalkan fungsi dari tim Driver yang terdiri dari Bappeda, BPKD, Inspektorat dan DISSOSP3AKB untuk DPA 2020	Meningkatkan koordinasi dengan OPD serta meningkatkan peran dan fungsi dari Pokja dan Tim Tehnis PUG dengan target Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
2.	Kasus kekerasan anak dan perempuan cukup tinggi	Sosialisasi Deteksi Dini kekerasan Terhadap Anak di sekolah melalui pembentukan agen perubahan dan disiplin positif, Sosialisasi tentang kekerasan perempuan baik	Melaksanakan pembentukan agen perubahan dan disiplin positip di SMP dengan TOT, memberdayakan pelayanan terpadu di wilayah-wilayah

		kekerasan di fasilitas umum maupun rumah tangga	kecamatan

9) Prestasi dan Inovasi

Dalam pelaksanaan program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada tahun 2019, terdapat Prestasi/Penghargaan tingkat nasional yang diperoleh, yaitu Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya. Penghargaan diberikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selain penghargaan tersebut, terdapat inovasi yaitu pembentukan tim roots di sekolah-sekolah untuk menanggulangi kasus kekerasan anak di sekolah.

III. Urusan Pangan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pangan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pangan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Pangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.26
Indikator Kinerja dan Capaian kinerja
Urusan Pangan tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)	92,75	92,75	100,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pangan dapat dilihat dalam tabel 3.27

Tabel 3.27
Data Pegawai Urusan Pangan

1	Jumlah Pegawai	:	19
2	Kualifikasi Pendidikan		
	SLTA	:	1
	S- 1	:	11
	S- 2 / S-3	:	7
3	Pangkat dan Golongan		
	Pengatur Muda Tk I	:	1
	Penata Muda Tk I	:	3
	Penata	:	6
	Penata Tk I	:	4
	Pembina	:	5
4	Jml Pejabat Struktural	:	4
5	Jml Pejabat Fungsional	:	6

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.436.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.324.289.220,- atau realisasi keuangan sebesar 92,2%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Pangan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pangan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Pangan dan solusi yang ditempuh untuk

mengatasi pemasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Permasalahan dan Solusi Urusan Pangan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Database terkait daerah rawan pangan dan gizi belum sampai pemetaan tingkat desa	Penyusunan peta food security and vulnerability atlas (FSVA) tingkat Kabupaten Klaten dimana analisisnya sampai dengan desa	Membuat FSVA tingkat Kabupaten Klaten
2	Database kelembagaan kelompok wanita tani (KWT) sampai sekarang belum terdata secara keseluruhan	Perlu didata ulang dan dibuat minimal SK Kepala Dinas	Melakukan pendataan KWT di Kabupaten Klaten
3	Masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal lahan pekarangan	Perlu difasilitasi bantuan pemanfaatan pekarangan	Memberikan fasilitasi melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan
4	Cadangan pangan belum semua terdistribusi	Perlu dipertimbangkan kebijakan sasaran bukan hanya untuk daerah rawan pangan dan bencana alam, melainkan juga untuk masyarakat miskin	Meningkatkan peran lembaga distribusi melalui kegiatan penguatan LDPM

9) Prestasi

Pada tahun 2019 dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pangan mendapat penghargaan/prestasi Juara Harapan II dalam Lomba Makanan Khas Jawa Tengah Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

IV. Urusan Lingkungan Hidup

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan Kelurahan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Lingkungan Hidup beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.29
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan	%	16,63	17,19	103,3
	Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat	%	10,0%	10,0%	100,3
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	27%	27%	99,0
	Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga	%	60	60	100,0
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	100%	100,0	100,0
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	%	100%	100,0	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	%	100%	100%	100,0
	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	85%	85%	100,0
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	100%	100%	100,0
	Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan	%	100%	100%	100,0
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	ha	0,15	0,57	380
	Luasan hutan kota	ha	3,8	3,8	100,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.30
Data Pegawai Urusan Lingkungan Hidup

1	**JUMLAH PEGAWAI**	**:**	**21**
2	**KUALIFIKASI PENDIDIKAN**		
	SLTA	**:**	1
	S-1	**:**	9
	S-2	**:**	11
3	**PANGKAT dan GOLONGAN**		
	Penata Muda/IIIa	**:**	3
	Penata Muda Tk.I/IIIb	**:**	2
	Penata/IIIc		5
	Penata Tk.I/IIId		2
	Pembina/IVa	**:**	8
	Pembina Tk.I/IVb	**:**	1
4	**JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL**	**:**	12
5	**JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL**	**:**	-

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Perangkat Daerah yang melaksanaan Program urusan Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPU PR, Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksanaan Program tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.42.883.961.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.571.066.568,- atau 82,9%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.147.638.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.843.331.616 atau sebesar 85,8%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Lingkungan Hidup disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31
Permasalahan dan Solusi Urusan Lingkungan hidup tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya.	Koordinasi dengan Dinas PU PR agar bisa memperluas lahan terbuka hijau dan terus mengusahakan peningkatan kualitas RTH dengan mengadakaan penghijauan di lingkungan RTH	Tahun 2020 rencana dibuka lahan Terbuka Hijau di belakang taman lampion
2	Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan dikarenakan belum adanya Pejabat Fungsional Pengawasan di bidang Lingkungan Hidup atau Tim Pengawasan dari OPD terkait	Perlu penunjukan Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau Pembentukan Tim Pengawas yang diangkat oleh BUpati	-
3	Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL).	Melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan industri tentang pentingnya suatu kegiatan usaha untuk mengelola limbahnya.	Melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan industri tentang pentingnya suatu kegiatan usaha untuk mengelola limbahnya.
4.	Peningkatan pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan	Melakukan Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

9) Prestasi/Penghargaan yang diterima

Selama tahun 2019, terdapat beberapa penghargaan / prestasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup. Penghargaan / prestasi tersebut antara lain :

1. Penghargaan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada SMK N 2 KLaten sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional tahun 2019.
2. Penghargaan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada SMA N 1 KLaten sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional tahun 2019.

3. Penghargaan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada SMA N 3 KLaten sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional tahun 2019.
4. Prestasi Lomba Penghematan Energi dan Air Kategori Instansi Pemerintah 2019 dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

V. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Administrasi Kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.32
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jumlah Akte	138.310	311.239	225,03
	Penduduk berakte kelahiran	%	93,7	91,3	97,4
	Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun	%	92,81	89,91	96,8
	Jml Akte Pernikahan per tahun	Jumlah Akte	525	472	**89,9**
	Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non muslim)	%	263.150	251.123	**95,4**
	Kepemilikan KTP	Jumlah KTP	946.150	961.542	**101,6**
	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0,9	89,97	**9.996,7**
	Cakupan penerbitan KTP	%	90,3	89,91	**99,57**
	Penerbitan Akte kematian	akta kematian	2.400	3.731	**155,4**
	Keluarga mempunyai KK	%	96,7	96,47	**99,8**

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.33
Data Pegawai Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

1	**Jumlah Pegawai**		:	37	Orang
2	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SLTP	:	1	Orang
	b)	SLTA	:	9	Orang
	c)	Diploma	:	5	Orang
	d)	S- 1	:	9	Orang
	e)	S- 2 / S-3	:	13	Orang
3	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Pengatur	:	1	Orang
	b)	Pengatur Tk I	:	3	Orang
	c)	Penata Muda	:	2	Orang
	d)	Penata Muda Tk I	:	10	Orang
	e)	Penata	:	7	Orang
	f)	Penata Tk I	:	7	Orang
	g)	Pembina	:	5	Orang
	h)	Pembina Tk I	:	1	Orang
	i)	Pembina Utama Muda	:	1	Orang
4	**Jumlah Pejabat Struktural**		:	17	Orang
5	**Jumlah Pejabat Fungsional**		:	6	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 7.164.896.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.502.483.827,- atau realisasi keuangan sebesar 90,8%. adapun alokasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.976.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.381.460.207,- atau sebesar 85%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil disesuaikan dengan RPJMD

Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34
Permasalahan dan Solusi Urusan Adm. Kependudukan dan Capil tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Tidak seluruh penduduk Klaten tercatat sebagai WN/Penduduk Klaten	1. Sosialiasi kepada masyarakat melalui siaran radio,organisasimasyarakat, spanduk, toga,tomas/pamflet 2. Verifikasi lapangan	Sosialisasi lebih intensif dengn inovasi metode
2	Kesalahan data dalam dokumen akta	1. Checklist pemberkasan awal 2. Verifikasi lapangan	1. Verifikasi lapangan lebih intensif 2. Checklist penerbitan awal 3. Pencocokkan data saat penyerahan akta, yaitu dengan cara membuat tanda terima dan checklist
3	Tidak dapat melakukan input data	Kerjasama dengan Kominfo	Backup sistem jaringan, berupa : (1) untuk backup data lokal dengan cara pengalihan/pemindahan jaringan internet dari IP lokal ke IP Publik, (2) untuk backup data nasional/SIAK Konsolidasi dengan cara pengalihan/pemindahan jaringan internet dari VPN (Virtual Protocol Network) ke IP Publik
4	Ada perbedaan antara data layanan dengan Data konsolidasi bersih	Melakukan verifikasi dan klarifikasi data layanan ke perangkat desa	Melakukan updating data secara periodik dengan aparatur desa secara manual dan aplikasi
5	Ada perbedaan antara data yang tertulis dengan kenyataan	1. Verifikasi dan klarifikasi lapangan 2. Updating data kependudukan sesuai dengan kenyataan	Verifikasi dan klarifikasi lapangan bagi data yang mencurigakan

9) Prestasi dan Inovasi

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019, terdapat penghargaan yang diterima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada Disdukcapil Kabupaten Klaten sebagai "Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik dengan Catatan" tahun 2019. Selain penghargaan tersebut, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut sebagai berikut:

NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
SMARD ON LINE	Pelayanan OnLine Disdukcapil ke Desa-desa meliputi : Update Data, Pembetulan Data, Akta Kelahiran OnLine, Akta Kematian On Line
PELAUT BALA	Memberikan Pelayanan kepada kaum Difabel, Disabilitas, dan Berkebutuhan Khusus
BUAH HATI	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat tentang Akta Kelahiran secara Online lewat Program SIAK
4 IN 1	Masyarakat mengurus akta kelahiran langsung mendapatkan NIK, KK, Akta Kelairan dan KIA
DUKA TAMAT (Berduka Bawakan Akta Kematian)	Memberikan Pelayanan Akta Kematian Melalui Program Smard Online

VI. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Kelurahan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.35
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat	%	33	33	**100**
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	%	65	**65**	**100**
Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	%	58	77	**132**
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	64	**64**	**100**
Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	LKM /BKM/ LPMD	782	**782**	**100**

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Prosentase Peningkatan Administrasi Perencanaan Desa	%	100	**95**	**95**

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.36
Data Pegawai Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.	**Jumlah Pegawai**		:	35	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SLTA	:	12	Orang
	b)	Diploma	:	3	Orang
	c)	S- 1	:	10	Orang
	d)	S- 2 / s -3	:	10	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Pengatur Muda Tk I	:	2	Orang
	b)	Penata Muda	:	2	Orang
	c)	Penata Muda Tk I	:	13	Orang
	d)	Penata	:	3	Orang
	e)	Penata Tk I	:	6	Orang
	f)	Pembina	:	8	Orang
	g)	Pembina Utama Muda	:	1	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	12	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	1	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Perangkat daerah yang melaksankaan program terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan serta Kelurahan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.4.981.029.299,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.611.096.607,- atau sebesar 92,6%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.411.576.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.009.535.411,- atau sebesar 88,2%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten

tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37
Permasalahan, Solusi dan rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Aparat / perangkat desa baru belum menguasai aplikasi siskeudes	Meyelenggarakan bintek siskeudes bagi perangkat desa baru.	Pendampingan aplikasi
2	Belum ada kelengkapan dan peralatan untuk mendukung kegiatan SID	Penyusunan draf perbup SID dan mengusulkan kelengkapannya	Implementasi perbup
3	Inventarisasi tanah kas/asset desa belum maksimal	Mendampingi desa dalam menginventarisasi asset	Menata aset kas desa/asset desa
4.	Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang pedoman peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan administrasi pemerintahan dan keuangan di desa	Pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Pendampingan kepada Perangkat Desa

9) Prestasi/ Penghargaan

Pada tahun 2019 terdapat beberapa prestasi/penghargaan dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat Desa. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Penghargaan/Prestasi Urusan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN/PRESTASI	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Pemenang III lomba pelaksanaan terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kesehatan Tk. Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tibayan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten.	Gubernur Jawa Tengah
2	Pemenang III Pelaksanaan Terbaik Pos Pelayanan	Gubernur Jawa

	Terpadu Tk. Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 kepada Pos Pelayanan Terpadu SIWI ASIH III Desa Gatak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.	Tengah
3	Pemenang II Pelaksanaan Terbaik Tertib Administrasi PKK, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Tahun 2019 kepada Desa Bono, Kec. Tulung, Kab. Klaten.	TP PKK Provinsi

VII. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Bagian Kesra

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 39
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Keluarga Berencana	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	65	71,99	109
	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	5,1	9,05	*22,5
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	%	8,97	15,91	*22,6
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (*age spesific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old*)	Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun	35	**0.0354**	**199,8**

	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
Pelayanan kontrasepsi	DO KB	%	15	9,05	*139
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
NAMA PROGRAM	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM**	**SATUAN**	**TARGET 2019**	**REALISASI 2019**	**CAPAIAN KINERJA (%)**
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera	%	28	45,15	**38,75**
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Persentase peserta KB mandiri	%	91	63,3	70,3
Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat					
	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	%	75	72,43	96,6
	Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif	%	75	70,74	94,3
	Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif	%	80	74,84	93,6
	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	%	65	72,73	111,9
Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					
	Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	BKB	641	561	87,5
	Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	BKR	286	228	79,7
	Jumlah tenaga pendamping kelompok Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL)	BKL	484	408	84,3
	Jumlah tenaga pendamping kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	UPPKS	596	495	83,1
Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga Pra sejahtera dan KS I	%	30	45,15	*49,5
	*(2 x target – realisasi) / target x 100%				
Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan	Persentase anggota kelompok BKB, BKR dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan	%	21	69,13	329,2

tumbuh kembang anak					
Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Peserta Kb Mandiri	%	90	63,3	70,3

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.40
Data Pegawai Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana

1.	Jumlah Pegawai		:	8	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan				
	a)	Diploma 1	:	1	Orang
	b)	S- 1	:	5	Orang
	c)	S- 2	:	2	Orang
3.	Pangkat dan Golongan				
	a)	Penata Muda	:	1	Orang
	b)	Penata	:	2	Orang
	c)	Penata Tk I	:	3	Orang
	d)	Pembina	:	2	Orang
4.	Jml Pejabat Struktural		:	3	Orang
5.	Jml Pejabat Fungsional		:		Orang
	JUMLAH		:	8	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Bagian Kesra. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.9.580.809.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.153.283.738 atau sebesar 85,1%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana disesuaikan dengan RPJMD

Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41
Permasalahan dan Solusi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

NO	PEMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih kurangnya dukungan kebijakan daerah untuk pembangunan kependudukan dan KB	Tersusunnya GDPK Tahun 2021-2026 melalui Advocasi penyusunan GDPK, meningkatkan peran kolalisi kependudukan	Penguatan dukungan TAPD, Linsek dalam kelembagaan
2	Kurangnya SDM terlatih pemberi layanan KB Implant dan IUD (CTU) dan belum adanya tenaga terlatih pelayanan MOP di faskes/ K0	Meningkatkan pelayanan dengan koordinasi linsek untuk optimalkan SDM yang ada dan Menjalin kerjasama dengan faskes klinik swasta dalam pelayanan MOP,	Penguatan kerjasama Linsek (Kesehatan dan mitra kerja)
3	Masih tingginya angka Unmed need/Kebutuhan KB yang tidak terlayani (15,91%)	optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan F1 dan konseling	meningkatkan kemampuan petugas dalam sistem pencatatan dan pelaporan F1 dan konseling pemilihan metode kontrasepsi bagi PUS
4	Tidak adanya dukungan pelayanan KB bagi keluarga miskin yang belum menjadi anggota BPJS	Masyarakat miskin tetap mendapatkan pelayanan KB melalui pelayanan KB	Mendorong masyarakat menjadi peserta BPJS Mandiri atau KB Mandiri. Serta mendorong pemerintah menyediaan dukungan anggaran untuk pelayanan KB Gratis

VIII. Urusan Perhubungan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perhubungan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perhubungan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.42
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perhubungan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio ijin trayek	kendaraan/jiwa	0,000229	0,000328	143,2
	Indeks kepuasan layanan angkutan umum	indeks	72,17	79,75	110,5
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km/kendaraan	0,002452	0,001180	48,1
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	jiwa	1.394.353	380.145	27,3
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	%	86	83,33	96,9
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan perlengkapan jalan	%	33,38	53,49	160,2
	Prosentase perlengkapan jalan terpasang	%	36,96	87,00	235,4

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji	kendaraan	12558	29134	232,0
	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	87,85	60,8	69,2
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	40	40	100,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.43
Data Pegawai Urusan Perhubungan

Jumlah Pegawai		55	Orang
Kualifikasi Pendidikan			
a)	SD	2	Orang
b)	SLTP	3	Orang
c)	SLTA	22	Orang
d)	Diploma	10	Orang
e)	S- 1	9	Orang
f)	S- 2	9	Orang
Pangkat dan Golongan			
a)	Juru	1	Orang
b)	Juru Tk I	1	Orang
c)	Pengatur Muda	5	
d)	Pengatur Muda Tk I	7	Orang
e)	Pengatur	10	Orang
f)	Pengatur Tk I	4	Orang
g)	Penata Muda	4	Orang
h)	Penata Muda Tk I	10	Orang
i)	Penata	6	Orang
j)	Penata Tk I	2	Orang
k)	Pembina	3	Orang
l)	Pembina Tk I	1	Orang
m)	Pembina Utama Muda	1	Orang
Jml Pejabat Struktural		10	Orang
Jml Pejabat Fungsional		8	Orang
JML		**55**	**Orang**

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 10.727.723.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.588.806.182,- atau 89,4%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.902.909.750 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.260.024.875,- atau sebesar 86,9%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Perhubungan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Perhubungan pada tahun 2019 beserta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.44
Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan urusan Perhubungan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Kurangnya SDM untuk ditempatkan pada ruang CCRoom ATCS.	Menambah SDM untuk ditempatkan pada ruang CCRoom ATCS.	Mengusulkan/membuka formasi tenaga teknis bidang perhubungan dalam rekruitmen CPNS tahun 2020.
2	Gedung Pengujian rawan banjir.	Penempatan alat uji /lantai pengujian di bawah jalan agar ditinggikan dan air hujan bias mengalir kesaluran yang ada.	Menyelamatkan alat uji dan kelengkapannya supaya tidak cepat rusak sehingga pelayanan lebih optimal.
3	Daya listrik dan intalasi PLN sering drop	Penambahan daya listrik agar cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik.	Penambahan daya listrik.

9) Prestasi / Penghargaan

Dalam pelaksanaan Program urusan Perhubungan, Pemerintah Kabupeten Klaten mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.

IX. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.45
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Komunikasi dan Informatika

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan telekomunikasi	%	53,6	53,6	100,0
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	73	73	100,0
	Persentase pelayanan publik dan nonpublik berbasis e-government	%	60	49	81,7
Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase penanganan pelayanan pengaduan masyarakat	%	100	96,5	96,5
Peningkatan SDM bidang komunikasi	Persentase SDM bidang komunikasi dan informasi	%	33,33	39	117,0

dan informasi	terlatih				
NAMA PROGRAM	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM**	**SATUAN**	**TARGET 2019**	**REALISASI 2019**	**CAPAIAN KINERJA (%)**
Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase event kabupaten terpublikasi	%	90	90	100,0
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor	60	74	123,3
	Persentase Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Massa	%	100	100	100,0
	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	%	100	100	100,0
	Persentase Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial	%%	100	100	100,0
	Persentase publikasi Kepala Daerah melalui penyuluhan dan media papan ruang	%	100	100	100,0
	Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui radio	%	90	85	94,4
	Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui komunikasi budaya	%	95	93	97,9

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.46
Data Pegawai Urusan Komunikasi dan Informatika

1	**Jumlah Pegawai**		:	22
2	**Kualifikasi Pendidikan**			
	a)	SD	:	1

	b)	SLTA	:	3
	c)	Diploma 3 & 4	:	1
	d)	S-1	:	10
	e)	S-2	:	7
3	**Pangkat dan Golongan**			
	a)	Pengatur Muda	:	1
	b)	Pengatur	:	1
	c)	Penata Muda	:	2
	d)	Penata Muda Tk I	:	4
	e)	Penata	:	6
	f)	Penata Tk I	:	3
	g)	Pembina	:	4
	h)	Pembina Tk I	:	1
4	**Jumlah Pejabat Struktural**		:	8
5	**Jumlah Pejabat Fungsional**		:	2
		Jumlah		**22**

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.12.279.037.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.397.880.114,- atau 92,8%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.218.217.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.006.916.350,- atau sebesar 90,5%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 3.47
Permasalahan dan Solusi
pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2019

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Aplikasi E-office dan DILAN belum bisa 100% dilaksanakan pada tahun 2019 karena beberapa fitur belum lengkap terpasang.	Perencanaan Tahun 2020 mengakomodir penyempurnaan fitur sehingga bisa segera diserahkan kepada OPD dan Desa untuk implementasi	Bimtek tahap lanjut akan dilaksanakan tahun 2020 dengan melibatkan pranata komputer baik dari OPD untuk aplikasi E-Office maupun desa untuk aplikasi DILAN
2	Sarana prasarana yang belum representatif, misal ruang server yang tidak sesuai standart.	Menyusun DED Interior Kantor Kominfo terutama untuk ruang server dan ruang lain yang mendukung kualitas pelayanan di bidang komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klaten	Bimtek tahap lanjut akan dilaksanakan tahun 2020 dengan melibatkan pranata komputer baik dari OPD untuk aplikasi E-Office maupun desa untuk aplikasi DILAN
3	Terbatasnya sarana transportasi untuk Tim liputan dalam rangka penyebarluasan informasi pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selain itu sarana transportasi juga dibutuhkan untuk Tim Jaringan Komunikasi untuk koordinasi lapangan apabila terjadi kendala teknis di seluruh wilayah	Selama ini mengikuti jadwal Kantor Humas pada saat peliputan sehingga mempengaruhi kualitas berita yang dapat diinformasikan kepada masyarakat (hampir sama dengan Kantor Humas). Sementara itu Tim Jaringan Komunikasi menggunakan kendaraan pribadi roda 2 yang akan terkendala apabila cuaca hujan dan	Dinas Kominfo sudah mengajukan permohonan penyediaan kendaraan khusus untuk pelliputan karena jenis berita yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat adalah peliputan terkait even pada H-3 dan H+3, sehingga berbeda dengan materi berita yang disampaikan

	Kabupaten Klaten.	kondisi malam hari.	Kantor Humas.

X. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada tahun 2019 adalah oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Kecamatan

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) **Tingkat Pencapaian Kinerja**

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.48
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	orang	55.066	55.066	100,0
	Persentase pertumbuhan UMKM	%	0,36320	0,1	27,5
	Persentase UMKM yang memiliki keunggulan kompetitif	%	3,94	3,60	91,4
	Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi produk halal	UMKM	75	69	92,0
Pengembangan Sistem Pendukung	Jumlah promosi produk unggulan daerah (pameran)	Promosi	6	6	100,0

Usaha Bagi UMKM	Persentase promosi produk UKM	%	50	193	386,0
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	80,18	69,85	87,1
	Pertumbuhan koperasi	unit	1.006	889	88,4
	Persentase pertumbuhan koperasi	%	0,028	0,0034	12,3
	Jumlah manajer koperasi bersertifikasi	orang	65	65	100,0
	Persentase manajer koperasi yang bersertifikasi	%	11,68	13	112,2
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah produk unggulan wilayah	kelompok	26	26	100,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.49
Data Pegawai Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah

Jumlah Pegawai		12	Orang
Kualifikasi Pendidikan			
a)	SLTA	4	Orang
b)	S- 1	5	Orang
c)	S- 2	3	Orang
Pangkat dan Golongan			
a)	Penata Muda	2	Orang
b)	Penata Muda Tk I	3	Orang
c)	Penata	2	Orang
d)	Penata Tk I	1	Orang
e)	Pembina	4	Orang
Jml Pejabat Struktural		3	Orang
Jml Pejabat Fungsional			Orang
JML		**12**	**Orang**

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Kecamatan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.489.991.436,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.134.900.011,- atau sebesar 85,7%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50
Permasalahan dan Solusi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Pelaksanaan pengawasan koperasi, identifikasi koperasi dan pendataan Nomor Induk Koperasi belum optimal	Penanganan yang sudah dilakukan untuk Bidang Koperasi yaitu : Pengawasan terhadap Koperasi yang kurang sehat, Pembubaran koperasi yang tidak aktif, Pendataan NIK dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Untuk Pembinaan koperasi yang kurang sehat dengan penyelenggaraan pelatihan, pengawasan koperasi dan pembinaan koperasi
2	Permasalahan Usaha Mikro dan Kecil terkait Masalah Manajemen usaha, masih sederhana	Penanganan yang yang sudah dilakukan bagi UKM dengan langkah : - Pelatihan manajemen usaha dan administrasi keuangan / akuntansi sederhana	- Untuk UKM Pelatihan manajemen usaha dan pendampingan konsultasi terkait manajemen usaha

	dan belum menyusun pelaporan keuangan, masalah permodalan, Ketrampilan SDM yang masih terbatas dan Akses pemasaran masih terbatas	- Sosialisasi / fasilitasi akses permodalan dengan pihak Bank, BUMN, BUMD, - Pelatihan / bimtek untuk peningkatan kualitas produk (pelatihan pengemasan, desain produk dll) - Penerbitan Perda 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Penerbitan SK Bupati Nomor 518.3/866 Tahun 2019 tentang Batik Sindu Melati sebagai Batik Khas Klaten, SK Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten	mikro dan kecil - Meningkatkan kemitraan dengan pihak perbankan / non perbankan untuk akses permodalan; pendampingan dalam penyusunan pelaporan kelayakan usaha - Pemberian pelatihan/bimbingan teknis, magang / sudy komparatif ke UMKM di wilayah lain yang lebih berhasil - Slogan aku cinta produk Klaten terus disosialisasikan, pengembangan e-UMKM, perluasan ajang pameran produk Klaten, pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah
No	**PERMASALAHAN**	**SOLUSI**	**RENCANA TINDAK LANJUT**
3	Belum optimalnya pemanfaatan Program Subsidi Bunga Pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Klaten oleh pelaku usaha Mikro di Kabupaten Klaten. APBD TA 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 2 Milyar baru terealisasi Rp. 122.000.000,- (6,12 %)	Program Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro dilanjutkan di tahun 2020 agar lebih banyak pelaku usaha mikro yang bisa memanfaatkannya.	Optimalisasi dan sosialisasi program subsidi bunga di tahun 2020 dan 2021.

9) Inovasi

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2019, terdapat inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut dalam bentuk Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat

(KUR). Inovasi tersebut berbentuk Program untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Klaten.

Usaha mikro yang layak menerima bantuan subsidi bunga harus dimiliki penduduk Kabupaten Klaten yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Kabupaten Klaten, wajib tercantum dalam data base Disdagkop UKM Kab. Klaten, memiliki Ijin Usaha Mikro (IUM) yang diterbitkan kecamatan setempat, usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya pengembangan usaha ekonomi produktif. Wirausaha baru dapat mengakses pinjaman sepanjang telah mengikuti pelatihan yang dibuktikandengan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Plafon pinjaman maksimal Rp. 25 Juta untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif. Pemberian subsidi bunga sebesar 80% dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran 2019. Prosentase tersebut dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur. Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro tahun 2019 adalah PD BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PD BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten. Alokasi dana untuk program ini di tahun 2019 sebesar Rp. 2 M (Dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1,5 M melalui PD BPR Bank Klaten dan Rp. 500 Juta melalui PD BPR BKK Tulung.

XI. Urusan Penanaman Modal

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Perekonomian

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Penanaman Modal beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.51
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Penanaman Modal Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan					

Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)				
	PMDN	investor	15	870	5.800
	PMA	investor	5	15	300
	Peningkatan Pendapatan BUMD	Rupiah	5 M	6 M	120
	Yang dimaksud adalah jumlah pendapatan BUMD sebesar 6 M				
	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)				
	PMDN (dlm ribu Rp)	Rp	94.659.145	1.914.915.766, 2	2.023
	PMA (dlm ribu US$)	US$	12.128.265	11.490.893	95
	Satuan target yang dimaksud adalah US$ 12.128.265 dan realisasi adalah US$11.490.893 (bukan dalam ribu US$)				
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Layanan proses perijinan	hari	10	10	100,0
	Rasio daya serap tenaga kerja				
	PMDN	org	438	21	5
	PMA	org	294	224	76,19
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	80,0	78,3	97,9
	Prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi				
	PMDN	%	2,20	733	33.318
	PMA	%	2,5	272	10.880

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.52
Data Pegawai Urusan Penanaman Modal

1.	**Jumlah Pegawai**		:	24	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SLTA	:	4	Orang
	b)	Diploma	:	1	Orang
	c)	S- 1	:	15	Orang
	d)	S- 2 / S-3	:	4	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Pengatur Muda Tk I	:		
	b)	Pengatur	:		
	c)	Pengatur Tk I	:	1	Orang
	d)	Penata Muda	:	3	Orang
	e)	Penata Muda Tk I	:	3	Orang

	f)	Penata	:	6	Orang
	g)	Penata Tk I	:	6	Orang
	h)	Pembina	:	3	Orang
	i)	Pembina Tk I	:	2	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	10	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	-	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Perekonomian. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.602.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp**.** 2.247.419.889,- atau sebesar 86,4%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.641.408.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.304.595.466,- atau sebesar 87,2%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Penanaman Modal disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016–2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Penanaman Modal selama tahun 2019 beserta solusi yang telah ditempuh dan rencana rindak lanjut dalam mengatasi permasalah dapat dilihat dalam matrik di bawah ini.

Tabel 3.53
Permasalahan dan solusi Urusan Penanaman Modal

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	kuantitas dan kompetensi SDM belum optimal	Sudah mengajukan perserta Diklat peningkatan kompetensi SDM	mengajukan perserta Diklat peningkatan kompetensi SDM
2	Data peluang investasi masih belum up to date	Pembuatan media promosi	Buku Profil dan vidio profil tahun 2020
3	sarana penunjang promosi investasi belum optimal	Pemenuhan media cetak dan elektronik	Leaflet dan Film Dokumenter

4	SOP dan Standar pelayanan masih belum up to date	Merevisi SOP dan SP	Sudah dilaksanakan dgn SK Kepala DPMPTSP no 800/49/2018, namun msh perlu direvisi lagi terkait dengan OSS
5	Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal	Menyusun evaluasi jabatan	Sudah tersusun evaluasi jabatan
6	Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahannya	Menfasilitasi pengisian LKPM Online	Asikin LKPM (Asistensi Dan Konsultasi Input LKPM)
7	kurangnya komitmen antara perangkat daerah teknis dan proses pelayanan	Melakukan koordinasi	Rakor setiap 3 bulan
8	Sikap dan pertisipasi dari masyarakat dalam mengurus perijinan	Mengadakan sosialisasi	Sosialisasi di 26 kecamatan
9	kurang optimalnya koordinasi dengan satuan kerja teknis	Melakukan koordinasi	Rakor setiap 3 bulan
10	Belum semua perangkat daerah teknis mengintergrasikan perizinan kepada DPMPTSP	Mengintegrasikan dengan OSS	Pendampingan kepada Perusahaan/pelaku usaha
NO	**PERMASALAHAN**	**SOLUSI**	**RENCANA TINDAK LANJUT**
11	Pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal terhambat karena lokasi yang di rencanakan oleh masyarakat tidak sesuai peruntukan dng RTRW	Memberi saran masukan kepada investor untuk sosialisasikan dengan tata ruang	Menyediakan informasi tata ruang
12	Pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal terhambat karena lokasi yang di rencanakan oleh masyarakat tidak sesuai lagi dng RTRW	Untuk lokasi sesuai dengan tata ruang	menunggu Revisi Perda no.11 th.2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah kab. Klaten th.2011-2031
13	Kewajiban membuat dokumen lingkungan yang memerlukan waktu lama	Koordinasi dengan satker teknis	disampaikan pada setiap Rakor dengan Tim Teknis
14	masih belum semua jenis pelayanan menggunakan sistem On Line	Mengintegrasikan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP ke dalam OSS	di rencanakan tahun 2019 namun blm bisa dilaksanakan krn belum ada aplikasi si cantik cloud

9) Inovasi dan Prestasi

Dalam pelaksanaan program urusan Penanaman Modal pada tahun 2019, terdapat beberapa inovasi dan terobosan yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten antara lain :

1. Pelayanan Perizinan JEMPOL MANIS (Jemput Bola Pelayanan Izin Online Aman Dan Gratis), yang merupakan pelayanan izin yang dilakukan oleh petugas dengan menggunakan mobil pelayanan keliling. Pelayanan izin dilaksanakan dengan jadwal rutin di setiap kecamatan dan pada saat acara sambang warga.
2. Pelayanan Pengaduan SAMA KITA (Satu Masukan Kita Tanggapi), yang merupakan pelayanan pengaduan masyarakat terkait izin usaha yang tidak sesuai aturan, melalui sms atau pesan whatsapp ke nomor admin 082137820699, atau datang langsung ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Klaten.
3. Pelayanan Penanaman Modal ASIKIN LKPM (Asistensi Dan Konsultasi Input Laporan Kegiatan Penanaman Modal), yang merupakan pelayanan bagi semua pelaku usaha yang memiliki kewajiban LKPM akan difasilitasi secara rutin terkait tata cara pelaporan, guna meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Klaten.

Dalam pelaksanaan Program urusan penanaman modal pada tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat penghargaan Pelayanan Publik Baik dengan Catatan dari Kemenpan Republik Indonesia. Selain penghargaan tersebut terdapat beberapa prestasi yang diraih dalam pelaksanaan Program urusan Penanaman modal. Prestasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54
Prestasi / Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal tahun 2019

NO	PRESTASI/PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1.	Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kinerja Tertinggi pada Kelompok Jumlah Pelanggan 20.001 s.d 50.000 SL	PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Juara II Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM 2019	PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten	PD PERPAMSI Jawa Tengah
3.	Top BUMD 2019 dengan Kategori TOP BPRKU I (Kabupaten)	PD BPR Bank Klaten	Majalah Top Business

4.	Top Pembina BUMD 2019	Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani	Majalah Top Business

XII. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesra, Kecamatan dan Kelurahan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.55
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA

	PROGRAM				(%)
Peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	69	69	**100,0**
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Wirausaha Muda yang Dibina (Keluarga Miskin)	%	20	20	**100,0**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	25	42	**168,0**
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi	%	80	**77,20**	**96,5**
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan narkoba	%	10	10	**100,0**
Pembinaan pemuda dan olahraga	Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Besar Nasional	%	20	20	**100,0**
	Presentase kehadiran peserta	%	90	90	**100,0**

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.56
Data Pegawai pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1		**Jumlah Pegawai**	11 Orang
2		**Kualifikasi Pendidikan**	
	a	SLTA sederajat	7 Orang
	b	S-1	1 Orang
	c	S-2/S-3	3 Orang
3		**Pangkat dan Golongan**	
	a	Pengatur Muda Tk I	:1 Orang
	b	Pengatur	:2 Orang
	c	Pengatur Tk I	:1 Orang
	d	Penata Muda Tk I	:4 Orang
	e	Penata	:1 Orang

	f	Penata Tk I	:1 Orang
	g	Pembina	:1 Orang
4		**Jumlah Pejabat Struktural**	:3 Orang
5		**Jumlah Pejabat Fungsional**	

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesra, Kecamatan dan Kelurahan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.984.436.333,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.612.666.905,- atau sebesar 92,5%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2017, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.57
Permasalahan dan Solusi Urusan kepemudaan dan Olahraga
tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Sarpras keOlahragaan belum memadai/ masih kurang	Memaksimalkan Sarpras yang telah ada	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.	Validasi data keolahragaan	update data	melakukan update data ke tingkat Kecamatan
3.	Keterbatasan data-data terkait kepemudaan	melakukan Survay lapangan	melakukan update data ke tingkat Kecamatan

9) Prestasi

Beberapa Prestasi Tingkat Nasional yang diperoleh dalam pelaksanaan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

Prestasi/Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi penghargaan
Juara 1 kelas C Putra, Pencak Silat	Alfian Nur Ghozali Anhar	Kementrian Pemuda dan Olahraga
Juara 1 aduan perorangan recurve Putra (Panahan)	Alvianto Bagas Prasetyadi	Kementrian Pemuda dan Olahraga
Juara II – 4x100m Gaya ganti Estafet Putra (Renang)	Cahya Erinjaya	Kementrian Pemuda dan Olahraga

XIII. Urusan Statistik

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Statistik pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Statistik beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Statistik dapat dilihat dalam tabel 3.58

Tabel 3.58
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Statistik Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen data statistik yang tersedia	%	71,43	**75**	**105,0**

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Statistik dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.59
Data Pegawai Urusan Statistik

1	Jumlah Pegawai		3	Orang
2	Kualifikasi Pendidikan			
	a)	S-1	1	Orang
	b)	S-2	2	Orang
3.	Pangkat dan Golongan			
	a)	Penata Muda	1	Orang
	b)	Penata	1	Orang
	c)	Pembina	1	Orang
4	Jumlah Pejabat Struktural		2	Orang

5	Jumlah Pejabat Fungsional	-	Orang
	Jumlah	3	

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 189.082.246 atau 94,5%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Statistik disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Statistik kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Statistik dapat dilihat dalam tabel 3.60

Tabel 3.60
Permasalahan dan Solusi Urusan statistik

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang statistik	Menambah Sumber Daya Manusia di bidang statistik	Menerima mahasiswa PKL terkait di bidang statistik
2	Penanggung jawab data statistik di OPD – tidak tetap	Menetapkan penanggung jawab data statistik OPD	Membuat SK tentang statistik

XIV. Urusan Kebudayaan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Humas, Kecamatan dan Kelurahan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kebudayaan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) **Tingkat Pencapaian Kinerja**

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.61
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Kebudayaan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Fasilitasi Pementasan Budaya Daerah	%	100	100	100,0
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	6	100,0
Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	11	13	118,2
Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/ Kelompok Kesenian yang Difasilitasi	%	5	5	100,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.62
Data Pegawai Urusan Kebudayaan

1		**Jumlah Pegawai**	9 Orang
2		**Kualifikasi Pendidikan**	
	a	SLTA sederajat	1 Orang
	b	S-1	4 Orang
	c	S-2/S-3	4 Orang
3		**Pangkat dan Golongan**	
	a	Pengatur Muda Tk I	: 1 Orang
	b	Penata Muda Tk I	: 2 Orang
	c	Penata	: 2 Orang
	d	Penata Tk I	
	e	Pembina	: 4 Orang
4		**Jumlah Pejabat Struktural**	:3 Orang

5		**Jumlah Pejabat Fungsional**	

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Humas, Kecamatan dan Kelurahan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.8.315.173.500- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.704.371.581,- atau sebesar 92,7%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Kebudayaan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.63
Permasalahan dan Solusi Urusan Kebudayaan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Kurangnya koordinasi antar Dinas terkait dengan pelaku budaya di Kabupaten Klaten.	Diperlukan koordinasi yang lebih baik lagi serta perencanaan dan persiapan yang matang dalam penyelenggaraan kegiatan sedi dan budaya	melakukan pendekatan secara persuasif ke para pelaku Budaya
2.	Kurangnya publikasi untuk penyelenggaraan kegiatan budaya dan seni, khususnya yang ada di daerah/ kecamatan	Diperlukan publikasi yang luas tidak hanya kegiatan seni budaya yang diselenggarakan di tingkat kabupaten tapi juga yang diselenggarakan di daerah	melakukan publikasi melalui sosmed , baliho dan pamflet

XV. Urusan Perpustakaan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perpustakaan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perpustakaan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.64
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perpustakaan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	10.000	83.511	835,11
	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat	%	10	22,19	221,9
	Jumlah koleksi buku perpustakaan	Judul buku	150	1.559	1.039

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.65
Data Pegawai Urusan Perpustakaan

1		**Jumlah Pegawai**	10 Orang
2		**Kualifikasi Pendidikan**	
	a	SLTA	2 orang
	b	Diploma	3 Orang
	c	S-1	4 Orang
	d	S-2/S-3	1 Orang
3		**Pangkat dan Golongan**	
	a	Pengatur Muda Tk I	:1 Orang
	b	Penata Muda	:3 Orang
	c	Penata Muda Tk I	:1 Orang
	d	Penata	:2 Orang
	e	Penata Tk I	:2 Orang

	f	Pembina	:1 Orang
4		**Jumlah Pejabat Struktural**	:3 Orang
5		**Jumlah Pejabat Fungsional**	: 2 orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.970.276.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.692.887.360,- atau sebesar 85,9% .

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Perpustakaan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perpustakaan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Perpustakaan dan solusi yang ditempuh untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.66
Permasalahan dan Solusi Urusan Perpustakaan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Bidang Perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana Bidang Perpustakaan	Pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan
2	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompetitif di bidang Perpustakaan (Pustakawan)	Peningkatan Kemampuan SDM sesuai bidangnya dan tupoksinya	Mengikuti sertakan SDM untuk Diklat-diklat/kursus teknis dan fungsional sesuai bidang dan tupoksi dalam rangka mendukung pelayanan prima.
3	Kurangnya Jumlah koleksi bahan pustaka	Peningkatan Jumlah dan Jenis koleksi	Merrencanakan penambahan anggaran pengadaan penyediaan bahan pustaka
4	Rendahnya Minat Baca masyarakat	Menciptakan/membuat lingkungan Perpustakaan yang nyaman mampu menarik minat	Meningkatkan pelayanan prima terhadap pengunjung dan menambah sarana

		masyarakat untuk berkunjung ke Perpustakaan	prasarana ldi lingkungan Perpustakaan

XVI. Urusan Kearsipan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kearsipan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Kearsipan dapat dilihat dalam tabel 3.67

Tabel 3.67
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Kearsipan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah koleksi arsip	arsip (berkas)	**7.500**	11010	146,8
	Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip	%	5	26,40	528
	Jumlah pengunjung arsip	orang	**36**	42	116,7
Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	Desa /kelurahan	**16**	16	100,0
	Prosentase Peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	%	10	10	100,0

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Prosentase peningkatan kelengkapan administrasi kearsipan	%	20	20	100,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.68
Data Pegawai Urusan Kearsipan

1	**Jumlah Pegawai**	17 Orang
2	**Kualifikasi Pendidikan**	
	SLTA	7 orang
	Diploma	2 orang
	S-1	3 orang
	S-2/S-3	5 orang
3	**Pangkat dan Golongan**	
	Pengatur muda Tk I	3 orang
	Pengatur	2 orang
	Penata Muda	1 orang
	Penata Muda Tk I	2 orang
	Penata	1 orang
	Penata Tk I	3 orang
	Pembina	3 orang
	Pembina Tk I	1 orang
	Pembina Utama Muda	1 orang
4	**Jumlah Pejabat Struktural**	7 orang
5	**Jumlah Pejabat Fungsional**	2 orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.344.723.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.018.544.438,- atau sebesar 86,1%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.7.066.575.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.038.653.863,- atau sebesar 28,8%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Kearsipan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Kearsipan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.69
Permasalahan dan Solusi Urusan Kearsipan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Bidang Kearsipan	Peningkatan sarana dan prasarana Bidang Kearsipan	Pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan
2	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompetitif di bidang Kearsipan (Arsiparis).	Peningkatan Kemampuan SDM sesuai bidangnya dan tupoksinya	Mengikuti sertakan SDM untuk Diklat-diklat/kursus teknis dan fungsional sesuai bidang dan tupoksi dalam rangka mendukung pelayanan prima.
3	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kearsipan	Peningkatan penyelenggraan kearsipan di seluruh OPD dan Desa	Mengintensifkan Sosialisasi/Penyuluhan kepada OPD dan Desa/masyarakat.

9) Inovasi dan prestasi

Dalam Pelaksanaan Program urusan Kerasipan terdapat inovasi yang dibuat oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja urusan kerasipan. Inovasi tersebut dalam bentuk Penyelamatan Arsip daerah rawan bencana di Kabupaten Klaten. Nama novasi tersebut adalah Titip Berkas Antik Digital (Titip Bandaku). Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memberikan layanan berupa Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana baik perorangan maupun lembaga, Layanan penitipan Arsip Perorangan dan Layanan Digitalisasi Arsip Perorangan. Selain inovasi tersebut, terdapat penghargaan / prestasi yang diterima Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam menjalankan program urusan kearsipan. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan JUARA HARAPAN III Lomba Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah

2. Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas prestasi Hasil Pengawasan Kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan mendapatkan nilai 89 dengan Kategori Memuaskan.

XVII.Urusan Persandian

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Persandian beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar beserta capaian kinerja di Bidang Kearsipan dapat dilihat dalam tabel 3.70

Tabel 3.70
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Persandian Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan persandian daerah	Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi	%	23,5	36,0	153,2

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Persandian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.71
Data Pegawai Urusan Persandian

1	**Jumlah Pegawai**		:	7	Orang
2	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SD	:	1	Orang
	b)	SLTA	:	2	Orang
	c)	S-1	:	4	Orang
3	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Pengatur Muda	:	2	Orang
	b)	Pengatur	:	1	Orang
	c)	Penata Muda	:	1	Orang
	d)	Penata Muda Tk I	:	1	Orang
	e)	Penata	:	1	Orang
	f)	Penata Tk I	:	1	Orang
4	**Jumlah Pejabat Struktural**		:	1	Orang

5	**Jumlah Pejabat Fungsional**	:	2	Orang
	Jumlah		**7**	

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.333.150,- atau sebesar 91,1%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Persandian disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Persandian kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Persandian dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.72

Tabel 3.72
Permasalahan dan Solusi Urusan Persandian tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Di lingkungan pejabat belum paham tentang resiko keamanan informasi yang akan terjadi, karena hanya berpedoman pada undang – undang keterbukaan informasi sedangkan sisi lain ada informasi yang harus diamankan (dirahasiakan).	Diadakan sosialisasi tentang pengamanan informasi di bidang komunikasi dan persandian kepada seluruh pejabat OPD agar tahu manfaat dan fungsi persandian sebagai pengamanan informasi di era digital.	Secara terencana dan bertahap diadakan sosialisasi persandian sebagai pengamanan.

c. Ringkasan Urusan Pilihan

I. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kelautan dan Perikanan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.73
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan budidaya	(ton)	31.302	28.229	90,18
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Konsumsi Ikan	(kg/kapita /tahun)	20	20,4	102,0
Pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan tangkap	(ton)	526	153	29

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.74
Data Pegawai Urusan Kelautan dan Perikanan

1	Jumlah Pegawai		:	22
2	Kualifikasi Pendidikan			
	a)	SLTP	:	1
	b)	SLTA	:	9
	c)	Diploma	:	1
	d)	S- 1	:	7
	e)	S- 2 / S-3	:	4
3	Pangkat dan Golongan			
	a)	Pengatur Muda	:	1
	b)	Pengatur Muda Tk I	:	5
	c)	Penata Muda Tk I	:	4
	d)	Penata	:	4
	e)	Penata Tk I	:	4

	f)	Pembina	:	4
4	Jml Pejabat Struktural		:	5
5	Jml Pejabat Fungsional		:	-

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Urusan Pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.143.576.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.926.100.552,- atau sebesar 89,85%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Kelautan dan Perikanan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.75
Permasalahan dan Solusi urusan Kelautan dan Perikanan
tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Produksi benih ikan di UPT UBI tidak mencapai target yang telah ditetapkan	Meningkatkan sarana prasarana di UPT UBI	TA. 2020 dialokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana di UPT UBI (perbaikan perkolaman, indoor hatchery) agar produksi benih ikan bisa optimal.
2.	Produksi perikanan tangkap tidak memenuhi target yang ditetapkan	Menjaga kelestarian sumber perairan umum	Melakukan sosialisasi pelestarian sumber perairan umum dan fasilitasi bantuan penebaran benih ikan

			di perairan umum.
3.	Produksi perikanan budidaya menurun (tidak mencapai target)	Peningkatan teknologi budidaya perikanan	Melakukan sosialisasi melalui pembinaan dan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan secara terus menerus.

II. Urusan Pariwisata

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pilihan di bidang Pariwisata adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan Bayat.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pariwisata beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) **Tingkat Pencapaian Kinerja**

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.76
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pariwisata Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	%	22	25	113,6
Pengembangan pemasaran pariwisata	Persentasi kenaikan kunjungan wisatawan	%	8	20	250,0
	Rata-rata lama kunjungan wisatawan	hari	1	1	100,0
Pengembangan Kemitraan	Persentasi kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra	%	10	10	100

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.77
Data Pegawai Urusan Pariwisata

1		**Jumlah Pegawai**	13 Orang
2		**Kualifikasi Pendidikan**	
	a	SLTA sederajat	9 Orang
	b	Diploma	1 Orang
	c	S-1	3 Orang
3		**Pangkat dan Golongan**	
	a	Pengatur Muda Tk I	5 Orang
	b	Pengatur	1 Orang
	c	Penata Muda Tk I	2 Orang
	d	Penata	2 Orang
	e	Penata Tk I	2 Orang
	f	Pembina	1 Orang
4		**Jumlah Pejabat Struktural**	3 Orang
5		**Jumlah Pejabat Fungsional**	

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan Bayat. Urusan Pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 8.418.684.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.115.454.979 atau sebesar 96,4%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.236.587.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.594.180.327 atau sebesar 84,8%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Pariwisata disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dihadapi dalam melaksanakan urusah pilihan Pariwisata Selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.78
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan Pariwisata tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Kurangnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak/sektor dalam usaha pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Klaten terkait infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di destinasi wisata.	Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak / sektor dalam pengembangan destinasi wisata, baik itu pihak yang terkait dengan infrastruktur, sarana parasarana, atau pun terkait dengan UMKM yang ada sehingga obyek wisata tersebut layak dan atraktif untuk dijadikan destinasi wisata unggulan	Berkerjasama dengan Dinas terkait untuk penataaan UMKM yang ada di Obyek Wisata
2.	Kurangnya investor dalam pengembangan destinasi wisata.	Peningkatan usaha promosi untuk menarik investor.	Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait

9) Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2019, terdapat beberapa prestasi / penghargaan dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prestasi Juara II Kategori Situs Sejarah terpopuler Anugrah Pesona Indonesia dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia.
2. Juara III Festival Desa Wisata didapat oleh Desa Wisata Jarum. Pengahrgaan tersebut diberikan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah.
3. Juara I Stand Pameran Festival Jamu dan Kuliner diberikan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

III. Urusan Pertanian

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pilihan di bidang Pertanian pada tahun 2019 adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan, Bagian Perekonomian dan Kecamatan Jatinom

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pertanian beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.79
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Produktifitas Padi	(kwt/ha)	64	67,32	105,2
	Produktifitas jagung	kwintal/ha	85,18	93,35	109,6
	Produktifitas kedelai	kwintal/ha	22,26	16,37	73,5
	Alokasi pupuk bersubsidi	Ton	88.035	53.363	60,6
	Penerimaan pendapatan DBHCHT	Rupiah	15.039.148.000	15.196.498.000.000	101.044
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tembakau Rajang	(ton)	2.636	1.750	66,4
	Produksi Tembakau Asepan	(ton)	1.167	2.595	222,4
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Mengikuti agro ekspo	(kali)	2	2	100,0
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Populasi Sapi	(ekor)	108.628	102.431	94,3
Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pembinaan usaha peternakan rakyat	(pengusaha	225	200	88,8
Peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi sapi potong	ekor	130.343	102.431	78,6
	Produksi Daging Sapi	(ton)	2.805	2.010	71,7
NAMA PROGRAM	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM**	**SATUAN**	**TARGET 2019**	**REALISASI 2019**	**CAPAIAN KINERJA (%)**
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani kelas utama	%	34	31,19	91,74
(indikator yang dimaksud kelas utama dan madya) capaian merupakan data 2019					
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	fasilitasi operasional Penyuluh	(orang)	209	205	98

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.80

Data Pegawai Urusan Pertanian

1	**Jumlah Pegawai**		:	**200**
2	**Kualifikasi Pendidikan**			
	a)	SLTP	:	3
	b)	SLTA	:	47
	c)	Diploma	:	17
	d)	S- 1	:	115
	e)	S- 2 / S-3	:	18
3	**Pangkat dan Golongan**			
	a)	Pengatur Muda	:	15
	b)	Pengatur Muda Tk I	:	12
	c)	Pengatur	:	15
	d)	Pengatur Tk I	:	7
	e)	Penata Muda	:	28
	f)	Penata Muda Tk I	:	42
	g)	Penata	:	22
	h)	Penata Tk I	:	35
	i)	Pembina	:	18
	j)	Pembina Tk I	:	5
	k)	Pembina Utama Muda	:	1
4	**Jml Pejabat Struktural**		:	22
5	**Jml Pejabat Fungsional**		:	106

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bagian Perekonomian dan Kecamatan jatinom. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 15.845.317.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.843.059.928,- atau sebesar 87,04%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 24.340.795.000- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.378.864.505 atau sebesar 75,5%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Pertanian disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pertanian kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan pilihan bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.81
Permasalahan dan Solusi
pelaksanaan urusan pertanian tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Banyak usulan kegiatan dari kelompok tani yang tidak bisa tercover karena keterbatasan anggaran	Prioritas kegiatan dengan melihat kebutuhan dan keaktifan kelompok tani	Membuat matriks prioritas kegiatan dan tetap mengusulkan kegiatan di tahun perjalanan (jika ada anggaran perubahan)
2	Limbah ternak (bau, lalat) di kandang ayam broiler/ petelur	Tingkat hygine dan sanitasi yang baik, pemberian feedaditif pada makanan atau minuman, pemberian probiotik pada tempat kotoran di kandang	Pembuatan kandang clousehouse dan pendataan kandang-kandang ayam, pengumpulan atau pertemuan peternak broiler atau petelur
3	Pemanfaatan produk olahan hasil ternak belum maksimal	Membentuk jejaring pelaku usaha	Komunikasi, koordinasi dan pembinaan

IV. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Program terkait urusan pilihan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bagian Perekonomian.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan pilihan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.82
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang	unit	250	901	360

Dalam Pelaksanaan Program Urusan ESDM tahun 2019, terdapat prestasi yang didapat oleh Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo. Prestasi tersebut adalah Juara Harapan II Lomba Desa Mandiri Energi (DME) Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tidak ada OPD khusus yang mengani urusan ESDM, sehingga pelaksanaan program urusan ESDM hanya bersifat subkordinasi di Bagian perekonomian dan DPU dan PR. Pegawai yang menagangi merupakan pegawai yang menangai pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bagian Perekonomian. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.49.910.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.631.181.958 atau sebesar 89,4%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Energi dan Sumber Daya Mineral disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dalam tabel 3.83

Tabel 3.83
Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan Urusan ESDM tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA

			TINDAK LANJUT
1.	Belum optimalnya pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dengan baik. padahal Kabupaten Klaten mempunyai potensi pengembangan EBT yang berasal dari Biogas (kotoran ternak terutama sapi) Mengubah mindset untuk lebih memanfaatkan EBT tidaklah mudah karena kebutuhan energy masih dapat dipenuhi dari listrik maupun gas LPG. Dengan kata lain tidak mau repot.	Sudah ada beberapa lokasi pemanfaatan EBT di Kabupaten Klaten baik yang berasal dari bantuan Pemprov. Jawa Tengah maupun swadaya masayarakat. Secara rutin tiap tahun Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengadakan Lomba Desa Mandiri Energi. Kabupaten Klaten baru dua kali mengikuti lomba tersebut : a. Tahun 2019 diwakili Desa Leses, Kec. Manisrenggo. Juara Harapan II. b. Tahun 2018 diwakili Kelompok Ternak Margo Mulyo, Dukuh Dungus, Desa Mundu, Kec. Tulung Juara III. Berdasarkan pengalaman di Dukuh Dungus, Desa Mundu, Kec. Tulung yang sampai saat ini masih berjalan pemanfaatan EBT Biogas karena ada pendampingan dari CSR dan juga pengembangan kegiatan di kelompok ternak tersebut melalui bentuk Arisan Pembangunan Digester Biogas dan Pengembangan usaha kelompok ternak (pupuk cair, olahan susu sapi-krupuk, permen)	Peningkatan pendampingan terhadap kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan penguatan peran CSR dalam pengembangan kegiatan pemanfaatan EBT

V. Urusan Perdagangan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan pilihan perdagangan adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Satpol PP dan Bagian Perekonomian.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perdagangan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Perdagangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.84
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perdagangan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Inflasi tahunan	%	3.5 % (±1)	2,64	tercapai
	Persentase produk barang dan jasa yang aman	%	**95**	95	100,0
	Persentase konsumen yang terlindungi	%	100	100	100
	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal	%	0,521	0,289	55,5
	Persentase cakupan pelayanan UTTP	%	35	3,75	10,7
	Persentase konsumen yang terlindungi	%	100	100	100,0
Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pasar yang direvitalisasi	unit	**2**	2	100,0
	Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi	%	4,082	**3,92**	**96,07**
	Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	**0,72**	0,77	107,2
	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%	**1,56**	1,6	102,56
Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	65,65	37,38	56,9

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Perdagangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.85
Data Pegawai Urusan Perdagangan

1.	**Jumlah Pegawai**		:	146	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SD	:	4	Orang
	b)	SLTP	:	12	Orang
	c)	SLTA	:	93	Orang
	d)	Diploma	:	8	Orang
	e)	S- 1	:	20	Orang
	f)	S- 2 / S-3	:	9	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Juru	:	3	Orang
	b)	Juru Tk I	:	2	Orang

	c)	Pengatur Muda	:	7	Orang
	d)	Pengatur Muda Tk I	:	45	Orang
	e)	Pengatur	:	29	Orang
	f)	Pengatur Tk I	:	4	Orang
	g)	Penata Muda	:	10	Orang
	h)	Penata Muda Tk I	:	5	Orang
	i)	Penata	:	22	Orang
	j)	Penata Tk I	:	14	Orang
	k)	Pembina	:	4	Orang
	l)	Pembina Utama Muda	:	1	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	17	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:		Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Perangkat Daerah yang melaksanaan Program urusan Pilihan adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Satpol PP dan Bagian Perekonomian. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 14.097.321.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.500.379.411 atau sebesar 88,7% dan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.12.679.146.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.943.130.833,- atau 86,3%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Perdagangan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.86
Permasalahan dan solusi urusan perdagangan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT

1.	Peredaran barang-barang bersubsidi non bersubsidi belum sesuai aturan dan tepat sasaran	Pembinaan dan pengawasan terkait regulasi / UU tentang subsidi dan non subsidi . dan Membentuk Tim Wasdal secara lintas sektor dalam melakukan Pembinaan Intensif ke pelaku usaha	Sosialisasi dan Pembinaan ke pelaku usaha Penerapan sangsi hukum sesuai aturan Undang Undang.
2.	Instabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Pemantuan harga kepokmas dan Penyampaian laporan secara lintas sektor Pembinaan dan pengendalian distribusi kepokmas dan barang penting lainnya pada distributor dan pedagang serta gudang kepokmas Koordinasi lintas sector	Koordinasi pembinaan dan pengawasan harga dan stock Kepokmas agar dapat stabil dan terkendali dengan melibatkan penegak hokum
3.	Masih tinnginya peredaran barang yang tidak aman tidak sesuai standar yang di tetapkan Undang Undang	Pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha terkait dengan produk yang aman bagi masyarakat dan sesuai standar	Penertiban penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk makanan .
4.	Alat UTTP di Kabupaten Klaten belum tertib ukur, Takar, Timbang sehingga merugikan konsumen	Sosialisasi dan Pembinaan pada wajib Tera dan tera ulang untuk melakukan tera dan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen serta Optimalisasi Pelayanan Tera di Kabupaten Klaten	Membentuk UPT Metrologi di Kabupaten Klaten.

VI. Urusan Perindustrian

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan pilihan di bidang perindustrian adalah oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, Bagian Perekonomian dan Kecamatan.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perindustrian beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) **Tingkat Pencapaian Kinerja**

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Perindustrian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.87
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perindustrian Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri menengah dan besar	unit usaha	132	138	104,5
	Jumlah Produk yang memiliki ISO dan SNI	dokumen	65	66	101,5
	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	%	76,00	77	101,3
	Debitur penerima KUR	Orang	30700,00	37058	120,7
Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	unit usaha	76	77	101,3
	Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK	pengrajin	331	276	83,4
	Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	%	11,50	9,59	83,4
	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	%	3,80	3,85	101,3

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Perindustrian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.88
Data Pegawai Urusan Industri

1.	**Jumlah Pegawai**		:	19	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SLTP	:	1	Orang

	b)	SLTA	:	5	Orang
	c)	Diploma	:	3	Orang
	d)	S- 1	:	5	Orang
	e)	S- 2 / S-3	:	5	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Juru Muda	:		Orang
	b)	Juru Muda Tk I	:		Orang
	c)	Juru	:	1	Orang
	d)	Pengatur Muda Tk I	:	3	Orang
	e)	Pengatur	:	2	Orang
	f)	Pengatur Tk I	:	2	Orang
	g)	Penata Muda Tk I	:	1	Orang
	h)	Penata	:	2	Orang
	i)	Penata Tk I	:	4	Orang
	j)	Pembina	:	3	Orang
	k)	Pembina Utama Muda	:	1	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	7	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:		Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bagian Perekonomian dan Kecamatan. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.833.689.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.527.124.101 atau sebesar 89,2%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.033.432.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.506.672.444 atau sebesar 82,6%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Perindustrian disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perindustrian kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di

Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.89
Permasalahan dan Solusi Urusan Perindustrian tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Belum optimalnya jaringan kerjasama antar IKM dalam meningkatkan produktifitas IKM	Melakukan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Memperkuat Jaringan klaster
2	Masih banyaknya Industri Mikro yang belum berijin	Melakukan Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian	Pendampingan perijinan Industri
3	Masih rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	Melakukan Kegiatan Pelatihan Industri	Melakukan pelatihan industri

9) Prestasi / Penghargaan

Pada pelaksanaan program urusan perindustrian tahun 2019, terdapat prestasi yang diraih oleh Dekranasda Kabupaten Klaten. Prstasi tersebut adalah Juara 1 Dekranasda Carnival Provinsi Jawa Tengah. Selain prestasi tersebut, Kabupaten Klaten yang diwakili Citra Yuliana (Siswi SMK Rota Bayat, Klaten) mendapat prestasi Juara Harapan II Lomba Desain Motif Batik & Tenun Terbaik Kategori Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

VII. Urusan Transmigrasi

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Transmigrasi pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Transmigrasi beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

3) **Tingkat Pencapaian Kinerja**

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.90
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Transmigrasi Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi swakarsa / umum	KK	30,00	14	46,7
	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	%	34,00	53,85	158,4
Transmigrasi lokal	Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi	%	42,50	71	168,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.91
Data Pegawai Urusan Transmigrasi

1.	**Jumlah Pegawai**		:	1	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	S- 2 / S-3	:	1	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Penata Tk I	:	1	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	1	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:		Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Urusan Pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar

Rp.250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.203.848.600 atau sebesar 81,5%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Transmigrasi disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Transmigrasi kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Transmigrasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.92
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Transmigrasi tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi	Pemberian Sosialisasi	Permintaan target Transmigran dari Provinsi melalui surat resmi.
2.	Masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa transmigran ditempatkan di tengah hutan jauh dari pusat-pusat kota dan pemerintahanpada saat-saat pengerahan	Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan bencana dan kemiskinan sangat diperlukan.	Sebelum mendapat alokasi target diadakan penjajagan terlebih dahulu.

B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Urusan Administrasi Pemerintahan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang di bidang administrasi Pemerintahan adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan, BPBD, Dispermasdes.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang administrasi Pemerintahan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.93
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Administrasi pemerintahan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase raperda yang terselesaikan	%	12	92,3	767,7
	Persentase perda yang terselesaikan	%	12	100	833,3
	Persentase perkada yang terselesaikan	%	50	171	342
	Persentase produk hukum yang terdigitalisasi	%	77	64,9	84,2
Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan permasalahan / kasus hukum dan HAM	%	6	100	1.666
NAMA PROGRAM	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM**	**SATUAN**	**TARGET 2019**	**REALISASI 2019**	**CAPAIAN KINERJA (%)**
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil	%	100	100	100,0

kepala daerah	Kepala Daerah				
	Kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Bulan	12	12	100,0
	Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100,0
	Persentase Pendampingan Keprotokolan Kepala Daerah	%	100	100	100,0
Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	%	72	96,5	134,0
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa/Kelurahan	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Bintek/Pelatihan	Orang	100,00	100	100
Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah	%	15	29,7	198,0
Peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dimonev se-Kabupaten Klaten	Desa	391	391	100
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	77	**75**	**97**
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	%	72	**59**	**82**
Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kejelasan batas antar kabupaten	Pilar	50	90	180,0
	Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan	obyek	50	70	140,0
NAMA PROGRAM	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM**	**SATUAN**	**TARGET 2019**	**REALISASI 2019**	**CAPAIAN KINERJA (%)**

Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	%	90	80,7	89,7
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase jumlah kebijakan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)	%	85	83,33	98,04
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar	%	90	29,41	32,68
Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor	%	100	100	100
	Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (capaian)	%	100	100	100
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu	%	100	100	100
Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase penyelesaian dokumen regulasi pengadaan barang dan jasa	%	100	100	100,0
	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan	%	100	99,9	99,9
NAMA PROGRAM	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM**	**SATUAN**	**TARGET 2019**	**REALISASI 2019**	**CAPAIAN KINERJA (%)**

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase produk Perda terbentuk	%	100	92,31	92,3
	Persentase produk pengawasan DPRD	%	100	92,86	92,9
	Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun	%	100	100	100,0
	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	%	100	100	100,0
	Persentase Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM maupun RKPD	%	100	100	100,0
	Persentase Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	%	100	100	100,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.94
Data Pegawai Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan

1.	**Jumlah Pegawai**		:	808	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SD	:	8	Orang
	b)	SLTP	:	23	Orang
	c)	SLTA	:	350	Orang
	d)	Diploma	:	52	Orang
	e)	S- 1	:	255	Orang
	f)	S- 2	:	120	Orang
3.	**Golongan**				
	a)	Golongan I	:	7	Orang
	b)	Golongan II	:	252	Orang
	c)	Golongan III	:	444	Orang
	d)	Golongan IV	:	105	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	259	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	18	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan, BPBD, Dispermasdes, Dinas Kominfo. Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang di bidang administrasi pemerintahan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 80.545.338.518 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.69.895.457.765 atau sebesar 86,8%. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 105.432.902.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.90.783.972.712 atau sebesar Rp. 86,1%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.95
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Update sistem dalam SPSE tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa karena hanya bisa dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan hal tersebut menghambat pelaksanaan tender karena mempengaruhi jadwal pelaksanaan tender dikarenakan sistem tidak bisa digunakan selama di update oleh LKPP	memantau website LPSE jika terdapat pemberitahuan UPGRADE sistem kemudian melakukan koordinasi dengan LKPP jika memang tidak diperlukan upgrade sistem maka tidak dilakukan upgrade sistem	tidak melakukan upgrade sistem (JAIM)
2.	Pencatatan ajuan produk hukum berupa keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan data Penangana perkara masih manual dengan pembukuan	dengan menggunakan mekanisme spreedsheets yang terkoneksi dengan internet	akan tetap digunakan dengan menyempurnakan beberapa kegitan yang masuk dalam split sheets
3.	pelaksanaan pembuatan produk hukum belum menggunakan aplikasi	mulai dirintis dengan e-legal drafting pada tahun 2019	mulai diberlakukan pada tahun 2020
4.	sudah memiliki web Jaringan Dokumentasi tapi belum terintegrasi secara nasional	sudah terintegrasi secara nasional	akan dikembangkan lebih lengkap peraturan dan informasi meliputi materi hukum, berita tentang kegiatan Bagian Hukum
5.	Belum terintegrasinya aplikasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan sehingga kurqang optimalnya nilai SAKIP Kabupaten	Pengembangan aplikasi SIMDA Integrated dari BPKP	Penerapan SIMDA Integrated mulai dari sisi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
6.	Penggunaan aplikasi “SIMPEL” yang belum maksimal mempengaruhi kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan, selain itu keterlibatan Perangkat Daerah yang melaporkan tiap bulan terlambat	Mengembangkan aplikasi dan mendorong OPD untuk tidka terlambat dalam melaporkan capaian pelaksanaan pembangunan	Mengembangkan aplikasi sistem informasi pelaporan
NO	**PERMASALAHAN**	**SOLUSI**	**RENCANA TINDAK LANJUT**

7.	Kesulitan mendapatkan data capaian fisik untuk paket pekerjaan konstruksi	Perlu adanya sistem manajemen pengendalian	Mengembangkan sistem manajemen pengendalian
8.	Penambahan alat elektronik tanpa pemberitahuan ke Bagian Umum sebagai pengelola gedung setda sehingga mengakibatkan over load daya listrik	Penggantian fuse , kontaktor , MCB	Tambah daya listrik dan penggantian komponen penunjang
			Penataan beban daya RST
			Adanya SOP penambahan alat elektronik Setda
9.	Peralatan Editing Video Belum Memadai	Peralatan Editing Video Dianggarkan Pada Tahun Anggaran 2020	Pembelian Peralatan Editing Video
10.	Kemampuan/skill Tenaga Protokoler yang Kurang Memadai	Pelatihan/Diklat Tenaga Keprotokoleran Pada Tahun 2020	Penyelenggaraan Diklat/Pelatihan Bagi Tenaga Keprotokoleran
11.	kemampuan/skill Tenaga Penyiaran yang kurang memadai	Pelatihan/Diklat Tenaga Penyiar	Penyelenggaraan Diklat/Pelatihan Bagi Tenaga Penyiar
12.	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum optimal	Meningkatkan Pembinaan Kepada Kecamatan terkait implementasi PATEN dan melaksanakan koordinasi secara intens dengan OPD teknis	Melaksanakan Revisi Perbup Penedelegasian wewenang Bupati kepada Camat
13.	Belum optimalnya implementasi pelaksanakan kegiatan di tingkat OPD teknis sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Perjanjian kerjasama maupun kesepakatan bersama.	Penyusunan Raperda tentang Kerjasama Daerah
14.	Kuantitas dan kualitas SDM di Kecamatan dan Kelurahan kurang memadai sehingga sering menjadi kendala dalam menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat.	Memaksimalkan SDM yang ada dan Penggunaan Tenaga Harian Lepas	Adanya kebijakan penambahan staf maupun personil di Kecamatan dan Kelurahan serta Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan maupun melalui pengembangan kompetensi secara mandiri
15.	Masih terdapat beberapa Kekosongan pejabat struktural di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sangat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.	Pelaksanaan pengisian jabatan struktural di Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan pengisian jabatan struktural di Kecamatan dan Kelurahan

9) Inovasi dan Prestasi

Dalam Pelaksanaan Program Urusan penunjang di bidang adminsitrasi pemerintahan terdapat inovasi yang dikembangkan oleh Bagian Organisasi yaitu aplikasi E-SAKIP Kabupaten. Aplikasi tersebut merupakan Aplikasi yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas penyusunan LAKIP. Diharapkan dengan aplikasi tersebut Nilai SAKIP Kabupaten Klaten bisa meningkat. Selain aplikasi tersebut, Bagian Hukum juga mengembangkan inovasi dalam bentuk aplikasi "SAPAR APEMAN". Akronim dari Satuan para Legal Aparatur Pemerintahan, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Klaten melalui Keputusan Bupati, beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang Hukum (para legal) dalam lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten.. Bertugas memberi Bantuan Hukum dalam bentuk konsultasi dan/atau pendampingan hukum bagi Aparatur pelaksana Pemerintahan di Kabupaten Klaten. Selain inovasi di atas, terdapat beberapa prestasi / penghargaan yang diperoleh dalam pelaksanaan Program urusan penunjang Administrasi Pemerintahan. Prestasi / penghargaan tersebut sebagai berikut :

1. Penghargaan Integrasi JDIH Nasional yang diberikan kepada Bagian Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
2. Penghargaan Kabupaten/kota Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
3. Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 'B' dari Kemenpan RB. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat nilai 'CC'

II. Urusan Pengawasan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pengawasan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.96
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Pengawasan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	persentase pemeriksaan program tahunan	%	100	100	100,0
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	peningkatan level maturitas SPIP	indek 1-5	3	3	100,0
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	peningkatan level kapabilitas APIP	indek 1-5	3	3	100,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.97

Data Pegawai Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan

1	Jumlah Pegawai		:	51	Orang
2	Kualifikasi Pendidikan				
	a)	SLTA	:	3	Orang
	b)	Diploma 3&4	:	3	Orang
	c)	S- 1	:	23	Orang
	d)	S- 2	:	22	Orang
3	Pangkat dan Golongan				
	a)	Pengatur Muda Tk I	:	2	Orang
	b)	Pengatur	:		Orang
	c)	Pengatur Tk I	:	1	Orang
	d)	Penata Muda	:	2	Orang
	e)	Penata Muda Tk I	:	6	Orang
	f)	Penata	:	7	Orang
	g)	Penata Tk I	:	14	Orang
	h)	Pembina	:	9	Orang
	i)	Pembina Tk I	:	8	Orang
	j)	Pembina Utama Muda	:	2	Orang
4	Jml Pejabat Struktural		:	9	Orang
5	Jml Pejabat Fungsional		:	35	Orang
	JML		:	51	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.7.455.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.211.234.968 atau sebesar 83,3%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.7.227.824.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.995.454.893,- atau sebesar 82,9%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan selama tahun 2019 beserta solusi yang sudah ditempuh dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.98

Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak lanjut urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Jumlah Penugasan di Tahun 2019 terlalu banyak dibandingkan dengan Sumberdaya dan waktu yang ada	Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan berdasarkan kemampuan sumberdaya yang ada	Pada Perencanaan Program Pemeriksaan Tahun 2020 mengurangi jumlah Objek Pemeriksaan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada
2	Perbandingan antara jumlah obrik dan sumber daya tidak berimbang, dimana jumlah obrik terlalu banyak sedangkan jumlah sumber daya terbatas sehingga tidak bisa melaksanakan pengawasan secara maksimal	Penambahan Sumber Daya Manusia dengan menambah Jabatan Pengawas	Mengajukan Penambahan aparat Pengawas ke BKPPD
3	Penugasan yang tidak terencana dan jumlah aduan masyarakat tidak bisa diprediksi sehingga menyulitkan pada saat pelaksanaan kegiatan	Mengalokasikan waktu kosong setiap bulannya , khusus untuk mengantisipasi penugasan yang tidak terencana.	Mengalokasikan waktu kosong dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan untuk mengantisipasi penugasan yang tidak terencana

III. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan adalah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dan Hampir seluruh OPD yang melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan. Sedangkan untuk urusan Penelitian dan Pengembangan hanya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan bidang Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.99
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

URUSAN PERENCANAAN					
NAMA PROGRAM	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM**	**SATUAN**	**TARGET 2019**	**REALISASI 2019**	**CAPAIAN KINERJA (%)**
Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	%	90	90	100,0
	Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100	100	100,0
Perencanaan Bidang Ekonomi	Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi	%	70	70	100,0
	Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi	%	Ada	ada	100,0
	Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembanguan daerah	%	27,27	11	40,3

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100,0
	Kesesuian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW	%	100	100	100,0
Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100,0
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100,0
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100,0
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	94,5	94,5
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100	98,8	98,8
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Penelitian dan pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	peserta	30	36	120,0
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	jenis inovasi	18	19	105,6

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.100
Data Pegawai Urusan Perencanaan

1.	Jumlah Pegawai		:	36	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan		:		Orang
	a)	SLTP	:	1	Orang
	b)	SLTA	:	4	Orang
	c)	Diploma 3 &4	:	2	Orang
	d)	S-1	:	14	Orang
	e)	S-2	:	15	Orang
3.	Pangkat dan Golongan				
	a)	Pengatur Muda	:	1	Orang
	b)	Pengatur Muda Tk I	:	3	Orang
	c)	Pengatur Tk I	:	1	Orang
	d)	Penata Muda	:	1	Orang
	e)	Penata Muda Tk I	:	3	Orang
	f)	Penata	:	11	Orang
	g)	Penata Tk I	:	10	Orang
	h)	Pembina	:	4	Orang
	i)	Pembina Tk I	:	1	Orang
	j)	Pembina Utama Muda	:	1	Orang
4.	Jumlah Pejabat Struktural		:	15	Orang
5.	Jumlah Fungsional Perencana		:	5	Orang
6.	Jumlah Fungsional Prakom			1	
		JUMLAH :		36	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.7.305.936.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.257.297.396 atau sebesar 85,6%. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.4.493.150.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.788.016.844,- atau sebesar 84,3%. Sedangkan urusan penelitian dan pengembangan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 886.073.933,- atau 88,6%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah urusan Perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan disesuaikan dengan

RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perubahan regulasi terhadap mekanisme perencanaan dari pemerintah Pusat yang berpengaruh pada Pemerintah daerah.
2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada kebijakan pada Pemerintah Daerah
3. Masih minimnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan
4. Masih minimnya himpunan data-data dasar/statistik Perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan.
5. Masih minimnya kualitas dan kuantitas aparatur perencana.
6. Masih minimnya koordinasi program lintas sektoral di perangkat daerah yang menyebabkan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar perangkat Daerah.
7. Ketidaktepatan waktu Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana kerja.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi lebih dini oleh Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah terkait adanya perubahan regulasi mekanisme perencanaan.
2. Peningkatan koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tentang arah kebijakan yang harus dituangkan dalam dokumen perencanaan mendasari kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam perencanaan pembangunan daerah, serta lebih meningkatkan proporsi pendekatan perencanaan yang bersifat partisipatif melalui penyelengaraan Musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Perlu menyusun/updating data-data dasar/statistik oleh Perangkat

daerah yang akan digunakan sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan dasar dalam merencanakan sasaran target program kegiatan perangkat daerah.

5. Perlu adanya peningkatan kualitas kompetensi dan kuantitas aparatur perencanaan melalui workshop/bimbingan teknis/diklat.
6. Perlu adanya peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah/lintas sektoral agar tidak tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan fokus terhadap sasaran program kegiatan.
7. Perlu disusun agenda kerja yang pasti untuk dapat dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan.

Adapun Rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi lebih dini oleh Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah terkait adanya perubahan regulasi mekanisme perencanaan.
2. Peningkatan koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tentang arah kebijakan yang harus dituangkan dalam dokumen perencanaan mendasari kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
3. Sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam perencanaan pembangunan daerah, serta lebih meningkatkan proporsi pendekatan perencanaan yang bersifat partisipatif melalui penyelengaraan Musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Menyusun/updating data-data dasar/statistik oleh Perangkat daerah yang akan digunakan sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan dasar dalam merencanakan sasaran target program kegiatan perangkat daerah.
5. Peningkatan kualitas kompetensi dan kuantitas aparatur perencanaan melalui workshop/bimbingan teknis/diklat.
6. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah/lintas sektoral agar tidak tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan fokus terhadap sasaran program kegiatan.
7. Menyusun agenda kerja yang pasti untuk dapat dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan.

Sedangkan Permasalahan dan solusi pada urusan Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam tabel 3.101

Tabel 3.101
Permasalahan dan solusi Urusan Penelitian dan pengembangan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Kurangnya dukungan Pemerintah dalam penerapan inovasi yang muncul	Perlunya pendanaan dan pendampingan dari pemerintah dalam mendorong innovator menjadi PPBT (Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi)	pendanaan dan pendampingan dari pemerintah dalam mendorong innovator menjadi PPBT (Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi)
2	Banyaknya Inovasi yang hanya berhenti di tingkat penelitian dan Lomba	Kuragnya minat Inovator untuk pengembangan temuan lebih lanjut	Peningkatan minat Inovator untuk pengembangan temuan lebih lanjut

9) Prestasi / Penghargaan

Dalam pelaksanaan Program urusan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2019, terdapat prestasi / Penghargaan sebagai berikut :

1. Prestasi Lolos 2 (dua) Varietas Padi Unggul (Rojolele Srinuk & Rojolele Srinar) Tahun 2019 Tingkat Nasional
2. Juara I Lomba Krenova Kategori Pelajar Tahun 2019 Tingkat SUBOSUKOWONOSRATEN diperoleh Leony Vita ARtanti (SMA N 1 Klaten)
3. Juara II Lomba Krenova Kategori Pelajar Tahun 2019 Tingkat SUBOSUKOWONOSRATEN diperoleh Pangestu Nugroho, Agustinus Dwi Danang Raharjo, Risang Bisma Prabancana, Yusta Trubus Widianto,Senli Yusdiantoro, Yulius Victor Paskah Natalina (SMK N 2 Klaten)
4. Juara III Lomba Krenova Kategori Masyarakat Umum Tahun 2019 Tingkat SUBOSUKOWONOSRATEN diperoleh Sri Murtono, S.Pd. M.Eng

IV. Urusan Keuangan

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan daerah

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.102
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Keuangan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	7,34	-21	-286
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	bulan	3	3	100,0
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	bulan	6	6	100,0
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100,0
	Prosentase penyerapan belanja daerah	%	83%	87	104
	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	53,0	54,9	103,6

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.103
Data Pegawai Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

1.	**Jumlah Pegawai**		:	104	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	SLTP	:	2	Orang
	b)	SLTA	:	29	Orang
	c)	Diploma	:	5	Orang
	d)	S- 1	:	48	Orang
	e)	S- 2 / S-3	:	20	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Juru Muda	:	0	Orang
	b)	Juru Muda Tk I	:	0	Orang
	c)	Juru	:	1	Orang
	d)	Juru Tk I	:	0	Orang
	e)	Pengatur Muda	:	0	Orang
	f)	Pengatur Muda Tk I	:	10	Orang
	g)	Pengatur	:	4	Orang
	h)	Pengatur Tk I	:	3	Orang
	i)	Penata Muda	:	11	Orang
	j)	Penata Muda Tk I	:	21	Orang
	k)	Penata	:	13	Orang
	l)	Penata Tk I	:	33	Orang
	m)	Pembina	:	7	Orang
	n)	Pembina Tk I	:	1	Orang
	o)	Pembina Utama Muda	:	0	Orang
	p)	Pembina Utama Madya	:	0	Orang
	r)	Pembina Utama	:	0	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	25	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	2	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan daerah. urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.37.017.718.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.327.751.133 atau 87,3%. Adapun alokasi

belanja tidak langsung sebesar Rp. 866.204.855.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 834.044.908.574,- atau sebesar 96,3%.

.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dan solusi serta tindak lanjut yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.104
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan

NO	PERMASALAHAN	ALASAN	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
1	Prosentase kenaikan PAD belum tercapai	Pendapatan Dana BOS mulai tahun 2019 tidak masuk PAD	Penyesuain NJOP
			Melakukan Inovasi untuk optimalisasi pendapatan di antaranya e-PBB, e-BPHTB, Pajak Online, Penambahan loket pembayaran melalui Tokopedia, Indomaret dan Gopay
			Dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

9) Prestasi dan Inovasi

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Keuangan pada tahun 2019, terdapat Prestasi yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Prestasi tersebut adalah Opini Wajar Tanpa Penegecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan keuangan tahun 2018. Selain pretsasi tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah berusaha meningkatkan Kinerja dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Adapaun inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
1.	Aplikasi BOS	Sistem Pengelolaan Dana Bos berbasis IT Yang Terintegrasi Dengan data Keuangan Daerah
2.	APL. SENSUS	verifikasi data sensus yang dulu dilakukan secara manual dan makan banyak waktu, sekarang sdh bisa dilakukan dengan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data sensus.
3.	SIDIA	Pencocokan dan penghitungan stok opname persediaan yang dulu dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi sehingga laoran persediaan lebih akurat.
4.	APL.REKONSILIASI	Aplikasi untuk rekonsiliasi Aset Daerah yang dahulu masih dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi aset serta laporan lebih akurat
5.	e-PBB (pbb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui berapa besaran pajak PBB yang harus di bayar oleh Wajib Pajak secara Online dengan internet (Cloud System) caranya cukup memasukkan NOP PBB
6.	e-BPHTB (bphtb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui informasi BPHTB secara Online
7.	Pajak Online	Penambahan Loket pembayaran PBB-P2 yang semula baru bisa lewat Bank Jateng dan Bumdes, di tahun 2019 sudah bisa melalui Tokopedia, Indomaret dan Go Pay
8.	NAS BPKD	NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang di khususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share data. NAS dapat di akses langsung melalui jaringan dengan protokol seperti TCP/IP

V. Urusan Kepegawaian

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) **Tingkat Pencapaian Kinerja**

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.105
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Kepegawaian Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	%	100	99	98,9
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase informasi kepegawaian yang akurat	%	100	100	100,0
	persentase layanan sumber daya aparatur	%	95	95	100,0
	Prosentase Pengembangan Aparatur	%	100	87	87,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 3.106
Data Pegawai Urusan Kepegawaian

1.	Jumlah Pegawai	:	40	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan	:	40	Orang
	a. SD	:	0	Orang
	b. SLTP	:	0	Orang
	c. SLTA	:	6	Orang
	d. Diploma I	:	0	Orang
	e. Diploma 2	:	0	Orang
	f. Diploma 3 dan 4	:	8	Orang
	g. S-1	:	14	Orang
	H. S-2	:	12	Orang

3.	Pangkat dan Golongan		40	Orang
	a. Juru Muda	:	0	Orang
	b. Juru Muda Tingkat I	:	0	Orang
	c. Juru	:	0	Orang
	d. Juru Tk. I	:	0	Orang
	e. Pengatur Muda	:	0	Orang
	f. Pengatur Muda Tk. I	:	0	Orang
	g. Pengatur	:	3	Orang
	h. Pengatur Tk. I	:	6	Orang
	i. Penata Muda	:	5	Orang
	j. Penata Muda Tk. I	:	8	Orang
	k. Penata	:	6	Orang
	l. Penata Tk. I	:	8	Orang
	m. Pembina	:	2	Orang
	n. Pembina Tk. I	:	1	Orang
	o. Pembina Utama Muda	:	1	Orang
	p. Pembina Utama Madya	:	0	Orang
	q. Pembina Utama	:	0	Orang
4.	Jumlah Pejabat Struktural	:	12	Orang
5.	Jumlah Pejabat Fungsional	:	6	Orang
	JUMLAH	:	40	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.17.717.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.698.932.082,- atau 88,6%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.913.355.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.371.904.632,- atau sebesar 86,2%.

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.107
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di bidang Kepegawaian

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih banyak Pejabat administrator dan pengawas yang belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
2	Pengembangan kompetensi PNS berupa pelatihan selama 20 JP per tahun per PNS sesuai amanat PP 11 2011 belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan manajemen pendidikan dan pelatihan bagi PNS daerah
3	Pemetaaan PNS belum dapat dilakukan sehingga kebutuhan (kekurangan/ kelebihan) PNS belum dapat diketahui secara pasti	Merencanakan pemetaan PNS	Merencanakan pemetaan PNS di semua SKPD pada tahun 2020
4	Penanganan pelanggaran disiplin baru menyentuh pada pelanggaran disiplin yang dilaporkan ke BKPPD sedangkan pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan seperti pelanggaran jam kerja, pakaian dinas dan lain-lain belum disentuh	Meningkatkan cakupan pembinaan disiplin	Meningkatkan cakupan pembinaan disiplin
5	Masih perlu evaluasi terkait sistem absensi elektronik	Mengalokasikan anggaran	Mengalokasikan anggaran untuk melengkapi aplikasi pendukung absensi elektronik

9) Inovasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Kepegawaian selama tahun 2019, terdapat beberapa inovasi / terobosan yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten. Inovasi / terobosan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
1.	Aplikasi SAPA (SMS layanan Kepegawaian)	1. Mengetahui Status usulan Karpeg, Karis , Karsu , Ijin belajar, Ijin Penggunaan gelar; 2. Pemberitahuan Kepada PNS yang akan memasuki BUP dan pemberitahuan usulan pensiun sudah dalam proses; 3. Pemberitahuan yang sifatnya segera yang berkaitan dengan kegiatan BKPPD
2.	Aplikasi SIAP (_ystem informasi Anjungan Layanan Kepegawaian)	1. Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian ; 2. Memenuhi kebutuhan informasi standar tentang kepegawaian tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas (cek layanan kepegawaian spt : Karis, Karsu, ijin gelar , ijin belajar, informasi kepegawaian, Statistisk kepegawaian, Cek data PNS, Cek surat
3.	Mutasi masuk PNS dengan Tes CAT (Computer Assisted Test)	Untuk menghilangkan praktek pungutan dalam mutasi masuk
4.	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Pemberitahuan dini PNS yang akan Pensiun dan penyampaian SK pensiun langsung ke alamat PNS yang pensiun

C. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1) Organisasi Perangkat Daerah pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Umum adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

2) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemerintahan Umum beserta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

3) Tingkat Pencapaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan umum dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.108
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum (Kebangpol)

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	100,0
	Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	96	94	97,9
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana	%	100	100	100,0
	Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba	%	4	14,28	*170
	Capaian Kinerja negative, rumus = (2x target – realisasi) / target x 100%				
Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu	%	5	12	240,0
	Prosentase ormas aktif yang terbina	%	85	85	100,0
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan	%	10	10	100,0

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai pelaksana Urusan Pemerintahan umum dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.109
Data Pegawai Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

Jumlah Pegawai		:	14	Orang
Kualifikasi Pendidikan				
a)	SLTA	:	5	Orang
b)	S- 1	:	3	Orang
c)	S- 2 / S-3	:	6	Orang
Pangkat dan Golongan				
a)	Penata Muda Tk I	:	6	Orang
b)	Penata	:		Orang
c)	Penata Tk I	:	4	Orang
d)	Pembina	:	3	Orang
e)	Pembina Tk I	:	1	Orang
Jml Pejabat Struktural		:	5	Orang
Jml Pejabat Fungsional		:	0	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kantor Kesatuan bangsa dan Politik sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan Umum mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.981.000.000,- dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.2.497.244.256,- atau terserap 84% sedangkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.1.414.594.000,- dan terserap Rp.1.195.119.365,- atau sebesar 84%

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Umum disesuaikan dengan RPJMD Bupati Klaten tahun 2016 – 2021, RKPD Tahun 2019, Renstra SKPD tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019 dan RKA 2019.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Umum kondisinya cukup.

8) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.110
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Status kelembagaan yang belum jelas mempengaruhi beban kerja tugas pokok fungsi yang diemban Kantor Kesbangpol Kabupaten Klaten	Mengusulkan segera dibentuk Badan Kesbangpol sebagai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019	Memantau dan melakukan persiapan kelembagaan berbentuk badan
2.	Keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan program kegiatan yang dipengaruhi oleh kelemahan perencanan anggaran dan kekosongan jabatan.	Mengusulkan pengisian pejabat baru yang kompeten di bidangnya serta meningkatkan pengendalian pelaksanaan program kegiatan	Memperbaiki time schedule dan meningkatkan kapasitas perencanaan
3.	Kekurangan inventarisasi data variabel yang mendukung indeks demokrasi daerah.	Perlunya peningkatan koordinasi pokja Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Klaten	Membuat mapping program dan aksi
4.	Kekurangan pegawai yang ahli di bidang ilmu teknologi (IT) sehingga belum memiliki data maupun informasi berbasis teknologi.	Mengusulkan penambahan pegawai yang ahli di bidang ilmu teknologi (IT)	Menugaskan THL bidang administrasi untuk melaksanakan tugas di bidang IT
5.	Belum tersusunnya Peraturan daerah sesuai tugas pokok fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik	Mengusulkan penambahan pegawai yang ahli di bidang ilmu teknologi (IT)	Menugaskan THL bidang administrasi untuk melaksanakan tugas di bidang IT

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 meliputi 3 aspek yaitu :

1. **Tataran Pengambil Kebijakan**

   Data dan informasi hasil pengukuran Capaian Kinerja pada Tataran pengambil Kebijakan tersebut dapat dilihat dalam **Buku Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Lampiran I.**

2. **Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum**.

   Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, dapat dilihat dalam **Buku Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Lampiran II.**

3. **Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.**

   Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan dapat dilihat dalam **Buku Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Lampiran III.**

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

Pelaksanaan Program Prioritas Nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang didukung oleh Program Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam tabel 4.1. Adapun hasil pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dalam **Buku Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Sub Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019.**

Tabel 4.1
Pelaksanaan Program Prioritas Nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP tahun 2019) yang didukung oleh Program Pemerintah Daerah pada tahun 2019

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM DAERAH	URUSAN BIDANG
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Pendidikan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Peningkatan Kesempatan Kerja	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perwaskim
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	PU dan PR
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengembangan wilayah transmigrasi dan Program Transmigrasi Lokal	Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM DAERAH	URUSAN BIDANG
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	**Kesehatan**
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	
	Program peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit	
	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan	
	Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia	
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	**Pendidikan**
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	Program Pendidikan Non Formal	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM DAERAH	URUSAN BIDANG
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perwaskim
	Program Pengembangan Perumahan	
	Program Peningkatan Kualitas Pemukiman	
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU dan PR
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Adminduk
Peningkatan Konektivitas dan TIK	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PU dan PR
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Program Perencanaan Tata Ruang	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	PERHUBUNGAN
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
	Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Kominfo
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
Peningkatan Sistem Logistik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PU dan PR
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	PERHUBUNGAN
Penanggulangan Bencana	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Perwaskim
	Program Penanganan Darurat Bencana	Sosial
	Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM DAERAH	URUSAN BIDANG
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
	Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan	Pertanian
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
	Peningkatan produksi hasil peternakan	
	Peningkatan Kesejahteraan Petani	
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	
	Pengembangan kawasan agropolitan	
Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Perindustrian	Perindustrian
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pariwisata	Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
	Program Pengembangan Kemitraan	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM DAERAH	URUSAN BIDANG
	Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Koperasi dan UKM
	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan
	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	
	Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Kominfo
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	Program penelitian dan pengembangan	Litbang
Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan	Pertanian
Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	PU dan PR
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	
Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PU dan PR
	Program Perencanaan Tata Ruang	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM DAERAH	URUSAN BIDANG
Kamtibmas dan Keamanan Siber	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Trantibumlinmas
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
	Program Peningkatan Persandian Daerah	Persandian
Kesuksesan Pemilu	Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik	Trantibumlinmas
Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Administrasi Pemerintahan
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	
	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
	Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan
	program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kominfo

BAB V
TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Alokasi dana Tugas Pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun 2019 adalah:

A. Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia

Tugas Pembantuan dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

B. Kementrian Pertanian Republik Indonesia

Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

A. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam bentuk Program Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu Padat Karya Infrastruktur, Tenaga Kerja Mandiri Pola Pendampingan dan Layanan dukungan manajemen eselon I.

B. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia dalam bentuk 3 (tiga) Program dan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida serta Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura terdiri dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat serta Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

4. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan yang diterima Perangkat daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 5.1 untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dan tabel 5.2 untuk Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten.

Tabel 5.1
Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
			KEU (%)	FISIK (%)						
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja										
Kegiatan Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja										
- Padat karya Infrastruktur	440.000.000	438.163.025	99,58	100	Jumlah orang yang ikut kegiatan padat karya infrastruktur	352	orang	352	orang	100
- Tenaga Kerja Mandiri Pola Pendampingan	630.000.000	625.573.700	99,30	100	Jumlah orang yang ikut kegiatan pelatihan tenaga kerja mandiri	180	orang	180	orang	100
- Layanan dukungan manajemen eselon I	43.768.000	33.389.300	76,29	100	Jumlah kegiatan layanan dukungan manajemen eselon I	1	kegiatan	1	kegiatan	100

Tabel 5.2
Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
				KEU (%)	FISIK (%)						
I	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**	**3.762.057.000**	**3.517.195.300**	**93,49**	**100**						
1	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	797.000.000	790.270.000	99,16	100	- Luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya	500	Ha	500	Ha	100
						- Jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan sumber air yang dibangun	1	Unit	1	Unit	100
						- Jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan sumber air yang dibangun	1	Unit	1	Unit	100
2	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	591.102.000	363.395.000	61,48	100	- Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian pra panen (traktor roda 2 dan pompa air)	26	Unit	26	Unit	100
						- Jumlah layanan supervisi dan pembinaan kegiatan alsintan	12	Bulan	12	Bulan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
				KEU (%)	FISIK (%)						
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.813.765.000	1.805.385.500	99,54	100	Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Dinas Pertanian KPP	12	Bulan	12	Bulan	100
4	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	314.600.000	313.309.400	99,59	100	- Jumlah pengawalan pupuk bersubsidi - Jumlah penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) - Dukungan fasilitasi pupuk dan pestisida - Jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan	1	Data	1	Data	100
5	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	245.590.000	244.835.400	99,69	100	- Jumlah penerima manfaat KUR - Luas lahan sawah yang tercakup dalam asuransi pertanian - Dukungan fasilitasi pembiayaan pertanian	12	Bulan	12	Bulan	100
II	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura**	**1.239.230.000**	**1.033.340.405**	**83,39**	**100**						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
				KEU (%)	FISIK (%)						
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1.188.750.000	1.017.580.405	85,60	100	- Luas kawasan cabai	60	Ha	60	Ha	100
						- Luas kawasan bawang merah	20	Ha	20	Unit	100
2	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	50.480.000	15.760.000	31,22	100	Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Dinas Pertanian KPP	12	Bulan	12	Bulan	100
III	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**	**36.000.000**	**30.500.000**	**84,72**	**100**						
1	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	36.000.000	30.500.000	84,72	100	Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Dinas Pertanian KPP	12	Bulan	12	Bulan	100

5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

A. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.113.768.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.097.126.025,- atau realisasi anggaran mencapai 98,5% dan realisasi fisik sebesar 100%.

B. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia dengan Total anggaran sebesar Rp. 5.037.287.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.581.035.705,- atau realisasi anggaran mencapai 90,94% dan realisasi fisik sebesar 100%.

6. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2019 adalah:

A. Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
B. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

7. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

Rincian Pegawai pelaksana tugas pembantuan pada bidang Tenaga Kerja dapat dilihat dalam tabel 5.3

Tabel 5.3
Data Pegawai Pelaksana Tugas Pembantuan
Bidang Tenaga Kerja

1.	Jumlah Pegawai		:	10	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan				
	a)	S- 1	:	9	Orang
	b)	S- 2 / S-3	:	1	Orang
3.	Pangkat dan Golongan				
	a)	Penata Muda Tk I	:	1	Orang
	b)	Penata	:	2	Orang
	c)	Penata Tk I	:	4	Orang
	d)	Pembina	:	1	Orang
	e)	Pembina Tk I	:	2	Orang
4.	Jml Pejabat Struktural		:	2	Orang
5.	Jml Pejabat Fungsional		:		Orang

Rincian Pegawai pelaksana Tugas Pembantuan pada Bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel 5.4

Tabel 5.4
Data Pegawai Pelaksana Tugas Pembantuan
Bidang Pertanian

1	**Jumlah Pegawai**		:	**200**
2	**Kualifikasi Pendidikan**			
	a)	SLTP	:	3
	b)	SLTA	:	47
	c)	Diploma	:	17
	d)	S- 1	:	115
	e)	S- 2 / S-3	:	18
3	**Pangkat dan Golongan**			
	a)	Pengatur Muda	:	15
	b)	Pengatur Muda Tk I	:	12
	c)	Pengatur	:	15
	d)	Pengatur Tk I	:	7
	e)	Penata Muda	:	28
	f)	Penata Muda Tk I	:	42
	g)	Penata	:	22
	h)	Penata Tk I	:	35
	i)	Pembina	:	18
	j)	Pembina Tk I	:	5
	k)	Pembina Utama Muda	:	1
4	**Jml Pejabat Struktural**		:	22
5	**Jml Pejabat Fungsional**		:	106

8. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, baik di Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan kondisinya cukup

9. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Perangkat Daerah Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dan Dinas Pertanian Kehatanan Pangan dan Perikanan secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, Namun demikian ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut. Adapun permasalahan terkait dengan Tugas Pembantuan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5
Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
Tugas Pembantuan dari Kementrian Tenaga Kerja yang dilaksanakan Disperinaker		
1	Kegiatan Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja sub kegiatan Tenaga Kerja Mandiri Pola pendampingan, waktu pelaksanaan yang relative singkat (3 hari) sehingga peserta terbatas dalam pembelajaran materi dan praktek.	Pelatihan dilaksanakan sesuai juklak dan juknis serta peserta diharapkan mampu berswakarsa untuk belajar. Tindak lanjut kedepan diperlukan perencanaan kegiatan lanjutan di APBD agar masyarakat bisa benar-benar mengimplementasikan program/kegiatan yang telah dilaksanakan
2	Kabupaten belum memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan (infrastruktur dan sarpras)	Pinjam instruktur BLK Surakarta / LKPK Swasta. Tindak lanjut ke depan diperlukan penyiapan Sarpras untuk pelatihan skill/kewirausahaan dan penyiapan instruktrur.
Tugas Pembantuan dari Kementrian Pertanian yang dilaksanakan Dinas Pertanian KP dan Perikanan		
3.	Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, pengadaan saprodi untuk pengembnagan cabai di Kabupaten Klaten terkendala SK Pergantian PPK yang terlambat	Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi untuk dapat dipercepat proses pembuatan SK. Rencana tindak lanjut dengan Lebih selektif dalam menentukan pejabat yang ditunjuk agar meminimalkan revisi
4.	Kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, budidaya kedelai terkendala bibit yang sulit dicari jadi tanam menjadi mundur sehingga ada yang mundur tidak jadi tanam	Koordinasi dengan produsen-produsen benih yang ada. Rencana tindak lanjut dengan Menghidupkan kelompok penangkar/desa mandiri benih (DMB) yang ada

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kerja Sama Daerah diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 370 dan telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Maksud dan tujuan kerja sama daerah ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kerja sama daerah dengan daerah lain adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja sama daerah dengan daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki eksternalitas urusan lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan elisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

1. Daerah yang diajak Kerjasama

Daerah yang diajak Kerjasama oleh Pemkab Klaten terdiri dari Daerah di wilayah Subosukowonosraten maupun daerah lain yang secara rinci dapat dilihat dalam Narasi poin 9 yaitu pada penjelasan Hasil (Output dari Kerjasama)

2. Dasar Hukum

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kerja Sama Daerah diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 370 dan telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dasar Hukum Pelaksanaan setiap bidang kerjasama Daerah dapat dilihat dalam Narasi poin 9 yaitu pada penjelasan Hasil (Output dari Kerjasama)

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama daerah meliputi bidang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, secara rinci tiap bidang kerjasama yang dilakukan dapat dilihat dalam Narasi poin 9 yaitu pada penjelasan Hasil (Output dari Kerjasama)

4. Nama Kegiatan

Nama Kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama Daerah di Kabupaten Klaten adalah Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kerjasama antar daerah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Klaten. Kegiatan kerjasama secara teknis dilakukan oleh setiap OPD dengan nama kegaitan yang berbeda di tiap OPD.

5. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama antar daerah adalah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten dengan membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang diketuai oleh Bapak Sekda Kabupaten Klaten dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait seperti Bappeda, BPKD, BKPPD, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Dinas Pariwisata kebudayaan Pemuda dan Olahraga, DPMPTSP, Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai yang menangani fasilitasi kerjasama Daerah di Bagian Pemerintahan sejumlah 8 orang, dengan kualifikasi Pendidikan SD sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 Sebanyak 3 Orang dan S2 sebanyak 3 orang. Adapun data Golongan/Ruang dalah sebagai berikut :

- Golongan II/a = 1 orang
- Golongan III/b = 2 orang
- Golongan III/c = 1 orang
- Golongan III/d = 1 orang
- Golongan IV/a = 2 orang
- Golongan IV/b = 1 orang

7. Sumber dan Jumlah anggaran

Sumber anggaran dalam pelaksanaan Fasilitasi kerjasmaa daerah berasal dari APBD Kabupaten Klaten dan dilaksanakan oleh Bagian pemerintahan Setda Kabupaten Klaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.000.000 dan realisasi sebesar Rp.128.571.023. Selain anggaran di Bagian Pemerintahan Setda Klaten, alokasi anggaran pelaksanaan kerjasama daerah juga berada di OPD teknis masing-masing penyelenggara kerjasama daerah.

8. Jangka waktu kerjasama

Jangka waktu kerjasama daerah untuk Kesepakatan Bersama berlaku 1 (satu) tahun dan untuk perjanjian kerjasama berlaku sesuai kesepakatan masing-masing pelaksana kerjasama. Secara rinci jangka waktu kerjasama dapat dilihat dalam dalam Narasi poin 9 yaitu pada penjelasan Hasil (Output dari Kerjasama)

9. Hasil (Output dari Kerjasama)

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Daerah lain yang disepakati pada Tahun 2019 dan kerjasama yang masih dilaksanakan/berlaku sampai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a) Kerjasama Wajib (Kerjasama Antar Daerah yang berbatasan) melalui Forum SUBOSUKOWONOSRATEN

Dengan dasar pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah Kabupaten/Kota Se-SUBOSUKAWONOSRATEN sepakat mengambil kebijakan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se SUBOSUKAWONOSRATEN.

Kerjasama ini dituangkan dalam Keputusan Bersama Bupati/ Wali Kota se SUBOSUKAWONOSRATEN tanggal 30 Oktober 2001, Nomor 10/ 2001, Nomor 590/ 398/ 2001, Nomor 42 Tahun 2001, Nomor 389 Tahun 2001, Nomor 5 Tahun 2001, Nomor 54.a Tahun 2001, Nomor 590/ 1414/ 2001 dan telah diperbaruhi dengan Peraturan Bersama Walikota Surakarta, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen dan Bupati Klaten Nomor 11.D Tahun 2006, Nomor 7847 Tahun 2006, Nomor 36 Tahun 2006, Nomor 26 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006, Nomor 26.a Tahun 2006, Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kerjasama Antar Daerah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten, tanggal 30 Oktober 2006.

Adapun realisasi pelaksanaan kerjasama melalui forum BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN yang masih berjalan sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Perjanjian Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor 476/177/II/2018, Nomor 476/212.1/II/2018, Nomor 476/9/17/2018, Nomor 476/144/2018, Nomor 476/110.1/28, Nomor 346/II/2018, Nomor 019.5/21/031/2018, Nomor 019.6/493/15 tentang Kerjasama Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (8 Februari 2018 s/d 8 Februari 2023).
2) Perjanjian Kerjasama Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Nomor 551.2/393/II/2018, Nomor 554/8/22/2018, Nomor 463/343/II/2018, Nomor 130.13/051.II/II/2018, Nomor 019.6/300/II/2018, Nomor 551.2/78/023/2018, Nomor 551.2/012 Tahun 2018 tentang Kerjasama Bidang Perhubungan Antar Daerah Se SUBOSUKAWONOSRATEN dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (8 Februari 2018 s/d 8 Februari 2023).
3) Perjanjian Kerjasama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Nomor 0196/2584/XII/2017, Nomor 364/2730/2017, Nomor 390/2181/XII/2017, Nomor 390/1412/XII/2017, Nomor 390/1087/XII/2017, Nomor 331.1/949-32/2017, Nomor 415.4/1649/28 tentang Kerjasama Bidang Pemadam Kebakaran dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022).

4) Perjanjian Kerjasama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Nomor 520/2411/2017, Nomor 0196/5156/28/2017, Nomor 521/2013/XII/2017, Nomor 520/1584.1/XII/2017, Nomor 520/1714-020/XII/2017, Nomor 520/3101/26 tentang Kerjasama Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Antar Daerah Di SUBOSUKAWONOSRATEN jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun (20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022).
5) Perjanjian Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Nomor 415.4/1537/XII/2017, Nomor 415.4/999/38/2017, Nomor 002/824/XII/2017, Nomor 360/67/XII/2017, Nomor 60/23/2018, Nomor 392/349-038/2017, Nomor 360/12/PKS/XII/2017 tentang Kerjasama Penanggulangan Bencana Di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun (20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022).
6) Perjanjian Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Nomor 800/1539/XII/2015, Nomor 415.4/1466/13/2015, Nomor 019.6/1933/XII/2015, Nomor 331.1/1059/2015, Nomor 130/001/XII/2015, Nomor 300/2/039/2015, Nomor 301/17/21/2015 tentang Kerjasama Operasional Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan

Perlindungan Masyarakat serta Pengamanan dan Pengawalan Pejabat dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun (30 Desember 2015 s/d 30 Desember 2020).

7) Perjanjian Kerjasama BAPPEDA Kota Surakarta, BAPPEDA Kabupaten Boyolali, BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo, BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, Kantor LITBANG dan IPTEK Kabupaten Wonogiri, Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen, BAPPEDA Kabupaten Klaten Nomor 050/1.159/2015, Nomor 050/956/12/2015, Nomor 050/304/2015, Nomor 050/001.24/I/2015, Nomor 130/52/2015, Nomor 800/274/31/2015, Nomor 050/285/09/2015 tentang Kerjasama Lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun (6 Maret 2015 s/d 6 Maret 2020).
8) Perjanjian Kerjasama Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten Nomor 556/0698, Nomor 556/1514/26/2018, Nomor 556/2217/2018, Nomor 556/391/2018, Nomor 556/315, Nomor 556/315, Nomor 556/26/026/2018, Nomor 556/576/13/2018 tentang Kerjasama Bidang Pengembangan Kepariwisataan Antar Daerah SOLO RAYA dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun (3 Mei 2018 s/d 3 Mei 2023).

b) Kerja sama daerah dengan daerah lain kategori kerja sama wajib

1) Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/PK/37/2017 dan Nomor 415.4/PK/10/2017 antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Klaten Dan Kabupaten Gunungkidul dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (11 April 2017 s/d 11 April 2022).
2) Perjanjian Kerjasama Nomor 38/PK.KDH/A/2015 dan Nomor 11 Tahun 2015 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Jalan Di Wilayah Perbatasan antara Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (5 Juni 2015 s/d 5 Juni 2020).

3) Kesepakatan Bersama Nomor 22/019.6/Tahun 2018 dan Nomor 100/5647.1/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (12 Desember 2018 s/d 12 Desember 2019).
4) Perjanjian Kerjasama Nomor 07/PKS/2018 dan Nomor 100/5647.2/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Klaten Dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (12 Desember 2018 s/d 12 Desember 2023).
5) Perjanjian Kerjasama Nomor 445.4/41/2018 dan Nomor 019.6/11/2018 antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Gedangsari I Kabupaten Gunungkidul dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Kesehatan dan Alih Ilmu Kesehatan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (13 Maret 2018 s/d 13 Maret 2020).
6) Perjanjian Kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Semin I Kabupaten Gunungkidul dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (22 Juli 2019 s/d 22 Juli 2021).
7) Perjanjian Kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Ngawen II Kabupaten Gunungkidul dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Rujukan Medis dan Pelayanan Rujukan Kesehatan lain Bagi Pasien yang Dirujuk dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (30 Agustus 2016 s/d 30 Agustus 2019).

c) Kerja sama daerah dengan daerah lain kategori kerja sama sukarela

1) Kesepakatan Bersama Nomor 15.14/NK/I/02/2019 antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tanggal 13 Februari 2019.

2) Kesepakatan Bersama Nomor 17/019.6/TAHUN 2019 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah, tanggal 11 Desember 2019 dengan jangka waktu kerjasama selama 12 (dua belas) bulan.
3) Nota Kesepakatan Nomor 12/019.6/Tahun 2019 dan Nomor 466.1/0136/Bag.Huk antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyaluran Bantuan Dana Bencana Alam tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu kerjasama selama 12 (dua belas) bulan.
4) Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PKS/Tahun 2019 dan Nomor 466.1/0137/Bag.Huk antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyaluran Dana Bantuan Masyarakat Untuk Korban Bencana Alam. tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun.
5) Kesepakatan Bersama Nomor 11/019.6/Tahun 2018 dan Nomor 019.6/369/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Semarang tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (25 September 2018 s/d 25 September 2019).
6) Kesepakatan Bersama Nomor 15/019.6/Tahun 2018 dan Nomor 06/MoU/2018 Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyaluran Bantuan Dana Bencana Alam dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (2 November 2018 s/d 2 November 2019).
7) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/2384/2018 dan Nomor PKS/130.5/1400/21 antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dengan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (25 September 2018 s/d 25 September 2021).
8) Perjanjian Kerjasama Nomor 05/PKS/2018 dan Nomor 03.02.10/108/MoU/PMI-KLU/XI/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyaluran Dana Bantuan Masyarakat Untuk Korban Bencana

Alam tanggal 2 November 2018 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

9) Perjanjian Kerjasama Nomor 139/34/PEM-OTDA Tahun 2018 dan Nomor 04/PKS/2018 antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Umum (TU) Di Unit Permukiman Transmigrasi Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (2 November 2018 s/d 2 November 2023).
10) Perjanjian Kerjasama Nomor Nomor 03/PKS/2018 antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Umum (TU) Di Unit Permukiman Transmigrasi Batu Ampar Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (2 November 2018 s/d 2 November 2023).
11) Perjanjian Kerjasama Nomor 9 Tahun 2014 dan Nomor 9.A/SOSNAKERTRANS/2014 antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2019).
12) Perjanjian Kerjasama Nomor 180/20.a.03/Hukum/2014 dan Nomor 15 Tahun 2014 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di UPT. Kancu'u Saebawalati Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (25 Juni 2014 s/d 25 Juni 2019).
13) Perjanjian Kerjasama Nomor 300/7/B.3/2015 dan Nomor 20 Tahun 2015 antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum (TU) Lokasi Malakoni Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (3 September 2015 s/d 3 September 2020).

14) Perjanjian Kerjasama Nomor 129/12.C/Hkm.org/IX/2015 dan Nomor 19 Tahun 2015 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum (TU) Di Pangea Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) SP.3 Kawasan Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (3 September 2015 s/d 3 September 2020).
15) Perjanjian Kerjasama Nomor 180/36/PERJ/HK-VI/2016 dan Nomor 42 Tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum di Sepunggur Unit Pemukiman Transmigrasi Satuan Pemukiman 3 (Tiga) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (20 Juni 2016 s/d 20 Juni 2021).
16) Perjanjian Kerjasama Nomor 375.1/Trans-2016 dan Nomor 45 Tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Satuan Pemukiman Padang Tarok 1 (Satu) Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (26 Mei 2016 s/d 26 Mei 2016).
17) Perjanjian Kerjasama Nomor 180/MOU/8/2016 dan Nomor 53 Tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Umum (TU) Di UPT. Waleh SP.3 Kawasan Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (20 Mei 2016 s/d 20 Mei 2021).
18) Perjanjian Kerjasama Nomor 1923/2016 dan Nomor 475.17/151.A/14 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten tentang Pelaksanaan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Sepunggur Desa Utama Kawasan Transmigrasi Salim Batu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimanatan Utara, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (20 April 2016 s/d 20 April 2021).

19) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengiriman dan Penempatan Transmigrasi Asal Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, tanggal 26 April 2017 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
20) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/15/2018 dan Nomor 019.6/3086/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Dalam Pelayanan Rujukan dan Pelayanan Parsial dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (2 April 2018 s/d 2 April 2020).
21) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah tentang Pelayanan Rujukan Parsial Pemeriksaan Panoramic X- Ray dan Periapical X- Ray dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020.

10. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pelaksanaan Kerjasama Daerah adalah sebagai berikut :

1) Belum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama Daerah baik Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Sinergi perencanaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2) Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang belum memahami pentingnya kerja sama wajib yang sifatnya regional sebagai sebuah kekuatan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.
3) Pemerintah Daerah yang sudah membentuk Sekretariat Kerja Sama/Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) saat ini mengalami kendala terkait kelembagaan dan kepastian hukum terhadap mekanisme pendanaan kelembagaan Sekretariat Kerja Sama/Badan Kerjasama.
4) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Kerjasama, belum memahami ruang lingkup kerjasama dalam pelaksanaannya membutuhkan pengalokasian anggaran sehingga masih terdapat perjanjian kerjasama yang belum dapat dilaksanakan.

5) Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah melalui Forum Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN belum memiliki sinergitas diantara setiap Kabupaten/Kota yang tergabung dalam forum tersebut.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Segera diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
2) Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Klaten harus selalu melakukan sosialisasi, pemahaman persepsi yang sama terhadap peraturan perundangan yang terkait kerja sama daerah secara berkesinambungan, dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.
3) Meningkatkan perhatian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kerjasama Daerah dalam bentuk pengalokasian anggaran, berperan aktif dalam pelaksanaan kerjasama daerah dan pengawasan pelaksanaan kerjasama daerah agar sesuai dengan yang diharapkan.
4) Pemerintah Provinsi perlu berperan aktif melakukan asistensi terhadap pembentukan Sekretariat Kerja Sama oleh Kabupaten/Kota diwilayahnya. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri juga harus berperan aktif untuk melakukan asistensi apabila kerja sama antar provinsi akan membentuk Sekretariat Kerja Sama Daerah.
5) Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan pedoman terkait pembentukan Sekretariat Kerja Sama Daerah termasuk mekanisme pendanaannya.
6) Perlu adanya *study* banding/ *Study* lapangan Pemerintah Daerah di daerah yang melaksanakan kerja sama yang sudah maju, dan koordinasi dalam rangka sinkronisasi usulan program dan penganggaran dalam Musrenbang Kabupaten (Anggota Musrenbang saling mengundang saat pelaksanaan Musrenbang). Meningkatkan intensitas pertemuan antar Sub Sekretariat BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak ketiga

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik, kerja sama dalam pengelolaan

aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerja sama investasi dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerja sama penyelesaian perselisihan, sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

1. Mitra yang diajak Kerjasama

Mitra yang diajak Kerjasama oleh Pemkab Klaten terdiri dari Perguruan Tinggi baik Negeri dan Swasta, BUMN, Swasta dan pihak ketiga lainnya. Secara rinci dapat dilihat dalam Narasi poin 9 yaitu pada penjelasan Hasil (Output dari Kerjasama)

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan setiap bidang kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dapat dilihat dalam Narasi poin 9 yaitu pada penjelasan Hasil (Output dari Kerjasama)

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi bidang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, secara rinci tiap bidang kerjasama yang dilakukan dapat dilihat dalam Narasi poin 9 yaitu pada penjelasan Hasil (Output dari Kerjasama)

4. Nama Kegiatan

Nama Kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama Daerah di Kabupaten Klaten adalah Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kerjasama antar daerah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Klaten. Kegiatan kerjasama secara teknis dilakukan oleh setiap OPD dengan nama kegaitan yang berbeda di tiap OPD.

5. SKPD Penyelenggara

Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama antar daerah adalah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten dengan membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang diketuai oleh Bapak Sekda Kabupaten Klaten dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait seperti Bappeda, BPKD, BKPPD, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Dinas Pariwisata kebudayaan Pemuda dan Olahraga, DPMPTSP, Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai yang menangani fasilitasi kerjasama Daerah di Bagian Pemerintahan sejumlah 8 orang, dengan kualifikasi Pendidikan SD sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 Sebanyak 3 Orang dan S2 sebanyak 3 orang. Adapun data Golongan/Ruang dalah sebagai berikut:

- Golongan II/a = 1 orang
- Golongan III/b = 2 orang
- Golongan III/c = 1 orang
- Golongan III/d = 1 orang
- Golongan IV/a = 2 orang
- Golongan IV/b = 1 orang
-

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran dalam pelaksanaan Fasilitasi kerjasmaa daerah berasal dari APBD Kabupaten Klaten dan dilaksanakan oleh Bagian pemerintahan Setda Kabupaten Klaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.000.000 dan realisasi sebesar Rp.128.571.023. Selain anggaran di Bagian Pemerintahan Setda Klaten, alokasi anggaran pelaksanaan kerjasama daerah juga berada di OPD teknis masing-masing penyelenggara kerjasama daerah.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu untuk Kesepakatan Bersama berlaku 1 (satu) tahun dan untuk perjanjian kerjasama berlaku sesuai kesepakatan masing-masing pelaksana kerjasama. Secara rinci jangka waktu kerjasama dapat dilihat dalam dalam Narasi poin 9 yaitu pada penjelasan Hasil (Output dari Kerjasama)

9. Hasil Kerjasama

Beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pihak ketiga pada tahun 2019 dan kerjasama yang masih dilaksanakan/berlaku sampai dengan tahun 2019, sebagaimana tersebut di bawah ini.

a. Data Kerjasama Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pihak ketiga yang disepakati pada tahun 2019.

1) Kesepakatan Bersama Nomor 01/019.6/16/Tahun 2019 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Toko Faham Timur, Toko Buku Jendela, CV. Amigo Mangesti Utomo tentang Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Anak Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Anak Di Kabupaten Klaten, tanggal 22 Februari 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.

2) Perjanjian Kerjasama Nomor 470/170/16 dan Nomor 08.007/AMG.SDM/III/ 19 antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan CV. Amigo Mangesti Utomo tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pelayanan Pemberian Discount/Keringanan Harga Untuk Belanja Di CV. Amigo Mangesti Utomo Kabupaten Klaten, tanggal 14 Maret 2019.
3) Kesepakatan Bersama Nomor 05/019.6/TAHUN 2019, Nomor HK.03.01/II.I/10010A/2019, Nomor 019.6/176/2019, Nomor 740/SEKUM.100.2/V/ 2019, Nomor 278/RSIA/A/V/2019, Nomor 024/PKS/Dirut.RSCH/ VI/2019, Nomor 670/RSU.MKH/V/2019, Nomor 1184/JAN/IV.6.A.U.1/J/2019, Nomor 121/PKS/DIR/PKU/V/ 2019, Nomor 320/SEKUM.18/V/2019 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Islam Klaten dengan Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak 'Aisyiyah Klaten dengan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Pedan dengan Rumah Sakit Umum Pembina Kesehatan Umum Delanggu dengan Rumah Sakit Umum Pusat Kesehatan Umat Jatinom dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Islam Cawas tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.
4) Perjanjian Kerjasama Nomor 441.91/4698/03/14 dan Nomor HK.03.01/II.I/10010A/2019 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Bulan.
5) Perjanjian Kerjasama Nomor 441.91/4698/03/14 dan Nomor 019.6/176/2019 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Bulan.

6) Perjanjian Kerjasama Nomor 441.91/4698/03/14 dan Nomor 740/SEKUM.100.2/V/2019 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Islam Klaten tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Bulan.
7) Perjanjian Kerjasama Nomor 441.91/4698/03/14 dan Nomor 278/RSIA/A/V/2019 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak 'Aisyiyah Klaten tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Bulan.
8) Perjanjian Kerjasama Nomor 441.91/4698/03/14 dan Nomor 025/PKS/Dirut.RSCH/VI/2019 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Bulan.
9) Perjanjian Kerjasama Nomor 441.91/4698/03/14 dan Nomor 670/RSU.MKH/V/2019 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Pedan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Bulan.
10) Perjanjian Kerjasama Nomor 441.91/4698/03/14 dan Nomor 1376/JAN/IV.6.A.U.1/1/ 2019 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Umum Pembina Kesehatan Umum Delanggu tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Bulan.
11) Perjanjian Kerjasama Nomor 441.91/4698/03/14 dan Nomor 121/PKS/DIR/PKU/V/ 2019 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Umum Pusat Kesehatan Umat Jatinom tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Bulan.

12) Perjanjian Kerjasama Nomor 441.91/4698/03/14 dan Nomor 320/SEKUM.18/V/2019 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Islam Cawas tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Bulan.
13) Kesepakatan Bersama Nomor 06/019.6/TAHUN 2019 dan Nomor 09/UST/Rek/MoU/VII/2019 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah Di Kabupaten Klaten Melalui Kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, tanggal 1 Juli 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.
14) Kesepakatan Bersama Nomor PER/4/072019 dan Nomor 07/019.6/TAHUN 2019 antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Wilayah Kabupaten Klaten, tanggal 1 Juli 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.
15) Kesepakatan Bersama Nomor 08/019.6/TAHUN 2019 antara Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Klaten, tanggal 1 Juli 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.
16) Kesepakatan Bersama Nomor 10/019.6/TAHUN 2019 dan Nomor 529/C.5-VIII/VII/2019 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah Di Kabupaten Klaten Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, tanggal 18 Juli 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.
17) Kesepakatan Bersama Nomor 11/019.6/TAHUN 2019 dan Nomor 602/R/AD/2019 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Universitas Slamet Riyadi Surakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pembangunan Kabupaten Klaten, tanggal Agustus 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.

18) Kesepakatan Bersama Nomor 16/019.6/TAHUN 2019 antara Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KomPAK) Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pendidikan Antikorupsi Di Kabupaten Klaten, tanggal 20 Nopember 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.
19) Kesepakatan Bersama Nomor 18/019.6/TAHUN 2019 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, tanggal 26 Desember 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.
20) Kesepakatan Bersama Nomor 19/019.6/TAHUN 2019 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa Surakarta tentang Pembangunan Daerah Di Kabupaten Klaten Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa Surakarta, tanggal 30 Desember 2019 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) Bulan.
21) Perjanjian Kerjasama Nomor 800/1057/29 dan Nomor 440/UN27.21/KS/2019 antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Orientasi Lapangan Bimbingan Teknis Pembekalan PNS Yang Akan Memasuki Purna Tugas (Bimbingan Teknis Pembekalan PNS Yang Akan Memasuki Purna Tugas) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1 hari (20 Maret 2019).
22) Perjanjian Kerjasama Nomor 800/4117/29 dan Nomor 2797.1/UN27.21/KS/2019 antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Uji Kompetensi Dalam Rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan jangka waktu pelaksanaan selama 2 hari (14-15 Oktober 2019).
23) Perjanjian Kerjasama Nomor 800/3766/29 dan Nomor 2574.1/UN27.21/KS/2019 antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Uji Kompetensi

Calon Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan jangka waktu pelaksanaan selama 23 September 2019 sampai dengan 21 November 2019.

24) Perjanjian Kerjasama Nomor 800/01726 dan Nomor 800/0989 antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten tentang Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kepegawaian Tahun 2019.
25) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/4177/30 dan Nomor 1139/PMS.04/009/2019 antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten tentang Penempatan Deposito Berjangka dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (24 Oktober 2019 s/d 24 Oktober 2020).
26) Perjanjian Kerjasama Nomor 360/309/2019 antara BPBD Klaten dengan STIKES Aisyiyah Surakarta tentang Program Pendidikan Profesi Ners Penyelenggaraan Praktek Manajemen disaster in community dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan.
27) Perjanjian Kerjasama Nomor 21/41/Slo/P/B dan Nomor 530/1730.1/20 dan Nomor 518.3/1595/19 dan Nomor 518.3/582.1/13 antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Unggulan Sentra Kerajinan Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi Dalam Rangka Mendukung Program Pengembangan Ekonomi Daerah /*Local Economic Development* (LED) Di Kabupaten Klaten dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun (6 Agustus 2019 s/d 6 Agustus 2022).
28) Nota Kesepakatan Nomor 43/MoU/33.10.UP.04.05/III/2019 dan Nomor 590/240/09/2019 antara Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pengintegrasian Data Pertanahan, tanggal 6 Maret 2019 dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun.
29) Nota Kesepahaman Nomor 22/KOMINFO/HK.03.02/04/2019, Nomor 04/019.6/TAHUN 2019 antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kabupaten Klaten, tanggal 15

Mei 2019 dengan jangka waktu kerjasama selama 12 (dua belas) bulan.

30) Nota Kesepahaman Nomor 21.1/X/NK/2019 dan Nomor 14/019.6/TAHUN 2019 antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Klaten tanggal 17 Oktober 2019 dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun.
31) Perjanjian Kerjasama Nomor 14030/H.H1/KB/2019 dan Nomor 02/PKS/Tahun 2019 antara Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Candi Plaosan Di Kabupaten Klaten tanggal 18 Oktober 2019 dengan jangka waktu kerjasama selama 3 (tiga) tahun.
32) Perjanjian Kerjasama Nomor 14029/H.H1/KB/2019 dan Nomor 03/PKS/Tahun 2019 antara Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Candi Sojiwan Di Kabupaten Klaten tanggal 18 Oktober 2019 dengan jangka waktu kerjasama selama 3 (tiga) tahun.
33) Kesepakatan Bersama Nomor NK-21/WPB.14/2019 dan Nomor 15/019.6/TAHUN 2019 antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pemanfaatan Bersama Data Dan Informatika Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah tanggal 15 Nopember 2019 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

b. Data Kerjasama Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pihak ketiga yang masih dilaksanakan/berlaku sampai dengan tahun 2019.

1) Kesepakatan Bersama Nomor MOU/003/PBAF/V/2018 dan Nomor 05/019.6/TAHUN 2018 antara PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Kerjasama Layanan Perbankan Dan Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Kepada Aparatur Sipil Negara Aktif Maupun Yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (2 Mei 2018 s/d 2 Mei 2019).

2) Kesepakatan Bersama Nomor 07/019.6/TAHUN 2018 dan Nomor 1.366/ITYSTTL/Rek/VI/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Institut Teknologi Yogyakarta tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (22 Mei 2018 s/d 22 Mei 2019).
3) Kesepakatan Bersama Nomor 08/019.6/TAHUN 2018 dan Nomor 3546/IT4/PM/2018 TAHUN 2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (5 Juli 2018 s/d 5 Juli 2019).
4) Kesepakatan Bersama Nomor 10/019.6/TAHUN 2018 dan Nomor 5148/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan Universitas Gadjah Mada tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (20 September 2018 s/d 20 September 2019).
5) Kesepakatan Bersama Nomor 20/2/Slo/NK/B dan Nomor 12/019.6/Tahun 2018 antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Unggulan Sentra Kerajinan Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi Dalam Rangka Mendukung Program Pengembangan Ekonomi Daerah /*Local Economic Development* (*LED*) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (18 Oktober 2018 s/d 18 Oktober 2019).
6) Kesepakatan Bersama Nomor 17/019.6 /TAHUN 2018, Nomor HK.03.01/II.I/21403/2018, Nomor 441.9/12.291/2018, Nomor 019.6/2474/14, Nomor 1127/SEKUM.100.2/XI/2018, Nomor 551/RSIA/A/XI/2018, Nomor 2064/JAN/IV.6.AU.1/J/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan Rumah Sakit dr. RM. Soedjarwadi Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dengan Rumah Sakit Islam Klaten dengan Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak 'Aisyiah Klaten dengan Rumah Sakit Pusat Kesehatan Umat Muhammadiyah Delanggu tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar, Penghuni Panti Sosial dan Lembaga

Pemasyarakatan, Korban Krisis Kesehatan, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Kejadian Luar Biasa Atau Wabah dan Gizi Buruk dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (16 November 2018 s/d 16 November 2019).

7) Kesepakatan Bersama Nomor 18/019.6/TAHUN 2018 dan Nomor IPAS-IDS/PRO/2018/NOV/046 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia tentang Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melalui Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Terintegrasi (Pekerti) Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (16 November 2018 s/d 16 November 2019).
8) Kesepakatan Bersama Nomor 17720 /It6.1/Dn/2018 dan Nomor 20/019.6/ TAHUN 2018 antara Institut Seni Indonesia Surakarta dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pengembangan Bidang Seni Budaya Di Kabupaten Klaten Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (6 Desember 2018 s/d 6 Desember 2019).
9) Kesepakatan Bersama Nomor HK.201/10/1/STTD-2018 dan Nomor 21/019.6/TAHUN 2018 antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Klaten Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (10 Desember 2018 s/d 10 Desember 2018).
10) Nota Kesepahaman Nomor 906/028/II/2018 dan Nomor 235/KN.01.10/II/2018 antara PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten dengan STIE AUB Surakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (22 Februari 2018 S/D 22 Februari 2023).
11) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/0023/30/2018 dan Nomor 0057/PEM.02.01/009/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten tentang Layanan Kas Daerah Online dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 Januari 2018 s/d 2 Januari 2020).
12) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/0024/30/2018 dan Nomor 0058/PEM.02.01/009/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Kerjanya Serta Badan Layanan Umum Daerah dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 Januari 2018 s/d 2 Januari 2020).

13) Kesepakatan Bersama Nomor 06/019.6/Tahun 2018 dan Nomor MO-00006/WPJ-32/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II tentang Penyediaan Data Melalui Program Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak tanggal 7 Mei 2018 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
14) Perjanjian Kerjasama Nomor PER/10/052015 dan Nomor 091.6/405/29 antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Klaten dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pelayanan Perizinan dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
15) Perjanjian Kerjasama Nomor PKS-01/WJP 31/KP/05/2018 dan Nomor 091.6/36/18/ TAHUN 2018 antara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
16) Perjanjian Kerjasama Nomor 411/KTR/VI-05/2018 dan Nomor 44 TAHUN 2018 antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Bagi Pemohon Perizinan Di Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
17) Perjanjian Kerjasama Nomor 180/360/11/2018, Nomor B-1398/0.3.19/Gs/07/2018, Nomor B/2492/VII/HUK.8.1/2018 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kejaksaan Negeri Klaten dan Kepolisian Resor Klaten tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (19 Juli 2018 s/d 19 Juli 2023).

18) Perjanjian Kerjasama Nomor 02 TAHUN 2018 Nomor W13.PP01.02-1598 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tentang Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (27 Agustus 2018 s/d 27 Agustus 2021).
19) Perjanjian Kerjasama Nomor 690/076/V/2018 dan Nomor 474/071/V/2018 antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Sigedang Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten tanggal 15 Mei 2018 dan berlaku selama PDAM Tirta Merapi masih memanfaatkan sumber mata air Sigedang.
20) Perjanjian Kerjasama Nomor 906/009/I/2018 dan Nomor HK.03.01/II.I/2283/2018 antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro tentang Penyediaan Air Bersih Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro tanggal 22 Januari 2018 dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
21) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/2/2018 dan Nomor 070/2/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dengan CV. Purbaya tentang Penyelenggaraan Jasa Penggunaan Mesin Printer dan Pembelian Toner dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019).
22) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/4/2018 dan Nomor 30/PEM.02.01/009/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten tentang Penempatan Deposito Berjangka Rumah Sakit Daerah Bagas Waras dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (20 Februari 2018 s/d 20 Februari 2021).
23) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/5/2018 dan Nomor 07/PKS-L/KIN/I/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dengan PT Kalimas Inti Niaga tentang Printer dan etiket farmasi dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019).
24) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/9/2018 dan Nomor 15/SPBU/III/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dan SPBU 44.574.21 tentang Pembelian BBM Pertamax

dan Dexlite untuk Kegiatan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (12 Maret 2018 s/d 12 Maret 2020).

25) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/10/2018 dan 069/UTD/III/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dengan PMI Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Bank Darah dan Pelayanan Darah pada Rumah Sakit Daerah Bagas Waras dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (13 Maret 2018 s/d 13 Maret 2020).
26) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/14/2018 dan Nomor II.02.e/243.a/MOU/IV/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dan STIKES Kusuma Husada tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (2 April 2018 s/d 2 April 2021).
27) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/18/2018 dan Nomor 1153/SEKUM/100.2/IV/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dengan Rumah Sakit Islam Klaten tentang Pelayanan Kerumahsakitan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 April 2018 s/d 2 April 2020).
28) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/19/2018 dan Nomor 1154/SEKUM/100.2/IV/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten Rumah Sakit Islam Klaten tentang Pelayanan Dokter Anestesi dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 April 2018 s/d 2 April 2020).
29) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/25/2018 dan Nomor 1154/SEKUM/100.2/IV/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dan PT Mitra Sejati Medika Penyelenggaraan Pemenuhan Kebutuhan BHP Orthopedi.
30) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/29/2018 dan Nomor 4/475/R antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dan Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten tentang Kerjasama Pengelolaan Jasa Keuangan Rumah Sakit dan Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (23 Juli 2018 s/d 23 Juli 2021).
31) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/32/2018 dan Nomor 1579/C.8-II/FIK/VIII/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dan Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (14 Agustus 2018 s/d 14 Agustus 2021).

32) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/39/2018 dan Nomor 1579/C.8-II/FIK/VIII/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten tentang Perjanjian Sewa Ruangan Untuk Anjungan Tunai Mandiri dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (31 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2021).
33) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/41/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Bagian Hubungan Masyarakat tentang Penguatan Promosi Brand Rumah Sakit Daerah Bagas Waras dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun (3 September 2018 s/d 3 September 2019).
34) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/42/2018 dan Nomor 019.6/1265/21 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika tentang Penguatan Promosi Brand Rumah Sakit Daerah Bagas Waras dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun (3 September 2018 s/d 3 September 2019).
35) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/43/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten Dinas Kesehatan Penguatan Promosi Brand Rumah Sakit Daerah Bagas Waras dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun (3 September 2018 s/d 3 September 2019).
36) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/50/2018 dan Nomor 001/E-MOU/Prakerin/SMK kes-RH/X/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Rahani Husada Klaten tentang Pelaksanaan Program Praktik Lapangan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021).
37) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/50/2018 dan Nomor 415/KTR/VI-05/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali tentang Implementasi Integrasi Sistem antara V-Claim dengan Sim-RS dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan (1 November 2018 s/d 31 Januari 2019).
38) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/74/2018 dan Nomor JAN-11/C.4.2/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dan PT Taspen Persero tentang Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (26 November 2018 s/d 26 November 2020).

39) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/330/2018 dan Nomor 853/KTR/VI-05/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun (1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019).
40) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/331/2018 dan Nomor 887/KTR/VI-05/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali tentang Pelayanan Obat Penyakit Kronis Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun (1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019).
41) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Akta Kelahiran, Bagi Pasien Penduduk Kabupaten Klaten Yang Berdomisili di Klaten tertanggal 27 Desember 2018 s/d masing-masing pihak tidak ada yang mengajukan perubahan atau pengakhiran.
42) Perjanjian Kerjasama antara Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Program Intersip Dokter Indonesia dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (6 Desember 2019 s/d 6 Desember 2022).
43) Perjanjian Kerjasama antara PT. SARANA PATRA JATENG dan PT. WASTEC INTERNATIONAL dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Di Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun (1 April 2019 s/d 31 Maret 2020).
44) Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Penyediaan Mobil Tangki Air Bersih dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (26 April 2019 s/d 25 April 2022).
45) Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pengembangan dan Peningkatan

Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda Pada SMKN 3 Klaten dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (17 September 2019 s/d 17 September 2022).

46) Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (22 Juli 2019 s/d 22 Juli 2022).
47) Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (23 Februari 2019 s/d 23 Februari 2022).
48) Perjanjian Kerjasama antara Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (8 Februari 2019 s/d 8 Februari 2022).
49) Perjanjian Kerjasama antara Universitas Widya Dharma Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (14 Juni 2019 s/d 14 Juni 2022).
50) Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Kabupaten Klaten tentang Penggunaan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten Jawa Tengah Sebagai Lahan Praktik Untuk Peserta Didik, Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta dengan jangka waktu 1 Februari 2019 s/d 2 Januari 2024.
51) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro dan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (5 Maret 2019 s/d 5 Maret 2022).

52) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pedan tentang Pelaksanaan Program Praktik Lapangan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (15 Januari 2019 s/d 15 Januari 2022).
53) Perjanjian Kerjasama antara CV. Andrety Globaal Media Sehat dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Unit Hemodialisa dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (19 Nopember 2015 s/d 19 Nopember 2020).
54) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten tentang Pengambilan dan Pembuangan Sampah Non Medis pada Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 2 (tiga) tahun (2 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019).
55) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan PT. Arfa Jaya Medika tentang Penyelenggaraan Instalasi Laboratorium Klinik dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (21 September 2015 s/d 21 September 2020).
56) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Khusus Bedah Diponegoro Dua Satu Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (10 Juni 2019 s/d 10 Juni 2021).
57) Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasa Raharja Perwakilan Surakarta dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Penanganan dan Penyelesaian Santuan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Terpadu dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (2 Oktober 2017 s/d 2 Oktober 2022).
58) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020).
59) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Kejaksaan Negeri Klaten tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (15 Maret 2018 s/d 15 Maret 2020).

60) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Khusus Bedah Islam Cawas Klaten dengan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (6 Juli 2017 s/d 6 Juli 2020).
61) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten tentang Pelayanan Kerumahsakitan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (29 Nopember 2017 s/d 29 Nopember 2020).
62) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Pelayan Pelayanan Back-Up Air Bersih dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (8 Nopember 2017 s/d 8 Nopember 2020).
63) Perjanjian Kerjasama Nomor 45 /PKS/TAHUN 2018 dan Nomor 200/PKS-KLATEN/AM/XII/2018 antara Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan PT. Woolu Aksara Maya tentang Pembuatan Perpustakaan Digital iKlaten dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (29 November 2018 s/d 29 November 2023).
64) Perjanjian Kerjasama Nomor HK.201/10/2/STTD-2018 dan Nomor 06/PKS/TAHUN 2018 antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Bidang Perhubungan Darat dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (10 Desember 2018 s/d 10 Desember 2023).
65) Perjanjian Kerjasama Nomor 470/1.041.a/17 dan Nomor 470/639/16 antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Dalam Pelayanan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (9 Oktober 2018 s/d 9 Oktober 2023).
66) Kesepakatan Bersama Nomor 2 Tahun 2016 dan Nomor B7116/BATAN/SU/KS0001/07/2016 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan BATAN tentang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (13 Juli 2016 s/d 13 Juli 2021).

67) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/2033/2017, Nomor MOU-3/PW12/3/2017, Nomor 0983/PEM.02.01/2017 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten tentang Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Proses Pencairan Surat Perintah Dana Secara Online di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (23 November 2017 s/d 23 November 2020).
68) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/1415.1/2017 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. Taspen (Persero) tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dan Pelayanan Proaktif dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (22 Juli 2017 s/d 21 Juli 2019).
69) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/1825/30/2017 dan Nomor 1100/PEM.02.01/009/2017 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Klaten tentang Penempatan Deposito Berjangka dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 Januari 2018 s/d 2 Januari 2020).
70) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/0023/30/2018 dan Nomor 0057/PEM.02.01/009/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten tentang Layanan Kas Daerah *Online* dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 Januari 2018 s/d 02 Januari 2020).
71) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/0024/30/2018 dan Nomor 0058/PEM.02.01/009/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerjanya Serta Badan Layanan Umum Daerah dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 Januari 2018 s/d 02 Januari 2020).
72) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/0023/30/2018 dan Nomor 0057/PEM.02.01/009/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten tentang Layanan Kas Daerah Online dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (2 Januari 2018 s/d 02 Januari 2020).

73) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/2558/15/2016 dan Nomor B.6349/KC-VII/OPS/II/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Klaten dengan Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten tentang Penempatan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun (29 November 2016 s/d 29 November 2020).
74) Kesepakatan Bersama Nomor 12/019.6/Tahun 2018 dan Nomor 20/2/Slo/P/B antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo tentang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Unggulan Sentra Kerajinan Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Dalam Rangka Mendukung Program Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah Atau *Local Economic Development* (LED) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (18 Oktober 2018 s/d 18 Oktober 2019).
75) Perjanjian Kerjasama Nomor 02 Tahun 2018 dan Nomor W13.PP01.02-1598 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tentang Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (27 Agustus 2018 s/d 27 Agustus 2021).
76) Kesepakatan Bersama Nomor 19/019.6/Tahun 2018 dan Nomor 200/MOU-KLATEN/AM/XII/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan PT. Woolu Aksara Maya tentang Pemanfaatan Aplikasi iKlaten Untuk Penunjang Smart City dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (29 November 2018 s/d 29 November 2019).
77) Perjanjian Kerjasama Nomor 45/PKS/Tahun 2018 dan Nomor 200/PKS-KLATEN/AM/XII/2019 antara Dinas Arsip dan Perpustakaan dan PT. Woolu Aksara Maya tentang Pembuatan Perpustakaan Digital iKlaten dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (29 November 2018 s/d 29 November 2023).
78) Kesepakatan Bersama Nomor MOU/003/PBAF/V/2018 dan Nomor 05/019.6/TAHUN 2018 antara PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Kerjasama Layanan Perbankan Dan Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Kepada Aparatur Sipil Negara Aktif Maupun Yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (2 Mei 2018 s/d 2 Mei 2019).

79) Kesepakatan Bersama Nomor KLA/4/363/2018 dan Nomor 16/019.6 /TAHUN 2018 antara Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Kerjasama Pemberdayaan Perekonomian Daerah dan Pemanfaatan Produk Dan Jasa Perbankan Di Kabupaten Klaten dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (12 November 2018 s/d 12 November 2019).

80) Perjanjian Kerjasama Nomor 470/43/V/2016 dan Nomor 063/F.02.01/LPP/V/2016 antara Pemerintah Desa Kahuman Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dengan Lembaga Penelitian Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Dharma Klaten dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (17 Mei 2016 s/d 17 Mei 2021).

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Koordinasi

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sesuai Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) di tingkat Kabupaten. Forum Koordinasi Pemimpin Daerah terdiri dari Bupati, Ketua DPRD. Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama , Kantor Imigrasi dan Kepala Pusdiklatpur.

2. Materi Koordinasi

Materi Koordinasi terkait beberapa hal, antara lain :

- Ekonomi, Sosial Budaya Keamanandan Ketertiban.
- Koordinasi Permasalahan Konflik Sosial.
- Koordinasi mengenai P4GN Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- Koordinasi mengenai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- Koordinasi mengenai pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- Koordinasi mengenai Kewaspadaan Dini Daerah
- Koordinasi Pengawasan orang asing

3. Instansi Vertikal yang terlibat

Kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi Vertikal mendasarkan pada Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. Adapun Instansi vertikal yang terlibat antara lain :

- DPRD Kabupaten Klaten
- Polres Klaten
- KODIM 0723 Klaten
- Kejaksaan Negeri Klaten
- Pengadilan Negeri Klaten
- Pengadilan Agama Klaten
- Pusdiklatpur
- Kantor Imigrasi

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran untuk Fasilitasi Koordinasi dengan Instansi vertikal berasal dari APBD Kabupaten Klaten, dengan anggaran yang melekat pada Kantor Kesbagpol Klaten. Adapaun alokasi anggaran untuk tahun 2019 untuk fasilitasi Koordinasi dengan Instansi vertikal sebesar Rp. 2.510.000.000 terdiri dari 4 Program dan 13 Kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.061.574.650

5. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan instansi Vertikal Daerah

SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan instansi Vertikal Daerah adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Klaten

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

1.	**Jumlah Pegawai**		:	14	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a	SLTA	:	5	Orang
	b	S- 1	:	3	Orang
	c	S- 2 / S-3	:	6	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a	Penata Muda Tk I (III/b)	:	6	Orang
	b	Penata Tk I (III/d)	:	4	Orang
	c	Pembina (IV/a)	:	3	Orang
	d	Pembina Tk I (IV/b)	:	1	Orang

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

Koordinasi dengan Instansi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan SKPD agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal. Selain melalui Forum Koordinasi Pimpnan Daerah, terdapat beberapa bentuk pelaksanaan kegiatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Instansi antara lain meliputi :

a. KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA). Koordinasi dilakukan rutin satu bulan sekali terkait Pembahasan informasi keterkitan situasi kondisi wilayah Kabupaten Klaten di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Instansi Vertikal yang terlibat dari unsur Kodim, unsur Polres, unsur Kejaksaan Tinggi dan Kesbangpol.
b. Penyelenggaraan Haji dan Penyelenggaraan lomba MTQ Tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Klaten
c. Peringatan Hari Besar Keagamaan bekerjasama dengan Kementrian Agama dan organisasi Kegamaan di tingkat Kabupaten Klaten
d. Penyelenggaraan Peringatan hari Besar Nasional bekerjasama dengan Instansi vertikal terkait.
e. Penanganan Bencana Alam koordinasi dengan Polres, Kodim, relawan, Dodiklatpur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dan instansi terkait.
f. Koordinasi dan Kerjasama dengan BPS dalam penyediaan data Kabupaten Klaten dalam bentuk Penyajian Buku Klaten Dalam Angka
g. Program Operasi Pekat koordinasi dengan Polres Klaten.
h. Pengamanan Hari besar keagamaan dan kegiatan penting di tingkat Kabupaten melibatkan Satpol PP bekerjasama dengan KODIM Klaten dan Polres Klaten.
i. Kegiatan Penyuluhan Hukum terpadu bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Klaten dan Polres Klaten
j. Kegiatan penegakan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum yang dilaksanakan bersama antara Satpol PP, Kepolisian, Bea Cukai, TNI dan instansi terkait.
k. Program Sosialisasi narkoba koordinasi dengan Polres Klaten Kejaksaan Negeri Klaten dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
l. Program Pengembangan wawasan kebangsaan bekerja sama dengan Polres Klaten, KODIM Klaten dan Kejaksaaan Negeri Klaten.

m. Program Pembinaan Politik Daerah melibatkan KPU Klaten, Bawaslu dan KODIM Klaten
n. Program TMMD koordinasi dengan Kodim dan Instansi terkait.
o. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga tingkat Kabupaten bekerjasama dengan instansi vertical terkait.
p. Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya tingkat Kabupaten bekerjasama dengan instansi vertical terkait.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan Manfaat Koordinasi Forum Koordinasi Pemimpin Daerah adalah sebagai berikut :

- Permasalahan mengenai Kondisi Wilayah Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Keamanan dan Ketertiban segera terdata dan teratasi.
- Permasalahan Konflik Sosial segera dapat ditangani.
- Tersusun rencana dan aksi mengenai P4GN Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- Tersusun rencana dan aksi mengenai pelaksanaan sosialisasi pembumian kembali Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan terlaksana.
- Pengawasan terhadap orang asing terlaksana
- Kewaspadaan Dini Daerah dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Sebagai dasar pertimbangan penetuan kebijakan daerah lebih lanjut

10. Permasalahan dan Solusi

Meskipun koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan Instansi Vertikal telah dapat berjalan, namun masih terdapat kendala antara lain: orientasi lebih cenderung terhadap instansi induknya sehingga pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Klaten belum maksimal.

Solusi dari permasalahan yang ada tersebut dapat dieliminir melalui keterpaduan perencanaan program antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah melalui Instansi Vertikal yang ada di daerah, dan perlu segera diterbitkan pedoman pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan instansi vertikal di daerah oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu solusi yang dapat dilaksanakan secara terpadu adalah melalui peningkatan intensitas koordinasi dari kedua belah pihak melalui berbagai forum.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1) Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

Pada tahun 2019 tidak ada Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

2) Solusi yang dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

Pada tahun 2019 tidak ada Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi namun kegiatan koordinasi dengan Kabupaten di wilayah perbatasan serta dengan Pemertintah Provinsi dan Kemendagri terus dilakuakn secara intensif.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah adalah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten dengan membentuk Tim Penegasan Batas Daerah yang diketuai oleh Ibu Bupati Klaten dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, Bappeda, BPKD Kabupaten Klaten, Kesbangpol Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Klaten, Satpol PP dan Bagian Hukum

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai yang menangani Pembinaan Batas Wilayah di Bagian Pemerintahan sejumlah 8 orang, dengan kualifikasi Pendidikan SD sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 Sebanyak 3 Orang dan S2 sebanyak 3 orang. Adapun data Golongan/Ruang dalah sebagai berikut :

- Golongan II/a = 1 orang
- Golongan III/b = 2 orang
- Golongan III/c = 1 orang
- Golongan III/d = 1 orang
- Golongan IV/a = 2 orang
- Golongan IV/b = 1 orang

5) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penegasan Batas Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Perbatasan (Kabupaten Boyolali, Sleman dan Gunungkidul), terkait dengan revisi Permendagri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah;

b. Melakukan penelusuran/pelacakan ulang oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali karena ada beberapa selisih Titik Koordinat dalam penarikan Garis Batas Daerahnya dan selanjutnya mengajukan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan sudah sampai dengan pembahasan Rapermen yang baru sesuai hasil penegasan batas daerah;
c. Melakukan penelusuran/pelacakan ulang oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul karena ada beberapa selisih Titik Koordinat dalam penarikan Garis Batas Daerahnya dan selanjutnya mengajukan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah pada Segmen Batas Daerah Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Gunungkidul dan sudah sampai dengan pembahasan Rapermen yang baru sesuai hasil penegasan batas daerah;
d. Melakukan penelusuran/pelacakan ulang oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Sleman karena ada beberapa selisih Titik Koordinat dalam penarikan Garis Batas Daerahnya dan selanjutnya mengajukan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah pada Segmen Batas Daerah Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sleman dan sudah sampai dengan pembahasan Rapermen yang baru sesuai hasil penegasan batas daerah;
e. Melaksanakan Sosialisasi hasil penelusuran/pelacakan Batas Daerah Antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Gunungkidul, Sleman dan Kabupaten Boyolali dengan mengundang Kepala Desa/Perangkat Desa di wilayah Perbatasan di Kabupaten Klaten dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
f. Monitoring Pilar Batas Daerah pada Segmen Batas Daerah Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Boyolali dimana ada beberapa Pilar yang perlu untuk dilakukan pemerliharaan.

6) Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan

Permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan Kabupaten Klaten beserta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Permasalahan yang terjadi di wilayah Perbatasan dan Solusi dalam menyelesaikan masalah

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Ekonomi & Industri Kreatif	a. Kurang optimalnya kerjasama pengembangan ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan daerah. b. Kerjasama pelayanan tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal se Subosukawonosraten.	a. Penyusunan Kerjasama Daerah bidang ekonomi kreatif di wilayah perbatasan. b. Segera diterbitkan regulasi daerah terkait pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi Legal sebagai dasar penyusunan kerjasamanya.
2	Sosial	a. Pengemis Gelandangan Oang Terlantar (PGOT), Penyakit Masyarakat (PEKAT), permasalahan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan tawuran warga yang berada di perbatasan wilayah masih sangat kurang koordinasinya, terutama dalam hal penanganan permasalahan tersebut dan pendanaannya b. Sulitnya koordinasi terkait Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan lintas wilayah dan minimnya pelayanan dan distribusi alat KB diwilayah perbatasan	a. Meningkatkan Koordinasi penanganan dan pendanaan untuk mengatasi Pengemis Gelandangan Oang Terlantar (PGOT), Penyakit Masyarakat (PEKAT), permasalahan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan tawuran warga yang berada di perbatasan wilayah melalui pembentukan kerjasama antar daerah. b. Membentuk kerjasama antar daerah untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelayanan dan distribusi alat KB di wilayah perbatasan.
3	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	a. Masih ada beberapa jalan dan jembatan perbatasan antar wilayah yang rusak b. Keterbatasan dan sengketa TPU	a. Meningkatkan koordinasi untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pekerjaan umum dan infrastrukur. b. Meningkatkan koordinasi dalam penyediaan dan penggunaan TPU

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	SOLUSI
		c. Kurangnya keterpaduan penataan kawasan perbatasan sehingga menimbulkan dampak kesenjangan ekonomi	c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan penataan kawasan perbatasan.
		d. Angkutan ilegal yang beroperasi lintas wilayah	d. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.
		e. Perbedaan penentuan kelas jalan, rute, jalur, rambu dan lintas angkutan barang termasuk angkutan pasir di wilayah perbatasan.	e. Penetapan kelas jalan, rute, jalur dan lintas angkutan barang termasuk angkutan pasir yang pasti dan disepakati bersama di wilayah perbatasan.
		f. Masih terdapat perbedaan perlakukan terhadap usaha pemberian rekomendasi hasil ANDALALIN antar lintas kabupaten pada tempat-tempat usaha yang rawan terhadap dampak lalu lintas	f. Membentuk kerjasama untuk menetapakan pemberian rekomendasi hasil ANDALALIN antar lintas Kabupaten
		g. Pencemaran sungai dan pengelolaan sampah	g. Penanganan pengelolaan sampah/pencemaran sungai secara bersama di wilayah perbatasan
		h. Relokasi warga bantaran sungai ke daerah lain	h. Kesepakatan dan kerjasama untuk menangani relokasi warga.
4	Pendidikan	Kesenjangan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan	Peningkatan mutu pendidikan di wilayah perbatasan
5	Kesehatan	a. Ketersediaan sarana dan prasarana kurang memadai di wilayah perbatasan	a. Meningkatkan koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan
		b. Ketersediaan tenaga medis yang dekat dengan masyarakat di wilayah perbatasan masih kurang	b. Penempatan tenaga medis di wilayah perbatasan perlu ditambah

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	SOLUSI
		c. Pemanfaatan obat yang ada di Puskesmas di wilayah perbatasan belum bisa sepenuhnya dipakai untuk melayani masyarakat Kabupaten Klaten dikarenakan masyarakat Kabupaten lain yang berbatasan juga memanfaatkan ketersediaan obat di Puskesmas wilayah Klaten.	c. Membentuk kerjasama daerah bidang kesehatan, khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan untuk masyarakat di wilayah perbatasan.
6	Bidang Administrasi wilayah	a. Jumlah pilar batas yang kurang, atau masih banyak pilar batas yang terpasang dalam kondisi rusak b. Kurang pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang batas pasti dari wilayah yang berbatasan c. Kurangnya pemahaman mengenai kepemilikan/asset pilar yang terpasang d. Kurangnya kepedulian pihak pemerintah desa terhadap pilar batas daerah.	a. Pemasangan perapatan pilar batas dan pemeliharaan pilar batas daerah b. Penegasan batas wilayah yang dilanjutkan dengan sosialisasi c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. d. sosialisasi pentingnya pilar batas daerah.
7	Bidang Penanggulangan Bencana	a. Bencana longsor di lereng Gunung yang berbatasan antara Gunungkidul dan Kabupaten Klaten b. Masalah aliran air dari lereng pegunungan Gunungkidul yang jatuhnya ke pemukiman penduduk di wilayah Kabupaten Klaten sehingga menyebabkan banjir. c. Masalah penanganan kebakaran di wilayah Perbatasan	a. Meningkatkan koordinasi dan membentuk kerjasama khusus dalam penanganan bencana longsor di wilayah perbatasan Gunungkidul dan Klaten b. Meningkatkan koordinasi dan membentuk kerjasama khusus dalam penanganan masalah aliran air di wilayah perbatasan Gunungkidul dan Klaten c. Pembentukan kerjasama dalam bidang penanganan kebakaran di wilayah perbatasan.

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	SOLUSI
8	Kependudukan	a. Masalah administrasi kependudukan di wilayah perbatasan yang masih rancu. b. Pemahaman masyarakat di wilayah perbatasan tentang pengurusan administrasi kependudukan yang masih kurang.	Kerjasama untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

Masalah bencana beberapa tahun ini menjadi perhatian serius oleh semua pihak, hal ini karena seringnya terjadi bencana di wilayah Indonesia. Pada tahun 2019 beberapa bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten antara lain :

- Angin Puting beliung
- Tanah longsor
- Banjir
- Erupsi gunung berapi
- Kecelakaan (Rumah roboh, tersengat listrik, Laka Sumur, pohon tumbang, Laka Sungai, Tersambar petir, Kecelakaan Kerja, Kebocoran tabung gas,
- Kekeringan

Jumlah Kejadian Bencana yang terjadi dan yang ditangani oleh BPBD Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam Tabel 6.6

Tabel 6.2
Data Kejadian Bencana yang ditangani BPBD Kabupaten Klaten
Tahun 2019

JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2019
Angin Puting beliung	394
Tanah Longsor	5
banjir	18
kekeringan	800
laka	3
Kebakaran	47
gempa	1
Lainnya	6

Sumber : BPBD Kab. Klaten 2020

Adapun untuk dampak bencana yang terjadi selama tahun 2019 bisa dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 6.3
Dampak Bencana Tahun 2019 di Kabupaten Klaten

NO	Dampak Bencana	Jumlah Terdampak
1.	Rumah Rusak	585 unit
2.	Lahan Rusak	117 ha
3.	Kekeringan	800 lokasi
4.	Meninggal Dunia	4 orang
5.	Pengungsi	26 orang

Sumber : BPBD Kab. Klaten 2020

Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menanggulangi Bencana yang ada di Kabupaten Klaten antara lain :

a. Penyusunan Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Klaten
b. Penyusunan Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten.
c. Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana
d. Pembentukan Desa Tangguh Bencana untuk tahun 2019 ada 3 desa
e. Pembentukan Sekolah Siaga Bencana 50 sekolah
f. Normalisasi sungai, penghijauan dan menjaga kebersihan sungai
g. Membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kecamatan
h. Penyusunan Rencana Kontijensi Kebencanaan
i. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana

2. Status Bencana

Status Bencana yang terjadi adalah bencana yang bersifat lokal/kabupaten

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran Belanja langsung pada tahun 2019 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 24.535.819.440,- (dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus Sembilan belas ribu mpat ratus empat puluh rupiah) anggaran tersebut diperinci menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak lansung sebesar Rp. 2.765.595.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Belanja langsung sebesar 21.770.224.440,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang digunakan untuk membiayai 5 program dan 34 Kegiatan dengan realisasi untuk belanja langsung sebesar Rp. 18.107.998.183 atau 83,18 %

4. Antisipasi Daerah Dalam menghadapi Kemungkinan Bencana.

Untuk mengantisipasi bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memberikan Pemahaman dan Pelatihan Kebencanaan.
b. Koordinasi Internal dan lintas sektoral instansi terkait .
c. Pendataan Personil
d. Persediaan peralatan yang ada

e. Inventarisasi kerusakan dan mitigasi
f. Pemilihan lokasi Pengungsian
g. Pendataan Potensi Desa di Wilayah/kawasan rawan Bencana
h. Mendirikan posko siaga bencana terpadu

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja BPBD Kabupaten Klaten bahwa BPBD berkedudukan sebagai lembaga lain daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian Pegawai BPBD Kabupaten KLaten dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.4
Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Klaten

1.	**Jumlah Pegawai**		:	28	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a)	Diploma	:	2	Orang
	b)	S- 1	:	16	Orang
	c)	S- 2 / S-3	:	10	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a)	Pengatur Muda Tk I	:	2	Orang
	b)	Pengatur	:	1	Orang
	c)	Pengatur Tk I	:	2	Orang
	d)	Penata Muda	:	3	Orang
	e)	Penata Muda Tk I	:	7	Orang
	f)	Penata	:	4	Orang
	g)	Penata Tk I	:	4	Orang
	h)	Pembina	:	4	Orang
	i)	Pembina Tk I	:	0	Orang
	j)	Pembina Utama Muda	:	1	Orang
4.	**Jml Pejabat Struktural**		:	12	Orang
5.	**Jml Pejabat Fungsional**		:	2	Orang

7. Kelembagaan Khusus Yang dibentuk menangani

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja BPBD Kabupaten Klaten bahwa BPBD berkedudukan sebagai lembaga lain daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

8. Potensi Bencana yang diperkirakan Terjadi :

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi diperkirakan sesuai dengan pemetaan kawasan rawasan bencana, antara lain :

1) Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi:
   a. Kecamatan Bayat;
   b. Kecamatan Cawas;
   c. Kecamatan Gantiwarno;
   d. Kecamatan Kemalang;
   e. Kecamatan Manisrenggo;
   f. Kecamatan Prambanan; dan
   g. Kecamatan Wedi.
2) Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi:
   a. Kecamatan Bayat;
   b. Kecamatan Cawas;
   c. Kecamatan Ceper;
   d. Kecamatan Gantiwarno;
   e. Kecamatan Juwiring;
   f. Kecamatan Karangdowo;
   g. Kecamatan Pedan;
   h. Kecamatan Prambanan;
   i. Kecamatan Trucuk;
   j. Kecamatan Wedi; dan
   k. Kecamatan Wonosari.
3) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana mencakup seluruh wilayah di Kabupaten.
4) Kawasan rawan letusan gunung berapi kawasan rawan bencana letusan Gunung Merapi.
5) Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur patahan aktif.

9. Permasalahan dan Solusi

Adapun beberapa permasalahan terkait dengan Bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten antara lain :

1) Permasalahan Terkait Bencana Banjir

a) Pendangkalan sungai yang diakibatkan oleh masih banyaknya sedimen/endapan di Sungai besar maupun anak sungai
b) Masih Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana (Karung plastic dan Bronjong Kawat)
c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah

Sedangkan solusi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah

a) Normalisasi Sungai
b) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
c) Perlu koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, dan bagi korban banjir telah diberikan bantuan logistic kebutuhan dasar kepada warga yang rumahnya terisolir genangan air.

2) Permasalahan dan solusi terkait Bencana Banjir Hujan/Lahar Dingin Merapi

Permasalahan terkait dengan bencana banjir lahar dingin Merapi adalah :

a) Sabuk Dam tidak cukup menampung/menahan aliran lahar hujan bila melebihi kapasitas seperti tahun 2014.
b) Pengerukan pasir sudah sampai pada dinding sungai Kaliworo dampaknya ke pemukiman.
c) Sendimentasi aliran sungai dibawah Kaliworo mulai dari Desa Borangan sampai dengan Pandansimping berdampak pereluasan ;lahar hujan.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan terkait dengan Bencana Lahar Dingin Merapi adalah :

a) Penambahan Sabuk Dam
b) Pengendalian Penambangan Pasir
c) Pengerukan sendimentasi

3) Permasalahan dan solusi terkait dengan bencana angin ribut dan puting beliung

Permasalahan terkait dengan Bencana Angin ribut yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat, tentang kegiatan pemangkasan pohon-pohon tinggi dekat bangunan sedangkan solusi yang ditempuh

memberikan sosialisasi mitigasi bencana angn kepada masyarakat, pentingnya bangunan rumah yang tahan terhadap angin dan pentingnya penahan kekuatan angin (Pohon yang berakar kuat yang letaknya jauh dari pemukiman) yang berfungsi pemecah kekuatan angin

4) Permasalahan dan solusi terkait dengan bencana tanah longsor

a) Bagunan yang terletak ditebing/tanah miring
b) Vegetasi (pepohonan) yang bergungsi untuk menahan tanah

Sedangkan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan bencana tanah longsor antara lain:

a) Tidak diijinkan membangun tanah di tebing atau di tanah miring.
b) Pembuatan tanggung di tebing
c) Reboisasi (Penanaman pohon keras)
d) Sosialisasi ke Masyarakat.

5) Permasalahan dan solusi terkait dengan Bencana Erupsi Gunung Merapi

Permasalahan yang ada terkait dengan bencana erupsi Merapi adalah Jalur Evakuasi yang sudah rusak karena truck galian C. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait bencana erupsi gunung merapi adalah dengan Pengalihan jalur truck Galian C atau pembatasan tonase.

6) Permasalahan dan solusi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu belum adanya payung hukum bantuan hibah dan atau bantuan keuangan untuk korban bencana, sedangkan solusi yang bisa ditempuh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah pembuatan payung hukum kaitan dengan bantuan hibah dan atau bantuan keuangan untuk korban bencana.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi

Gangguan ketentraman dan ketertiban berupa konflik berbasis sara, anarkis, separatisme atau lainnya tidak terjadi di Kabupaten Klaten selama tahun 2019. Adapun kasus radikalisme dimana salah satu pelaku tertangkap di wilayah Kabupaten Klaten adalah merupakan pengembangan kasus radikalisme dari daerah lain. Adapun Gangguan yang terjadi selama tahun 2019 berupa gangguan Penyakit Masyarakat sehingga perlu langkah dalam penanggulannya.

Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol selama tahun 2017 - 2019 adalah yaitu pelacuran, dalam kurun waktu tahun 2017 - 2019 perkembangannya bersifat meningkat, Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 6.7

Tabel 6.5
Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Oleh Satpol PP Kabupaten Klaten
Tahun 2016 - 2019

NO	TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	HASIL OPERASI PENERTIBAN					
			PGOT		PSK/ WTS	PASANGAN TIDAK RESMI	ANJAL/PUNK	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2016	12	14	7	8	46	12	4
2	2017	15	15	8	6	58	12	14
3	2018	15	8	6	10	78	18	7
4	2019	20	12	5	12	37	38	8

S A N K S I

- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan ;
- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ;
- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut;
- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.

(Sumber) : satpol PP tahun 2019

Berdasarkan catatan 3 (tiga) tahun terakhir, trend pelanggaran peraturan daerah khususnya masalah penyakit masyarakat semakin besar jumlahnya dibandingkan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah secara umum. Hal ini disebabkan oleh :

1. Tingkat kesadaran warga masyarakat yang rendah ;
2. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai ke pedesaan / pelosok ;

3. Persaingan ekonomi dan gaya hidup kekinian mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum
4. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Selain Penyakit Masyarakat di atas, terdapat salah satu gangguan keamanan dan ketertiban yang sering membuat resah masyarakat, yaitu Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol. Berikut Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol selama tahun 2014–2019 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6.6
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2014–2019

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2014	6	120 liter	60 botol	10 dus	20 dus
2	2015	6	200 liter	40 botol	5 dus	4 dus
3	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
4	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
5	2018	0	0	0	0	0
6	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu; - Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2019.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani

Perangkat daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Satpol PP.

Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sedangkan dasar hukum pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten adalah Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sedangkan Fungsi Polisi Pamong Praja Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten adalah :

a. penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d. pengawasan terhadap masyarakat , aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang:

a. Ideologi wawasan kebangsaan;
b. Politik dan kewaspadaan nasional;
c. Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesbangpol sebagai Pelaksana Program bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 6.7
Data Pegawai Satpol PP dan Kesbangpol

SATPOL PP					
1.	**Jumlah Pegawai**		:	61	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a	SD	:	1	Orang
	b	SLTP	:	6	Orang
	c	SLTA	:	33	Orang
	d	Diploma - 3	:	2	Orang
	e	S - 1	:	14	Orang
	f	S - 2/ S-3	:	5	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a	Pengatur Muda (II/a)	:	5	Orang
	b	Pengatur Muda Tk (II/b)	:	7	Orang
	c	Pengatur (II/c)	:	2	Orang
	d	Pengatur Tk I (II/d)	:	3	Orang
	e	Penata Muda (III/a)	:	2	Orang
	f	Penata Muda Tk I (III/b)	:	22	Orang
	g	Penata (III/c)	:	9	Orang
	h	Penata Tk I (III/d)	:	7	Orang
	i	Pembina (IV/a)	:	3	Orang
	j	Pembina Tk I (IV/b)	:	1	Orang
KESBANGPOL					
1.	**Jumlah Pegawai**		:	14	Orang
2.	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a	SLTA	:	5	Orang
	b	S- 1	:	3	Orang
	c	S- 2 / S-3	:	6	Orang
3.	**Pangkat dan Golongan**				
	a	Penata Muda Tk I (III/b)	:	6	Orang
	b	Penata Tk I (III/d)	:	4	Orang
	c	Pembina (IV/a)	:	3	Orang
	d	Pembina Tk I (IV/b)	:	1	Orang

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Bentuk kegiatan Penanggulangan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat serta lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan).

Selain hal tersebut, Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat pada SATPOL PP dilaksanakan dengan kegiatan Operasi PGOT / WTS / MIRAS / ANAK JALANAN, Penertiban dan Penindakan Pelanggaran Perda/Perbup dan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Perda/Perbup.Sasaran Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat, meliputi :

a. Pengawasan dan Penindakan Peredaran Minuman Beralkhohol (Miras) baik di minimarket, toko/kios/warung dan tempat hiburan;
b. Penertiban baik yustisi mapun non yustisi terhadap Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, WTS/PSK, Pasangan tidak resmi (pasangan selingkuh), Anak Jalanan (Anak Punk) yang melakukan praktek mengemis, menggelandang dan berbuat asusila baik ditempat strategis, taman kota, traffic light dan hotel kelas melati;
c. Penertiban dan pencegahan praktek vandalisme ; dan
d. Pembinaan dan pengawasan intensif para pelanggar Perda/Perbup baik secara mental dan ketrampilan dalam bekerjasama dengan dinas/instansi terkait.

Beberapa Kendala dalam penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum besrerta solusi dan Rencana Tindak Lanjut yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

NO	KENDALA	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih banyaknya Warnet yang belum berijin	Diadakan Operasi , Sosialisasi dan Penyuluhan	Di adakan Sosialisasi dan Penyuluhan Perda N0.14 tahun 2013 tentang Warnet
2	Masih adanya Kafe dan Karaoke yang belum berijin	Operasi rutin dan pembinaan bersama instansi terkait	Satpol PP, Disbudparpora dan KPT melakukan upaya pembinaan kepada pengusaha kafesecara intensif ; Perlunya diterbitkan Perda/Perbub yang mengatur tentang Pendirian Usaha

NO	KENDALA	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
			Warnet dan sejenisnya atau merevisi Perda No. 19 Tahun 2002.
3	Masih banyak Mini Market berjaringan yang operasionalnya (jam buka) menyalahi aturan	Operasi rutin dan pembinaan bersama instansi terkait	Satpol pp melakukan pembinaan dengan mendatangi langsung Toko modern mini market berjaringan untuk mendata kelengkapan ijin mini market dan menegur mini market yang jam operasionalnya menyalahi perda
4	Pedagang kaki Lima masih banyak yang menyalahi tempat dan jam buka untuk berjualan	Pembinaan bersama Disperindagkop dan instansi lainnya	Satpol PP berkoordinasi dengan DPU dan Disperindagkop untuk segera melakukan upaya penempatan PKL di tempat tersendiri (dibuatkan Tempat Khusus) untuk berjualan
5	Masih banyaknya pemasangan reklame liar	Operasi dan pembinaan bersama instansi terkait	Satpol PP secara rutin melakukan penertiban reklame yang melanggar perda K3 dan perda penyelenggaran reklame.
6	Masih banyaknya WTS, Pengemis, Gelandangan dan orang terlantar	Pembinaan dan operasi rutin penertiban WTS, Pengemis, Gelendangan dan Orang Terlantar	Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengoptimalkan tempat penampungan
7	Masih kurangya Personil Satpol PP	Perekrutan THL	Mengoptimalkan anggota untuk Operasional
8	Masih kurangnya sarana dan prasarana (Mobil untuk Operasional)	di buat jadwal supaya tidak berbenturan penggunaan mobil operasional	Mengajukan Pengadaan sarana dan Prasarana (mobil operasional)

5. Keikutsertaan Aparat Kemananan dalam Penangulangan

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan Gangguan yang terjadi melalui Forkompinda , Tim Kewaspadaan Dini, Forum-Forum, Tim Penanganan Konflik Sosial dan kerjasama dalam menanggulangi masalah Penyakit Masyarakat.

Forum Koordinasi Pemimpin Daerah terdiri dari Bupati, Ketua DPRD. Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama, Kantor Imigrasi dan Kepala Pusdiklatpur, dilaksanakan setiap bulan dan setiap saat apabila ada hal yang harus segera dikoordinasikan. Adapun Materi Koordinasi adalah mengenai Cipta Kondisi Wilayah Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Keamanan dan Ketertiban, Koordinasi Permasalahan Konflik Sosial, Koordinasi mengenai P4GN Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Koordinasi mengenai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Koordinasi mengenai pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Koordinasi mengenai Kewaspadaan Dini Daerah dan Koordinasi Pengawasan orang asing.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Program urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dan Satpol PP. Urusan Wajib pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.630.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.031.623.898,- atau 90,97%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.008.427.000,- Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.027.078.681,- atau sebesar 85,9%.

BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Urusan Pendidikan

Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip: kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

   Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada PAUD merupakan peserta didik yang berusia 5-6 tahun.

b. Pendidikan Dasar (Dikdas)

   Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Dikdas merupakan peserta didik yang berusia 7-15 tahun (SD dan SMP).

c. Pendidikan Kesetaraan (Diksetara)

   Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Diksetara merupakan peserta didik yang berusia 7-18 tahun (Kejar Paket A, B dan C).

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup :

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. Tata cara pemenuhan standar

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.1.a
Target Pencapaian SPM urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	Setiap Tahun
3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya.

Tabel 7.1.b
Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2019

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan	Realisasi 2019
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	167.200	152.905	77,53 %

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan	Realisasi 2019
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	222.747	54	0,024 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	36.270	27.610	76,12 %

No	Indikator SPM	Target Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun 2019
1.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	100%
3.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%

4. Alokasi Anggaran

Jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Tabel 7.1.c
Anggaran mendukung SPM Pendidikan Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
BELANJA	Rp. 433.155.905.030	Rp. 344.580.816.714	Rp. 88.575.088.316
Belanja Operasi :	Rp. 420.693.906.030	Rp 344.883.785.744	Rp 85.810.120.286
1. Belanja Pegawai	Rp 399.835.658.782	Rp 316.829.254.494	Rp 83.006.404.288
2. Belanja Barang	Rp 20.607.497.248	Rp 17.823.088.250	Rp 2.784.408.998
Belanja Modal :	Rp 12.461.999.000	Rp 9.697.030.970	Rp 2.764.968.030
1. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 4.942.856.000 Rp 5.199.143.000	Rp 4.757.235.820	Rp 185.620.180
2. Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 2.320.000.000	Rp 4.238.568.175	Rp 960.574.825
3. Belanja Aset Tetap Lainnya		Rp. 701.226.975	Rp 1.618.773.025
Surplus/(Defisit)	Rp.(1.299.216.965.090)	Rp.(1.043.511.007.14)	Rp. 262.940.989.918

*Sumber CALK 2019

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.338.396.000**
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	285.000.000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	425.396.000
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67.500.000
4	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.000.000
7	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	293.500.000

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80.000.000
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	63.000.000
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1.463.000.000**
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.038.000.000
12	Pengadaan mebeleur	200.000.000
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000
16	Fasilitasi Pindahan Kantor	100.000.000
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**50.000.000**
17	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	50.000.000
IV	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**210.000.000**
18	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah	210.000.000
V	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**722.000.000**
19	Peningkatan Mutu pendidikan PAUD	185.000.000
20	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini	95.000.000
21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD	200.000.000
22	Fasilitasi kegiatan PAUD	200.000.000
23	Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	42.000.000

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
VI	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**27.151.950.500**
24	Penambahan ruang kelas sekolah	230.000.000
25	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	1.500.000.000
26	Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)	550.000.000
27	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK Bidang Pendidikan)	945.000.000
28	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	200.000.000
29	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah	120.000.000
30	Pelatihan Penyusunan kurikulum	50.000.000
31	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	50.000.000
32	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	115.000.000
33	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	30.000.000
34	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan	1.415.000.000
35	Penggabungan SD Negeri	60.000.000
36	Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)	9.496.966.000
37	Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP (DAK Bid. Pendidikan)	905.771.000
38	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	50.000.000
39	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD	440.000.000
40	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP	615.000.000
41	Pengembangan Kurikulum SD	100.000.000
42	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD	40.000.000

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
43	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP	30.000.000
44	Pembangunan Sanitasi/MCK SD	150.000.000
45	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD	150.000.000
46	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP	75.000.000
47	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD	40.000.000
48	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	40.000.000
49	Penyelenggaran Ujian SD	500.000.000
50	Penyelenggaran Ujian SMP	50.000.000
51	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bid. Pendidikan)	1.435.000.000
52	Pembangunan sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)	414.270.000
53	Pembangunan Ruang Belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)	1.121.566.000
54	Pembangunan Ruang Belajar SMP (DAK Bidang Pendidikan)	495.131.000
55	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang Pendidikan)	433.032.000
56	Rehabilitasi sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)	335.700.000
57	Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD (DAK Bidang Pendidikan)	1.155.000.000
58	Pengadaan Buku Perpustakaan SDN (Bankeu Provinsi)	232.000.000
59	Pengadaan Alat TIK SDN (Bankeu Provinsi)	124.000.000
60	Rehab Ruang Kelas Rusak SDN (Bankeu Provinsi)	250.000.000
61	Rehabilitasi sedang/ berat Bumi Perkemahan	230.000.000
62	Pembangunan Sarana Prasarana Bumi Perkemahan	230.000.000

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
63	Pembangunan Kantor Kwartir Cabang Pramuka	225.000.000
64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Silpa-DAK)	728.514.500
65	Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan	520.000.000
66	Penguatan Pendidikan Karakter melalui "Program Matur Jujur"	1.275.000.000
VII	**Program Pendidikan Non Formal**	**155.000.000**
67	Pengembangan pendidikan keaksaraan	60.000.000
68	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	50.000.000
69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45.000.000
VIII	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**16.156.200.000**
70	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	200.000.000
71	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	75.000.000
72	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	80.000.000
73	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas	205.000.000
74	Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta	150.000.000
75	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas	40.000.000
76	Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)	30.000.000
77	Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan	250.000.000
78	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.126.200.000

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
IX	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**120.000.000**
79	Pengembangan minat dan budaya baca	70.000.000
80	Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa	50.000.000
X	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**2.781.000.000**
81	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	40.000.000
82	Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)	100.000.000
83	Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan	61.000.000
84	Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah	47.000.000
85	Penyusunan Data Pokok Pendidikan	100.000.000
86	Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan	
87	Penerimaan Siswa Baru SMP Online	305.000.000
88	Operasional BOS Tingkat SD	1.828.000.000
89	Operasional BOS Tingkat SMP	170.000.000
90	Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak	40.000.000
91	Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu Provinsi)	90.000.000
XI	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**196.900.000**
92	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	146.900.000
93	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	50.000.000
		50.344.446.500

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten didukung 106 orang, terdiri 62 orang PNS, 44 orang PTT.

Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut

Tabel 7.1.d
Keadaan PNS Dan PTT Dinas Pendidikan Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN	PNS GOLONGAN				PTT	JUMLAH
		I	II	III	IV		
1.	S2	0	0	12	20	0	32
2.	S1	0	0	13	0	20	33
3	AKADEMI / D3	0	2	0	0	7	9
4	D2	0	0	0	0	0	0
5	SLTA	0	12	3	0	17	32
6	SLTP	0	0	0	0	0	0
7	SD	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	14	28	20	44	106

Tabel 7.1.e
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Dinas Pendidikan Tahun 2019

NO	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1.	Pembina (Gol. IV.c)	0
2.	Pembina Tk I (Gol. IV.b)	8
3.	Pembina (Gol. IV.a)	12
4.	Penata Tk. I (Gol. III.d)	9
5.	Penata (Gol. III.c)	12
6.	Penata Muda Tk. I (Gol. III.b)	7
7.	Penata Muda (Gol. III.a)	1
8.	Pengatur Tk I (Gol. II.d)	1
9.	Pengatur (Gol. II.c)	8
10.	Pengatur Muda Tk. I (Gol. II.b)	3
11.	Pengatur Muda (Gol. II.a)	1
	JUMLAH	**62**

Tabel 7.1.f
Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselonering
Dinas Pendidikan Tahun 2019

NO	BIDANG TUGAS	ESSELON			PELAKSANA	PTT	FUNGSIONAL/ PENGAWAS	JUMLAH
		II	III	IV				
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	1	3	15	25	0	44
3	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	0	1	3	6	6	0	16
4	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	0	1	3	4	4	6	18
5	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	0	1	3	4	4	0	12
6	Bidang Pembinaan Ketenagaan	0	1	3	5	5	0	14
JUMLAH		1	5	15	34	44	6	105

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik masalah eksternal maupun internal serta solusi dalam penyelesaian permasalahan yang ditempuh antara lain:

1. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
2. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1;
3. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
4. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan standar Nasional;

5. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini pada umur 5 – 6 tahun
6. Keterbatasan biaya dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada pada jenjang pendidikan dasar (usia 7 – 15 tahun)
7. Adanya pengaruh pergaulan yang kurang baik yang masih kuat mempengaruhi anak di lingkungannya, seperti bergabung dengan kelompok Punk, gang ,maupun kelompk tertentu yang berdampak negative
8. kurangnya kesadaran anak akan pentingnya pendidikan, sehingga didaerah tertentu anak memilih untuk bekerja dan mendapatkan uang

solusi dalam penyelesaian permasalahan yang ditempuh antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;
5. Optimalisasi dan koordinasi dilingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan program peningkatan kesadaran bagi masyarakat untuk mengeyam pendidikan sesuai dengan tingkatannya.

B. Urusan Kesehatan

1. Jenis pelayanan dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten/kota sebagai berikut :

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4) Pelayanan kesehatan balita;
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 7.2.a Target Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	PERHITUNGAN PEMBIAYAAN (Rp)
	INDIKATOR	NILAI (%)		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	2019	151.689.500
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	2019	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	100	2019	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	2019	154.441.000
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	2019	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100	2019	862.163.950

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	PERHITUNGAN PEMBIAYAAN (Rp)
	INDIKATOR	NILAI (%)		
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100	2019	
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	100	2019	758.738.950
9	Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	100	2019	758.738.950
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	2019	78.593.250
11	Pelayanan Kesehtaan orang dengan TB	100	2019	592.042.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	2019	58.386.000

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2.b
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019

No	INDIKATOR	Target		Realisasi	
		Jumlah Sasaran	%	Jumlah Sasaran	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	16,835	100	15,802	93.86
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	15,761	100	15,680	99.49
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	15,681	100	15,335	97.79
4	Pelayanan kesehatan balita;	65,212	100	62,455	95.77
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	49,414	100	44,305	89.66
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	702,877	100	663,642	94.42
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	200,603	100	192,077	95.75
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	275,329	100	136,173	49.46
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	43,150	100	30,814	71.41
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	3,467	100	2,771	79.93
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	7,294	100	1,713	23.49
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV	17,088	100	15,248	89.23

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Klaten berjumlah Rp 3.418. 293.600,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.2.c
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019

No	Jenis Layanan	Kegiatan yang Mendukung		Jumlah Anggaran (2019)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	a	Refresh tenaga kesehatan (dokter umum, bidan, analis kesehatan, petugas gizi, dokter gigi) dalam pelayanan ANC terpadu	
		b	Koordinasi lintas sektor tentang percepatan penurunan AKI	19.388.000,00
		c	Pertemuan pemanfaatan Buku KIA	
		d	Evaluasi pelaksanaan implementasi Buku KIA di Posyandu	
		e	Monitoring pelaksanaan kelas ibu hamil	
		f	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam fasilitator kelas Ibu	35.161.500,00
		g	Pelacakan kematian ibu	6.900.000,00
		h	Pengkajian kasus kematian maternal	29.688.000,00
		i	Pembahasan kasus kematian maternal	12.592.000,00
		j	Pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh DSOG	37.960.000,00
		k	Orientasi pelayanan kesehatan reproduksi masa sebelum hamil	
		l	Penyediaan buku KIA	10.000.000,00
		TOTAL		**151.689.500,00**
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	a	Refresh tenaga kesehatan tentang Asuhan Persalinan Normal	-
		b	Peningkatan kapasitas nakes dalam kbpp	-
			Kunjungan nifas	-
			Penyuluhan dan konseling IMD, ASI Eksklusif	-
			Pemberian vitamin K dan vitamin A	-
		TOTAL		

No	Jenis Layanan	Kegiatan yang Mendukung		Jumlah Anggaran (2019)
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	a	Refresh tenaga kesehatan tentang penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia dan BBLR	-
		b	Implementasi Kunjungan Neo	-
			Imunisasi	-
		c	Peningkatan kapasitas nakes dalam MTBS	-
		d	Evaluasi pelayanan kunjungan neonatal dan nifas	-
		TOTAL		**-**
4	Pelayanan kesehatan balita	a	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam SDIDTK	62.356.000,00
		b	Pendampingan bayi dan balita dengan komplikasi oleh DSA	22.560.000,00
		c	Peningkatan kapasitas bidan desa dalam program KIA	47.141.000,00
		d	Peningkatan kapasitas nakes di BPM/Klinik/RS	22.384.000,00
		TOTAL		**154.441.000,00**
5	Pelayanan kesehatan pada anak pendidikan dasar	a	Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan umum & gigi	-
		b	Pemantauan kesehatan lingkungan	-
		c	Pemantauan Status Gizi	-
		d	Aksi Bergizi (sarapan sehat, minum TTD & literasi)	-
		e	Imunisasi dan obat cacing	-
		f	Pemeriksaan Hb	-
		g	Pertemuan konselor sebaya	-
		h	Pemantauan garam beryodium	-
		i	Parenting class	-
		TOTAL		**-**
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	A	Sosialisasi strategi pencapaian SPM	1.641.500,00
		B	Pertemuan peningkatan kapasitas petugas	4.020.000,00
		C	Pertemuan peningkatan kapasitas guru UKS	13.240.000,00
		D	Pertemuan peningkatan kapasitas kader	7.871.000,00
		E	Sosialisasi kader	4.653.000,00
		F	Belanja bahan	18.458.000,00
		G	Belanja cetak	9.150.000,00

No	Jenis Layanan	Kegiatan yang Mendukung		Jumlah Anggaran (2019)
		H	Pertemuan petugas Puskesmas dan Rumah Sakit	1.870.000,00
		I	Validasi data	2.992.000,00
		J	Pertemuan peningkatan kapasitas kader	4.653.750,00
		K	Rapat koordinasi IVA	3.366.000,00
		L	Belanja alat	790.248.700,00
		TOTAL		**862.163.950,00**
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	A	Pendataan	-
		b	Penyuluhan	-
		c	Skrining dan pelayanan kesehatan lansia	-
		D	Pembinaan Posyandu Lansia	-
		E	Peringatan Halun & senam lansia	-
		F	Kunjungan lansia risti (home care)	-
		G	Peningkatan kapasitas Kader lansia	-
		H	Pembentukan posyandu lansia	-
		I	Pelayanan laboratorium	-
		TOTAL		**3.500.000**
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	a	Sosialisasi strategi pencapaian SPM	1.641.500,00
		b	Pertemuan peningkatan kapasitas petugas	4.020.000,00
		c	Pertemuan peningkatan kapasitas Dokter dan Petugas	2.309.000,00
		d	Sosialisasi Kader	4.653.000,00
		e	Belanja bahan	18.458.000,00
		f	Belanja cetak	9.150.000,00
		g	Pertemuan petugas Puskesmas dan Rumah Sakit	1.870.000,00
		h	Validasi data	2.992.000,00
		i	Pertemuan peningkatan kapasitas kader	4.653.750,00
		j	Pertemuan pengendalian penyakit	1.873.000,00
		k	Sosialisasi Perbup	1.870.000,00
		l	Belanja alat	705.248.700,00
		TOTAL		**758.738.950,00**
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	a	Sosialisasi strategi pencapaian SPM	1.641.500,00
		b	Pertemuan peningkatan kapasitas petugas	4.020.000,00
		c	Pertemuan peningkatan kapasitas Dokter dan Petugas	2.309.000,00

No	Jenis Layanan	Kegiatan yang Mendukung		Jumlah Anggaran (2019)
		d	Sosialisasi Kader	4.653.000,00
		e	Belanja bahan	18.458.000,00
		f	Belanja cetak	9.150.000,00
		g	Pertemuan petugas Puskesmas dan Rumah Sakit	1.870.000,00
		h	Validasi data	2.992.000,00
		i	Pertemuan peningkatan kapasitas kader	4.653.750,00
		j	Pertemuan pengendalian penyakit	1.873.000,00
		k	Sosialisasi Perbup	1.870.000,00
		l	Belanja alat	705.248.700,00
		TOTAL		**758.738.950,00**
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	a	Pertemuan Kapasitas Bidan dalam DD Gangguan Jiwa	9.709.000,00
		b	Rapat koordinasi pengendalian masalah kesehatan jiwa di masyarakat dengan linsek	6.695.000,00
		c	Sosialisasi posyandu jiwa bagi kader	11.804.000,00
		d	Sosialisasi strategi pencapaian SPM	1.641.500,00
		e	Workshop penanganan gangguan jiwa di masyarakat	23.315.000,00
		f	Refresing masalah napza bagi dokter	4.870.000,00
		g	Rapat koordinasi program jiwa dan napza dengan kepala puskesmas	3.183.000,00
		h	Pertemuan petugas Puskesmas dan Rumah Sakit	1.870.000,00
		i	Pertemuan peningkatan kapasitas kader	4.653.750,00
		j	Validasi data	1.122.000,00
		k	Koordinasi linsek dalam penanggulangan napza	3.746.000,00
		l	Pertemuan penanggulangan masalah kesehatan jiwa	2.992.000,00
		m	Pertemuan petugas kesehatan jiwa	2.992.000,00
		TOTAL		**78.593.250,00**
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	a	Pertemuan PKH	7.992.000,00
		b	Pertemuan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan TCM	3.740.000,00
		c	Pertemuan sosialisasi RAD TB Kabupaten	1.870.000,00
		d	Pertemuan refreshing tatalaksana TB	9.740.000,00
		e	Monev WIFI TB	3.750.000,00

No	Jenis Layanan	Kegiatan yang Mendukung		Jumlah Anggaran (2019)
		f	Cartridge MTB/RIF (HBDC)	108.900.000,00
		g	Pertemuan validasi data TB	7.480.000,00
		h	Pertemuan petugas laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit	3.740.000,00
		i	Belanja modal pengadaan alat TCM	444.830.000,00
		TOTAL		**592.042.000,00**
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	a	Pengadaan cartridge HIV-VL/Viraload	58.386.000,00
		b	Pertemuan petugas HIV Puskesmas dan Rumah Sakit	
		c	Pertemuan askep HIV bagi petugas Puskesmas dan Rumah Sakit	
		d	Pertemuan KDS (Kelompok Dukungan Sebaya)	
		e	Pertemuan Tim VCT Kabupaten	
		f	Pelaksanaan pemeriksaan VCT Mobile	
		g	Pertemuan petugas IMS dan Hepatitis Puskesmas dan Rumah Sakit	
		h	Pengadaan Rapid Tes Vikia	
		TOTAL		**58.386.000,00**

5. Dukungan Personil

Rincian dukungan personil berdasarkan profesinya di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 7.2.d Jenis dan Jumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Total
a	Dokter Umum	25	62	87
b	Dokter Gigi	6	30	36
c	Perawat	67	138	205
d	Bidan		385	385
e	Kesehatan Masyarakat	18	42	60
f	Kesehatan Lingkungan	14	26	40
g	Gizi/ Nutrisionis	10	91	101
h	Ahli Lab Medik	5	32	37
i	Terapi Fisik	9	19	28
j	Teknis Kefarmasian	6	32	38
k	Apoteker	11	35	46
JUMLAH		171	892	1063

6. Permasalahan dan Solusi

1) Pelayanan kesehatan penderita DM dan hipertensi

Permasalahannya:

a) Belum semua masyarakat yang beresiko DM/hipertensi sadar dan bersedia melakukan pemeriksaan
b) Belum semua penderita DM/hipertensi bersedia melakukan pengobatan rutin
c) Masih banyak masyarakat yang berobat di klinik atau dokter praktek swasta dan datanya tidak terlaporkan ke puskesmas/ RS
d) Sasaran masih menggunakan data proyeksi yang sudah ditentukan dari kementerian dan bukan sasaran riil

Solusinya adalah:

a) Peningkatan sosialisasi tentang penyakit DM dan hipertensi kepada masyarakat maupun institusi atau pemegang kebijakan pada institusi terkait
b) Peningkatan kerjasama dan jejaring antar puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
c) Peningkatan kompetensi SDM dalam layanan DM dan hipertensi
d) Peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan minimal
e) Perekrutan kader kesehatan atau mengoptimalkan kader yang sudah ada
f) Meningkatkan peran Forum Kesehatan Desa

2) Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV

Permasalahan:

a) Pasien TBC tidak mau diperiksa HIV
b) Belum ada SOP Pemeriksaan HIV pada pasien TBC
c) Tidak ada LSM untuk menjangkau Populasi kunci, terutama Waria dan LSL
d) Ibu hamil yang periksa di dokter obsgyn belum semuanya diperiksa HIV

Solusinya:

a) Peningkatan kapasitas petugas sebagai konselor. Diusulkan pelatihan Konselor HIV tahun 2021 melalui anggaran DBHCHT
b) Puskesmas membuat SOP Pemeriksaan TB-HIV
c) Koordinasi dengan KPAD untuk mengajukan adanya Penjangkau yang direkrut resmi oleh KPAD dengan anggaran hibah KPA
d) Pertemuan tripel eliminasi di bulan Maret 2020

3) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

Permasalahan:

a) Terduga sudah diberi pot dahak tapi tidak dikembalikan

b) Belum dilakukan skrening kepada masyarakat umum secara berkala
c) Pengetahuan masyarakat tentang tanda gejala TBC masih kurang sehingga tidak periksa ke pelayanan kesehatan jika mengalami gejala
d) Pelacakan kontak belum optimal
e) Belum optimalnya jejaring TBC di tingkat Kabupaten dan Kecamatan
f) Jumlah sasaran terduga TBC berdasarkan perkiraan temuan kasus, sementara jumlah kasus yang ditemukan lebih rendah dari target temuan

Solusinya:

a) Pembentukan kader TBC, 1 RT 1 kader di tingkat desa yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat, skrining warganya yang mengalami gejala TBC dan merujuk spesimen TBC dari rumah warga ke puskesmas
b) Mewajibkan puskesmas untuk melaksanakan pelacakan kontak dan tindak lanjut PIS-PK
c) Optimalisasi dan evaluasi WIFI TB

4) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ):

Permasalahannya:

a) Kesulitan menemukan ODGJ karena ada yang mempunyai keluarga/ berkeliaran dan ada yang disembunyikan oleh keluarga
b) Belum semua keluarga bersedia memeriksakan anggota keluarganya dengan gangguan jiwa berat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin
c) Masih terbatasnya tenaga kesehatan puskesmas yang mendapatkan pelatihan pelayanan dengan gangguan jiwa
d) Masih banyak desa yg belum mempunyai Posyandu Jiwa sehingga pemantauan secara rutin tiap bulan belum maksimal
e) Penilaian negatif dari masyarakat terhadapa orang dengan gangguan jiwa berat

Solusinya adalah:

a) Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam penjaringan ODGJ di masyarakat
b) meningkatan edukasi kepada keluarga yg mempunyai anggota keluarga dengan gangguan jiwa berat agar bersedia melakukan perawatan secara maksimal termasuk pengobatannya
c) peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan jiwa
d) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa
e) Pembentukan posyandu jiwa

5) Pelayanan kesehatan usia lanjut

Permasalahan:

a) Belum ada persamaan persepsi dan definisi operasional dari petugas kesehatan tentang pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia.
b) Tenaga kesehatan yang terlatih atau tentang kesehatan lanjut usia yang masih sedikit.
c) Puskesmas santun lansia baru sedikit dan belum maksimal dalam memberikan pelayanan.
d) Petugas yang memegang program lansia sering berganti ganti.
e) Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Solusinya:

a) Penguatan dari sdm dan sarana prasarana di puskesmas.
b) Persamaan persepsi tentang definisi operasional dari pelayanan lanjut usia.
c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan terhadap lanjut usia.
d) Pengalokasian dana untuk peningkatan sarana dan prasarana serta sdm.
e) Pemegang program lanjut usia sebaiknya diberikan SK Kepala Puskesmas atau Kepala Dinas Kesehatan.

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif:

Permasalahan yang ditemui:

a) Pelaksanaan posbindu PTM kebanyakan dilakukan pada jam kerja krn terbatasnya SDM baik dari puskesmas maupun kader
b) Belum semua warga masyarakat usia produktif mau datang ke posbindu untuk dilakukan skrining kesehatan
c) Skrining kesehatan di puskesmas belum maksimal karena terbatasnya SDM
d) Belum semua warga masyarajat usia produktif yg mau periksa ke puskesmas dengan berbagai alasan
e) Belum semua desa mempunyai Posbindu PTM
f) Kebanyakan Posbindu PTM di pusatkan di balai desa sehingga masyarakat yg jaraknya jauh dari balai desa belum mau datang ke posbindu PTM
g) Belum semua posbindu punya alat posbindu kit sendiri ada beberapa yg masih menggunakan alat dari puskesmas

Solusinya adalah:

a) Memaksimalkan kegiatan posbindu dan diupayakan melakukan posbindu di luar jam kerja
b) Peningkatan sosialisasi Posbindu PTM ke masyarakat
c) Peningkatan kompetensi petugas

d) Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan skrining kesehatan

e) Melakukan motivasi pada desa untuk pembentukan posbindu PTM

7) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Permasalahan : standar pelayanan minimal untuk usia pendidikan dasar pada awal tahun kemarin belum dipahami bersama tentang standar kuantitas maupun kualitas sehingga sasaran dan anggaran berubah-ubah

Solusinya: persamaan persepsi dan pembahasan bersama definisi operasional indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

8) Pelayanan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir

Permasalahan: kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir banyak dilaksanakan di puskesmas dan rumah sakit/klinik bersalin/ PKU/BPS

Solusinya: membentuk jejaring antara dinas kesehatan/puskesmas dengan rumah sakit/klinik bersalin/ PKU/BPSP

9) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Permasalahan : sasaran ibu hamil masih menggunakan data proyeksi, bukan sasaran riil yang digunakan sebagai penyebut dalam penghitungan capaian kinerja

Solusinya: diperlukan penjelasan dalam laporan penerapan SPM bahwa sasaran yang digunakan sebagai penyebut bukan sasaran riil ibu hamil yang ada

C. Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis pelayanan dasar

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap Warga Negara.

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3.a
Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
	Indikator	Nilai		
1.	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2019	6.042.894.000
2.	penyediaan pelayanan pengolahan air limbahdomestik	100	2019	4.138.800.000

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.3.b
Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

No	INDIKATOR	Target		Realisasi	
		Jumlah Sasaran	%	Jumlah Sasaran	%
1.	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1 kabupaten	100	1 kabupaten	80,16
2.	penyediaan pelayanan pengolahan air limbahdomestik	1 kabupaten	100	1 kabupaten	99,79

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten berjumlah Rp.73.961.944.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.3.c
Alokasi Anggaran SPM Pekerjaan Umum

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.764.400.000,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	550.000.000,00
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	335.253.528,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	166.400.000,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.000.000,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55.000.000,00
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	217.746.472,00
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	30.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	10.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		749.000.000,00
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	200.000.000,00
2	Pengadaan mebeleur	100.000.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000,00
5	Penataan Lingkungan Kantor	219.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000,00
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	15.000.000,00
2	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	10.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		40.000.000,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000,00
2	Monev kegiatan SKPD	25.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan		131.250.000,00
1	Biaya Operasional Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (DAK Bid. Perkim)	131.250.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		1.600.000.000,00
1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	500.000.000,00
2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	450.000.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong	650.000.000,00
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		3.000.000.000,00
1	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	2.900.000.000,00
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		10.181.694.000,00
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Bid. Air Minum)	2.693.119.000,00
2	Pengembangan sistem distribusi air minum	2.625.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	610.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	
3	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	200.000.000,00
4	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	100.000.000,00
5	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	20.000.000,00
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM) (DAK Bid. Sanitasi)	3.500.000.000,00
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (Silpa DAK Bidang Air Minum)	424.775.000,00
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Silpa DAK Sanitasi)	8.800.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan		150.000.000,00
1	BOP Pendampingan PNPM	150.000.000,00
Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung		55.770.600.000,00
1	Pembangunan Gedung Milik Daerah	51.520.600.000,00
2	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah	3.400.000.000,00
3	Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor	850.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		550.000.000,00
1	Pengawasan pemanfaatan ruang	100.000.000,00
2	Monitoring dan Pengendalian Bangunan	75.000.000,00
3	Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten	375.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	73.961.944.000,00

5. Dukungan Personil

Rincian dukungan personil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 7.3.d. Jumlah Keseluruhan Pegawai Disperwaskim

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PNS	43 orang	
2	CPNS	- orang	
3	THL	31 orang	
	Jumlah	72 orang	

Tabel 7.3.e
Sebaran pegawai berdasarkan Golongan Pendidikan Disperwaskim

GOL. PEND.	PNS/CPNS/THL 2			
	PNS	CPNS	THL	Total
SD	2		1	3
SMP	4		2	6
SMA	5		10	15
SMK	9		14	23
D-3	1		1	2
D-4	0			0
S-1	13		3	16
S-2	7			7
JUMLAH	**41**	**0**	**31**	**72**

Tabel 7.3.f
Sebaran pegawai berdasarkan jabatan dan status kepegawaian Disperwaskim

BAGIAN (BIDANG)	SUBAG/SEKSI	PNS	CPNS	THL	Total
SEKRETARIAT	**KEPALA DINAS**	1			1
	SEKRETARIS	1			1
	KEPALA SUB BAGIAN	0			0
	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4		6	10
	KEPALA SUB BAGIAN	1			1
	STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	7		13	20
BIDANG PERUMAHAN	**KEPALA BIDANG**	1			
	KEPALA SEKSI PENDATAAN, PERENCANAAN, & FASILITASI	1			1
	STAF SEKSI PENDATAAN, PERENCANAAN, & EVALUASI	3		2	5
	KEPALA SEKSI PENYEDIAAN & FASILITASI	1			
	SEKSI PENYEDIAAN & FASILITASI	7		18	25
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN & TATA BANGUNAN	**KEPALA BIDANG**	1			0
	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIK & EVALUASI	1			1
	SEKSI PERENCANAAN TEKNIK & EVALUASI	7		4	11
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN KUALITAS & PENGENDALIAN	1			1
	SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN KUALITAS & PENGENDALIAN	7		7	14
					89
GRAND TOTAL		**44**	**0**	**50**	**94**

Tabel 7.3.g
Sebaran pegawai berdasarkan Golongan Ruang Disperwaskim

GOL	PANGKAT	PNS/CPNS/THL 2			
		JUMLAH	PNS	CPNS	THL
IV/c	Pembina Utama Muda	0	0		
IV/b	Pembina Tk 1	1	1		
IV/a	Pembina	2	2		
III/d	Penata Tk 1	8	8		
III/c	Penata	6	6		
III/b	Penata Muda Tk 1	11	11		
III/a	Penata Muda	1	1		
II/d	Pengatur Tk 1	2	2		
II/c	Pengatur	3	3		
II/b	Pengatur Muda Tk 1	3	3		
II/a	Pengatur Muda	3	3		
I/d	Juru Tk 1	0	0		
I/c	Juru	1	1		
I/b	Juru Muda Tk 1	0	0		
THL	HONORER	31			31
GRAND TOTAL		**72**	**41**	**0**	**31**

Tabel 7.3.h
Sebaran pegawai berdasarkan Jabatan Struktural (Eselon)

NO	PANGKAT	GOL	ESELON					
			TOTAL	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
1	Pembina Utama Muda	IV/c						
1	Pembina Tk 1	IV/b	1		1			
2	Pembina	IV/a	2			2		
3	Penata Tk 1	III/d	3				3	
4	Penata	III/c	3				3	
5	Penata Muda Tk 1	III/b						
6	Penata Muda	III/a						
7	Pengatur Tk 1	II/d						
8	Pengatur	II/c						
9	Pengatur Muda Tk 1	II/b						
10	Pengatur Muda	II/a						
JUMLAH			**9**	**0**	**1**	**2**	**6**	**0**

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan, solusi dan Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut

Tabel. 7.3.i
Permasalahan, solusi dan Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
A	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Bidang Air Minum)		
1	a. Bidang Air Minum (DAK & HAMP)		
	Pelaksanaan yang melibatkan pendanaan dari desa	Pelaksanaan sesuai dengan anggaran yang ada tanpa melibatkan pedanaan dari desa berdasarkan data perencanaan yang sudah diketahui pihak desa	Melaksanakan sesuai dari perencanaan awal (sesuai dari survey perencana yang diketahui pihak desa)
B	Kegiatan Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)		
	a. Bidang Air Minum (PAMSIMAS)		
	Pengeboran sumur dibeberapa wilayah seperti di kec. Bayat mengalami kendala tanah keras	Mencari pihak ke -3 yang mempunyai kapasitas mumpuni baik alat maupun SDM dalam pengeboran	Fasilitaor lapangan dan dinas teknis mendata pihak ke-3 yang mempunyai kapasitas baik dan meminta untuk mempresentasikan terlebih dahulu mengenai kemampuan alat, SDM dan paket pekerjaan
	Beberapa desa mengalami pengunduran waktu karena belum bisa mencairkan dana yang disebabkan belum adanya rekening dalam APBDes untuk transfer dana dari APBD	Pihak desa terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama dengan pihak ke-3	Ada sosialisasi terlebih dahulu untuk desa yang mendapat program PAMSIMAS dan tata cara penganggarannya

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
C	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM) (DAK Bidang Sanitasi)		
	a. Bidang Sanitasi (DAK)		
	Pencairan dana DAK yang memakan waktu dan ada jeda antara pelaksanaan dana tahap seblumnya dengan pencairan tahap berikutnya (Verifikasi dr inspektorat) & Kesiapan tenaga desa dalam pelaksanaan yang kurang	Memperpendek waktu pencairan dari tahap sebelum dan berikutnya & mempersiapkan tenaga untuk pelaksanaan di desa	Melaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pencairan & meningkatkan SDM BKM (pelatihan) dalam pelaksanaan fisik di desa
D	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (Silpa DAK Bidang Air Minum)		
	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan air minum di kabupaten klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi dan pendataan sebagai data awal potensi dan permasalhan air minum di kabupaten klaten 2 Perlunya koordinasi rutin antar stageholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base 3 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	1 Telah disusun pendataan potensi dan permasalahan air minum di kabupaten klaten 2 Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua) 3 Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
E	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Silpa DAK Bidang Sanitasi)		
	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan sanitasi di kabupaten klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi dan pendataan sebagai data awal potensi dan permasalhan sanitasi di kabupaten klaten	1 Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataan lanjutan (di 22 kecamamatan lainnya) sebagai data awal potensi dan permasalahan sanitasi di kabupaten klaten
		2 Perlunya koordinasi rutin antar stajeholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base	2 Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua)
		3 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	3 Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data

D. Urusan Perumahan

1. Jenis pelayanan dasar

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
4. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Perumahan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4.a
Target Pencapaian SPM Perumahan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
	Indikator	Nilai		
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	2019	0
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	2019	0

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Kabupaten Klaten tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.4.b
Realisasi Pencapaian SPM perumahan

No	INDIKATOR	Target		Realisasi	
		Jumlah Sasaran	%	Jumlah Sasaran	%
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1 kabupaten	100	1 kabupaten	100
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	1 kabupaten	100	1 kabupaten	100

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Kabupaten Klaten berjumlah Rp.73.961.944.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.4.c

Alokasi Anggaran SPM perumahan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.764.400.000,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	550.000.000,00
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	335.253.528,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	166.400.000,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.000.000,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55.000.000,00
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	217.746.472,00
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	30.000.000,00
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	10.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		749.000.000,00
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	200.000.000,00
2	Pengadaan mebeleur	100.000.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000,00
5	Penataan Lingkungan Kantor	219.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000,00
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	15.000.000,00
2	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	10.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		40.000.000,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000,00
2	Monev kegiatan SKPD	25.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan		131.250.000,00
1	Biaya Operasional Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (DAK Bid. Perkim)	131.250.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		1.600.000.000,00
1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	500.000.000,00
2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	450.000.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong	650.000.000,00
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		3.000.000.000,00
1	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	2.900.000.000,00
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		10.181.694.000,00
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Bid. Air Minum)	2.693.119.000,00
2	Pengembangan sistem distribusi air minum	2.625.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	610.000.000,00
3	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	200.000.000,00
4	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	100.000.000,00
5	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	20.000.000,00
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM) (DAK Bid. Sanitasi)	3.500.000.000,00
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan	424.775.000,00

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Sanitasi (Silpa DAK Bidang Air Minum)	
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Silpa DAK Sanitasi)	8.800.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan		150.000.000,00
1	BOP Pendampingan PNPM	150.000.000,00
Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung		55.770.600.000,00
1	Pembangunan Gedung Milik Daerah	51.520.600.000,00
2	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah	3.400.000.000,00
3	Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor	850.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		550.000.000,00
1	Pengawasan pemanfaatan ruang	100.000.000,00
2	Monitoring dan Pengendalian Bangunan	75.000.000,00
3	Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten	375.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	73.961.944.000,00

5. Dukungan Personil

Rincian dukungan personil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 7.4.d. Jumlah Keseluruhan Pegawai Disperwaskim

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PNS	43 orang	
2	CPNS	- orang	
3	THL	31 orang	
	Jumlah	72 orang	

Tabel 7.4.e
Sebaran pegawai berdasarkan Golongan Pendidikan Disperwaskim

GOL. PEND.	PNS/CPNS/THL 2			
	PNS	CPNS	THL	Total
SD	2		1	3
SMP	4		2	6
SMA	5		10	15
SMK	9		14	23
D-3	1		1	2
D-4	0			0
S-1	13		3	16
S-2	7			7
JUMLAH	**41**	**0**	**31**	**72**

Tabel 7.4.f
Sebaran pegawai berdasarkan jabatan dan status kepegawaian Disperwaskim

BAGIAN (BIDANG)	SUBAG/SEKSI	PNS	CPNS	THL	Total
SEKRETARIAT	**KEPALA DINAS**	1			1
	SEKRETARIS	1			1
	KEPALA SUB BAGIAN	0			0
	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4		6	10
	KEPALA SUB BAGIAN	1			1
	STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	7		13	20
BIDANG PERUMAHAN	**KEPALA BIDANG**	1			
	KEPALA SEKSI PENDATAAN, PERENCANAAN, & FASILITASI	1			1
	STAF SEKSI PENDATAAN, PERENCANAAN, & EVALUASI	3		2	5
	KEPALA SEKSI PENYEDIAAN & FASILITASI	1			
	SEKSI PENYEDIAAN & FASILITASI	7		18	25
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN & TATA BANGUNAN	**KEPALA BIDANG**	1			0
	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIK & EVALUASI	1			1
	SEKSI PERENCANAAN TEKNIK & EVALUASI	7		4	11
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN KUALITAS & PENGENDALIAN	1			1
	SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN KUALITAS & PENGENDALIAN	7		7	14
					89
GRAND TOTAL		**44**	**0**	**50**	**94**

Tabel 7.4.g
Sebaran pegawai berdasarkan Golongan Ruang Disperwaskim

GOL	PANGKAT	PNS/CPNS/THL 2			
		JUMLAH	PNS	CPNS	THL
IV/c	Pembina Utama Muda	0	0		
IV/b	Pembina Tk 1	1	1		
IV/a	Pembina	2	2		
III/d	Penata Tk 1	8	8		
III/c	Penata	6	6		
III/b	Penata Muda Tk 1	11	11		
III/a	Penata Muda	1	1		
II/d	Pengatur Tk 1	2	2		
II/c	Pengatur	3	3		
II/b	Pengatur Muda Tk 1	3	3		
II/a	Pengatur Muda	3	3		
I/d	Juru Tk 1	0	0		
I/c	Juru	1	1		
I/b	Juru Muda Tk 1	0	0		
THL	HONORER	31			31
GRAND TOTAL		**72**	**41**	**0**	**31**

Tabel 7.4.h
Sebaran pegawai berdasarkan Jabatan Struktural (Eselon)

NO	PANGKAT	GOL	ESELON					
			TOTAL	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
1	Pembina Utama Muda	IV/c						
1	Pembina Tk 1	IV/b	1		1			
2	Pembina	IV/a	2			2		
3	Penata Tk 1	III/d	3				3	
4	Penata	III/c	3				3	
5	Penata Muda Tk 1	III/b						
6	Penata Muda	III/a						
7	Pengatur Tk 1	II/d						
8	Pengatur	II/c						
9	Pengatur Muda Tk 1	II/b						
10	Pengatur Muda	II/a						
JUMLAH			**9**	**0**	**1**	**2**	**6**	**0**

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan, solusi dan Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan SPM Perumahan adalah sebagai berikut

Tabel. 7.4.i
Permasalahan, solusi dan Rencana Tindak Lanjut
dalam pelaksanaan SPM Perumahan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Database Perumahan tentang RTLH yang belum akurat	Dilaksanakan pendataan yang detail dan akurat	Maintenance data dan update data jika sudah ada database yang akurat
2.	Belum terlaksananya kegiatan penyerahan PSU (Pra Sarana Umum) perumahan yang dibangun pengembang kepada Pemerintah Kabupaten	Dibentuk tim verifikasi dan regulasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut	Memulai kegiatan penyerahan PSU (Pra Sarana Umum) pada Tahun Anggaran 2020

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
3.	Tingkat hunian RUSUNAWA yang belum optimal dan permasalahan pembayaran sewa hunian	Sosialisasi yang lebih intens untuk mempromosikan RUSUNAWA dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penghuni rusunawa	Menyebarkan pamflet RUSUNAWA, sosialisasi di kecamatan, dan menerap kan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
4.	Kekurangan Sarpras Kantor	Dilaksanakan pendataan Sarpras kantor	Pengadaan Sarpras perkantoran
5.	Belum adanya kendaraan Operasional untuk IMB dan RTLH	Pengusulan Pengadaan Kendaraan Operasional	Pengadaan Kendaraan Operasional
6.	Anggaran untuk Rusunawa belum teranggarkan karena belum adanya kegiatan	Pengusulan Anggaran untuk Rusunawa belum teranggarkan karena belum adanya kegiatan	Penganggaran kegiatan untuk Rusunawa

E. Urusan Kentrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis pelayanan dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan kebakaran daerah Kabupaten/ Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, paling sedikit memuat :

a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran:
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi dan Kabupaten/Kota yaitu Jenis pelayanan dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada, yang meliputi

a. Pelayanan kerugian materil; dan
b. Pelayanan pengobatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota bahwa Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

a. Pelayanan informasi rawan bencana

   kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling tidak memuat :

   1. penyusunan kajian resiko bencana
   2. komunikasi informasi edukasi rawan bencana

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

   Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana paling tidak memuat :

   1. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
   2. pembuatan rencana kontinjensi;
   3. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
   4. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
   5. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;

6. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling tidak memuat :

1. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
2. respon cepat darurat bencana;
3. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
4. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
5. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Pelayanan dasar sub-urusan kebakaran dan sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari:

Tabel 7.5.a
Target Pencapaian SPM Sub urusan kebakaran dan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100%

Pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari:

1. Pelayanan informasi rawan bencana,
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel 7.5.b

Target Pencapaian SPM Sub urusan bencana

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja jenis Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada pada tahun 2019, tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di kabupaten Klaten terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.c
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibunlinmas
yang dikerjakan Satpol PP

No	Jenis pelayanan dasar	indikator	Laporan masuk	Yang diselesaikan	Realisasi 2019
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	227	227	100
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	1.204	1.104	91.69

Realisasi pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah jenis layanan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di kabupaten Klaten terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.d
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibunlinmas yang dikerjakan BPBD

No	Jenis pelayanan dasar	indikator	Target	Realisasi
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Keamanan ketentraman Ketertiban umum sub-urusan kebakaran dan sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2019 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar. Rp 3.241.000.000,-(tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD kabupaten Klaten. Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapain SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.e
Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibunlinmas yang dikerjakan Satpol PP

No	Jenis layanan	Isu SPM bidang Trantibumlinmas	Program/Kegiatan	Anggaran	realisasi
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan kualitas pencegahan terjadinya kebakaran	- Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran	80.000.000	77.601.900
		Penanganan penyelamatan korban kebakaran	- Operasional Pemadam kebakaran	1.083.950.000	1.035.882.793
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum/masyarakat dan penegakan perda/perkada sesuai SOP	- Patroli Trantibum di wilayah Kabupaten Klaten	70.000.000	69.778.400
			- optimalisasi pengamanan penertiban wilayah kabupaten klaten	1.288.050.000	1.281.252.716
			- Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda	110.000.000	105.393.000
			- Pembinaan Penegakan Perda/Perbup	35.000.000	54.913.250
			- Operasi PGOT,WTS dan Miras	100.000.000	99.860.850
		Peningkatan pembinaan dan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan Anggota	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	64.000.000	62.697.423
			- Kegiatan pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat	225.000.000	224.855.750

No	Jenis layanan	Isu SPM bidang Trantibumlinmas	Program/Kegiatan	Anggaran	realisasi
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Satpol PP dan Satlinmas	- Pengadaan Peralatan gedung Kantor	75.000.000	69.607.000
			- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya	110.000.000	104.581.000

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Keamanan ketentraman Ketertiban umum sub bidang kebencanaan Tahun 2019 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar. Rp 1.125.000.000,-(satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana sebesar Rp. 403.836.300,-
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Rp. 368.710.240
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rp. 1.936.411.180,-

Tabel 7.5.f
Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibunlinmas yang dikerjakan BPBD

No	Jenis layanan	Kegiatan	Anggaran	realisasi
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	- Pelatihan simulasi pengurangan resiko bencana	617.580.000	403.836.300
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana	100.000.000	95.252.000
		- Pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana	50.000.000	46.731.500
		- Penyelenggaraan sekolah sugai	225.000.000	188.119.800
		- Peningkatan koordinasi forum penanggulangan bencana	50.000.000	42.119.800

No	Jenis layanan	Kegiatan	Anggaran	realisasi
		- Desa tangguh bencana	100.000.000	91.523.840
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Koordinasi pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana	404.300.000	262.421.100
		- Pengembangan dan pemberdayaan TRC	477.794.440	440.572.667
		- Droping air	200.000.000	111.000.000
		- Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana	555.000.000	520.541.600
		- Penyediaan logistic	505.000.000	426.552.627

5. Dukungan Personil

Susunan Personil Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Klaten dan Damkar berdasarkan Jumlah Personil Menurut Golongan dan Jenis Kelamin adalah sebagai beriiikut.

Tabel 7.5.g
Personil Satpol PP tahun 2019

Jumlah Pegawai			
Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	-	-	
II	15 Orang	2 orang	17 Orang
III	36 Orang	4 Orang	40 Orang
IV	4 Orang	-	4 Orang
THL Satpol PP	32 orang	3 orang	35 0rang
THL Damkar	18 orang	-	18 orang
Jumlah	105 Orang	9 Orang	114 Orang

Susunan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.

Tabel 7.5.h
Jumlah Pegawai BPBD Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai			
Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	-	-	
II	5 Orang	-	6 Orang
III	11 Orang	7 Orang	18 Orang
IV	5 Orang	-	4 Orang
Jumlah	21 Orang	7 Orang	28 Orang

Tabel 7.5.i
Jumlah Pegawai BPBD Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai			
Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S2	7 Orang	1 Orang	8 Orang
S1	4 Orang	4 Orang	8 Orang
D3	2 Orang	1 Orang	3 Orang
SLTA	5 Orang	2 Orang	7 Orang
SLTP	2 Orang	-	2 Orang
SD	-	-	-
Jumlah	20 Orang	8 Orang	28 Orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Satpol PP Kabupaten klaten dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh.

Tabel 7.5.j
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Trantibunlinmas

Permasalahan	Solusi
A. Perencanaan 1. Masih adanya perbedaan persepsi antara Definisi Operasional (DO) SPM dan DO Program 2.Perencanaan belum terpadu antar semua program	Koordinasi antara pelaksana program dengan pejabat pembuat SPM
B. Koordinasi 1. Kurangnya koordinasi antara pelaksana program dengan pengelola atau Pejabat pembuat SPM	Meningkatkan koordinasi
C. Pendanaan 1. anggaran yang didapatkan belum sesuai dengan matriks rencana aksi SPM	Mengusulkan anggaran untuk SPM sesuai dengan matriks rencana aksi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM BPBDP Kabupaten klaten dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Adapun beberapa permasalahan terkait dengan Bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten antara lain :

1) Permasalahan Terkait Bencana Banjir

a) Pendangkalan sungai yang diakibatkan oleh masih banyaknya sedimen/endapan di Sungai besar maupun anak sungai
b) Masih Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana (Karung plastic dan Bronjong Kawat)
c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah

Sedangkan solusi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah

a) Normalisasi Sungai
b) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
c) Perlu koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, dan bagi korban banjir telah diberikan bantuan logistic kebutuhan dasar kepada warga yang rumahnya terisolir genangan air.

2) Permasalahan dan solusi terkait Bencana Banjir Hujan/Lahar Dingin Merapi

Permasalahan terkait dengan bencana banjir lahar dingin Merapi adalah :

a) Sabuk Dam tidak cukup menampung/menahan aliran lahar hujan bila melebihi kapasitas seperti tahun 2014.
b) Pengerukan pasir sudah sampai pada dinding sungai Kaliworo dampaknya ke pemukiman.
c) Sendimentasi aliran sungai dibawah Kaliworo mulai dari Desa Borangan sampai dengan Pandansimping berdampak pereluasan ;lahar hujan.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan terkait dengan Bencana Lahar Dingin Merapi adalah :

a) Penambahan Sabuk Dam
b) Pengendalian Penambangan Pasir
c) Pengerukan sendimentasi

3) Permasalahan dan solusi terkait dengan bencana angin ribut dan puting beliung

Permasalahan terkait dengan Bencana Angin ribut yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat, tentang kegiatan pemangkasan pohon-pohon tinggi dekat bangunan sedangkan solusi yang ditempuh memberikan sosialisasi mitigasi bencana angn kepada masyarakat, pentingnya bangunan rumah yang tahan terhadap angin dan pentingnya penahan kekuatan angin (Pohon yang berakar kuat yang letaknya jauh dari pemukiman) yang berfungsi pemecah kekuatan angin

4) Permasalahan dan solusi terkait dengan bencana tanah longsor

a) Bagunan yang terletak ditebing/tanah miring
b) Vegetasi (pepohonan) yang bergungsi untuk menahan tanah

Sedangkan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan bencana tanah longsor antara lain:

a) Tidak diijinkan membangun tanah di tebing atau di tanah miring.
b) Pembuatan tanggung di tebing
c) Reboisasi (Penanaman pohon keras)
d) Sosialisasi ke Masyarakat.

5) Permasalahan dan solusi terkait dengan Bencana Erupsi Gunung Merapi

Permasalahan yang ada terkait dengan bencana erupsi Merapi adalah Jalur Evakuasi yang sudah rusak karena truck galian C. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait bencana erupsi gunung merapi adalah dengan Pengalihan jalur truck Galian C atau pembatasan tonase.

6) Permasalahan dan solusi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu belum adanya payung hukum bantuan hibah dan atau bantuan keuangan untuk korban bencana, sedangkan solusi yang bisa ditempuh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah pembuatan payung hukum kaitan dengan bantuan hibah dan atau bantuan keuangan untuk korban bencana.

F. Urusan Sosial

1. Jenis pelayanan dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
5) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 7.6.a

Target Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Klaten Tahun 2019

No.	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp.)
	Indikator	Nilai (%)		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	2019	565.000.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	2019	65.000.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	2019	1.625.000.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	2019	256.500.000
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100	2019	-

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.6.b
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Klaten Tahun 2019

No.	Indikator	Target		Realisasi	
		Jumlah Sasaran	%	Jumlah Sasaran	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	553	100	400	72
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	470	100	470	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	2.500	100	1.957	78
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	98	100	138	141
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	333	100	333	100

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 7.6.c
Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	115.000.000
			Bantuan Sosial kepada penyandang Disabilitas Berat	450.000.000
			Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	-
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		Bantuan Sosial kepada Anak Terlantar di luar panti	365.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	206.500.000
			Penanganan mayat terlantar	20.000.000
			Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	30.000.000
			Pemutakhiran Data Keluarga Miskin	1.315.000.000
4	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	125.000.000
5	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	**Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	-
			Jumlah	**2.626.500.000**

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yang terdiri dari :

ASN = 9 orang (Fungsional Pekerja Sosial)

Non-ASN = 29 orang (Sakti Peksos 3 orang, TKSK 26 orang)

6. Permasalahan dan Solusi

1) Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

Permasalahan :

- Belum optimalnya pelayanan dasar untuk penyandang disabilitas di luar panti melalui bantuan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;

- Belum optimalnya bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas di kabupaten klaten;
- Belum optimalnya pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi terkait perencanaan bantuan dan pelatihan dalam forum perencanaan OPD;
- Meningkatkan verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran.

2) Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

Permasalahan :

- Belum optimalnya keakuratan data lanjut usia terlantar pada tahun berjalan yang menyebabkan kurang maksimalnya bantuan yang berhasil disalurkan;

Solusi :

- Meningkatkan verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran.

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsif good govermance dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing–masing sasaran strategis. Adapun skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90,00%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75,00%	Sedang
4	50,01% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tabel 8.2.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≤ 99,99	Tercapai
2	≥ 100	Tidak Tercapai

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

A. TARGET KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, capaian indikator kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana Tabel 8.3.

Tabel 8.3.
Target Kinerja dan Capaian Kinerja
Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	50	98,28	196,56
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	85	85,09	100,11
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	16	12	75,00
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,11	10,01	99,01
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,65	1,59	96,36
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,72	0,71	98,61
3	Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*)	3.1	Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)/TFR	Indeks	2,14	2,1	98,13
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,22	76,67	100,59
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan danrehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	85	62,26	72,75
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	97	96	98,9
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,1	13,09	99,92

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	13	130
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	22	440,00
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	3,13	52,17
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	14,3	143,00
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	22,19	443,8
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,07	77,55	92,24
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	150
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85	91,31	108,60
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	12,56	251,2
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72	68	94,44
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	66 (B)	61,32 (B)	92,91
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3	3,22	107,33
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	83	92,22
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	80	90	112,50
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	81	90,00
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,08
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,08
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,08

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,64	75,43
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,3	10,98	89,69
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	42	39	92,86
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	31,96	127,84
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,12	19,98	104,49
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	11	11,45	104,09
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	81,82	105	128,33
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):				
			PMDN	%	438	19	4,34
			PMA	%	294	139	47,28
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):				
			PMDN	%	2,2	733	33318,18
			PMA	%	2,5	272	10880,00
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,05	1,00	95,24
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	81	117,39
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,9	71,48	81,32
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,98	37,00	105,77
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	6,5	7,6	116,92
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyrakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	37,19	60,87	163,67

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	47,41	45,87	96,75
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks	73,75	53,76	72,89
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,2	78,98	100,28
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	35,57	28,46	80,01
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	79,57	82,29	103,42
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	53,71	83,3	155,09
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	77	72,17	93,73
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	66	58	87,88
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	97	96	98,97
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,23	60,25	100,03
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nindya (750)	Madya (650)	86,67
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	80,05	79,02	98,71
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	78,37	97,96
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	Sdh (92,70)	Sdh (91,77)	99,00
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	41	5,2	12,68

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (*enam puluh enam*) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 60 (*enam puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 *(tujuh)* indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. **Indikator Progresif**, dengan hasil:

a. Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 81,67% dengan Kriteria ***Sangat Tinggi***;
b. Sebanyak 5 (lima) atau sebanyak 8,33% dengan Kriteria ***Tinggi***;
c. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,33% dengan kriteria *Sedang;*
d. Sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 3,33% dengan Kriteria ***Rendah***; dan
e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,00% dengan Kriteria ***Sangat Rendah***.

Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** (atau interval nilai realisasi kinerja ***≥ 90,01***) sebanyak 49 (*empat puluh sembilan)* indikator atau 81,67%, diantaranya:
   1. Prosentase Sekolah Dasar yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
   2. Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi Standar Nasional;
   3. Usia Harapan Hidup;
   4. Persentase Penguatan Kapasitas PSKS;
   5. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
   6. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
   7. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
   8. Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat;
   9. Indeks Profesionalitas ASN;
   10. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   11. Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu;
   12. Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan;
   13. Prosentase Kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku;
   14. Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;
   15. Level Maturitas SPIP;
   16. Level Kapabilitas APIP;
   17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
   18. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
   19. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara;
   20. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
   21. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi;
   22. Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah;
   23. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah;

24. Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah;
25. Persentase Keterlibatan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra;
26. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB;
27. Prosentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek;
28. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata;
29. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
30. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing;
31. Prosentase Inovasi yang Diterapkan;
32. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN;
33. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA;
34. Rasio Penduduk yang Bekerja;
35. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
36. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB;
37. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing;
38. Indeks Layanan Infrastruktur;
39. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
40. Ketaatan Terhadap RTRW;
41. Indeks Kualitas Udara;
42. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan);
43. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
44. Indeks Demokrasi;
45. Indeks Ketertiban Masyarakat;
46. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
47. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;
48. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat; dan
49. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja ***75,01 - 90,00*** sebanyak 5 (lima) indikator, diantaranya:
   1. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan;
   2. Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan);
   3. Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)
   4. Indeks Kualitas Air; dan
   5. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja 65,01 – 75,00 sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu:
   1. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan

2. Indeks Kualitas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;

d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ***50,01 - 65,00*** sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya.

e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sangat rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ **50,00** sebanyak 3 (tiga) indikator, diantara:

1. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN:
2. Rasio daya serap tenaga kerja PMA; dan
3. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi.

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja* sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagaimana Gambar Diagram 8.1.

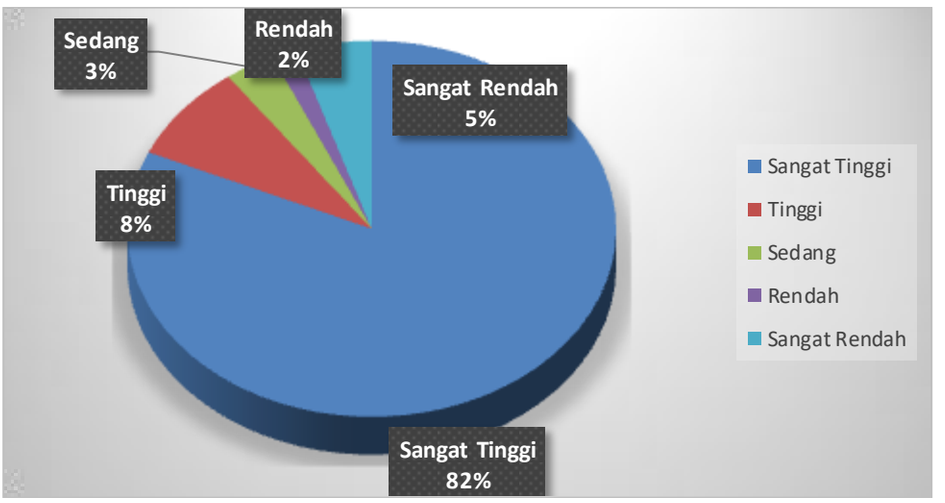

Gambar *Diagram 8.1 Peringkat Kinerja Progresif*

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Tercapai (Berhasil Menekan)***, atau interval nilai realisasi kinerja skala ≤99,99 sebanyak 7 (tujuh) indikator, diantaranya:

1. Kasus Kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi;
3. Angka Kematian Balita; dan
4. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U);
5. Tingkat Inflasi YoY;
6. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate)*/TFR; dan
7. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala*

Nilai Peringkat Kinerja Regresif maka diperoleh hasil sebagaimana Gambar Diagram 8.2.

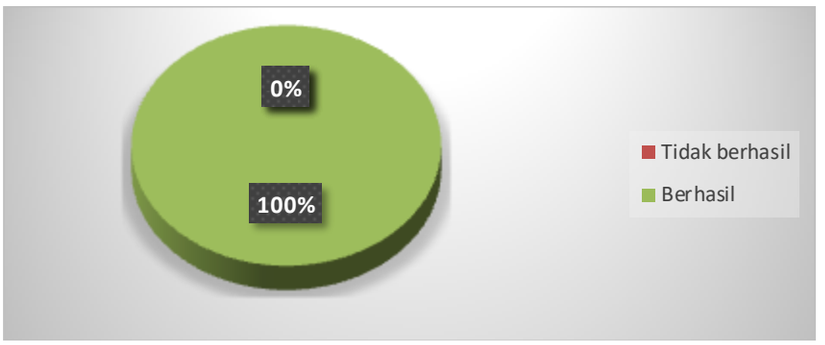

Gambar *Diagram 8.2 Peringkat Kinerja Regresif*

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di Kabupaten Klaten Tahun 2019 didasarkan pada pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup *(Life-skill),* 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehinggga capaian kinerja Pendidikan Sepanjang Hayat tahun 2019 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah Daerah.

Adapun capaian sasaran: *Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal* sebagaimana Tabel 8.4.

Tabel 8.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJM	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	61,05	50	98,28	196,56	55	178,69

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJM	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
2	Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	82,00	85	85,09	100,11	95	89,57

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020.

Capaian sasaran kinerja: ***Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal***, sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan pendidikan, diantaranya:

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2014-2018, yaitu dari sebesar 12,74 pada tahun 2014 menjadi sebesar 13,07 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu dari sebesar 8,16 pada tahun 2015 menjadi sebesar 8,26 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memasuki jenjang pendidikan pendidikan lebih tinggi semakin baik. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khusunya di dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,02 % dari dari sebesar 8,16 pada tahun 2015 menjadi sebesar 8,26 pada tahun 2019, hal ini disebabkan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2015-2019 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2015 sudah mencapai 94,53%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada tahun 2019 naik menjadi 98,66%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 87,58% pada tahun 2015, dan pada Tahun 2019 menjadi 98,46%. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B banyak yang bersekolah dari luar daerah serta ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat.

Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 untuk semua jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 8.5.

Tabel 8.5.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019

No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	94,53	87,58	93,06
2	2016	105,23	97,57	81,00
3	2017	97,45	90,93	-
4	2018	102,75	95,21	-
5	2019	98,66	98,46	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.
*Catatan: *) Mulai tahun 2017 Urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi.*

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang bersifat fluatuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2015 sudah mencapai 81,60%, naik menjadi 88,37% pada tahun 2019. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2015 sudah mencapai 63,96% menjadi 73,14% pada tahun 2019 hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar disajikan pada Tabel 8.6.

Tabel 8.6.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019

No	Tahun	SD /MI /SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2015	81,60	63,96
2	2016	91,26	72,77
3	2017	86,84	68,22
4	2018	90,84	64,07
5	2019	88,37	73,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.6. sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogyakarta dan Solo.

5) Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2015-2019 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.7.

Tabel 8.7.
Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	%	0,02	0,03	0,04	0,02	0,01
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	%	0,10	0,08	0,23	0,06	0,05
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA*)	%	0,73	0,69	Na	Na	Na

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.
*Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.*

Berdasarkan Tabel 8.7. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah dua tahun terakhir mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari tahun 2018 sebesar 0,02% menjadi 0,01% di tahun 2019, sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS dari 0,06% pada tahun 2018 menjadi 0,05% pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan dasar sudah terpenuhi dengan adanya program Pemerintah antara lain Bantuaan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

6) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif. Perkembangan angka kelulusan tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 8.3.

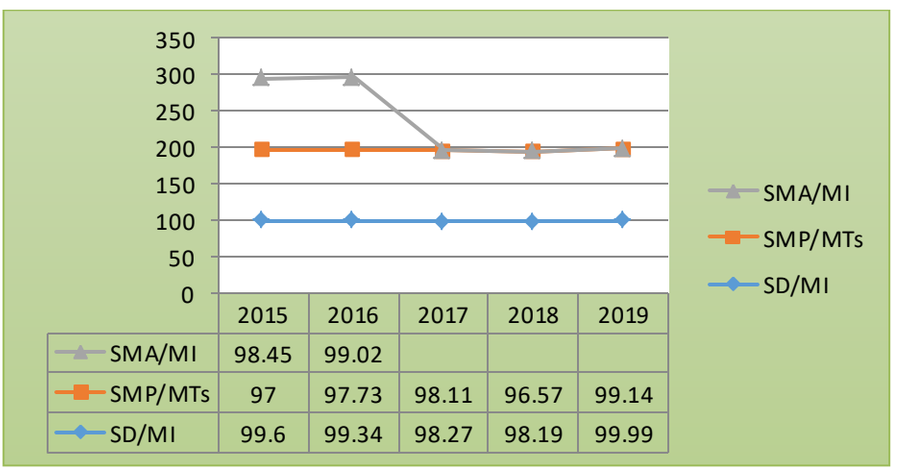

	2015	2016	2017	2018	2019
SMA/MI	98.45	99.02			
SMP/MTs	97	97.73	98.11	96.57	99.14
SD/MI	99.6	99.34	98.27	98.19	99.99

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020.
Gambar 8.3 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2015-2019
*Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.*

Berdasarkan sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI cenderung mengalami penurunan terakhir dari 99,6% pada tahun 2015 menjadi 99,99 % di tahun 2019. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTS dari 97 % di tahun 2015 naik menjadi 99,14 % pada tahun 2019.

7) Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun ke atas dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten tahun 2014-2019 disajikan pada gambar 8.4.

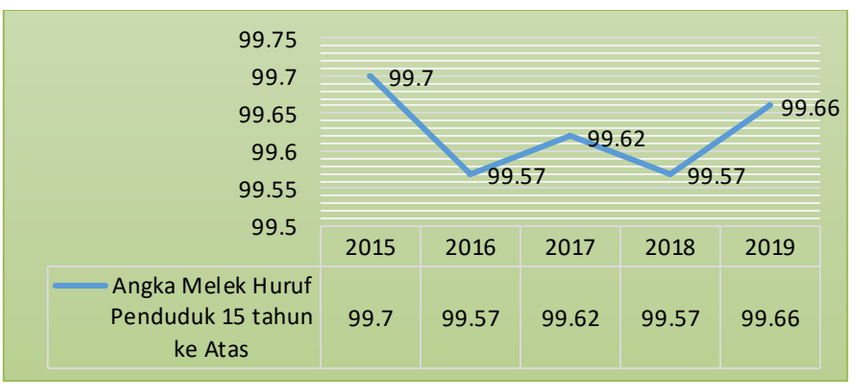

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020.
Gambar 8.4. Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, dari 99,62 % di tahun 2017 menjadi 99,66 % di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Klaten sudah terbebas dari buta huruf.

8) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 mensyaratkan kualifikasi teknis yang semakin tinggi sehingga perlu dibarengi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.8.

Tabel 8.8.
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	79,09	81,99	84,16	87,67	90,32
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	92,09	91,51	60,33	91,98	94,17
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK*)	%	96,71	97,06	Na	Na	Na

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.
*Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.*

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama lima tahun terakhir (Tahun 2015-2019) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana tunjangan profesi guru yang sudah memiliki sertifikat profesi, dan bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/, SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 8.9.

Tabel 8.9.
Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2 dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019

Uraian	**Satuan**	**Tahun**				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	98,08	98,76	98,27	99,00	99,19
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	96,58	96,78	93,55	96,92	97,10
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK*)	%	89,64	97,53	Na	Na	Na

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020.
*Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.*

Berdasarkan Tabel 8.9. sebagaimana tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat di jenjang pendidikan SD/MI dari 98,08% pada tahun 2015 menjadi 99,19% di tahun 2019, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dari 96,58% pada tahun 2015 menjadi 97,10% pada tahun 2019. Jabatan Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS telah memenuhi kualifikasi S1/D4 sesuai standar sistem Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah masing-masing telah tercapai 100%. Hal ini

menandakan bahwa tingkat mutu guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

9) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 8.5

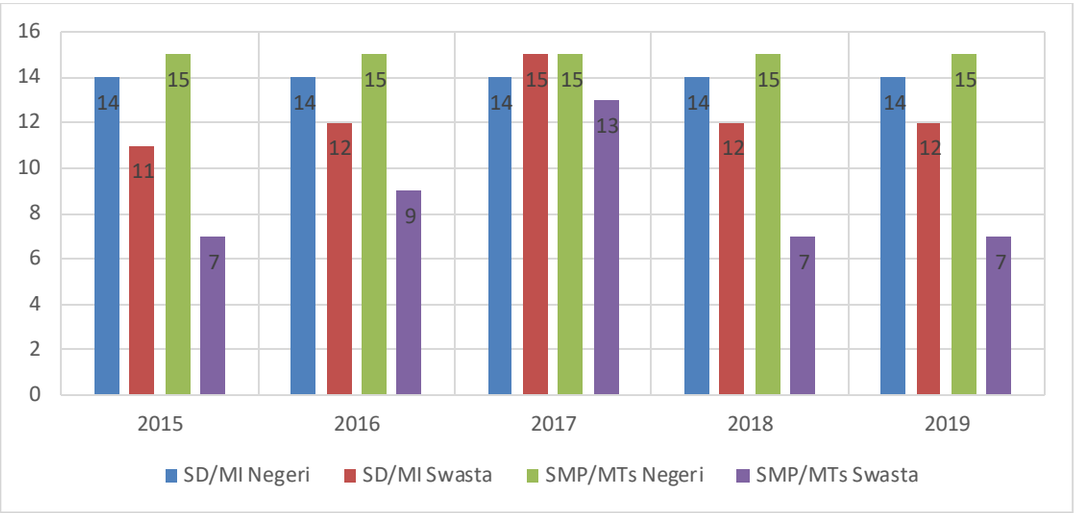

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020.
Gambar 8.5. Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2015-2019.

Berdasarkan gambar sebagaimana di atas Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri (*Rasionya 1:14*) dan SMP/MTs Negeri (*Rasionya 1:15)* Tahun 2015-2019 angkanya relatif stabil, sedangkan untuk jenjang Pendidikan SD/MI swasta dan SMP/MTs swasta bersifat flutuatif, hal ini sangat tergantung kondisi sekolah dan akibat kebijakan zonasi sekolah sangat berpengaruh terhadap situasi pilihan siswa dan sikap orang tua/wali murid untuk memilih dan menentukan sekolahan yang diminati.

10) Manajeman Pelayanan Pendidikan

Manajeman Pelayanan Pendidikan diukur dengan indikator Angka melanjutkan sekolah dari Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.10.

Tabel 8.10.
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	100,37	98,87	99,26	99,30	96,70
Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK	96,64	92,43	88,28	95,48	97,73

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.10. sebagaimana tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada tahun 2015-2019 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini mengkondisikan, bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

11) Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten. Perkembangan kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik selama tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.11.

Tabel 8.11.
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	69,29	71,09	67,06	68,53	68,25
Sekolah pendidikan SMP/MTS	%	89,61	88,23	96,30	80,00	88,89

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020.

Berdasarkan Tabel tersebut di atas kondisi ruang kelas gedung sekolah masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: *Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal* terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
3. Pendidikan Non Formal;
4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Permasalahan

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

a. Belum terpenuhinya aksesibilitas sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi baik;

b. Masih rendahnya tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
c. Terjadinya kekosongan kepala sekolah jenjang pendidikan SD Negeri, per Desember 2019 sebanyak 194 Kepala Sekolah SD Negeri tidak mempunyai kepala sekolah;
d. SD Negeri tidak mempunyai tenaga administrasi untuk mengelola administrasi Laporan Dana BOS dan Aset, sehingga guru terbebani dengan tugas administrasi pelaporan BOS dan Aset;.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan, diantaranya:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan,meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan Diklat peningkatan kapasitas guru;
c. Pengisian Kepala Sekolah dengan Diklat penguatan bagi calon Kepala Sekolah; dan
d. Pengusulan pengangkatan tenaga harian Lepas (THL) Pengadministrasian Umum di SD Negeri.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan;

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat, serta berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota terkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya: 1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan sebagaimana Tabel 8.12.

Tabel 8.12.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kasus kematian Ibu	15	13	16	12	75,00	14	85,71
2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,7	10,11	10,01	**99,01**	10,07	100,10
3	Angka Kematian Balita	2,99	1,9	1,65	1,59	**96,36**	1,61	93,17
4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,56	0,72	0,71	98,61	0,70	101,43

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan,* sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan kesehatan, diantaranya:

1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 dapat disajikan pada Gambar 8.6.

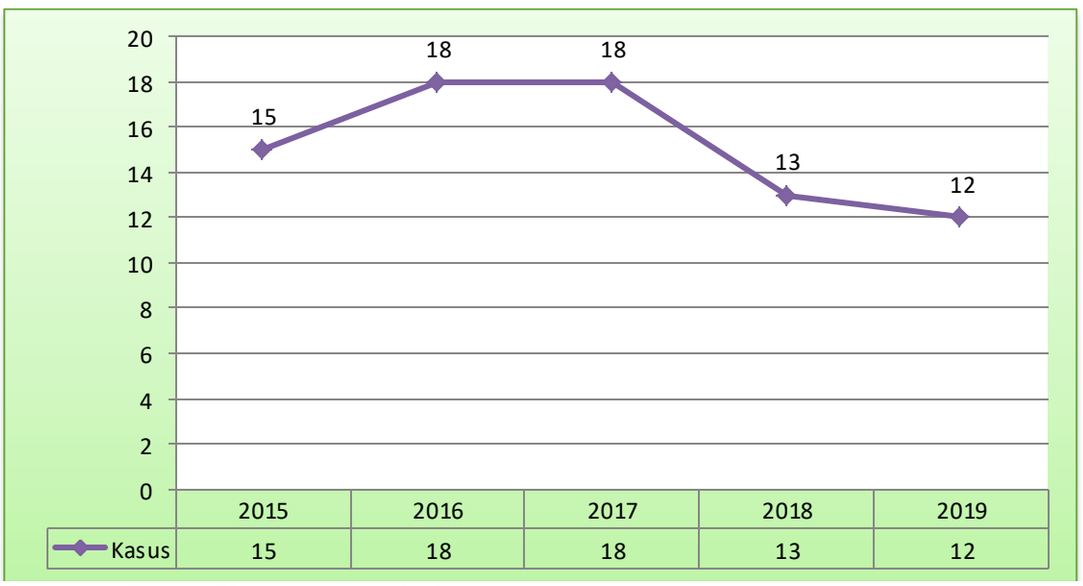

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

Gambar 8.6. Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 8.6. sebagaimana tersebut di atas, kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan

dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun kasus kematian ibu melahirkan selama tahun 2015–2019 menurut kecamatan dan Puskesmas disajikan pada Tabel 8.13.

Tabel 8.13.
Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Prambanan	Prambanan	2	0	0	2	0
		Kebondalem Lor	0	0	0	0	1
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	0	1	0	0
3	Wedi	Wedi	1	3	0	1	0
4	Bayat	Bayat	1	0	1	1	0
5	Cawas	Cawas I	0	0	2	1	0
		Cawas II	1	0	1	1	0
6	Trucuk	Trucuk I	1	1	1	0	0
		Trucuk II	0	0	1	0	1
7	Kalikotes	Kalikotes	0	1	0	0	0
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	2	1	1	0	2
		Jogonalan II	0	0	0	0	0
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	1	0	1	0
11	Karangnongko	Karangnongko	0	0	1	0	0
12	Ngawen	Ngawen	0	0	0	0	1
13	Ceper	Ceper	0	0	2	0	1
		Jambukulon	0	1	0	0	0
14	Pedan	Pedan	1	0	0	1	1
15	Karangdowo	Karangdowo	0	1	1	1	0
16	Juwiring	Juwiring	0	3	0	0	0
17	Wonosari	Wonosari I	0	0	1	1	0
		Wonosari II	0	1	0	0	2
18	Delanggu	Delanggu	0	1	1	0	0
19	Polanharjo	Polanharjo	1	0	0	1	1
20	Karanganom	Karanganom	1	0	2	1	0
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	0	1	0	0	0
22	Jatinom	Jatinom	0	0	0	1	1
		Kayumas	0	1	0	0	0
23	Kemalang	Kemalang	1	0	2	0	0
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	1	0	0	0	0
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	1	0	0	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	1	1	0	0	1
		Jumlah	15	18	18	13	12

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.13 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, hal ini disebabkan salah satunya karena hypertensi, faktor medis lainnya, dan non medis yang menyebabkan kasus kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 disajikan pada gambar 8.7

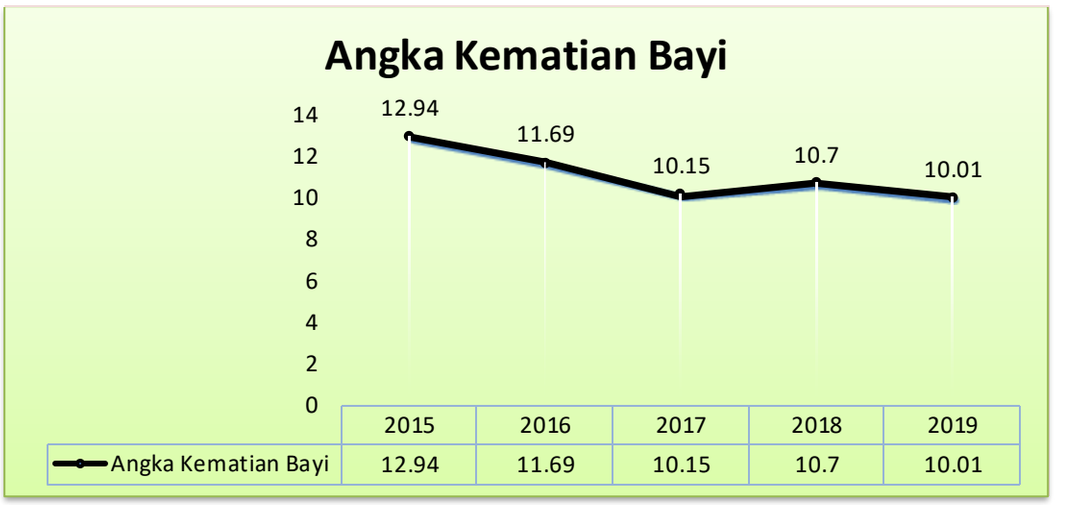

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.
Gambar 8.7 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar sebagaimana tersebut di atas angka kematian bayi dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Penyebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian bayi yang tinggi.

3. Angka Kematian Balita

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 8.8.

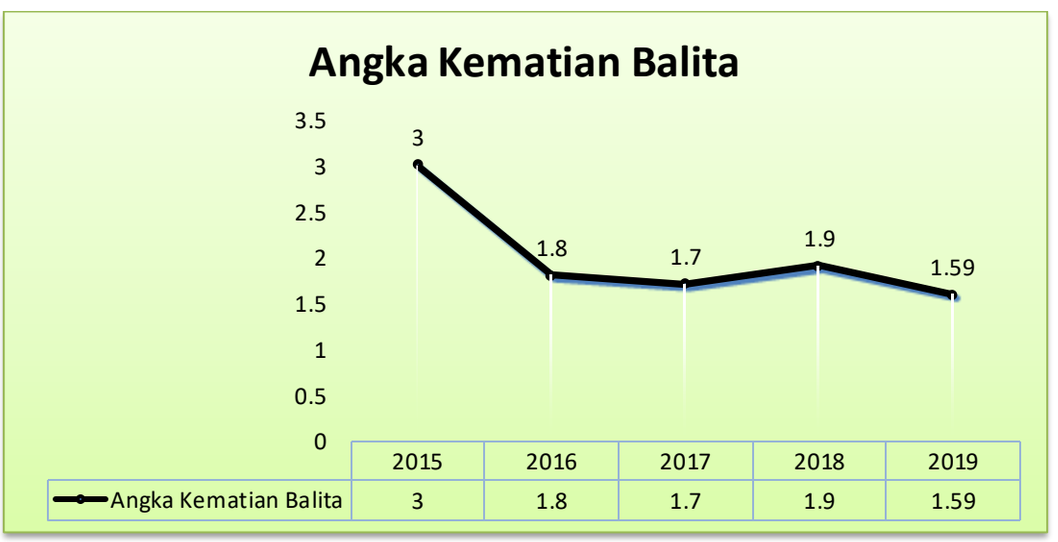

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.
Gambar 8.8. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar tersebut di atas Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2015 sebanyak 3 per 1.000 KH (atau 51 kasus), tahun 2016 sebanyak 1,8 per 1.000 KH (atau 32 kasus), tahun 2017 sebanyak 1,7 per 1.000 KH (atau 27 kasus), tahun 2018 sebanyak 1,9 per 1.000 KH (atau 30 kasus), dan tahun 2019 menjadi sebanyak 1,59 per 1.000 KH (atau 25 kasus). Penyebab Kematian balita terbanyak

diare, maka derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian balita yang tinggi.

4. Prevalensi Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk masih menjadi masalah karena berbagai penyebab. Penyebab balita mengalami gizi buruk karena: asupan makan yang kurang, pola jajanan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya.

Kasus *underweight* (gizi buruk dan gizi kurang) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada gambar 8.9.

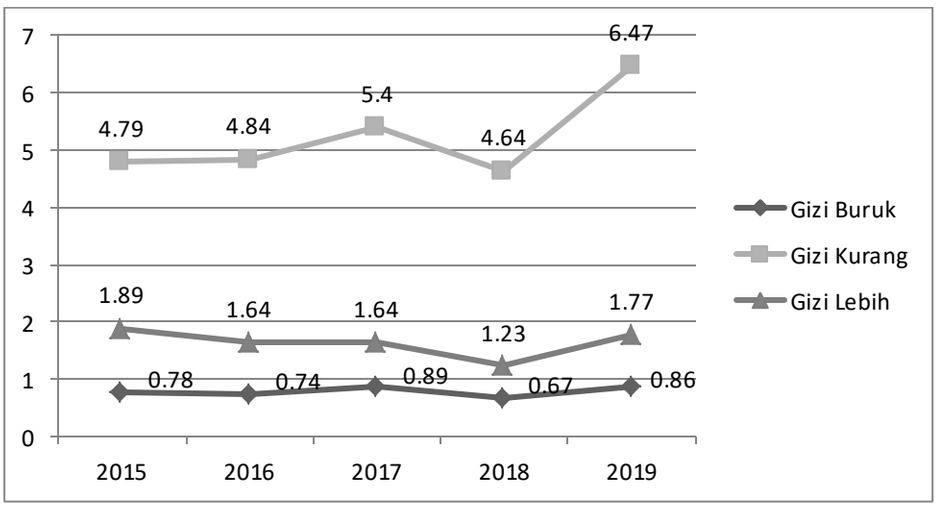

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020.
Gambar 8.9. Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat perkembangan selama tahun 2015-2019 kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta bersifat fluktuatif, dan Kecamatan yang perlu mendapat perhatian (survalen) diantaranya: Delanggu, Jogonalan, Trucuk, Wonosari, Kalikotes, Prambanan, Jatinom, Gantiwarno.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: ***Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat*** terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;

7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; dan
13. Pelayanan Kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi.
b. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
   - Deman berdarah *dengue*.
   - Malaria
   - Filariatis
c. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
   - Penyakit menular Tuberculosis paru
   - Kusta penderita PB
   - Diare
   - Infeksi Saluran Pernapasan Atas
   - HIV
   - Kejadian luar biasa KIPI
d. Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk
e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan.
f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi, dan
g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan

b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

3. Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*);

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka kelahiran diupayakan dengan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian sasaran: ***Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)*** sebagaimana Tabel 8.14.

Tabel 8.14.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate)* /TFR	2,2	1,91	2,14	2,1	98,13	2,1	100

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2020.

Jumlah kelahiran hidup pada tahun 2018 sebanyak 15.786 KH, dan pada tahun 2019 sebanyak 15.681 KH. (atau turun 0,66 % dibanding tahun 2018). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka kelahiran dengan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 perkembangannya bersifat fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2015 sebanyak 23.559 peserta KB baru, dan pada tahun 2019 turun menjadi 12.503 peserta KB baru. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.15.

Tabel 8.15.
Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2015	203.448	23.559	154.422
2016	201.950	26.461	158.943
2017	211.577	23.783	169.626
2018	196.717	15.565	137.109
2019	197.949	12.503	141.315

Sumber : Dinas Sosial, P3A dan KB Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.15. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan persentase KB Baru terhadap terhadap pasangan usia subur pada tahun 2019 sebesar 6,32%, dan rasio peserta KB baru terhadap Peserta KB Aktif sebesar 8,85%, sedangkan rasio peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur sebesar 71,39%.

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2019 jumlah keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I (KS I), dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 372.281 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai hasil yang optimal. Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.16.

Tabel 8.16.
Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya
di Kabupaten Klaten Tahun 2015–2019

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.425	3.103	9.233	13.761
02 Gantiwarno	2.110	2.275	8.356	12.741
03 Wedi	1.635	3.322	11.096	16.053
04 Bayat	5.643	3.183	8.412	17.238
05 Cawas	2.689	4.004	12.150	18.843
06 Trucuk	4.724	4.303	13.410	22.437
07 Kalikotes	894	2.402	6.806	10.102
08 Kebonarum	369	1.203	3.946	5.518
09 Jogonalan	1.812	3.519	10.835	16.166
10 Manisrenggo	1.754	3.452	7.972	13.178
11 Karangnongko	2.002	2.116	7.311	11.429
12 Ngawen	1.168	4.163	9.239	14.570
13 Ceper	1.222	5.268	14.078	20.568
14 Pedan	1.394	3.433	9.534	14.361
15 Karangdowo	3.135	2.603	9.060	14.798
16 Juwiring	1.740	3.777	10.020	15.537
17 Wonosari	2.956	3.682	10.206	16.844
18 Delanggu	475	2.811	7.938	11.224
19 Polanharjo	1.142	2.774	8.421	12.337
20 Karanganom	1.343	3.305	9.444	14.092
21 Tulung	2.588	2.987	9.628	15.203
22 Jatinom	4.128	3.171	8.631	15.930
23 Kemalang	3.239	2.468	6.341	12.048
24 Klaten Selatan	1.016	3.165	8.998	13.179
25 Klaten Tengah	941	2.369	8.318	11.628
26 Klaten Utara	1.142	2.889	8.445	12.476
2019	**52.682**	**81.747**	**237.828**	**372.261**

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	52.688	81.688	238.374	372.750
2017	80.935	114.736	192.994	388.665
2016	67.400	83.239	239.583	390.222
2015	68.814	80.446	236.200	385.460

Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.16. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2019 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.682 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 81.747 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 237.8828 jiwa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kelahiran. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: ***Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)*** diantaranya:

1. Keluarga Berencana;
2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri;
4. Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
5. Pelayanan Kontrasepsi;
6. Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
7. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
8. Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
9. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

Permasalahan

Urusan keluarga berencana untuk menekan angka melahirkan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya angka *drop out* KB; dan
2. Banyak Pasangan usia subur.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan keluarga berencana, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur; dan
b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana.

4. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit;

Kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan pelindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit didorong dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit Daerah (RSD) didukung dengan kinerja Puskesmas untuk menekan angka kematian.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit*** sebagaimana Tabel 8.17.

Tabel 8.17.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Usia Harapan Hidup	76,59	76,77	76,62	76,67	100,07	76,62	99,93

Sumber: BPS, 2020 (diolah).

Usia Harapan Hidup (UHH) dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2015-2019 UHH cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini. Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten tahun 2015–2019 disajikan pada Gambar 8.10.

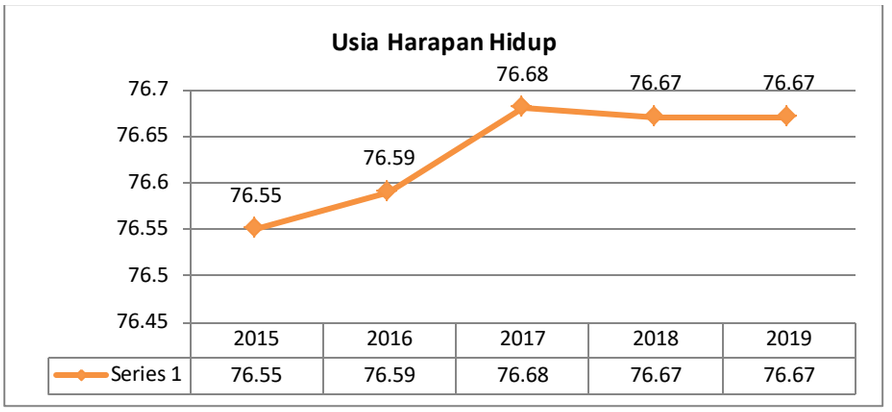

Sumber : BPS, (2020) diolah.
Catatan: tahun 2019 angka sementara
Gambar 8.10. Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

1) Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2019 adalah 69,3 % dengan jumlah per bulan disajikan pada Gambar 8.11.

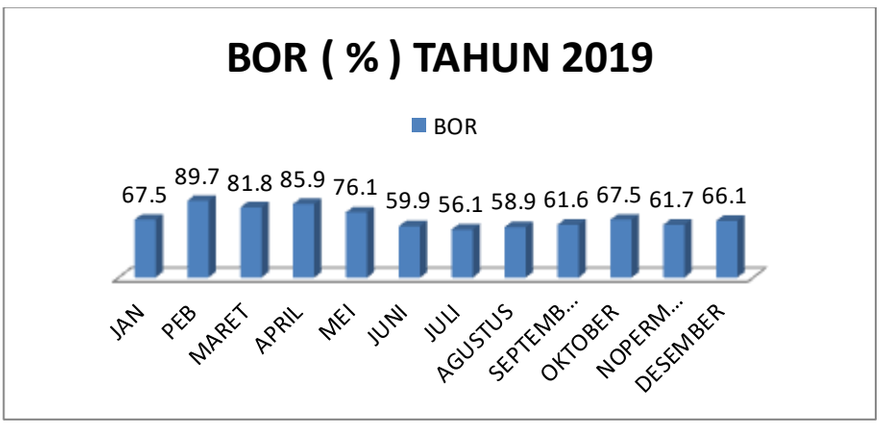

Sumber : RSD Bagas Waras Kab. Klaten, 2020
Gambar 8.11. Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).

Di samping itu, pada Tahun 2019, jumlah kunjungan pasien sebanyak 118.011 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 10.185 orang/Tahun (atau rata-rata 28 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 92.574 orang/Tahun (atau rata-rata 349 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 15.252 orang/Tahun (atau rata-rata 42 orang/hari). Adapun kinerja pelayanan RSD Bagas Waras dapat dilihat pada Gambar 8.12.

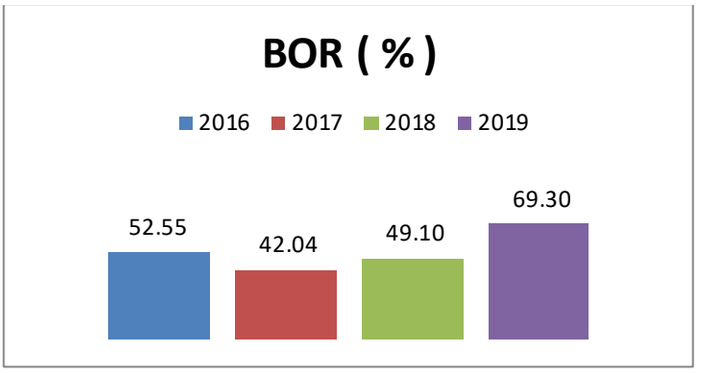

Sumber : RSUD Bagaswaras, 2020.

Gambar 8.12. Perkembangan Indikator BOR Tahunan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Berdasar pada Gambar 8.11. dan Gambar 8.12. indikator BOR di atas terlihat bahwa pada Tahun 2019 terjadi kenaikan persentase pemakaian tempat tidur dibanding Tahun 2018 sebesar 20,2.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: ***Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitan Oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit*** dengan program utama Pelayanan Kesehatan, dengan didukung beberapa program, diantaranya:

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan; dan
2. Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
   a. Deman berdarah dengue .
   b. Malaria
2. Untuk jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti *Diabetes Militus* (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
   a. Penyakit menular Tuberculosis paru
   b. Kusta penderita PB
   c. Diare
   d. Infeksi Saluran Pernapasan Atas
   e. HIV
   f. Kejadian luar biasa KIPI

g. Pencegahan Stunting

h. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;

b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

5. Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM;

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS*** dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM sebagaimana Tabel 8.18.

Tabel 8.18.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS
dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	35,52	70,66	85	62,26	72,25	89	69,96
2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	97	96	98,9	100	96
3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	14,32	13,1	13,09	99,92	12,9	101,47

Sumber: Dinas Sosial, P3A dan KB, 2020. (diolah).

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan

kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi Sejenis Lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2015–2019 disajikan pada Gambar 8.13.

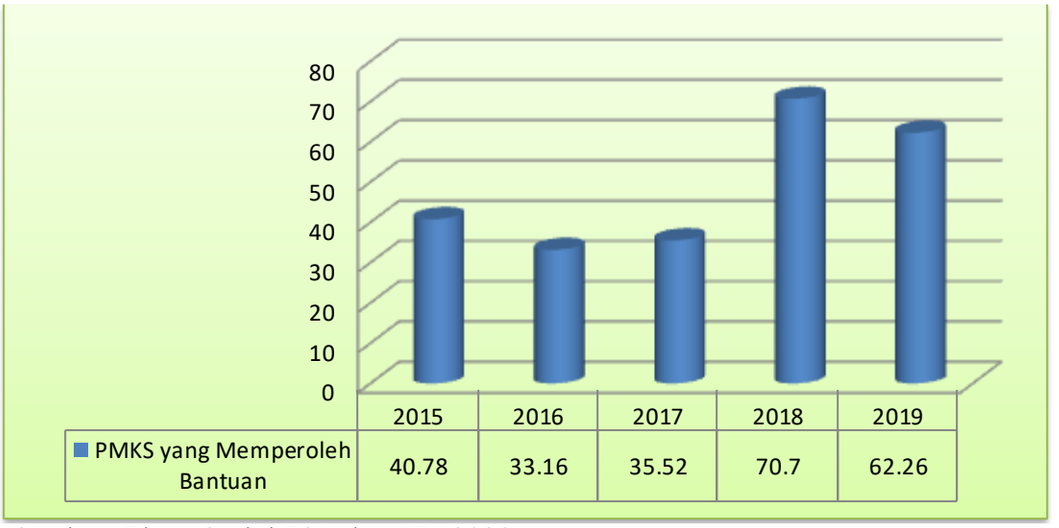

Sumber: Dinas Sosial P3A dan KB, 2020.
Gambar 8.13. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2015–2019

Berdasarkan Gambar 8.13. sebagaimana tersebut di atas, karena dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

2. Persentase Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 25 (dua puluh lima) Jenis PMKS di Klaten. 11 (sebelas) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi Kelembagaan Kesejaheraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 11) Komda Lansia.

Dari sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

3. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dari 26 (dua puluh enam) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termonitor selama tahun 2018 tercatat sebanyak 225.287 PMKS. Terbesar fakir miskin sebanyak 194.827 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 12.224 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 5.561 orang. Pada tahun 2019 jumlah berkurang menjadi sebanyak 172.857 PMKS. Terbesar fakir miskin sebanyak 144.440 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 11.481 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: ***Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM***, diantaranya:

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat terpencil (KAT) dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
4. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, Penyakit lainnya);

Permasalahan

Urusan Sosial dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan;
2. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya kasus pengguna Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS; dan
4. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;
b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial.
c. Penguatan Posyandu Remaja untuk mencegah penggunaan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.

6. Sasaran Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga*** sebagaimana Tabel 8.19.

Tabel 8.19.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	12	10	12	120	60	20,00
2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	5	5	100	30	16,67

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020.

Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan dan jumlah organisasi olahraga selama lima tahun terakhir (tahun 2015-2019) jumlahnya relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga masih kurang. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo. Perkembangannya kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 8.20.

Tabel 8.20.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	31	31	31	31	31
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	26	29	29	29	29
4.	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	8	35	35	35	35

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: ***Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga,*** diantaranya:

1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

2. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
3. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
4. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; dan
5. Pembinaan pemuda dan olahraga.

Permasalahan

Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Usia produktif memiliki kepekaan psikologis sesuai dengan pilihannya sendiri, kadang program kepemudaan Pemerintah kurang menyentuh kebutuhan pemuda secara umum; dan
2. Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pemuda, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
b. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi atlet dan pemuda yang berprestasi.

7. Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.

Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan melakukan berbagai event dan baluran budaya daerah. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing daerah melalui seni dan budaya. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya*** sebagaimana Tabel 8.21.

Tabel 8.21.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	3,2	6	3,13	52,17	6	52,17
2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	14,3	10	14,3	143	10	143

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2020.

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2015-2019 dapat disajikan pada Tabel 8.22.

Tabel 8.22.
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni danBudaya	kegiatan	52	52	52	52	28
2	Jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2020.

Promosi, pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengiriman Tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain. Begitu juga dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten semakin intensif.

Upaya untuk perlindungan dan pelestarian seni budaya daerah akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), diantaranya: a) Lurik ATBM; b) Tari Lurik Payung; dan c) Tari Lurik Asri. Begitu juga dengan pelestarian dan penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten belum efektif dilaksanakan.

2. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Selama tahun 2015-2019 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten tidak ada perubahan. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015–2019 dapat dilihat pada Tabel 8.23.

Tabel 8.23.
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Pemandangan Alam	buah	2	2	2	2	2
4	Museum	buah	1	1	1	1	1

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.23. sebagaimana tersebut di atas, jumlah cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2015-2019 tidak mengalami perkembangan, sebab penambahan maupun pengurangan cagar budaya memerlukan verifikasi dari Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Budaya dan Pariwisata serta UNESCO.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya;
2. Pengembangan Nilai Budaya;
3. Pengelolaan Keragaman Budaya: dan
4. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Permasalahan:

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Kekayaan, nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila tidak dirawat dan dipelihara akan mengakibatkan *cultcure lag (kemandegan budaya),* dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa*;* dan
2. Kurangnya pembinaan yang kontinu bagi pengelolaan kekakayaan budaya, nilai budaya, dan keberagaman budaya.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pamong budaya, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi untuk pengembangan dan pengelolaan budaya; dan
c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi pelaku seni dan budaya yang berprestasi.

8. Sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan;

Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melakukan berbagai event daerah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan budaya baca masyarakat. Adapun capaian sasaran:

Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan disajikan pada Tabel 8.24.

Tabel 8.24.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan kunjungan masyarakat	4	65,79	5	22,19	443,8	5	443,8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2020.

Pada Tahun 2019 jumlah perpustakaan desa sebanyak 43 unit dan perpustakaan kelurahan sebanya 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian peningkatan minat baca masyarakat. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.25.

Tabel 8.25.
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	41.464	43.979	44.687	45.362	49.786
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.673	40.003	41.225	68.346	83.511

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.25. sebagaimana tersebut di atas, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 68.346 orang, dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 83.511 orang (atau naik 22,19%). Perkembangan jumlah perpustakaan desa selama tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.26.

Tabel 8.26.
Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa
di Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2019

NO	Tahun	Jumlah Perpustakaan
(1)	(2)	(3)
1	2015	44
2	2016	44
3	2017	45
4	2018	45
5	2019	45

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.26. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2015-2019) bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 45 desa dari 391 desa (atau baru 11,50% dari jumlah desa).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: ***Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan*** dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, diantaranya:

1. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung; dan
2. Kurang representaifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan pengujung perpustakaan, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
b. Menciptakan lingkungan perpustakaan yang representatif; dan
c. Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku.

9. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur dari tingkat profesionalisme aparatur Pemerintah daerah, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah*** sebagaimana Tabel 8.27.

Tabel 8.27.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	74	84,07	77,55	92,24	87,36	88,77

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2020.
*) *Catatan: Kondisi awal belum terisi karena pengisian Indeks Profesionalitas ASN dimulai tahun 2017.*

Tuntutan profesionalitas aparatur sipil negara merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 merupakan cerminan sejauh mana integritas ASN dalam menjalankan mandat. Capaian Indeks Profesionalitas ASN dapat disajikan pada Tabel 8.28.

Tabel 8.28.
Capaian Indeks Profesionalitas ASN

IPP	Unsur				Jumlah Nilai IPP
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai	12	35,5	25	5	77,5

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2020.

Capaian kinerja sebagaimana Tabel 8.28. di atas merupakan hasil dari penilaian berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diperoleh hasil, bahwa pada tahun 2019 nilai IPP mencapai 77,55 dengan (kategori sangat sedang). Keberhasilan ini ditunjung dari unsur:

a. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran. Pada tahun 2019 jumlah ASN sebanyak 9.877 orang, dengan perincian yang berpendidikan: a) Jenjang SD/MI sebanyak 63 orang (atau 0,64%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 226 orang (atau 2,29%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.531 orang (atau 15,50%), d) Jenjang D3 sebanyak 1.610 orang (atau 16,30%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.884 orang (atau 59,57%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 563 orang (atau 5,70%).

b. Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d.Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.877 ASN pada tahun 2019 yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 353 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 63 orang dan Bimbingan Teknis sebanyak 56 orang. Atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan Bintek hanya berkisar 4,78%. Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat.

c. Kinerja

Dimensi Kinerja, menurut Peraturan ini digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

d. Disiplin

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah ASN yang melanggar disiplin sebanyak 10 ASN.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk sasaran strategis: *Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah* terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Permasalahan :

a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan
b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan
b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif.

10. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur Opini BPK terhadap LKPD. Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*** sebagaimana Tabel 8.29.

Tabel 8.29.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK terhadap LKPD	WDP (3)	WTP (4)	WDP (3)	WTP (4)	133,33	WTP (4)	100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020.
Catatan: Tidak Wajar (TD) Skor 1 , Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Skor 2, Wajar dengan Pengecualian (WDP) Skor 3), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Skor 4.

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),* kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, tranparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013–2018 disajikan pada Tabel 8.30.

Tabel 8.30.
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2015–2018

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2015	WTP	*Paragraf penjelas berupa:* berlarutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
		tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2016	WDP	*Paragraf penjelas berupa:* belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2017	WDP	*Paragraf penjelas berupa:* belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya Perangkat Daerah dan pengelolaan dana BOS.
2018	WTP	*Paragraf penjelas berupa:* pengendalian rekening pengelolaan KAS dan mekanisme pembayaran langsung masih lemah. Pengelolaan piutang PBB perdesaan dan perkotaan tidak tertib.

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2020.
**) Catatan: Opini BPK tahun 2019 In Proses.*

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 8.30. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti–bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsif akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019, dengan penguatan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan :

a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan
b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah mendukung tugas pokok DPRD, dan membuat laporan administrasi dan keuangan. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD*** tahun 2019 sebagaimana Tabel 8.31.

Tabel 8.31.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	93,10	85	91,31	108,60	85	127,76

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.31. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2019 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 12 Raperda, dari 13 Raperda yang direncanakan.

Mengacu pada pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2019 capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana Tabel 8.32.

Tabel 8.32.
Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021
Sampai dengan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2019			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=[(4)+(6)]/(8)*100
1	Menyempurnakan 366ystem dan prosedur pelayanan kepada DPRD	Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan	181	56	43	76,79	347	64,55
2	Meningkatnya kualitas layanan legislasi DPRD	Jumlah produk legislasi DPRD	63	28	12	42,86	140	53,57
		Jumlah produk pengawasan DPRD	28	14	13	92,86	84	48,81
		Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan	12	4	4	100	18	88,89

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang sifatnya progresif, diperoleh hasil :

a. Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan
   Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 76,79% (atau dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Baik***). Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sampai dengan tahun 2019 sebanyak 224 produk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 64,55%.
b. Jumlah Produk Legislasi DPRD.
   Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah produk legislasi DPRD pada tahun 2019 capaian kinerjanya hanya sebesar 42,86% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Rendah*****).** Jumlah produk legislasi DPRD sampai dengan tahun 2019 sebanyak 75 produk legislasi DPRD (Perda) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 53,57%.
c. Jumlah Produk Pengawasan DPRD.
   Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah produk pengawasan DPRD pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 92,86% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah produk pengawasan DPRD sampai dengan tahun 2019 sebanyak 41 Obyek pengawasan (Obrik) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 48,81%.
d. Jumlah Produk Penganggaran Yang Dihasilkan
   Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produk Penganggaran yang dihasilkan pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 13 produk penganggaran atau persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 88,89%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: M*eningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD* pada tahun 2019, dengan penguatan program peningkatan kapasitas DPRD.

Permasalahan:

a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
b. Tingginya mobilitas DPRD yang tidak diimbangi kecepatan pengadministrasian kegiatan terkadang belum bisa diukur sebagai capaian kinerjanya.

Solusi :

a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan manfaat.

Adapun capaian sasaran**:** ***Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*** sebagaimana Tabel 8.33.

Tabel 8.33.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	Na	71	100	100	100	90	111,11

Sumber: Bappeda, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: ***Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*** pada tahun 2019, yang didukung perlunya ***perencanaan*** *pembangunan Daerah* yang wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung ***data dan informasi pelaksanaan pembangunan***.

Permasalahan:

a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi perencana; dan
b. Tidak tersedianya data dan informasi pelaksanaan yang mudah diakses sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi kinerja.

Solusi:

a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN perencana;
b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja; dan
c. Perencanaan pembangunan daerah harus didukung ***base line data dan informasi pembangunan*** yang akurat, dan tepat manfaat. Dukungan semua pihak untuk mewujudkan perencanaan yang tepat waktu dan manfaat, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen rencana sangat dibutuhkan sekaligus sebagai upaya kita mendukung: **Terwujudnya Masyarakat Klaten yang *Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.***

13. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD;

Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan tata kelola Arsip SKPD dengan melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana kearsipan, dan peningkatan pengelolaan arsip secara terpadu. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Arsip. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD*** disajikan pada Tabel 8.34.

Tabel 8.34.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	11,72	5	12,56	251,2	25	50,24

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2020.

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset Pemerintah daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 sebanyak 68.700 arsip, dan pada Tahun 2019 sudah mencapai 98.635 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 8.35.

Tabel 8.35.
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Arsip	Jumlah	68.700	74.700	78.434	87.625	98.635

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.35. sebagaimana tersebut di atas, Pelayanan arsip untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: ***Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD*** dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta memfaatkan ***data dan informasi pelaksanaan pembangunan*** yang terdokumentasikan/terarsipkan.

Permasalahan:

a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan arsip Daerah; dan
b. Terbatasnya ruang untuk penyimpan arsif, dan sebagian besar arsip belum terdigitalisasi.

Solusi:

a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN pengelola arsip; dan
b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

14. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel*** disajikan pada Tabel 8.36.

Tabel 8.36.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	48	72	68	94,44	100	94,44

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, jumlahnya masih relatif sedikit. Namun ketika Dana Desa mulai digunakan untuk penguatan BUMDes jumlahnya mulai meningkat. Sekarang berjumlah 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes Tumbuh sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan lembaga ekonomi Pedesaan tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.37.

Tabel 8.37.
Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola oleh Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	63	40	5
2016	141	40	5
2017	217	40	5
2018	224	40	5
2019	224	40	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.37. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas managemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.38.

Tabel. 3.38.
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa Ngawonggo Kec. Ceper	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3 Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di	1.Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2.Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3.Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4.Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di	1.Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jurangjero, Kec. Karanganom 2.Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karangan, Kec. Karanganom 3.Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karanganom, Kec. Karanganom 4.Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
				Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	desa Nangsri, Kec Manisrenggo	sampah organik di desa Jungkare, Kec. Karanganom 5.Pelatihan pertanian hidroponik di desa Kahuman, Kec. Ngawen
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi	1. Posyantek antar desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar desa Kec. Trucuk

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 8.38. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten, diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Data yang tersaji dalam pengembangan kawasan perdesaan hanya ada pada Tahun 2016 dan 2017, dikarenakan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan ini baru dimulai pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 hanya ada 1 data pengembangan kawasan pedesaan yaitu pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan di Kecamatan

Wedi. Pengembangan kawasan perdesaan tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa, Penempatan lokasi tersebut di dasarkan pada hasil penelitian Universitas Tidar Kabupaten Magelang. Sedangkan pada Tahun 2017 pengembangan kawasan desa ada 5 data pengembangan kawasan pedesaan dan masih dalam proses penyusunan RPKP, yaitu:

1). Pengembangan kawasan desa sentra batik di Desa Jarum, Banyuripan, Beluk dan Kebon di Kecamatan Bayat. Pengembangan kawasan desa batik tersebut telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut sebagai sentra penghasil batik di Kabupaten Klaten.
2). Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik di Desa Tlingsing, Mlese, Balak dan Baran di Kecamatan Cawas. Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik tersebut sedah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
3). Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi di Desa Taskombang, Solodiran, Kranggan, dan Nagsri di Kecamatan Manisrenggo. Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi tersebut sedah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
4). Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi di Desa Balerante, Sidorejo, dan Bumiharjo di Kecamatan Kemalang. Pengembangan kawasan desa wisata wisata alam lereng merapi tersebut sedah sesuai dengan potensi desa yang terletak di lereng gunung merapi. Rician pengembangan lokasi desa wisata disajikan pada Tabel 8.39.

Tabel 8.39.
Lokasi Pengembangan Desa Wisata

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
2016	Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan	Kecamatan Wedi : Ds. Kaligayam, Ds. Kadilanggon, Ds. Melikan	Sudah menyusun RPKP	SK Bupati No. 050/221 Tahun 2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Kabupaten Klaten
2017	Kawasan Sentra Batik	Kecamatan Bayat : Ds. Jarum, Ds. Banyuripan, Ds. Beluk, Ds. Kebon	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Sentra Industri Lurik dan Pertanian Organik	Kecamatan Cawas : Ds. Tlingsing, Ds. Mlese, Ds. Balak, Baran	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi	Kecamatan Manisrenggo : Ds. Taskombang, Ds. Solodiran, Ds. Kranggan, Ds. Nangsri	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
	Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi	Kecamatan Kemalang : Ds. Balerante, Ds. Sidorejo, Ds. Bumiharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
2018	Kawasan Wisata Budaya	Kecamatan Prambanan : Ds. Tlogo, Ds. Bugisan, Ds. Kemuda	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kab. Klaten
	Kawasan Pertanian Organik	Kecamatan Karanganom : Ds. Gempol, Ds. Jeblog, Ds. Ngabeyan, Ds. Pondok	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Terpadu	Kecamatan Kebonarum : Ds. Gondang, Ds. Basin, Ds. Pluneng, Ds. Malangjiwan, Ds. Karangduren, Ds. Ngrundul, dan Ds. Menden	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan IRT dan Pangan Lestari	Kecamatan Polanharjo : Ds. Kranggan, Ds. Keprabon, Ds. Kebonharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Air dan Pertanian	Kecamatan Polanharjo : Ds. Janti, Ds. Sidowayah, Ds. Sidoharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
2019	Kawasan Peternakan Kambing	Kecamatan Ngawen: Ds. Gatak, Ds. Duwet, Ds. Manjung	Proses SK Bupati	
	Kawasan Wisata Air dan Perikanan	Kecamatan Tulung: Ds. Wunut, Ds. Cokro, Ds. Daleman, Ds. Dalangan	Proses Persetujuan Kerjasama antar Desa	
	Kawasan Pertanian Terpadu	Kecamatan Delanggu: Ds. Dukuh, Ds. Jetis, Ds. Butuhan, Ds. Banaran, Ds. Bowan, Ds. Sribit, Ds. Mendak, Ds. Krecek, Ds. Karang, Ds. Sabrang, Ds. Tlobong, Ds. Gatak, Ds. Delanggu, Ds. Kepanjen, Ds. Segaran, Ds. Sidomulyo.	Proses Persetujuan Kerjasama antar Desa	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 8.39. sebagaimana tersebut di atas, ada 5 (lima) kawasan dengan desa sebanyak 17 (tujuh belas) desa pengembangan desa wisata masing-masing ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

15. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*** sebagaimana Tabel 8.40.

Tabel 8.40.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Level Maturitas SPIP	1	2	3	3	100	3	100
2	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	100	3	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,89(C)	60,33 (B)	66 (B)	61,32 (B)	92,91	70 (B)	87,60 (B)

Sumber: Inspektorat dan Setda Bagian Organisasi, 2020.

1. Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 3 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Klaten tanggal 26 November 2019 oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 Tanggal 21 Juni 2018, Inspektorat Kabupaten Klaten disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten berada pada level 3.

2. Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari 5 tingkatan yaitu:

1. Level 0 (belum ada), Belum memiliki kebijakan dan prosedur;
2. Level 1 (Rintisan), Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan;
3. Level 2 (Berkembang), Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
4. Level 3 (Terdefinisi), Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
5. Level 4 (Terkelola & Terukur), Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6. Level 5 (Optimum), Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2019 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian mandiri telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan kemudian dilakukan kendali mutu oleh BPKP DIY pada awal tahun 2018 dengan nilai akhir 2,29. Penilaian mandiri dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 kemudian direviu oleh BPKP DIY dengan nilai 3,15. Akhirnya berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari BPKP Pusat tertanggal 26 November 2019, Kabupaten Klaten dinyatakan telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP.

3. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2018 mencapai level 3 (tiga), namun demikian realisasinya baru mencapai level 2. Sama dengan Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian mandiri pertama dilakukan pada bulan April 2018 dan penilaian mandiri kedua dilakukan pada Bulan November 2018. Atas penilaian mandiri pertama telah dievaluasi oleh BPKP DIY dengan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 (dua). Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP yang diselesaikan tanggal 13 November 2018 telah menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 (tiga),

namun demikian hasil evaluasi (*quality Assurance*) dari BPKP Pusat baru mencapai Level 2+, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 8.41.

Tabel 8.41.
Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten

No	Elemen	Level
(1)	(2)	(3)
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2020.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh *Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; serta Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan Tabel 8.41. sebagaimana tersebut di atas, penyebab belum tercapaianya Level 3, diantaranya:

a. Inspektorat belum mempunyai SDM yang berkualifikasi sebagai Perencana Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) disebabkan Inspektorat belum menginternalisasi peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kerangka kpmpetensi (KPA tersedianya Staf APIP yang berkualifikasi profesional pada elemen 2);
b. Inspektorat belum menilai keakuratan hasil penilaian risiko *(risk register)* OPD dan menggunakannya sebagai dasar untuk penyusunan PPBR.

Selanjutnya berdasarkan nilai Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang masih pada level 2, Inspektorat Kabupaten Klaten melakukan penilaian mandiri ke BPKP DIY untuk mendapatkan QA, dan diajukan ke BPKP Pusat untuk direviu. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil reviu (LHR) dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019, tertanggal 26 Desember 2019 dinyatakan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah berada pada level 3, sebagaimana Tabel 8.42.

Tabel 8.42.
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten

No	Elemen	Hasil SA	Hasil QA	Hasil Reviu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peran dan Layanan	3	3	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	3	3
3	Praktik Profesional	3	3	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3	3
5	Budaya dan Hubungan	3	3	3
6	Struktur Tata Kelola	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2020.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung–jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 mengupayakan pentingnya ***Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih*** yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan *Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.*

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 dengan nilai 66, namun terealisasi 61,32 (dengan Kategori B). Perolehan skor 61,32 dengan kriteria sedang.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 61,32 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
   - Perencanaan kinerja nilai 20,79
   - Pengukuran kinerja nilai 15,16
   - Pelaporan kinerja nilai 10,21
   - Evaluasi kinerja nilai 5,03
   - Capaian kinerja nilai 10,14
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi

Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
   a). Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
   b). Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
   a). Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
   b). Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah; dan
3. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.

Permasalahan :

1. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan.
2. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor.
3. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Solusi :

1. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan.
2. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten.
3. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah guna mempertahankan opini WTP, dengan penguatan komitmen semua sepihak, baik pimpinan maupun pejabat fungsional umum Kabupaten Klaten untuk mempertahankan opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

16. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah*** sebagaimana Tabel 8.43.

Tabel 8.43.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	3,09	3	3,22	107,33	3,1	3,22

Sumber: Setda Bagian Pemerintahan, 2020.
Catatan: Kondisi capaian 2019 baru penilaian dari Provinsi, dari Depdagri belum keluar.

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : ***Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih*** yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2019 dengan ***skor 3,22*** tergolong ***sangat tinggi*** , dan perolehan skor ini apabila dirangking untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduk posisi 23 (dua puluh tiga) dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah–langkah sebagai berikut:

a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
b. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.
c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: ***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien***, dan program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Peningkatan Kinerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Peningkatan Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan Wilayah Perbatasan;
4. Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi administrasi Tata Kelola Kecamatan;
5. Pengembangan Komunikasi Informatika Mass Media;
6. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan;
7. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
8. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan; dan
9. Kerjasama informasi dengan Mass Media.

Permasalahan :

a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan
b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

17. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase

tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara, dan Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM*** sebagaimana Tabel 8.44.

Tabel 8.44.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	90	90	83	92,22	90	83
2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	0	234	80	90	112,50	80	90

Sumber: Setda Bagian Hukum, 2020.

1. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara

   Pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 63 Produk Hukum Daerah, dengan perincian: sebanyak 13 Peraturan Daerah, dan 50 Peraturan Bupati. dibahas tepat waktu, terealisasi sebanyak (12 Perda + 96 Perbup). Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 6 perkara, dan terselesaikan sebanyak 6 perkara.
2. Indeks Kabupaten Peduli HAM

   Penghargaan atas martabat manusia adalah hak setiap warga negara yang wajib diberikan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin hak setiap warga negara diukur dari Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara*** di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan:

1. Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang.
2. Supremasi hukum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul.

3. Pembangunan berbasis isu, sepenuhnya belum dianalisis secara tata naskah akademis baik menyangkut aspek: yuridis, sosial dan filosofinya.

Solusi:

1. Pemerintah wajib hadir memberi perlindungan HAM terhadap warga negara yang mengalami ancaman.
2. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak politik, memberi peluang berkembangnya aspek kebebasan sipil, memeperkuat aspek kelembagaan demokrasi agar Kabupaten Peduli HAM dapat diwujudkan.
3. Memperkuat Sekretariat Komisi HAM Kabupaten.

18. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana). Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan*** sebagaimana Tabel 8.45.

Tabel 8.45.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	87,78	90	81	90,00	90	90

Sumber: Setda Bagian Pembangunan, 2020.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi *"Senenan"* dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan secara rutin, hal ini sebagai bentuk agenda aksi untuk pengendalian kegiatan yang diharapkan menjaga konsistensi capaian pelaksanaan pembangunan dengan target rencana. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 169 program dengan 2.918 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 95% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 dan terserap sebesar Rp.857.012.047.026,68 (atau 84,63%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: ***Meningkatnya Koordinasi***

Pelaksanaan Pembangunan, dengan program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.

Permasalahan:

1. Ada beberapa kegiatan fisik yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, karena terbatasnya masa kontrak pekerjaan tidak mencukupi waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya Pembangunan Gedung Pemda II.

Solusi:

1. Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat manfaat.

19. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel

Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi. Adapun capaian sasaran: ***Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel*** sebagaimana Tabel 8.46.

Tabel 8.46.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi)	0	100	100	100	100	100	100

Sumber: Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 2020.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan: *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel* dilakukan secara transparan, dan terbuka untuk publik. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 198 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari sebanyak 198 usulan yang lolos seleksi secara elektronik sebanyak 198, gagal lelang sebanyak 2, 1 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD, dan 5 penunjukan langsung oleh OPD terkait.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel*** dilakukan secara transparan, dengan dukungan program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelayanan Pemilihan penyedia barang dan jasa).

Permasalahan:

Karena semua sistem sudah dijalankan secara *online*, tertutup kemungkinan adanya praktek penyimpangan.

Solusi:

Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

20. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja, diantaranya: Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah, Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah, dan Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*** sebagaimana Tabel 8.47.

Tabel 8.47.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	90	88,14	96	98	102,08	90	108,89
2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	90	98,08	96	98	102,08	90	108,89
3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	100	95	96	98	102,08	100	98

Sumber: Setda Bagian Humas, 2020.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam ***Meningkatkan Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*****,** pada tahun 2019, diantaranya:

1. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah
   Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan pada tahun 2019 sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1.687 (atau 98%).
2. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah
   Jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 2400 dan terealisasi sebanyak 2.352 (98%).
3. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah
   Jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 240 dan terealisasi sebanyak 235 (atau 98%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*** untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dilakukan dengan program Kerjasama dengan Mass Media.

Permasalahan:

Liputan kegiatan Kepala Daerah, belum menjadi dokumen *cerita historis ke Pemerintahan* baru sebatas berita/informasi.

Solusi:

Menyusun sekapur sirih setiap event Kepala Daerah yang memiliki nilai historis menjadi cerita sukses perjalanan Pemerintah.

21. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawalan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawalan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi YoY. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawalan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian*** sebagaimana Tabel 8.48.

Tabel 8.48.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawalan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Inflasi YoY	4(± 1)	2,39	3,5 (± 1)	2,64	75,43	3,5 (± 1)	2,64

Sumber: Setda Bagian Perekonomian, 2020.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2015-2019 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015 sebesar 7,55%, atau lebih tinggi dibanding Tahun 2019 sebesar 2,64%. Penurunan nilai inflasi disebabkan adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis dan harga komoditas yang stabil. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 8.14.

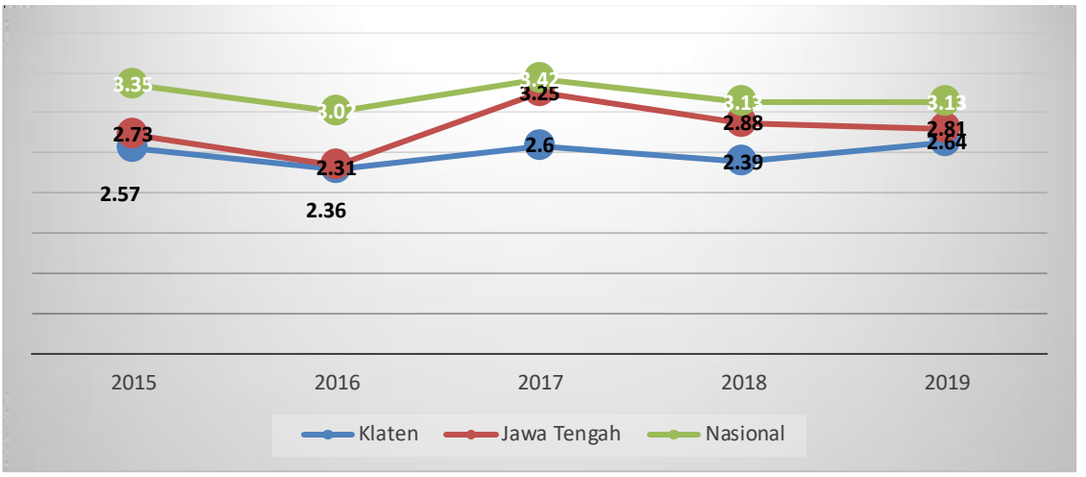

sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2020.
Gambar 8.14. Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 8.14. di atas, laju inflasi selama tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Sedangkan untuk Tahun 2019 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 2,64% disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawalan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian*** dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi daerah, agenda aksi ini dilakukan melalui program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Permasalahan:

Fluktuatifnya harga kebutuhan pokok, seringkali bergerak lebih cepat dari upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Karena kegiatannya Pemerintahan bersifat *"linier"* tidak *"given"* atau menunggu waktu.

Solusi:

1. Perlunya stok kebutuhan bahan pokok yang aman dan tersedia; dan
2. Menggerakkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk bergerak cepat mengatasi gejolak harga yang dimungkikan terjadi.

22. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan

pembangunan bidang kesra. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat*** sebagaimana Tabel 8.49.

Tabel 8.49.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesra	90	90	95	95	100	95	100

Sumber: Setda Bagian Kesra, 2020.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2019 jumlah keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra yang direncanakan sebanyak 300 pemangku kepentingan, dan terealisasi sebanyak 285 (atau 95%). Kegiatan yang dilakukan diantaranya: penyaluran bantuan bagi PMKS, penguatan Pokja Lansia, dan fasilitasi bantuan sosial lainnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat*** untuk mendukung kegiatan Perangkat Daerah dilakukan dengan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan:

Kompleksitas permasalahan sosial belum disusun rencana Aksi Daerah untuk mrngatasi isu daerah yang berkembang terkait dengan bidang Kesra.

Solusi:

Perlu disusun Renaksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan Perangkat Daerah terkait.

23. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*** sebagaimana Tabel 8.50.

Tabel 8.50.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	12,5	10,98	12,3	10,98	89,27	12,6	87,14

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020.

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km^2. Pada Tahun 2018 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 32.959,2 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.579,5 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 26.017 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19.012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10.314 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2.202 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.631 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering.Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.51.

Tabel 8.51.
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian
di Kabupaten Klaten Tahun 2015–2019

No.	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prambanan	1,235	13.0	1,195	2,443
2	Gantiwarno	1,608	155.0	801	2,564
3	Wedi	1,543	18.0	8777	2,438
4	Bayat	810	785.0	2,348	3,943
5	Cawas	2,139	46.0	1.262	3,447
6	Trucuk	1.873	2.0	1.506	3,381
7	Kalikotes	710	8.0	580	1,298
8	Kebonarum	704	2.0	261	967
9	Jogonalan	1.474	1.0	1.126	2,670
10	Manisrenggo	1.431	139.0	1.099	2,696
11	Karangnongko	724	851.0	666	2,674
12	Ngawen	1.023	8.0	1.009	1,697
13	Ceper	1.429	7.0	634	2,445
14	Pedan	839	444.3	809	1,917
15	Karangdowo	2.045	69.0	1.026	2,923

No.	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Juwiring	1.941	12.0	964	2,979
17	Wonosari	2.136	14.0	614	3,114
18	Delanggu	1.263	1.0	556	1,878
19	Polanharjo	1.736	92.0	762	2,384
20	Karanganom	1.633	11.0	1.064	2,406
21	Tulung	1.669	466.5	1.435	3,200
22	Jatinom	576	1,542.8	3.2	3,553
23	Kemalang	51	1,847.8	67	5,166
24	Klaten Selatan	781	3.0	659	1,443
25	Klaten Tengah	285	1.0	606	892
26	Klaten Utara	285	40.0	713	1,038
	Jumlah 2019	**31.943,0**	**6,579.5**	**27.034**	**65,556,0**
	2018	32,959.2	6,579.5	27.034	65,556,0
	2017	33,021.0	6,581.0	25,954.0	65,556.0
	2016	33,066.0	6,581.0	25,909.0	65,556.0
	2015	33,111.0	6,581.0	25,684.0	65,556.0

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB.

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.52.

Tabel 8.52.
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Jenis Komoditas	2015		2016		2017		2018		2019	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	69.158	68.661	76.029	73.627	74.964	73.962	70,421	73,810	68.039	69.962
2	Jagung	11.784	11.484	9.682	9.549	11.713	11.085	10510.6	10292.2	12.284	11.344
3	Kedelai	2.820	2.816	1.935	1.523	2.562	2.234	3744.8	3554.7	1.509	1.572
4	Kacang Tanah	2.074	2.073	1.224	1.067	955	909	1346.3	1296.3	843,8	1.037
5	Kacang Hijau	116	115	350	299	240	228	18.4	4	371,3	369,3
6	Ubi Kayu	707	707	822	685	435	395	304.9	357.9	561	724
7	Ubi Jalar	32	28	24	20	26	21	31	29	37,3	43,2

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Sedangkan Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.53.

Tabel 8.53.
Perkembangan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

No	Jenis Komoditas	2015		2016		2017		2018		2019	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Padi	437.623	63,29	426.028	57,87	380.268	51,41	458,992	61.80	474.216	67,32
2	Jagung	94.416	82,22	72.583	74,97	90.343	81,50	81,981	79.65	105.893	93,35
3	Kedelai	5.656	20,06	2.759	18,12	4.440	19,87	7,026	19.77	2.573	16,37
4	Kacang Tanah	3.151	15,20	1.784	14,58	1.527	16,79	1,816	14.01	1.489	14,36
5	Kacang Hijau	134,634	11,61	260	8,72	285	12,50	81	11.31	538	14,56
6	Ubi Kayu	20.370	288,12	32.224	392,11	9.778	224,99	9,370	261.80	19.598	270,69
7	Ubi Jalar	369,15	131,84	356	143,55	251	119,28	297	103.67	555	128,52

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.52 dan Tabel 8.53 sebagaimana di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.

Produksi dan produktivitas padi pada Tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan tehnologi di bidang pertanian. Sedangkan Produksi Perkebunan Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.54.

Tabel 8.54.
Produksi Perkebunan Tahun 2015-2019

No.	**Jenis Komoditas**	**Produksi (Ton)**				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1	Tembakau Rajangan	2,191.360	2,193.575	1,233.527	1.147,27	1.750,30
2	Tembakau Asepan	1,164.270	1,038.530	1,070.724	1.037,05	2.595,30
3	Tembakau Vorstenland	453.740	303.930	239.455	135.535	55.144
4	Kelapa Dalam	5,384.477	4,097.630	4,697.582	3.976,64	4.048.189
5	Kelapa Hibrida	43.556	45.510	45.600	49.073	29.340
6	Kelapa Deres	82.861	99.470	98.740	87.149	87,15
7	Kopi Arabica	101.940	105.250	81.320	43,32	43.320
8	Kopi Robusta	4.856	9.830	9.990	9,82	9,82
9	Cengkeh	46.378	44.220	45.630	36,5	36,5
10	Lada	9.717	13.150	12.110	9,78	11,4
11	Tebu	4,184.222	6,289.000	3,258.940	3.258,9	3.316.970

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.54. sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2016 sebesar 2.193,575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 2.595,30 ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun

2014–2018 disajikan pada Tabel 8.55.

Tabel 8.55.
Populasi Ternak Tahun 2015-2019

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sapi Potong	99,438	88,343	88,850	100,259	102.431
2	Sapi Perah	5,486	5,795	6,098	6,284	6.433
3	Kambing	92,014	88,343	88,957	9,596	101.402
4	Domba	43,982	38,489	38,570	45,204	46.963
5	Ayam Bukan Ras	1,446,963	2,801,581	3,256,177	2,245,443	2.532.676
6	Ayam Pedaging	1,936,862	2,898,344	3,385,400	2,475,187	3.896.788
6	Ayam Petelur	1,045,869	867,822	930,234	746,422	832.764
7	Itik	292,929	395,436	575,100	425,473	430.329
8	Burung Puyuh	454,596	451,193	452,332	519,566	535.244

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.55. sebagaimana tersebut di atas, terlihat pada tahun 2018 populasi sapi potong mengalami kenaikan sebesar 100,259 ekor jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 88.850 ekor. Hal ini dipengaruhi oleh intensifnya penyuluhan tentang kesehatan hewan dan penggunaan bibit ternak yang baik. Sedangkan produksi peternakan tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.56.

Tabel 8.56.
Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2015-2019

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Susu (Liter)	4,030,895	4,878,662	5,903,181	4,266,718	4.978.442
2	Daging (Kg)	2,549,885	2,749,351	2,963,800	584,220	2.010.393
3	Telur (Butir)	246,585,003	375,376,131	570,571,719	130.992.000	154.784.416

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.56. sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, daging dan telur pada Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dari Tahun 2014-2017 yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak dan menurunnya populasi hewan ternak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada tahun 2019 dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat;
3. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
4. Pengembangan perikanan tangkap;
5. Pengembangan budidaya perikanan;
6. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
7. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
9. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;

10. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
11. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; dan
12. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan;

Permasalahan:

a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan.
b. Belum optimalnya penerapan tekhnologi, rekayasa genetik, varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan.
c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam *(back to nature).*
d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual *(intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten.
e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan.
f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan.
h. Belum optimalnya sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani, dan
i. Belum terciptanya sinergitas antar Satker dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan.

Solusi :

a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
c. Menenkan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam *(back to nature);*.
d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual *(intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan

e. Penciptaan sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.

24 Sasaran Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan;

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan*** disajikan pada Tabel 8.57.

Tabel 8.57.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	35	42	39	92,86	58	67,24

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa. Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2013-2014 relatif masih rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes Tumbuh sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada

pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan lembaga ekonomi Pedesaan tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.58.

Tabel 8.58.
Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	63	40	5
2016	141	40	5
2017	217	40	5
2018	224	40	5
2019	224	40	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.58. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas managemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.59.

Tabel. 3.59.
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa Ngawonggo Kec. Ceper	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3 Pelatihan Hidroponik	1.Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2.Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3.Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Taskombang, Kec	1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jurangjero, Kec. Karanganom 2. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karangan, Kec. Karanganom 3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karanganom ,Kec.

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
				Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	Manisrenggo 4.Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo	Karanganom 4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jungkare, Kec. Karanganom 5. Pelatihan pertanian hidroponik di desa Kahuman, Kec. Ngawen
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1.Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi	1. Posyantek antar desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar desa Kec. Trucuk

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.59. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan; dan
2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Permasalahan:

1. Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi.

Solusi :

1. Percepatan penggunaan Dana Desa yang berorientasi untuk pengembangan LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Peningkatan kapasitas SD aparatur desa untuk memanfaatkan era digital bagi pengembangan desa.

25. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan;

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan produktifitas, dan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing daerah. Adapun capaian Sasaran: ***Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan*** sebagaimana Tabel 8.60.

Tabel 8.60.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	47,50	25	31,96	127,84	100	31,96

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020.

Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.61.

Tabel 8.61.
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2015	82	329.021	220	1	0,5	550	1.000
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	2.224.294	190.686	1	1	1.000	2.000
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.61. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2015 -2019 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.62.

Tabel 8.62.
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Realisasi (Rp. dlm 000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perayaan Padusan	57.500	52.500	57.500	58.000	64.005
2	Perayaan Maleman	26.000	28.000	28.000	28.000	30.800
3	Perayaan Syawalan	47.000	51.700	52.500	53.000	58.500
4	Perayaan Yaqowiyu	0	0	0	0	0
5	Deles Indah	12.500	14.000	15.600	9.600	4.200
6	OMAC	559.175	609.976	739.919	943.170	1.689.580
7	Jombor Permai	68.205	65.495	68.050	71.450	67.175
8	Makam Pandanaran	152.300	143.300	144.500	141.200	161.175
9	Makam Ronggowarsito	1.880	1.890	2.000	2.050	2.435
10	Pemandian Jolotundo	22.017,5	24.200	50.170	81.680	120.065
11	Candi Plaosan	7.758	53.883	80.454	218.718	153.027

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Realisasi (Rp. dlm 000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
12	Makam Ki Ageng Gribig	2.000	3.000	3.030	3.041	4.030
13	Lain-lain	21.350	23.850	13.450	12.460	28.880
	Jumlah	***977.685,5***	***1.071.794***	***1.255.173***	***1.622.369***	***2.384.397***

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.62. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebanyak Rp.2.384.397.000.000,- atau meningkat sebanyak Rp.762.028.000.000,- (31,96%) dibanding tahun 2018.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 8.63.

Tabel 8.63.
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2019

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas *(OMAC)*	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganom
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubrah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok, Nganten, Siblarak dan Umbul Nilo	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganom
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganom
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi
41	UmbulTirtomulyani&TirtoMulyono	Alam	Kec. Kebonarum
42	WatuPrahu Bukit Cinta	Alam	Kec. Bayat
43	WatuSepur	Alam	Kec. Bayat
44	Bukit Petrum	Alam	Kec. Bayat
45	Puncak Arjuna	Alam	Kec. Bayat
46	Kedungan Waterpark	Buatan	Kec. Pedan
47	Tirtonirmolo	Buatan	Kec. Prambanan
48	Museum Gula Jawa Tengah	Buatan	Kec. Jogonalan
49	Candi Merak	Budaya	Kec. Karangnongko
50	Candi Sojiwan	Budaya	Kec. Prambanan
51	Kolam Renang Tirta Pelangi	Buatan	Kec. Bayat
52	Kolam Renang Tirta Indah	Buatan	Kec. Klaten Selatan
53	Kolam Renang Tirta Harapan	Buatan	Kec. Klaten Utara
54	Desa Wisata Glagah	Edukasi	Kec. Jatinom
55	Wisata Hidroponik	Edukasi	Kec. Kemalang
56	Kalitalang	Alam	Kec. Kalitalang
57	Banyu Beku	Alam	Kec. Polanharjo
58	Water Gong	Alam	Kec. Polanharjo
59	Ponggok Ciblon	Buatan	Kec. Polanharjo
60	Susur Kali Pusur	Alam	Kec. Tulung
61	Tugu Waseso Soropaten	Budaya	Kec. Polanharjo
62	Taman Celosia Tlogo Nursery	Buatan	Kec. Prambanan
63	Umbul Gedaren	Alam	Kec. Jatinom
64	Umbul Manten	Alam	Kec. Tulung
65	Umbul Brondong	Alam	Kec. Kebonarum
66	Omah Wayang	Budaya	Kec. Klaten Selatan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten , 2020.

Permasalahan:

Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

Solusi:

Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

26. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM;

Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan untuk: ***Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM*** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perdagangan, koperasi dan UMKM.

Adapun capaian Sasaran: ***Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM*** sebagaimana Tabel 8.64.

Tabel 8.64.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,74	17,88	19,12	19,98	104,50	19,38	19,98
2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	5	8,99	11	11,45	104,09	15	11,45

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2020.

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pada tahun 2019 tercatat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tumbuh sebesar 19,98%. Tumbuhnya sektor perdagangan ini ditunjang adanya

pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya.

2. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 55.070 UMKM, namun dari sebanyak 55.070 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.306 UMKM (atau 11,45%) yang tersebar di 11 (sebelas) klaster UMKM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM diantaranya dengan program:

1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
3. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
5. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; dan
6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Permasalahan :

a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan
f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.

Serta:

a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;.
b. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk; dan
c. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Solusi :

a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
f. Penataan dan pemberdayaan PKL.

27. Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah;

Penerapan inovasi dalam pembangunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun capaian Sasaran: ***Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah*** sebagaimana Tabel 8.65.

Tabel 8.65.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMd	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase inovasi yang diterapkan	31,82	60	81,82	105	128,33	100	105

Sumber: Bappeda, 2020.

Inovasi Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian-pencapaian pembangunan daerah dan pengembangan Daerah. Inovasi ini didorong munculnya pola pikir yang inovatif menjadi pijakan bagi kerangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 19 jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan. Gambaran inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan terus dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel. 8.66.

Tabel 8.66.
Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Matur Dokter	Matur Dokter merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat di Kabupaten Klaten dalam mendapat informasi atau melakukan pengaduan dan konsultasi tentang masalah kesehatan kepada petugas. Dalam Aplikasi Matur Dokter memiliki beberapa fitur seperti logo, Panel Kontrol, *Whatsapp Chat* Darurat, Telepon Darurat, Informasi Tempat Tidur Rumah Sakit, Matur Dokter, Forum Kesehatan, Berita Kesehatan, Tips Kesehatan, *Slide Show* Berita Kesehatan	Kesehatan

No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
2	e-*Planning* e–*Budgeting*	Perencanaan APBD dimulai dari perencanaan RKPD/Renja Perangkat Daerah yang sudah dilakukan melalui aplikasi yang berbasis web yang dapat diakses melalui alamat ***http://e-planning.klatenkab.go.id.*** Fokus aplikasi ini dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang dalam tahapan penyusunannya mengakomodir dan mendokumentasikan antara lain Musrenbang Kecamatan, ***E-Reses*** yang menghasilkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, serta penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah 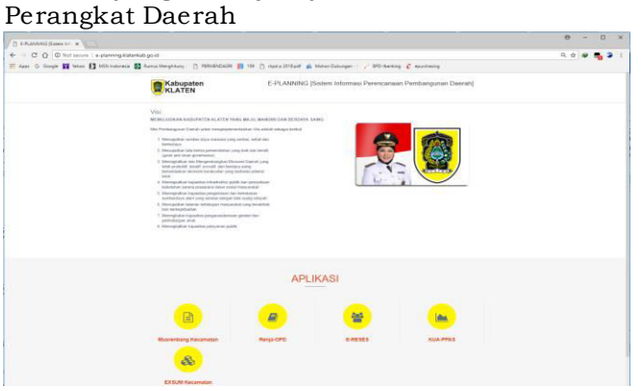 Sistem aplikasi integrasi perencanaan dan penganggaran sudah dibangun di tahun 2018, dengan berbasis web yang dapat diakses di alamat ***http://ebudgeting.klatenkab.go.id/*** Sistem ini digunakan dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan rincian belanja yang disusun menjadi PRA-RKA yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Raperda APBD yang diintegrasikan dalam sistem SIMDA. 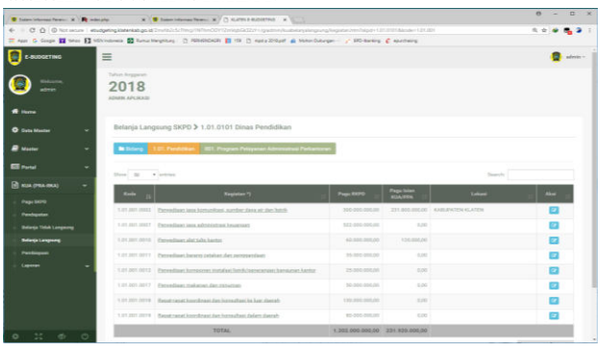	Perencanaan
3	Pengembangan Varietas Padi Rojo Lele	Latar belakang pengembangan varietas padi Rojolele adalah keinginan untuk pelestarian varietas tersebut, dikarenakan petani mulai enggan menanam disebabkan oleh kondisi fisik varietas padi yang tinggi sekitar 180 cm, sehingga mudah rebah pada saat akan panen dan umur	Penelitian dan Pengembangan

No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
		tanaman yang lama sekitar lima setengah bulan. Bekerjasama dengan instansi BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) kelemahan tersebut diperbaiki dengan tujuan memendekan umur tanaman dan memendekan tinggi tanaman. Penelitian dimulai bulan Desember 2013 dan saat ini tujuan tersebut telah tercapai, umur tanaman lebih pendek menjadi sekitar seratus hari dan tinggi tanaman menjadi sekitar 110 cm. disamping itu tambahan hasil positipnya antara lain produktivitas menjadi lebih besar diindikasikan dari jumlah anakan yang lebih banyak, serta sifat padi rojolele yang pulen dan wangi masih terjaga. Direncanakan pada awal pebruari dijadwalkan akan dilakukan uji proposal pelepasan varietas padi hasil penelitian sebagai varietas padi Rojolele yang baru sebagai varietas lokal khas Klaten.	
4	Layanan e-KTP Mobile	Layanan *e-KTP mobile* dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. *e-KTP mobile* diutamakan menyasar pada siswa-siswa sekolah yang telah berwajib KTP, penduduk usia wajib KTP yang mempunyai keterbatasan fisik dan masyarakat umum.	

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran inovasi yang diterapkan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis inovasi yang diterapkan dengan Program Penelitian dan Pengembangan, dan program lainnya.

Permasalahan :

a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk inovasi serta kurang berkembangnya kerjasama inovasi Daerah; dan
b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah;

Solusi :

a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk inovasi Daerah dengan membuka kerjasama pihak ketiga; dan
b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah;

28. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal;

Sektor penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: ***Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal*** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan penanaman modal.

Adapun capaian Sasaran: ***Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal*** sebagaimana Tabel 8.67.

Tabel 8.67.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):							
	PMDN	189	131	438	19	4,34	483	3,93
	PMA	46	264	294	139	47,28	294	47,28
2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):							
	PMDN	1,75	1078	2,2	733	33318,18	2,50	29320,00
	PMA	2,25	52	2,5	272	10880,00	2,55	10666,67

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019, disajikan pada Tabel 8.68.

Tabel 8.68.
Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2015-2019

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US$)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp 000.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/Penurunan (%)
2015	420.700	5.469.100.000	27	-86	20.598.400.000	5	259
2016	6.372.700	82.845.100.000	53	1.415	62.385.300.000	21	203
2017	10.257.000	138.469.500.000	43	61	247.327.500.000	41	68
2018	3.091400	41.211.500.000	39	-70	229.788.500.000	67	27
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.68. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah investasi PMDN maupun PMA pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu PMDN sebesar Rp.1.914.915.766.292.000,- dan PMA sebesar Rp.160.872.497.498.000,- dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu PMDN sebesar Rp.229.788.500.000.000,- dan PMA sebesar Rp.41.211.500.000.000,- Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infratruktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 8.69.

Tabel 8.69.
Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	5	21	41	67	870
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	3.959	2.861	2.781	1.793	16.772
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	20.598.400	62.385.300	247.327.200	229.788.500	1.914.915.766

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2020.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 8.70.

Tabel 8.70.
Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	27	53	43	39	15
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	230	1.468	79	561	2.087
3	Nilai Investasi	(US $)	420.700	6.372.700	10.257.000	3.091.400	11.490.893

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.69. dan Tabel 8.70. sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMDN dan PMA di Kabupaten Klaten tahun 2019 terlihat bahwa sebagian perusahaan atau proyek belum dapat merealisasikan investasi atau penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal didukung dengan program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi terkait potensi investasi; dan
2. Harga tanah peruntukan industri yang tinggi.

Solusi :

1. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
2. Mengupayakan pemanfaatan lahan kritis sebagai lokasi investasi, dan Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur penunjang.

29. Sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan;

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan*** disajikan pada Tabel 8.71.

Tabel 8.71.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing
Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	0,87	1,05	1	95,24	1,08	92,59
2	Angka partisipasi angkatan kerja	6,779	73,58	69	81	117,39	69	117,39

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2020.

1. Rasio Penduduk yang Bekerja

   Jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sebanyak 894.536 jiwa dan yang bekerja sebesar (54,56%) , pada tahun 2019 jumlah angkat kerja meningkat menjadi sebanyak 963.445 jiwa dan yang bekerja sebesar 70,72%. Sehingga rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2019 meningkat sebanyak 68.886 jiwa (atau naik 7,15%) dibanding tahun 2018.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

   Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2018 sebesar 70,46%, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 75,64%. Sehingga masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar penyerapan angkatan kerja. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program: 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan 2) Peningkatan Kesempatan kerja.

Permasalahan:

a. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
b. Peluang kerja relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh

pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;

e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;
f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok–kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
j. Inkonsistensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); dan
k. Belum tersedianya *database* ketenagakerjaan.

Solusi :

a. Membuka peluang kerja seluas–luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok–kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak–hak pekerja;
g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
h. Merintis *database* ketenagakerjaan secara *online*.

30. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan;

Perlindungan tenaga kerja sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tidak saja memberi rasa nyaman bagi pekerja, tetapi juga menjaga ketahanan daerah. Sehingga perlunya perlindungan tenaga kerja akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan*** disajikan pada Tabel 8.72.

Tabel 8.72.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	82,59	87,9	71,48	81,32	25,5	280,31

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.72, sebagaimana tersebut di atas Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018 sebanyak 52.866 peserta, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebanyak 51.922 peserta (atau turun 1,79% dibanding tahun 2018). Penurunan ini disebabkan gagal setor, dan pindah kerja. Sebagian peserta Program BPJS Ketenagakerjaan tersebar di PMA dan PMDN yang ada di Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Permasalahan:

1. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
2. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok–kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
4. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;

Solusi :

a. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan dan wajib difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
b. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
c. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja; dan
d. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja.

31. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian;

Sektor perindustrian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: ***Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri*** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perindustrian.

Adapun capaian Sasaran ***Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Sektor Perindustrian*** sebagaimana Tabel 8.73.

Tabel 8.73.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	35,94	34,98	37,00	105,77	35,2	105,11
2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	1,80	6,5	7,6	116,92	7,5	101,33

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2020.

1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 36,80 % (atau

Rp.9.013.718,21 juta) pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 37,00 % (atau Rp.9.601.710,72 juta).

2. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2018 jumlah IKM sebanyak 34.823 IKM dan yang memiliki daya saing baru mencapai 1,8% (atau sebanyak 62 IKM, dan pada tahun 2019 jumlah IKM menjadi sebanyak 34.828 IKM dan mempunyai daya saing mencapai 7,6% (atau sebanyak 2.647 IKM).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor industri diantaranya dengan program:

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Permasalahan :

a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor IKM; dan
d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perindustrian unggulan Kabupaten Klaten;

Solusi :

a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

32. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat;

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah kabupaten diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah: Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor–faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu Pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat*** disajikan pada Tabel 8.74.

Tabel 8.74.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks layanan infrastruktur	26,27	58,61	37,19	60,87	163,67	38,16	159,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat di Kabupaten Klaten yang ditunjang oleh indikator persentase jalan dalam kondisi baik sepanjang 471,86 Km (total panjang jalan 769,63 Km), drainase dalam kondisi baik baru mencapai 61,31% (471,86 Km), hal ini disebabkan karena pembangunan jalan tidak disertai pembangunan drainase, sehingga merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi jalan. Program

pendukungan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat, diantaranya:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; dan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Permasalahan :

a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan.
b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.
c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).
d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.
f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Solusi :

a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
f. Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

33. Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan;

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan*** disajikan pada Tabel 8.75.

Tabel 8.75.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Pelayanan Infrasruktur Perhubungan	36,04	43,58	47,41	45,87	96,75	57,52	79,75

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan meningkat dari tahun lalu 43,58% menjadi 45,87%, angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 47,41%. Prosentase tingkat realisasinya sebesar 96,75%, hal tersebut disebabkan karena target yang disampaikan merupakan target renstra pada tahun ke-4 (Tahun 2019) yang belum disesuaikan kedalam target Renja Tahun 2019 dengan melewati berapa kebijakan terkait pengurangan anggaran.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan sebagaimana tersebut di atas, didukung jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 8.76.

Tabel 8.76.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
Tahun 2015-2019

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	11.049	10.657	9.622	8.878	8.591
02 Mobil Bus					
* Umum	386	464	397	384	408
Bus Besar	80	44	65	97	88
Bus Sedang	196	131	261	248	268
Bus Kecil	110	289	71	39	52
* Bukan Umum	155	137	105	111	117
03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	9	9	6	10	21
Jumlah	**11.985**	**11.731**	**10.527**	**9.383**	**9.137**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.76. sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 8.77.

Tabel 3.77.
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
Di Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m^2
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m^2
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m^2
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m^2
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m^2
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m^2
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m^2
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m^2

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan, dilaksanakan dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Permasalahan:

1. Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal
2. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian Golongan C)
3. Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya
4. Masih minimnya jumlah *Traffic Light ATCS* yang telah terkoneksi dengan *CC Room*
5. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas daerah perbatasan yang masih belum optimal

6. Ketertiban Administrasi dan Teknis di Pengujian kendaraan bermotor yang justru dikeluhkan masyarakat dan berbanding negatif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Dari permasalahan yang dihadapi diatas, secara garis besar solusi terhadap permasalahan utama, diantaranya:

1. Meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan; dan
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan perhubungan.

34. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat Pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurusi masalah administrasi Pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 8.78.

Tabel 8.78.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	57,71	34,08	73,75	53,76	72,89	74	72,65

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman*** di Kabupaten Klaten yang pergerakkannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk

yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2) penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 (2 desa) titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit.

Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran: *Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman* terdiri dari 8 (delapan) program, diantaranya:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
3. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
4. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung;
5. Pengembangan Perumahan;
6. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong;
7. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; dan
8. Pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan.

Permasalahan :

a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan.
b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.
c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum).
e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Solusi :

a. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
d. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

35. Sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang;

Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus

selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Hal inilah yang menjadi pijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Adapun capaian sasaran: ***Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang*** sebagaimana Tabel 8.79.

Tabel 8.79.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 208	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	79,2	78,98	100,28	80,00	98,73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020.

Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Pada tahun 2019 ketaatan terhadap RTRW mencapai 78,98%, konsekwensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobasan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsif-prinsif pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian, makna strategisnya sejak awal proses perencanaan dalam pengambil keputusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang mendesak terkait pembangunan berkelanjutan

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang*** dilaksanakan melalui Program:

1. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
2. Penataan Ruang; dan
3. Perencanaan Ruang.

Permasalahan :

a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang.
d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
f. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Solusi :

a. Optimalisasi Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan
d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

36. Sasaran Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup;

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan. Masih rendahnya indeks kualitas air salah satu penyebabnya adalah tingginya pencemaran air oleh limbah domestik.

Adapun capaian sasaran: ***Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup*** disajikan pada Tabel 8.80.

Tabel 8.80.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas air	16,00	18,28	35,57	28,46	80,01	40,46	70,39
2	Indeks kualitas udara	60,00	83,3	79,57	82,29	103,42	84,46	97,43
3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	34,14	42,54	53,71	83,3	155,09	58,60	142,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.

Target Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2019 sebesar 35,57 dengan capaian realisasi IKA sebesar 28,46 (80,01%) sedangkan target Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2019 sebesar 79,57 telah melampaui target yang ditentukan dengan capaian sebesar 82,29 (103,42%). Uji sampling udara menggunakan *metode pasive sampler* dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan karena SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang maka tahun 2019 ini hanya dapat dilakukan sekali dengan pengambilan sampling pada 26 titik dari 7 sungai yang ada di Kabupaten Klaten dari target 10 sungai. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut : Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur. (DAS Bengawan Solo). Indeks Kualitas air dan Kualitas udara disajikan pada Gambar 8. 15.

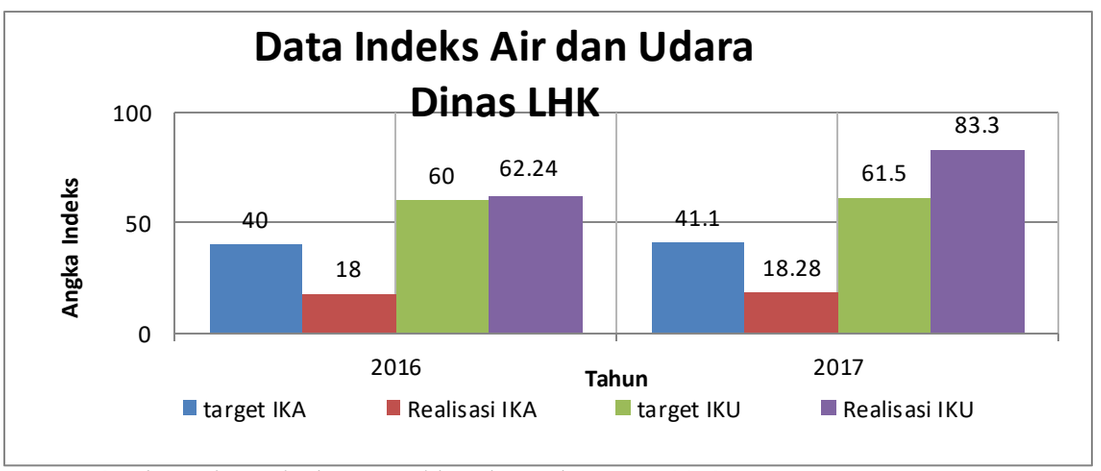

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.
Gambar 8.15. Indeks Kualitas Air dan Kualitas Udara

Berdasarkan Gambar 8.15. sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air dibanding tahun lalu mengalami peningkatan sejumlah 0,28 poin dan indeks udara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 20,9 poin. Kedua indeks tersebut diatas yaitu indeks kualitas air dan udara apabila digabung dengan indeks tutupan vegetasi/tutupan lahan dimana indeks tutupan lahan/vegetasi Kab. Klaten tahun 2018 sebesar 42,54 menjadi Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan hasil perhitungan 47,49. Meningkat dibandingkan tahun lalu dimana IKLH Kab. Klaten 39,74, meskipun masih jauh dari target yang diharapkan akan tetapi telah terlihat jelas mengalami progres kenaikan. Dengan adanya komitmen semua pihak instansi terkait diharapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten pada akhirnya sesuai dengan apa yang ditargetkan/diharapkan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 9 dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLHK kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data selama tahun 2019 sebanyak 5 aduan masyarakat di mana 5 kasus sudah terselesaikan (100%). Hasil tahun 2019 lebih baik dari pada tahun 2018 dimana persentase capaian indikator sasaran

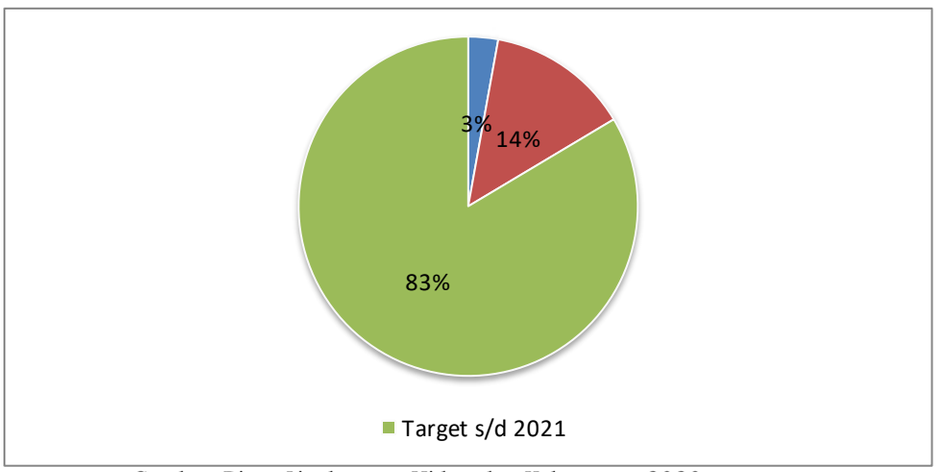

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.
Gambar: 8.16. Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019 dan Target sampai tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup*** dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan:

1. Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan
2. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik.

Solusi:

Kewenangan dalam pengendalian IPAL domestik bukan menajadi kewenangan Dinas LHK melainkan Perwaskim sehingga diharapkan kedepan adanya program dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai.

37. Sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau risiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorisisasikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatakan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran: ***Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana*** sebagaimana Tabel 8.81.

Tabel 8.81.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	0	Sedang	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Sedang	Sedang

Sumber: Badan Penanggunglangan Bencana Daerah, 2020.

Pada tahun 2019 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum belum optimal, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan "***Desa Paseduluran"*** dan Kabupaten Tangguh Bencana, serta untuk mendukung pencapaian sasaran: ***Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana*** di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran

Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana dengan program, diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; dsn
3. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik;

Permasalahan :

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis migasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan Kabupaten Tangguh Bencana.

Solusi :

Berdasarkan perkembangan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi melalui arah kebijakanya:

1) Mengurangi risiko bencana; dan
2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dilaksanakan melalui strategi:
   (1) Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
   (2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan
   (3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

38. Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi;

Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km^2) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk pada kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi*** sebagaimana Tabel 8.82.

Tabel 8.82.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019*)			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks Demokrasi	69,75	72,17	77	72,17	93,73	75,70	95,34

Sumber: Kesbangpol Klaten 2020, (diolah).
**) Angka sementara, mengingat tahun 2019 update data dalam proses.*

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, diantaranya: 1) kebebasan sipil, 2) hak-hak politik, dan 3) lembaga demokrasi. Penetapan besaran IDI ditetapkan dengan skala nilai 0-100. Penetapan nilai IDI di Kabupaten Klaten mengikuti angka Provinsi Jawa Tengah, karena melakukan pengukuran dan penghitungan Provinsi. Adapun capaian IDI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar 70,85, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 72,17.

Pengukuran atas indeks komposit pembetuk IDI pada tahun 2018, diperoleh dari komponen: 1) kebebasan sipil (skor 76,21), 2) hak-hak politik dan lembaga demokrasi (skor 66,92), dan 3) lembaga demokrasi (skor 75,42). Catatan tahun 2019 belum update data.

Berdasarkan capaian IDI, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori baik (indeks > 80), kategori sedang (indeks 60-80), dan kategori buruk (indeks < 60). Oleh karena itu pencapaian IDI pada tahun 2019 angka sementara (sama dengan tahun 2018) menperoleh skor 72,17 dengan kategori sedang.

Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya: ***Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi*** diantaranya:

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik;

Permasalahan:

a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;
c. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Solusi :

a. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;
b. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

39. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;

Ukuran keberhasilan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya diantaranya diukur dengan indikator Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan). Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya melalui lembaga desa untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa.

Adapun capaian sasaran: ***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya*** disajikan pada Tabel 8.83.

Tabel 8.83.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	49	66	58	87,88	100	58

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.

Berdasarkan capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya pada tahun 2019 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 58 orang, atau naik sebanyak 9 (atau 18,37%) kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dibanding tahun 2018.

Apabila per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 58 orang dan diakumulasi dengan jumlah desa/kelurahan sudah merupakan modal sosial untuk melestarikan adat dalam pengembangan kehidupan sosial yang memadai sampai

tingkat kabupaten. Tinggal bagaimana pembinaan dan fasilitasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Permasalahan :

a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;.
b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;
c. Belum adanya sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya ; dan
b. Peningkatan sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

40. Sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Ukuran keberhasilan Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator Indeks ketertiban masyarakat. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun capaian sasaran: ***Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*** disajikan pada Tabel 8.84.

Tabel 8.84.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks Ketertiban Masyarakat	90	92,2	97	96	98,97	100	98,97

Sumber: Satpol PP, 2020.

Berdasarkan capaian Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana Tabel 8.86. di atas, memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56km^2) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda pada tahun 2018 mencapai 90,91% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 92,42% (dari sebanyak 1,254 kasus penegakan Perda dan yang diselesaikan sebanyak 1.159 kasus yang diselesaikan) hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya:

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkhohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 8.85.

Tabel 8.85.
Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil operasi penertiban					
			PGOT		PSK/WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2015	10	11	5	10	50	8	2
2	2016	12	14	7	8	46	12	4
3	2017	15	15	8	6	58	12	14
4	2018	15	8	6	10	78	18	7
5	2019	20	12	5	12	37	38	8
S A N K S I								
- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan ; - Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ; - Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan								

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil operasi penertiban					
			PGOT		PSK/WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
tindak lanjut; - Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.								

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 8.85. sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat semakin besar jumlahnya dibandingkan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah secara umum, hal ini disebabkan:

a. Tingkat kesadaran warga masyarakat yang rendah;
b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
c. Persaingan ekonomi dan gaya hidup kekinian mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Berikut Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.86.

Tabel 8.86.
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2015–2019

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2015	6	200 liter	40 botol	5 dus	4 dus
2	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
3	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
4	2018	0	0	0	0	0
5	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu; - Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.86. sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkhohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.87.

Tabel 8.87.
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentramaan Umum
Tahun 2015–2019

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	-	17	-	-	-
2.	Konflik Sara	-	17	3	1	-
3.	Gerakan Radikalisme	4	21	9	2	-

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.87. sebagaimana tersebut di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Ancaman terorisme hanya terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus. Sedangkan konflik SARA terbanyak pada Tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus. Rata-rata jumlah dari jenis permasalahan di Tahun terakhir mengalami penurunan hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir konflik SARA.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: *Jumlah kriminalitas tertangani/jumlah penduduk X 10.000 (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)* maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut :

a. Tahun 2015 : 3,94.
   Jumlah kriminalitas tertangani 509 kasus dibagi jumlah penduduk 1.292.013 dikali 10.000.
b. Tahun 2016 : 4,19
   Jumlah kriminalitas tertangani 546 kasus dibagi jumlah penduduk 1.300.706 dikali 10.000.
c. Tahun 2017 : 3,25
   Jumlah kriminalitas tertangani 424 kasus dibagi jumlah penduduk 1.304.519 dikali 10.000.
d. Tahun 2018 :1,89.
   Jumlah kriminalitas tertangani 248 kasus dibagi jumlah penduduk 1.314.781 dikali 10.000
e. Tahun 2019 : 2,73
   Jumlah kriminalitas tertangani 361 kasus dibagi jumlah penduduk 1.323.609 dikali 10.000

Sumber Kesbangpol, 2020.

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang, sehingga penanganannyapun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak. 3). Selain itu rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap perda/perbup karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparatur penegak Perda/Perbup.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*** yang didukung dengan program Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan :

a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya *Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;.
b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan *Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*;
c. Belum adanya sarana informasi *Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan masyarakat lebih senang mengkonsumsi berita hoax* sebagai komoditas politik.

Solusi :

a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait *Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*; dan
b. Peningkatan sarana informasi *Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas untuk melawan berita *hoax*.

41. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/*goals* dari pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam

kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa *foodborne disease* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak.

Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak*** disajikan pada Tabel 8.88.

Tabel 8.88.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019*)			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,25	60,23	60,25	100,03	60,37	98,72
2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya (650)	Nindya (750)	Madya (650)	86,67	Nindya (750)	86,67

Sumber: Dinas Sosial, P3A dan KB, 2020.
Catatan: capaian tahun 2019 angka sementara, karena rilis data belum keluar

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2015-2019 menunjukan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.89.

Tabel 8.89.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG	95,90	73,97	96,54	96,62	96,62

Sumber : Dinsos P3A dan KB, 2020.
Catatan: *) angka sementara

Berdasarkan Tabel 8.89. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir IPG tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 96,62% dan pada tahun 2019 sementara tetap 96,62%. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan melalui penguatan lembaga P2TP2A, dan dukungan penganggaran responsif gender diharapkan akan meningkatkan IPG.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2015-2019 menunjukan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.90.

Tabel 8.90.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2015-2019

No.	**Indikator**	**Tahun**				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	**(7)**
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	6,00	6,00	6,00	6,00	18
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	52,74	49,7	43,65	52,71	52,71
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	37,69	37,69	37,76	37,77	37,77
4	IDG	59,95	59,95	59,60	60,25	60,25

Sumber : Dinas Sosial, P3A dan KB, 2020.
Catatan: *) angka sementara update terakhir per Februari 2020. (IDG)

Berdasarkan Tabel 8.90. sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2015-2019 bersifat relatif fluktuatif, hal ini dikarenakan budaya *patriarki* yang masih kuat. Hal ini termanifestasi dalam bentuk *stereotype,* marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban ganda perempuan, dan adanya deskriminasi pada upah pekerja perempuan di sektor non formal. Khusus

Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) pada tahun 2019 angkanya mencapai 18% *(atau 9 perempuan dari total anggota DPRD sebanyak 50 orang).*

3. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari posisi perempuan dalam jabatan eksekutif dan legislatif selama tahun 2015-2019 relatif stagnan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk menduduki posisi jabatan eksekutif dan legislatif. Perkembangan keterwakilan peran perempuan dalam jabatan pemerintahan, dan Lembaga Perwakilan Rakyat selama tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.91.

Tabel 8.91.
Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No.	**Jenis Jabatan**	**Tahun**				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	**(7)**
1	Eksekutif (%)	(7.417/26.518)= 27,97	(7.072/27.344)= 25,86	56,6	57	59,7
2	Legislatif (%)	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(9/50) = 18

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2020 (diolah.)

Berdasarkan Tabel 8.91. sebagaimana tersebut di atas, keterlibatan perempuan di lembaga legislatif pada tahun 2015-2019 stagnan karena masih dalam satu periode DPRD hasil Pemilu tahun 2014, hanya dalam jabatan eksekutif mulai tahun 2017 persentasenya meningkat, hal ini seiring dengan peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan dalam mengisi formasi jabatan publik.

4. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 8.92.

Tabel 8.92.
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2015-2019

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2015	7	10	2	0	2	18	0	3	0	0	42
2016	11	16	2	8	0	29	0	6	0	1	73
2017	9	6	3	5	0	12	0	7	1	0	43
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51
2019	6	7	9	3	5	15	4	8	0	0	57

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2020 (diolah.)

. Berdasarkan Tabel 8.92. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir (tahun 2018-2019) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 6 kasus dari tahun 2018 sebesar 51 kasus menjasi 57 kasus di tahun 2019, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
4. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Permasalahan :

a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Solusi :

a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

42. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan;

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas layanan perhubungan diantaranya diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan, terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, kemudahan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan angkutan serta kepuasan bagi pengguna layanan perhubungan. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan*** disajikan pada Tabel 8.93.

Tabel 8.93.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	75,99	78,95	80,05	79,02	98,71	81,08	97,48

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Berdasarkan capaian Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan sebagaimana Tabel 8.93. di atas, ditunjang adanya ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 8.94.

Tabel 8.94.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	11.049	10.657	9.622	8.878	8.591
02 Mobil Bus					
* Umum	386	464	397	384	408
Bus Besar	80	44	65	97	88
Bus Sedang	196	131	261	248	268
Bus Kecil	110	289	71	39	52
* Bukan Umum	155	137	105	111	117
03 Kendaraan Khusus/Alat Berat	9	9	6	10	21
Jumlah	**11.985**	**11.731**	**10.527**	**9.383**	**9.137**

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020.

Disamping Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) yang tercatat, juga dimiliki terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 8.95.

Tabel 3.95.
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
di Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m^2
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m^2
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m^2
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m^2
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m^2
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m^2
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m^2
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m^2

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan yang didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Permasalahan :

a. Tingginya mobilitas penduduk, diperlukan sarana perhubungan massal yang terjangku dan mudah. Namun banyak kondisi angkutan umum yang sudah tidak laik jalan;.
b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan layanan perhubungan; dan
c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perhubungan ; dan
b. Peningkatan sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

43. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;

Ukuran keberhasilan meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Pelayanan Perijinan Satu Pintu dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa, serta daya saing Daerah.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat*** disajikan pada Tabel 8.96.

Tabel 8.96.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakt	84,50	80,52	80	78,37	97,96	80,00	97,96

Sumber: DPM dan PTSP, 2020.

Berdasarkan tanggapan penggunan layanan ketika disurvei secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal, dan Perijinan Satu Pintu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 78,37 (artinya kategori baik). Perolehan indeks ini didasarkan atas penilaian atas 8 (delapan) unsur pelayanan, diantaranya: a. Persyaratan, b. Prosedur, c. Waktu pelayanan, d. Biaya/tarif, e. Produk layanan, f. Kompetensi pelaksana, g. Perilaku pelaksana, h. Maklumat pelayanan, dan i. Penanganan pengaduan.

Disamping itu pada tahun 2019 tercatat kinerja layanan satu pintu diukur dari jumlah penerbitan Surat Izin usaha berdasarkan jenis usaha, diantaranya: 1. Perusahaan kecil sebanyak 61 izin usaha, 2. Perusahaan menengah sebanyak 367 izin usaha, dan 3. Perusahaan besar sebanyak 73 izin usaha. Sedang izin ganggu (HO) menurut bentuk badan usaha, diantaranya: 1. Perusahanan Terbatas (PT) sebanyak 46 PT, 2. CV sebanyak 73, dan 3. Lainnya sebanyak 193 HO.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang didukung dengan program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.

Permasalahan :

a. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat; dan
b. Belum optimalnya sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat ; dan
b. Peningkatan sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

44. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas;

Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.323.609 orang, yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 957.821 orang dan yang mempunyai Akte Kelahiran sebanyak 1.313.742 orang.

Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas*** sebagaimana Tabel 8.97.

Tabel 8.97.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat thd layanan administrasi	Sdh	82,74	Sdh (92,70)	Sdh (91,77)	99,00	sdh	sdh

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang

berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perkembangan jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.98.

Tabel 8.98.
Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019

No	Jenis Akte	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelahiran	23.503	22.356	23.256	27.755	26.582
2	Kematian	1.336	615	1.400	2.116	1.800
3	Perkawinan	595	441	450	473	472
4	Perceraian	58	58	58	71	76

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.98. sebagaimana tersebut di atas, untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program e-KTP sampai dengan tahun 2019 baru tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 957.821 orang, dan yang mempunyai Akte Kelahiran sebanyak 1.313.742 orang. Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten *yang belum* memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akte lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2015-2019 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 8.98. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 8.99.

Tabel 8.99.
Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2015	967.452	106.872
2	2016	927.310	93.846
3	2017	894.986	91.538
4	2018	877.190	71.223
5	2019	850.325	55.921

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.99. sebagaimana tersebut di atas jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2015–2019 cenderung turun, hal ini disebabkan karena validasi data kependudukan untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program e-KTP.

Permasalahan :

a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
b. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

45. Sasaran Pengembangan Ketransmigrasian;

Ukuran keberhasilan pengembangan ketrasmigrasian diukur dengan indikator Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. Selama tahun 2015-2019 sasaran transmigrasi di daerah: Kalimatan, Sulawesi dan Sumatra, namun mulai tahun 2017-2019 tinggal Sumatra saja yang menjadi tujuan transmigrasi.

Adapun capaian sasaran: ***Pengembangan Ketransmigrasian*** disajikan pada Tabel 8.100.

Tabel 8.100.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pengembangan Ketransmigrasian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018	Kondisi Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Thd Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	-64,62	-80	41	5,2	**12,68**	42	12,38

Sumber: Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, 2020.

Ukuran keberhasilan peningkatan besaran minat transmigrasi diukur dari jumlah peserta transmigasi yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 37 jiwa (20 KK), dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 56 jiwa (20 KK). Sedangkan yang diberangkatkan menjadi peserta yang ditempatkan pada tahun 2018 sebanyak 28 jiwa (7 KK), dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 44 jiwa (14 KK).

Adapun peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.101.

Tabel 8.101.
Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan
Tahun 2015-2019

TAHUN	Sumatra		Kalimantan		Sulawesi	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	5	23	2	7	-	-
2016	5	20	10	46	4	17
2017	4	13	-	-	-	-
2018	7	28	-	-	-	-
2019	14	44				

Sumber : Disperinaker Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 8.101. sebagaimana tersebut di atas, pengiriman transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan berkurangnya quota penempatan transmigran asal Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Selama ini penempatan transmigrasi Kabupaten Klaten masih tergantung dengan quota dan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pengembangan ketransmigrasian yang didukung dengan program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan program Transmigrasi Lokal.

Permasalahan :

a. Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup:
b. Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan quotanya.
c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan penjaringan sampai penempatan transmigrasi; dan
d. Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan ketransmigrasian; dan
b. Peningkatan sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.2.716.040.824.886,- (*dua trilyun tujuh ratus enam belas milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah rupiah)*, dan terealisasi sebesar Rp.2.680.504.038.263,44 *(dua trilyun enam ratus delapan puluh milyar lima ratus empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga koma empat puluh empat rupiah),* dengan rincian sebagai berikut:

   1.1. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.292.651.477.481,- (*Dua ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*), dan teralisasi sebesar Rp.311.577.751.655,44. (*tiga ratus sebelas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima koma empat puluh empat rupiah*), atau melampaui target sebanyak Rp.19.026.274.174,44 (*sembilan belas milyar dua puluh enam juta dua ratus tujuh empat ribu seratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah*).

   1.2. Dana Perimbangan

   Dana Perimbangan pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.1.719.123.949.405,- (*satu trilyun tujuh ratus sembilan belas milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.1.659.690.587.378,- (*satu trilyun enam ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau 96,54%.

   1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.704.265.398.000,– (*tujuh ratus empat milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.709.135.699.230,- (*tujuh ratus sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau* 100,69%.

2. Belanja Daerah

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.3.091.935.509.198,52 (*tiga trilyun sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah*), dan terserap sebanyak Rp.2.673.947.783,68 *(dua trilyun enam ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma enam puluh delapan rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 sebesar Rp.2.079.221.807.921,- (*Dua trilyun tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.1.816.935.736.757,- (*satu trilyun delapan ratus enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Atau terserap 87,39%*

2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung (mendanai program dan kegiatan) pada tahun 2019 direncanakan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 (satu trilyun *dua belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima puluh dua rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.857.012.047.026,68 (*delapan ratus lima puluh tujuh milyar dua belas juta empat puluh tujuh ribu dua puluh enam koma enam puluh delapan rupiah*). Atau terserap 84,53%

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran daerah langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.395.394.684.312,52,- *(Tiga ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat tiga ratus dua belas koma lima puluh dua rupiah).*
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.19.500.000.000,- (*Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah*).

**) Catatan: input data per: pk. 10,17 WIB tanggal 27 Januari 2020.*

Tabel 8.102.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	50	98,28	196,56	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1. Dinas 2. TK 3. SKB	 722.000.000 180.000.000 45.016.000	 576.773.886 164.348.400 42.868.000	 79,90 91,30 95,23
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	85	88,09	100,11	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27.151.950.500	22.874.027.146	84,24
							Pendidikan Non Formal: 1. Dinas 2. SKB	 155.000.000 3.476.777.000	 123.102.250 3.401.538.950	 79,40 97,84
							Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.156.200.000	15.292.692.352	94,66
							Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	120.000.000	97.650.600	81,40
							Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.781.000.000	2.413.748.155	86,79
							Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah (BOS): 1. SD 2. SMP	 65.282.177.791 40.628.270.099	 61.556.288.786 38.191.515.928	 94,29 94,00

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	16	12	75,00	Upaya Kesehatan Masyarakat: 1. Dinas 2. Puskesmas	 11.051.770.531 22.755.000.000	 7.377.244.447 20.001.084.316	 66,75 87,90
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,11	10,01	99,01	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.961.530.000	1.233.545.666	62,89
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,65	1,59	96,36	Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.219.493.000	3.938.314.555	93,34
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,72	0,71	98,61	Pengawasan Obat dan Makanan	100.000.000	97.129.700	97,13
							Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	444.700.000	439.433.250	98,82
							Perbaikan Gizi Masyarakat	410.900.000	400.875.550	97,56
							Pengembangan Lingkungan Sehat	1.265.150.000	1.041.250.146	62,89
							Standarisasi Pelayanan Kesehatan: 1. Dinas 2. Puskesmas	 60.000.000 73.972.517.015	 23.103.700 62.361.586.356	 38,51 84,30
							Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	19.596.892.625	17.217.203.931	87,86
							Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	16.248.661.000	13.880.824.648	85,43

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	6.749.999.000	6.544.341.345	96,24
							Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	93.634.000	75.642.950	80,79
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,22	76,67	100,59	Pelayanan Kesehatan	43.599.095.276,52	37.064.495.638,69	85,01
							Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	200.000.00	156.996.372	78,50
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan danrehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	85	62,26	72,25	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	115.000.000	98.689.800	85,82
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	97	96	**98,9**	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.690.900.000	1.292.352.299	76,43

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,10	13,09	**99,92**	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial: 1. Dinsos P3A dan KB 2. Kesra	 862.000.000 9.400.000	 829.763.850 300.000	 96,26 3,18
							Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	40.000.000	29.501.100	73,75
5	Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*)	Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate)* / TFR	Angka	2,14	2,10	**98,13**	Keluarga Berencana	8.439.392.000	7.152.344.757	84,75
							Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	14.500.000	14.342.450	98,91
							Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	521.640.000	443.081.500	84,94
							Pelayanan kontrasepsi	146.287.000	130.942.484	89,51
							Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	190.000.000	184.350.000	97,02
							Pengembangan pusat informasi dan konseling KRR	158.350.000	124.626.647	78,70
							Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	45.773.000	44.806.700	97,89

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	10.500.000	10.150.000	100
							Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	8.000.000	7.927.650	99,10
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	13	130	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	725.000.000	675.803.578	93,21
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	22	440	Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga	1.293.000.000	1.230.055.680	95,13
							Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	250.000.000	218.283.000	87,31
							Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba:	75.000.000	61.576.000	82,10
							Pembinaan Pemuda dan Olahraga: 1. Disbudparpora 2. Kesra	 1.206.000.000 18.030.000	 1.079.379.000 16.770.000	 89,00 93,01
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	3,2	54	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.795.000.000	2.565.670.071	91,79

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya									
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	14,3	143	Pengembangan Nilai Budaya	185.000.000	160.626.500	86,83
							Pengelolaan Keragaman Budaya	75.000.000	71.316.000	95,09
							Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Humas)	465.000.000	464.600.000	99,91
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	22,19	443,8	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.970.276.500	1.692.887.360	85,92
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,08	77,55	92,18	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 1. Setda Organisasi 2. BKPD	 325.000.000 10.825.000.000	 167.382.684 10.770.819.727	 51,50 99,5
							Pembinaan dan Pengembangan Aparatur: 1. Setda Organisasi 2. BKPD	 209.000.000 5.550.000.000	 152.050.840 3.776.110.192	 72,75 68,68

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	133,33	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.739.178.000	12.025.963.240	76,41
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	100	92,28	92,28	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	27.592.151.000	26.379.372.529	95,06
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.700.000.000	2.242.381.983	83,05
							Perencanaan Pembangunan Ekonomi	556.500.000	507.823.394	91,25
							Perencanaan Sosial dan Budaya	550.000.000	469.979.808	85,45
							Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	600.000.000	590.469.375	98,41
							Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	490.400.000	417.316.023	85,10
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	12,56	251,2	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	308.681.000	261.331.000	84,66

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	156.111.000	134.915.388	86,42
							Perbaikan sistem adminstrasi kearsipan	27.340.000	18.861.880	68,99
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72	71	98,61	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	192.195.726	156.774.166	81,57
							Tata Kelola Pemerintah Desa	2.767.704.150	2.117.954.375	76,52
							Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100.000.000	94.170.275	94,17
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.335.229.350	4.307.726.169	80,74
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	599.142.200	540.374.741.	90,19
							Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	39.999.850	33.729.791	84,32

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	66 (B)	60,33 (B)	91,41	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	780.000.000	655.486.551	84,04
							Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	165.000.000	123.801.378	75,03
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3	3,22	107,33	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1. Pemerintahan 2. Umum	 951.000.000 3.196.200.000	 427.616.200 2.577.112.000	 44,96 80,63
							Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	135.000.000	128.571.000	95,24
							Pengembangan Wilayah Perbatasan	260.000.000	227.451.100	87,48
							Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi administrasi Tata Kelola Kecamatan	120.000.000	105.579.700	87,98
							Pengembangan komonikasi, informasi dengan Mass Media (Humas)	296.755.000	281.960.632	95,01
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan	2.871.759.405	2.677.236.150	93,23

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	1.575.178.000	1.472.241.668	93,47
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	1.661.341.400	1.556.233.494	93,67
							Kerjasama informasi dengan Mass Media (Humas)	1.594.782.500	1.486.845.464	93,23
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	83	92,22	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.861.500.000	1.667.423.000	89,57
		Indeks kabupaten peduli HAM	%	80	90	112,50	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	820.000.000	567.147.000	69,16
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	81	90,00	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	967.457.000	767.382.500	79,57

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa (Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan)	523.513.000	385.890.557	73,71
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	94	94	100	Kerjasama dengan Mass Media: 1. Kominfo 2. Humas	 1.051.000.000 1.594.782.500	 1.027.080.383 1.486.845.464	 97,72 93,23
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	94	98	102,1	Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	200.000.000	189.082.246	94,54
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	94	95	101,06	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	580.000.000	486.580.950	83,89
							Penanganan pengaduan masyarakat	100.000.000	76.599.931	96,60
							Peningkatan Persandian Daerah	30.000.000	27.333.150	91,11
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,64	74,26	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	23.336.000	21.419.000	91,79
							Peningkatan Keagamaan	5.271.895.000	3.960.071.610	95,12
							Peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	46.717.000	40.711.550	87,15
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,3	12,3	100	Peningkatan Ketahanan Pangan: 1. Pertanian 2. Setda Perekonomian	 5.906.317.000 175.000.000	 5.478.945.178 139.018.220	 93 79,44
							Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	1.436.150.000	1.324.289.220	92
							Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	150.000.000	136.519.825	93
							Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.450.000.000	1.378.854.900	95
							Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.948.555.000	1.415.634.050	73
							Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.750.000.000	2.211.041.967	80

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	105.000.000	103.965.000	99
							Pengembangan perikanan tangkap	250.000.000	170.602.475	68
							Pengembangan budidaya perikanan	1.743.576.000	1.618.978.252	93
							Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	455.000.000	391.253.650	86
							Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	245.000.000	210.012.121	86
							Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	560.000.000	535.864.572	96
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	35	35	100	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	848.214.582	738.537.184	87,07
							Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	394.500.000	319.845.051	81,08
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	31,96	127,84	Pengembangan Kemitraan	485.000.000	456.914.900	94,21
							Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.028.438.000	1.967.859.910	97,01

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.639.496.000	4.477.541.255	96,51
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,12	19,98	104,49	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	605.000.000	537.597.940	88,86
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	11	11,45	**104,09**	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	1.240.000.000	1.038.995.234	83,79
							Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	430.000.000	399.524.387	92,91
							Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.075.000.000	788.143.137	73,32
							Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.853.542.000	5.039.185.575	86,09
							Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	410.000.000	394.312.760	96,17
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	81,82	105	128,33	Program penelitian dan pengembangan	1.000.000.000	886.073.933	89

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi: 1. DPM dan PTSP 2. Setda Perekonomian	 648.950.000 391.000.000	 528.840.840 294.877.132	 81,49 75,42
		PMDN	%	438	19					
		PMA	%	294	139					
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):					Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	430.655.000	338.578.625	78,62
		PMDN	%	2,2	733	**33318,18**				
		PMA	%	2,5	272	**10880,00**				
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,05	1,00	95,24	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	355.000.000	318.335.000	89,67
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	69,00	81	117,39	Peningkatan Kesempatan Kerja	327.000.000	263.282.920	80,51
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,90	71,48	81,32	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	197.000.000	178.475.154	90,60
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas,	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,98	36,82	105,26	Pengembangan industri kecil dan Menengah:			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan daya saing sektor Perindustrian						1. Disperinaker 2. Setda Perekonomian	912.000.000 705.000.000	834.655.750 599.516.027	91,52 85,04
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	6,50	7,6	116,92	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	225.000.000	189.619.500	84,28
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyrakat	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	36,44	60,87	167,04	Pembangunan Jalan dan Jembatan	111.278.649.000	85.874.407.215	77,17
							Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	8.500.000.000	7.004.431.627	82,41
							Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	17.610.212.000	13.956.511.465	79,25
							Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	8.000.000.000	6.350.334.682	79,38
							Penataan Trotoar jalan	2.000.000.000	1.504.006.950	75,20
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrasruktur Perhubungan	Tingkat	47,41	45,87	96,75	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	-		
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	1.833.840.000	1.526.234.269	83,23

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							dan Fasilitas LLAJ			
							Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	4.724.595.000	4.512.942.202	95,52
							Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1.082.000.000	763.849.378	70,60
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks	45,27	53,76	118,78	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	49.800.000.000	44.570.037.708	89,50
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah: 1. DPU 2. Perwaskim	 1.000.000.000 10.181.694.000	 931.040.000 9.246.483.832	 93,10 90,81
							Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1.638.282.500	1.458.668.310	89,04
							Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	55.770.600.000	47.489.111.754	85,15
							Pengembangan Perumahan	131.250.000	70.718.563	53,88
							Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	1.600.000.000	1.231.058.505	76,94
							Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	3.000.000.000	2.315.094.162	77,17
							Pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan	150.000.000	91.934.750	61,29

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,20	78,98	86,09	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang: 1. DPU 2. Perwaskim	 150.000.000 550.000.000	 148.304.925 59.502.081	 98,87 10,82
							Perencanaan Tata Riuang	1.600.000.000	1.254.562.852	78,41
							Pemanfaatan Ruang	400.000.000	250.002.607	62,50
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	35,57	28,46	80,01	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.590.755.000	572.306.724	35,98
		Indeks kualitas udara	Indeks	79,57	82,29	103,42	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	790.000.000	652.358.450	82,58
		Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	53,71	83,3	155,09	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	545.000.000	386.813.599	70,97
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. DPU 2. DLHK	 18.450.000.000 7.516.329.000	 15.170.958.809 5.965.271.645	 82,23 79,36
							Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	110.000.000	87.905.150	79,91
							Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH): 1. DPU 2. DLHK	 10.900.000.000 1.422.400.000	 9.068.900.239 1.367.840.447	 83,20 96,16
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Penyelenggaran Penanggulangan Bencana	1.172.580.000	867.798.540	74,01

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	risiko bencana									
							Penanganan Darurat Bencana: 1. Satpol PP 2. BPBD	 1.083.950.000 2.176.444.440	 1.035.882.793 1.509.853.553	 95,57 69,37
							Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	16.043.150.000	13.775.569.007	85,87
							Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	155.000.000	148.668.400	95,92
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	Indeks	77	72,17	93,7	Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan: 1. Kesbangpol 2. Satpol PP	 425.000.000 160.000.000	 358.091.500 140.865.600	 84,26 88,04
							Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	425.000.000	379.895.000	89,39
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	66	58	87,89	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	884.995.242	840.595.105	94,98
							Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga	901.000.000	874.958.316	97,11

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	848.214.582	738.537.184	87,07
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	97	96	98,97	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan	1.513.050.000	1.506.108.466	99,54
							Peningkatan Pemberantasan penyakit Msyarakat (Pekat)	265.000.000	260.167.100	98,18
							Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan: 1. Kesbangpol 2. Satpol PP	 1.390.000.000 775.000.000	 1.104.226.450 701.655.000	 79,44 90,54
							Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakkriminal	270.000.000	219.361.700	81,25
							Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100.000.000	90.611.050	90,61
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,23	60,25	100,03	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	110.000.000	62.610.570	56,92
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	107.500.000	100.495.850	93,48
							Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan	297.500.000	282.329.090	94,69

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							gender dalam pembangunan			
							Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	180.000.000	170.441.070	94,69
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	80,05	79,02	98,71	Peningkatan Pelayanan Angkutan	862.500.000	813.458.422	94,31
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai Survai Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	78,37	97,96	Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	0	0	0
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	Sdh (92,70)	Sdh (91,77)	95,06	Penataan Administrasi Kependudukan	3.998.689.000	3.685.734.035	92,17
45	Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	41	5,2		Pengembangan Wilayah Transmigrasi	218.000.000	177.255.850	81,31
							Transmigrasi Lokal	32.000.000	26.592.750	83,10
Jumlah Anggaran Prioritas I (*program untuk membiayai visi dan misi Bupati*)								878.973.204.765,00	751.695.655.912,00	85,52
Jumlah Belanja Langsung								1.012.713.701.277,52	857.012.047.026,68	84,63
Jumlah Belanja Tidak Langsung								2.079.221.807.921,00	1.816.935.736.757	87,39
Jumlah Total Belanja Daerah								3.091.935.509.198,52	2.673.947.783.783,69	86,48

D. EFEKTIFITAS SUMBER DAYA

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2019, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan 2) efektifitas penggunaan sumber daya aparatur. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 61 (enam puluh satu) indikator yang sifatnya progresif, dan 6 (enam) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2019, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 169 program dengan 2.918 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 95% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 dan terserap sebesar Rp.857.012.047.026,68 (atau 84,63%). Secara rinci tingkat pencapaian efektifitas sumber daya antara sasaran dan realisasi keuangan dapat disajikan pada Tabel 8.103.

Tabel 8.103.
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	196,56	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	88,81 .	Efisien
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	100,11	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	84,24	Efisien
					Pendidikan Non Formal:	88,62	Efisien
					Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	94,66	Efisien
					Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	81,40	Efisien
					Manajemen Pelayanan Pendidikan	86,79	Efisien
					Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah (BOS): 1. SD 2. SMP	 94,29 94,00	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	75,00	Upaya Kesehatan Masyarakat: 1. Dinas 2. Puskesmas	 66,75 87,90	Efisien
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	99,01	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	62,89	Efisien
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	96,36	Obat dan Perbekalan Kesehatan	93,34	Efisien
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	98,61	Pengawasan Obat dan Makanan	97,13	Efisien
					Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	98,82	Efisien
					Perbaikan Gizi Masyarakat	97,56	Efisien
					Pengembangan Lingkungan Sehat	62,89	Efisien
					Standarisasi Pelayanan Kesehatan: 1. Dinas 2. Puskesmas	 38,51 84,30	Efisien
					Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	87,86	Efisien
					Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	85,43	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	96,24	Efisien
					Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	80,79	Efisien
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	100,59	Pelayanan Kesehatan	85,01	Efisien
					Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	78,50	Efisien
4	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	130	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	93,21	Efisien
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	440	Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga	95,13	Efisien
					Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	87,31	Efisien
					Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba:	82,10	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Pembinaan pemuda dan olahraga: 1. Disbudparpora 2. Kesra	89,00	Efisien
5	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	143	Pengembangan Nilai Budaya	86,83	Efisien
					Pengelolaan Keragaman Budaya	95,09	Efisien
					Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Humas)	99,91	Efisien
6	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	443,8	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	85,92	Efisien
7	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	133,33	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	76,41	Efisien
8	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	Perencanaan Pembangunan Daerah	83,05	Efisien
					Perencanaan	91,25	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Pembangunan Ekonomi		
					Perencanaan Sosial dan Budaya	85,45	Efisien
					Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	98,41	Efisien
					Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	85,10	Efisien
9	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	251,2	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	84,66	Efisien
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	86,42	Efisien
					Perbaikan sistem adminstrasi kearsipan	68,99	Efisien
10	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	80,74	Efisien
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	100	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	90,19	Efisien
					Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	84,32	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75,03	Efisien
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	107,33	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1. Pemerintahan 2. Umum	 44,96 80,63	Efisien
					Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	95,24	Efisien
					Pengembangan Wilayah Perbatasan	87,48	Efisien
					Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi administrasi Tata Kelola Kecamatan	87,98	Efisien
					Pengembangan komonikasi, informasi dengan Mass Media (Humas)	95,01	Efisien
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan	93,23	Efisien
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	93,47	Efisien
					Peningkatan Koordinasi	93,67	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan		
					Kerjasama informasi dengan Mass Media (Humas)	93,23	Efisien
12	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Indeks kabupaten peduli HAM	%	112,50	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	69,16	Efisien
13	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa (Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan)	73,71	Efisien
14	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100	Kerjasama dengan Mass Media: 1. Kominfo 2. Humas	97,72 93,23	Efisien
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	102,1	Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	94,54	Efisien
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	101,06	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	83,89	Efisien
					Penanganan pengaduan masyarakat	96,60	Efisien
					Peningkatan Persandian Daerah	91,11	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
15	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	91,79	Efisien
					Peningkatan Keagamaan	95,12	Efisien
					Peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	87,15	Efisien
16	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	100	Peningkatan Ketahanan Pangan: 1. Pertanian 2. Setda Perekonomian	93 79,44	Efisien
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	92	Efisien
					Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	93	Efisien
					Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	95	Efisien
					Peningkatan Kesejahteraan Petani	73	Efisien
					Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	80	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	99	Efisien
					Pengembangan perikanan tangkap	68	Efisien
					Pengembangan budidaya perikanan	93	Efisien
					Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	86	Efisien
					Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	86	Efisien
					Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	96	Efisien
17	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	100	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	87,07	Efisien
					Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	81,08	Efisien
18	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	190	Pengembangan Kemitraan	94,21	Efisien
					Pengembangan Pemasaran Pariwisata	97,01	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Pengembangan Destinasi Pariwisata	96,51	Efisien
19	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	104,49	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	88,86	Efisien
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	104,09	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	83,79	Efisien
					Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	92,91	Efisien
					Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	73,32	Efisien
					Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	86,09	Efisien
					Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	96,17	Efisien
20	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	128,33	Program penelitian dan pengembangan	89	Efisien
21	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	78,62	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
	penanaman modal						
		PMDN	%	**33318,18**			
		PMA	%	**10880,00**			
22	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Angka partisipasi angkatan kerja	%	117,39	Peningkatan Kesempatan Kerja	80,51	Efisien
23	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	105,26	Pengembangan industri kecil dan Menengah: 1. Disperinaker 2. Setda Perekonomian	 91,52 85,04	Efisien
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	116,92	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	84,28	Efisien
24	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyrakat	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	167,04	Pembangunan Jalan dan Jembatan	77,17	Efisien
					Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	82,41	Efisien
					Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	79,25	Efisien
					Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	79,38	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Penataan Trotoar jalan	75,20	Efisien
25	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks	118,78	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	89,50	Efisien
					Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah: 1. DPU 2. Perwaskim	 93,10 90,81	Efisien
					Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	89,04	Efisien
					Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	85,15	Efisien
					Pengembangan Perumahan	53,88	Efisien
					Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	76,94	Efisien
					Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	77,17	Efisien
					Pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan	61,29	Efisien
26	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	Indeks	103,42	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	82,58	Efisien
		Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	155,09	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	70,97	Efisien
					Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. DPU 2. DLHK	 82,23 79,36	Efisien

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
					Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	79,91	Efisien
					Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH): 1. DPU 2. DLHK	 83,20 96,16	Efisien
27	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas Indeks	103,53	Penyelenggaran Penanggulangan Bencana	74,01	Efisien
					Penanganan Darurat Bencana: 1. Satpol PP 2. BPBD	 95,57 69,37	Efisien
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	85,87	Efisien
					Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	95,92	Efisien
28	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	100,03	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	56,92	Efisien

*Catatan: *) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan sifatnya refresif, sehingga capaian indikator kinerja ≤100 tingkat capaian targetnya tercapai.*

Berdasarkan Tabel 8.103. sebagaimana tersebut di atas, jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 28 sasaran (atau 62,22% dari sebanyak 45 sasaran strategis), sedangkan jumlah indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 41 indikator sasaran (atau 61,19% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis). Berdasarkan Tabel 8.102 dan Tabel 8.103, sebagaimana tersebut di atas jumlah rencana anggaran untuk membiayai Anggaran Prioritas I (*program untuk membiayai visi dan misi Bupati*) sebanyak Rp.878.973.204.765,00 dan terealisasi sebanyak Rp.751.695.655.912,00 serta memperhatikan indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 41 indikator sasaran (atau 61,19% dari sebanyak 67 indikator sasaran) dengan anggaran sebanyak Rp.669.058,465.685,00 maka dapat disimpulkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebanyak Rp.82.637.190.287,00 {*dengan perhitungan: Realisasi anggaran sebanyak Rp.751.695.655.912,00* ***dikurangi*** *Rp.669.058,465.685,00 dari anggaran sebanyak 41 indikator sasaran (atau 61,19% dari sebanyak 67 indikator sasaran) yang memcapai efisiensi)}.*

b) Efektifitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya aparatur disajikan terlebih dahulu jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2019 disajikan pada Tabel 8.104.

Tabel 8.104

Jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana /Strata I	Pasca Sarjana / Strata 2 & 3
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.	Sekretariat Daerah	7	0	0	0	0	0	1	6
	Bagian Pemerintahan Setda	5	3	1	0	0	1	3	3
	Bagian Hukum Setda	7	7	0	0	4	1	7	2
	Bagian Perekonomian Setda	5	4	0	0	2	0	2	5
	Bagian Pembangunan Setda	4	4	0	0	1	1	3	3
	Bagian Kesra Setda	8	7	0	1	5	1	5	3
	Bagian Organisasi Setda	9	6	0	0	1	2	9	3
	Bagian Humas Setda	12	10	0	0	5	5	11	1
	Bagian Umum Setda	31	21	1	5	29	3	12	2
	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	10	3	0	0	2	0	6	5
02	Sekretariat DPRD	35	6	3	5	12	1	11	9
03	Inspektorat	30	21	0	0	3	3	22	23
04	Dinas Pendidikan	2139	3993	4	89	462	617	4758	202
05	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	28	19	1	0	18	3	15	10
06	Dinas Kesehatan	329	1204	4	17	236	834	408	34
07	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	23	24	1	0	8	8	24	6
08	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16	20	0	0	10	6	7	13
09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21	14	0	0	12	3	10	10
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	8	0	0	3	2	14	5
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	123	35	6	15	95	8	23	11
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja	18	12	1	0	6	2	15	6

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana /Strata I	Pasca Sarjana / Strata 2 & 3
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	6	1	0	4	1	10	8
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32	11	2	2	14	1	17	7
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	282	25	32	58	145	15	45	12
16	Dinas Perhubungan	41	14	2	4	21	11	9	8
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11	10	0	1	1	0	11	8
18	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	145	96	0	6	55	21	138	21
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	13	14	0	1	8	5	7	6
20	Satuan Polisi Pamong Praja	55	6	1	6	33	2	15	4
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiahan Daerah	29	11	0	0	6	8	14	12
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	63	41	0	4	31	6	45	18
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24	15	0	0	5	2	16	16
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	8	0	0	9	3	11	6
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10	4	0	0	5	0	6	3
26	**Kecamatan Klaten Tengah**	**27**	**21**	**0**	**1**	**17**	**3**	**20**	**7**
27	**Kecamatan Klaten Selatan**	**6**	**14**	**0**	**0**	**6**	**2**	**9**	**3**
28	**Kecamatan Klaten Utara**	**14**	**17**	**0**	**0**	**12**	**3**	**9**	**7**
29	**Kecamatan Kebonarum**	**8**	**9**	**0**	**0**	**8**	**2**	**3**	**4**
30	**Kecamatan Wedi**	**14**	**10**	**0**	**0**	**12**	**1**	**7**	**4**
31	**Kecamatan Kalikotes**	**11**	**9**	**0**	**1**	**7**	**1**	**9**	**2**
32	**Kecamatan Ngawen**	**7**	**10**	**0**	**0**	**8**	**1**	**7**	**1**
33	**Kecamatan Jogonalan**	**9**	**10**	**0**	**0**	**8**	**1**	**7**	**3**
34	**Kecamatan Karangnongko**	**17**	**7**	**0**	**2**	**13**	**2**	**5**	**2**
35	**Kecamatan Manisrenggo**	**17**	**6**	**0**	**0**	**13**	**2**	**7**	**1**
36	**Kecamatan Gantiwarno**	**10**	**7**	**0**	**0**	**10**	**0**	**4**	**3**
37	**Kecamatan Prambanan**	**12**	**11**	**0**	**0**	**9**	**1**	**11**	**2**
38	**Kecamatan Kemalang**	**17**	**4**	**0**	**0**	**12**	**2**	**4**	**3**
39	**Kecamatan Jatinom**	**16**	**7**	**0**	**0**	**14**	**1**	**5**	**3**
40	**Kecamatan Karanganom**	**12**	**10**	**1**	**0**	**12**	**1**	**5**	**3**

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana /Strata I	Pasca Sarjana / Strata 2 & 3
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	**Kecamatan Tulung**	**20**	**5**	**0**	**1**	**17**	**1**	**5**	**1**
42	**Kecamatan Polanharjo**	**14**	**3**	**0**	**1**	**8**	**2**	**6**	**0**
43	**Kecamatan Pedan**	**15**	**4**	**1**	**0**	**8**	**2**	**3**	**5**
44	**Kecamatan Karangdowo**	**12**	**6**	**0**	**0**	**12**	**3**	**1**	**2**
45	**Kecamatan Trucuk**	**11**	**6**	**0**	**0**	**9**	**0**	**5**	**3**
46	**Kecamatan Bayat**	**16**	**5**	**0**	**2**	**10**	**1**	**7**	**1**
47	**Kecamatan Delanggu**	**12**	**11**	**0**	**0**	**13**	**1**	**7**	**2**
48	**Kecamatan Wonosari**	**19**	**8**	**0**	**1**	**15**	**0**	**9**	**2**
49	**Kecamatan Cawas**	**12**	**11**	**1**	**0**	**12**	**1**	**6**	**3**
50	**Kecamatan Ceper**	**12**	**5**	**0**	**2**	**4**	**0**	**10**	**1**
51	**Kecamatan Juwiring**	**12**	**7**	**0**	**1**	**11**	**0**	**3**	**4**
	Jumlah	3.972	5.905	63	226	1.531	1.610	5.884	563

Sumber: BKPD, dan Setda Bagian Organisasi, 2020 (Diolah)
Keterangan:

	Efektif	*70,18%*
	Ada yang efektif, dan ada yang tidak efektif	*17,54%*
	Tidak efektif	*12,28%*

Penilaian tingkat efektifitas sumber data dihitung berdasarkan capaian indikator sasaran yang mempunyai tingkat efisiensi sebagaimana Tabel 8.102. dan Tabel 8.103.

BAB IX

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Laporan yang telah disusun diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan yang telah diraih, ada beberapa capaian kinerja di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 yang hasilnya masih belum optimal. Hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan perbaikan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan di masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Akhir kata kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, selanjutnya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna mewujudkan Kabupaten Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.***

Klaten, Maret 2020

BUPATI KLATEN

Hj. SRI MULYANI

LAMPIRAN I **TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN**

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg Ketertiban Umum	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	ADA PERDA Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung	ADA	
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah [1] seluruhnya	Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2019, sebanyak 40.379 unit. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2019, sebanyak 380.591 Unit.	10.6%	
			3	Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum	Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum	ADA PERDA Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban kebersihan dan keindahan	ADA	
		Peraturan ttg kependuduka n	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP = 965.471 - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP = 1.013.611	95.3%	
			5	Pengurusan KIA	Prosentase Anak yang sudah memiliki KIA	- Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA = 64.590 - Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA = 309.867	20.8%	
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2019 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak = 61 orang - Penduduk pada akhir tahun 2019, berjumlah = 1.323.609 orang	0,04 per 10.000 penduduk	
		Kebijakan bidang Penanganan Bencana	7	Keberadaan PERDA tentang Penangangan Bencana	Ada atau tidak ada PERDA Penangangan Bencana	ADA PERDA Nomor 14 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten klaten (yang mengatur Penanganan Bencana)	ADA	
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	ADA Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah	ADA	

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2019 disampaikan pada tanggal maret 2020 sesuai surat pengantar Nomor	tepat waktu	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2019, disampaikan pada tanggal 20 maret 2020 - Laporan Kinerja tahun 2019. disampaikan pada tanggal 19 Mar 2020	tepat waktu	
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM	Ada atau tidaknya Peraturan tentang penerapan SPM	belum ada Peraturan Daerah terkait SPM	tidak adA	belum ada Peraturan Daerah terkait SPM
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak 32 MOU yang terdiri dari:	32 MOU	
				1) Perjanjian Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor 476/177/II/2018, Nomor 476/212.1/II/2018, Nomor 476/9/17/2018, Nomor 476/144/2018, Nomor 476/110.1/28, Nomor 346/II/2018, Nomor 019.5/21/031/2018, Nomor 019.6/493/15 tentang Kerjasama Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATENdengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (8 Februari 2018 s/d 8 Februari 2023).			
				2) Perjanjian Kerjasama Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Nomor 551.2/393/II/2018, Nomor 554/8/22/2018, Nomor 463/343/II/2018, Nomor 130.13/051.II/II/2018, Nomor 019.6/300/II/2018, Nomor 551.2/78/023/2018, Nomor 551.2/012 Tahun 2018 tentang Kerjasama Bidang Perhubungan Antar Daerah Se SUBOSUKAWONOSRATEN dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (8 Februari 2018 s/d 8 Februari 2023).			
				3) Perjanjian Kerjasama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Nomor 0196/2584/XII/2017, Nomor 364/2730/2017, Nomor 390/2181/XII/2017, Nomor 390/1412/XII/2017, Nomor 390/1087/XII/2017, Nomor 331.1/949-32/2017, Nomor 415.4/1649/28 tentang Kerjasama Bidang Pemadam Kebakaran dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022).			

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				4) Perjanjian Kerjasama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Nomor 520/2411/2017, Nomor 0196/5156/28/2017, Nomor 521/2013/XII/2017, Nomor 520/1584.1/XII/2017, Nomor 520/1714-020/XII/2017, Nomor 520/3101/26 tentang Kerjasama Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Antar Daerah Di SUBOSUKAWONOSRATEN jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun (20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022)				
				5) Perjanjian Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Nomor 415.4/1537/XII/2017, Nomor 415.4/999/38/2017, Nomor 002/824/XII/2017, Nomor 360/67/XII/2017, Nomor 60/23/2018, Nomor 392/349-038/2017, Nomor 360/12/PKS/XII/2017 tentang Kerjasama Penanggulangan Bencana Di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun (20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022).				
				6) Perjanjian Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Nomor 800/1539/XII/2015, Nomor 415.4/1466/13/2015, Nomor 019.6/1933/XII/2015, Nomor 331.1/1059/2015, Nomor 130/001/XII/2015, Nomor 300/2/039/2015, Nomor 301/17/21/2015 tentang Kerjasama Operasional Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat Serta Pengamanan dan Pengawalan Pejabat dengan jangka				
				7) Perjanjian Kerjasama BAPPEDA Kota Surakarta, BAPPEDA Kabupaten Boyolali, BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo, BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, Kantor LITBANG dan IPTEK Kabupaten Wonogiri, Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen, BAPPEDA Kabupaten Klaten Nomor 050/1.159/2015, Nomor 050/956/12/2015, Nomor 050/304/2015, Nomor 050/001.24/I/2015, Nomor 130/52/2015, Nomor 800/274/31/2015, Nomor 050/285/09/2015 tentang Kerjasama Lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun (6 Maret 2015 s/d 6 Maret 2020).				
				8) Perjanjian Kerjasama Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Sragen, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten Nomor 556/0698, Nomor 556/1514/26/2018, Nomor 556/2217/2018, Nomor 556/391/2018, Nomor 556/315, Nomor 556/315, Nomor 556/26/026/2018, Nomor 556/576/13/2018 tentang Kerjasama Bidang Pengembangan Kepariwisataan Antar Daerah SOLO RAYA dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun (3 Mei 2018 s/d 3 Mei 2023).				
				9) Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/PK/37/2017 dan Nomor 415.4/PK/10/2017 antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Klaten Dan Kabupaten Gunungkidul dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (11 April 2017 s/d 11 April 2022).				
				10) Perjanjian Kerjasama Nomor 38/PK.KDH/A/2015 dan Nomor 11 Tahun 2015 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Jalan Di Wilayah Perbatasan antara Kabupaten Klatendengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (5 Juni 2015 s/d 5 Juni 2020).				
				11) Kesepakatan Bersama Nomor 22/019.6/Tahun 2018 dan Nomor 100/5647.1/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (12 Desember 2018 s/d 12 Desember 2019).				
				12) Perjanjian Kerjasama Nomor 07/PKS/2018 dan Nomor 100/5647.2/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Klaten Dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (12 Desember 2018 s/d 12 Desember 2023).				
				13) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/11/2018 dan Nomor 445.4/41/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten PUSKESMAS Gedangsari I Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pelayanan Rujukan Medik/Penunjang dan Pelaksanaan Alih Ilmu Kesehatan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun (13 Maret 2018 s/d 13 Maret 2020).				

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				14) Kesepakatan Bersama Nomor 17/019.6/TAHUN 2019 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah, tanggal 11 Desember 2019 dengan jangka waktu kerjasama selama 12 (dua belas) bulan.				
				15) Nota Kesepakatan Nomor 12/019.6/Tahun 2019 dan Nomor 466.1/0136/Bag.Huk antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyaluran Bantuan Dana Bencana Alam tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu kerjasama selama 12 (dua belas) bulan.				
				16) Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PKS/Tahun 2019 dan Nomor 466.1/0137/Bag.Huk antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyaluran Dana Bantuan Masyarakat Untuk Korban Bencana Alam. tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun.				
				17) Kesepakatan Bersama Nomor 11/019.6/Tahun 2018 dan Nomor 019.6/369/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Semarang tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (25 September 2018 s/d 25 September 2019).				
				18) Kesepakatan Bersama Nomor 15/019.6/Tahun 2018 dan Nomor 06/MoU/2018 Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyaluran Bantuan Dana Bencana Alam dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan (2 November 2018 s/d 2 November 2019).				
				19) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/2384/2018 dan Nomor PKS/130.5/1400/21 antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang dengan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten tentang Pengembangan Dan Implementasi Aplikasi Smart City dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (25 September 2018 s/d 25 September 2021).				
				20) Perjanjian Kerjasama Nomor 05/PKS/2018 dan Nomor 03.02.10/108/MoU/PMI-KLU/XI/2018 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyaluran Dana Bantuan Masyarakat Untuk Korban Bencana Alam tanggal 2 November 2018 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.				
				21) Perjanjian Kerjasama Nomor 139/34/PEM-OTDA Tahun 2018 dan Nomor 04/PKS/2018 antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Umum (TU) Di Unit Permukiman Transmigrasi Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (2 November 2018 s/d 2 November 2023).				
				22) Perjanjian Kerjasama Nomor Nomor 03/PKS/2018 antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Umum (TU) Di Unit Permukiman Transmigrasi Batu Ampar Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (2 November 2018 s/d 2 November 2023).				
				23) Perjanjian Kerjasama Nomor 9 Tahun 2014 dan Nomor 9.A/SOSNAKERTRANS/2014 antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2019).				
				24) Perjanjian Kerjasama Nomor 180/20.a.03/Hukum/2014 dan Nomor 15 Tahun 2014 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di UPT. Kancu'u Saebawalati Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (25 Juni 2014 s/d 25 Juni 2019).				
				25) Perjanjian Kerjasama Nomor 300/7/B.3/2015 dan Nomor 20 Tahun 2015 antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum (TU) Lokasi Malakoni Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (3 September 2015 s/d 3 September 2020).				
				26) Perjanjian Kerjasama Nomor 129/12.C/Hkm.org/IX/2015 dan Nomor 19 Tahun 2015 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum (TU) Di Pangea Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) SP.3 Kawasan Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (3 September 2015 s/d 3 September 2020).				

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				27) Perjanjian Kerjasama Nomor 180/36/PERJ/HK-VI/2016 dan Nomor 42 Tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum di Sepunggur Unit Pemukiman Transmigrasi Satuan Pemukiman 3 (Tiga) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (20 Juni 2016 s/d 20 Juni 2021).				
				28) Perjanjian Kerjasama Nomor 375.1/Trans-2016 dan Nomor 45 Tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Satuan Pemukiman Padang Tarok 1 (Satu) Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (26 Mei 2016 s/d 26 Mei 2016).				
				29) Perjanjian Kerjasama Nomor 180/MOU/8/2016 dan Nomor 53 Tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Umum (TU) Di UPT. Waleh SP.3 Kawasan Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (20 Mei 2016 s/d 20 Mei 2021).				
				30) Perjanjian Kerjasama Nomor 1923/2016 dan Nomor 475.17/151.A/14 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten tentang Pelaksanaan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Sepunggur Desa Utama Kawasan Transmigrasi Salim Batu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimanatan Utara, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun (20 April 2016 s/d 20 April				
				31) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengiriman dan Penempatan Transmigrasi Asal Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, tanggal 26 April 2017 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun				
				32) Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/15/2018 dan Nomor 019.6/3086/2018 antara Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Dalam Pelayanan Rujukan dan Pelayanan Parsial, tanggal 2 April 2018 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) Tahun.				

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak-- 7 prioritas '- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 Program/agenda prioritas.	140%	semua prioritas Kabupaten mendukung Prioritas Nasional
					Prioritas Pembangunan Nasional :	Prioritas Pembangunan Kabupaten:		
					1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran		
						Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan		
					2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah		
					3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri dan UKM serta koperasi		
					4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana		
						Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta		
					5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi		
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2019 (APBD) = 23 urusan. (23 / 24) x 100%	95.83%	
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA	Tepat atau tidak tepat waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT	

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				APBD 2019	penetapan	PERDA Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD KAB KLATEN TA. 2019 Di tetapkan tgl 26 Desember 2019		
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	ADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ADA	
–		-	17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ------ 3) Urusan PU dan Penataan Ruang Rp.— 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp ------- 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp ------ 6) Urusan Sosial Rp ------ Total Belanja pelayanan dasar Rp. ------- Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. ------	52%	
					1) Urusan Pendidikan	846,747,063,630		
					2) Urusan Kesehatan	285,530,400,003		
					3) Urusan PU dan penataan Ruang	202,993,876,022		
					4 Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	7,553,623,797		
					5) Urusan Trantibum dan Linmas	12,058,702,579		
					6) Urusan sosial	39,595,733,449		
						1,394,479,399,480		
					Total belanja APBD 2019	2,675,948,342,711		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ------- 2) Urusan Kesehatan Rp. -----	42%	
						Total Belanja Pend & Kes Rp. ----		
					1) Urusan Pendidikan	846,747,063,630		
					2) Urusan Kesehatan	285,530,400,003		
					Pendidikan + Kesehatan	1,132,277,463,633		
					Total belanja APBD 2019	2,675,948,342,711		
		Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik [3] sesuai dengan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	ADA PERDA Nomor 14 Tahun 2018 tentang penyelenggarran pelayanan publik (standar pelayanan publik)	Ada	
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 sebanyak 9.877 orang.	0,74%	
						Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2019 sebanyak 1.323.609 orang.		
			21	Rasio PNS Memiliki Kualifkasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Tesehatan)	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) = 1.203 orang Jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019 = 9.877 orang (ratio 12,17) Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database (tentang kepegawaian)	ada	Database Kepegawaian

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kelembagaan	22	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb: 1) Bagian (Setda) = 1 Unit (9 Bagian) 2) Dinas = 16 Unit 3) Badan = 3 Unit 4) Kantor = 0 Unit 5) Rumah Sakit = 1 Unit (UPTD) 6) Lembaga Teknis lainya = unit 7) Kecamatan/Distrik = 26 unit 8) OPD = 3 Unit - Sekretariat DPRD - Inspektorat - Satpol PP 9) OPD Bukan PP 18 = 2 Unit - BPBD - Kesbangpol Jumlah Perangkat Daerah = 51 unit	51 unit	(di luar RSD Bagas Waras)
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak 15 Perda	15 PERDA	umber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	RAPERDA yang disetujui tahun 2019, sebanyak 15 RAPERDA. RAPERDA yang di usulkan DPRD tahun 2019, sebanyak 15 PERDA.	100%	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun $^{2019 \times 100\%}$	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 42 keputusan. '- Keputusan DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 42 keputusan.	100.00%	
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanju t keputusan Bupati	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2019 x 100%	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak 1122 keputusan. Keputusan Bupati tahun 2019 yang di usulkan, sebanyak 1122 keputusan.	100%	Sumber data dari Bagian Hukum

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak- lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2019 x 100%	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak 96 PerBupati. Peraturan Bupati dalam tahun 2019 sebanyak 96 PerBupati.	100%	Sumber data dari Bagian Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Tidak ada Perda yang dibatalkan		Sumber data dari Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	ada	Pasal 124 menjelasakan tentang Partisipasi masyarakat / Konsultasi Publik
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	ADA, 1) Klatenkab.go.id Perbup Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Registrasi Nama Domain Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa 2) PPID Perbup Nomor 61 Tahun 2018 3) Pengaduan Masyarakat (Matur Ibu) Perbup Nomor 50 Tahun 201	ADA	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp. 1.659.690.587.378 Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 1.719.123.949.405	96.5%	
					Dana Perimbangan terserap	Rp 1,659,690,587,378		
					Dana Perimbangan di rencanakan	Rp 1,719,123,949,405		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp--- - DAU Tahun 2019, sebesar Rp. --------	67%	
					Realisasi belanja langsung APBD TA 2019	859,012,605,954		
					DAU Tahun 2019	1,275,867,072,000		
		Alokasi Belanja pada APBD	33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total realisasi belanja Langsung dibagi APBD x 100%	Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp. 859.012.605.954 -Total realisasi Belanja APBD Tahun 2019, Sebesar Rp.2.675.948.342.711	32%	
					Realisasi belanja langsung APBD TA 2019	859,012,605,954		
					Realisasi belanja APBD TA 2019	2,675,948,342,711		
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.311.678.176.655 Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. 2.682.975.497.985	12%	
					Realisasi PAD APBD TA 2019	Rp 311,678,176,655		
					Realisasi Pendapatan APBD TA 2019	Rp 2,682,975,497,985		
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: WTP Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan opini: belum rilis	Opini tahun 2018 =WTP - Opini tahun 2019= ------	
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	SILPA Tahun 2019, sebesar Rp 382.974.503.142Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. 2.682.975.497.985	14%	
					SILPA TA 2019	Rp 382,974,503,142		
					Total pendapatan	Rp 2,682,975,497,985		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp 2.675.948.342.711Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. 3.091.935.509.199	87%	
					Realisasi Belanja TA 2019	Rp 2,675,948,342,711		
					Total anggaran Belanja APBD TA 2019	Rp 3,091,935,509,199		
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019	Jumlah Rekomendasi yang sesuai: 698, Jumlah rekomendasi sampai akhir tahun 2019: 805	86.71%	Sumber data dar Inspektorat. Data merupakan rekomendas dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD [4]	Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi dengan potensi PAD X 100%	Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp. 311.678.176.655 Potensi PAD pada APBD Tahun 2019 Rp. 379.386.200.475	82%	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)
						APBD Rp -------		
					Realisasi PAD TA 2019	Rp 311,678,176,655		
					Potensi PAD pada RPJMD	Rp 379,386,200,475		
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2019 - PAD 2018) : PAD 2018 X 100%	Total PAD pada Tahun 2019 sebesar	-21%	Penurunan PAD karena pendapatan BOS tahun 2019 tidak masuk PAD, tetapi masuk Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2018, pendapatan BOS masuk ke dalam PAD
						Rp 311,678,176,655		
						Total PAD pada Tahun 2018 sebesar		
						395,884,244,135.42		

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak ---- yang terdiri dari 1) Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan 2018 2) Wahana Tata Nugraha dari Kementrian Perhubungan 3) Juara II Kategori Situs Sejarah terpopuler Anugrah Pesona Indonesia dari Kemnetrian Pariwisata 4) Partisipasi Aktif Pemilu Serentak 2019 dari Kemendagri 5) Kabupaten/kota Peduli HAM dari Kemenkumham 6) Integrasi JDIH Nasional dari Kemenkumham (7) Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya dari Kementrian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI (8) Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori " Baik " Tahun 2019 (RSD Bagas Waras) dari Kemnepan RB (9) “Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan Catatan” tahun 2019 (Disdukcapil) (10) “Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan Catatan” tahun 2019 (DPMPTSP) 11. Tanda Penghargaan STBM Berkelanjutan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kabupaten STOP BABS / ODF Dalam Upaya Memobilisasi Masyarakat untuk Terlibat Dalam Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Tahun 2019.	11 Penghargaan	Penghargaan Tingkat Nasional

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	ADA mulai operasi pada bulan ***APRIL*** tahun **2011**	ada	
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2019	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak ijin	590 ijin	Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN >=200 Juta)

LAMPIRAN III (ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN)

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ---------- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	(27.610 / 36.270) x 100%	76,12%	
		2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD ---------- x 100 % Jumlah Pendidik PAUD	(2. 168 / 4.069) x 100 %	53.28%	
		3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	(122 / 1.549) x 100%	7.88%	
		4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ---------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas	(1.031.503 / 1.035.064) x 100%	99.66%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	(100.390 / 113.698) x 100%	88,30%	
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama -------- ---------- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan	(39.085 / 53.502) x 100%	73,05%	
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI	(13 / 111.440) x 100%	0.01%	
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	(24 / 52.249) X 100%	0.05%	
		9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan sekolah dasar ---------- x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar	(7.215 / 7.988) X 100%	90.32%	
		10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan menengah pertama ---------- x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama	(3.507 / 3.724) X 100%	94.17%	
		11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP	(860 / 871) X 100%	98.74%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	(18.835 / 18.837) X 100%	99.99%	
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	(16. 738 / 16.884) X 100%	99.14%	
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	(18.213 / 18.835) X 100%	96,70%	
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (kejar paket)	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	(54 / 3.744) X 100%	1,44%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
2	Kesehatan	16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ---------- x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten	(161 / 1.323.609)	0.01%	daya tampung / Bed RS Milik Pemda

NO	URUSAN	**NO.**	**IKK**	**RUMUS/PERSAMAAN**	**PERHITUNGAN**	**CAPAIAN KINERJA**	**KET**
		17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten	(1 / 1) X 100%	100%	RS Khusus Milik Pemda

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan ---------- Jumlah Penduduk Kabupaten	(1.050 / 1.323.609) x 100	0.08%	Tenaga Kesehatan khusus ASN
		19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ---------- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten	(15.702 / 16.835) X 100 %	93.3%	
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ---------- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten	(15.680 / 15.681) X 100 %	99.99%	
		21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	(15.335 / 15.681) X 100%	97.79%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		22	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten	(62.455 / 65.212) X 100%	95.77%	
		23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	(17532 / 17532) X 100%	100%	
		24	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	(650.185 / 726.968) X 100%	89.44%	
		25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	(179.167 / 196.407) X 100%	91.22%	
		26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	(156.197 / 315.318) x 100%	49.54%	
		27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten	(48.245 / 37.485) x 100%	128.70%	berdasarkan perhitungan penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan (1 penderita bisa mendapat pelayanan lebih dari sekali)
		28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	(2.728 / 2.929) x 100%	93.1%	
		29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten	(6.426 / 13.055) x 100%	49.22%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	(17.045 / 18.844) x 100%	90.45%	
		31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI ----------x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	(401 / 401) x 100%	100%	
		32	Presentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu ---------- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama	(49 / 49) x 100%	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ---------- x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	(320 / 320) x 100%	100%	
		34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan ---------- x 100.000 Jumlah Ibu Melahirkan	(12 / 15.681) X 100.000	76.5	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**35**	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) KM ---------- x 100 % Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut KM	(533, 56 + 128,47 / 769, 63) x 100%	86.02%	
		36	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi/ditingkatkan ---------- x 100% Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/ direkonstruksi/rusak	(40,07 / 55,6) x 100%	72.1%	
		37	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ----------x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	Wilayah sungai menjadi kewenangan Provinsi		
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yangterlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	Tidak memiliki Kawasan Pantai		
		39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten. ---------- x 100 %	(305.063 / 380.591) x 100%	80.16%	data merupakan jumlah rumah yang memiliki akses terhadap air bersih

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
				Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.			
		40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ---------- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A	(421.407 / 422. 284) x 100%	99.79%	(data merupakan data KK yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak)
		41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten		.....%	
		42	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ---------- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	(2 / 13) x 100%	15%	
		43	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi ---------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	(421.407 / 422. 284) x 100%	99.79%	(data merupakan data KK yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak)
		44	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ---------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	(305.063 / 380.591) x 100%	80.16%	data merupakan jumlah rumah yang memiliki akses terhadap air bersih
		45	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh ---------- x 100 % Luas Wilayah	(41,65 / 65.556 ha)	0.06%	
		46	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau ---------- x 100 %	(28.278,72 / 65.556 ha) x 100% 28.275,52 Ha (RTH)+ HUTAN GERGUNUNG 3,8 Ha dikelola DLHK	43.14%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
				Luas wilayah	65556 (Luas wilayah)		
		47	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ---------- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	(9.945 / 29.713) x 100%	33,47%	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	(34 / 34) x 100%	100%	
		49	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	belum ada relokasi bagi masyarakat terdampak program pemerintah Kabupaten		
		50	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	(97,56 ha / 139,3 ha)	70.04%	Luas Pemukiman Kumuh yang ditangani 2019
		51	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ---------- x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten	(11. 266 / 380.591) x 100%	2.96%	rumah kumuh = Rumah Tidak Layak Huni
		52	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten	(3 / 5) x 100%	60%	data perumahan
		53	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ---------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	380.591 - (24.774 - 13.508) / 380.591 x 100% = (369.325 / 380.591) x 100%	97%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	54	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ---------- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	(19 / 20) x 100%	95%	
		55	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	(34 / 34) x 100%	100%	
		56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	908,520	908,520	
		57	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1420	1420	
		58	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	200	200	
		59	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran danenyelamatan/ Perangkat Daerah ---------- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	(68 / 231) x 100%	29%	
		60	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	**7 Km dalam 15 Menit**	**7 Km dalam 15 Menit**	
		61	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS ---------- x 100 % Jumlah Personil Satpol PP	(2 / 61) x 100%	3.28%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ---------- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	(2963 / 10974) x 100%	27%	
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ---------- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	(333 / 333) x 100%	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		64	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ---------- x100% Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	(1 / 10.974) x 100%	0.01%	
		65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga ---------- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	(26 / 62) x 100%	42%	
		66	Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada ---------- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina	(38 / 10.974)	0.35%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
7	Tenaga Kerja	67	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ---------- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	Belum ada dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah		
		68	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	(1389 / 40.991) x 100%	3.39%	
		69	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ---------- x 100% Jumlah tenaga kerja	(27.829.653.910.000 / 40.991) x 100%	67,892,107,804.15	
		70	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100% Jumlah Perusahaan	(66 / 751) x 100%	8.79%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		71	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---------- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	(1517 / 8786) x 100%	17.27%	
		72	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial ---------- x 100% Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	(3 / 5) x 100%	60%	
		73	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi ---------- x 100% Jumlah Instruktur	tidak memiliki instruktur bersertifikat Kompetensi. Belum Punya BLK yang aktif untuk pelatihan		khusus balai latihan kerja milik pemda

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		74	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan ---------- x 100% Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	(92 / 129) x 100%	71.3%	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ---------- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	(7.018.403.750 / 998.542.421.277,52) x 100%	0.70%	
		76	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi ---------- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	(26 / 341.276) x 100%	0.008%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		77	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ---------- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	(17 / 523.811) x 100.000	3,25	
		78	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yng terlayani ---------- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	(17 / 17) x 100%	100%	
		79	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ---------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan	rumus yang benar angkatan kerja perempuan dibagi Pend Usia kerja perempuan (264.941 / 476.341) x 100%	55.6%	data tahun 2018

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
				Angkatan Kerja Perempuan	264,941		
				Pend Usia Kerja Perempuan	476,341		
9	Pangan	80	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ---------- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	Ketersediaan beras dan jagung = 370.802,43 ton Kebutuhan beras dan jagung = 127.598,55 ton (370.802,43 / 127.598,55) x 100%	290.6%	
		81	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada	Lokasi DPKPP. Stock beras 6025 kg dan 11250 kg GKG	ada	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
10	Pertanahan	82	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ---------- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	(977.260 M^2 / 977.260 M^2) x 100%	100%	luas tanah sesuai peruntukan merupakan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin lokasi dan setelah ada pertimbangan teknis dari BPN , melalui OSS Ijin lokasi diterbitkan
		83	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ---------- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	(65.890 M^2 / 65.890 M^2)	100%	data dari Permohonan Hak Pakai dan Penerbitan Ijin Hak Pakai dari BPN untuk Pembangunan Fasilitas Umum
		84	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ---------- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	(977.260 M^2 / 977.260 M^2) x 100%	100%	luas tanah sesuai peruntukan merupakan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin lokasi dan setelah ada pertimbangan teknis dari BPN , melalui OSS Ijin lokasi diterbitkan
		85	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL); ---------- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	tahun 2019 tidak ada Tanah obyek Landreform yang diredistribusikan		

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		86	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	(3.987.474,28 m² / 14.293.408,64 m²) x 100%	27.9%	Tanah Milik Pemda
		87	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ---------- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	pada tahun 2019 Tidak ada izin membuka tanah/hutan bagi masyarakat dikarenakan tanah/hutan dikuasai oleh Perhutani		
		88	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ---------- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	pada tahun 2019 tidak ada pengaduan sengketa tanah garapan		
11	Lingkungan Hidup	89	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		50.24	50.24	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		90	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani ---------- x 100% Total vol timbunan sampah Kabupaten	(74.000 / 397.082,7 kg) x 100%	18.80%	
					* Vol sampah yang ditangani DPU dan PR = 216 M^3 = 64,8 ton = 64.800 kg, konversi 1 M^3 = 0,3 ton sampah, pengurangan sampah TPS 3 R dan Bank Sampah = 10 ton = 10.000 kg		

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		91	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ---------- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Pada tahun 2019 tidak ada yang melanggar terhadap ijin lingkungan dan ijin PPLH dari Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	92	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran ---------- x 100% Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	(310.122 / 347.559) X 100%	89.23%	
		93	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ---------- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	(965.471 / 1.013.611) X 100%	95.3%	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	(55 / 114) x 100%	48%	
		95	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	(4 / 193) x 100%	2%	
		96	PKK aktif	Jumlah PKK aktif ---------- x 100 % Jumlah PKK	(428 / 428) x 100%	100%	
		97	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif ---------- x 100 % Total Posyandu	(2313 / 2313) x 100%	100%	

NO	URUSAN	**NO.**	**IKK**	**RUMUS/PERSAMAAN**	**PERHITUNGAN**	**CAPAIAN KINERJA**	**KET**
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.1	2.1	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		99	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		0,42	0,42	
		100	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern "---------- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur	(141.315 / 197.949)x 100%	71.39%	
		101	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ---------- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur	(14.240 + 17.254) / 197.949 x 100%	15.9%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
15	Perhubungan	102	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektvitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)	0.3	0.3	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
				Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
		103	Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0.52	0.52	
16	Komunikasi dan Informatika	104	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- x 100% Jumlah PD	(51 / 51) X 100%	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		105	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ---------- x 100% Jumlah Layanan Publik	layanan yang online = (14 / 557) x 100%	2.51%	Perbub No 49 Tahun 2018 Tentang Integrasi Satu Data, 14/557 (Angka 14 itu merupakan jumlah pelayanan publik yang online, sedangkan angka 557 di dapat dari daftar pelayanan publik (SIPP) dari bagian organisasi (Bagor))

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		106	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ---------- x 100% Jumlah penduduk	sasaran penduduk di atas 10 tahun = (1.147.261 / 1.323.609) x 100%	86.68%	semua warga Klaten usia produktif menjadi sasaran penyebaran informasi Publik melalui (Radio Siaran Pemerintah Daerah Klaten, klatenkab.go.id, sosial media dan layanan informasi lainnya
		107	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ADA, Perda No 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan E - Government	ADA	
		108	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi ---------- x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	untuk ASN tidak ada yang memiliki serifikat Kompetensi	tidak ada	a. Untuk ASN Tidak Ada b. Untuk THL Ada

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	109	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	(287 / 889) x 100%	32.30%	
		110	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha (peningkatan usaha mikro/ (tahun 2019 - 2018) ---------- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan (data 2018)	(38.838 - 38.789) / 38.789 X 100% tahun 2019 usaha mikro = 38.838, kecil = 11.189, menengah = 5030, tahun 2018 mikro = 38.789, kecil = 11.189, menengah = 5030	0.13%	menggunakan data pertumbuhan usaha Mikro di tahun 2019
		111	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha ---------- x 100% Jumlah usaha kecil keseluruhan	(159 / 11.189) x 100%	1.42%	
		112	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ---------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	(713 / 889) x 100%	80.2%	
18	Penanaman Modal	113	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten ---------- x 100% Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	PMA : (160.872.497.498 - 41.211.500.000) ---------- x 100% 41.211.500.000	272%	
					PMDN : (1.914.915.766.292 - 229.788.500.000) ---------- x 100% 229.788.500.000	733%	
19	Kepemudaan dan Olahraga	114	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten ---------- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	(150 / 276.762)	0.05%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		115	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten ---------- x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	(200.000 / 276.762)	72%	
		116	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	11 medali	11	
		117	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan ---------- x 100% jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi	(196 / 215) x 100%	91.2%	
20	Statistik	118	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah PD	(51 / 51) x 100 %	100%	
		119	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah PD	(51 / 51) x 100 %	100%	
21	Persandian	120	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100% Jumlah area penilaian	531 (data yang diamankan) : 1490 (data yang tidak diamankan)	36%	Mengunakan persentase data yang diamankan
22	Kebudayaan	121	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ---------- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	(13 / 93)	14%	
		122	Penyelenggaraan festifal seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	17	Jumlah	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
23	Perpustakaan	123	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca	Nilai Indeks Kegemaran membaca = 66,35	66.35	berdasarkan survey kegemaran membaca
		124	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	x = a′+b′/a+b × 100% x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks) a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)	x = a' + b' / a+b x 100 % = (11+0) / (11+0) x 100% a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan = 11 b' = kolleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan =0 a= koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) = 11 b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) =0	100%	
		125	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ---------- X 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	(37.457 / 49.786) x 100%	75.24%	
24	Kearsipan	126	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1. T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	T = (80 + 100 + 100 + 0) / 4 = 70%	70%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		127	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	T=(80+70+70+90+80+70) / 6 = 76.65%	76.65%	
	URUSAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	128	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	28.276 ton (tangkap = 153 ton + budidaya = 28.123 ton)	28276 ton	
		129	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional ---------- x 100 % Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	tidak memiliki Tempat pelelangan ikan		
26	Pariwisata	130	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ---------- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1	(183.559 - 222.373)/ 222.373 x 100 %	-17.5%	
		131	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ---------- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1	(3.884.024 -2.483.945) /2.483.945 x 100%	56%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		132	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ---------- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	(99.878 / 785) x 100%	12723%	
		133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ---------- x 100% Jumlah total PDRB	PDRB dari sektor Pariwisata = 2,107,384,190,000 PDRB = 39,799,207,150,000	5.30%	PDRB dari pariwisata = PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan
		134	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	Jumlah Kontribusi PAD dari sektor pariwisata ---------- x 100% Jumlah total PAD	2.384.397.000 / 311.678.176.655,44) X 100%	0.8%	
				PAD PARIWISATA	2,384,397,000		
				PAD	311,678,176,655.44		
27	Pertanian	135	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per tahun ---------- Luas Panen	Produksi Pangan = 604.862 ton = 60.486.200 kw Luas panen 85.051,5 Ha	711 kw / ha	Produksi pangan 7 komoditas dan luas panen 7 komoditas
		136	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ---------- x 100%	PDRB Pertanian = 4,206,652,770,000	10.57%	data PDRB atas DASAR harga BERLAKU tahun

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
				Jumlah total PDRB	PDRB = 39,799,207,150,000		2019
		137	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ---------- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Jumlah kasus 2018 sebanyak 134. Jumlah kasus 2019 sebanyak 188.	40,30%	
28	Energi Sumber DayaMineral	138	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ---------- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	Tidak ada Perusahaan yang memanfaatkan Panas Bumi di Kab. Klaten		
29	Perdagangan	139	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ---------- x 100% Jumlah total PDRB	PDRB = 39,799,207,150,000 PDRB Sektor Perdagangan = 6,430,015,480,000.00	16.16%	data PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019
		140	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ---------- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten	(340 / 417) x 100%	81.53%	
		141	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ---------- x 100% RDKK	Realisasi = 53362,93 ton RDKK = 85186 ton	62.6%	
	- -	142	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ---------- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	(300 / 8000) x 100%	3.75%	
30	Perindusrian	143	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ---------- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	(34.690 - 34.686) / 34.686 x 100%	0.01%	
		144	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	(Jumlah jenis prioritas Kabupaten ---------- x 100% (Jumlah jenis prioritas Nasional	(4 / 10)	40%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
				Prioritas Nasional : a. industri pangan; b. industri Farmasi, kosmetik dan alkes; c. industri tekstil, kulit, alas kaki; d. industri alat transportasi; e. Industri elektronika dan telematika / ICT; f. industri pembangkit energi; g. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri; h. industri hulu argo i. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam j. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara (yang diakomodir dalam prioritas Kabupaten adalah poin a, c, g, i)	Prioritas Kabupaten : a. industri makanan; b. industri pengolahan tembakau; c. industri tekstil; d. industri pakaian jadi; e. industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; f. industri logam dasar; g. industri furnitur;		
		145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	(167 / 300) x 100%	55.67%	
		146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	Tidak ada Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan		
		147	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	tidak ada Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten		Di kawasan Kabupaten Klaten tidak ada kawasan industri, adanya peruntukan zona industri sesuai Perda RTRW No. 11 / 2011
31	Transmigrasi	148	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Tidak ada fasilitasi pembangunan dan pembinaan pemukiman transmigrasi		

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
			pembinaannya		(Klaten tidak menjadi tujuan transmigrasi)		
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten	Menunjukkan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten	39 Sistem Informasi Manajemen	39	
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD ---------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	(171 / 181) x 100%	94,5%	
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ---------- x 100 % Jumlah APBD		18.92%	
				Total Belanja APBD	Rp 2,675,948,342,711		
				BTL Pegawai	**998,225,472,820**		
				BTL Pegawai Guru	**392,485,206,632**		
				BTL Pegawai Nakes	**99,571,302,447**		
				BTL Pegawai di luar guru + nakes	**506,168,963,741**		
		4	Rasio PAD	Jumlah PAD ---------- X 100% Jumlah PDRB non migas	PAD = Rp 311,678,176,655 PDRB = 39,799,207,150,000 PDRB Non Migas 39,799,207,150,000	0.8%	PDRB TAHUN 2019 Atas Dasar Harga berlaku
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----------X 100% jumlah belanja APBD	(2.675.948.342.711 - 764.461.701.387) / 2.675.948.342.711 X 100%	71%	
				Transfer Expenditures	764,461,701,387		
				Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan	Rp 2,675,948,342,711		
				Belanja APBD	Rp 2,675,948,342,711		
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level 3	level 3	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level 3	level 3	
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ---------- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n	pada tahun 2019 tidak ada Kontrak Infrastruktur dengan nilai besar yang pembangunannya dalam 3 kuartal / 9 bulan / 270 hari. Tidak ada kontrak multi years di Kabupaten Klaten pada tahun 2019		
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----------X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	(854 / 4.949) x 100%	17.00%	kompetitif terdiri dari tender dan pengadaan langsung dengan nilai ≥ 50 juta
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ---------- X 100% Total belanja langsung	(767.116.046.749,68 / 858.817.747.879,68) x 100%	89.32%	Belanja Langsung melalui pengadaan terdiri dari belanja barang jasa dan belanja modal
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----------X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(136 / 2985) x 100%	4,56%	
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- X 100% Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	36 / 160	22.5%	
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisas - ---------X 100% Total belanja APBD dikurangi satu	(2.675.948.342.711 / (3 091 935 509.198,52 - 1) X 100%	86.5%	
			Realisai belanja	2,675,948,342,711			
			Total Belanja APBD	3,091,935,509,199			
			Total belanja APBD dikurangi satu	3,091,935,509,198			

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
		14	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	
		15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ---------- X 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	Realisasi SILPA 2019 = Rp 382,974,503,142 Total Belanja Anggaran tahun 2018 = 2,611,007,499,826	14.7%	
		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----------X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Alokasi anggaran dan realisasi anggaran dapat diakses di webiste pemda	100%	dokumen APBD dapat diakses di website PEMDA
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ---------- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	(11/ 11) X 100%	100%	Dokumen : 1. RKA PPKD, 2. DPA PPKD, 3. APBD, 4. PERDA APBA, 5. RKA SKPD, 6. DPA SKPD, 7. PROGRAM KEGIATAN, 8. KAK, 9. PERUBAHAN APBD, 10. RKPD PERUBAHAN ADA 3, 11. APBD
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	4 kegiatan	4 kegiatan	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	6 kegiatan	6 kegiatan	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	2	
					alokasi	Rp	Rp 16,325,000,000	89%
					Realisasi	Rp	Rp 14,546,929,919	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	28	
					1. SOP Mutasi Intern PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten			
					2. SOP Mutasi Masuk PNS ke Kabupaten Klaten			
					3. SOP Mutasi Keluar PNS dari Kabupaten Klaten			
					4. SOP Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)			
					5. SOP Penyelesaian Konversi NIP			
					6. SOP Penyelesaian SK Pensiun			
					7. SOP Kenaikan Pangkat			
					8. SOP Kenaikan Gaji Berkala			
					9. SOP Pemutakhiran Data PNS			
					10. SOP Pengiriman Diklat Teknis			
					11. SOP Penyelenggaraan Diklat Teknis			
					12. SOP Pengiriman Diklat Kepemimpinan			
					13. SOP Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan			
					14. SOP Pengiriman Diklat Prajabatan			
					15. SOP Penyelenggaraan Diklat Prajabatan			
					16. SOP Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS			
					17. SOP Pengurusan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya			
					18. SOP Pelayanan Pengurusan Kartu Istri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU)			
					19. SOP Pencarian Data dan Informasi			
					20. SOP Pengurusan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG)			
					21. SOP Pengelolaan Arsip Kepegawaian			
					22. SOP Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu			
					23. SOP Pemberian Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar			
					24. SOP Pemberian Ijin Penggunaan Gelar			
					25. SOP Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu			
					26. SOP Pengiriman Ujian Dinas			
					27. SOP Pemberian Tugas Belajar			
					28. SOP Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	14	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	14	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Arsiparis	1		
					2. Pranata Komputer	6		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	40	0.40%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	13	92.86%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	14	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	14	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	14	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	6	100.00%
					Jumlah program RENJA OPD	program	6	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	6	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	6	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	6	100.00%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	21,116,355,000	0.68%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	18,771,132,190	0.70%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	15,399,227,558	82.04%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	18,771,132,190	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	3,371,904,632	17.96%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	18,771,132,190	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	14,208,015	0.64%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,214,366,955	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	6	
					alokasi	Rp	5,976,900,000	86%
					Realisasi	Rp	5,114,044,516	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	
					SOP Penyusunan Renca Kerja Pemerintah			
					SOP koordinasi perencanaan Bidang Ekonomi			
					SOP Koordinasi perencanaan Pembangunan			
					SOP Koordinasi Perencanaan Bidang Fsisik dan Prasarana			
					SOP Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Evaluasi dan Pengembangan			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
					PERDA RPJPD No 7 tahun 2009			
					Perda RPJMD No 13 tahun 2018			
					PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	15	88%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ADA	
					1. Jabatan Fungsiona Perencana	orang	5	
					2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer	orang	1	
							-	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	36	0.36%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	11	73.33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	15	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	15	100.00%

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	15	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	Ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	Ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	Ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	8	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	8	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	8	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	8	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	8	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	8	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	11,619,050,000	0.38%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,943,466,672	0.37%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	6,155,449,828	61.90%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,943,466,672	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	3,788,016,844	38.10%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,943,466,672	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	6,307,405,033	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak Ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	Ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BPBD KABUPATEN KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	3	
					alokasi	Rp	19,561,124,440	83%
					Realisasi	Rp	16,153,221,100	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	2	
					1. SOP Kedaruratan erupsi merapi			
					2. SOP Gempa			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERDA Nomor 14 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten klaten			
					Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten.			
					Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Klaten			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	13	93%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	14	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer	2 orang		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	29	0.29%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang		0.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	13	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	13	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	5	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	5	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	5	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	5	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	5	100.0%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	24,535,819,440	0.8%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	20,417,610,743	0.8%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	18,107,998,183	88.7%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	20,417,610,743	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	2,309,612,560	11.3%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	20,417,610,743	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	belum ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	24,136,010,119	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	1	76%
					alokasi	Rp	**15,739,178,000**	
					Realisasi	Rp	**12,025,963,240**	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	10	
					1. SOP ttg Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah			
					2. SOP ttg Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			
					3. SOP ttentang Pengelolaan Pajak Daerah			
					4. SOP ttg pelayanan pajak Daerah			
					5. SOP ttg Pengelolaan Pajak Lesehan Harian			
					6. SOP ttg Penelitian DPA/DPA Perubahan Pelaksana Anggaran			
					7. SOP ttg Penelitian RKA/RKA Perubahan Pelaksana Anggaran			
					8. SOP ttg Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Pinjam Pakai)			
					9. SOP ttg Pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan BMD			
					10. SOP ttg Pemanfaatan BMD			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
				1	Perda Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas perda Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok pokok pengelolaan keuanga daerah			
				2	Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok pokok pengelolaan keuangan daerah			
				3	Perda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang perubahan APBD Kabupaten klaten TA 2019			
				4	Perda Nomor 26 tahun 2018 tentang APBD Kabupaten klaten TA.2019			
				5	Perbub Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Klaten TA 2019			
				6	Perbub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Klaten TA 2019			
				7	Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD			
				8	Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Klaten TA.2018			
				9	Perbub No. 15 tahun 2019 Tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bansos Kabupaten Klaten			
				10	Perbub No 49 Tahun 2010 tentang Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB Kabupaten Klaten			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11	Perbub No 49 Tahun 2017 Tentang Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD Kab. Klaten			
				12	Perbub No 31 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan dana BOS pada satuan Pendidikan Negeri di kabupaten klaten			
				13	Perbub No 55 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten			
				14	Perbub No 14 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah Kabupaten Klaten			
				15	Perbub No 60 Tahun 2018 tentang perubahan Lampiran perbub nomor 25 Tahun 2017 Tentang kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Klaten			
				16	Perbub No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan BLUD			
				17	Perda No 8 tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah			
				18	Perbub No 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas lampiran Perbub Klaten no 59 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan perda kab klaten no 8 tahun 2010 Tentang pajak Air tanah			
				19	Perbub no 49 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan perda no 8 tahun 2010 tentang pajak air tanah			
				20	Perda No 9 Tahun 2010 tentang BPHTB			
				21	Perda No 59 Tahun 2010 tentang sistem dan prosedur pemungutan BPHTB			
				22	Perda No 16 tahun 2011 tentang pajak daerah			
				23	Perbub nomor 45 tahun 2011 tentang Tata cara pemungutan pajak daerah			
				24	Perbub nomor 46 tahun 2011 tentang Tata cara pemerikasaan pajak daerah			
				25	Perbub nomor 47 tahun 2011 tentang Tata cara pemungutan dan pemerikasaan Retribusi Daerah			
				26	Perbub nomor 17 tahun 2018 tentang Tata cara pemungutan dan pemerikasaan Retribusi Daerah			
				27	Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang PBB-P2			
				28	Perbub Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemungutan PBB-P2			
				29	Perbub Nomor 26 Tahun 2012 tentang Styandar operasi dan prosedur pemungutan PBB-P2			
				30	Perbub Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembetulan, Pembatalan , Pengurangan PBB-P2			
				31	Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum			
				32	Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas perda No 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum			
				33	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas perda No 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum			
				34	Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha			
				35	Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Retribusi Jasa Usaha			
				36	Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu			
				37	Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	25	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	25	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	Ada	
					1. Pranata Komputer		1	
					2. Arsiparis		1	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	104	1.05%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	11	44.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	25	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	25	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	25	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	4	100.00%
					Jumlah program RENJA OPD	program	4	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	4	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	4	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	4	100.00%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	903,222,573,550	29.21%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	866,372,659,707.00	32.38%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	32,327,751,133	3.73%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	866,372,659,707.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	834,044,908,574	96.27%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	866,372,659,707.00	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	22,091,120,479	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	4	
					alokasi	Rp	1,466,000,000	61%
					Realisasi	Rp	889,218,267	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	tidak ada	
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ADA	ADA
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN			
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	75%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	8	0.08%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	3	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	6	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	6	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	6	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	6	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	6	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	3,233,395,000.00	0.1%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,396,706,536.00	0.1%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	1,396,458,674.00	58.3%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,396,706,536.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,000,247,862.00	41.7%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,396,706,536.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	652,108,657	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada (SKM Setda)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN KESRA SETDA KAB. KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	6	
					alokasi	Rp	5,463,052,000	75%
					Realisasi	Rp	4,112,797,110	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	3	
					1. SOP ttg Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan			
					2. SOP ttg Perencanaan Anggaran Belanja Hibah			
					3. SOP ttg Pencairan Belanja Hibah			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ADA	ada
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	15	0.15%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	50%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	8	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	8	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	8	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	8	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	8	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	8	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	7,081,146,000	0.23%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	5,438,115,438	0.20%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	4,313,457,336	79.32%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	5,438,115,438	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,124,658,102	20.68%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	5,438,115,438	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	34,067,462,252	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada (SKM Setda)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	2	
					alokasi	Rp	2,681,500,000	83%
					Realisasi	Rp	2,234,571,124	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	6	
					1. SOP ttg bantuan Hukum			
					2. SOP ttg Peraturan Bupati			
					3. SOP ttg Keputusan Bupati			
					4. SOP ttg Paraf Keputusan Bupati			
					5. SOP ttg Paraf Peraturan Bupati			
					6. SOP ttg pendokumentasian Produk hukum Daerah			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					Perda Nomor 21 tahun 2018 ttg Bantuan Hukum			
					Perda No 16 tahun 2017 ttg Pembentukan Produk Hukum di Daerah			
					Perbup No 73 Tahun 2019 ttg Petunjuk pelaksanakan Perda No 21 tahun 2018 ttg Bankumaskin			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	75%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	14	0.14%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	67%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	3	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	4	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	4	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	4	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	4	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	4	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	4,228,063,000	0.1%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	3,583,472,235	0.1%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	2,524,404,028	70.4%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	3,583,472,235	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,059,068,207	29.6%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	3,583,472,235	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,636,066,643	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada (SKM Setda)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUMAS SETDA KAB. KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	3	
					alokasi	Rp	3,374,505,000	95%
					Realisasi	Rp	3,195,765,442	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	19	
					1. SOP Naskah Sambutan Bupati			
					2. SOP Liputan dan Dokumentasi			
					3. SOP Pembuatan Release			
					4. SOP Penyiaran dan pemberitaan			
					5. SOP Protokoler			
					dan seterusnya total ada 19 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer		1	
					2. Pranata Humas		4	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	22	0.22%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	25%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	5	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	5	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	5	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	5	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	5	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	5,272,944,000	0.2%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	4,807,595,774	0.2%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	3,196,265,442	66.5%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	4,807,595,774	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,611,330,332	33.5%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	4,807,595,774	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	6,853,962,763	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada (SKM Setda)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	1	
					alokasi	Rp	967,457,000	79%
					Realisasi	Rp	767,382,501	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	
					1. SOP ttg Perbup ttg Perbup pelaksanaan Kegiatan			
					2. SOP fasilitasi dan koordinasi pelak pemb			
					3. SOP peningkatan koord pelaks pemb			
					4. SOP ttg SOP monitoring dan evaluasi			
					5. SOP pengendalian pelak pemb			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ADA	
					PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	7	0.07%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	75%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	5	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	5	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	5	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	5	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	5	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,329,625,000	0.1%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,861,377,314	0.1%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	1,170,110,800	62.9%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,861,377,314	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	691,266,514	37.1%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,861,377,314	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,178,126,265	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada (SKM Setda)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	5	
					alokasi	Rp	1,556,000,000	77%
					Realisasi	Rp	1,191,932,629	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	7	
					1. SOP ttg Monitoring Kinerja BUMD			
					2. SOP ttg Intensifikasi PAD dan Sumbangan Pihak Ketiga			
					3. SOP ttg Penyusunan Usulan Kegiatan DBHCHT Kabupaten Klaten			
					4. SOP ttg Penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan DBHCHT Kabupaten Klaten			
					5. SOP ttg Pengesahan Surat Pernyataan Penganggaran Kembali Sisa DBHCHT Kabupaten Klaten			
					6. SOP ttg Penyusunan Laporan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Klaten			
					7. SOP ttg Penyusunan Laporan Penggunaan Energi Listrik dan Air Perangkat Daerah Kabupaten Klaten			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan	ADA	ada	
					Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga			
					Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten			
					Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten			
					Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten			
					Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten			
					Perda No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Klaten No. 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Klaten pada BUMD			
					Perbup No. 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kab. Klaten Tahun 2019			
					Perbup No. 29 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komisaris, dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Klaten			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	75%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	9	0.09%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	66.67%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	3	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	8	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	8	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	8	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	8	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	8	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	8	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,765,606,000	0.1%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,211,945,478	0.1%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	1,333,505,219	60.3%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,211,945,478	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	878,440,259	39.7%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,211,945,478	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	777,377,394	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada (SKM Setda)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KAB. KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	1	
					alokasi	Rp	523,513,000	74%
					Realisasi	Rp	385,890,557	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	7	
					1. SOP tentang Proses Layanan Pengadaan Barang Jasa			
					2. SOP tentang Regristrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa			
					3. SOP tentang Pendampingan UPLOAD di Bidding Room			
					4. SOP tentang Perubahan Data Penyedia Barang/Jasa			
					5. SOP tentang Perubahan Jadwal Batas Akhir UPLOAD dan awal Pembukaan Dokumen			
					6. SOP tentang Pemulihan Keadaan Aplikasi LPSE Akibat Kendala Tehnis			
					7. SOP tentang Uji Forensik			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					Perbup Nomor 80 tahun 2019 ttg Tata Cara Pengadaan Barjas yang dibiayai dari APBD Kab. Klaten			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	14	0.14%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	75%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	4	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	5	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	5	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	5	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	5	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	5	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	3,163,710,000	0.10%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,297,457,106	0.09%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	585,831,458	25.50%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,297,457,106	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,711,625,648	74.50%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,297,457,106	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	827,843,641	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada (SKM Setda)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	3	
					alokasi	Rp	1,464,000,000	74%
					Realisasi	Rp	1,088,949,578	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	11	
					1. SOP ttg analisas jabatan			
					2. SOP ttg penyusunan peraturan daerah SOTK			
					3. SOP ttg penyusunan peraturan bupati tupoksi			
					4. SOP ttg penyusunan lakip setda			
					5. SOP ttg penyusunan lakip kabupaten			
					6. SOP ttg penyusunana IKU			
					7. SOP ttg penyusunan IKM			
					8. SOP ttg penyusunan penetapan kinerja			
					9. SOP ttg penyusunan peraturan bupati tata naskah dinas			
					10. SOP ttg penyusunan peraturan bupati pakaian dinas			
					11. SOP ttg penyusunan peraturan bupati tata hubungan kerja			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
					Perda No 8 tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan PD Kabupaten Klaten			
					Perda No 14 tahun 2018 ttg Penyuelengaraan Pelayanan Publik			
					Perbup SOTK sebanyak 25			
					Perbup 57 tahun 2017 ttg Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2019			
					Perbup 88 tahun 2019 ttg Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemkab Klaten			
					Perbup 82 tahun 2019 ttg Perubahan Lampiuran Bupati Klaten nomor 34 tahun 2016 ttg Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab. Klaten tahun 2016 - 2021			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	75%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Jabatan pranata komputer		1	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	15	0.15%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	100%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	3	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	6	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	6	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	6	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	6	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	6	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	3,209,258,000	0.10%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,561,005,339	0.10%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	1,275,571,095	49.81%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,561,005,339	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,285,434,244	50.19%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,561,005,339	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	725,501,118	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada (SKM Setda)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM SETDA KAB. KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	1	
					alokasi	Rp	3,196,200,000	81%
					Realisasi	Rp	2,577,111,606	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	
					1. SOP ttg pinjam ruang			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	59	0.60%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	50.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	5	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	5	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	5	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	5	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	5	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	22,455,190,000	0.73%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	19,017,161,600	0.71%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	13,666,146,719	71.86%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	19,017,161,600	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	5,351,014,881	28.14%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	19,017,161,600	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	41,402,207,718	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada (SKM Setda)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN KAB. KLATEN
URUSAN : PENDIDIKAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	6	
					alokasi	Rp	47,136,150,500	88%
					Realisasi	Rp	41,424,538,889	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	10	
					1. SOP mutasi siswa			
					2. SOP Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)			
					3. SOP Ijin Pendirian Sekolah			
					4. SOP Pengesahan nilai piagam siswa			
					5. SOP Legalisir Ijazah			
					6. SOP Pelaksanaan Lomba Siswa			
					7. SOP Pengesahan Kurikulum SD/SMP			
					8. SOP Pelaksanaan Lomba PTK Berprestasi			
					9. SOP Rekomendasi Outing Class			
					10. SOP Tunjangan Profesi			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
					1. Peraturan Bupati Klaten tentang PPDB			
					2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Klaten			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	19	90%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	21	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	6.00
					1. Guru			
					2. Pengawas Sekolah			
					3. Penilik Sekolah			
					4. Pamong Belajar			
					5. Pranata Komputer			
					6. Analisis Kepegawaian			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	6,132	62.08%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	11%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	19	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	19	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	19	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	11	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	11	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	11	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	11	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	11	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	11	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,031,077,250,011	33.3%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	840,660,035,421	31.4%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	147,818,803,077	17.6%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	840,660,035,421	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	692,841,232,344	82.4%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	840,660,035,421	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	911,780,273,120.39	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KAB. KLATEN DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN
URUSAN : KESEHATAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	60,529,377,156	75%
					Realisasi	Rp	45,648,925,593	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	10	ada 10
					SOP Laporan Kematian Ibu			
					SOP Laporan Kematian Bayi			
					SOP Laporan Kematian Balita			
					SOP Penanganan Gizi Buruk			
					SOP Verifikasi Peserta Jamkesda			
					SOP Fogging Fokus Penanggulangan DBD			
					SOP Pelayanan Publik Surat Ijin Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis di instansi			
					SOP Pelaporan Pemeriksaan Kesehatan Haji Elektronik (SISKOHATKES)			
					SOP Distribbusi Logistik Haji			
					SOP Tata Laksana Kasus AFP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
					Perda No 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Klaten			
					Perda No 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif			
					Perbup No 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Klaten			
					Perbup No.7 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Klaten			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	55	93%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	59	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada (15 jabatan)	ada
					1. Dokter Umum			
					2. Dokter Gigi			
					3. Perawat			
					4. Perawat Gigi			
					5. Bidan			
					6. Sanitarian			
					7. Penyuluh Kesmas			
					8. Epidemiolog			
					9. Apoteker			
					10. Asisten Apoteker			
					11. Analis Kesehatan			
					12. Nutrisionis			
					13. Rekam Medik			
					14. Fisioterapis			
					15. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	1383	14.00%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	19	34.55%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	55	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	55	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	55	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	16	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	16	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	15	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	15	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	15	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	15	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	273,281,712,171	8.8%

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	225,207,481,128	8.4%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	132,288,772,923	58.7%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	225,207,481,128	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	92,918,708,205	41.3%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	225,207,481,128	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	19,070,432,268	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ADA (Perijinan dan Laboratorium)	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN : ADMINISTRASI KEPENDUUDKAN DAN CATATAN SIPIL

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	1	
					alokasi	Rp	3,998,689,000	92%
					Realisasi	Rp	3,685,734,035	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	29	
					1. SOP Permohonan Kartu Keluarga			
					2. SOP Permohonan KTP-el			
					3. SOP Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan			
					4. SOP Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kpendudukan			
					5. SOP Kerjasama Administrasi Kependudukan			
					dan seterusnya total ada 29 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan			
					Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	16	76%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	21	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer		6 orang	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	37	0.37%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	13	81.25%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	16	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	16	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	16	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	4	100.00%
					Jumlah program RENJA OPD	program	4	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	4	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	4	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	4	100.00%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	11,141,366,000.00	0.36%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,883,944,034.00	0.37%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	6,502,483,827.00	65.79%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,883,944,034.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	3,381,460,207.00	34.21%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,883,944,034.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	12,487,973,259	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KLATEN
URUSAN : 1. 1. KOMINFO
2. STATISTIK
3. PERSANDIAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN KOMINFO	URUSAN STATISTIK	URUSAN PERSANDIAN	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	4	1	1			
					alokasi	Rp	8,751,950,000	200,000,000	30,000,000	92%	95%	91%
					Realisasi	Rp	8,070,109,769	189,082,246	27,333,150			
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	7	1	3	7	1	3
							1. SOP pemasangan infrastruktur jaringan baru	1. SOP Penyusunan data statisttik Perencanaan Daerah	1. SOP Pengelolaan pengiriman berita dari Lingkungan Pemda Klaten ke lingkungan Pemda Klaten, provinsi, Pusat, melalui peralatan teleks, Fax, telepon, email dan media lainnya			
							2. SOP penambahan bandwitch internet infrastruktur jaringan		2. SOP Pengelolaan berita masuk dari Pusat, Provinsi, Daerah lain, luar pemda dengan peralatan teleks, Fax, telepon, email dan media lainnya serta mengirimkan kepada yang berwenang			
							3. SOP Permintaan layanan E-Gov		3. SOP pengelola penerima dan pengelola serta mencatat berita sandi dari Provinsi, Pusat serta mengirimkan kepada yang berwenang			
							4. SOP Pelaporan masalah jaringan					
							5. SOP Pembongkaran infrastruktur jaringan					
							6. SOP layanan informasi PPID					

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN KOMINFO	URUSAN STATISTIK	URUSAN PERSANDIAN	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							7. SOP penerbitan surat rekomendasi pendirian menara telekomunikasi					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada	tidak ada	ada	ada	tidak ada
							Perda No 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan E - Government	PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG INTEGRASI SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KLATEN				
							PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK					
							PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	8	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	8	1	1			
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	tidak ada	ada	ada	tidak ada	ada
							1. Pranata Komputer		1. Sandiman			
							2. Pranata Humas					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	16	3	6	0.16%	0.03%	0.06%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	9877	9877			
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	6	1	1	75.00%	100.00%	100.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	8	1	1			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN KOMINFO	URUSAN STATISTIK	URUSAN PERSANDIAN	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	8	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	8	1	1			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen						
			-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			-RKA-OPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program Renja yang diakomodir dalam RKPD	program	8	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
					Jumlah program RENJA OPD	program	8	1	1			
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	8	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	8	1	1			
		12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	8	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
					Jumlah program dalam DPA OPD	program	8	1	1			
6	Laporan keuangan OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Aloaksi anggaran OPD dibagi total Alokasi APBD x 100%	Alokasi anggaran OPD	Rp	12,620,717,000	200,000,000	30,000,000	0.41%	0.01%	0.001%
					Total belanja APBD (Alokasi)	Rp	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52			
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	11,645,864,368	189,082,246	27,333,150	0.44%	0.01%	0.001%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68			
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	9,638,948,018	189,082,246	27,333,150	82.77%	100.00%	100.00%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	11,645,864,368.00	189,082,246	27,333,150			
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	2,006,916,350	-	-	17.23%	0.00%	0.00%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	11,645,864,368.00	189,082,246	27,333,150			
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN KOMINFO	URUSAN STATISTIK	URUSAN PERSANDIAN	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak						
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp						
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	15,913,021,404					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	4	4	4	4
			1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan /layanan pengaduan	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			3. Leaflet	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	-	-	-	-	-	-
			5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA PERBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KLATEN
URUSAN : 1. Urusan Pariwisata
2. Urusan Kebudayaan
3. Urusan Pemuda dan Olaharaga

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN Pariwisata	URUSAN Kebudayaan	URUSAN Pemuda dan Olahraga	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	3	3	5			
					alokasi	Rp	7,152,934,000	3,055,000,000	3,549,000,000	96%	92%	93%
					Realisasi	Rp	6,902,316,065	2,797,612,571	3,285,149,105			
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	13	6	2	13	6	2
							SOP ttg Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata	SOP ttg Pelayanan Surat Rekomendasi	SOP ttg Pelayanan Legalisir Piagam Penghargaan			
							SOP ttg Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	SOP ttg Pelayanan Legalisir Piagam Penghargaan	SOP ttg Pelayanan Surat Rekomendasi			
							SOP ttg Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri	SOP ttg Pelayanan Bioskop Keliling				
							SOP ttg Pembinaan POKDARWIS	SOP ttg Pelayanan Verikasi dan Inventarisasi situs Cagar Budaya				
							SOP ttg Penyelenggaraan Pariwisata	SOP ttg Keg Pelatihan Jurnalistik ttg Cagar Budaya				
							SOP ttg Pemeliharaan Obyek Wisata	SOP ttg Lomba Karya Tulis Ilmiah ttg Cagar Budaya				
							SOP ttg Pemilihan Mas dan Mbak Klaten					
							SOP ttg Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Propinsi					
							SOP ttg Fas Pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku Industri Pariwisata					
							SOP ttg Pembinaan dan Pengem ADWINDO					

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN Pariwisata	URUSAN Kebudayaan	URUSAN Pemuda dan Olahraga	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							SOP ttg Operasional Obyek Wisata					
							SOP ttg Pengelolaan Obyek Wisata					
							SOP ttg Penyusunan Detail Enginnering Design Destinasi Wisata					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada	tidak ada	ada	ada	tidak ada
							PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA				
							ERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014-2029	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELESTARIAN BAHASA DAN BUDAYA JAWA				
								PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN KESENIAN DAERAH				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	3	3	87.50%	100%	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	8	3	3			
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	27	9	11	0.27%	0.09%	0.11%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	9877	9877			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN Pariwisata	URUSAN Kebudayaan	URUSAN Pemuda dan Olahraga	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	1	2	29%	33%	67%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	3	3			
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	3	3	100%	100%	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	3	3			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	3	3
			-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
			-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
			-RKA-OPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program Renja yang diakomodir dalam RKPD	program	6	3	5	100%	100%	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	6	3	5			
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	6	3	5	100%	100%	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	6	3	5			
		12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	6	3	5	100%	100%	100%
					Jumlah program dalam DPA OPD	program	6	3	5			
	Laporan keuangan OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Aloaksi anggaran OPD dibagi total Alokasi APBD x 100%	Alokasi anggaran OPD	Rp	12,650,771,000	3,055,000,000.00	3,549,000,000.00	0.41%	0.10%	0.11%
					Total belanja APBD (Alokasi)	Rp	3,091,935,509,199	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52			
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	12,347,651,380	2,797,612,571.00	3,285,149,105.00	0.46%	0.10%	0.12%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN Pariwisata	URUSAN Kebudayaan	URUSAN Pemuda dan Olahraga	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	8,111,064,379	2,797,612,571.00	3,285,149,105.00	66%	100%	100%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	12,347,651,380	2,797,612,571.00	3,285,149,105.00			
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	4,236,587,001	-	-	34%	-	-
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	12,347,651,380	2,797,612,571.00	3,285,149,105.00			
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp						
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	26,261,971,651	aset masuk urusan pariwisata	aset masuk urusan pariwisata			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	3	3	4	3	3
			1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan /layanan pengaduan	ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
			3. Leaflet	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	ADA	tidak ada	tidak ada	ADA	tidak ada	tidak ada
			4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	ADA	tidak ada	tidak ada	ADA	tidak ada
			5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
URUSAN : 1. KOPERASI DAN UKM
2. PERDAGANGAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	
							URUSAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PERDAGANGAN	URUSAN 1	URUSAN 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	4	3		
					alokasi	Rp	2,275,000,000.00	7,338,542,000	87%	85%
					Realisasi	Rp	1,976,117,561.00	6,221,641,472		
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	ada 2	ada 6	ada 2	ada 6
							1. SOP. Pengajuan Ijin Penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam	1. SOP Tentang Permohonan Ijin Kios/Los		
							2. SOP. Pameran bagi UKM	2. SOP. Permintaan Karcis		
								3. SOP. Penarikan Retribusi Pasar		
								4. SOP. Rekomendasi BBM		
								5. SOP. Rekomendasi Perizinan Toko Modern		
								6. SOP. Rekomendasi Pengajuan Merk		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada 2	ada 7	ada	ada
							1. Perda No. 11 Th.2018, Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Perda No. 5 Th.2018, Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL		
							2. Peraturan Bupati Klaten No. 43 Th 2015, Tentang Penyelenggaraan ijin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Klaten	2. Perda No 24 tahun 2017 ttg Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang		
								3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 ttg Pengelolaan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan		
								4. Perbub. No. 37 Th 2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan		

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	
							URUSAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PERDAGANGAN	URUSAN 1	URUSAN 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
								5. Perbub. No. 38 Th 2018, Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.		
								6. Perbub. No. 39 Th 2018, Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL.		
								7. Perbub. No. 40 Th 2018, Tentang Penetapan Lokasi PKL.		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	17	100.00%	85%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	3	20		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	tidak ada		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	11	147	0.11%	1.49%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	9877		
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	12	66.67%	70.59%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3	17		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	17	100%	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	3	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
			-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	ada		
			-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	ada		
			-RKA-OPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program Renja yang diakomodir dalam RKPD	program	3	7	100%	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	3	7		

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	
							URUSAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PERDAGANGAN	URUSAN 1	URUSAN 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	3	7	100%	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	3	7		
		12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	3	7	100%	100%
					Jumlah program dalam DPA OPD	program	3	7		
6	Laporan keuangan OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Aloaksi anggaran OPD dibagi total Alokasi APBD x 100%	Alokasi anggaran OPD	Rp	2,275,000,000.00	26,517,918,000	0.07%	0.86%
					Total belanja APBD (Alokasi)	Rp	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52		
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,976,117,561	23,270,538,494.00	0.07%	0.87%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68		
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	1,976,117,561	12,327,407,661.00	100%	53%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,976,117,561	23,270,538,494.00		
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	-	10,943,130,833	0%	47%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,976,117,561	23,270,538,494.00		
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp				0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp		113,369,442,690		

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	
							URUSAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PERDAGANGAN	URUSAN 1	URUSAN 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	3	3	3
			1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
			2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan /layanan pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
			3. Leaflet	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
			4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
			5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	ada	ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN : 1.KEARSIPAN
2. PERPUSTAKAAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	
							URUSAN 1 (KEARSIPAN)	URUSAN 2 (PERPUSTAKAAN)	URUSAN 1	URUSAN 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan	jumlah program yg berkaitan dengan	sebutkan program yang berkaitan	program	3	1		
					alokasi	Rp	2,344,723,500	1,970,276,500	86%	86%
					Realisasi	Rp	2,018,544,438	1,692,887,360		
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	17	20	17	20
							SOP ttg Pemindahan arsip Inaktif	SOP ttg Pelayanan perpustakaan umum		
							SOP ttg Penyerahan Arsip Statis	SOP ttg Pelayanan Pendaftaran Anggota		
							SOP ttg Penerimaan arsip Inaktif	SOP Perpanjangan kartu, Penggantian Kartu hilang/rusak dan penukaran Kartu Sementara		
							SOP ttg Pengelolaan Arsip Inaktif	SOP Pelayanan Re Aktivasi Kartu Anggota		
							SOP ttg Penerimaan arsip Statis	Pelayanan Peminjaman kunci Loker		
							dan seterusnya total ada 17 SOP	dan seterusnya total ada 20 SOP		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada	ada	Ada
							PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN		
							PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN			
							PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP	-		

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	
							URUSAN 1 (KEARSIPAN)	URUSAN 2 (PERPUSTAKAAN)	URUSAN 1	URUSAN 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	3	95.65%	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	3		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	2	2	Ada	Ada
					1. Jabatan Pustakawan			ADA		
					2. Jabatan Arsiparis		ADA			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	17	10		
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	9877		
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	6	2	86%	67%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	3		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	3	100%	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	3		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	Ada	Ada
			-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	Ada	Ada		
			-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	Ada	Ada		
			-RKA-OPD		-RKA-OPD	ada/tidak	Ada	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program Renja yang diakomodir dalam RKPD	program	5	1	100%	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	5	1		
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	5	1	100%	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	5	1		
		12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	5	1	100%	100%
					Jumlah program dalam DPA OPD	program	5	1		
6	Laporan keuangan OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Aloaksi anggaran OPD dibagi total Alokasi APBD x 100%	Alokasi anggaran OPD	Rp	9,411,298,500	1,970,276,500	0.30%	0.06%
					Total belanja APBD (Alokasi)	Rp	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52		
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	4,057,198,301	1,692,887,360	0.15%	0.06%

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	
							URUSAN 1 (KEARSIPAN)	URUSAN 2 (PERPUSTAKAAN)	URUSAN 1	URUSAN 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68		
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	2,018,544,438	1,692,887,360	49.75%	100.00%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	4,057,198,301	1,692,887,360		
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	2,038,653,863	-	50.25%	0.00%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	4,057,198,301	1,692,887,360		
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	Ada	Ada
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	ada		
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	ada		
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	Ada	Ada
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp				
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	16,392,984,614	Aset ikut urusan utama		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	5		
			1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	Ada		
			2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan /layanan pengaduan	ada/tidak	Ada	Ada		
			3. Leaflet	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	Ada	Ada		
			4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	Ada		
			5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	ada/tidak	Ada	Ada		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Ada	Ada		

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	7	
					alokasi	Rp	6,088,609,700	84%
					Realisasi	Rp	5,142,834,472	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	2	
					1. SOP ttg mekanisme pencaiaran DD dan ADD			
					2. SOP ttg Proses pencairan BOP KPMD			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA			
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KERJASAMA DESA			
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA			
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA			
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	12	92%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	1	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	35	0.35%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	9	75%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	12	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	12	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	12	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	11	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	11	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	11	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	11	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	11	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	11	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	10,764,426,000	0.35%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,360,543,417	0.35%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	6,351,008,006	68%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,360,543,417	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	3,009,535,411	32%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,360,543,417	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	3,655,968,719.00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	Ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. KLATEN
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	7	
					alokasi	Rp	13,211,360,000	83%
					Realisasi	Rp	11,012,617,980	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	ada
					1. SOP ttg Pelayanan Perizinan			
					2. SOP ttg Prosedur pelaksanaan integritas personil laboratorium			
					3. SOP ttg Prosedur pelaksanaan kerahasiaan pelanggan			
					4. SOP ttg Prosedur pelaksanaan penanganan contoh uji			
					5. SOP ttg Prosedur pelaksanaan metode pengujian			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
					1, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perburuan burung, Ikan, Satwa Liar dan Satwa Liar lainnya			
					2, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah			
					3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik			
					4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
					5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bahan Bernahaya dan beracun			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	12	92%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer		1	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	21	0.21%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	10	83.33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	12	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	12	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	12	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	11	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	11	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	11	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	11	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	11	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	11	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	15,359,048,000	0.50%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	12,855,949,596	0.48%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	11,012,617,980	85.66%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	12,855,949,596	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,843,331,616	14.34%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	12,855,949,596	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	Ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	380,000,000	2.23%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	17,051,519,486	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak Ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	Ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KAB. KLATEN
URUSAN : PENANAMAN MODAL

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	2	
					alokasi	Rp	1,079,605,000	62%
					Realisasi	Rp	667,519,655	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	36	Ada
					1. SOP Izin Prinsip			
					2. SOP Izin Penanaman modal			
					3. SOP izin usaha tetap			
					4. SOP Izin Lokasi			
					5. SOP izin usaha tanaman pangan, dst sampai 36 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ADA	
					1. Perda Nomor 15 tahun 2012 ttg Penyelengaraan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten			
					2. Perbup No 29 tahun 2015 ttg rencana Umum Penanaman Modal Kab. Klaten tahun 2016 - 2025			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	12	92%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	24	0.24%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	4	33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	12	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	12	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	12	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	6	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	6	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	6	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	6	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	6	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	4,856,408,000	0.16%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	4,260,285,423	0.16%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	1,955,689,957	45.91%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	4,260,285,423	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	2,304,595,466	54.09%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	4,260,285,423	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	3,794,700,931	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KAB. KLATEN
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	3	
					alokasi	Rp	5,974,371,400	82%
					Realisasi	Rp	4,881,830,701	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	23	
					1. SOP Penyusunan PKPT Berbasis Resiko			
					2. SOP Penilaian 360 derajat			
					3. SOP Pemeriksaan Reguler			
					4. SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus			
					dan seterusnya total ada 23 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
					Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Biaya Operasional Pengawasan Pada Inspektorat			
					Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Resiko di Lingkungan Pemkab Klaten			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Jabatan pranata komputer			
					2. Jabatan Auditor			
					3. Jabatan P2UPD			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	51	0.52%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	9	100%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	9	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	9	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	5	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	5	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	5	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	5	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	5	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	14,682,824,000	0.47%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	12,206,689,861	0.46%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	6,211,234,968	50.88%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	12,206,689,861	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	5,995,454,893	49.12%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	12,206,689,861	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	10,349,733,846	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KLATEN
URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	4	
					alokasi	Rp	2,510,000,000	82%
					Realisasi	Rp	2,061,574,650	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	
					1. SOP fasilitasi dana hibah Ormas			
					2. SOP fasilitasi dana bantuan keuangan Parpol			
					3. SOP Fasilitasi Hibah KPU			
					4. SOP fasilitasi Hibah Bawaslu			
					5. SOP Penerbitan SKT Ormas			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	14	0.14%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	4	80%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	7	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	7	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	7	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	7	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	7	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	7	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	4,395,594,000	0.14%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	3,692,363,621	0.14%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	2,497,244,256	67.63%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	3,692,363,621	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,195,119,365	32.37%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	3,692,363,621	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,201,892,900	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KAB. KLATEN
URUSAN : KESEHATAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	3	
					alokasi	Rp	50,549,094,277	87%
					Realisasi	Rp	43,765,833,326	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	88	
					1. SOP ttg Penempatan Pasien Di Ruang Isolasi Tekanan Positif			
					2. SOP ttg Penempatan Pasien Di Ruang Isolasi Tekanan Negatif			
					3. SOP Pasien Dengan Pemulangan Kritis			
					4. SOP Pelayanan Farmasi Bila Obat Terkunci			
					5. SOP Penanganan Obat dan Alkes Yang Tidak Tersedia Di Rumah Sakit			
					6. SOP Kredensial Staf Medis			
					7. SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan secara langsung , dll sampai 88 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "BAGAS WARAS" KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	12	92%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	20	ada
					1 .DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM			
					2. DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI			
					3. DOKTER SPESIALIS SARAF			
					4. DOKTER SPESIALIS THT			
					5. DOKTER SPESIALIS KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			
					6. DOKTER SPESIALIS PARU			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7. DOKTER GIGI			
					8. DOKTER UMUM			
					9. DOKTER SPESIALIS ANESTESI			
					10. DOKTER SPESIALIS BEDAH			
					11. PERAWAT			
					12. BIDAN			
					13. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT			
					14. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			
					15. REKAM MEDIS			
					16. NUTRISIONIS			
					17. FISIOTERAPI			
					18.SANITARIAN			
					19. APOTEKER			
					20. PRANATA KOMPUTER			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	91	0.92%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	7	58.33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	12	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	12	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	12	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	9	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	9	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	5	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	5	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	5	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	60,192,288,276.52	1.9%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.00	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	51,993,627,101.68	1.9%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	45,341,032,859.68	87.2%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	51,993,627,101	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	6,652,594,242	12.8%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	51,993,627,101	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	206,156,784,475.00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. KLATEN
URUSAN : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	8	
					alokasi	Rp	71,408,544,000	85%
					Realisasi	Rp	60,526,915,479	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	11	
					1. Pengendalian Pembangunan Perumahan			
					2. Pertimbangan Teknis Pembangunan Perumahan			
					3. SOP Pelayanan Aduan			
					4. SOP Pelayanan Pendaftaran Penghuni Rusunawa			
					5. SOP Penyusunan Analisa dan Harga satuan Pekerjaan Tata Bangunan			
					6. SOP Perencanaan Teknik Pemeliharaan Gedung, Rumah Negara dan Kantor Milik Kabupaten			
					7. SOP Perencanaan Teknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Permukiman			
					8. Pembinaan Teknik Jasa Konstruksi			
					9. SOP Penaksiran Nila Bangunan Gedung			
					10. SOP Sertifikat Laik Fungsi			
					11. SOP sertifikat Pengendalian dan Monitoring IMB			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
					1. Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung			
					2. Perda Nomor 20 tahun 2011 tentang retribusi Perizinan Tertentu			
					3. Perda No 5 tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang			
					4. Perbup No 25 Tahun 2019 tentang Penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas pada bangunan Gedung fasilitas umum bagi penyandang disabilitas Di kabupaten klaten			
					5. Perda No 1 tahun 2016 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
					6. Perbup no 28 tahun 2013 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa			
					7. Perbup No 56 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup no 28 tahun 2013 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa			
					8. Perda No 27 tahun 2018 tentang jasa konstruksi			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	90%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	43	0.44%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	4	40.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	10	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	11	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	11	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	11	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	11	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	11	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	11	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	77,524,170,000	2.5%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	65,671,714,719	2.5%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	62,560,932,114	95.3%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	65,671,714,719	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	3,110,782,605	4.7%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	65,671,714,719	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	337,092,625,133	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KAB. KLATEN
URUSAN : PERHUBUNGAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	3	
					alokasi	Rp	6,669,095,000	91%
					Realisasi	Rp	6,090,250,002	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	9	
					SOP Penertiban parkir di tepi jalan umum			
					SOP Pengadaan dan pemasangan guardrail			
					SOP Pengadaan dan pemasangan traffic light			
					SOP Pengendalian Muatan Angkutan Barang/Bahan Galian Golongan C			
					SOP Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas			
					SOP pelayanan uji fisik kendaraan bermotor			
					SOP operasi laik jalan			
					SOP operasional lalu lintas			
					SOP Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan alat timpbang portabel			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	ada
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM			
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perda Nomor 13 tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor			
					Perda Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggraan Pengujian kendaraan bermotor			
					Perda Penyelnggaraan Jalan (no 10/2015)			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	10	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	2	
					1. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	7 orang		
					2. Pranata Komputer	1 orang		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	55	0.56%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	8	80%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	10	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	6	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	6	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	6	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	6	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	6	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	15,630,632,750	0.51%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	13,848,831,057	0.52%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	9,588,806,182	69.24%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	13,848,831,057	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	4,620,024,875	33.36%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	13,848,831,057	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	50,108,327,824.00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. KLATEN
URUSAN : 1. PERINDUSTRIAN
2.TENAGA KERJA
3. TRANSMIGRASI

NAMA PERANGKAT DAERAH :
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN PERINDUSTRIAN	URUSAN TENAGA KERJA	URUSAN TRANSMIGRASI	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	2	3	2			
					alokasi	Rp	1,137,000,000	879,000,000.00	250,000,000.00	90%	86%	82%
					Realisasi	Rp	1,024,275,250	760,093,074.00	203,848,600.00			
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1 buah	11 buah	1 buah			
							1. SOP ttg Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)	1. SOP ttg Pembuatan AKI/Kartu Pencari Kerja dan AK II/Identitas Pencari Kerja	1. SOP ttg endaftaran Calon Transmigrasi			
								2. SOP ttg Pembuatan AK III/Kartu Pemberi Kerja.				
								3. SOP ttg Pengantar Berkas Lamaran/ AK V				
								4. SOP ttg Restribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)				
								5. SOP ttg Pemberian Ijin Lembaga Pelatihan Ketrampilan Swasta/LPKS.				
								6. SOP ttg Pembuatan Rekomendasi Paspor				
								7. SOP ttg Pembuatan Surat Penerbitan Ijin Bursa Kerja Khusus (BKK)				
								8. SOP ttg Pembinaan Hubungan Industrial				
								9. SOP ttg Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persetujuan Bersama)				
								10. SOP ttg Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Anjuran)				
								11. SOP ttg Pengajuan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)				

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN PERINDUSTRIAN	URUSAN TENAGA KERJA	URUSAN TRANSMIGRASI	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		tidak ada	ada	tidak ada			
								Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	3	1	100.00%	100.00%	100.00%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	3	1			
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	Ada	tidak ada			
							Pranata Komputer	Pengantar Kerja				
								Mediator				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	19	10	1	0.19%	0.10%	0.01%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	9877	9877			
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	6	1	0	85.71%	33.33%	0.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	3	1			
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	3	1	100.00%	100.00%	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	3	1			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3			
			-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	Ada	Ada	Ada			
			-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	Ada	Ada	Ada			
			-RKA-OPD		-RKA-OPD	ada/tidak	Ada	Ada	Ada			
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program Renja yang diakomodir dalam RKPD	program	3	3	2	100%	100%	100%

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN PERINDUSTRIAN	URUSAN TENAGA KERJA	URUSAN TRANSMIGRASI	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah program RENJA OPD	program	3	3	2			
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	2	3	2	100%	100%	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	2	3	2			
		12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	2	3	2	100%	100%	100%
					Jumlah program dalam DPA OPD	program	2	3	2			
6	Laporan keuangan OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Aloaksi anggaran OPD dibagi total Alokasi APBD x 100%	Alokasi anggaran OPD	Rp	5,045,874,000	879,000,000	760,093,074	0.16%	0.03%	0.02%
					Total belanja APBD (Alokasi)	Rp	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52			
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	3,963,600,918	760,093,074	203,848,600	0.15%	0.03%	0.01%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68			
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	1,832,023,724	760,093,074	203,848,600	46.22%	100.00%	100.00%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	3,963,600,918	760,093,074	203,848,600			
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	2,131,577,194			53.78%	0.00%	0.00%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	3,963,600,918	760,093,074	203,848,600			
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3			
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada	Ada	Ada			
			- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada			
			- CALk		- CALk	ada/tidak	Ada	Ada	Ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	Ada	Ada			
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	158,323,396	0		5.2%	
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	612,416,628	3,053,572,003	1			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	4	1			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN PERINDUSTRIAN	URUSAN TENAGA KERJA	URUSAN TRANSMIGRASI	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MASYARAKAT		1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Tidak	ada	Tidak			
			2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan /layanan pengaduan	ada/tidak	Tidak	ada	Tidak			
			3. Leaflet	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	Tidak	ada	Tidak			
			4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak			
			5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	ada/tidak	ada	ada	ada			
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	ada			

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. KLATEN
URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	13	
					alokasi	Rp	229,698,861,000	81%
					Realisasi	Rp	186,093,444,654	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	7	
					1. SOP ttg informasi tata ruang			
					2. SOP ttg sewa walls/alat berat			
					3. SOP ttg pengambilan sampah			
					4. SOP ttg sewa alun-alun			
					5. SOP ttg sewa Stadion			
					6.SOP pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)			
					7. SOP ttg Perijinan tanah pengairan			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan	ada/tidak	ada	ada
					Perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah (no. 6/2018)			
					Perda tentang irigasi (no. 22/2017)			
					Perda tentang RTRW (no. 11/2011)			
					Perda izin pemanfaatan ruang (no 5 / 2015)			
					Perda Penyelnggaraan Jalan (no 10/2015)			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	29	97%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	30	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	307	3.11%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	9	31.03%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	29	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	29	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	29	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	18	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	18	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	18	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	18	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	18	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	18	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	260,119,338,000	8.41%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	210,014,710,391	7.85%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	191,137,126,592	91.01%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	210,014,710,391	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,877,583,810	0.89%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	210,014,710,391	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,633,189,383,794.00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KLATEN
URUSAN : KETRENTAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	7	
					alokasi	Rp	8,104,000,000	96%
					Realisasi	Rp	7,807,916,818	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	14	
					1. SOP Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (SOP Penindakan Pelanggar Perda/ atau Perbub secara Yustisial)			
					2. SOP ……			
					3. SOP Pengendalian Masa/Demo			
					4. SOP Pengaman dan Pengawalan			
					5. SOP Pengerahan Linmas dan Pengamanan Kegiatan Penting Tingkat Kabupaten			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan	ada	ada	ada
				PERDA/PERBUP	**URAIAN**			
				27 thn 2002	**Larangan Pelacuran**			
				28 thn 2002	Minuman Beralkohol/Miras			
				9 thn 2003	Pengelolaan Irigasi			
				10 thn 2003	SIUP			
				12 thn 2003	TDP			
				9 Tahun 2007	Penyelenggaraan reklame			
				11 thn 2007	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
				9 Thn 2011	Penyelenggaraan Perlindungan Anak			
				11 thn 2011	Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031			
				12 Thn 2011	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Klaten			
				13 Thn 2011	Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi			
				15 Thn 2011	Bangunan Gedung			
				16 thn 2011	Pajak Daerah			
				17 Thn 2011	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan			
				18 thn 2011	Retribusi Jasa Umum			
				19 Thn 2011	Retribusi Jasa Usaha			
				20 Thn 2011	Retribusi Perijinan Tertentu			
				9 Tahun 2012	Air Tanah			
				5 Thn 2018	Penataan dan Pemberdayaan PKL			
				13 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah			
				12 Thn 2013	Ketertiban, Kebersihan, Keindahan			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				14 Thn 2013	Penyelenggaraan Warung Internet di Kab. Klaten			
				12 thn 2017	Penyelenggaraan Kepariwisataan			
				3 Tahun 2018	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis			
				8 Tahun 2018	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			
				31 thn 2011	UKL/UPL			
				8 thn 2012	ANDALALIN			
				20 thn 2012	Perubahan perbup andalalin			
				16 thn 2014	Sistim percepatan tentang pelaksanaan standar verifikasi legalitas kayu			
				31 thn 2014	Sistim Manajemen Rekayasa Lalin			
				37 thn 2018	Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL			
				38 thn 2018	Pedoman pembentukan tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL			
				39 thn 2018	Pengajuan permohonan tanda daftar usaha PKL			
				40 thn 2018	Penetapan lokasi PKL			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	13	93%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	14	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer	1 orang		
					2			
					3			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	61	0.62%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	9	69.23%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	13	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	13	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	12	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	12	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	10,483,833,000	0.34%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,547,690,251	0.36%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	4,715,730,935	49.39%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,547,690,251	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	4,831,959,316	50.61%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	9,547,690,251	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	12,179,538,048	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KAB. KLATEN
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	1	
					alokasi	Rp	27,592,151,000	88%
					Realisasi	Rp	24,233,330,018	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	11	
					1. SOP ttg Reses			
					2. SOP ttg Audensi			
					3. SOP ttg Penyusunan Produk Hukum			
					4. SOP ttg Penyediaan Bahan Bacaan			
					5. SOP ttg Pembahasan Raperda			
					6. SOP ttg Pembahasan Raperda Inisiatif			
					7. SOP ttg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
					8. SOP ttg Peningkatan Kapasitas			
					9. SOP ttg Penyelenggaraan Rapat Paripurna			
					10. SOP ttg Public Hearing			
					11. SOP ttg Penyusunan Risalah			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
					Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	11	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	11	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1. Jabatan Pranata Humas	1		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	41	0.42%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	10	90.91%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	11	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	11	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	11	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	ada	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	6	100.00%
					Jumlah program RENJA OPD	program	6	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	6	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	6	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	6	100.00%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	34,600,700,000	1.12%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	29,724,123,051	1.11%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	26,379,372,529	88.75%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	29,724,123,051	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	3,344,750,522	11.25%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	29,724,123,051	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	11,618,374,581	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tdak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
URUSAN : 1. PERTANIAN
2. PANGAN
3. KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN 1 (Pertanian)	URUSAN 2 (Pangan)	URUSAN 3 (Perikanan)	URUSAN 1 (Pertanian)	URUSAN 2 (Pangan)	URUSAN 3 (Perikanan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	8	1	3			
					alokasi	Rp	13,419,872,000	1,436,150,000	2,143,576,000	87%	92%	90%
					Realisasi	Rp	11,725,571,438	1,324,289,220	1,926,100,552			
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	79	16	3	Ada	Ada	Ada
							1) SOP ttg Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman (PTT, Jajar Legowo)	1) SOP ttg Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1) SOP ttg Penerima /Calon Lokasi kegiatan			
							2) SOP ttg Pengembangan Perbenihan TPH (Pembinaan Penangkar Benih TPH)	2) SOP ttg Pembinaan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	2) SOP ttg Statistik Perikanan Budidaya			
							3) SOP ttg Pengembangan Varietas (Pengenalan Varietas Baru dan Pemuliaan Rojolele)	3) SOP ttg Pemantauan Harga Komoditas Pangan	3) SOP ttg Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Daratan			
							4) SOP ttg Pengumpulan Data Statistik Pertanian	4) SOP ttg Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan				
							5) SOP ttg Pengendalian OPT Pangan dan Hortikultura, dst sampai 79 SOP	5) SOP ttg Pembinaan Desa Mandiri Pangan, DST SAMPAI 16 SOP				
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		Ada, 7	Ada, 2	Ada, 3	ADA	ADA	ADA
							Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam Untuk Masa Tanam Tahun 2019-2020 Di Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten	Perda Kab Klaten nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perikanan			

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN 1 (Pertanian)	URUSAN 2 (Pangan)	URUSAN 3 (Perikanan)	URUSAN 1 (Pertanian)	URUSAN 2 (Pangan)	URUSAN 3 (Perikanan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perbup Klaten nomor 11 tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Klaten	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu			
							Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2017 tentang Irigasi		Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha			
							Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016					
							Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani					
							Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutan					
							Perda kab Klaten nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	22	4	5	95.65%	100%	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	23	4	5			
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ADA	ada	-	Ada	Ada	Tidak Ada
							1. Jabatan Penyuluh Pertanian	1. Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)				
							2. Jabatan Medik Veteriner					
							3. Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP)					
							4. Jabatan Pengawas Bibit Ternak (WASBITNAK)					
							5. Jabatan Analis Kepegawaian					

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN 1 (Pertanian)	URUSAN 2 (Pangan)	URUSAN 3 (Perikanan)	URUSAN 1 (Pertanian)	URUSAN 2 (Pangan)	URUSAN 3 (Perikanan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							6. Jabatan Pranata Komputer					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	200	19	22	2.02%	0.19%	0.22%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	9877	9877			
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	17	4	3	86.36%	100.00%	80.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	22	4	5			
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	22	4	5	100%	100%	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	22	4	5			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	Ada	Ada	Ada
			-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	ada	ada			
			-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	ada	ada			
			-RKA-OPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	ada	ada			
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program Renja yang diakomodir dalam RKPD	program	12	1	3	100%	100%	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	12	1	3			
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	1	3	100%	100%	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	1	3			
		12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	1	3	100%	100%	100%
					Jumlah program dalam DPA OPD	program	12	1	3			
6	Laporan keuangan OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Aloaksi anggaran OPD dibagi total Alokasi APBD x 100%	Alokasi anggaran OPD	Rp	39,936,112,000	1,436,150,000	2,143,576,000	1.29%	0.05%	0.07%

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN 1 (Pertanian)	URUSAN 2 (Pangan)	URUSAN 3 (Perikanan)	URUSAN 1 (Pertanian)	URUSAN 2 (Pangan)	URUSAN 3 (Perikanan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Total belanja APBD (Alokasi)	Rp	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52			
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	32,006,589,714	1,324,289,220	1,926,100,552	1.20%	0.05%	0.07%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68			
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	13,627,725,209	1,324,289,220	1,926,100,552	43%	100%	100%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	32,006,589,714	1,324,289,220	1,926,100,552			
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	18,378,864,505	-	-	57%	0.00%	0.00%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	32,006,589,714	1,324,289,220	1,926,100,552			
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	Ada	Ada	Ada
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	ada	ada			
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	ada	ada			
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	ada	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp						
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	31,317,630,753	876,080,385	10,040,699,357			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	2	2			
			1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	ADA	ADA	Ada	Tidak	Tidak
			2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan /layanan pengaduan	ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
			3. Leaflet	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	Ada	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak
			4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
			5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN : 1. SOSIAL
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN 1 (SOSIAL)	URUSAN 2 (PP PA)	URUSAN 3 (DALDUK KB)	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	4	4	8			
					Alokasi	Rp	3,705,300,000	695,000,000	9,534,092,000	85%	89%	85%
					Realisasi	Rp	3,158,131,832	615,876,580	8,112,572,188			
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	9	2	7	9	2	7
							1. SOP ttg pengajuan pengangkatan anak/adopsi	1. SOP ttg Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	1. SOP ttg Pengelolaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			
							2. SOP ttg pengajuan/permohonan bantuan sosial utk penyandang disabilitas, orang terlantar, kehabisan bekal	2. SOP ttg Pelaksanaan kegiatan PP PA	2. SOP ttg Penggunaan Mobil Unit Penerangan (Mupen)			
							3. SOP ttg Pengajuan/permohonan bantuan rumah tidak layak huni		3. SOP ttg Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
							4. SOP ttg Pengajuan terdaftar/perpanjangan surat ijin operasional LKS		4. SOP ttg Pelayanan KB dengan Mobil Pelayanan			
							5. SOP ttg Pemberian Rekomendasi Bantuan/Hibah pada perorangan, kelompok masy dan lembaga sosial		5. SOP ttg Penyaoman KB			
							6. SOP ttg Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (korban dan saksi)		6. SOP ttg Advokasi dan KIE Pelayanan Kontrasepsi			
							7. SOP ttg Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan		7. SOP ttg Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja ke Sekolah/kelompok masyarakat			
							8. SOP ttg Bantuan pangan non tunai					
							9. SOP ttg Penanganan Balita terlantar					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan	Perda/ Perkada	ada	ada	tidak ada	ada	ada	tidak ada

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN 1 (SOSIAL)	URUSAN 2 (PP PA)	URUSAN 3 (DALDUK KB)	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
							PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL					
							PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN HIV (HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS) DAN AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SYNDROME) DI KABUPATEN KLATEN					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	8	3	3	100%	100%	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	8	3	3			
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	tidak ada	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada
							1. Jabatan Pekerja Sosial					
							2. Jabatan Pranata Komputer					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	34	5	8	0.34%	0.05%	0.08%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	9877	9877			
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	1	3	38%	33%	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	8	3	3			
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	8	3	3	100%	100%	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	8	3	3			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	3	3
			-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			-RKA-OPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN 1 (SOSIAL)	URUSAN 2 (PP PA)	URUSAN 3 (DALDUK KB)	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program Renja yang diakomodir dalam RKPD	program	5	4	10	100%	100%	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	5	4	10			
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	4	4	8	100%	100%	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	4	4	8			
		12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	4	4	8			
					Jumlah program dalam DPA OPD	program	4	4	8			
6	Laporan keuangan OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Aloaksi anggaran OPD dibagi total Alokasi APBD x 100%	Alokasi anggaran OPD	Rp	9,076,543,000	695,000,000	9,534,092,000	0.29%	0.02%	0.31%
					Total belanja APBD (Alokasi)	Rp	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52	3,091,935,509,198.52			
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	7,414,265,159	615,876,580	8,112,572,188	0.28%	0.02%	0.30%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68	2,675,948,342,710.68			
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	3,158,131,832	615,876,580	8,112,572,188	43%	100%	100%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	7,414,265,159	615,876,580	8,112,572,188			
		16	Total Belanja tidak langsung dari total belanja SKPD	Total Belanja tidak langsung dibagi total belanja SKPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah	Rp	4,256,133,327			57%		
					realisasi belanja perangkat daerah	Rp	7,414,265,159					
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0	0	-	-	0.00%

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	ELEMEN DATA			CAPAIAN KINERJA		
							URUSAN 1 (SOSIAL)	URUSAN 2 (PP PA)	URUSAN 3 (DALDUK KB)	URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	16,836,050,013	aset masuk urusan utama	aset masuk urusan utama			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	5	5	5	5
			1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan /layanan pengaduan	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			3. Leaflet	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	5. MEDIA INFORMASI	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYAT
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	11	
					alokasi	Rp	633,900,000	87%
					Realisasi	Rp	550,788,650	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	5
					1. SOP Pelayanan Remonendasi Dispensasi Nikah			
					2. SOP Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris			
					3. SOP Pelayanan SKCK			
					4. SOP Pelayanan Usulan Pembangunan			
					5. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	21	0.21%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	4	67%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	15	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	15	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	15	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	15	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	15	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	15	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,736,253,000	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,334,134,467	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	798,336,588	34.2%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,334,134,467	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,535,797,879	65.8%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,334,134,467	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,208,302,516	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CAWAS
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	655,936,000	92%
					Realisasi	Rp	602,996,000	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	
					1. SOP ttg legalisasi umum			
					2. SOP ttg pindah penduduk			
					3. SOP ttg pembuatan SKCK			
					4. SOP pencairan ADD			
					5. SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	ada
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	24	0.24%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	29%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	14	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	14	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	13	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	13	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	13	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	13	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,832,012,000	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,551,077,934	0.10%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	928,536,017	36.4%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,551,077,934	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,622,541,917	63.6%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,551,077,934	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,450,771,367	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CEPER
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	0%
					alokasi	Rp	541,700,000	92%
					Realisasi	Rp	499,423,409	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	4	
					1. SOP ttg pelayanan pindah KK			
					2. SOP ttg pelayanan KTP			
					3. SOP ttg pembuatan SKCK			
					4. SOP ttg / dispensasi nikah			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	18	0.18%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	5	83.33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen		
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	14	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	14	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	14	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	14	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	14	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	14	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,736,091,000	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,330,814,319	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	785,532,233	33.70%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,330,814,319	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,545,282,086	66.30%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,330,814,319	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,791,284,425	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN DELANGGU
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	406,754,000	98%
					Realisasi	Rp	398,229,550	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	
					1. SOP ttg Pelayanan Legalisasi Umum			
					2. SOP ttg Pelayanan SKCK			
					3. SOP ttg Pelayanan KK			
					4. SOP ttg Pelayanan KTP			
					5. SOP ttg Pelatanan SKM			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	1	
					1. Pranata Komputer		ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	23	0.23%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9,877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	4	57%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	14	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	14	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	14	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	14	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	14	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	14	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,643,255,000	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,375,671,221	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	676,394,699	28.47%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,375,671,221	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,699,276,522	71.53%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,375,671,221	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	3,538,006,472	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GANTIWARNO
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	11	
					alokasi	Rp	489,500,000	80%
					Realisasi	Rp	389,225,316	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	2	
					1. SOP ttg Pelayanan penerbitan KK			
					2. SOP ttg Perijinan dan non perijinan			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer		ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	17	0.17%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	33.33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	5	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	5	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	5	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	5	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	5	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,417,129,000.00	0.08%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,174,382,288.00	0.08%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	844,676,000.00	38.85%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,174,382,288	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,329,765,688	61.16%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,174,382,288	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,591,847,902	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JOGONALAN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	8	
					alokasi	Rp	463,040,000	94%
					Realisasi	Rp	436,743,000	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	6	
					1. SOP ttg ket ahli waris			
					2. SOP ttg pelayanan SKCK			
					3. SOP Pelayanan Penerbitan kartu Kuning / AK-1			
					4.SOP ttg dispensasi nikah			
					5. SOP ttg Pelayanan Rekomendasi ijin usaha			
					6. SOP Pelayanan Surat pindah penduduk			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	19	0.19%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	7	100%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	12	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	12	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,585,619,000	0.08%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,295,963,789	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	752,833,160	32.79%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,295,963,789	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,543,130,629	67.21%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,295,963,789	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,822,699,982	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JUWIRING
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	12	
					alokasi	Rp	566,704,436	73%
					Realisasi	Rp	412,053,406	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	15	
					1. SOP ttg pelayanan pindah KK			
					2. SOP ttg pelayanan KTP			
					3. SOP ttg Pindah penduduk			
					4. SOP ttg Rekomedasi Ijin usaha Mikro			
					5. SOP Surat Keterangan ahli waris, dst total 15 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	71%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan		
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	20	0.20%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	40%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	16	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	16	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	16	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	16	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	16	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	16	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,749,813,000	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,223,605,686	0.08%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	642,297,981	28.89%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,223,605,686	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,581,307,705	71.11%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,223,605,686	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,299,213,595	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGANOM
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	12	
					alokasi	Rp	602,500,000	95%
					Realisasi	Rp	572,068,100	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	1. SOP ttg Pelayanan KK	buah	35	
					2. SOP ttg Pelayanan Surat Pindah Penduduk			
					3. SOP ttg Pelayanan SKCK			
					4. SOP ttg Pelayanan KTP			
					5. SOP ttg Pelayanan SKTM			
					dan seterusnya total ada 35 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	21	0.21%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	4	67%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	16	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	16	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	16	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	16	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	16	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	16	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,678,737,000	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,305,919,808	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	780,614,257	33.85%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,305,919,808	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,525,305,551	66.15%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,305,919,808	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3 komponen	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,994,966,999	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGDOWO
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	12	
					alokasi	Rp	506,875,000	94%
					Realisasi	Rp	476,909,700	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	
					1. SOP ttg Pelayanan Pindah KK			
					2. SOP ttg Pelayanan KTP			
					3.SOP ttg Pelayanan SKCK			
					4. SOP ttg Rekomendasi Ijin Usaha			
					5. SOP ttg Rekomendasi Ijin HO			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	71%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	19	0.19%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	60%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	16	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	16	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	16	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	16	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	16	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	16	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,570,524,000	0.08%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,212,178,516	0.08%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	693,755,409	31.36%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,212,178,516	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,518,423,107	68.64%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,212,178,516	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen		
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	Ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,072,783,882	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	Ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGNONGKO
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	11	
					alokasi	Rp	526,830,000	97%
					Realisasi	Rp	512,212,460	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	11	
					1. SOP ttg pelayanan fasilitasi pengajuan ADD			
					2. SOP ttg rekomendasi ijin IMB dan HO			
					3. SOP Pelayanan SKCK			
					4. SOP pelayanan rekomendasi nikah			
					5. SOP legalisasi proposal bantuan keuangan			
					6. SOP layanan rekomendasi ijin keramaian			
					7. SOP penerbitan KK, dst sampai 11 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	24	0.24%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	5	71%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	15	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	15	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	15	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	15	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	15	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	15	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,808,986,000	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,545,168,992	0.10%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	806,407,488	31.68%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,545,168,992	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,738,761,504	68.32%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,545,168,992	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	5,581,070,339	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEMALANG
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	11	
					alokasi	Rp	659,837,705	76%
					Realisasi	Rp	499,588,947	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	4	
					SOP rekomendasi ijin keramaian			
					SOP E-KTP			
					SOP rekomendasi nikah			
					SOP Penerbitan KK			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan		
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	21	0.21%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen		
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

499588947

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	15	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	15	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	15	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	15	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	15	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	15	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,920,008,000	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,377,106,140	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	804,012,694	33.82%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,377,106,140	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,573,093,446	66.18%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,377,106,140	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	7,140,231,201	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN TENGAH
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	9	
					alokasi	Rp	502,600,000	99.84%
					Realisasi	Rp	501,774,500	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	6	
					1. SOP ttg Pelayanan Pindah Penduduk			
					2. SOP ttg Pelayanan legalisasi umum			
					3. SOP ttg Perekaman e-KTP			
					4. SOP ttg Rekomendasi Dispensasi Nikah			
					5. SOP ttg IMB			
					6. SOP ttg rekomendasi ijin keramaian			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	12	0.12%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	6	100%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	13	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	13	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	13	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	13	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	13	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	13	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,163,391,000.00	0.07%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	1,905,221,143.00	0.07%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	772,049,279.00	40.52%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,905,221,143.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,133,171,864.00	59.48%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,905,221,143.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	5,649,192,317	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN UTARA
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	421,800,000	89%
					Realisasi	Rp	373,873,300	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	14	
					1. SOP kartu keluarga			
					2. SOP pindah datang penduduk			
					3. SOP ijin pindah nikah			
					4. SOP proposal bantuan sosial/keuangan			
					5. SOP legalisasi akte kelahiran, dst sampai 14 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	21	0.21%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	4	67%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	14	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	14	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	14	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	14	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	14	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	14	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,824,772,000.00	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,485,568,631.00	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	696,203,070.00	28.01%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,485,568,631.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,789,365,561.00	71.99%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,485,568,631.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	4,954,440,929	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	Tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MANISRENGGO
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	9	
					alokasi	Rp	550,300,000	95%
					Realisasi	Rp	523,438,550	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	6	
					1. SOP ttg pelayanan KK			
					2. SOP ttg pindah penduduk			
					3. SOP ttg legalitas ijin nikah			
					4.SOP ttg legalitas akte kelahiran			
					5. SOP ttg legalitas kematian			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	1	
					1. Pranata Komputer		ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	23	0.23%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	43%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD		
							Elemen Data	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	13	100%	
					Jumlah program RENJA OPD	program	13		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	13	100%	
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	13		
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	13	100%	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	13		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,821,882,000	0.09%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52		
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,494,745,913	0.09%	
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68		
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	790,673,022	31.69%	790,723,022
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,494,745,913		
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,704,072,891	68.31%	50,000
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,494,745,913		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3		
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada		
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00%	
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,271,686,896		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada		

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGAWEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	422,500,000	97%
					Realisasi	Rp	411,686,750	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	
					1. Pelayanan KK			
					2. Pelayanan rekomendasi ijin usaha			
					3. Pelayanan surat pindah penduduk			
					4. Pelayanan SKCK			
					5. Pelayanan Penerbitan kartu Kuning			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	17	0.17%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	29%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	14	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	14	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	14	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	14	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	14	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	14	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,524,028,000	0.08%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,241,822,821	0.08%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	747,152,070	33.33%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,241,822,821	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	149,670,751	6.68%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,241,822,821	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,563,074,595	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PEDAN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	485,500,000	99%
					Realisasi	Rp	478,490,500	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	19	
					1. SOP ttg pelayanan KK			
					2. SOP ttg pelayanan surat pindah penduduk			
					3. SOP ttg pelayanan KTP			
					4. SOP surat keteranga n (KTP sementara)			
					5. SOP SKW (Surat Keterangan Waris), dst sampai 19 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	19	0.19%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	14%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	15	100
					Jumlah program RENJA OPD	program	15	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	14	100
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	14	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	14	100
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	14	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,545,232,000	0.08%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,279,212,614	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	716,164,445	31.42%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,279,212,614	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,563,048,169	68.58%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,279,212,614	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,940,453,594	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN POLANHARJO
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	465,950,000	99%
					Realisasi	Rp	462,366,900	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	
					1. SOP pindah penduduk			
					2. SOP pelayanan KK			
					3. SOP pelayanan E-KTP			
					4. SOP surat rekomendasi ijin usaha			
					5. SOP dispensasi surat nikah			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	71%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	16	0.16%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	60%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	12	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	12	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,641,689,000	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,277,834,215	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	757,113,034	33.24%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,277,834,215	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,520,721,181	66.76%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,277,834,215	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	6,022,143,384	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PRAMBANAN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	12	
					alokasi	Rp	854,700,000	93%
					Realisasi	Rp	796,547,400	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	12	
					1. SOP ttg pengurusan akte kelahiran			
					2. SOP ttg pengurusan KK			
					3. SOP ttg pengurusan legalisasi fotocopy KTP & KK			
					4. SOP ttg pengurusan akte kematian			
					5. SOP ttg pengurusan akte perkawinan			
					dan seterusnya sampai 12 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer		ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	24	0.24%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	43%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	14	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	14	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	14	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	14	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	14	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	14	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	3,215,623,000	0.10%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,808,774,191	0.10%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	991,306,834	35.29%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,808,774,191	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,817,467,357	64.71%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,808,774,191	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,992,738,516	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TRUCUK
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	480,500,000	98%
					Realisasi	Rp	470,257,144	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	10	
					1. SOP ttg pengelolaan laporan kependudukan			
					2. SOP ttg pengelolaan KTP, KK, Pindah, Datang			
					3. SOP ttg rekomendasi SKW (Surat Keterangan Waris)			
					4. SOP ttg rekomendasi perijinan (IUMK, IMB, HO, Keramaian)			
					5. SOP ttg rekomendasi SKCK, SKTM, Akte Kelahiran			
					6. SOP ttg pengelolaan monografi			
					7. SOP ttg bantuan keuangan ke desa			
					8. SOP ttg ADD			
					9. SOP ttg pengesahan proposal			
					10. SOP ttg dispensasi nikah			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	19	0.19%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	50%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	13	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	13	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	13	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	13	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	13	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	13	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,566,761,000.00	0.08%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,202,231,109.00	0.08%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	774,678,547	35.18%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,202,231,109.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,427,552,562	64.82%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,202,231,109.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	3,360,342,274	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TULUNG
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	9	
					alokasi	Rp	473,500,000	68%
					Realisasi	Rp	323,721,350	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	Buah	5	
					1. SOP Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah			
					2. SOP Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris			
					3. SOP Pelayanan SKCK			
					4. SOP Pelayanan Usulan Pembangunan			
					5. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	24	0.24%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	13	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	13	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	13	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	13	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	13	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	13	
	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,972,901,000	0.10%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,402,255,945	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	546,778,000	22.76%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,402,255,945	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,855,477,945	77.24%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,402,255,945	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,746,196,289	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WEDI
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	8	
					alokasi	Rp	508,000,000	96%
					Realisasi	Rp	488,887,750	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	4	
					1. SOP Pelayanan Pembuatan KK			
					2. SOP Pelayanan pembuatan IMB			
					3. SOP ttg pembuatan KTP			
					4. SOP ttg pelayanan ijin gangguan HO			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	1	
					1. Pranata Komputer		ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	24	0.24%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	6	86%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	12	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	12	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,987,296,000	0.10%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,692,948,583	0.10%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	857,735,391	31.85%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,692,948,583	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,835,213,192	68.15%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,692,948,583	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,145,669,840	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN SELATAN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	8	
					alokasi	Rp	554,327,500	98%
					Realisasi	Rp	544,024,850	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	3	
					1. SOP Rekomendasi perijinan			
					2. SOP Legalisasi Suarat Pengantar / Keterangan			
					3. SOP administrasi Kependudukan			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer		1	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	15	0.15%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	11	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	11	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	11	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	11	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	11	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	11	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,117,333,000.00	0.07%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	1,932,053,613.00	0.07%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	794,164,502.00	41.10%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,932,053,613.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,137,889,111.00	58.90%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,932,053,613.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,422,288,487	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEBONARUM
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	9	
					alokasi	Rp	391,191,683	90%
					Realisasi	Rp	353,591,900	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	13	
					1. SOP ttg pelayanan pindah kk			
					2. SOP ttg pelayanan perekaman			
					3. SOP ttg Suket Dimisili			
					4. SOP ttg SKCK			
					5. SOP ttg ijin usaha, dst sampai 13 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer		1	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	17	0.17%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	29%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD		
							Elemen Data	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	13	100%	
					Jumlah program RENJA OPD	program	13		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	13	100%	
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	13		
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	13	100%	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	13		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,448,975,000	0.08%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52		
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,248,524,519	0.08%	
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68		
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	895,211,639	39.81%	895,211,639
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,248,524,519		
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,353,312,880	60.19%	
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,248,524,519		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3		
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada		
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00%	
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,631,741,320		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada		

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WONOSARI
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	8	
					alokasi	Rp	564,334,000	87%
					Realisasi	Rp	492,475,200	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	15	
					1. SOP pelayanan KTP			
					2. SOP Pelayanan KK			
					3. SOP Pelayanan Pindah penduduk			
					4. SOP rekomendasi ijin usaha			
					5. SOP rekomendasi IMB, dst sampai 15 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	6	86%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	26	0.26%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	3	50%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	6	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	6	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	6	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	12	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	12	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	3,418,716,000	0.11%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,952,471,875	0.11%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	929,245,443	31.47%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,952,471,875	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	2,023,226,432	68.53%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,952,471,875	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,369,526,103	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KALIKOTES
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	6	
					alokasi	Rp	461,394,000	97%
					Realisasi	Rp	446,676,300	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	12	
					1. SOP pelayanan KK			
					2. SOP Pelayanan KTP			
					3. SOP Pindah Penduduk			
					4. SOP SKCK			
					5. SOP pelayanan legalisasi umum			
					6. SOP SKTM			
					7. SOP pelayanan rekomendasi disepensasi Nikah			
					8. SOP SKW			
					9. SOP pelayanan rekomendasi ijin keramaian			
					10. SOP pelayanan rekomendasi ijin usaha			
					11. SOP pelayanan rekomendasi IMB			
					12. SOP pelayanan rekomendasi IPPT			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	7	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	19	0.19%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	6	86%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	7	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	7	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	7	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	8	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	8	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	8	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	8	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	8	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	8	
	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,594,439,000	0.08%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,356,756,849	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	755,321,233	32.05%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,356,756,849	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,601,435,616	67.95%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,356,756,849	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	ada	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,512,820,592	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATINOM
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	9	
					alokasi	Rp	695,903,650	97%
					Realisasi	Rp	673,805,800	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah		
					1. SOP ttg Penyelesaian Permasalahan Ketertiban	buah	6	
					2. SOP ttg Penaganan dan Pelaporan Bencana			
					3. SOP ttg Pengajuan Alokasi Dana Desa			
					4. SOP ttg Pencairan Alokasi Dana Desa			
					5. SOP ttg Pengajuan TPP			
					6. SOP ttg Fasilitasi Pilkades			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		ada	
					PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENDELAGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	71%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	7	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	ada	
					1. Pranata Komputer			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	18	0.18%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	5	100
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang		0%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	14	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	14	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	13	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	13	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	13	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	13	
	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	2,800,151,000.00	0.09%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	2,529,452,888.00	0.09%
					Total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	970,348,532.00	38.36%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,529,452,888.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	1,559,104,356.00	61.64%
					Realisasi belanja perangkat daerah	Rp	2,529,452,888.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,088,610,827	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	Ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENG LOR
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	13	
					alokasi	Rp	798,041,000	96%
					Realisasi	Rp	762,892,930	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	9	
					1. SOP ttg Prosedur Pelayanan Penggantian KK			
					2. SOP ttg Pelayanan KTP			
					3. SOP ttg Prosedur layanan legalisasi surat-surat, kependudukan dan capil			
					4. SOP ttg prosedur pelayanan SKCK			
					5. SOP tttg prosedur layanan surat, pindah penduduk, dst sampai 9 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		tidak ada	#VALUE!
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	80%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	4	0.04%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	25%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ADA	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	16	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	16	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	16	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	16	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	16	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	16	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,439,568,000.00	0.05%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,201,067,257.00	0.04%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	878,387,376.00	73%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,201,067,257.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	322,679,881.00	27%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,201,067,257.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	6,888,854,036	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BUNTALAN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	715,382,000	97%
					Realisasi	Rp	692,202,621	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	16	
					1. SOP pembuatan KK			
					2. SOP akte kelahiran			
					3. SOP akte kematian			
					4. SOP pindah penduduk			
					5. SOP nikah			
					6. SOP domisili			
					7. SOP SKTM			
					8. SOP legalisasi akta kematian			
					9. SOP legalisasi umum			
					10. SOP ijin IUMK			
					11. SOP IMB			
					12. SOP SKW			
					13. SOP IPPT			
					14. SOP rekomendasi ijin keramaian			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	6	0.06%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	25.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	4	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	13	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	13	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,700,337,000.00	0.05%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,422,971,176.00	0.05%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	858,117,033.00	60%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,422,971,176.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	564,854,143.00	40%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,422,971,176.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	9,297,616,181	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GAYAMPRIT
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	671,764,375	97%
					Realisasi	Rp	654,877,600	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	
					1. SOP Pelayanan Surat Pindah Penduduk			
					2. SOP pelayanan surat datang penduduk			
					3. SOP pelayanan surat keterangan kelahiran			
					4. SOP pelayanan srt keterangan kematian			
					5. SOP pelayanan KTP dan KK			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan			#DIV/0!
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	5	0.05%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	40.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	12	100.00%
					Jumlah program RENJA OPD	program	12	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	100.00%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,633,609,000.00	0.05%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,378,510,141.00	0.05%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	841,272,906.00	61.03%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,378,510,141.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	537,237,235.00	38.97%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,378,510,141.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	6,320,562,677	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GERGUNUNG
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	708,341,000	100%
					Realisasi	Rp	705,828,270	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	18	
					1. SOP Laporan Kependudukan			
					2. SOP surat rekomendasi			
					3. SOP rekomendasi HO			
					4. SOP surat keterangan kematian			
					5. SOP surat kelahiran dst sampai 18 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	5	0%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	20%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	14	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	14	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	14	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	14	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	14	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	14	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,650,505,000.00	0.05%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,481,762,791.00	0.06%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	1,058,144,223.00	71%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,481,762,791.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	423,618,568.00	29%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,481,762,791.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	6,322,900,293	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN JATINOM
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	12	
					alokasi	Rp	905,841,000	99%
					Realisasi	Rp	894,049,740	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	10	
					1. SOP Layanan Surat Permohonan E-KTP			
					2. SOP Layanan surat Pembuatan / Pembaharuan KK			
					3. SOP. Laporan Kependudukan			
					4. SOP Layanan Penduduk Datang			
					5. Pengurusan Surat Keterangan Kematian			
					6. Layanan Surat Kelahiran			
					7.SOP Layanan surat pindah penduduk			
					8. SOP Layanan Pengantar SKCK			
					9. SOP. Layanan Penarikan PBB			
					10. SOP. Layanan Legalitas			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	80%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	5	0.05%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	2	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	15	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	15	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	14	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	14	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	14	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	14	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,753,853,000.00	0.06%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,555,630,729.00	0.06%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	1,116,663,966.00	72%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,555,630,729.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	438,966,763.00	28%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,555,630,729.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	4,205,013,944	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tdk ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tdk ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENG
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	8	
					alokasi	Rp	714,309,289	99%
					Realisasi	Rp	705,804,640	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	2	
					1. SOP ttg Pelayanan Pindah KK			
					2. SOP ttg Pelayanan KTP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		tidak ada	#VALUE!
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	60%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	6	0.06%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	33.33%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	3	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	3	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	11	100.00%
					Jumlah program RENJA OPD	program	11	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	11	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	11	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	11	100.00%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	11	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,679,840,000.00	0.05%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,464,604,812.00	0.05%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	878,175,582.00	59.96%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,464,604,812.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	586,429,230.00	40.04%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,464,604,812.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,685,293,504	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	-	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KABUPATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	9	
					alokasi	Rp	695,822,000	96%
					Realisasi	Rp	669,876,956	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	6	
					1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)			
					2. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris			
					3. Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha			
					4. Layanan surat rekomendasi HO			
					5. Pelayanan Legalisasi Umum			
					6. Pelayanan Surat Pindah Penduduk			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan		Tidak	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	TIDAK ADA	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	6	0.06%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	20%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	11	100%
					Jumlah program RENJA OPD	program	11	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	11	100%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	11	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	11	100%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	11	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,565,651,000.00	0.05%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,363,834,082.00	0.05%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	879,343,695.00	64%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,363,834,082.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	484,490,387.00	36%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,363,834,082.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,265,924,561	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KLATEN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	10	
					alokasi	Rp	663,791,000	99%
					Realisasi	Rp	657,857,750	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure*	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP		tidak ada	
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan			#DIV/0!
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	6	0.06%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	20.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	12	100.00%
					Jumlah program RENJA OPD	program	12	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	100.00%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,607,450,000.00	0.05%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,350,972,969.00	0.05%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	841,189,518.00	62.27%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,350,972,969.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	509,783,451.00	37.73%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,350,972,969.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	1,604,434,073	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	

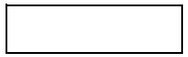

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN MOJAYAN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	11	
					alokasi	Rp	762,405,500	99%
					Realisasi	Rp	752,163,415	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	
					1. SOP ttg Pelayanan Pindah KK	5		
					2. SOP ttg Pelayanan Kelahiran			
					3. SOP ttg Pelayanan Kematian			
					4. SOP ttg Pelayanan KTP			
					5. SOP ttg Pelayanan Nikah			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	6	0.06%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	1	20.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	14	100.00%
					Jumlah program RENJA OPD	program	14	

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	14	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	14	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	14	100.00%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	14	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,639,383,000.00	0.05%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,441,153,876.00	0.05%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	922,633,722.00	64.02%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,441,153,876.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	518,520,154.00	35.98%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,441,153,876.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	10,436,244,639	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	TIDAK ADA	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN TONGGALAN
Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	jumlah program yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	sebutkan program yang berkaitan dengan penyelengaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran serta realisasinya	program	9	
					alokasi	Rp	732,141,000	93%
					Realisasi	Rp	678,466,982	
		2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	9	
					1. SOP Musrenbang kelurahan			
					2. SOP Surat keterangan Waris			
					3. SOP Legalisasi Umum			
					4. SOP rekomendasi ijin usaha			
					5. SOP KTP, dan seterusnya ada 9 SOP			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	keberadaan peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada atau tidak ada	apabila ada sebutkan			#DIV/0!
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100%
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	7	0.07%
					Jumlah PNS Kabupaten	orang	9877	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim …org	orang	0	0.00%
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100.00%
					Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	5	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RENJA-SKPD		-RENJA-OPD	ada/tidak	ada	
			-RKA-SKPD		-RKA-OPD	ada/tidak	ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	program	12	100.00%

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Satuan elemen data	LPPD	
							Elemen Data	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah program RENJA OPD	program	12	
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	12	100.00%
					Jumlah Program dalam RKA OPD	program	12	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	12	100.00%
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	12	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp	1,667,693,000.00	0.05%
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	3,091,935,509,198.52	
		14	realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,386,068,552.00	0.05%
					total realisasi belanja APBD	Rp	2,675,948,342,710.68	
		15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah	Rp	836,895,877.00	60.38%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,386,068,552.00	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah	Rp	549,172,675.00	39.62%
					Total realisasi belanja perangkat daerah	Rp	1,386,068,552.00	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada **laporan inventarisasi** barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp		0.00%
					Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	2,536,271,292	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Media Informasi	ada/tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**ada/tidak surat ketetapan** hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DISPERMASDES, BPBD, SEK. DPRD, SETDA, DPU DAN PR, KECAMATAN, KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
I	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**192,195,726**	**192,195,726**	**156,774,166**	**82**	**100**		**Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	77	77	%	95	%	100
1	Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	192,195,726	192,195,726	156,774,166	82	100	Kabupaten Klaten	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan/ bimteks	1,000	1,000	Orang	1,000	Orang	100
II	**Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**2,672,704,150**	**2,767,704,150**	**2,117,954,375**	**66**	**100**		**Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan**	72	72	%	59	%	100
1	Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa	199,441,125	199,441,125	100,611,000	50	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peraturan yang disosialisasikan kepada pemerintah desa kabupaten Klaten	4	4	peraturan	3	peraturan	100
2	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa	134,000,000	134,000,000	97,829,250	73	100	Kabupaten Klaten	Jumlah regulasi tentang desa yang tersusun Kabupaten Klaten	4	4	regulasi	4	regulasi	100
3	Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa	1,969,629,375	2,064,629,375	1,665,183,017	81	100	Kabupaten Klaten	Jumlah penyelenggaraan pemilihan kepala desa kabupaten klaten	344	345	desa	345	Kepala desa	100
4	Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	60,957,800	60,957,800	20,738,325	34	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta fasilitasi aparatur pemerintahan desa dan kecamatan dalam satu tahun	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
5	Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa	95,948,750	95,948,750	80,030,500	83	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta lomba tertib administrasi desa tingkat kabupaten klaten	26	26	desa	26	desa	100
6	Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa	30,964,600	30,964,600	20,006,654	65	100	Kabupaten Klaten	Jumlah penyelesaian tanah kas desa	9	9	kegiatan	10	kegiatan	100
7	Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan	181,762,500	181,762,500	133,555,629	73	100	Kabupaten Klaten	jumlah desa yang dinilai perkembangan pembangunan	26	26	desa	26	desa	100
SEKRETARIAT DEWAN (SETWAN)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1,718,180,000**	**1,893,880,000**	**1,468,195,476**	**77.52**	**100**		**Persentase pemenuhan operasional kantor (%)**	**8,126**	**8,130**		**8,841**		
1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	44,800,000	54,800,000	43,305,600.00	79.02	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis pelayanan surat menyurat	8000	8000	Surat	8700	Surat	109
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300,000,000	300,000,000	196,783,221.00	65.59	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	12-Jan	4	Rekening	4	Rekening	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan	83,754,000	99,454,000	96,198,066.00	96.73	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis jasa administrasi yang disediakan	10	1	orang/paket	1	orang/pake	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	193,453,000	193,453,000	142,592,197.00	73.71	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	7	10	jenis/orang	10	jenis/orang	100
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45,000,000	45,000,000	38,909,250.00	86.47	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7	7	jenis	7	jenis	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11,454,000	11,454,000	4,522,000.00	39.48	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1	1	paket	1	paket	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118,000,000	118,000,000	81,695,750.00	69.23	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8	8	jenis	8	jenis	100
7.9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	124,975,000	124,975,000	71,610,500.00	57.30	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14	14	jenis	14	jenis	100
8.9	Penyediaan Logistik Kantor	20,000,000	20,000,000	3,728,750	18.64	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	7	7	unit	7	unit	100
9.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	180,000,000	230,000,000	149,477,505	64.99	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	1	1	paket	1	paket	100
11	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	250,000,000	350,000,000	346,747,385	99.07	100	Sekretariat DPRD	jumlah dan jenis penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	12	bulan	12	bulan	100
12	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30,000,000	30,000,000	13,491,500	44.97	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	12	bulan	12	bulan	100
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor	261,744,000	261,744,000	252,646,352	96.52	100	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor	14	14	orang	14	orang	100
14	Kegiatan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	55,000,000	55,000,000	26,487,400	48.16	100	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Klaten	50	50	orang	50	orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**	**723,669,000**	**673,169,000**	**374,966,285**	**55.70**			**Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**59**	**59**		**59**		**100**
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	124,680,000	124,680,000	114,117,500	91.53	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2	2	unit	2	unit	100
16	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	60,000,000	60,000,000	52,781,678	87.97	100	Sekretariat DPRD	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1	1	unit	1	unit	100
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,000,000	100,000,000	89,070,750	89.07	100	Sekretariat DPRD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	2	unit	2	unit	100
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	129,629,000	116,129,000	25,856,582	22.27	100	Sekretariat DPRD	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4	4	unit	4	unit	100
19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	149,815,000	112,815,000	43,183,675	38.28	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dipelihara	20	20	unit	20	unit	100
20	Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	30,000,000	30,000,000	6,660,000	22.20	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	7	7	jenis	7	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	120,000,000	120,000,000	39,984,100	33.32	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	18	18	jenis	18	jenis	100
22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	9,545,000	9,545,000	3,312,000	34.70	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara	5	5	jenis	5	jenis	100
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**403,000,000**	**292,947,750**	**72.69**	**100**		**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD (%)**	**300**	**300**		**300**		**100**
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	373,000,000	373,000,000	266,197,750	71.37	100	Sekretariat DPRD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	250	250	stel	250	stel	100
24	Pengadaan Pakaian Ciri Khas Daerah	30,000,000	30,000,000	26,750,000	89.17	100	Sekretariat DPRD	Jumlah pakaian ciri khas daerah bagi anggota DPRD yang disediakan	50	50	stel	50	stel	100
IV	**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan**	**4,000,000**	**4,000,000**	**2,661,000**	**66.53**	**100**		**Persentase DokumenPerencanaan, LaporanKeuangan dan Kinerja**	**2**	**2**		**2**		**100**
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,000,000	4,000,000	2,661,000	66.53	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen lakip dan LKPPD yang disusun	2	2	dokumen	2	dokumen	100
V	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**22,142,151,000**	**27,592,151,000**	**24,233,330,018**	**87.83**			Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
								Persentase Tersusun dan terintegrasinya program -program kerja DPRD untuk melaksanakan	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
								Persentase Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
								Persentase produk Perda terbentuk	**100**	**100**	**%**	**92**	**%**	**92**
								Persentase produk pengawasan DPRD	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
								Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
26	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3,761,555,000	6,011,555,000	5,321,175,448	88.52	92	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis Raperda yang dibahas	12	13	Raperda	12	Raperda	92
27	Hearing/ Dialog & Koord. Dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat	600,000,000	600,000,000	224,483,332	37.41	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis hearing/dialog dengan tokoh masyarat/agama	12	12	bulan	12	bulan	100
28	Rapat-rapat Paripurna	397,143,000	397,143,000	329,924,350	83.07	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis fasilitas rapat-rapat Paripurna DPRD	30	30	kali	30	kali	100
29	Reses	2,229,502,000	2,244,902,000	2,107,278,500	93.87	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis reses	3	2	kegiatan	2	kegiatan	100
30	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	3,359,092,000	3,359,092,000	2,632,826,825	78.38	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis workshop DPRD kab. Klaten	6	6	kegiatan	6	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
31	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	46,800,000	46,800,000		0.00	0	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis sosialisai peraturan perundan-undangan	6	6	kegiatan	0	kegiatan	0
32	Penyusunan Produk Hukum DPRD	410,906,000	410,906,000	66,673,338	16.23	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis produk hukum DPRD	20	20	dokumen	20	dokumen	100
33	Penyusunan Risalah	75,000,000	125,000,000	76,283,800	61.03	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis Risalah rapat Paripurna DPRD	30	40	risalah	40	risalah	100
34	Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	10,254,023,000	13,404,023,000	12,766,053,200	95.24	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis kegiatan Alkab DPRD	12	12	bulan	12	bulan	100
35	Fasilitasi Fraksi DPRD	363,000,000	347,600,000	290,583,000	83.60	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis fasilitas keg. Fraksi DPRD	7	7	orang	7	orang	100
36	Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	386,282,000	386,282,000	276,191,686	71.50	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	1	1	paket	1	paket	100
37	Penyebarluasa informasi lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	258,848,000	258,848,000	141,856,539	54.80	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyebarluasan informasi kedewanan	1	1	paket	1	paket	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**294,000,000**	**309,000,000**	**299,271,086**				**Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**100**	%	100	%	100%
1	Penyediaan alat tulis kantor	24,000,000	24,000,000	21,942,100	91.4%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah ATK yang tersedia	29	29	jenis	29	jenis	100%
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,000	40,000,000	34,625,000	86.6%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	3 (Paket)	4	jenis	3	jenis	75%
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	5,000,000	4,757,500	95.2%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4	4	jenis	4	jenis	100%
4	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	25,000,000	23,869,100	95.5%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah kegiatan penyediaan makan dan minum rapat	40	40	kegiatan	33	kegiatan	83%
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195,000,000	195,000,000	194,691,886	99.8%	100	Luar Kab. Klaten	jumlah kegiatan perjalanan dinas luar daerah	90	90	kegiatan	76	kegiatan	84%
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20,000,000	20,000,000	19,385,500	96.9%	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam daerah	50	50	kegiatan	82	kegiatan	164%
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**240,000,000**	**240,000,000**	**207,969,321**				**Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik**	**90**	**90**	**%**	100	**%**	111%
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	87,000,000	87,000,000	81,810,000	94.0%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah perlengkapan gedung kantor baru	39	39	unit	11	unit	28%
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	85,000,000	85,000,000	79,697,000	93.8%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah peralatan gedung kantor baru	11	11	unit	39	unit	355%
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25,000,000	25,000,000	11,742,321	47.0%	100	Bagian Pemerintahan	jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik	5	5	unit	5	unit	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8,000,000	8,000,000	2,320,000	29.0%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4	4	unit	4	unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35,000,000	35,000,000	32,400,000	92.6%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah item peralatan gedung kantor terpelihara	3	3	Jenis	3	Jenis	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	**451,000,000**	**951,000,000**	**427,616,253**				**Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	%	100	%	100%
1	Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	11,000,000	511,000,000	10,565,000	2.1%	23	Kab. Klaten	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi Bupati (Koordinasi Bupati dengan OPD, Instansi Vertikal, Stakeholder terkait dan Kepala Daerah lain)	48	49	dokumen	48	dokumen	98%
2	Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	275,000,000	275,000,000	265,644,303	96.6%	97	Kab. Klaten	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	4	dokumen	4	dokumen	100%
3	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah	165,000,000	165,000,000	151,406,950	91.8%	92	Kab. Klaten	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	5 dokumen	dokumen	5	dokumen	#VALUE!
IV	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	**135,000,000**	**135,000,000**	**128,571,023**				**Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah**	**15%**	**15%**	%	90	%	60000%
1	Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah	135,000,000	135,000,000	128,571,023	95.2%	100	Kab. Klaten dan Luar Kab. Klaten	Jumlah perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama baru	5 dokumen	5	dokumen	70	dokumen	1400%
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**120,000,000**	**120,000,000**	**105,579,770**				**Persentase Kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi Kecamatan secara baik**	**90**	**90**	%	90	%	100%
1	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	67,000,000	67,000,000	59,077,250	88.2%	100	Kab. Klaten	jumlah Kecamatan yang mendapaatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tertib administrasi kecamatan	26	26	Kecamatan	70	Kecamatan	269%
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	53,000,000	53,000,000	46,502,520	87.7%	100	Kab. Klaten	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi PATEN	26	26	Kecamatan	29.7	Kecamatan	114%
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMBANGUNAN)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**124,200,000**	**144,200,000**	**132,989,399**										
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,200,000	4,200,000	3,900,000	93	100	Bagian Pembangunan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1095	1095	Eksemplar	1095	Eksemplar	100
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100,000,000	100,000,000	96,797,899	97	100	Bagian Pembangunan	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
3	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	20,000,000	40,000,000	32,291,500	81	100	Bagian Pembangunan	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	40	40	Kali	40	Kali	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**151,640,000**	**201,650,000**	**174,828,000**										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	106,190,000	155,200,000	145,900,000	94	100	Bagian Pembangunan	Jumlah peralatan gedung terbeli	12	12	Unit	12	Unit	100
2	Pengadaan Mebeleur	1,500,000	1,500,000	1,210,000	81	100	Bagian Pembangunan	Jumlah mebelair terbeli	1	1	Unit	1	Unit	100
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	33,950,000	33,950,000	16,971,000	50	100	Bagian Pembangunan	Jumlah kendaraan dinas/Operasional terpelihara	5	5	Unit	5	Unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	11,000,000	10,747,000	98	100	Bagian Pembangunan	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	14	14	Unit	14	Unit	100
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**118,000,000**	**121,500,000**	**86,781,500**										
1	Sosialisasi Peraturan Per UU an	59,000,000	59,000,000	35,228,000	60	100	Bagian Pembangunan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1	1	Kali	1	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pembinaan Kompetensi Teknis	59,000,000	62,500,000	51,553,500	82	100	Bagian Pembangunan		2	2	Kali	2	Kali	100
V	**Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**	**796,000,000**	**967,457,000**	**767,382,501**										
1	Peny. Perat. Bupati Klaten ttg Petunjuk Pelaks. Keg./Proyek di Kabupaten Klaten	32,000,000	73,700,000	55,673,500	76	100	Bagian Pembangunan	Jumlah buku peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan	1	1	Perbup	1	Perbup	100
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	41,000,000	47,500,000	16,710,825	35	100	Bagian Pembangunan	Jumlah perangkat daerah	51	51	Perangkat daerah	51	Perangkat daerah	100
3	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	131,000,000	146,757,000	93,049,650	63	100	Bagian Pembangunan	Jumlah perangkat daerah	51	51	Perangkat daerah	51	Perangkat daerah	100
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	189,000,000	204,000,000	178,191,650	87	100	Bagian Pembangunan	Jumlah perangkat daerah	51	51	Perangkat daerah	51	Perangkat daerah	100
5	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	403,000,000	495,500,000	423,756,876	86	100	Bagian Pembangunan	Jumlah perangkat daerah	51	51	Perangkat daerah	51	Perangkat daerah	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**118,500,000**	**167,500,000**	**152,631,355**	91.12	94		**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	100	100	%	95	%	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,800,000	10,000,000	9,347,200	93.47	100	BAG HUKUM	Jumlah Jenis ATK tersedia	12 bulan	50	Jenis	50	Jenis	100
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,000,000	10,000,000	9,969,800	99.70	100	BAG HUKUM	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	7 Dokumen	20	Jenis	20	Jenis	100
3	Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	15,000,000	14,974,000	99.83	100	BAG HUKUM	Jumlah Bahan Bacaan dan buku peraturan	2 buku, surat kabar	25	buku	25	buku	100
4	Penyediaan Makan dan Minuman	5,000,000	5,000,000	3,996,000	79.92	100	BAG HUKUM	Jumlah makan dan minuman tersedia	12 bulan	300	paket	300	paket	100
5	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luardaerah	48,200,000	60,000,000	59,682,248	99.47	100	LUAR KLATEN	Jumlah kegiatan Perjadin Luar Daerah	12 bulan	25	keg	25	keg	100
6	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5,500,000	5,500,000	5,200,000	94.55	100	DALAM KOTA KLATEN	Jumlah kegiatan Perjadin Dalam Daerah	500 kegiatan	25	keg	25	keg	100
7	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	30,000,000	62,000,000	49,462,107	79.78	60	BAG HUKUM	Jumlah tenaga administrasi perkantor	2 orang	5	org	3	org	60
II	**Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**45,000,000**	**168,000,000**	**137,201,549**	81.67	75		**Persentase sarana dan prasarana kantor terpenuhidan dalam kondisi baik**	90%	90%	%	75	%	8333
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000	128,000,000	117,610,000	91.88	100	BAG HUKUM	Jemlah perlengkapan gedung	4 unit	13	unit	13	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	10,000,000	10,000,000	6,240,549	62.41	100	BAG HUKUM	Jumlah kendaraan Dinas	4 unit (1 Mobil, 3 Motor)	4	unit	4	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	15,000,000	15,000,000		0.00	0	BAG HUKUM	Jumlah peralatan yang terpelihara	20 unit	20	unit	0	unit	0
4	Penataan Kearsipan	-	15,000,000	13,351,000	89.01	100	BAG HUKUM	Jumlah keg penataan kearsipan	3 kegiatan	3	keg	3	keg	100
III	**Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**1,301,500,000**	**1,861,500,000**	**1,667,423,958**	89.57	100		**Prosentase tercapainya penyusunan produk hukum**	12 raperda 12 perda 50 perbub 77 perda/perbup	90% 85% 90% 90%	%	100 100 192 65	%	11111 11765 21333 7222
1	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	25,000,000	22,750,000	91.00	100	BAG HUKUM	Jumlah buku	86 Dokumen(26 Perda dan 60 Perbub)	1000	buku	1000	buku	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Kajian Peraturan Perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan	40,000,000	40,000,000	37,613,168	94.03	100	BAG HUKUM	Jumlah produk hukum yang dikaji	15 Dokumen (Draft)	15	dok	15	dok	100
3	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	916,500,000	1,476,500,000	1,316,172,959	89.14	100	BAG HUKUM	Jumlah perda yang disusun Jumlah peraturan bupati yang tersusun	3 kegiatan (12 Raperda, 60 Perbub, 12	3	keg	3	keg	100
4	Pengembangan System JDIH	45,000,000	45,000,000	43,866,181	97.48	100	BAG HUKUM	Jumlah kegiatan	15 kegiatan	1	keg	1	keg	100
5	Evaluasi Produk Hukum Daerah	75,000,000	75,000,000	64,092,200	85.46	100	BAG HUKUM	Jumlah evaluasi	10 perda	1	dok	1	dok	100
6	Penyusunan Himpunan LD dan TLD	100,000,000	100,000,000	91,741,000	91.74	100	BAG HUKUM	Jumlah Buku Himpunan	3 Dokumen	1200	buku	1200	buku	100
7	Penyusunan Prolegda	100,000,000	100,000,000	91,188,450	91.19	100	BAG HUKUM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	dok	1	dok	100
IV	**Penyuluhan dan Pelayana Bantuan Hukum dan HAM**	**685,000,000**	**820,000,000**	**567,147,166**	69.16	81		**Prosentase Penanganan indek kabupaten Peduli HAM**	4 perkara	90%	%	100	%	11111
1	Sosialisasi Produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu	235,000,000	235,000,000	214,036,200	91.08	100	BAG HUKUM	Jumlah Masyarakat dan Aparatur	12 bulan	1500	org	1500	org	100
2	Penanganan Perkara/gugatan Perdata, Perkara TUN dan penghormatan HAM	350,000,000	485,000,000	278,742,009	57.47	43	PN. TUN	Jumlah perkara yang tertangani	10 perkara	14	perkara	6	perkara	43
3	Rancana Aksi HAM	100,000,000	100,000,000	74,368,957	74.37	100	BAG HUKUM	Jumlah Peserta RANHAM	100 orang	200	org	200	org	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
I	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**87,000,000**	**87,000,000**	**74,945,690**										
1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10,000,000	10,000,000	9,980,000	100	100	Bag. Perekonomian	Jumlah perbaikan peralatan kerja	13	13	unit	13	unit	100
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000	10,000,000	9,728,500	97	100	Bag. Perekonomian	Jumlah jenis ATK yang tersedia	18	18	jenis	18	jenis	100
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,000,000	12,000,000	11,949,000	100	100	Bag. Perekonomian	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3	3	jenis	3	jenis	100
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	40,000,000	40,000,000	28,350,690	71	100	Prov. Jateng, DIY, DKI/Jabar	Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	19	19	kegiatan	23	kegiatan	121
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15,000,000	15,000,000	14,937,500	100	100	Kab. Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	38	38	kegiatan	72	kegiatan	189
II	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**62,000,000**	**80,000,000**	**62,955,500**	**79**	100	**Bag. Perekonomian**	**Prosentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik**	**92**	**92**	**%**	**92**	**%**	**100**
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	47,000,000	61,000,000	56,280,000	92	100	Bag. Perekonomian	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	4	6	jenis	6	jenis	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15,000,000	19,000,000	6,675,500	35	100	Bag. Perekonomian	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	5	5	unit	5	unit	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**154,000,000**	**154,000,000**	**123,607,543**										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	5,000,000	4,424,000	88.48	100	Bagian Organisasi	Jumlah surat terkirim dan masuk Bagian Organisasi	2000	2000	Surat	1749	Surat	87
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,000,000	15,000,000	14,987,500	99.92	100	Bagian Organisasi	Jumlah jenis ATK tersedia	1	1	Paket	1	Paket	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,000,000	10,000,000	8,635,000	86.35	100	Bagian Organisasi	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6	6	Jenis	6	Jenis	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6,000,000	6,000,000	5,186,400	86.44	100	Bagian Organisasi	Jumlah surat kabar/ bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	5	5	Jenis	5	Jenis	100
5	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000	10,000,000	2,318,750	23.19	100	Bagian Organisasi	Jumlah rapat dan koordinasi Bagian Organisasi	26	26	Jumlah	12	Jumlah	46
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	98,000,000	98,000,000	85,705,893	87.45	100	Bagian Organisasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	70	70	Kegiatan	63	Kegiatan	90
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,000,000	10,000,000	2,350,000	23.50	100	Bagian Organisasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	60	Kegiatan	50	Kegiatan	83
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur**	**72,000,000**	**72,000,000**	**53,242,099**										
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	18,000,000	18,000,000	17,400,000	96.67	100	Bagian Organisasi	Jumlah pengadaan brankas, rak kayu dan white board Bagian Organisasi	1	1	Paket	1	Paket	100
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	30,000,000	30,000,000	28,418,000	94.73	100	Bagian Organisasi	Jumlah pengadaan peralatan kantor	2	2	Unit	2	Unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15,000,000	15,000,000	7,424,099	49.49	100	Bagian Organisasi	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bagian Organisasi	1 Mobil dan 3 Sepeda Motor	1 Mobil dan 3 Sepeda Motor	Unit	1 Mobil dan 3 Sepeda Motor	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,000,000	9,000,000	0	0.00	0	Bagian Organisasi	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Bagian Organisasi	7	7	Unit	0	Unit	0
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**15,000,000**	**15,000,000**	**9,771,875**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	15,000,000	9,771,875	65.15	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah, PK dan IKU	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**550,000,000**	**930,000,000**	**769,516,054**										
1	Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	150,000,000	150,000,000	114,029,503	76.02	100	Bagian Organisasi	Jumlah laporan kinerja, Perjanjian Kinerja dan IKU Kabupaten	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
2	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Non Struktural	100,000,000	300,000,000	254,972,521	84.99	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev, draft perda, draft perbup kelembagaan perangkat daerah	2	4	Dokumen	4	Dokumen	100
3	Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja	100,000,000	200,000,000	165,749,761	82.87	100	Bagian Organisasi	Jumlah OPD yang terfasilitasi penyusunan SOP dan tertib administrasi	59	59	OPD dan Bagian	59	OPD dan Bagian	100
4	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	100,000,000	180,000,000	157,180,269	87.32	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen SKM kabupaten, Laporan Pencapaian SPM, Dokumen Proposal Inovasi Pelayanan Publik dan Perbup standar pelayanan	3	4	Dokumen	4	Dokumen	100
5	Penyusunan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,000,000	100,000,000	77,584,000	77.58	100	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen hasil SKM	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**152,123,000**	**222,123,000**	**193,498,475**				**Persentase Pemenuhan Kabutuhan Administrasi Perkantoran**						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,975,000	3,975,000	3,975,000	65	100	Bagian kesra	Jumlah surat yang terkirim	12 bulan	106 surat	surat	106	surat	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12,200,000	12,200,000	7,885,000	65	95	Bagian kesra	Jumlah item peralatan kerja yang diperbaiki	17 unit	17 kali	kali	17	kali	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	13,864,000	13,864,000	11,536,400	83	95	Bagian kesra	Jumlah item ATK yang tersedia	1 paket	35 jenis	jenis	35	jenis	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,600,000	20,600,000	18,650,000	91	100	Bagian kesra	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	7 Dokumen	2 jenis	jenis	2	jenis	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,084,000	3,084,000	2,832,000	92	100	Bagian kesra	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 Jenis	3 buah	buah	3	buah	100
6	Penyediaan makanan dan minuman	8,400,000	8,400,000	7,825,000	93	100	Bagian kesra	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	300 paket	paket	300	paket	100
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50,000,000	85,000,000	84,918,575	100	100	Luar Kabupaten Klaten	Jumlah frekwensi Perjalanan Dinas luar daerah	12 bulan	150 Kali	kali	150	kali	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40,000,000	75,000,000	55,876,500	75	90	Kabupaten Klaten	Jumlah frekwensi Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan	300 kali	kali	300	kali	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**11,640,000**	**11,640,000**	**7,161,751**				**Persentase Sarana dan Prasarana kantor terpenuhi dan dalam kondisi baik**						
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11,640,000	11,640,000	7,161,751	62	70	Bagian kesra	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	7(2 mobil, 5 motor)	7 unit	unit	7	unit	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUMAS)														
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**516,832,439**	**642,417,500**	**599,728,061**	90.91	99	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	95%				100
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,800,000	32,000,000	29,837,034	93.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Jenis Rekening	4	4	Rekening	4	Rekening	100
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12,000,000	13,100,000	13,100,000	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	jumlah tenaga administrasi Keuangan Bag. Humas	6	6	Orang	6	Orang	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	156,465,179	209,247,000	197,308,469	94.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah THL Tenaga Kebersihan, THL Protokol dan Tenaga Dokumentasi Bag. Humas	11	11	Orang	11	Orang	100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30,000,000	35,000,000	34,905,000	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Alat Terpelihara	52	52	Unit	52	Unit	100
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	29,143,860	35,145,100	32,143,900	91.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Alat Kantor Tersedia Bag. Humas	61	61	Jenis	61	Jenis	100
6	Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan	34,205,000	34,205,000	33,719,250	99.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah cetak dan penggandaan Bag. Humas	77.850	77.850	Eksemplar	77.850	Eksemplar	100
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	51,218,400	29,618,400	8,018,400	27.00	90	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Langganan Surat Kabar/Bahan Bacaan Untuk Penyusunan Kliping Berita	7	7	Media	7	Media	100
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	10,000,000	15,252,000	15,180,000	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Rapat dan Tamu Bagian Humas	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100
9	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	40,000,000	55,000,000	53,682,008	98.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Bag. Humas	48	48	Kegiatan	48	Kegiatan	100
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	35,000,000	40,000,000	39,900,000	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bag. Humas	300	300	Kegiatan	300	Kegiatan	100
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran	90,000,000	143,850,000	141,934,000	98.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Agenda dan Vandel	450	450	Kegiatan	450	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**274,000,000**	**375,550,000**	**363,131,285**	97.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten, RSPD Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran Klaten	Meningkatnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	95%	95%				100
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	83,900,000	138,550,000	130,063,200	94.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Perlengkapan Kantor Tersedia	16	16	Unit	16	Unit	100
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45,100,000	33,500,000	32,185,350	96.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Bag. Humas	14	14	Unit	14	Unit	100
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	25,000,000	25,000,000	24,600,000	98.00	100	RSPD Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran Klaten	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	6	6	Unit	6	Unit	100
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Non Kantor	50,000,000	107,500,000	105,832,000	98.00	100	RSPD Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran Klaten	Jumlah Gedung Terpelihara	3	3	Unit	3	Unit	100
5	Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor	70,000,000	71,000,000	70,450,735	99.00	100	RSPD Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran Klaten	Jumlah Pembuatan Ruang Ganti Pakaian, Rumah Genset dan Studio Talk Show RSPD	3	3	Unit	3	Unit	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**7,868,261,000**	**9,391,761,000**	**7,814,874,157**	**83%**	**100%**		**Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**%**	**83**	**%**	**83**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	54,000,000	54,000,000	42,287,070	78%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah surat terkirim	1200	2500	surat	2500	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2,210,400,000	2,510,400,000	1,748,673,135	70%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah jenis rekening terbayar	5	5	jenis	5	jenis	100%
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	275,000,000	575,000,000	523,100,000	91%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah peralatan dan perlengkapan tersedia	1	75	kali	75	kali	100%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	135,270,000	145,270,000	131,687,155	91%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah THL administrasi	1	2	org	2	org	100%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,060,432,000	1,080,432,000	919,847,681	85%	100%	Gedung Pemda I & II, Rumdin Bup & Wabup	Jumlah THL kebersihan kantor	54	60	org	55	org	92%
6	Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000	100,000,000	99,345,400	99%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah jenis alat kantor tersedia	1	53	jenis	53	jenis	100%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,000,000	200,000,000	183,611,500	92%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	1	17	jenis	17	jenis	100%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,000,000	163,500,000	134,830,620	82%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	1	53	jenis	53	jenis	100%
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	38,828,000	38,828,000	34,572,807	89%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	36	2	bh	2	bh	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	42,000,000	42,000,000	39,753,304	95%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yg tersedia	6	6	bh	6	bh	100%
11	Penyediaan bahan logistik	375,000,000	475,000,000	391,115,500	82%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah bahan logistik tersedia	30000	2	bh	2	bh	100%
12	Penyediaan makanan dan minuman	850,000,000	1,150,000,000	1,136,281,862	99%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah makanan dan minuman tersedia	5	125	paket	125	paket	100%
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	700,000,000	900,000,000	895,914,431	100%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	300	250	kali	250	kali	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	650,000,000	750,000,000	651,697,750	87%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	1500	70	kali	70	kali	100%
15	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	933,804,000	933,804,000	697,087,380	75%	100%	Gedung Pemda I & II, Rumdin Bup & Wabup	Jumlah THL pengaman kantor	49	40	org	30	org	75%
16	Penyediaan jasa pengemudi kantor	193,527,000	193,527,000	134,068,102	69%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah THL pengemudi kantor	10	10	org	7	org	70%
17	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	50,000,000	80,000,000	51,000,460	64%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah jaminan pemeliharaan kesehatan terbayar	2	2	tagihan	1	tagihan	50%
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2,205,039,000**	**3,407,039,000**	**3,225,371,356**	**95%**	**100%**		**Prosentase sarana dan prasarana kantor terpenuhi dan dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**%**	**95**	**%**	**95**
1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	140,805,000	215,805,000	212,017,800	98%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah perlengkapan rumjab/dinas terbeli	2	7	unit	7	unit	100%
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	170,000,000	346,000,000	338,805,900	98%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah perlengkapan gedung terbeli	392	9	unit	6	unit	67%
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	219,955,000	335,955,000	331,713,100	99%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah peralatan gedung terbeli	2	5	unit	5	unit	100%
4	Pengadaan mebeleur	168,202,000	298,202,000	262,978,650	88%	100%	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin	Jumlah meubeulair terbeli	4	18	unit	15	unit	83%
5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	130,000,000	170,000,000	153,611,000	90%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah rumdin terpelihara	2	2	unit	2	unit	100%
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	523,250,000	908,250,000	850,726,100	94%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah gedung kantor terpelihara	2	2	unit	2	unit	100%
7	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	75,000,000	75,000,000	55,294,598	74%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah mobil jabatan terpelihara	4	4	unit	4	unit	100%
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	350,000,000	350,000,000	340,033,258	97%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	43	43	unit	43	unit	100%
9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	35,527,000	50,527,000	42,262,550	84%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah perlengkapan rumjab/dinas terpelihara	5	5	unit	5	unit	100%
10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	61,000,000	111,000,000	96,151,500	87%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara	3	32	unit	32	unit	100%
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30,000,000	30,000,000	29,700,000	99%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah peralatan gedung terpelihara	4	4	unit	4	unit	100%
12	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30,000,000	50,000,000	48,890,000	98%	100%	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin	Jumlah meubeulair terpelihara	4	3	jenis	3	jenis	100%
13	Penataan Lingkungan Kantor	271,300,000	466,300,000	463,186,900	99%	100%	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin	Jumlah lingkungan kantor tertata	4	5	lokasi	5	lokasi	100%
III	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**75,000,000**	**75,000,000**	**27,600,000**	**37%**	**55%**		**Prosentase terpenuhinya pakaian dinas untuk kdh/wkdh**	**100**	**100**	**%**	**55**	**%**	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	75,000,000	75,000,000	27,600,000	37%	55%	Bup & Wabup	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	2	31	bh	17	bh	55%
IV	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	**2,926,200,000**	**3,196,200,000**	**2,577,111,606**	**81%**	**100%**		**Prosentase kelancaran pelayanan kedinasan kdh/wkdh**	**100**	**100**	**%**	**98**	**%**	**98**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	350,000,000	520,000,000	519,623,125	100%	100%	Rumdin Bup & Wabup	jumlah acara jamuan tamu	36	60	paket	60	paket	100%
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	150,000,000	230,000,000	229,206,875	100%	100%	Rumdin Bup & Wabup	jumlah acara jamuan tamu	36	60	paket	60	paket	100%
3	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	75,000,000	75,000,000	63,441,875	85%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah rapat	36	36	paket	36	paket	100%
4	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	551,200,000	571,200,000	561,328,713	98%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	70	70	kali	70	kali	100%
5	Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,800,000,000	1,800,000,000	1,203,511,018	67%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah kebutuhan	2	14	jenis	13	jenis	93%
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**142,669,000**	**142,669,000**	**116,604,891**				**Prosentase terpenuhinya kelengkapan administrasi**	**100**	**100**	**%**		**%**	**94.69**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1,827,000	1,827,000	1,745,200	95.52	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Surat Terkirim	20	20	Surat	20	Surat	100
2	Penyediaan alat tulis kantor	16,954,000	16,954,000	10,802,400	63.72	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	30	30	Jenis	30	Jenis	100
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,500,000	12,500,000	5,875,160	47.00	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Jenis Cetak Penggandaan	4	4	Jenis	4	Jenis	100
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,500,000	6,500,000	5,413,650	83.29	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	4	Jenis	4	Jenis	100
5	Penyediaan makanan dan minuman	17,888,000	17,888,000	11,233,125	62.80	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia	500	500	Makan	314	Makan	62.80
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75,000,000	75,000,000	73,258,856	97.68	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	22	22	Kali	22	Kali	100
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12,000,000	12,000,000	8,276,500	68.97	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10	10	Kali	10	Kali	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**82,818,000**	**105,818,000**	**81,818,710**				**Prosentase Terpenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**	**100**	**100**	**%**		**%**	**100**
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	41,676,000	58,176,000	52,797,591	90.75	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terbeli	4	4	Jenis	4	Jenis	100
2	Pengadaan Mebeleur	15,050,000	21,550,000	19,049,000	88.39	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Julah Jenis Mebeeur Terbeli	2	2	Jenis	2	Jenis	100
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / operasional	17,092,000	17,092,000	4,207,119	24.61	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	5	5	Unit	5	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	9,000,000	9,000,000	5,765,000	64.06	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Peralatan Gedung kantor Terpelihara	16	16	Unit	16	Unit	100
III	**Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**	**617,513,000**	**523,513,000**	**385,890,557**				**Prosentase OPD Terfasilitasi Layanan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**99.67**
1	Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan	95,884,000	95,884,000	62,027,950	64.69	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati yang Dihasilkan	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
2	Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	449,667,000	364,667,000	273,457,817	74.99	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket yang Ditenderkan	200	200	Paket Lelang	198	Paket Lelang	99
3	Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	71,962,000	62,962,000	50,404,790	80.06	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah OPD dan Pelaku Usaha yang Dilayani	351	351	OPD /Pelaku Usaha	351	OPD /Pelaku Usaha	100

I	**Program Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan**	10,000,000.00	10,000,000.00	9,945,575.00										
1	Penyusunan Analisis Jabatan	10,000,000.00	10,000,000.00	9,945,575.00	99.46%	100	DPU-PR	jumlah penyusunan laporan hasil analisis jabatan sesuai peraturan yang berlaku	2	2	laporan	2	laporan	100%

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1,486,500,000**	**1,767,673,000**	**1,519,367,858**										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7,500,000	7,500,000	6,336,000.00	84.48	100	BPBD	Jumlah Surat Terkirim	500 surat	500	surat	500	surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	150,000,000	150,000,000	104,826,366.00	69.88	100	BPBD	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	3 rekening	3	rekening	3	rekening	100
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	107,400,000	107,400,000	89,412,406.00	83.25	90	BPBD	Jumlah THL kebersihan kantor dan shelter	6 orang	6	orang	6	orang	100
4	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	122,000,000	136,000,000	105,780,421.00	77.78	90	BPBD	Jumlah THL Tenaga Administrasi/teknis Kantor	5 orang	7	orang	7	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000	40,000,000	36,236,300.00	90.59	100	BPBD	Jumlah alat tulis kantor	30 Jenis	30	jenis	30	jenis	100
6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	40,000,000	40,000,000	32,367,800.00	80.92	100	BPBD	Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 jenis	6	jenis	6	jenis	100
7	Penyediaanan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	40,000,000	40,000,000	24,871,600.00	62.18	90	BPBD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	30 jenis	30	jenis	30	jenis	100
8	Penyediaanan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10,000,000	10,000,000	8,264,200.00	82.64	95	BPBD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 jenis	2	jenis	2	jenis	100
9	Penyediaan Bahan Logistik	425,000,000	505,000,000	426,552,627.00	84.47	100	BPBD	Jumlah Bahan Logistik	15 jenis	23	jenis	23	jenis	100
10	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000	70,000,000	51,187,000.00	73.12	95	BPBD	Jumlah Makanan dan minuman	27 kegiatan	27	kegiatan	27	kegiatan	100
11	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	170,000,000	270,000,000	269,521,228.00	99.82	100	BPBD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 kali	60	kali	60	kali	100
12	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	75,000,000	105,000,000	90,400,000.00	86.10	100	BPBD	Jumlah Kegiatan Rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	80 kali	90	kali	90	kali	100
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor	166,600,000	193,466,000	183,425,370.00	94.81	100	BPBD	Jumlah Honorarium tenaga harian lepas jaga kantor dan gudang	10 orang	10	orang	10	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
14	Penyediaan jasa pengemudi kantor	83,000,000	93,307,000	90,186,540.00	96.66	100	BPBD	Jumlah Honorarium Tenaga Harian Lepas dan OperasionalKendaraan siaga bencana	4 orang	3	orang	3	orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**757,550,000**	**610,377,000**	**435,409,225**										#DIV/0!
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	117,827,000	109,529,320.00	92.96	100	BPBD	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terbeli	0 unit	3	unit	3	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	440,000,000	100,000,000	80,039,000.00	80.04	100	BPBD	pemeliharaan taman ews	7 unit	4	unit	4	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	202,550,000	247,550,000	187,139,905.00	75.60	100	BPBD	Jumlah Kendaraan Roda Enam, Kendaraan Roda Empat, Roda Dua	7 jenis	7	jenis	7	jenis	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	18,331,000.00	73.32	100	BPBD	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Gudang serta Shelter	8 jenis	8	jenis	8	jenis	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	25,000,000	35,000,000	6,000,000.00	17.14	75	BPBD	Jumlah Pemeliharaan mebeleur	6 jenis	6	jenis	4	jenis	67
6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kebencanaan	65,000,000	85,000,000	34,370,000.00	40.44	75	BPBD	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kebencanaan	-	3	jenis	2	jenis	67
KEC. KLATEN UTARA														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**161,000,000**	**206,500,000**	**187,622,820**				**Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik**						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,889,800.00	96.33	85	Kec.Klaten Utara	Jumlah Surat Masuk dan Keluar selama 1 tahun	500	500	Surat	420	Surat	84
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Air dan Listrik	60,000,000	60,000,000	41,325,520.00	68.88	65	Kec.Klaten Utara	Jumlah dan Jenis Rekening Penyedia jasa Oprasional Kantor	4	4	rekening	3	rekening	75
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24,000,000	24,500,000	24,499,250.00	100.00	85	Kec.Klaten Utara	Jumlah tenaga administrasi	2	2	Orang	2	Orang	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,500,000	12,500,000	12,498,650.00	99.99	85	Kec.Klaten Utara	Jumlah tenaga Kebersihan Kantor Kecamatan	1	1	Orang	1	Orang	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3,000,000	3,000,000	2,998,450.00	99.95	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah ATK	30	25	Jenis	23	Jenis	92
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlah FC	2,000	1,900	Lembar	1,800	Lembar	94.74
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	2,000,000	1,994,450.00	99.72	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	20	15	Jenis	15	Jenis	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	8,000,000	8,000,000	7,985,000.00	99.81	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah rapat-rapat yang terorganisasi	48	46	Kegiatan	46	Kegiatan	100
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	10,000,000	50,000,000	49,983,100.00	99.97	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan keluar daerah	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	12,000,000	17,000,000	16,950,000.00	99.71	80	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan dalam daerah	60	50	Kegiatan	50	Kegiatan	100
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	24,500,000	24,500,000	24,498,600.00	99.99	85	Kec.Klaten Utara	Jumlah tenaga keamanan kantor	2	2	Orang	2	Orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**11,000,000**	**101,500,000**	**98,146,550**				**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik**						
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	85,800,000	85,350,500.00	99.48	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0.00	3	Unit	3	Unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8,000,000	8,000,000	5,147,050.00	64.34	70	Kec.Klaten Utara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, 8 sepeda motor, 1 mobil	9	9	Unit	8	Unit	88.9
3	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor dan rumah tangga	3,000,000	7,700,000	7,649,000.00	99.34	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah peralatan kantor dan rumah tangga yang dipelihara	9	9	Jenis	9	Jenis	100.0

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1,200,000**	**1,200,000**	**200,000**			Kec.Klaten Utara	**Pencapaian laporan tepat waktu**						
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,200,000	1,200,000	200,000.00	16.67	20	Kec.Klaten Utara	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	1	1	Laporan/Dokumen	1	Laporan/Dokumen	100.0
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**82,000,000**	**87,000,000**	**83,434,050**			Kec.Klaten Utara	**Jumlah LKM/BKM/LPMD**						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	7,000,000.00	100.00	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah keg musrenbag kec	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	3,559,800.00	71.20	75	Kec.Klaten Utara	Jumlah desa yang dibina	8	8	Desa/Kelurahan	7	Desa/Kelurahan	87.5
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	4,000,000	9,000,000	8,512,750.00	94.59	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah pengendalian ADD, DD	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
4	Penunjang Operasional Penyampain Bantuan Keuangan	7,000,000	7,000,000	6,613,800.00	94.48	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	18,000,000	18,000,000	17,628,000.00	97.93	90	Kec.Klaten Utara	Jumlah pembinaan PKK desa	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,119,800.00	85.33	90	Kec.Klaten Utara	Jumlah dokumen profil desa	6	6	Desa	6	Desa	100.0
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,999,900.00	100.00	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan acara sambang warga	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.0
V	**Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**40,000,000**	**44,500,000**	**43,645,350**			Kec.Klaten Utara	**Rasio penanganan ketentraman dan kertertiban umum di kec**						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	34,000,000	38,500,000	38,001,600.00	98.71	80	Kec.Klaten Utara	pelaksanaan cipta kondisi dan patroli terpadu	4	4	Kegiatan/Triwulan	4	Kegiatan/Triwulan	100.0
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,818,750.00	93.96	90	Kec.Klaten Utara	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,825,000.00	94.17	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah penyelenggaraan tindaklanjut kejadian luar biasa	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
VI	**Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**36,000,000**	**36,000,000**	**35,883,400**			Kec.Klaten Utara	**Prosentase pembinaan pemerintah desa dengan baik**						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,959,600.00	98.99	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah koordinasi tapem dengan pemdes	6	6	Desa	6	Desa	100.0
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,999,000.00	99.98	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah pembinaan administrasi tapem, APBDes, RKPDes	6	6	Desa	6	Desa	100.0
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000.00	100.00	20	Kec.Klaten Utara	Jumlah tindaklanjut permasalahan administrasi tapem	6	6	Desa	2	Desa	33.3

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	100.00	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah penagihan PBB	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	8,000,000	8,000,000	7,975,000.00	99.69	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah pemenang lomba tertib administrasi desa	6	6	Desa	6	Desa	100.0
6	Koordinasi Pemilihan kepala Desa	11,000,000	11,000,000	10,949,800.00	99.54	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah Kepala Desa Terpilih	6	6	Desa	6	Desa	100.0

KELURAHAN BARENG LOR

I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**102,400,000**	**102,400,000**	**96,430,946**										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	15,000,000	15,000,000	9,246,686	61,64	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yg terbayar	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15,000,000	15,000,000	14,898,420	99,32	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	bulan	12	bulan	12	bulan	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,500,000	13,500,000	13,495,520	99,97	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	bulan	12	bulan	12	bulan	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	10,000,000	10,000,000	9,988,750	99,89	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah ATK yg tersedia	bulan	12	bulan	12	bulan	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah brg cetakan dan Penggandaan	bulan	12	bulan	12	bulan	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,500,000	1,500,000	1,487,350	99,16	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah komponen listrik yg tersedia	bulan	12	bulan	12	bulan	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,998,700	99,94	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	jenis surat kabar	2	jenis surat k	2	jenis surat	100
10	Penyediaan makanan dan minuman.	5,500,000	5,500,000	5,492,500	99,85	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi	kali	12	kali	12	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	kali	12	kali	12	kali	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100.00	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	kali	60	kali	60	kali	100
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor.	14,000,000	14,000,000	13,923,020	99,45	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	bulan	12	bulan	12	bulan	100
II	**Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**	**13,000,000**	**13,000,000**	**12,916,800**										
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0										
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	0	0	0										
3	Pengadaan Mebeleur	0	0	0										
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3,000,000	3,000,000	2,976,500	99,22	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	1,500,000	1,500,000	1,442,200	96,15	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	unit	1	unit	1	unit	100
6	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	0	0	0										
7	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara	unit	5	unit	5	unit	100
8	Penataan Lingkungan Kantor	2,500,000	2,500,000	2,498,100	99,92	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah taman, Gapura Kantor dan Pavingisasi lingkungan kantor	paket	3	paket	3	paket	100
III	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,498,900**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000	1,498,900	99,93	100	Kel. Bareng Lor	Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2017 disusun dengan baik dan tepat waktu	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan**	**213,000,000**	**210,200,000**	**206,064,250**		**100**	Kel. Bareng Lor							
1	Pemberdayaan RT	105,000,000	105,000,000	104,413,500	99,44	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah koordinasi RT	Rt	41	Rt	41	Rt	100
2	Pemberdayaan RW	33,000,000	33,000,000	32,959,750	99,88	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah koordinasi RW	Rw	14	Rw	14	Rw	100
3	Pemberdayaan PKK	15,000,000	15,000,000	14,993,850	99,96	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi PKK	kali	12	kali	12	kali	100
4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	2,000,000	2,000,000	1,999,650	99,98	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	kali	12	kali	12	kali	100
5	Operasional LPMK	25,000,000	25,000,000	24,999,300	100	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi LPMK	kali	12	kali	12	kali	100
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD dan Posyandu)	30,200,000	30,200,000	26,698,200	88,40	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah anak dini usia yang memperoleh manfaat pendidikan - Jumlah posyandu yang diberdayakan - Jumlah balita yang memperoleh manfaat posyandu	PAUD dan Posyandu	1	PAUD dan Posyandu	1	PAUD dan Posyandu	100
V	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan**	**68,000,000**	**68,000,000**	**67,976,000**		**100**								
1	Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	24,500,000	24,500,000	24,485,000	99,94	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah dan jenis Dokumen rencana kerja SKPD (perubahan 2107 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100
2	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa / Kelurahan	43,500,000	43,500,000	43,491,000	99,98	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100
VI	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan**	**33,000,000**	**33,000,000**	**32,405,450**										
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan(Musrenbangkel)	15,000,000	15,000,000	14,896,500	99,31	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitasi Pembangunan	kali	1	kali	1	kali	100
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,912,450	97,08	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah prosentase kegiatan pembinaan Pembangunan	kali	12	kali	12	kali	100
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	15,000,000	15,000,000	14,596,500	97,31	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	Rw	14	Rw	14	Rw	100
VII	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan**	**3,000,000**	**3,000,000**	**2,999,850**		**100**								
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,999,850	100	100	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibin	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibin	kali	12	kali	12	kali	100
VIII	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan.**	**38,000,000**	**38,000,000**	**37,968,250**		**100**								
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,973,500	99,12	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan Kelurahan	kali	12	kali	12	kali	100
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,000,000	25,000,000	24,998,450	99,99	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	wajib pajak	3013	wajib pajak	3013	wajib pajak	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Fasilitas Pilkada	10,000,000	10,000,000	9,996,300	100	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100

KEL. GERGUNUNG

I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**103,800,000**	**103,800,000**	**101,984,443**	**98%**	**98%**								**98%**
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	20,000,000	20,000,000	18,589,858	93%	93%	Kel. Gergunung	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yg terbayar	3	3	Telepon, air listrik, internet	3	Telepon, air listrik, internet	**100%**
2	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,959,875	99%	99%	Kel. Gergunung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg ada	5	5	Buah	5	Buah	**100%**
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	13,600,000	13,600,000	13,599,920	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	1	1	Orang	1	Orang	**100%**
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,600,000	13,600,000	13,599,870		0%	Kel. Gergunung	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	1	1	Orang	1	Orang	**100%**
5	Penyediaan alat tulis kantor	6,000,000	6,000,000	5,982,900	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah ATK yg tersedia	26	26	Macam ATK	26	Macam	**100%**
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	6,000,000	6,000,000	5,998,000	100%	100%	Kel. Gergunung	7 Jenis barang cetakan dan 14.046 lbr	14,053	14,053	Lembar	14,053	Jumlah penggandaan dokumen	**100%**
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	3,000,000	2,985,400	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah komponen listrik yg tersedia	12	12	Bulan	12	Bulan	**100%**
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,971,000	99%	99%	Kel. Gergunung	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	4	4	Buah	4	Buah	**100%**
9	Penyediaan makanan dan minuman.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	**100%**
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000	15,000,000	14,700,000	98%	98%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	**100%**
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	60	60	Kegiatan	60	Kegiatan	**100%**
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor.	13,600,000	13,600,000	13,597,620	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	1	1	Orang	1	Orang	**100%**
II	**Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**	**106,500,000**	**246,000,000**	**241,331,760**	**98%**	**98%**								**98%**
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000	70,000,000	69,882,700	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5	5	Unit	5	Unit	**100%**
2	Pengadaan Mebeleur	47,000,000	47,000,000	44,869,200	95%	95%	Kel. Gergunung	Jumlah mebeleur gedung kantor	10	10	Unit	10	Unit	**100%**
3	Pemeliharaan rutin/peralatan berkala gedung kantor	2,000,000	2,000,000	1,985,000	99%	99%	Kel. Gergunung	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	4	4	Macam	4	Macam	**100%**
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	2,500,000	2,500,000	2,353,250	94%	94%	Kel. Gergunung	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	1	1	Unit	1	Unit	**100%**
5	Penataan Lingkungan Kantor	30,000,000	124,500,000	122,241,610	98%	98%	Kel. Gergunung	Jumlah taman, Gapura Kantor dan Pavingisasi lingkungan kantor	3	3	Buah	3	Buah	**100%**
III	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**100%**	**100%**								**100%**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2017 disusun dengan baik dan tepat waktu	1	1	Dokumen	1	Dokumen	**100%**
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan**	**188,900,000**	**188,900,000**	**188,894,300**	**100%**	**100%**								**100%**
1	Pemberdayaan RT	88,500,000	88,500,000	88,499,500	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah koordinasi RT	41	41	Desa/kelurahan	41	Desa/kelurahan	**100%**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pemberdayaan RW	34,400,000	34,400,000	34,400,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah koordinasi RW	14	14	Desa/kelurahan	14	Desa/kelurahan	**100%**
3	Pemberdayaan PKK	15,000,000	15,000,000	14,998,550	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi PKK	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	**100%**
4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	5,000,000	5,000,000	4,999,950	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	**100%**
5	Operasional LPMK	26,000,000	26,000,000	25,998,550	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi LPMK	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	**100%**
6	pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD dan Posyandu)	20,000,000	20,000,000	19,997,750	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah anak dini usia yang memperoleh manfaat pendidikan - Jumlah posyandu yang diberdayakan - Jumlah balita yang memperoleh manfaat posyandu	547	547	Kegiatan	547	Kegiatan	**100%**
V	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan**	**23,500,000**	**23,500,000**	**23,500,000**	**100%**	**100%**								**100%**
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan(Musrenbangkel)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitasi Pembangunan	12	12	Desa/Kelurahan	12	Desa/Kelurahan	**100%**
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah prosentase kegiatan pembinaan Pembangunan	12	12	Desa/Kelurahan	12	Desa/Kelurahan	**100%**
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	14	14	Kegiatan	14	Kegiatan	**100%**
VI	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,498,000**	**100%**	**100%**								**100%**
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	3,500,000	3,500,000	3,498,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibin	3	3	Desa/Kelurahan	3	Desa/Kelurahan	**100%**
VII	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan.**	**64,000,000**	**64,000,000**	**63,884,300**	**100%**	**100%**								**100%**
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	38,500,000	38,500,000	38,384,300	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan Kelurahan	12	12	Desa/Kelurahan	12	Desa/Kelurahan	**100%**
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,500,000	25,500,000	25,500,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	1,000	1,000	Jml	1,000	Jml	**100%**
KECAMATAN KLATEN TENGAH														
I	**Program Pelayanan Adminsistrasi Perkantoran**	**148,650,000**	**207,900,000**	**193,457,630**	93%	130%		Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,000,000	38,000,000	27,634,072	73%	111%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembayaran rekening telpon,air,listrik, internet	3	4	rekening	4	rekening	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2	2	THL	2	THL	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah jasa administrasi keuangan	2	2	THL	2	THL	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,800,000	26,800,000	25,318,682	94%	94%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembayaran tegana kebersihan (2THL)	2	2	THL	2	THL	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah jenis ATK yang diperlukan	21	25	jenis	25	jenis	100%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3,000	3,000	lembar	3,000	lembar	100%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Prosentase Ketersediaan komponen listrik dan penerangan	11	15	jenis	15	jenis	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	4,750,000	15,000,000	14,990,000	100%	316%	Kec. Klaten Tengah	prosentase ketersediaan makanan dan minuman pegawai	20	40	koordinasi	40	koordinasi	100%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10,000,000	36,000,000	36,000,000	100%	360%	Kec. Klaten Tengah	Prosentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	4	30	perjalanan	30	perjalanan	100%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	200%	Kec. Klaten Tengah	Prosentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	50	60	perjalanan	60	perjalanan	100%
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	26,800,000	26,800,000	25,705,194	96%	96%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor (2 THL)	2	2	THL	2	THL	100%
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	26,800,000	26,800,000	25,309,682	94%	94%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembayaran tenaga administrasi (2 THL) Tenaga Administrasi/teknis perkantoran	2	2	THL	2	THL	100%
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**16,600,000**	**72,350,000**	**69,967,149**	97%	421%		Persentase sarana dan prasarana kondisi baik						
1	Pengadaan Mebeleur	5,000,000	30,750,000	29,725,000	97%	595%	Kec. Klaten Tengah	jumlah mebeeur yang dibeli	2	2	jenis	2	jenis	100%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6,600,000	6,600,000	5,492,149	83%	83%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara	6	8	kendaraan	8	kendaraan	100%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3	8	jenis	8	jenis	100%
	Pengadaan Sounsystem	0	30,000,000	29,750,000	99%	#DIV/0!	Kec. Klaten Tengah	jumlah pengadaan soundsystem		1	unit	1	unit	100%
III	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**92,000,000**	**107,000,000**	**106,648,100**	100%			Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,995,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	9	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	9	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	5,000,000	15,000,000	14,691,500	98%	294%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	9	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	15,000,000	15,000,000	14,980,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	-Jumlah Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan - Dana Hibah	9	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	15,000,000	15,000,000	14,999,400	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100%
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,999,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah kegiatan musrenbangkecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
8	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	40,000,000	39,983,200	100%		Kec. Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**47,000,000**	**47,000,000**	**46,968,750**	100%	100%		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	34,000,000	34,000,000	33,993,750	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah koordinasi trantibum	12 keg	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,490,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembinaan trantibum	100%	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,485,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	- Jumlah fasilitasi trantibum - jumlah frekwensi koordinasi forkopimda tingkat kecamatan	100%	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**48,600,000**	**48,600,000**	**48,553,750**				Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,800,000	4,800,000	4,764,750	99%	99%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah koordinasi tapem selama 12 bulan	100%	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,700,000	4,700,000	4,700,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembinaan administrasi tapem	100%	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,800,000	4,800,000	4,795,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah fasilitasi tapem	100%	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	4,300,000	4,300,000	4,295,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah intensifikasi penagihan PBB	15261 SPPT	3	desa	3	desa	100%
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah fasilitasi lomba tertib administrasi Desa	3	3	desa	3	desa	100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	15,000,000	15,000,000	14,999,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	koordinasi pengisian kepala desa	3 desa	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KEL KABUPATEN														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**123,714,000**	**123,714,000**	**116,088,519**										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	19,000,000	19,000,000	11,534,819	61%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yg terbayar	3	3	Rek	3	Rek	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan Kantor	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	5	5	Keg	5	Keg	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	18,000,000	18,000,000	17,990,120	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	12	12	bln	12	bln	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17,000,000	17,000,000	16,999,780	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	12	12	bln	12	bln	100%
5	Penyediaan Alat tulis Kantor	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah ATK yg tersedia	25	25	Jenis	25	Jenis	100%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,100,000	4,100,000	4,099,800	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah barang cetakan & Penggandaan	13666	13666	lbr	13666	lbr	100%
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	3	3	Jenis	3	Jenis	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	7,614,000	7,614,000	7,614,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi	15	15	kali	13	kali	100%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	15,000,000	15,000,000	14,850,000	99%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	1	1	kali	1	kali	100%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	140	140	kali	140	kali	100%
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	12	12	bln	12	bln	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**416,887,000**	**73,780,000**	**72,856,780**										
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	1,425,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	gordin	gordin	m	gordin	m	100%
2	Pengadaan Mebeleur	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah pengadaan mebeleur	2 filling cabinet	2 filling cabinet	buah	2 filling cabinet	buah	100%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50,000,000	50,000,000	49,206,800	98%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara	perbaikan atap belakang dan lantai 2	perbaikan atap belakang dan lantai 2	paket	perbaikan atap belakang dan lantai 2	paket	100%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	1,200,000	1,200,000	1,069,980	89%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	kendaraan roda 2	kendaraan roda 2	th	kendaraan roda 2	th	100%
5	Pemeliharaan rutin / berkala mebeler	358,762,000	2,080,000	2,080,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah mebeler yang terpelihara	8 nKursi 8 meja tulis	8 nKursi 8 meja tulis	buah/unit	8 nKursi 8 meja tulis	buah/unit	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	**184,381,000**	**184,381,000**	**183,368,550**										
1	Pemberdayaan RT	77,881,000	77,881,000	77,880,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah koordinasi RT	38	38	RT	38	RT	100%
2	Pemberdayaan RW	26,100,000	26,100,000	26,039,750	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi RW	12	12	RW	12	RW	100%
3	Pemberdayaan PKK	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi PKK	13	13	Keg	13	Keg	100%
4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	8	8	keg	8	keg	100%
5	Operasional LPMK	25,400,000	25,400,000	25,280,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi LPMK	5	5	keg	5	keg	100%
6	Pemberdayaan Kelembagaan kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD & POSYANDU	10,000,000	10,000,000	9,168,800	92%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah koordinasi PAUD dan POSYANDU	12	12	Posyandu	12	Posyandu	100%
	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	**31,000,000**	**31,000,000**	**30,699,566**										
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (MUSRENBANGKEL)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitasi Pembangunan	1	1	keg	1	keg	100%
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	6,000,000	6,000,000	5,999,700	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah frekwensi pembinaan kelembagaan Pembangunan	4	4	keg	4	keg	100%
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	10,000,000	10,000,000	9,699,866	97.00%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	12	12	RW	12	RW	100%
	ProgramPeningkatan Koordinasi,Pembinaan,Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	**6,500,000**	**6,500,000**	**6,497,250**										
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	6,500,000	6,500,000	6,497,250	99.96%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan	6	6	Keg	6	Keg	100%
								Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	7	7	Lembaga	7	Lembaga	
	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan	**58,000,000**	**58,000,000**	**57,820,100**										
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	30,000,000	30,000,000	29,828,100	99.43%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah frekuwensi koordinasi Pembinanaan Kelembagaan pemerintahan dan Pileg Pilpres	4	4	Keg	4	Kegiatan	100%
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	28,000,000	28,000,000	27,992,000	99.97%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	1478	1478	WP PBB	1478	WP PBB	100%
KEL. KLATEN														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program pelayanan Administrasi Perkantoran**	**146,000,000**	**146,000,000**	**137,384,768**										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	20,000,000	20,000,000	12,115,888	61	100	Kelurahan Klaten	Jumlah rekening internet, telepon , air dan listrik yang terbayar	3	3	Rekening	3	Rekening	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengk. Ktr.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang d pelihara	11	11	Unit	11	Unit	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30,000,000	30,000,000	29,999,740	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah tenaga administrasi keuangan	2	2	Orang	2	Orang	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,000,000	18,000,000	17,999,620	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	1	1	Orang	1	Orang	100%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,500,000	6,500,000	6,499,900	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah ATK yang tersedia	27	27	Jenis/macam	27	Jenis/macam	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20,000	20,000	lembar	20,000	lembar	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah Komponen Listrik Yang dipelihara	16	16	lampu	16	lampu	100%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah jenis surat kabar dan buku perundang-undangan	3	3	Surat Klabar	3	Surat Klabar	100%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	9,000,000	9,000,000	8,857,500	98	100	Kelurahan Klaten	Jumlah rapat koordinasi	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100%
10	Rapat2 , Koordinasi dan Konsultasi Luar D.	15,000,000	15,000,000	14,475,000	97	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi keluar daerah	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
11	Rapat2 , Koordinasi dan Konsultasi DLM D.	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi ke dalam daerah	160	160	kegiatan	160	kegiatan	100%
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13,500,000	13,500,000	13,437,120	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah Tenaga keamanan kantor dengan 1 THL	1	1	Orang	1	Orang	100%
II	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	**45,950,000**	**45,950,000**	**45,947,000**										
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	14,950,000	14,950,000	14,950,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	3	3	Unit	3	Unit	100%
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	5,000,000	5,000,000	4,997,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah paket Pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor	1	1	paket	1	paket	100%
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas /Operasional	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1	1	kendaraan	1	kendaraan	100%
4	Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah rehab gedung kantor	1	1	paket	1	paket	100%
III	**Program Peningkatan Kapasitas Kelemb. Kemasy.**	**126,550,000**	**126,550,000**	**126,013,800**										
1	Pemberdayaan RT	48,600,000	48,600,000	48,549,800	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi RT di Kel. Klaten	27	27	RT	27	RT	100%
2	Pemberdayaan RW	16,200,000	16,200,000	16,149,800	100	100	Kelurahan Klaten	Jumalah koordinasi RW di Kel. Klaten	9	9	RW	9	RW	100%
3	Pemberdayaaan PKK	22,750,000	22,750,000	22,403,900	98	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi rutin PKK aktif dan pembuatan data dinding	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
4	Pemberdayaan Karang Taruna Tingkat Kel.	2,500,000	2,500,000	2,434,800	97	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi Karang Taruna	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
5	Pemberdayaaan LPM	25,500,000	25,500,000	25,480,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi LPMK	1	1	Lembaga	1	Lembaga	100%
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasy. Di	11,000,000	11,000,000	10,995,500	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi Posyandu Lansia	2	2	lembaga	2	lembaga	100%
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan di Tingkat Kelurahan**	**22,400,000**	**22,400,000**	**22,050,000**										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemb. Kelurahan (Musrenbangkel)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan(Musrenbangkel)	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kel.	6,200,000	6,200,000	6,050,000	98	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi pembinaan kelembagaan pembangunan	1	1	lembaga	1	lembaga	100%
3	Penunjang Operasional Penyaluran Pemb. Kel.	6,200,000	6,200,000	6,000,000	97	100	Kelurahan Klaten	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	9	9	RW	9	RW	100%
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan**	**6,200,000**	**9,200,000**	**9,000,000**	**98**	**100**								
1	Pembinaan Kelemb.Kemasyarakatan Kel.	6,200,000	9,200,000	9,000,000	98	100	Kelurahan Klaten	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3	4	rapat	4	rapat	100%
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Admin. Pemerintahah Kel.**	**47,400,000**	**47,400,000**	**47,224,000**	**100**	**100**								
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kel.	22,400,000	22,400,000	22,224,900	99	100	Kelurahan Klaten	Jumlah Koordinasi kelembagaan pemerintahan dan jumlah LINMAS di Kelurahan Klaten	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,000,000	25,000,000	24,999,100	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB dan Jumlah WP PBB	1006	1006	WP	1006	WP	100%
	KEL. TONGGALAN													
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**114,000,000**	**114,000,000**	**107,760,895**										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	8,500,000	8,500,000	6,859,715	81	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah jenis rekening yang terbayar	Jumlah jenis rekening yang terbayar	6	rekening	6	rekening	100
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4,500,000	4,500,000	4,425,000	98	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	5	kali	5	kali	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16,000,000	16,000,000	15,548,120	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah THL Administrasi Keuangan	Jumlah THL Administrasi Keuangan	1	orang	1	orang	100
4	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	15,000,000	15,000,000	14,387,120	96	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah THL jasa kebersihan kantor	Jumlah THL jasa kebersihan kantor	1	orang	1	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	6,000,000	6,000,000	5,997,700	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Jenis ATK yang Tersedia	Jumlah Jenis ATK yang Tersedia	12	bulan	12	bulan	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,000,000	4,000,000	3,950,000	99	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20,000	lembar	13,167	lembar	66
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	660,000	33	70	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	12	bulan	12	bulan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
8	Penyediaan makanan dan minuman	2,500,000	2,500,000	2,122,000	85	90	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	5	kali	5	kali	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15,000,000	15,000,000	14,475,000	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Frekuensi Perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan dinas keluar daerah	3	kali	3	kali	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	12,000,000	12,000,000	11,975,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	100	kali	100	kali	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	15,000,000	15,000,000	14,524,120	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah THL Keamanan Kantor	Jumlah THL Keamanan Kantor	1	orang	1	orang	100
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,500,000	13,500,000	12,837,120	95	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah THL administrasi /teknis perkantoran	Jumlah THL administrasi /teknis perkantoran	1	orang	1	orang	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA**	**46,000,000**	**56,500,000**	50,668,000	**90**	**90**								
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	35,000,000	30,318,000	87	90	Kelurahan Tonggalan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3	kegiatan	3	kegiatan	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaaraan dinas/operasional	1,000,000	1,500,000	650,000	43	45	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Yang terpelihara	4	kali	2	kali	50
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000	20,000,000	19,700,000	99	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Gedung / Kantor Yang terehab	Jumlah Gedung / Kantor Yang terehab	1	buah	1	buah	100
III	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**2,000,000**	**2,000,000**	-	**-**	**-**								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	-	-	-	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	12	bulan		bulan	
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT**	**215,700,000**	**215,700,000**	**213,183,850**		**99**								
1	Pemberdayaan RT	94,500,000	94,500,000	94,296,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pemberdayaan RT	Jumlah kegiatan pemberdayaan RT	45	kali	45	kali	100
2	Pemberdayaan RW	46,200,000	46,200,000	45,905,700	99	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pemberdayaan RW	Jumlah kegiatan pemberdayaan RW	15	kali	15	kali	100
3	Pemberdayaan PKK	20,700,000	20,700,000	20,690,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pemberdayaan PKK	Jumlah kegiatan pemberdayaan PKK	11	kegiatan	11	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Pemberdayaan Karang Taruna Tk. Kelurahan	4,000,000	4,000,000	3,800,000	95	95	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan	6	kegiatan	6	kegiatan	100
5	Operasional LPMK	27,500,000	27,500,000	27,487,150	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan operasional LPMK	Jumlah kegiatan operasional LPMK	8	kegiatan	8	kegiatan	100
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan diwilayah kelurahan (PAUD dan Posyandu)	22,800,000	22,800,000	21,005,000	92	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan Posyandu yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Posyandu yang dilaksanakan	8	kegiatan	8	kegiatan	100
V	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN**	**35,000,000**	**35,000,000**	**34,999,500**	**100**	**100**								
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan	5,000,000	5,000,000	4,999,500	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Musrenbangkel yang dilaksanakan	Jumlah Musrenbangkel yang dilaksanakan	1	kali	1	kali	100
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan operasional penyaluran hibah	Jumlah kegiatan operasional penyaluran hibah	4	kegiatan	4	kegiatan	100
				-	-	-								
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN KELURAHAN**	**3,000,000**	**3,000,000**	**2,923,750**	**97**	**100**								
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,923,750	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan	13	kali	13	kali	100
VII	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN**	**51,500,000**	**51,500,000**	**50,916,850**	**99**	**100**								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pembinan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	18,000,000	18,000,000	17,559,550	98	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan	5	kegiatan	5	kegiatan	100
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan operasional PBB	Jumlah kegiatan operasional PBB	8	kegiatan	8	kegiatan	100
3	Fasilitasi Pilkada	8,500,000	8,500,000	8,357,300	98	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan fasilitasi pilkada	Jumlah kegiatan fasilitasi pilkada	1	kegiatan	1	kegiatan	100
	KEL. MOJAYAN													
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**99,280,500**	**112,118,500**	**111,495,187**	**99**									
1	Penyediaan jasa komonukasi, sumber daya air dan listrik	11,306,000	11,306,000	10,947,107	97	95	Kel. Mojayan	Jumlah rekening internet, telepon, listrik dan air yang terbayar	4 Rekenening	4 Rekenening		4	Rekenening	100
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah peralatan dan perelengkapan	2 peralatan	2 peralatan		2	peralatan	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	42,838,000	42,836,660	100	88	Kel. Mojayan	Jumlah tenaga administrasi	2 THL, 12 bulan	2 THL, 12 bulan		2	orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	4,060,000	4,060,000	4,059,000	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah ATK yang tersedia	12 Jenis ATK	12 Jenis ATK		12	ATK	100
5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	1,836,500	1,836,500	1,836,300	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	20 buku, 300 set , 8.012 lbr	20 buku, 300 set , 8.012 lbr		20 buku, 300 set , 8.012 lbr		100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,740,000	87	80	Kel. Mojayan	Jumlah koran dan buku perundang undangan	2 jenis koran dalam 1 tahun	2 jenis koran dalam 1 tahun		2 jenis koran dalam 1 tahun		100
7	Penyediaan makanan dan minuman	9,000,000	9,000,000	8,999,000	100	98	Kel. Mojayan	Jumlah koordinasi	12 kali	12 kali		12 kali		100
8	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kel. Mojayan	Jmlh koordinasi luar daerah	1 kali	1 kali		1 kali		100
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam. Daerah	8,200,000	8,200,000	8,200,000	100	100	Kel. Mojayan	Jmlh koordinasi dlm daerah	53 kali	53 kali		53 kali		100
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor	13,378,000	13,378,000	13,377,120	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah tenaga keamanan	1 THL, 12 bulan	1 THL, 12 bulan		1 THL, 12 bulan		100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparetur**	**58,455,000**	**58,455,000**	**57,980,120**	**99**									
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100	100	Kel. Mojayan	Jmlh Perlengkapan gedung	1 set gordyn, 1 unit sound	1 set gordyn, 1 unit sound		1 set gordyn, 1 unit sound		100
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	51,955,000	51,955,000	51,658,500	99	100	Kel. Mojayan	Jmlh Peralatan gedung	2 printer , 1 laptop	2 printer , 1 laptop		2 printer , 1 laptop		100
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	2,000,000	2,000,000	1,821,620	91	100	Kel. Mojayan	Jmlh kendaraan	1 kendaraan	1 kendaraan		1 kendaraan		100
III	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan**	**1,000,000**	**1,000,000**	**995,000**										
	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000	995,000	100	100	Kel. Mojayan	Jmlh laporan	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		100
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan**	**231,614,000**	**231,614,000**	**228,609,575**	99	100								100
1	Pemberdayaan Rt	127,224,000	127,224,000	127,224,000	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah RT	62 RT	62 RT		62 RT		100
2	Pemberdayaan RW.	34,560,000	34,560,000	34,560,000	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah RW	12 RW	12 RW		12 RW		100
3	Pemberdayaan PKK	18,830,000	18,830,000	18,828,700	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah PKK	50 Anggota	50 Anggota		50 Anggota		100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Operasional LPMK	26,000,000	26,000,000	25,999,000	100	100	Kel. Mojayan	Terlaksananya operasional LPMK	1 lembaga	1 lembaga		1 lembaga		100
5	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD & POSYANDU)	25,000,000	25,000,000	**21,997,875**	88	100	Kel. Mojayan	Jmlh pendidik paud, jmlh lansia	4 pendidik, 20 lansia	4 pendidik, 20 lansia		4 pendidik, 20 lansia		100
V	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan**	**22,000,000**	**22,000,000**	**21,999,500**										
1	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	22,000,000	22,000,000	21,999,500	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah eks perangkat Desa	1 perangkat	1 perangkat		1 perangkat		100
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan**	**28,705,500**	**28,705,500**	**28,704,300**	**100**									
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	13,523,000	13,523,000	13,522,600	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah koordinasi	2 koordinasi	2 koordinasi		2 koordinasi		100
2	Pembinaan Kelembagaan pembangunan kelurahan/ Desa	5,182,500	5,182,500	5,181,700	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah lembaga	3 lembaga	3 lembaga		3 lembaga		100
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100	Kel. Mojayan	Terlaksananya penyaluran bantuan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		100
VII	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,999,800**	100									0
1	Pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan kelurahan	5,000,000	5,000,000	4,999,800	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah lembaga	3 lembaga	3 lembaga		3 lembaga		100
VIII	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan**	**43,145,000**	**43,145,000**	**43,133,350**										
1	Pembinaan kelembagaan Pemerintahan kelurahan	18,145,000	18,145,000	18,133,600	100	80	Kel. Mojayan	Jumlah lembaga	3 lembaga	3 lembaga		3 lembaga		100
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,000,000	25,000,000	24,999,750	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah wajib pajak	2544 wajib pajak	2544 wajib pajak		2544 wajib pajak		100
	KEL. BUNTALAN													
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**103,301,000**	**114,301,000**	**101,350,912**										
1	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18,600,000.00	18,600,000.00	11,952,417	64.26	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah rekening yang terbayar	12	12	Bulan	12	Bulan	100
2	Penyedia jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor	4,000,000.00	10,000,000.00	8,105,000	81.05	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	4	4	Unit	4	Unit	100
3	Penyedia jasa administrasi keuangan	13,594,000.00	13,594,000.00	12,837,120	94.43	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1	1	orang	1	orang	100
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	16,800,000.00	16,800,000.00	16,434,655	97.83	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah tenaga kebersihan	1	1	orang	1	orang	100
5	Penyedia jasa alat tulis kantor	3,154,000.00	3,154,000.00	2,686,300	85.17	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	25	25	Buah	25	Buah	100
6	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	2,653,000.00	2,653,000.00	2,568,200	96.80	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah cetak dan penggandaan	3500	3500	Lembar	3500	Lembar	100
7	penyedia bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2,000,000.00	2,000,000.00	1,178,100	58.91	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah surat kabar yang tersedia	3	3	Macam	3	Macam	100
8	Penyedia makan dan minum	8,000,000.00	10,000,000.00	9,277,000	92.77	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi rapat koordinasi	3	3	Kali	3	Kali	100
9	Rapat-rapat kooedinasi dan konsultasi keluar daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	14,475,000	96.50	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah	1	1	Kali	1	Kali	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000	100.00	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi rapat koordiasi dalam daerah	40	40	Kali	40	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
11	Penyedia jasa pengamanan kantor	13,500,000.00	13,500,000.00	12,837,120	95.09	95	Kelurahan Buntalan	Jumlah tenaga keamanan kantor	1	1	Orang	1	Orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**61,658,000**	**66,158,000**	**64,563,500**										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	27,308,000.00	27,308,000.00	27,000,000	98.87	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4	4	Buah	4	Buah	100
2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	26,350,000.00	30,850,000.00	30,600,000	99.19	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	1	Paket	1	Paket	100
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	2,000,000.00	2,000,000.00	1,213,500	60.68	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah kendaraa dinas yang dipelihara	1	1	Unit	1	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor dan rumah tangga	6,000,000.00	6,000,000.00	5,750,000	95.83	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi pemeliharaan	2	2	Kali	2	Kali	100
III	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan**	**22,000,000**	**22,000,000**	**20,712,805**										
1	Pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	2,000,000	2,000,000	1,850,000	92.50	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah peserta pembinaan pembangunan kelembagaan Kelurahan	12	12	RW	12	RW	100
2	Pelaksanaan MUSRENGBANGKEL	10,000,000	10,000,000	9,449,305	94.49	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah kegiatan dan peserta	1	1	Kali	1	Kali	100
3	Penunjang operasional penyaluran bantuan	10,000,000	10,000,000	9,413,500	94.14	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah RW yang terfasilitasi	12	12	RW	12	RW	100
IV	**Program peningkatan koordinasi pembinaan. fasilitas administrasi**	**3,000,000**	**3,000,000**	**2,402,500**										
	kemasyarakatan Kelurahan													
1	Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,402,500	80.08	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah lembaga kemsyarakatan	7	7	Lembaga	7	Lembaga	100
V	**Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitas Administrasi**	**38,500,000**	**38,500,000**	**38,281,500**										
	Pemerintahanrahan Kelurahan													
1	Pembinaan kelembagaan pemerintahan Kelurahan	19,000,000	19,000,000	18,781,500	98.85	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi kegiatan	1	1	Kali	1	Kali	100
2	Operasional PBB tingkat Kelurahan	19,500,000	19,500,000	19,500,000	100.00	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah lembar SPPT penyaluran dan penagihan	1770	1770	Lembar	1770	Lembar	100
VI	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan**	**143,739,000**	**143,739,000**	**140,728,076**										
1	Pemberdayaan RT	66,439,000	66,439,000	66,029,996	99.38	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah RT	31	31	RT	31	RT	100
2	Pemberdayaan RW	26,400,000	26,400,000	26,220,000	99.32	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah RW	12	12	RW	12	RW	100
3	Pemberdayaan PKK	10,000,000	10,000,000	9,330,080	93.30	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah peserta	40	40	Orang	40	Orang	100
4	Operasional LPMK	25,400,000	25,400,000	24,508,000	96.49	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah koordinasi LPMK	1	1	Kali	1	Kali	100
5	Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dieilayah Kelurahan	15,500,000	15,500,000	14,640,000	94.45	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi kegiatan PAUD dan POSYANDU	100	100	%	100	%	100
	(PAUD & POSYANDU)													
VII	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa / Kelurahan**	**87,202,000**	**87,202,000**	**74,296,000**										
1	Kompensasi gaji perangkat Kelurahan	44,002,000	44,002,000	31,096,000	70.67	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah perangkat	2	2	Orang	2	Orang	100
2	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga Desa / Kelurahan	43,200,000	43,200,000	43,200,000	100.00	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah perangkat	2	2	Orang	2	Orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KEL. BARENG													
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**102,799,211**	**121,799,211**	**116,960,692**										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14,000,000	25,600,000	22,206,733	**86.75**	**100**	kel.bareng	- prosentase jumlah rekening yang terbayar jumlah rekening yang terbayar	3	3	**REK**	**3**	**REK**	**100**
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	17,565,750	17,565,750	17,491,620	**99.58**	**100**	kel.bareng	- 1 orang THL yang terfungsikan	1	1	**thl**	1	**thl**	**100**
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15,678,263	15,678,263	15,413,620	**98.31**	**100**	kel.bareng	- 1 orang Kondisi lingkungan kantor yang bersihJumlah tenaga Kebersihanpembelian alat kebersihan	1	1	**thl**	1	**thl**	**100**
4	Penyediaan alat tulis kantor	7,722,300	7,722,300	7,706,000	**99.79**	**100**	kel.bareng	- 10 barang 10 Macam alat-alat tulis kantor	30	30	**jenis**	30	**jenis**	**100**
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,082,898	3,082,898	2,782,600	**90.26**	**100**	kel.bareng	- 5 rim Prosentasi kebutuhan penggandaan cetakan	16000	16000	**lembar**	16000	**lembar**	**100**
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,630,000	**81.5**	**100**	kel.bareng	- 3 jenis Surat Kabar Prosentasi pemenuhan kebutuhan informasi terkini3 Jenis Surat Kabar	3	3	**surat kabar**	3	**surat kabar**	**100**
7	Penyediaan makanan dan minuman	8,280,000	15,680,000	15,669,000	**99.93**	**100**	kel.bareng	- 6 Kali Kegiatan terpenuhinya makan minum untuk rapat rapat	18	18	**kegiatan**	18	**kegiatan**	**100**
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000	15,000,000	14,600,000	**97.33**	**100**	kel.bareng	- 3 karyawan Tercapainya kinerja aparatur kantor yang berkualitas	3	3	**kegiatan**	3	**kegiatan**	**100**
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,000,000	6,000,000	6,000,000	**100**	**100**	kel.bareng	- 12 Jumlah rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	140	140	**kegiatan**	140	**kegiatan**	**100**
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13,470,000	13,470,000	13,461,119	**99.93**	**100**	kel.bareng	- 1 orang Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantorJumlah tenaga keamanan kantor	1	1	**thl**	1	**thl**	**100**
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**44,632,500**	**56,632,500**	**55,421,750**		**100**								
1	Pembangunan Gudang Kantor	9,500,000	9,500,000	9,500,000	**100**	**100**	kel.bareng							
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	22,500,000	22,500,000	22,500,000	**100**	**100**	kel.bareng	- 2 Jenis (Kamera & LCD TV) Ketersediaan peralatan Audio Visual yang memadai	1	1	**unit**	1	**unit**	**100**
3	Pengadaan mebeleur	7,632,500	7,632,500	7,412,500	**97.12**	**100**	kel.bareng	- 5 unit - 5 unit terprnuhinya mebeleur kantor yang memadai	3	3	**unit**	3	**unit**	**100**
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2,000,000	2,000,000	1,651,750	**82.59**	**100**	kel.bareng	- 1 Paket Terpeliharanya gedung kantor yang memadai	1	1	**unit**	1	**unit**	**100**
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3,000,000	3,000,000	2,630,000	**87.67**	**100**	kel.bareng	- 1 Unit Konddisi Kendaraan Dianas yang baik dan layak	1	1	**unit**	1	**unit**	**100**
6	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor	-	12,000,000	11,727,500	**97.73**	**100**	kel.bareng	- 1 Paket Terpenuhinya perawatan peralatan gedung agar tercipta kenyamanan dlm pelayanan	1	1	**paket**	1	**paket**	**100**
III	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan**	**179,254,950**	**179,254,950**	**175,998,500**		**100**								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pemberdayaan RT	82,600,000	82,600,000	82,556,000	**99.95**	**100**	kel.bareng	- 32 Lancarnya kegiatan tingkat RT	1	1	**kegiatan**	1	**kegiatan**	**100**
2	Pemberdayaan RW	23,200,000	23,200,000	23,153,000	**99.8**	**100**	kel.bareng	- 9 Rw Terpenuhi capaian pelaksanaan tugas-tugas RW	1	1	**kegiatan**		**kegiatan**	**0**
3	Pemberdayaan PKK	10,473,900	10,473,900	10,305,800	**98.4**	**100**	kel.bareng	- 12 Kegiatan Jumlah Kegiatan Rutin PKK dalam satu tahun	12	12	**kegiatan**	12	**kegiatan**	**100**
4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	9,000,000	9,000,000	8,900,000	**98.89**	**100**	kel.bareng	- 9 Rw Lancarnya kegiatan Karang Taruna tingkat Kelurhan	9	9	**kegiatan**	9	**kegiatan**	**100**
5	Operasional LPMK	28,758,800	28,758,800	28,620,200	**99.52**	**100**	kel.bareng	- 1 Lembaga LPMK - terfasilitasi kegiatan rapat koordinasi LPMK- Jumlah koordinasi LPMK	1	1	**kegiatan**		**kegiatan**	**0**
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	25,222,250	25,222,250	22,463,500	**89.06**	**100**	kel.bareng	- 1 kegiatan Senam sehat Lansia setiap bulan	12	12	**kegiatan**	12	**kegiatan**	**100**
7	pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan kelurahan	-	-	-										
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan**	**32,219,650**	**32,219,650**	**31,413,800**										
1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	14,070,000	14,070,000	13,579,000	**96.51**	**100**	kel.bareng	- 5 1 kegiatan MUSRENBANG tingkat Kelurahan	2	2	**kegiatan**	2	**kegiatan**	**100**
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	5,375,400	5,375,400	5,311,000	**98.8**	**100**	kel.bareng	- 4 kali Rapat Terfasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan	4	4	**kegiatan**	4	**kegiatan**	**100**
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	12,774,250	12,774,250	12,523,800	**98.04**	**100**	kel.bareng	- 12 Terlaksananya penunjang operasional panyaluran bantuan RW	12	12	**kegiatan**	12	**kegiatan**	**100**
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan**	**75,952,000**	**75,952,000**	**75,381,200**										
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	46,258,500	46,258,500	45,748,100	**98.9**	**100**	kel.bareng	- 4 Jumlah Rapat Koordinasi Kelembagaan Pemerintahan	4	4	**kegiatan**	4	**kegiatan**	**100**
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	29,693,500	29,693,500	29,633,100	**99.8**	**100**	kel.bareng	- 1251 WP	**1**	**1**	**kegiatan**	**1**	**kegiatan**	**100**

	KEC. KLATEN SELATAN													
I	**PROG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**120,426,000**	**182,710,500**	**177,233,402**	**97.88**	**100**								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,775,000	2,775,000	2,775,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Surat Terkirim	165	165	keg	12	keg	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	16,200,000	20,000,000	17,564,223	87.82	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	3	3	jenis	12	jenis	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16,196,000	16,196,000	15,689,620	96.87	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah THL Kebersihan Kantor	12	12	bulan	12	bulan	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	10,116,500	10,116,500	10,111,000	99.95	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis ATK Tersedia	12	12	jenis	12	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	3,557,000	3,557,000	3,557,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	10000	10000	lembar	10000	lembar	100
6	Penyediaan komponen instlasi listrik & penerangan	3,325,000	3,325,000	3,325,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah jenis komponen listrik dan Penerangan Bangunan	8	8	jenis	8	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,536,500	5,000,000	4,979,500	99.59	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis Peralatan yang tersedia	12	6	jenis	6	jenis	100
8	Penyediaan makanan & minuman		25,021,000	24,976,000	99.82	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia	8	10	keg	12	keg	120
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	10,000,000	50,000,000	48,863,699	97.73	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Frekwesi Perjalanan Dinas Luar Daerah	10	12	keg	12	keg	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,000,000	6,000,000	5,975,000	99.58	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Frekwesi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125	135	keg	135	keg	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	27,347,000	27,347,000	26,580,240	97.20	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah THL Pengamanan Kantor	12	12	bulan	12	bulan	100
12	Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,373,000	13,373,000	12,837,120	95.99	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah THL tenaga administrasi teknis perkantoran	12	12	bulan	12	bulan	100
II	**Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**	**70,749,000**	**70,749,000**	**70,695,750**	**99.94**	**100**	Kec. Klaten Selatan							
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42,302,000	42,302,000	42,264,200	99.91	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Gedung yang Terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7,000,000	7,000,000	6,997,550	99.97	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	7	7	unit	7	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas	21,447,000	21,447,000	21,434,000	99.94	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Terpelihara	4	4	jenis	5	jenis	125
III	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**2,213,000**	**2,213,000**	**2,210,500**	**99.89**	**100**	Kec. Klaten Selatan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,213,000	2,213,000	2,210,500	99.89	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Dokumen	5	5	dokumen	5	dokumen	100
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan & fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa kelurahan di Kecamatan**	**109,563,000**	**147,740,500**	**146,906,500**	**99.07**	**100**	Kec. Klaten Selatan							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,762,000	96.03	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Keg Koordinasi Adm PMD	12	12	keg	12	keg	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,993,000	99.83	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Adm PMD	12	12	keg	12	keg	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	18,366,000	56,543,500	56,165,000	99.33	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Keg Fasilitasi Adm PMD	6	12	keg	12	keg	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keu	9,197,000	9,197,000	9,185,000	99.87	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Pemantauan	12	12	keg	12	keg	100
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,935,500	99.74	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Keg Fasilitasi PKK	12	12	keg	12	keg	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	6,000,000	6,000,000	5,999,500	99.99	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah dokumen Profil Desa/Kecamatan	12	12	keg	12	keg	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Sambang Warga	1	1	keg	1	keg	100
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,866,500	97.78	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1	1	keg	1	keg	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	**Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Ketentraman & ketertiban umum di Kecamatan**	**48,686,000**	**48,574,000**	**48,256,350**	**99.49**	**100**	Kec. Klaten Selatan							
1	Peningkatan koord Adm Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan	35,500,000	35,388,000	35,145,800	99.32	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Adm Trantibum	12	12	keg	12	keg	100
2	Peningkatan pembinaan Adm Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan	3,500,000	3,500,000	3,496,300	99.89	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan PembinaanAdm Trantibum	12	12	keg	12	keg	100
3	Peningkatan fasilitasi Adm Ketentraman dan kertertiban umum kecamatan	9,686,000	9,686,000	9,614,250	99.26	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Adm Trantibum	12	12	keg	12	keg	100
VI	**Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**47,077,000**	**46,727,000**	**46,514,000**	**99.32**	**100**	Kec. Klaten Selatan							
1	Peningkatan koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,974,000	99.57	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan koordinasi adm. Tata Pemerintahan	12	12	keg	12	keg	100
2	Peningkatan pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,984,000	99.68	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatanPembinaan adm. Tata Pemerintahan	12	12	keg	12	keg	100
3	Peningkatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.	3,390,000	3,390,000	3,300,000	97.35	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi adm. Tata Pemerintahan	12	12	keg	12	keg	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan intensifikasi PBB	12	12	keg	12	keg	100
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	13,487,000	13,487,000	13,487,000	100	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan lomba Desa	12	12	keg	12	keg	100
6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	12,000,000	11,650,000	11,569,000	99.30	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	10	10	keg	10	keg	100

KEL. GAYAMPRIT														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**126,845,625**	**126,845,625**	**121,427,806**	**96%**	**100%**	**Kel Gayamprit**	**Jumlah pelayanan administrasi perkantoran**						
1	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber air dan listrik daya	9,600,000	9,600,000	8,927,786	93%	100%	Kel Gayamprit	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	3	3	Rekening	3	Rekening	100%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,712,242	13,712,242	13,195,120	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah tenaga kebersihan	1	1	THL	1	THL	100%
3	Penyediaan alat tulis kantor	4,663,097	4,663,097	4,662,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	13	alat tulis kantor	13	alat tulis kantor	100%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah cetakan, penggandaan & jilid	12 bulan	5	cetakan, pengganadaan & jilid	5	cetakan, penggana daan & jilid	100%
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,844,300	92%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah langganan koran/surat kabar	3	3	koran/sura t kabar	3	koran/sur at kabar	100%
6	Penyediaan makanan dan minuman	7,395,625	7,395,625	7,092,000	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Rapat Koordinasi	76	12	Rapat koordinasi	12	Rapat koordinas i	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	15,000,000	15,000,000	14,075,000	94%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1	2	Perjalanan dinas luar daerah	2	Perjalanan dinas luar daerah	100%
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4,000,000	4,000,000	3,900,000	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	60	Perjalanan dinas dalam daerah	60	Perjalanan dinas dalam daerah	100%
9	Penyediaan jasa pengamanan kantor	13,548,472	13,548,472	12,837,120	95%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah tenaga pengamanan kantor	1	1	THL	1	THL	100%
10	Penyediaan peralatan kebersihan & pengelolaan sampah	41,682,392	41,682,392	40,160,860	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah tenaga persampahan		3	THL	3	THL	100%
11	Penyediaan tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,743,797	13,743,797	13,233,620	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah tenaga administrasi kantor	12 bulan	1	THL	1	THL	100%
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur**	**66,331,000**	**66,331,000**	**64,967,500**	**98%**	**100%**	**Kel Gayamprit**	**Jumlah sarana dan prasarana aparatur**						
1	Pengadaan Peralatan gedung kantor	10,270,000	10,270,000	10,070,000	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peralatan kantor	2	2	laptop & printer	2	laptop & printer	100%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2,000,000	2,000,000	1,997,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah gedung yang dipelihara	1	1	pengecetan pagar	1	pengecetan pagar	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	1,798,000	1,798,000	943,000	52%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah kendaraan dinas	1	1	Zuzuki Titan	1	Zuzuki Titan	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	3,000,000	3,000,000	2,900,000	97%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah perakatan kantor	8	8	Laptop, AC, printer,PC C & LCD	8	Laptop, AC, printer,PC C & LCD	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler	2,145,000	2,145,000	2,145,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah mebeler kantor	20	2	meja biro & 1/2 Biro	2	meja biro & 1/2 Biro	100%
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	40,300,000	40,300,000	40,098,000	99%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah gedung yang direhab	1	1	Gedung TK Pertiwi	1	Gedung TK Pertiwi	100%
7	Penataan Lingkungan	6,818,000	6,818,000	6,814,500	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah taman kantor	1	.1	Taman kantor	.1	Taman kantor	100%
III	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan**	**Rp 17,600,000**	**Rp 17,600,000**	**Rp 14,233,100**	81%	100%	Kel Gayamprit	**Jumlah Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan**						
1	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Rp 7,600,000	Rp 7,600,000	Rp 7,583,100	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peserta Musrenbang	40	40	Peserta Musrenbang	40	Peserta Musrenbang	100%
2	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 6,650,000	67%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah monev penyaluran bantuan	9	9	Jumlah Monev	9	Jumlah Monev	100%
IV	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan Fasiltasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan**	**Rp 2,820,000**	**Rp 2,820,000**	**Rp 2,820,000**	100%	100%	Kel Gayamprit	**Jumlah Peningkatan Koordinasi,Pembinaan Fasiltasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan**						
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Rp 2,820,000	Rp 2,820,000	Rp 2,820,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah fasilitasi koordinasi lansia	1	1	Jumlah Kelompok Lansia	1	Jumlah Kelompok Lansia	100%
V	**Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan**	**Rp 33,593,375**	**Rp 33,593,375**	**Rp 33,345,000**	99%	100%	Kel Gayamprit	**Jumlah Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan**						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kel.	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 9,997,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Anggota Linmas	1 kali	31	anggota Linmas	31	anggota Linmas	100%
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Rp 23,593,375	Rp 23,593,375	Rp 23,348,000	99%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Intensifilasi PBB	4 lembar	1597	Jumlah SPPT	1597	Jumlah SPPT	100%
VI	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan**	**Rp 180,110,000**	**Rp 180,110,000**	**Rp 176,896,600**	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan kelurahan						
1	Pemberdayaan RW	Rp 82,710,000	Rp 82,710,000	Rp 81,225,000	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah RT & RW	9 RW	42	RT & RW	42	RT & RW	100%
2	Pemberdayaan PKK	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 34,758,500	99%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Rakor PKK	1 kegiatan	12	Rapat Koordinasi	12	Rapat Koordinasi	100%
3	Pemberdayaan Karang Taruna tk. Kelurahan	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Anggota Karang Taruna Kelurahan	1 kegiatan	40	Anggota Karang Taruna	40	Anggota Karang Taruna	100%
4	Operasional LPMK	Rp 26,000,000	Rp 26,000,000	Rp 25,999,600	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Rapat LPMK	1 kegiatan	1	Lembaga /Organisasi	1	Lembaga /Organisasi	100%
5	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan (PAUD & Posyandu)	Rp 34,400,000	Rp 34,400,000	Rp 32,913,500	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi PAUD & Posyandu	2 kegiatan	10	GTT dan Posyandu	10	GTT dan Posyandu	100%
VII	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan**	**Rp 43,700,000**	**Rp 43,700,000**	**Rp 43,697,900**	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan						
1	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa/Kelurahan	Rp 43,700,000	Rp 43,700,000	Rp 43,697,900	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah perangkat desa penerima tamsil	2	2	perangkat desa	2	perangkat desa	100%

KEC. KALIKOTES

I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**158,412,730**	**178,412,730**	**173,590,958**	**97**	100		**Prosentase jumlah administrasi perkantoran**	100	100				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	2,500,000	2,447,000	**98**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah surat masuk dan keluar	1000	1000	surat	1000	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15,000,000	15,000,000	13,059,558	**87**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah rekening jasa listrik, telepon, internet dan air	3	3	rekening	2	rekening	67%
3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	15,293,150	15,293,150	14,756,020	**96**	**100**	Kec.Kalikotes	jumlah tenaga administrasi keuangan	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28,065,620	28,065,620	27,529,240	**98**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2	2	orang	2	orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	11,938,860	11,938,860	11,929,750	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah ATK yang dibeli	20	20	jenis	20	jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,600,000	9,600,000	9,570,000	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah fotocopy dan cetakan	32000	32000	lembar	32000	lembar	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	11,137,000	16,137,000	14,490,000	**90**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	12	12	kali	12	kali	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20,000,000	20,000,000	19,983,770	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi dinas luar daerah	60	60	kali	60	kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30,000,000	45,000,000	44,950,000	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi dinas dalam daerah	100	120	kali	120	kali	100%
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	14,878,100	14,878,100	14,875,620	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah tenaga keamanan kantor	1	1	orang	1	orang	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**135,193,270**	**140,193,270**	**135,053,975**	**96**			**Prosentase jumlah tingkat sarana dan prasarana**	100	100				0%
1	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas	2,387,132	2,387,132	2,050,000	**86**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1	1	unit	1	unit	100%
2	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	2,038,188	2,038,188	1,699,500	**83**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3	3	unit	3	unit	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ Operasional	14,767,950	14,767,950	12,812,475	**87**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1	1	unit	1	unit	100%
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	116,000,000	116,000,000	113,492,000	**98**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah gedung yang direhab	1	1	unit	1	unit	100%
5	Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan gedung kantor	0	5,000,000	5,000,000	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0	5	unit	5	unit	100%
II	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**87,500,000**	**99,500,000**	**98,660,600**	**99**	**100**		**Prosentase peningkatan Koordinasi, Pembinaan & Fasilitasi PMD di Kecamatan**						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,998,500	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi peningkatan administrasi PMD	7	7	desa	7	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	3,500,000	3,500,000	3,493,300	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan pembinaan administrasi PMD	7	7	desa	7	desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	2,000,000	2,000,000	1,999,800	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan fasilitai administrasi PMD	7	7	desa	7	desa	100%
4	Penunjang Operasional Penyampian Bantuan Keuangan	7,500,000	19,500,000	19,426,900	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan penunjang penyampian keuangan	7	7	desa	7	desa	100%
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,800,000	**99**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan PKK	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100%
6	Penyusunan Profil Desa /Kelurahan / Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,919,400	**99**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah penyusunan profil desa	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,523,200	**99**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah sambang warga	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tk Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,499,500	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan musrenbang	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
III	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**49,075,000**	**69,075,000**	**68,473,400**	**99**	**100**			100	100				
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	37,000,000	37,000,000	36,950,000	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi peningkatan administrasi Trantib	7	7	desa	7	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	6,575,000	6,575,000	6,574,600	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan pembinaan administrasi Trantib	7	7	desa	7	desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	5,500,000	25,500,000	24,948,800	**98**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan fasilitai administrasi Trantib	7	7	desa	7	desa	100%
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**46,500,000**	**63,500,000**	**63,459,100**	**100**	**100**								
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,499,900	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi peningkatan administrasi Tapem	7	7	desa	7	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	3,000,000	12,000,000	11,989,900	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan pembinaan administrasi Tapem	7	7	desa	7	desa	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,550,000	4,550,000	4,549,600	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan fasilitai administrasi Tapem	7	7	desa	7	desa	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,450,000	3,450,000	3,449,800	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan intensifikasi PBB	7	7	desa	7	desa	100%
5	Lomba tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	14,999,900	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah desa yang melakukan lomba	7	7	desa	7	desa	100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	16,000,000	24,000,000	23,970,000	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah desa yang melakukan pemilihan	7	7	desa	7	desa	100%
KEC. NGAWEN														
I	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	**162,500,000**	**202,500,000**	**192,721,114**	119%	100%								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4,500,000	4,500,000	4,498,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	2000	2000	surat	1106	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28,000,000	28,000,000	21,554,623	77%	100%	Kec. Ngawen	Kebutuhan komunikasi, penerangan lancar	3	3	paket	3	paket	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15,000,000	15,000,000	14,983,324	100%	100%	Kec. Ngawen	Petugas Administrasi Keuangan	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33,000,000	33,000,000	31,977,247	97%	100%	Kec. Ngawen	Tenaga pembersih kantor	2	2	orang	2	orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	8,000,000	8,000,000	7,990,750	100%	100%	Kec. Ngawen	jumlah item pengadaan ATK	50	50	jenis	50	jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	12	bulan	12	bulan	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000	4,000,000	3,999,240	100%	100%	Kec. Ngawen	komponen listrik dan instalasi listrik yang memadai	15	15	ruang	15	ruang	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	6,000,000	16,000,000	15,934,250	266%	100%	Kec. Ngawen	Penyediaan makan dan minum rapat	12	12	bulan	12	bulan	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20,000,000	45,000,000	44,866,450	224%	100%	Kec. Ngawen	Penyediaan BBM,transportasi bagi camat, sekcam, kasi, kasubag dan staf selama 1 tahun	7	7	kali	7	kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10,000,000	15,000,000	15,000,000	150%	100%	Kec. Ngawen	Penyediaan BBM,transportasi bagi camat, sekcam, kasi, kasubag dan staf selama 1 tahun	40	40	kali	40	kali	100%
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,000,000	27,000,000	24,917,230	92%	100%	Kec. Ngawen	Tenaga keamanan kantor dan fasilitasi yang ada selama 1 tahun	15	15	ruangan	15	ruangan	100%
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**76,000,000**	**136,000,000**	**133,744,306**	176%	100%								
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	13,500,000	13,500,000	11,954,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2	2	Unit	2	Unit	100%
2	Pengadaan mebelair	0	10,000,000	9,960,000	100%	100%	Kec. Ngawen		1	1	ruangan	1	ruangan	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8,000,000	8,000,000	7,998,820	100%	100%	Kec. Ngawen	pemeliharaan dan kebersihan kantor						
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12,000,000	12,000,000	11,934,586	99%	100%	Kec. Ngawen	terpeliharanyaa kendaraan dinas	7	7	kendaraan	7	kendaraan	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	10,000,000	9,896,900	99%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1	1	paket	1	paket	100%
6	Penataan lingkungan kantor	32,500,000	82,500,000	82,000,000	252%	100%	Kec. Ngawen	Terbangunnya pagar samping kecamatan dan pmbuatan taman kecamatan	2	2	obyek	2	obyek	100%
III	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kierja dan keuangan**	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**100%**	100%								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyusunan laporan capaian knerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	dokumen LAKIP SKPD 2019	1	1	dokumen	1	dokumen	100%
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**85,500,000**	**90,500,000**	**90,346,500**	106%	100%								
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah koordinasi	13	13	desa	13	desa	100%
2	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	jumlah fasilitasi Adm PMD	13	13	desa	13	desa	100%
3	Penunjang Operasional Penyampaian bantuan keuangan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah	13	13	desa	13	desa	100%
4	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	20,000,000	20,000,000	19,896,700	99%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah fasilitasi 10 program PKK	13	13	desa	13	desa	100%
5	Penyusunan Profil Desa / Kelurahan / kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,950,000	99%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah profil	13	13	desa	13	desa	100%
6	Penyelenggaraan Sambang warga	35,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Dialog dan sosialisasi Bupati, Muspida dan Muspika dengan masyarakat umum	Terwujudnya Penyelenggaraan Sambang warga	Terwujudnya Penyelenggaraan Sambang warga				
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	9,000,000	9,000,000	8,999,800	100%	100%	Kec. Ngawen	Terlasananya Musrenbang Tingkat kecamatan	1	1	keg	1	keg	100%
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**50,000,000**	**50,000,000**	**49,974,500**	100%	100%								100%
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	34,000,000	34,000,000	33,974,500	100%	100%	Kec. Ngawen	Terlaksananya koordinasi trantib	13	13	desa	13	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah pembinaan Adm Trantib	16	16	kali	16	kali	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah Fasilitasi Adm Trantib	15	15	kali	15	kali	100%
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**43,500,000**	**48,500,000**	**47,509,300**	**109%**	100%								
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,671,500	95%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah Koordinasi Tapem	8	8	kali	8	kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,999,900	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah pembinaan Adm Tapem	6	6	kali	6	kali	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah fasilitasi Adm Tapem	6	6	kali	6	kali	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah intensifikasi PBB tingkat Kecamatan	13	13	desa	13	desa	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Koordinasi pemilihan Kepala desa	15,000,000	20,000,000	19,337,900	129%	100%	Kec. Ngawen		12	12	desa	12	desa	100%
	KEC. KEBONARUM													
I	**Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran**	**158,598,267**	**215,833,317**	**213,907,939**	**99**	**91**	**Kec Kebonarum**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**						
1	Peyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah ATK dan benda pos	990	990	surat	990	surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet	11,550,000	11,550,000	11,024,092	95	100	Kec Kebonarum	Jumlah rekening,telpon ,listrik,air dan internet	4	4	jenis	4	jenis	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	8,491,857	8,491,857	8,490,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah servis dan perbaikan alat alat kantor	30	30	kali	30	kali	100
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operaional	11,977,450	15,000,000	14,998,983	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Jasa servis dan peralatan suku cadang,pajak kendaraan Dinas	11	11	unit	11	unit	100
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,340,000	15,340,000	14,937,131	97	90	Kec Kebonarum	Jumlah THL Kebersihan	1	1	0rang	1	0rang	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,150,000	6,150,000	6,150,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah jan Jenis alat tulis kantor	35	35	jenis ATK	35	jenis ATK	100
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2	2	eksp	2	eksp	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,287,500	7,000,000	7,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah komponen instalasi listrik	12	12	jenis	12	jenis	100
9	Penyediaan bahan Bacaan dan Perauran Perundang undangan	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100	90	Kec Kebonarum	Jumlah bahan bacaan	3	3	jenis	3	jenis	100
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	8,500,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah rapat dan jamuan tamu	12	12	rakor	12	rakor	100
11	Rapar rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	15,000,000	35,000,000	34,996,970	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah perjalanan Dinas rapat koordinasi luar daerah	2	2	kali/keg	2	kali/keg	100
12	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12,000,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah perjalanandinas rapat koordinasi dalam daerah	12	12	kali/keg	12	kali/keg	100
13	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	26,917,740	26,917,740	26,724,501	99	100	Kec Kebonarum	Jumlah THL Keamanan	2	2	0rang	2.00	0rang	100
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	26,758,720	26,758,720	25,961,262	97	90	Kec Kebonarum	Jumlah tenaga Administrasi	2	2	orang	2.00	orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**25,650,000**	**294,275,000**	**284,066,500**	**97**	**100**	**Kec Kebonarum**	**Persentasi Peningk*atan Sarana Prasarana Aparatur***						
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25,650,000	61,500,000	54,949,000	89	100	Kec Kebonarum	Jumlah barang pengadaan perlengkapan gedung kantor	3	3	unit	3.00	unit	100
2	PengadaanPeralatan Gedung Kantor	-	-	-	0	0	Kec Kebonarum	Jumlah barang pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	unit	-	unit	
3	Pengadaan mebeleur	-	30,000,000	27,500,000	92	100	Kec Kebonarum	Jumlah barang pengadaan mebeleur	60	60	unit	60	unit	100
4	Pemeliharaan Rutine /Berkala Gedung Kantor	-	5,370,000	4,602,500	86	100	Kec Kebonarum	Jumlah ruangan yang terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
5	Penataan Lingkungan Kantor	-	197,405,000	197,015,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan pembuatan taman	3	3	paket	3	paket	100
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan**	**1,700,000**	**1,700,000**	**1,700,000**	**100**	**100**	**Kec Kebonarum**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**						
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKLPD	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi SKPD	3	3.00	dokumen	3.00	dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**74,000,000**	**98,394,950**	**97,050,000**	**99**	**98**	**Kec Kebonarum**	**Prentase Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah rapat koordinasi PMD di Kecamatan	12	12.00	keg	12.00	keg	100
2	Peningkatan Pembinaan Admnistrasi Pemberdayaan Masyrakat desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan pembinaan Admnistrasi PMD di Kecamatan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	12,500,000	11,210,000	90	80	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan Fasilitasi PMD di Kecamatan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah lokasi penyampaian bantuan keuangan	7	7.00	keg	7.00	keg	100
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	20,000,000	36,894,950	36,840,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan	12	12.00	keg	12.00	keg	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Penyusunan profil Desa	8	8.00	dokumen	8.00	dokumen	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Penyelenggaraan sambang warga	1	1.00	keg	1	keg	100
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Pengikut Musrenbang Kecamatan	1	1.00	keg	1	keg	100
9	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa/Alokasi Dana Desa	-	-		0	0	Kec Kebonarum	Jumlah dokumen haisl pelaksanaan kegiatan			dokumen		dokumen	#DIV/0!
V	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan,Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**37,800,000**	**65,500,000**	**65,425,000**	**100**	**97**	**Kec Kebonarum**	**Prosentase Peningkatan koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**						
1	Peningkatan koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100	90	Kec Kebonarum	Jumlah koordinasi Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
2	Peningkatan Pembinaan Admnistrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,925,000	98	100	Kec Kebonarum	Jumlah rapat dan perjalanan dinas ke Desa dalam rangka Pembinaan Admninistrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tk.Kecamatan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
3	Peningkatan Fasilitasi Admnistrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	2,800,000	30,500,000	30,500,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan fasilitasi ketentraman dan ketertiban Umum wilayah	2	2.00	keg	2.00	keg	100
VI	**Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan,dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**31,315,000**	**31,315,000**	**31,315,000**		**100**	**Kec Kebonarum**	**Prosentase Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan**						
1	Peningkatan koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan koordinasi admnistrasi Tata Pemerintahan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Pembinaan administrasi Tata Pemerintahan	2	2.00	keg	2	keg	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan	2	2.00	keg	2	keg	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	2,890,000	2,890,000	2,890,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah rapat dan perjalanan dinas untuk realisasi PBB	2	2.00	keg	2	keg	100
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	6,025,000	6,025,000	6,025,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan lomba tertib administrasi Desa Tingkat Kecamatan	7	7.00	keg	7.00	keg	100
6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Calon Kepala Desa	4	4.00	org	4.00	org	100

KEC. WEDI

I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**126,700,000.00**	**174,500,000.00**	**160,624,541.00**										
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah surat terkirim	165	165	Surat	165	Surat	100
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,800,000	21,600,000	16,610,261	76.90	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dan jenis rekening	3	3	rekening	3	rekening	100
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14,800,000	14,800,000	14,292,970	96.57	100	Kecamatan Wedi	Jumlah tenaga kebersihan kantor	1	1	orang	1	orang	100
4.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah jenis ATK	36	36	Jenis	36	Jenis	100
5.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan	3,000,000	4,800,000	4,800,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah barang dan penggandaan	1	1	Jenis	1	Jenis	100
6.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	2,500,000	2,500,000	2,459,000	98.36	100	Kecamatan Wedi	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	15	15	Jenis	15	Jenis	100
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000,000	3,000,000	2,933,600	97.79	100	Kecamatan Wedi	Jumlah peralatan dan perlengkapan	6	6	Jenis	6	Jenis	100
8.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	3,100,000	3,100,000	3,000,000	96.77	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dan jenis surat kabar	3	3	Surat kabar	3	Surat kabar	100
9.	Penyediaan makanan dan minuman	7,000,000	8,200,000	8,198,000	99.98	100	Kecamatan Wedi	Jumlah rapat koordinasi	8 Kali	451	paker	451	paker	100
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10,000,000	50,000,000	43,353,100	86.71	100	Kecamatan Wedi	Jumlah koordinasi /studi banding ke luar daerah	5	20	kali	20	kali	100
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	13,000,000	16,000,000	16,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah koordinasi,konsultasi dan pemantauan dalam daerah	140	154	kali	154	kali	100
12.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	28,000,000	28,000,000	26,984,490	96.37	100	Kecamatan Wedi	Jumlah tenaga keamanan kantor	2	2	orang	2	orang	100
13	Penyediaam jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,500,000	13,500,000	12,993,120	96.25	100	Kecamatan Wedi	Jumlah tenaga admnistrasi kantor	1	1	orang	1	orang	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR**	**54,300,000**	**200,000,000**	**195,723,100**										
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	18,800,000	74,000,000	72,854,000	98.45	100	Kecamatan Wedi	Jumlah peralatan	3	6	unit	6	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23,000,000	23,000,000	23,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah gedung yang direhab	1	1	unit	1	unit	100
3	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7,500,000	8,000,000	6,188,100	77.35	100	Kecamatan Wedi	Jumlah kendaraan dinas	8	11	unit	11	unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	4,805,000	96.10	100	Kecamatan Wedi	Julah peralatan yang dipelihara	5	5	unit	5	unit	100
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	65,000,000	64,416,000	99.10	100	Kecamatan Wedi			1	paket	1	paket	100
6	Penataan Lingkungan Kantor	0	25,000,000	24,460,000	97.84	100	Kecamatan Wedi	Jumlah taman yang dibuat	1	1	paket	1	paket	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**										
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dokumen	3	3	dokumen	3	dokumen	100
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN**	**131,000,000**	**136,000,000**	**135,090,450**										
1.	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	12,000,000	12,000,000	11,998,500	99.99	100	19 desa	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi PPM	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	32,000,000	32,000,000	31,998,500	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi PPM	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,499,950	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi PPM	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	12,500,000	12,500,000	12,499,000	99.99	100	19 desa	Jumlah kegiatan pemantauan	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah kegiatan fasilitasi PKK	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	6,000,000	6,000,000	5,999,500	99.99	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dokumen profil	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	40,000,000	39,095,000	97.74	100	Wil. Kecamatan Wedi	Jumlah kegiatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
V	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN**	**63,000,000**	**69,500,000**	**69,498,900**										
1	peningkatan koordinasi Administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	37,500,000	37,500,000	37,499,800	100	100	19 desa	Jumlah Kegiatan koordinasi administrasi trantibum	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
2	peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,499,850	100	100	19 desa	Jumlah Kegiatan pembinaan administrasi trantibum	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
3	peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	18,000,000	24,500,000	24,499,250	100	100	19 desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi trantibum	1	2	kegiatan	2	kegiatan	100
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN**	**82,000,000**	**82,000,000**	**81,998,400**										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	16,000,000	16,000,000	15,999,800	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan koordinasi tapem	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
2.	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan pembinaan tapem	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3.	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	9,000,000	9,000,000	8,999,800	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan fasilitasi tapem	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
4.	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	9,000,000	9,000,000	8,999,800	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan intensifikasi PBB	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
5.	Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	19 desa	Jumlah desa yang dinilai	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
6.	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	23,000,000	23,000,000	22,999,000	100	100	19 desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	18	18	Desa	18	Desa	100
KEC. JOGONALAN														
I	**PROG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**192,210,000**	**201,210,000**	**189,945,435**	**94.40**									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7,096,000	7,096,000	7,092,960	99.96	100	Kec. Jogonalan	Jml surat terkirim	700	700	lbr	743	lbr	106
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	14,000,000	16,000,000	10,653,539	66.58	100	Kec. Jogonalan	Jml jasa rekening	3	3	rekening	3	rekening	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18,529,566	18,529,566	17,937,120	96.80	100	Kec. Jogonalan	Jml THL Kebersihan	1	1	orang	1	orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	20,360,000	20,360,000	20,360,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Jml ATK berdasarkan jenisnya	32	32	jenis	32	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	4,798,000	4,798,000	4,765,000	99.31	100	Kec. Jogonalan	Jml barang cetak berdasarkan jenisnya	4	4	jenis	4	jenis	100
6	Penyediaan komponen instlasi listrik & penerangan	5,000,000	5,000,000	3,316,000	66.32	100	Kec. Jogonalan	Jml instalasi listrik berdasarkan jenisnya	11	11	jenis	11	jenis	100
7	Penyediaan makanan & minuman	24,660,000	24,660,000	24,651,600	99.97	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi rapat rutin selama 1 tahun	12	12	kali	12	kali	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	20,000,000	25,000,000	24,855,300	99.42	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi rakor & konsultasi luar daerah	10	15	kali	9	kali	60
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	28,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi rakor & konsultasi dalam daerah	250	300	kali	300	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	16,356,434	16,356,434	15,236,436	93.15	100	Kec. Jogonalan	Jml THL Keamanan	1	1	orang	1	orang	100
11	Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	33,410,000	33,410,000	31,077,480	93.02	100	Kec. Jogonalan	Jml THL administrasi	2	2	orang	2	orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**	**74,250,000**	**117,250,000**	**113,576,725**	**96.87**									
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Jumlah perlengkapan gedung terbeli	1	1	unit	1	unit	100
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	-	43,000,000	42,800,000	99.53	100	Kec. Jogonalan	Jumlah peralatan kantor terbeli	0	7	unit	7	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42,000,000	42,000,000	41,200,000	98.10	100	Kec. Jogonalan	Jumlah perlengkapan gedung terbeli	1	1	unit	1	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8,250,000	8,250,000	6,626,725	80.32	100	Kec. Jogonalan	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	6	6	unit	6	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,500,000	10,500,000	9,450,000	90.00	100	Kec. Jogonalan	Jumlah perlengkapan gedung terpelihara	12	12	unit	12	unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Jumlah gedung terpelihara	9	9	unit	9	unit	100
III	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1,500,000**	**1,500,000**	1,450,000	**96.67**									
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000	1,450,000	96.67	100	Kec. Jogonalan	Jumlah dokumen laporan	12	12	dokumen	12	dokumen	100
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan & fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa kelurahan di Kecamatan**	**107,540,000**	**111,540,000**	**110,268,900**	**98.86**									

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi koordinasi seksi PPM kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,875,000	97.92	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi pembinaan seksi PPM kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,640,000	9,640,000	9,616,600	99.76	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi fasilitasi seksi PPM kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keu	10,000,000	10,000,000	9,910,000	99.10	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg mendapat bantuan keuangan	12	12	desa	12	desa	100
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,847,000	99.39	100	Kec. Jogonalan	Jml penggerak PKK Kecamatan dan desa	410	410	orang	410	orang	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	10,000,000	10,000,000	9,675,000	96.75	100	Kec. Jogonalan	Jml dokumen profil tiap tiap desa	2	2	dokumen	2	dokumen	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,517,800	98.62	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg ditempati kegiatan sambang warga	1	1	desa	1	desa	100
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	9,900,000	9,900,000	9,827,500	99.27	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg mengikuti musrenbang tk. Kecamatan	18	18	desa	18	desa	100
V	**Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Ketentraman & ketertiban umum di Kecamatan**	**47,000,000**	**61,000,000**	**58,216,800**	**95.44**									
1	Peningkatan koord Adm Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan	36,000,000	40,000,000	39,788,800	99.47	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi koordinasi seksi Trantibum kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
2	Peningkatan pembinaan Adm Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,981,400	99.69	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi pembinaan seksi Trntibum kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
3	Peningkatan fasilitasi Adm Ketentraman dan kertertiban umum kecamatan	5,000,000	15,000,000	12,446,600	82.98	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi fasilitasi seksi Trantibum kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
VI	**Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**55,500,000**	**85,500,000**	**81,308,500**	**95.10**									
1	Peningkatan koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	15,000,000	13,852,500	92.35	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi koordinasi seksi Tapem kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
2	Peningkatan pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	15,000,000	12,523,900	83.49	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi pembinaan seksi Tapem kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
3	Peningkatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.	5,000,000	15,000,000	14,872,500	99.15	100	Kec. Jogonalan	Frekfensi fasilitasi seksi Tapem kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Jml wajib pajak	25,300	25,300	STTS	24,800	STTS	98
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	17,500,000	17,500,000	17,128,400	97.88	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg mengikuti lomba tertib adm desa	18	18	desa	18	desa	100
6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	18,000,000	18,000,000	17,931,200	99.62	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg menyelenggarakan sosialisasi pilkades	13	13	desa	13	desa	100
KEC. GANTIWARNO														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**141,500,000**	**206,500,000**	**180,961,634**										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	2,995,250	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kelancaran pengelolaan surat menyurat	1,000	1,000	Lembar	1,000	Lembar	100
2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,500,000	24,000,000	8,362,034	35	100	Kecamatan Gantiwarno	Terbayarnya rekening telepon, listrik, dan air	3	4	Rekening	4	Rekening	100
3	penyediaan jasa administrasi keuangan	16,000,000	23,000,000	22,319,680	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kelancaran keuangan kantor	1	2	Orang	2	Orang	100
4	penyediaan jasa kebersihan kantor	16,000,000	23,000,000	22,317,880	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	1	2	Orang	2	Orang	100
5	penyediaan alat tulis kantor	12,500,000	12,500,000	12,342,350	99	100	Kecamatan Gantiwarno	jumlah ATK yang di tersedia	35	35	Jenis	35	Jenis	100
6	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,000,000	3,000,000	2,999,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4	10	Jenis	10	Jenis	100
7	penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	4,823,750	96	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya penerangan kantor	12	10	Jenis	10	Jenis	100
8	penyediaan makanan dan minuman	12,000,000	27,500,000	27,493,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tercukupinya makanan dan minuman	12	48	Kali	48	Kali	100
9	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14,500,000	26,500,000	26,368,000	100	100	JawaTengah dan Seluruh Indonesia	Tercukupinya biaya perjalanan dinas luar daerah	12	8	Kali	8	Kali	100
10	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	20,000,000	20,000,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tercukupinya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12	24	Kali	24	Kali	100
11	penyediaan jasa pengamanan kantor	16,000,000	16,000,000	15,453,570	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya keamanan kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor	1	1	Orang	1	Orang	100
12	penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran	16,000,000	23,000,000	15,487,120	67	68	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kelancaran pekerjaan kantor	1	2	Orang	1	Orang	50
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**28,500,000**	**185,000,000**	**176,924,300**										
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas	-	20,000,000	19,650,000	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas	0	5	Unit	5	Unit	100
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	74,000,000	72,700,000	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	0	8	Unit	8	Unit	100
3	Pengadaan Mebeleur	21,500,000	44,000,000	42,860,000	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	40	40	Unit	40	Unit	100
4	Pemeiharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	7,000,000	7,000,000	2,392,300	34	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5	5	Unit	5	Unit	100
5	rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	-	40,000,000	39,322,000	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kenyamanan gedung kantor	0	2	Paket	2	Paket	100
III	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan di Kecamatan**	**122,000,000**	**140,500,000**	**138,135,916**										
1	peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa kelurahan di kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,998,500	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya koordinasi admin PMD	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
2	peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa kelurahan kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,970,150	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya pembinaan admin PMD	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
3	peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa kelurahan kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,992,250	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya fasilitas admin PMD	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	10,000,000	10,000,000	9,825,000	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Pemantauan BANKEU tepat sasaran	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
5	pembinaan 10 program PKK tingkat kecamatan	27,000,000	40,500,000	38,724,550	96	100	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasinya 10 program PKK tk. Kecamatan	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
6	penyusunan profil desa kelurahan	16,000,000	16,000,000	15,998,950	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tersusunya dokumen profil Desa	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
7	penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	15,000,000	15,000,000	14,677,616	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Terselenggaranya musrenbang	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
8	penyelenggaraan sambang warga	35,000,000	40,000,000	39,948,900	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terselenggaranya sambang warga	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**47,000,000**	**47,000,000**	**46,606,000**										
1	peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	30,000,000	30,000,000	29,725,000	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya koordinasi admin. Trantibum	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
2	peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya pembinaan adm. Trantibum	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
3	peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,881,000	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya fasilitasi adm. Trantibum	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**67,000,000**	**67,000,000**	**65,175,850**										
1	peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	11,000,000	11,000,000	10,416,450	95	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya koordinasi adminitrasi tapem	2	16	Desa	16	Desa	100
2	peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,775,750	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya pembinaan admin tapem	3	16	Desa	16	Desa	100
3	peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,198,700	89	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya fasilitas admin tapem	2	16	Desa	16	Desa	100
4	intensifikasi pbb tingkat kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,968,550	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	17,899	16	Desa	16	Desa	100
5	lomba tertib administrasi desa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	erpenuhinya Fasilitas Lomba tertib adminitrasi desa	16	16	Desa	16	Desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	21,000,000	21,000,000	20,816,400	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya fasilitas pemilihan kades	16	16	Desa	16	Desa	100

KEC. PRAMBANAN														
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**157,000,000**	**202,500,000**	**173,119,884**	**85%**	**100%**		**Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26,400,000	34,000,000	16,609,784	49%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah rekening jasa listrik, telepon, air dan internet yang terbayar selama 12 bulan	4	4	rekening	4	rekening	**100**
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,945,000	19,945,000	18,352,620	92%	100%	Kecamatan Prambanan	Pembayaran THL kebersihan dan alat kebersihan	1	1	orang	1	orang	**100**
3	Penyediaan alat tulis kantor	12,100,000	15,000,000	13,657,500	91%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah ATK kec. Prambanan	12	12	bulan	12	bulan	**100**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,600,000	5,600,000	5,556,000	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	12	12	bulan	12	bulan	**100**
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	4,601,500	92%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor kec. Prambanan	12	12	bulan	12	bulan	**100**
6	Penyediaan makanan dan minuman	14,500,000	35,500,000	29,260,000	82%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah frekuensi rapat koordinasi Kantor Kecamatan Prambanan	12	12	bulan	12	bulan	**100**
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,000,000	19,000,000	18,839,000	99%	100%	Luar Kab Klaten	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Kecamatan Prambanan	2	2	orang	2	orang	**100**
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	9,000,000	14,000,000	13,600,000	97%	100%	Dalam Kab Klaten	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kantor Kecamatan Prambanan	12	12	bulan	12	bulan	**100**
9	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,287,000	27,287,000	26,489,240	97%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pembayaran 2 THL jasa pengamanan kantor dan alat pengamanan kantor (2 THL) Kantor Kecamatan Prambanan	2	2	orang	2	orang	**100**
10	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	27,168,000	27,168,000	26,154,240	96%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pembayaran 2 THL jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran dan sarana penunjang kerja Kantor Kecamatan Prambanan	2	2	orang	2	orang	**100**
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**27,800,000**	**27,800,000**	**21,639,550**	**78%**	**100%**	**Kecamatan Prambanan**	**Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-				Kecamatan Prambanan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Led TV 2 unit)	2	2	unit	2	unit	**100**
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-				Kecamatan Prambanan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli (AC 3 unit, PC 1 unit, printer 1 unit)	5	5	unit	5	unit	**100**
3	Pengadaan mebeleur	-	-				Kecamatan Prambanan	Jumlah mebeleur yang dibeli	102	102	buah	102	buah	**100**
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	10,000,000	7,597,000	76%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1	1	tahun	1	tahun	**100**
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8,800,000	8,800,000	5,237,550	60%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6	6	kendaraan	6	kendaraan	**100**
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor & rumah tangga	9,000,000	9,000,000	8,805,000	98%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	3	3	unit	3	unit	**100**
III	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN**	**99,400,000**	**108,900,000**	104,286,800	**96%**	**100%**		**Prosentase pemenuhan peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,999,500	100%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah musrenbang tk kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	**100**
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	7,000,000	7,000,000	5,726,000	82%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa	3	3	kegiatan	3	kegiatan	**100**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	9,000,000	9,000,000	8,865,500	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa	2	2	kegiatan	2	kegiatan	**100**
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	11,000,000	11,000,000	9,753,000	89%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan penyampaian bantuan keuangan desa	4	4	kegiatan	4	kegiatan	**100**
5	Fasilitasi 10 program pokok PKK tingkat kecamatan	19,500,000	24,000,000	23,773,500	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah TP PKK desa yang terfasilitasi 10 program pokok PKK tingkat kecamatan	16	16	TP PKK desa	16	TP PKK desa	**100**
6	Penyusunan profil desa/kelurahan/ kecamatan	7,900,000	7,900,000	6,832,500	86%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah laporan penyusunan profil kecamatan	2	2	laporan	2	laporan	**100**
7	Penyelenggaraan sambang warga	35,000,000	40,000,000	39,336,800	98%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan sambang warga	1	1	kegiatan	1	kegiatan	**100**
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN**	**42,000,000**	**53,650,000**	**49,727,000**	**93%**	**100%**		**Prosentase pemenuhan peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	31,000,000	31,000,000	29,603,500	95%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	2	2	kegiatan	2	kegiatan	**100**
2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah linmas inti dan linmas desa yang dibina (linmas inti 31 orang dan linmas desa 496 orang)	527	527	orang	527	orang	**100**
3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	6,000,000	17,650,000	15,123,500	86%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	3	3	kegiatan	3	kegiatan	**100**
V	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN**	**80,600,000**	**88,950,000**	**86,701,000**	**97%**	**100%**		**Prosentase pemenuhan peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	7,700,000	7,700,000	7,596,800	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi tata pemerintahan	3	3	kegiatan	3	kegiatan	**100**
2	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,800,000	97%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan	2	2	kegiatan	2	kegiatan	**100**
3	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	16,400,000	18,000,000	17,255,900	96%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan	3	3	kegiatan	3	kegiatan	**100**
4	Intensifikasi PBB tingkat kecamatan	8,250,000	10,000,000	9,714,800	97%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah intensifikasi PBB tingkat kecamatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Prambanan	12	12	kali	12	kali	**100**
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	16,250,000	16,250,000	16,035,000	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah lomba tertib administrasi desa	1	1	kegiatan	1	kegiatan	**100**
6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	26,000,000	31,000,000	30,298,500	98%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah sosialisasi dan koordinasi pemilihan kepala desa	14	14	desa	14	desa	**100**
KEC. MANISRENGGO														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**182,929,944**	**208,700,000**	**198,708,772**										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	2,861,000	95.37	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah surat masuk dan keluar	500	500	Surat	500	Surat	100
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik	19,800,000	19,800,000	15,258,472	77.06	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah pembayaran rekening	2	2	Rekening	2	Rekening	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	28,783,944	29,000,000	27,943,740	96.36	100.00	Kec. Manisrenggo	Jumlah tenaga administrasi keuangan	2	2	Orang	2	Orang	
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	24,790,000	17,300,000	16,724,120	96.67	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah pembayaran petugas kebersihan kantor	1	1	Orang	1	Orang	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,000,000	13,000,000	12,954,700	99.65	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis pembelian atk	18	18	Macam	18	Macam	100
6	Penyediaan Barang CetakanPenggandaan	2,000,000	2,500,000	2,292,000	91.68	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah cetak dan penggandaan	5	5	Macam	5	Macam	100
7	Penyediaan Instalansi Listrik /penerrangan bangunan Kantor	4,000,000	4,000,000	3,882,000	97.05	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis pembelian peralatan listrik	5	5	Jenis	5	Jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	6,800,000	22,500,000	22,443,500	99.75	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah kegiatan rapat	12	12	Kali	12	Kali	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	10,000,000	40,000,000	38,937,000	97.34	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah perjalanan dinas keluar daerah dalam setahun	5	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25,475,000	28,800,000	27,850,000	96.70	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam setahun	50	50	Kegiatan	50	Kegiatan	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	45,281,000	28,800,000	27,562,240	95.70	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah petugas pengamanan kantor	2	2	Orang	2	Orang	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**37,375,000**	**66,375,000**	**63,246,300**										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	15,000,000	42,000,000	41,244,800	98.20	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis barang peralatan gedung	1	1	Paket	1	Paket	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	8,875,000	8,875,000	8,424,000	94.92	100	Kec. Manisrenggo	jumlah gedung yang dipelihara	2	2	Unit	2	Unit	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	7,000,000	9,000,000	7,077,500	78.64	100	Kec. Manisrenggo	jumlah kendaraan yang dipelihara	1	1	Unit	1	Unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis pemeliharaan Perlengkapan	6	6	Unit	6	Unit	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis Pemeliharaan Mebeleur	3	3	Unit	3	Unit	100
6	Pemeliharaan Rutin Gamelan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis Pemeliharaan Gamelan	1	1	perangkat	1	perangkat	100
III	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN & FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN DI KECAMATAN**	**98,500,000**	**103,500,000**	**101,677,900**										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,943,600	99.44	99	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dikoordinasikan	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dibina	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,962,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dilakukan fasilitasi	16	16	desa	16	desa	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	10,000,000	10,000,000	9,973,100	99.73	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang menerima bantuan keuangan	16	16	desa	16	desa	100
5	Fasilitasi 10 Program pokok PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,829,100	99.37	100	Kec. Manisrenggo	jumlah rapat koordinasi	16	16	desa	16	desa	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	7,500,000	7,500,000	7,484,000	99.79	100	Kec. Manisrenggo	jumalh data profil desa	16	16	desa	16	desa	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	40,000,000	38,486,100	96.22	100	Kec. Manisrenggo	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN , FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN**	**43,500,000**	**53,500,000**	**52,792,000**										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	34,500,000	44,500,000	44,499,300	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dikoordinasikan	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,292,700	95.39	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dibina	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Umum Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,000,000	88.89	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dilakukan fasilitasi	16	16	desa	16	desa	100
V	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN**	**47,325,000**	**49,300,000**	**48,756,900**										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,912,800	97.82	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dikoordinasikan	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,800,000	93.33	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dibina	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,999,300	99.99	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dilakukan fasilitasi	16	16	desa	16	desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	4,800,000	4,800,000	4,720,000	98.33	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dilakukan intensifikasi	16	16	desa	16	desa	100
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	16,000,000	16,000,000	15,900,000	99.38	100	Kec. Manisrenggo	jumlah pemenang lomba desa	1	1	desa	1	desa	100
6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	12,525,000	14,500,000	14,424,800	99.48	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah Kegiatan Fasilitasi	2	2	desa	2	desa	100
	KEC KEMALANG													
I	**Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran**	**123,652,650**	**206,886,295**	**175,097,697**										
1	Penyediaan Surat Menyurat	1,535,000	2,000,000	1,425,000	71.25	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah surat menuyurat yang tepat sasaran	500	800	buah	800	buah	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	18,000,000	20,000,000	9,653,467	48.27	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Terbayarnya Biaya langgaanan Telpon, Air dan listrik	12	4	jenis	4	Jenis	100%
3	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	14,846,196	14,846,196	13,931,620	93.84	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Terbayarnya jasa kebersihan Kantor	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,522,775	15,000,000	11,685,900	77.91	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	20	20	jenis	20	jenis	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,004,031	5,000,000	4,252,750	85.06	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kersediaan barang cetakan dan penggandaan	12	3	jenis	3	Jenis	100%
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,850,000	2,500,000	1,586,000	63.44	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah ketersediaan komponen listrik dalam satu tahun	6	6	jenis	6	Jenis	100%
7	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	1,500,000	1,500,000	1,080,000	72.00	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah ketersediaan surat kabar dan bacaan	24	24	buah	24	Jenis	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	8,000,000	24,000,000	15,440,000	64.33	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah tercukupinya Makanan dan minuman dalam satu tahun	12	300	paket	300	paket	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	20,000,000	50,000,000	49,448,270	98.90	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah perjalanan Dinas luar daerah Kecamatan Kemalang	10	10	kali	10	Kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	15,000,000	33,000,000	29,675,000	89.92	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kemalang	95	95	kali	95	Kali	100%
11	Penyediaan jasa keamanan kantor	28,394,648	28,394,647	26,274,240	92.53	100	Kecamatan Kemalang	Pemenuhan jasa Petugas Keamanan Lingkungan Kantor kecamatan Kemalang	2	2	orang	2	orang	100%
12	Penyediaan jasa tenaga adminitrasi keuangan	-	10,645,452	10,645,450	40.00	100	Kecamatan Kemalang	Pemnehan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	2	2	orang	2	orang	100%
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**96,048,600**	**146,000,000**	**118,496,550**										
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	20,000,000	20,000,000	100.00	100	Kecamatan Kemalang	Terpenuhinya peralatan gedung Kantor	0	2	paket	2	paket	100%
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	6,000,000	6,000,000			0	Kecamatan Kemalang	Terpenihinya Pengecatan gedung kantor	3	3	unit	0	unit	0%
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	10,048,600	25,000,000	18,260,550	73.04	100	Kecamatan Kemalang	Terpenuhinya pemeliharaan Kendaraan Dinas	7	11	unit	11	unit	100%
5	Pemelihaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5,000,000	10,000,000	4,850,000	48.50	100	Kecamatan Kemalang	Perpenuhinya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	15	15	unit	15	unit	100%
6	Fasilitasi Pindahan Kantor	75,000,000	85,000,000	75,386,000	88.69	100	Kecamatan Kemalang	Terpenuhinya pindahan Kantor yang terfasiliasi	1	1	kegiatan	1	Kegiatan	100%
III	**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1,276,000**	**1,276,000**	**1,275,000**	99.92									

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realiasi kinerja SKPD	1,276,000	1,276,000	1,275,000	99.92	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Dokumen yang tersusun	3	3	dokumen	3	dokumen	100%
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembiaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan di Kecamatan**	**106,560,000**	**145,374,955**	**133,764,000**										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdyaan Masyarakat Desa/Kalurahan Kecamatan	8,500,000	20,000,000	18,432,500	92.16	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Jumlah Koordinasi PMD	13	13	Desa	13	Desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Pemberdyaan Masyarakat Desa/Kalurahan Kecamatan	8,250,000	14,000,000	12,700,000	90.71	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Jumlah Pembinaan						
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdyaan Masyarakat Desa/Kalurahan Kecamatan	7,200,000	13,000,000	11,232,500	86.40	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi	13	13	Desa	13		100%
4	Penunjang Operasional Penyampaian Keuangan	13,110,000	18,874,955	18,062,500	95.50	100	Kecamatan Kemalang		13	13	desa	13	Desa	100%
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat kecamatan	25,000,000	30,000,000	28,211,500	94.04	100	Kecamatan Kemalang	Terpenuhinya kegiatan 10 Program Pokok PKK	13	13	Kelompok	13	Kelompok	100%
6	Penyusunan Profil Desa/Kalurahan	8,000,000	13,000,000	9,630,000	74.08	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah dokumen profil desa yang dibuat	13	13	Desa	13	Desa	100%
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	36,500,000	36,500,000	35,495,000	97.25	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kegiatan sambang warga tingkat Kecamatan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembiaan dan Fasilitasi Administrasi Ketertiaban Umum di Kecamatan**	**53,500,000**	**66,500,000**	**57,370,000**										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum di Kecamatan	38,000,000	51,000,000	45,455,000	89.13	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Jumlah Koordinasi Adm. Ketentraman dan Ketertiban Umum	13	13	Desa	13		100%
2	Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Ketertiban Umum di Kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,475,000	99.67	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya jumlah pembinaan Adminitrasi Trantibum	1	1	Kegiatan	0		0%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketertiban Umum di Kecamatan	8,000,000	8,000,000	4,440,000	55.60	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Kegiatan fasilitasi Adm. Trantibum	1	1	Kegiatan	1		100%
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**55,161,250**	**68,661,250**	**31,942,250**										
1	Peningkatan Koordinasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	8,000,000	8,000,000	1,375,000	17.19	0	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya koordinasi Adm. Tapem	2	2	Kegiatan	1		50%
2	Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	8,500,000	8,500,000		0.00	0	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Pembinaan Adm. Tapem	13	13	Desa	0	Desa	0%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	8,500,000	22,000,000	10,917,250	49.62	100	Kecamatan Kemalang	Menignkatnya Fasilitasi Adm. Tapem	1	1	Kegiatan	1		100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	4,161,250	4,161,250	4,150,000	99.73	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang membayar PBB	2	2	Kegiatan	2		100%
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	7,500,000	50.00	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kegiatan lomba tertib Administrasi Desa yang terfasilitasi	1	1	Kegiatan	1		100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	11,000,000	11,000,000	8,000,000	72.73	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Koordinasi Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	1	1	Kegiatan	1		100%

KEC. KARANGNONGKO

I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**165,082,000**	**178,920,000**	**171,245,288**										
1	penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	2,500,000	2,472,832	98.91	98.9	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan surat menyurat terpenuhi	750	750	Surat	750	Surat	100%
2	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	23,400,000	23,400,000	18,695,288	79.89	79.9	Kec.Karangnongko	jumlah kebutuhan listrik,air dan Internet terpenuhi	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,000,000	21,000,000	20,543,120	97.82	97.8	Kec.Karangnongko	Jumlah THL Kebersihan terpenuhi	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan alat tulis kantor	12,753,600	12,753,600	12,728,708	99.80	99.8	Kec.Karangnongko	Jumlah alat tulis kantor terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan npenggandaan	7,790,000	7,790,000	7,500,000	96.28	96.3	Kec.Karangnongko	Jumlah barang cetakan dan penggandaan terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	4,999,980	100.00	100	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan alat listrik terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	100	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan surat kabar terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000	17,000,000	17,000,000	100.00	100	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan makan dan minum terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25,000,000	31,838,000	31,600,000	99.25	99.3	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan Dinas luar dan study banding luar daerah terlaksana	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah	15,000,000	15,000,000	14,640,000	97.60	97.6	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan Dinas Dalam Daerah terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,491,000	27,491,000	26,428,240	96.13	96.1	Kec.Karangnongko	Pengamanan kantor terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran	13,947,400	13,947,400	13,437,120	96.34	96.3	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan THL Teknis Adm. Perkantoran terpenuhi	1	1	orang	1	orang	100%
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**30,448,000**	**116,132,000**	**113,556,800**										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	3,300,000.00	58,300,000	58,294,000	99.99	100	Kec.Karangnongko	Jumlah pengadaan peralatam gedung kantor terpenuhi	1	1	Unit	1	Unit	100%
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3,000,000	3,000,000	2,900,000	96.67	96.7	Kec.Karangnongko	jumlah kebutuhan pemeliharaan rutin rumah dinas terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3,832,000	3,832,000	3,820,000	99.69	99.7	Kec.Karangnongko	kebutuhan pemeliharaan gedung terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10,316,000	11,000,000	9,242,800	84.03	84.0	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000	40,000,000	39,300,000	98.25	98.3	Kec.Karangnongko	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISITEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**3,640,000**	**4,000,000**	**3,978,000**	99.45	99.5	Kec.Karangnongko							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,640,000	4,000,000	3,978,000	99.45	99.5	Kec.Karangnongko	jumlah kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relasi kinerja SKPD terpenuhi	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100%
IV	**Program peningkatan koordiansi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan**	**99.000.000**	**99,000,000**	**92,725,000**	93.66	94	Kec.Karangnongko							
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,550,000	92.50	93	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,650,000	94.17	94	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,950,000	99.17	99	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	10,000,000	10,000,000	8,000,000	80.00	80	Kec.Karangnongko	jumlah Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
5	Pembinaan 10 program PKK tingkat kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,800,000	99.20	99	Kec.Karangnongko	jumlahPembinaan 10 program PKK tingkat kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
6	Penyusunan profil desa/kelurahan	6,000,000	6,000,000	5,975,000	99.58	100	Kec.Karangnongko	jumlah Penyusunan profil desa/kelurahan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
7	Penyelenggaraan sambang warga	40,000,000	40,000,000	36,800,000	92.00	92	Kec.Karangnongko	jumlah Penyelenggaraan sambang warga terpenuhi	1	1	desa	1	desa	100%
V	**Program peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**58,000,000**	**72,000,000**	**71,100,000**	98.61	98.6	Kec.Karangnongko							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan	36,000,000	50,000,000	49,650,000	99.30	99.3	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,500,000	91.67	91.7	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	16,000,000	16,000,000	15,950,000	99.69	99.7	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecaman**	**73,300,000**	**73,300,000**	**72,125,000**	98.40	98.4	Kec.Karangnongko							

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan Koodinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Koodinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan terpenuhi	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	6,400,000	6,400,000	6,250,000	97.66	97.7	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
4	Intensifikasi PBB tingkat kecamatan	9,900,000	9,900,000	9,775,000	98.74	98.7	Kec.Karangnongko	jumlah Intensifikasi PBB tingkat kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
5	Lomba tertib administrasi desa	15,000,000	15,000,000	14,500,000	96.67	96.7	Kec.Karangnongko	jumlah Lomba tertib administrasi desa terpenuhi	14	14	desa	14	desa	100%
6	Koordinasi pemilihan kepala desa	16,000,000	16,000,000	15,850,000	99.06	99.1	Kec.Karangnongko	jumlah Koordinasi pemilihan kepala desa terpenuhi	11	11	desa	11	desa	100%
7	Koordinasi pengisian perangkat desa	14,000,000	14,000,000	13,750,000	98.21	98.2	Kec.Karangnongko	jumlah Koordinasi pengisian perangkat desa terpenuhi	9	9	desa	9	desa	100%
	KEC. JATINOM													
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**	**147,222,600**	**227,096,350**	**210,186,612**	**92.55**	**100**								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	2,901,000	96.70	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya surat-menyurat di kantor kecamatan	875	875	surat	875	surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik	17,000,000	43,000,000	31,626,412	73.55	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya jasa komunikasi, listrik dan air.	3	3	rekening	3	rekening	100
3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	25,004,110	25,244,110	21,999,000	87.15	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya jasa administrasi perkantoran	2	2	orang	2	orang	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13,020,000	13,140,000	12,880,100	98.02	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya jasa kebersihan kantor	1	1	orang	1	orang	100
5	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	13,198,000	13,198,000	13,198,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyediaan Alat Tulis Kantor	20	20	jenis	20	jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,845,000	9,000,000	8,999,900	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	5	jenis	5	jenis	100
7	Penyediaan Makan dan Minum	11,881,250	26,000,000	25,952,000	99.82	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman	12	12	kali	12	kali	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,000,000	50,000,000	49,949,100	99.90	100	Luar Kab. Klaten	Terwujudnya pelaksanaan rakor ke luar daerah	7	7	kegiatan	7	kegiatan	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.00	100	Kab. Klaten	Terwujudnya pelaksanaanrakor dalam daerah	70	70	kegiatan	70	kegiatan	100
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor	26,274,240	26,514,240	24,681,100	93.09	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya jasa pengamanan kantor	2	2	tenaga keamanan	2	tenaga keamanan	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**	**80,706,000**	**84,500,000**	**73,971,120**	87.54	100								
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	8,206,000	12,000,000	4,541,620	37.85	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas	5	5	unit	5	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya Peralatan Gedung kantor	8	8	buah	8	buah	100
3	Penataan Lingkungan Kantor	70,000,000	70,000,000	66,929,500	95.61	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penataan lingkungan kantor	200	200	meter 2	200	meter 2	100
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan.**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,388,000**	**92.53**	100								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000	1,388,000	92.53	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyusunan lapooran capaian kinerja dan realisasi SKPD	1	1	dokumen	1	dokumen	100
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel di Kecamatan :**	**79,000,000**	**84,000,000**	**79,653,700**	**94.83**	**100**								
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan di Kec.	5,000,000	5,000,000	4,999,900	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya koordinasi administrasi desa/kelurahan	18	18	desa/ kel	18	desa/ kel	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kec.	5,000,000	5,000,000	4,999,300	99.99	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya pembinaan administrasi desa/kelurahan	18	18	desa/ kel	18	desa/ kel	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kec.	5,000,000	5,000,000	4,999,800	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya fasilitasi administrasi desa/kelurahan	18	18	desa/ kel			
4	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	24,000,000	24,000,000	20,599,300	85.83	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya fasilitasi 10 Program PKK	18	18	desa/ kel	18	desa/ kel	100
5	Penyusunan Profil Desa-Kelurahan-Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,991,000	99.82	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan	1	1	dokumen	1	dokumen	100
6	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	40,000,000	39,064,400	97.66	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyelenggaraan sambang warga	1	1	desa	1	desa	100
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :**	**51,410,000**	**50,500,000**	**50,441,100**	**99.88**	**100**								
1	Peningkatan koordinasi administrasi Trantibum Kecamatan	36,000,000	36,000,000	35,999,800	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya koordinasi administrasi Trantibum	12	12	kali	12	kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi Trantibum Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,941,500	99.03	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya pembinaan administrasi Trantibum	558	558	orang	558	orang	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi Trantibum Kecamatan	9,410,000	8,500,000	8,499,800	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya fasilitasi administrasi Trantibum	18	18	desa/kel	18	desa/kel	100
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel di Kecamatan :**	**72,606,900**	**70,449,150**	**70,436,700**	**99.98**	**100**								
1	Peningkatan koordinasi administrasi Tapem Kecamatan	10,606,900	8,449,150	8,448,700	99.99	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya koordinasi administrasi Tapem	17	17	kali	17	kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi Tapem Kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya pembinaan administrasi Tapem administrasi Tapem	34	34	perdes	34	perdes	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi Tapem Kecamatan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya fasilitasi administrasi Tapem administrasi Tapem	17	17	desa	17	desa	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,988,000	99.80	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya Intensifikasi PBB Kecamatan Jatinom	22942	22942	lembar	22942	lembar	100
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya lomba tertib administrasi desa	17	17	desa	17	desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Koordinasi Pengisian Kepala Desa	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya Pengisian Pilkades	15	15	desa	15	desa	100
KEL. JATINOM														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**113,500,000**	**118,700,000**	**108,398,476**										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik ,	21,800,000	27,000,000	21,347,916	79.07	100	Kel. Jatinom	Jumlah Rekening Pajak Yang dibayar	5	5	Rek	5	Rek	100
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	29,300,000	29,300,000	27,194,240	92.81	100	Kel. Jatinom	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	2	2	orang/bln	2	orang/bln	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14,000,000	14,000,000	13,087,500	93.48	100	Kel. Jatinom	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	1	1	orang/bln	1	orang/bln	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	6,500,000	6,500,000	6,436,000	99.02	100	Kel. Jatinom	Jumlah Jenis ATK	19	19	jenis	19	jenis	100.0
5	Penyediaan barang cetakan dan pengggadaan	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.00	100	Kel. Jatinom	Jumlah Jenis barang cetak dan FC	6000	6000	lembar	6000	lembar	100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	1,600,000	1,600,000	1,560,000	97.50	100	Kel. Jatinom	Jumlah Jenis Surat Kabar	2	2	Macam	2	Macam	100
7	Penyediaan makan dan minuman	4,000,000	4,000,000	3,880,000	97.00	100	Kel. Jatinom	Jumlah jenis makan minum rapat yang terorganisasi	8	8	kali	8	kali	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	15,000,000	15,000,000	14,475,000	96.50	100	Luar Kab. Klaten	Jumlah Kegiatan Luar Daerah	2	2	kali	3	kali	150
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4,000,000	4,000,000	3,999,500	99.99	100	Kab. Klaten	Jumlah Kegiatan dalam Daerah	20	20	kali	20	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	15,500,000	15,500,000	14,618,320	94.31	100	Kel. Jatinom	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	1	1	orang/bln	1	orang/bln	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**16,500,000**	**118,000,000**	**114,215,400**										
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	15,000,000	40,000,000	39,888,400	99.72	100	Kel. Jatinom	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang di bayar	2	2	Jenis	2	buah	100
2	Pengadaan peralatan kantor	-	26,500,000	23,840,000	89.96	100	Kel. Jatinom	Jumlah Peralatan Kantor Yang di bayar	0	2	Jenis	2	unit	100
3	Pengadaan mebeler	-	50,000,000	49,232,000	98.46	100	Kel. Jatinom	Jumlah pengadaan Mebeleur kantor	0	3	Jenis	3	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,500,000	1,500,000	1,255,000	83.67	100	Kel. Jatinom	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	1	1	unit	1	unit	100
III	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan**	**98,100,000**	**101,400,000**	**99,547,550**										
1	Pemberdayaan RT	30,000,000	30,000,000	29,985,500	99.95	100	Kel. Jatinom	Jumlah RT	15	15	RT	15	RT	100
2	Pemberdayaan RW	15,600,000	15,600,000	15,591,000	99.94	100	Kel. Jatinom	Jumlah RW	7	7	RW	7	RW	100
3	Pemberdayaan PKK	15,000,000	15,000,000	14,951,800	99.68	100	Kel. Jatinom	Jumlah binaan PKK kelurahan	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100.0
4	Pemberdayaan Karang Taruna	2,000,000	5,300,000	3,697,600	69.77	100	Kel. Jatinom	Jumlah Kegiatan	1	17	kegiatan	17	Kegiatan	100.0
5	Operasional LPMK	5,000,000	5,000,000	4,825,650	96.51	100	Kel. Jatinom	Jumlah Rapat koordinasi LPMK	12	12	kali	12	kali	100
6	Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD&POSYANDU)	10,000,000	10,000,000	9,997,000	99.97	100	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan Paud, TK, Posyandu, PKB	12	12	kali	12	kali	100
7	Pemberdayaan LPM	20,500,000	20,500,000	20,499,000	100.00	100	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan Rapat yang dilaksanakan	12	12	kali	12	kali	100
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan**	**35,000,000**	**35,000,000**	**34,912,700**										
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	10,000,000	10,000,000	9,992,250	99.92	100	Kel. Jatinom	Jumlah Musrengbangkel	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan.	10,000,000	10,000,000	9,999,450	99.99	100	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan dan peserta	4	4	Kali	4	Kali	100
3	Penunjang operasional penyaluran bantuan	15,000,000	15,000,000	14,921,000	99.47	100	Kel. Jatinom	Jumlah RW yang terfasilitasi	6	6	Orang	6	Orang	100
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan.**	**7,500,000**	**7,500,000**	**7,498,250**										
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan.	7,500,000	7,500,000	7,498,250	99.98	100	Kel. Jatinom	jumlah Kegiatan kemasyarakatan	4	4	Kali	4	Kali	100
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan.**	**27,000,000**	**27,000,000**	**26,992,400**										
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan.	12,000,000	12,000,000	11,998,400	99.99	100	Kel. Jatinom	Frekuensi kegiatan	4	4	kali	4	kali	100
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	15,000,000	15,000,000	14,994,000	99.96	100	Kel. Jatinom	Jumlah lembar SPPT penyaluran dan penagihan	847	847	lembar	847	lembar	100

KEC. KARANGANOM														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**150,150,000**	**200,450,000**	**163,449,582**				**Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran**						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000	4,500,000	2,898,100	64	100	Kabupaten Klaten	Jumlah surat terkirim	2000	2000	Surat	667	Surat	33
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,000,000	26,000,000	24,656,282	95	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah jenis rekening terbayar	3	3	Jenis	3	Jenis	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4,500,000	4,500,000	2,824,250	63	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah jenis laporan tersusun	4	4	Jenis	4	Jenis	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27,000,000	27,000,000	26,412,990	98	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah THL kebersihan kantor	2	2	Orang	2	Orang	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,500,000	7,500,000	7,490,580	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah jenis ATK tersedia	21	21	Jenis	21	Jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,000,000	4,000,000	3,541,600	89	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	3	3	Jenis	3	Jenis	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,000,000	1,000,000	732,500	73	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	5	5	Jenis	5	Jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	2,750,000	22,000,000	13,656,000	62	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah makanan dan minuman tersedia	2	2	Paket	2	Paket	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	10,000,000	15,000,000	14,646,000	98	100	Jawa dan Luar Jawa	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	2	2	Kali	3	Kali	150
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8,000,000	27,600,000	8,350,000	30	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	80	100	Kali	100	Kali	100
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,400,000	27,400,000	26,601,240	97	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah THL pengamanan kantor	2	2	Orang	2	Orang	100
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	27,500,000	33,950,000	31,640,040	93	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor	2	3	Orang	3	Orang	100
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**	**23,900,000**	**47,550,000**	**42,400,075**				**Persentase sarana dan prasarana kondisi baik**						
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3,700,000	25,850,000	24,550,000	95	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	1	7	Unit	7	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,200,000	4,200,000	4,199,200	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah gedung kantor terpelihara	2	2	Unit	2	Unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11,000,000	12,500,000	8,785,875	70	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	6	8	Unit	8	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	4,865,000	97	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Peralatan Gedung kantor terpelihara	5	5	Unit	5	Unit	100
III	**Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**3,000,000**	**1,500,000**	**898,000**				**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**						
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000	1,500,000	898,000	60	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah laporan capaian kinerja tersusun	1	1	Laporan	1	Laporan	100
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**104,500,000**	**104,500,000**	**92,781,700**				**Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu**						
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,449,250	99	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	19	19	Kali	19	Kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,498,500	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	38	38	Kali	38	Kali	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,449,000	99	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	19	19	Kali	19	Kali	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	19,000,000	19,000,000	18,974,250	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	19	19	Desa	19	Desa	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	13,957,000	56	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah kelompok PKK terfasilitasi	19	19	Kelompok	19	Kelompok	100
6	Penyelenggaraan Sambang warga	35,000,000	35,000,000	34,453,700	98	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah kegiatan sambang warga	1	1	Kali	1	Kali	100
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**52,500,000**	**60,000,000**	**59,044,350**				**Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat**						
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	37,500,000	45,000,000	44,096,850	98	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19	19	Kali	19	Kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,499,000	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19	19	Kali	19	Kali	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,448,500	99	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19	19	Kali	19	Kali	100
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**69,700,000**	**77,700,000**	**73,249,350**				**Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu**						
1	Peningkatan koordinasi administrasi tata Pemerintahan kecamatan	8,500,000	8,500,000	7,484,000	88	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan	19	19	Kali	19	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan pembinaan administrasi tata Pemerintahan kecamatan	8,000,000	8,000,000	7,999,400	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan	19	19	Kali	19	Kali	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan kecamatan	8,000,000	8,000,000	7,973,950	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tata Pemerintahan	19	19	Kali	19	Kali	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan	5,500,000	5,500,000	2,648,600	48	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa yang membayar PBB	19	19	Desa	19	Desa	100
5	Lomba tertib administrasi desa	17,700,000	17,700,000	17,200,000	97	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa terfasilitasi lomba	19	19	Desa	19	Desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	22,000,000	30,000,000	29,943,400	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa terfasilitasi Pilkades	17	17	Desa	17	Desa	100
	KEC. TULUNG													
I	**Jenis pelayanan administrasi perkantoran**	**141,700,000**	**143,700,000**	**130,144,750**				**Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran**						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	4,998,250	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah surat terkirim		2500	Surat	880	Surat	35
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik	12,000,000	12,000,000	10,200,000	0	100	Kec Tulung	Jumlah jenis rekening terbayar		3	Jenis	3	Jenis	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional	10,000,000	10,000,000	7,115,250	71	100	Kec Tulung	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara		11	unit	11	unit	100
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	10,000,000	10,000,000	8720750	0	100	Kec Tulung	Jumlah desa yang menerima dana desa		18	Desa	18	Desa	100
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,400,000	16,400,000	15465520	0	100	Kec Tulung	Jumlah THL kebersihan kantor		1	Orang	1	Orang	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,500,000	10,500,000	10337500	0	100	Kec Tulung	Jumlah jenis ATK tersedia		21	Jenis	21	Jenis	100
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	8,000,000	8,000,000	6,450,000	81	100	Jawa dan Luar Jawa	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah		2	Kali	2	Kali	100
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	13,000,000	15,000,000	12,425,000	83	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah		100	Kali	100	Kali	100
9	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	28,000,000	28,000,000	26658240	0	100	Kec Tulung	Jumlah THL pengamanan kantor		2	Orang	2	Orang	100
10	Penyediaan jasa pengemudi kantor	-	-	0.00		100		-		-	-	-	-	-
11	Penyediaan Jasa tenaga administrasi /teknis kantor	28,800,000	28,800,000	27774240	0	100	Kec Tulung	Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor		2	Orang	2	Orang	100
II	**Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**75,600,000**	**102,200,000**	**82,372,500**				**Persentase sarana dan prasarana kondisi baik**						
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	15,800,000	35,800,000	32,550,000	91	100	Kec Tulung	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli		4	Unit	4	Unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	11,300,000	17,900,000	17,800,000	99	100	Kec Tulung	Jumlah gedung kantor terpelihara		2	Unit	2	Unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	10,000,000	10,000,000	0.00	0	0	Kec Tulung	Terpeliharanya gedung kantor			Unit	0	Unit	-
4	Pengadaan rutin/berkala mabeleur	5,000,000	5,000,000	0.00	0	0	Kec Tulung	Jumlah pengadaan mebeleur			Unit	0	Unit	-
5	Rehabiilitasi sedang/berat rumah dinas	28,500,000	28,500,000	27,022,500	0	100	Kec Tulung	Jumlah gedung kantor di rehab		1	Unit	1	Unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan dan rumah tangga	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Tulung	Jumlah peralatan dan rumah tangga kantor terpelihara		7	Unit	7	Unit	100
7	Penataan lingkungan kantor	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,060,000**				**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**						
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,200,000	1,200,000	1,060,000	88	100	Kec Tulung	Jumlah desa desa		18	Desa	18	Desa	100
IV	**Progam Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**105,700,000**	**110,700,000**	**99,494,450**				**Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu**						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Kecamatan	15,700,000	15,700,000	13,405,000	85	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa		19	Kali	19	Kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan/Kelurahan Kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,299,100	97	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		38	Kali	38	Kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	10,000,000	10,000,000	8,044,400	80	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa		18	Kali	18	Kali	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	12,500,000	12,500,000	11,066,000	89	100	Kec Tulung	Jumlah desa penerima bantuan keuangan		18	Desa	18	Desa	100
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	20,000,000	20,000,000	15,926,200	80	100	Kec Tulung	Jumlah kelompok PKK terfasilitasi		18	Kelompok	18	Kelompok	100
6	Penyusunan Profil desa / Kelurahan	5,000,000	5,000,000	3,934,750	79	100	Kec Tulung	Jumlah kegiatan penyusunan profile desa/Kelurahan		1	Kali	1	Kali	100
7	Penyelenggaraan sambang warga	35,000,000	40,000,000	39,819,000	100	100	Kec Tulung	Jumlah kegiatan sambang warga		1	Kali	1	Kali	100
V	**Progam Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**51,000,000**	**64,000,000**	**56,761,800**				**Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat**						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec	37,000,000	50,000,000	47,166,200	94	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		18	Kali	18	Kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec	7,000,000	7,000,000	5,320,600	76	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum		18	Kali	18	Kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec	7,000,000	7,000,000	4,275,000	61	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		18	Kali	18	Kali	100
VI	**Progam Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**60,500,000**	**60,500,000**	**51,301,200**				**Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu**						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kec	6,000,000	6,000,000	5,203,000	87	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan		18	Kali	18	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kec	7,000,000	7,000,000	4,245,000	61	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan		18	Kali	18	Kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kec	7,000,000	7,000,000	4,259,000	61	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tata Pemerintahan		18	Kali	18	Kali	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,690,000	94	100	Kec Tulung	Jumlah desa yang membayar PBB		18	Desa	18	Desa	100
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	15,500,000	15,500,000	15,404,200	99	100	Kec Tulung	Jumlah desa terfasilitasi lomba		18	Desa	18	Desa	100
6	Fasilitasi pemilihan kepala Desa	20,000,000	20,000,000	17,500,000	88	100	Kec Tulung	Jumlah desa terfasilitasi Pilkades		4	Desa	4	Desa	100

	Kec. Polanharjo													
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**156,450,000**	**206,969,000**	**192,728,165**			**Kec. Polanharjo**	**Prosentase Pelayanan Adm Perkantoran Yang Baik**						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,999,200	100%	100%		Jumlah Surat Masuk dan Keluar	800	800	Lembar	1605	Lembar	201%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik	17,000,000	30,000,000	18,542,579	62%	62%		Jumlah Rekening Pembayaran Jasa LTA	3	3	Rekening	3	Rekening	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	27,469,000	27,469,000	26,455,140	96%	96%		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	2	2	Orang	1	Orang	50%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17,190,000	20,000,000	19,493,320	97%	97%		Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	1	1	Orang	1	Orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	10,103,000	13,000,000	12,858,950	99%	99%		Jumlah dan Jenis ATK	30	30	Jenis	30	Jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,500,000	5,500,000	5,498,000	100%	100%		Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan	10	10	Jenis	10	Jenis	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	5,500,000	5,500,000	5,480,966	100%	100%		Jumlah dan Jenis Komponen Istalasi Listrik	10	10	Jenis	10	Jenis	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	14,000,000	25,000,000	24,967,500	100%	100%		Jumlah Frekwensi Rapat	470	470	Kali	450	Kali	96%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar daerah	15,000,000	25,000,000	24,946,270	100%	100%		Jumlah Frekwensi Rakor Luar Daerah	18	18	Kali	18	Kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	100%		Jumlah Frekwensi Rakor Luar Daerah	100	100	Kali	300	Kali	300%
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,500,000	27,500,000	26,486,240	96%	96%		Jumlah Tenaga Keamanan / Penjaga Malam	2	2	Orang	2	Orang	100%
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**146,050,000**	**105,400,000**	**102,017,969**	97%		**Kec. Polanharjo**	**Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur**						
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	27,200,000	74,900,000	72,867,000	97%	97%		Jumlah Peralata Gedung Kantor Yang Tersedia	9	9	Jenis	5	Jenis	56%
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	11,000,000	12,000,000	10,680,969	89%	89%		Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara	7	7	kendaraan	7	kendaraan	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000	10,000,000	9,990,000	100%	100%		Jumlah peralatan Gedung Kantor Yang diplihara	16	16	Jenis	16	Jenis	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8,500,000	8,500,000	8,480,000	100%	100%		Jumlah Mebeleur Yang diplihara	56	56	unit	56	unit	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PMD / KEL**	**89,350,000**	**89,850,000**	**89,380,400**	99%	99%	**Kec. Polanharjo**	**Prosentase Pengumpulan LPJ ADDTepat Waktu**	54	54	Desa	38	Desa	**70%**
								Prosentase Pengumpulan LPJ DDTepat Waktu	55	55	Desa	38	Desa	**69%**
								Prosentase Pengumpulan LPJ Hibah/Bankeu Yang Tepat Waktu	48	48	Desa	38	Desa	**79%**
								Prosentase Desa / Kel Yang Melaksanakan Musrenbang	100	100	Desa	100	Desa	**100%**
								Prosentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kec Yang Tertealisasi dlm APBD	27%	27%	Usulan	27%	Usulan	**100%**
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	8,000,000	8,000,000	7,990,000	100%	100%		Jumlah Frekwensi Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	18	18	Kali	18	Kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	8,000,000	8,000,000	7,989,400	100%	100%		Jumlah Frekwensi Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	18	18	Kali	18	Kali	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	8,450,000	8,450,000	8,401,000	99%	99%		Jumlah Frekwensi Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	18	18	Kali	18	Kali	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	5,400,000	5,400,000	5,374,800	100%	100%		Jumlah Frekwensi Fasilitasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan	36	36	Kali	36	Kali	100%
5	Fasilitasi 10 program PKK Tingkat Kecamatan	19,500,000	20,000,000	19,826,800	99%	99%		Jumlah Kelompol PKK	19	19	Krlompok	19	Krlompok	100%
6	Penyusunan Profil Desa / Kelurahan /Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%		Jumlah Dokumen Profil Desa	19	19	Dokumen	19	Dokumen	100%
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,798,400	99%	99%		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sambang Warga	500	500	Orang	500	Orang	100%
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TRANTIBUM**	**53,800,000**	**68,400,000**	**68,331,250**	100%	100%	**Kec. Polanharjo**	**Cakupan Jumlah Linmas : Jumlah Penduduk**	13.2	13.2	Linmas	13.2	Linmas	**100%**
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	35,400,000	50,000,000	49,958,900	100%	100%		Jumlah Frekwensi Forkopinda Tingkat Kecamatan	12	12	Kali	12	Kali	100%
2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum	12,400,000	12,400,000	12,397,500	100%	100%		Jumlah Frekwensi Pembinaan Linmas Inti dan Desa	36	36	Kali	12	Kali	33%
3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	6,000,000	6,000,000	5,974,850	100%	100%		Jumlah Frekwensi Fasilitasi Trantib	24	24	Kali	12	Kali	50%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN**	**66,200,000**	**68,200,000**	**67,209,000**	99%	99%	**Kec. Polanharjo**	**Prosentase Desa Yang Menyusun RAPBDes Tepat Waktu**	88	88	Desa	50	Desa	**57%**
								Prosentase Kesesuaian Kegiatan APBDes dengan RAPBDes	88	88	Kegiatan	88	Kegiatan	**100%**
								Prosentase Kelembagaan BPD, LPMD, PMK, PKK, Karang Taruna dan Kel Tani di Ds/Kel yang Aktif	84	84	Lembaga	27.77	Lembaga	**33%**
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata pemerintahan	7,200,000	7,200,000	7,163,900	99%	99%		Jumlah Frekwensi Koordinasi Administrasi Tata pemerintahan	24	24	Kali	24	Kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata pemerintahan	7,200,000	7,200,000	7,181,900	100%	100%		Jumlah Frekwensi Pembinaan Administrasi Tata pemerintahan	24	24	Kali	24	Kali	100%
3	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan	7,800,000	7,800,000	7,731,800	99%	99%		Jumlah Frekwensi Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan	24	24	Kali	24	Kali	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan	6,000,000	8,000,000	7,759,600	97%	97%		Jumlah Frekwensi Intensifikasi PBB	24	24	Kali	24	Kali	100%
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	14,725,500	98%	98%		Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba	18	18	Desa	18	Desa	100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	18,000,000	18,000,000	17,871,300	99%	99%		Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	16	16	Desa	15	Desa	94%
7	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	5,000,000	5,000,000	4,775,000	96%	96%		Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan BPD	1	1	Kegiatan	18	Kegiatan	1800%
KEC. DELANGGU														
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**161,500,000**	**168,500,000**	**160,603,449**										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	24,000,000	24,000,000	20,046,460	0.00	0	Kec. Delanggu	Jml. Rek. Yang dibayar kecamatan	3	3	Rek	3	Rek	100
2	Penyediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kend. Dinas / Operasional	15,000,000	15,000,000	14,934,289	99.56	100	Kec. Delanggu	Jml. Kendaraan yang dipelihara kecamatan	6	6	unit	6	unit	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	31,500,000	31,500,000	30,319,240	96.25	96	Kec. Delanggu	Jml. jasa administrasi keuangan kecamatan	3	3	org	3	org	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,000,000	16,000,000	15,482,120	96.76	97	Kec. Delanggu	Jml. THL kebersihan Kantor kecamatan	1	1	org	1	org	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000	10,000,000	9,453,200	94.53	95	Kec. Delanggu	Jml. Tersedianya atk kecamatan	833	833	rim	790	rim	95
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,000,000	7,000,000	6,753,300	96.48	96	Kec. Delanggu	Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan	2	2	rim	2	rim	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	5,000,000	7,000,000	6,700,000	95.71	96	Kec. Delanggu	Jml. Makan minum tamukecamatan	178	178	kali	175	kali	98
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	15,000,000	20,000,000	19,970,600	99.85	100	Kec. Delanggu	Jml rakor & perjalanan dinas luar daerah	1	9	kali	9	kali	100
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100	Kec. Delanggu	Jml rakor & perjalanan dinas dalam daerah	88	88	kali	88	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	28,000,000	28,000,000	26,944,240	96.23	96	Kec. Delanggu	Jml. THL keamanan kantor kecamatan	2	2	org	2	org	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA**	**76,800,000**	**113,246,000**	**111,070,500**										
1	Pengadaan Peralatan gedung kantor	34,800,000	51,800,000	51,500,000	99.42	99	Kec. Delanggu	Jml. Peralatam gudang kantor kecamatan	2	6	bh	6	bh	100
2	Pemel. rutin/berkala gedung kantor	27,000,000	46,446,000	45,001,500	96.89	97	Kec. Delanggu	Jml. Gedung kantor yang dipelihara	2	2	lokasi	2	lokasi	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor	8,000,000	8,000,000	7,720,000	96.50	97	Kec. Delanggu	Jml. Peralatan kantor yang dipelihara	5	5	bh	5	bh	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	7,000,000	7,000,000	6,849,000	97.84	98	Kec. Delanggu	Jml. Peralatan gudang yang diperlihara	5	5	bh	5	bh	100
III	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU**	**1,000,000**	**1,000,000**	**987,000**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000	987,000	98.70	99	Kec. Delanggu	Jml. Dokumen laporan kinerja kecamatan	1	1	bh	1	bh	100
IV	**PROGRAM PENINGKANTAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KEL**	**86,000,000**	**90,000,000**	**88,241,650**										
1	Peningkatan Koordinasi Adm.Pemberdayaan Masy. Desa / Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,923,800	98.48	98	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang terkoordinasi adm PPM	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Adm.Pemberdayaan Masy. Desa / Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,875,000	97.50	98	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang terbina adm PPM	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Adm.Pemberdayaan Masy. Desa / Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,926,000	98.52	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang terfasilitasi adm PPM	16	16	desa	16	desa	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	5,000,000	5,000,000	4,930,500	98.61	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang termonitor bankeu	16	16	desa	16	desa	100
5	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tk. Kecamatan	20,000,000	20,000,000	19,710,100	98.55	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang difalitasi kegiatan 10 program PKK	16	16	desa	16	desa	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kel	1,000,000	-					Jml dokumen pengadaan buku profil desa						
7	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,787,250	97.87	98	Kec. Delanggu	Musyawarah pembangunan tk. kec	1	1	kali	1	kali	100
8	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	40,000,000	39,089,000	97.72	98	Kec. Delanggu	Kegiatan sambang warga	1	1	desa	1	desa	100
V	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TRANTIBUM DI KECAMATAN**	**50,000,000**	**65,000,000**	**63,407,300**										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantibum di Kecamatan	35,000,000	50,000,000	48,924,000	97.85	98	Kec. Delanggu	Jml Desa yang dikoordinasi adm trantibun	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantibum di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,788,000	95.76	96	Kec. Delanggu	Jml Desa yang dibina adm trantibun	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Adm. Trantibum di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,760,000	95.20	95	Kec. Delanggu	Jml Desa yang difasilitasi adm trantibun	16	16	desa	16	desa	100
4	Pengembangan dan Penataan Pedagang kaki lima (PKL)	5,000,000	5,000,000	4,935,300	98.71	99	Kec. Delanggu	Jml penataan PKL di desa	7	7	desa	7	desa	100
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADM. TAPEM DI KECAMATAN**	**54,000,000**	**54,000,000**	**53,255,500**										
1	Peningkatan Koordinasi Adm. Tata Pemerintahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,847,800	96.96	97	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang dikoordinasi adm tata pemerintahan	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Adm. Tata Pemerintahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,939,800	98.80	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang dibina adm tata pemerintahan	16	16	desa	16	desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitasi Adm. Tata Pemerintahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,945,000	98.90	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang difasilitasi adm tata pemerintahan	16	16	desa	16	desa	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,924,800	97.49	97	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang dibina admPBB	16	16	desa	16	desa	100
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	14,932,000	99.55	100	Kec. Delanggu	terselenggaranya lomba tertib adm desa	16	16	desa	16	desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	21,000,000	21,000,000	20,666,100	98.41	98	Kec. Delanggu	Terselenggaranya Pemilihan kepala desa	16	16	desa	16	desa	100
KEC. JUWIRING														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**149,721,568**	**186,488,564**	**147,946,725**			Kec. Juwiring							
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	3,951,000	5,777,000	3,679,100	64%	100	Kec. Juwiring	Jumlah instansi terkait	12	12	instansi	12	instansi	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	30,000,000	33,000,000	26,993,415	82%	100	Kec. Juwiring	Waktu pembayaran rekening	12	12	bulan	12	bulan	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,687,000	2,955,000	2,607,000	88%	90	Kec. Juwiring	Penyediaan peralatan kebersihan	12	12	bulan	12	bulan	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,745,284	26,744,000	25,674,080	96%	100	Kec. Juwiring	Waktu pembayaran THL	12	12	bulan	12	bulan	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,087,000	11,095,000	7,720,050	70%	75	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan ATK	12	12	bulan	12	bulan	100
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,705,000	6,075,000	1,175,400	19%	75	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan barang cetakan	12	12	bulan	12	bulan	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	2,733,000	4,106,000	3,059,000	75%	90	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan instalasi listrik	12	12	bulan	12	bulan	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	4,896,000	10,108,564	1,236,000	12%	75	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan makanan&minuman	12	12	bulan	12	bulan	100
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	15,000,000	31,500,000	31,295,600	99%	100	Kec. Juwiring	Jumlah personil perjalanan dinas luar daerah	2	2	orang	2	orang	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	10,900,000	14,190,000	10,275,000	72%	85	Kec. Juwiring	Jumlah personil perjalanan dinas dalam daerah	10	10	orang	10	orang	100
11	Penyediaan Jasa pengamanan Kantor	41,017,284	40,938,000	34,232,080	84%	100	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor	12	12	bulan	12	bulan	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor**	**40,007,000**	**80,507,000**	**62,900,550**	78%		Kec. Juwiring							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	24,000,000	23,967,000	100%	100	Kec. Juwiring	jenis peralatan kantor tersedia	0	2	jenis	2	jenis	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,153,000	15,153,000	14,823,700	98%	100	Kec. Juwiring	jumlah gedung kantor kondisi baik	2	2	unit	2	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16,254,000	25,254,000	9,009,850	36%	75	Kec. Juwiring	jumlah kendaraan dinas kondisi baik	10	11	unit	11	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8,600,000	8,600,000	7,600,000	88%	75	Kec. Juwiring	jumlah perlengkapan kondisi baik	10	6	unit	6	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	7,500,000	7,500,000	100%	**100**	Kec. Juwiring	jumlah peralatan kondisi baik	0	10	buah	10	buah	100
III	**Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitas Adm Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**121,779,000**	**129,731,000**	**106,371,606**			Kec. Juwiring							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	9,814,000	10,795,000	10,106,650	94%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terkoordinasi	19	19	desa	19	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	10,120,000	11,132,000	6,974,650	63%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terbina	19	19	desa	19	desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	9,599,000	10,558,000	3,660,183	35%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terfasilitasi	19	19	desa	19	desa	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	18,341,000	18,341,000	10,702,198	58%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa penerima bantuan keuangan	19	19	desa	19	desa	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	26,539,000	26,539,000	22,601,100	85%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terbina PKK	19	19	desa	19	desa	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	2,267,000	2,267,000	2,236,900	99%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terfasilitasi penyusunan profil desa	19	19	desa	19	desa	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	40,000,000	39,991,125	100%	100	Kec. Juwiring	jumlah peserta sambang warga	500	500	orang	500	orang	100
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10,099,000	10,099,000	10,098,800	100%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa peserta musrenbangcam	19	19	desa	19	desa	100
IV	**Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**71,998,000**	**77,847,000**	**54,907,200**			Kec. Juwiring							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	33,551,000	39,400,000	34,696,600	88%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terkoordinasi	19	19	desa	19	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	12,023,000	12,023,000	2,265,000	19%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terbina	19	19	desa	19	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	26,424,000	26,424,000	17,945,600	68%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terfasilitasi	19	19	desa	19	desa	100
V	**Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**79,911,000**	**79,911,000**	**66,553,600**	83%		Kec. Juwiring							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	9,107,000	9,107,000	3,282,100	36%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terkoordinasi	19	19	desa	19	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	11,825,000	11,825,000	10,835,000	92%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terbina	19	19	desa	19	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	9,022,000	9,022,000	6,900,000	76%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terfasilitasi	19	19	desa	19	desa	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	9,533,000	9,533,000	7,056,000	74%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa dengan PBB sesuai target	19	19	desa	19	desa	100
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	15,424,000	15,424,000	15,424,000	100%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa peserta lomba tertib administrasi desa	19	19	desa	19	desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	25,000,000	25,000,000	23,056,500	92%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa penyelenggara pilkades	16	16	desa	16	desa	100
	KEC WONOSARI													
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**156,742,000**	**202,042,000**	**179,731,449**										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7,000,000	7,000,000	6,829,000	97.6	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Surat masuk dan keluar	750	750	lembar	777	lembar	104%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30,740,000	45,740,000	26,995,249	59.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Rekening	3	3	Rekening	3	Rekening	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6,858,000	6,858,000	6,667,800	97.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tenaga Adm Keuangan	2	2	orang	2	orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30,286,000	30,286,000	28,844,740	95.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	2	2	orang	2	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Penyediaan alat tulis kantor	6,252,000	7,252,000	6,673,000	92.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah / Jenis ATK	30	30	Jenis	30	Jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,000,000	7,500,000	7,498,800	100.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah/ Jenis Cetak dan Penggandaan	10	10	Jenis	10	Jenis	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	3,600,000	6,400,000	6,387,500	99.8	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Rapat	120	120	kegiatan	120	kegiatan	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,000,000	25,000,000	24,998,000	100.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah perjalanan luar daerah	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	25,000,000	24,975,000	99.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah perjalanan dalam daerah	300	300	kegiatan	300	kegiatan	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	27,246,000	27,246,000	26,609,740	97.7	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	2	2	orang	2	orang	100
11	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,760,000	13,760,000	13,252,620	96.3	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tenaga administrasi/teknis perkantoran	1	1	orang	1	orang	100
12												-		
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**42,615,000**	**252,965,000**	**244,164,594**										
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	15,000,000	13,700,000	91.3	100.0	Kec. Wonosari	Julah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	3	unit	3	unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	26,550,000	26,050,000	98.1	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor	0	3	unit	3	unit	100
3	Pengadaan mebeleur	-	38,800,000	38,053,000	98.1	100.0	Kec. Wonosari	jumlah Pengadaan mebeleur	0	6	unit	6	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,201,000	15,201,000	15,129,500	99.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah unit Gedung kantor yang terpelihara	3	3	unit	3	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12,664,000	12,664,000	9,681,000	76.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5	5	unit	5	unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,500,000	3,500,000	3,270,000	93.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	7	7	unit	7	unit	100
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11,250,000	11,250,000	9,775,000	86.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Peralatan Gedung / kantor terpelihara	8	8	unit	8	unit	100
8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	90,000,000	89,514,994	99.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Gedung / Kantor Yang terehab	0	1	unit	1	unit	100
9	Penataan Lingkungan Kantor	-	40,000,000	38,991,100	97.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Taman terbangun	0	1	unit	1	unit	100
												-		
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3,592,000**	**3,592,000**	**3,473,600**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,592,000	3,592,000	3,473,600	96.7	100.0	`	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	1	1	dokumen	1	dokumen	100
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**131,077,000**	**159,878,000**	**151,621,800**										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,211,000	25,337,000	22,394,500	88.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	6,163,000	9,613,000	8,500,000	88.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	14,843,000	16,068,000	13,479,000	83.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	10,777,000	10,777,000	10,699,000	99.3	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	18	18	desa	18	desa	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	46,696,000	46,696,000	46,328,900	99.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi	18	18	kelompok	18	kelompok	100
6	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	11,397,000	11,397,000	10,986,000	96.4	100.0	Kec. Wonosari	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD	10	10	%	10	%	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	34,990,000	39,990,000	39,234,400	98.1	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Peserta Yang mengikuti sambang warga	500	500	orang	500	orang	100
												0		
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**60,204,000**	**85,732,000**	**68,929,400**										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	33,086,000	50,000,000	38,186,400	76.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	6,355,000	10,645,000	10,000,000	93.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Pembinaan Trantibum	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	20,763,000	25,087,000	20,743,000	82.7	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Trantibum	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
												0		
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**93,492,000**	**94,103,000**	**87,604,000**										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	6,137,000	6,137,000	5,878,000	95.8	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	11,642,000	11,642,000	11,584,500	99.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	15,569,000	21,069,000	17,394,000	82.6	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	8,829,000	8,829,000	7,497,000	84.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Desa Lunas PBB	18	18	desa	18	desa	100
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	16,852,000	16,852,000	16,822,000	99.8	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah desa terfasilitasi lomba	18	18	desa	18	desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	23,070,000	29,574,000	28,428,500	96.1	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah desa terfasilitasi Pilkades	15	15	desa	15	desa	100
7	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	11,393,000	-	-	0	0	Kec. Wonosari	Jumlah Perangkat Desa yang terisi	10	10	orang	0	oresa	0
KEC. CEPER														
I	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**144,300,000**	**180,300,000**	**175,581,034**										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	5,000,000	4,935,000.00	0.99	99	Kec Ceper	jumlah surat terkirim	800	800	surat	622	surat	78
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	22,500,000	22,500,000	20,435,704.00	0.91	95	Kec Ceper	jumlah rekening jasa yang terbayar	3	3	rekening	3	rekening	100
3	Penyediaan administrasi keuangan	13,500,000	13,500,000	13,499,120.00	1.00	90	Kec Ceper	jumlah tenaga administrasi keuangan	1	1	orang	1	orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,500,000	13,500,000	13,499,120.00	1.00	90	Kec Ceper	jumlah petugas jasa kebersihan kantor	1	1	orang	1	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Penyediaan alat tulis kantor	14,000,000	14,000,000	14,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	Jenis ATK yg diperlukan	20	20	jenis	17	jenis	85
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah penggandaan dokumen	20000	20000	lembar	15000	lembar	75
7	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah komponen listrik yg tersedia	5	5	jenis	5	jenis	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	14,000,000	25,000,000	22,535,000.00	0.90	90	Kec Ceper	jumlah rapat2 koordinasi	12	12	kali	9	kali	75
10	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	15,000,000	30,000,000	29,877,850.00	1.00	100	Luar Kab Klaten	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi luar daerah	5	12	kali	4	kali	33
11	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	25,000,000	25,000,000.00	1.00	99	Kab Klaten	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi dalam daerah	50	50	OP	38	OP	76
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	26,800,000	26,800,000	26,799,240.00	1.00	99	Kec Ceper	jumlah petugas jasa pengaman kantor	2	2	orang	2	orang	100
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**53,800,000**	**102,800,000**	**100,158,790.00**										
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	21,000,000	20,300,000.00	0.97	97	Kec Ceper	jml dan jenis peralatan gd kantor	4	4	unit	3	unit	75
2	Pengadaan mebeleur	-	25,000,000	25,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jml dan jenis mebeleur	4	4	unit	4	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	7,500,000	15,000,000	14,926,600.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah rumah jabatan yg dirawat	1	1	unit	1	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	10,000,000	15,500,000	15,469,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah gedung kantor yang dirawat	1	1	unit	1	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	10,000,000	15,000,000	13,163,190.00	0.88	80	Kec Ceper	jumlah kendaraan dinas yang dirawat	7	7	unit	6	unit	86
6	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah meja mebeleur yang dipelihara	20	20	unit	18	unit	90
7	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga	9,300,000	9,300,000	9,300,000.00	1.00	85	Kec Ceper	jml peralatan kantor yg dipelihara	7	7	unit	6	unit	86
III	**Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masayarakat desa/kel di kecamatan**	**104,000,000.00**	**109,000,000.00**	**107,337,800.00**										
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	12,000,000	12,000,000	11,975,000.00	1.00	99	Kec Ceper	jumlah pelaksanaan musrenbangkec	1	1	Kali	1	Kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,976,000.00	1.00	95	Kec Ceper	jml desa yg dibina administrasi PMD	18	18	Desa	18	Desa	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah pengendalian/pembinaaan ADD, DD	18		Desa	18	Desa	#DIV/0!
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	12,000,000	12,000,000	11,990,000.00	1.00	99	Kec Ceper	jumlah desa yg menerima bantuan keuangan	18	18	Desa	18	Desa	100
5	Fasilitasi 10 program pokok PKK tk kecamatan	20,000,000	25,000,000	24,925,000.00	1.00	89	Kec Ceper	frekwensi pembinaan PKK Desa	12	12	Kali	12	Kali	100
6	Penyusunan profil desa/kel	5,000,000	5,000,000	4,972,000.00	0.99	80	Kec Ceper	dokumen profil kecamatan	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
7	Penyelenggaraan sambang warga	35,000,000	35,000,000	33,499,800.00	0.96	96	Kec Ceper	jumlah kegiatan sambang warga	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	**Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**57,500,000**	**67,500,000.00**	**67,129,759.00**										
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	40,000,000	40,000,000	39,948,860.00	1.00	88	Kec Ceper	jumlah pelaksanaan patroli terpadu	12	12	Kali	12	Kali	100
2	Peningkatanpembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	7,500,000	17,500,000	17,302,000.00	0.99	92	Kec Ceper	jumlah pemantauan dan pembinaan trantibum	18	18	Desa	18		100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,878,899.00	0.99	90	Kec Ceper	jumlah penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa	18	18	Desa	18	Desa	100
V	**Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan di kecamatan**	**60,000,000**	**60,000,000**	**59,761,000.00**										
1	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,950,000.00	1.00	95	Kec Ceper	jumlah keg koordinasi Muspika, Kades, dan lembaga lainnya	18	18	Kali	18	Kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan di kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,500,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan	18	18	Desa	18	Desa	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,480,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah penyelesaian tindak lanjut permasalahan administrasi pemerintah	18	18	Kali	18	Kali	100
4	Intensifikasi PBB tk kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,987,000.00	1.00	99	Kec Ceper	jumlah koordinasi penagihan PBB	18	18	Kali	18	Kali	100
5	Fasilitasi/koordinasi pemilihan kepala desa	25,000,000	25,000,000	24,844,000.00	0.99	99	Kec Ceper	jumlah kepala desa terpilih	14	14	Orang	14	Orang	100
KEC. PEDAN														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**186,500,000**	**191,500,000**	**175,223,945**	**91.50**	**91.50**	Kecamatan Pedan							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	22,500,000	22,500,000	20,724,360	92.11	92.11	Kecamatan Pedan	Jumlah tenaga administrasi	1	1	Orang / kegiatan	1	Orang / kegiatan	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,000,000	24,000,000	13,505,198	56.27	56.27	Kecamatan Pedan	kurun waktu pembayaran rekening	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40,000,000	40,000,000	38,574,240	96.44	96.44	Kecamatan Pedan	jumlah jasa petugas kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan kantor petugas kebersihan	2	2	orang	2	orang	100%
4	Penyediaan alat tulis kantor	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah alat tulis kantor terpenuhi	11	11	Unit	11	Unit	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	400	400	Lembar	400	Lembar	100%
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000	5,000,000	4,994,400	99.89	99.89	Kecamatan Pedan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	Unit	1	Unit	100%
7	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah kebutuhan makan minum rapat dan tamu	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,000,000	20,000,000	19,946,267	99.73	99.73	Kecamatan Pedan	jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2	2	kali	2	kali	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30	30	Kali	30	Kali	100%
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	40,000,000	40,000,000	37,479,480	93.70	93.70	Kecamatan Pedan	jumlah jasa petugas pengamanan kantor dan pembelian peralatan pengamanan kantor kecamatan pedan	2	2	orang	2	orang	100%
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**35,000,000**	**57,000,000**	**56,450,000**	**99.04**	**99.04**	Kecamatan Pedan							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	12,000,000	11,500,000	95.83	95.83	Kecamatan Pedan	Jumlah jenis peralatan kantor	0	1	Unit laptop	1	Unit laptop	100%
2	Pengadaan mebeleur	0	10,000,000	9,950,000	99.50	99.50	Kecamatan Pedan	jumlah pengadaan mebeler	0	10	Buah meja Rapat	10	Buah meja Rapat	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah belanja pemeliharaan rutin /berkala gedung	2	2	tempat	2	tempat	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9	9	Unit	9	Unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemeliharaan rutin / perlengkapan berkala	2	2	Jenis	2	Jenis	100%
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan	5	5	jenis	5	jenis	100%
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeler	2	2	Jenis	2	Jenis	100%
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**100.00**	**100.00**	Kecamatan Pedan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jjumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	dokumen	1	dokumen	100%
III	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**69,000,000**	**79,000,000**	**78,500,000**	**99.37**	**99.37**	Kecamatan Pedan							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah koordinasi administrasi masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pembinaan administrasi masyarakat desa / di kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	5,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah fasilitasi administrasi masyarakat desa / kelurahan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	4,000,000	4,000,000	3,500,000	87.50	87.50	Kecamatan Pedan	jumlah operasional penyampaian bantuan keuangan	1	1	desa	1	desa	100%
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah fasilitas 10 program PKK Tk.kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
6	Penyelenggaraan Sambang Warga	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah belanja kegiatan sambang warga	500	300	Orang	300	Orang	100%
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah penyelenggaraan musrembang tingkat kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**45,000,000**	**60,000,000**	**59,991,500**	**99.99**	**99.99**	Kecamatan Pedan							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	35,000,000	50,000,000	49,991,500	99.98	99.98	Kecamatan Pedan	jumlah koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**45,000,000**	**63,000,000**	**62,999,000**	**100.00**	**100.00**	Kecamatan Pedan							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah intensifikasi PBB Tk.kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah lomba tertib administrasi desa	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	17,000,000	35,000,000	34,999,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemilihan kepala desa	12	12	desa	12	desa	100%

KEC. KARANGDOWO

I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**139,192,000.00**	**164,192,000.00**	**154,447,371.00**	**94.06**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6,809,000.00	6,809,000.00	6,808,100.00	99.98	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Surat Yang Terkirim	500	500	Surat	500	Surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18,233,000.00	18,233,000.00	13,926,171.00	76.37	90	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	2	2	Rekening	2	Rekening	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41,636,000.00	41,636,000.00	39,517,360.00	94.91	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Tenaga Kebersihan	3	3	Orang	3	Orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	6,885,000.00	6,885,000.00	6,834,500.00	99.26	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	18	18	Jenis	18	Jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,376,000.00	5,376,000.00	5,233,000.00	97.34	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak Dan Penggandaan	28000	28000	Lembar	28000	Lembar	100%
7	Penyediaan makanan dan minuman	7,800,000.00	17,800,000.00	16,104,000.00	90.47	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Makan Dan Minum Saat Rapat Koordinasi	15	15	Paket	15	Paket	100%
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	12	Kali	12	Kali	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutihan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Daerah Daerah	12	12	kali	12	kali	100%
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	27,453,000.00	27,453,000.00	26,024,240.00	94.79	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Tenaga Untuk Jasa Keamanan Kantor	2	2	Orang	2	Orang	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**63,933,000.00**	**63,933,000.00**	**55,649,338.00**	**87.04**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6,875,000.00	6,875,000.00	5,629,000.00	81.87	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pengandaan Perlengkapan Kantor	2	2	Unit	2	Unit	100%
2	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	19,000,000.00	19,000,000.00	18,522,500.00	97.48	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pengadaan Laptop	3	3	Unit	3	Unit	100%
3	Pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas	4,480,000.00	4,480,000.00	4,338,500.00	96.84	100	Kecamatan Karangdowo	Jenis Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	5	5	Unit	5	Unit	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13,621,000.00	13,621,000.00	9,084,700.00	94.42	100	Kecamatan Karangdowo	Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	9	9	Unit	9	Unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12,161,000.00	12,161,000.00	6,820,638.00	56.08	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6	6	Unit	6	Unit	100%
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,001,000.00	3,001,000.00	2,820,000.00	93.96	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pembelian Alat Atau Bahan Bangunan Dan Upah Tukang	8	8	Unit	8	Unit	100%
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,675,000.00	2,675,000.00	6,379,000.00	95.56	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peralatan Yang Dipelihara Perbaikan (Komputer, Printer Dan Monitor)	3	3	Unit	3	Unit	100%
8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,120,000.00	2,120,000.00	2,055,000.00	96.93	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Mebeleur (Meja, Kursi Dan Almari)	3	3	Unit	3	Unit	100%
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**2,911,000.00**	**97.03**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	2,911,000.00	97.03	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Realisasi Dokumen Selama 1 Tahun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
IV	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**105,000,000.00**	**115,000,000.00**	**106,763,700.00**	**92.83**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	4,950,000.00	99.00	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Koordinasi Aministrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan di Kecamatan	19	19	Kali	19	Kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	5,000,000.00	10,000,000.00	9,699,000.00	96.99	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	19	19	Kali	19	Kali	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	5,000,000.00	10,000,000.00	9,140,000.00	91.40	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	19	19	Kali	19	Kali	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	15,000,000.00	15,000,000.00	11,060,200.00	73.73	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Penunjang Oprasional Penyampaian Bantuan Keuangann	19	19	Desa	19	Desa	100%
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000.00	25,000,000.00	24,755,500.00	99.02	100	Kecamatan Karangdowo	Terwujutnya kegiatan 10 program pkk Tingkat Kecamatan	12	12	Kali	12	Kali	100%
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	5,000,000.00	5,000,000.00	4,931,500.00	98.63	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Profil Desa/Kelurahan	20	20	Dokumen	20	Dokumen	100%
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000.00	35,000,000.00	9,885,500.00	98.86	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Penyelenggaraan sambang warga	1	1	Kali	1	Kali	100%
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10,000,000.00	10,000,000.00	32,342,000.00	92.41	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**42,000,000.00**	**58,000,000.00**	**57,979,100.00**	99.96	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	34,000,000.00	50,000,000.00	49,993,400.00	99.99	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19	19	Kali	19	Kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	3,000,000.00	3,000,000.00	2,986,500.00	99.55	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,200.00	99.98	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
VI	**Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**59,625,000.00**	**65,625,000.00**	**65,051,150.00**	**99.12**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,700,000.00	5,700,000.00	5,695,000.00	99.91	101	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000.00	4,000,000.00	3,989,750.00	99.74	102	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamata	19	19	Desa	19	Desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000.00	4,000,000.00	3,997,000.00	99.93	103	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	10,650,000.00	10,650,000.00	10,395,000.00	97.61	104	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	10,275,000.00	10,275,000.00	10,231,500.00	99.58	105	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Fasilitasi lomba Tertib Administrasi Desa	1	1	Kali	1	Kali	100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	25,000,000.00	31,000,000.00	30,742,900.00	99.17	106	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	17	17	Desa	17	Desa	100%

KEC. CAWAS														
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**149,562,000**	**173,062,000**	**162,088,917**	94	100	Kecamatan Cawas	**Prosentase Pelayanan Administrasi Kantor yang baik**						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,150,000	3,150,000	3,134,900	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah surat masuk dan keluar	2600	2600	surat	2600	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26,492,000	26,492,000	17,796,584	67	100	Kecamatan Cawas	jumlah Rekening Jasa Listrik, Telpon, Internet, air, koran	5	5	rekening	5	rekening	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25,946,000	25,946,000	25,889,544	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Tenaga Administrasi keuangan	2	2	orang	2	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16,856,000	16,856,000	15,422,175	91	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan Kantor	1	1	orang	1	orang	100%
5	penyediaan alat tulis kantor	7,500,000	7,500,000	7,154,950	95	100	Kecamatan Cawas	Jumlahitem ATK yang tersedia	28	28	jenis	28	jenis	100%
6	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2,350,000	2,350,000	2,295,000	98	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Barang Cetakan	3	3	jenis	3	jenis	100%
								Jumlah penggandaan	7000	7000	lembar	7000	lembar	100%
								jumlah penjilidan	21	21	buah	21	buah	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,875,000	3,875,000	3,856,750	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah komponen listrik yang terbeli	6	6	jenis	12	jenis	200%
8	Penyediaan makanan dan minuman	7,125,000	7,125,000	7,115,500	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah frekuensi Rapat dalam 1 tahun	12	12	kali	12	bulan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000	22,500,000	22,337,970	99	100	Kecamatan Cawas	jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	12	12	bulan	12	bulan	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	31,000,000	30,975,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	12	12	bulan	12	bulan	100%
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	26,268,000	26,268,000	26,110,544	99	100	Kecamatan Cawas	Jumlah tenaga Pengamanan kantor	2	2	orang	2	2	100%
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**25,822,000**	**167,322,000**	**159,886,300**	96	100	Kecamatan Cawas	**Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**						
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	40,000,000	38,158,500	95	100	Kecamatan Cawas	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (1 unit TV LED, 2 unit AC, 1 unit kipas angin, Kipas angin besar 4 buah, 1 buah printer, 2 buah laptop, I unit PC Komputer)	0	12	unit	12	unit	100%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000	15,000,000	14,987,800	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	3	3	unit	3	unit	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8,372,000	8,372,000	5,881,000	70	100	Kecamatan Cawas	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	9	9	unit	9	unit	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,450,000	2,450,000	2,350,000	96	100	Kecamatan Cawas	Jumlah item perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	1	unit	1	unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	1,500,000	1,500,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah item peralatan gedung kantor yang terpelihara	4	4	unit	4	keg	100%
6	Penataan Lingkungan Kantor	-	100,000,000	97,009,000	97	100	Kecamatan Cawas	Jumlah penataan lingkunagan kantor (pavingisasi, Pembuatan Sumur resapan,pengadaan Pot dan Bunga)	1	1	keg	1	keg	100%
III	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN**	**131,000,000**	**131,000,000**	**130,365,800**	100	100	Kecamatan Cawas	**Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan**			desa		desa	#DIV/0!
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdaayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,979,900	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah koordinasi administrasi PMD	20	20	desa	20	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,970,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah pembinaan administrasi PMD	20	20	desa	20	desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	12,500,000	12,500,000	12,464,900	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang difasilitasi administrasi PMD	20	20	desa	20	desa	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	20,000,000	20,000,000	19,969,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah penyampaian bantuan keuangan	20	20	desa	20	desa	100%
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	30,000,000	30,000,000	29,989,500	100	100	Kecamatan Cawas	Fasilitasi 10 program pokok PKK	20	20	desa	20	desa	100%
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	7,000,000	7,000,000	6,959,100	99	100	Kecamatan Cawas	Pembuatan profil desa	20	20	kegiatan	20	1	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	12,500,000	12,500,000	12,444,800	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecmatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
8	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,588,600	99	100	Kecamatan Cawas	Jumlah kunjungan sambang warga (Desa Gombang)	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN**	**45,000,000**	**45,000,000**	**44,645,300**	99	100	Kecamatan Cawas							#DIV/0!
	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	31,000,000	31,000,000	30,710,500	99	100	Kecamatan Cawas	Jumlah desa yg dikoordinasi Administrasi Trantib	20	20	desa	20	desa	100%
	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,954,800	99	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang dibina administrasi Trantib	20	20	desa	20	desa	100%
	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,980,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang diFasilitasi administrasi Trantib	20	20	desa	20	desa	100%
V	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN**	**68,000,000**	**73,000,000**	**70,103,400**		100	Kecamatan Cawas	**Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan**						#DIV/0!
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemeritahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,916,000		100	Kecamatan Cawas	Koordinasi Administrasi Tapem	20	20	desa	20	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemeritahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,998,000		100	Kecamatan Cawas	pembinaan Administrasi Tapem	20	20	desa	20	desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,916,000		100	Kecamatan Cawas	Fasilitasi Tapem administrasi Tapem	20	20	desa	20	desa	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	12,000,000	12,000,000	11,999,800		100	Kecamatan Cawas	jumlah desa/kelurahan yang ditargetkan lunas PBB	20	20	desa	20	desa	100%
5	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	25,000,000	40,000,000	37,273,600		100	Kecamatan Cawas	jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa (Japanan, Baran , Mlese)	13	13	desa	13	desa	100%
6	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	10,000,000	-	-		100	Kecamatan Cawas	jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa			desa		desa	
	KEC. TRUCUK													
I	**PROG. PELAYANAN ADMS. PERKANTORAN**	**175,700,000**	**220,700,000**	**214,277,803**										
1	Penyd. Jasa Surat Menyurat	4,000,000	4,000,000	3,997,200	99.9	100	Kec. Trucuk	Jumlah surat terkirim	1025 surat	165	surat	165	surat	100
2	Penyd. Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik	21,000,000	21,000,000	17,129,073	81.6	100	Kec. Trucuk	Jumlah jenis rekening terbayar	2 rekening	3	rekening	3	rekening	100
3	Pernyd. Jasa Kebersihan kantor	17,000,000	17,000,000	16,492,670	97.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah THL kebersihan kantor	1 orang	1	orang	1	orang	100
4	Penyd. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0	100	Kec. Trucuk	jumlah perbaikan peralatan kerja	10 kali	1	kali	1	kali	100
5	Penyd. Alat Tulis Kantor	4,000,000	4,950,000	4,950,000	100.0	100	Kec. Trucuk	jumlah jenis ATK tersedia	7 jenis	35	jenis	35	jenis	100
6	Penyd. Barang cetakan dan penggandaan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	2 jenis	2	jenis	2	jenis	100
7	Penyd. Kompnn Istlsi listrik/penrngan bangunan kantor.	2,500,000	2,500,000	2,496,460	99.9	100	Kec. Trucuk	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	3 jenis	8	jenis	8	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
8	Penyd. Peralatan rumah tangga	5,000,000	4,050,000	4,048,850	100.0	100	Kec. Trucuk	jumlah peralatan rumah tangga tersedia	6 jenis	1	buah	1	buah	100
9	Penyd. Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	3 jenis	3	buah	3	buah	100
10	Penyd. Makanan dan minuman	12,000,000	17,000,000	17,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah makanan dan minuman tersedia	14 kali	8	pakt	8	pakt	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20,000,000	40,000,000	39,999,270	100.0	100	Jawa&Luar Jawa	jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	10 kali	10	kali	10	kali	100
12	Penyd. Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	20,000,000	40,000,000	40,000,000	100.0	100	Desa/Kec/Kab	jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	40 kali	135	kali	135	kali	100
13	Penyd. Jasa Pengamanan Kantor	28,500,000	28,500,000	27,477,540	96.4	100	Kec. Trucuk	Jumlah THL Pengamanan Kantor	2 orang	2	orang	2	orang	100
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran.	27,200,000	27,200,000	26,186,740	96.3	100	Kec. Trucuk	Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor	2 orang	2	orang	2	orang	100
II	**PROG PENINGKATAN SARANA & PRASARANA**	**62,800,000**	**92,800,000**	**79,143,600**										
1	Pengadaan Mebeluer	17,500,000	35,000,000	34,650,000	99.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah mebeleur terbeli	2 jenis	1	unit	1	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	8,000,000	8,000,000	7,968,000	99.6	100	Kec. Trucuk	Jumlah rumah dinas terpelihara	1 unit	1	unit	1	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	8,800,000	8,800,000	8,776,500	99.7	100	Kec. Trucuk	Jumlah Peralatan Gedung kantor terpelihara	2 jenis	1	unit	1	unit	100
4	Pemeliharaan rutin / berkala kend. Dinas / operasional	18,500,000	26,000,000	12,749,100	49.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	2 unit	8	unit	8	unit	100
5	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	15,000,000	15,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah peralatan Gedung Kantor terpelihara	10 jenis	2	unit	2	unit	100
III	**PROG. PENINGKATAN KORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / KELURAHAN.**	**97,650,000**	**97,650,000**	**97,596,000**										
1	Peningktan kords, adms Pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan di Kecamatan.	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD	18 desa	2	kali	2	kali	100
2	Peningktan Pembinaan, adms pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.	5,500,000	5,500,000	5,475,000	99.5	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD	18 desa	2	kali	2	kali	100
3	Peningkatan Fasltasi, adms Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.	9,150,000	9,150,000	9,149,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Fasilitasi PMD	18 desa	2	kali	2	kali	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	12,500,000	12,500,000	12,499,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	18 desa	18	desa	18	desa	100
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,974,000	99.9	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi	18 PKK	18	desa	18	desa	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	5,000,000	5,000,000	4,999,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Dokumen Profil tersusun	18 desa	18	desa	18	desa	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga.	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Peserta yang mengikuti sambang warga	18 desa	1	kegiatan	1	kegiatan	100
IV	**PROG. PENINGKATAN KORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM.**	**50,400,000**	**65,400,000**	**62,892,000**										
1	Peningktan kords, adms. Ketentraman dan Ketertiban Umum	35,000,000	50,000,000	47,494,000	95.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum	18 desa	2	kali	2	kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan Pembinaan Adm. Ketenrman dan Ketertiban Umum	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Pembinaan Trantibum	18 desa	2	kali	2	kali	100
3	Peningkatan Fasiltasi Adms. Ketentraman dan Ketertiban Umum	9,900,000	9,900,000	9,898,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Trantibum	18 desa	2	kali	2	kali	100
V	**PROG. PENINGKATAN KORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN.**	**61,500,000**	**61,500,000**	**61,481,944**										
1	Peningktan Kords. Adms Tata Pemerintahan.	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem	18 desa	2	kali	2	kali	100
2	Peningktan Pembinaan. Adms Tata Pemerintahan.	4,000,000	4,000,000	3,999,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem	18 desa	2	kali	2	kali	100
3	Peningktan Fasilitasi. Adms Tata Pemerintahan.	6,500,000	6,500,000	6,490,700	99.9	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem	18 desa	2	kali	2	kali	100
4	Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah desa terfasilitasi lomba	18 desa	18	desa	18	desa	100
5	Fasilitasi Lomba Tertib Adm. Desa	15,000,000	15,000,000	14,992,600	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Desa Lunas PBB	18 desa	18	desa	18	desa	100
6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	20,000,000	20,000,000	19,999,644	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kepala Desa yang terisi	18 desa	15	desa	15	desa	100
	KEC. BAYAT													
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	***157,950,000***	***197,950,000***	***158,311,238***				***Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran***	***100***	***81%***	***%***	100	%	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	4,751,000	95	100	Kec. Bayat	Jumlah surat terkirim	750	750	surat	912	surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,000,000	21,000,000	12,717,738	61	100	Kec. Bayat	Jumlah jenis rekening terbayar	4	4	rekening	4	rekening	100
3	Penyedian Jasa Administrasi Keuangan	27,000,000	27,000,000	26,034,740	96	100	Kec. Bayat	Jumlah THL Adminitrasi Keuangaan	2	2	orang	2	orang	100
4	Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	16,000,000	16,000,000	15,122,620	95	100	Kec. Bayat	Jumlah THL Kebersihan Kantor	1	1	orang	1	orang	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5,000,000	5,000,000	4,254,300	85	100	Kec. Bayat	Jumlah jenis ATK tersedia	15	15	jenis	15	jenis	100
6	Pemyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,250,000	3,250,000	2,651,000	82	100	Kec. Bayat	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	5000	5	lembar	5	jenis	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,700,000	2,700,000	2,151,500	80	100	Kec. Bayat	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan lingkungan	9	9	jenis	9	jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	10,500,000	25,500,000	15,466,000	61	100	Kec. Bayat	Jumlah makanan dan minuman tersedia	12	2	bulan	2	paket	100
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15,000,000	25,000,000	23,563,100	94	100	Luar Kab. Klaten	Jumlah Frekuensi perjalanan luar daerah	7	10	kali	9	kali	100
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	25,000,000	40,000,000	25,325,000	63	100	Kab. Klaten	Jumlah Frekuensi perjalanan dalam daerah	100	300	kali	225	kali	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	27,500,000	27,500,000	26,274,240	96	100	Kec. Bayat	Jumlah THL pengamanan kantor	2	2	orang	2	orang	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	***34,000,000***	***94,000,000***	***84,270,000***				***Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik***	***100***	***100***	***%***	*100*	***%***	100
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4,000,000	29,000,000	27,150,000	94	100	Kec. Bayat	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli	3	8	unit	3	unit	100
2	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	7,000,000	7,000,000	4,699,000	67	100	Kec. Bayat	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11,000,000	11,000,000	7,432,000	68	100	Kec. Bayat	Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara	9	9	kendaraan	9	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7,000,000	7,000,000	6,400,000	91	100	Kec. Bayat	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	3	15	unit	5	unit	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	5,000,000	5,000,000	4,000,000	80	100	Kec. Bayat	Jumlah meubeler terpelihara	32	50	buah	49	unit	100
6	Penataan Lingkungan Kantor	-	35,000,000	34,589,000	99	100	Kec. Bayat	Jumlah lingkungan kantor tertata	0	2	0	2	paket	100
III	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	***1,550,000***	***1,550,000***	***1,098,700***				***Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan***	***100***	100	***%***	*100*	***%***	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,550,000	1,550,000	1,098,700	71	100	Kab. Klaten	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	12	dokumen	10	dokumen	100
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN**	***96,500,000***	***96,500,000***	***85,003,900***				***Prosentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu***	67	67	%	100		
								Prosentase pengumpulan LPJ Dana Desa yang tepat waktu	87	87	%	100		
								Prosentase pengumpulan LPJ Banuan Keuangan /hibah yang tepat waktu	90	90	%	100		
								Prosentase desa/kelurahan yang melaksanaka musrenbang	100	100	%	100		
								Prosentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD	90	90	%	100		
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,586,600	96	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD	8	8	kali	8	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	8,000,000	8,000,000	6,528,200	82	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD	6	6	kali	6	kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,447,100	92	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi PMD	6	6	kali	6	kali	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	7,000,000	7,000,000	5,132,500	73	100	Kec. Bayat	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	18	18	desa	18	desa	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	20,249,000	81	100	Kec. Bayat	Jumlah kelompok PKK terfasilitasi	12	12	kali	12	kali	100
6	Penyusunan Profil Desa/Keluarahan	4,500,000	4,500,000	2,974,500	66	100	Kec. Bayat	Jumlah dokumen profil tersusun	1	1	dokumen	1	dokumen	100
7	Penyelenggaraan Sambung Warga	35,000,000	35,000,000	34,086,000	97	100	Ds. Banyuripan	Jumlah kunjungan sambang warga	1	1	kali kunjungan	1	kali kunjungan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN**	***50,000,000***	***60,000,000***	***46,975,600***				***Cakupan petugas perlindungan masyarakat***	***56***	56	%	100	%	100
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	36,000,000	46,000,000	36,620,600	80	100	Kec.Bayat	Jumlah kegiatan koordinasi Trantibum	18	18	kali	18	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	7,000,000	7,000,000	5,791,600	83	100	Kec.Bayat	Jumlah kegiatan Pembinaan trantibum	10	10	kali	10	kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	7,000,000	7,000,000	4,563,400	65	100	Kec.Bayat	Jumlah kegiatan fasilitasi trantibum	10	10	kali	10	kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN**	***49,000,000***	***49,000,000***	***36,320,300***				***Prosentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu***	70	70	%	100	%	100
								Prosentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	95	95	%	100		
								Prosentase kelembagaan (BPD, LPMD/LPKM,PKK, Karang taruna, dan kelompok tani didesa/kelurahan yang aktif	100	100	%	100		
1	Peningkatan Koordinasi Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan	8,000,000	8,000,000	6,198,000	77	100	Kec. Bayat	Jumlah kegiatan koordinasi Tapem	8	8	kali	8	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan	8,000,000	8,000,000	4,700,000	59	100	Kec. Bayat	Jumlah kegiatan pembinaan Tapem	10	10	kali	10	kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan	8,000,000	8,000,000	5,972,600	75	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem	8	8	kali	8	kali	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,996,200	100	100	Kec. Bayat	Jumlah Desa di kecamatan bayat yang membayar PBB	18	18	desa	18	desa	100
5	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	17,000,000	17,000,000	16,453,500	97	100	Kec. Bayat	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	18	18	desa	18	desa	100
6	Koordinasi Pengisihan Perangkat Desa	5,000,000	5,000,000		-		Kec. Bayat	Jumlah Perangkat desa yang terisi	8	8	0rang	0	orang	
	JUMLAH		**80,545,338,518**	**69,895,457,765**	**86.8%**									

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : PENGAWASAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : INSPEKTORAT KABUPATEN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
INSPEKTORAT KABUPATEN														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**466,556,700**	**634,062,700**	**534,836,392**	**84**	**100**		**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**	60%	**40**	**%**	**40**	**%**	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4,150,000	5,000,000	3,418,800	68	100	Inspektorat Kab	Jumlah surat terselesaikan	1200 lembar	1200	surat	1200	surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84,000,000	64,000,000	40,636,571	63	100	Inspektorat Kab	Jumlah tagihan rekening air, listrik, telp, internet	12 bulan	4	rekening	6	tagihan	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40,360,300	50,000,000	45,488,803	91	100	Inspektorat Kab	Jumlah lokasi jasa kebersihan dan jumlah tenaga kontrak	2 orang	2	orang	2	lokasi	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	50,040,100	75,000,000	71,684,600	96	100	Inspektorat Kab	Jumlah ATK tersedia	1 paket	75	item	40	item	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,425,000	45,000,000	42,591,425	95	100	Inspektorat Kab	Jumlah dokumen tergandakan	1 paket	45,800	lembar	45,800	lembar	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,026,600	5,000,000	2,149,600	43	100	Inspektorat Kab	Jumlah unit peralatan listrik tersedia	1 paket	5	item	16	item	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	7,640,000	7,398,700	97	100	Inspektorat Kab	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12	bulan	12	eksemplar	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	58,532,000	70,000,000	58,492,400	84	100	Inspektorat Kab	Jumlah makanan minuman tersedia	60 kegiatan	60	paket	60	kegiatan	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,000,000	200,000,000	153,553,461	77	100	Inspektorat Kab	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	38	perjalanan	33	perjalanan	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10,000,000	20,000,000	19,713,500	99	100	Inspektorat Kab	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	125	perjalanan	30	perjalanan	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	90,022,700	92,422,700	89,708,532	97	100	Inspektorat Kab	Jumlah THL Pengaman Kantor	6 orang	6	Orang	6	Orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**293,197,700**	**846,565,900**	**794,567,875**	**94**	**100**		**persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	60%	**65**	**%**	**65**	**%**	100
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35,920,000	334,520,000	322,016,000	96	100	Inspektorat Kab	Jenis/jumlah perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	17	unit	3	unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	56,050,000	243,550,000	238,656,500	98	100	Inspektorat Kab	Jumlah peralatan kantor tersedia	25 unit	25	Item	13	Item	52.00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54,736,800	72,005,000	50,507,177	70	100	Inspektorat Kab	Jumlah perawatan kendaraan dinas	19 unit (8 Mobil,	19	unit	26	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20,000,000	20,000,000	14,336,200	72	100	Inspektorat Kab	jumlah lokal gedung/ruangan yang terpelihara	25 unit	1	Unit	1	Unit	100
5	Fasilitasi Pindahan Gedung Kantor	126,490,900	176,490,900	169,051,998	96	100	Inspektorat Kab	jumlah fasilitasi pindahan kantor inspektorat	1 kegiatan	1	kegiatan	1	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**4,475,801,550**	**5,335,229,350**	**4,307,726,169**	**81**	**100**		**peningkatan level SPIP indek 1 - 5**	100%	**2.90**	**Level**	**2.90**	**Level**	100
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1,260,044,900	1,001,226,500	827,591,600	83	100	Inspektorat Kab	jumlah obyek pemeriksaan dan laporan terselesaikan inspektorat	168 obrik	168	obrik	12	OPD	100
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	333,548,000	529,648,000	426,984,600	81	100	Inspektorat Kab	jumlah kasus/pengaduan	72 kasus	100	kasus	600	Orang	100
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	662,526,000	743,126,000	514,821,470	69	100	Inspektorat Kab	Tersusunnya laporan hasil Reviu KUA PPAS, Reviu RKA, Reviu LKD, Reviu LK SKPD, Reviu LkjIP, Reviu Penyaluran dab Penggunaan Dana Desa, Reviu Tender Pengadaan Barang/Jasa Penyerapan Anggaran Pemda, Reviu RPJMD, Reviu Renstra	90 Dokumen	90	dokumen	284	Obrik	316
4	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	640,841,000	1,181,991,000	1,062,558,258	90	100	Inspektorat Kab	jumlah temuan pengawasan ditindaklanjuti Inspektortat	192 obrik	192	obrik	100	%	100
5	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	86,950,000	86,950,000	62,827,459	72	100	Inspektorat Kab	jumlah rakorwas terlaksana	20 kali	20	kali	11	Laporan	100
6	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	35,000,000	35,000,000	29,852,500	85	100	Inspektorat Kab	Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	1 kegiatan	75	%	75	%	100
7	Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	86,720,000	121,920,000	118,044,839	97	100	Inspektorat Kab	Jumlah SKPD yang didampingi dalam pengimplementasian SPIP	1 Kegiatan	50	OPD	20	kegiatan	100
8	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	60,000,000	65,560,000	58,647,241	89	100	Inspektorat Kab	Jumlah laporan LHKASN	2000 ASN	2000	ASN	300	Orang	100
9	Pengendalian Gratifikasi	176,947,900	205,434,300	198,410,866	89	100	Inspektorat Kab	jumlah peserta sosialisasi pengendalian gratifikasi	600 orang	600	orang	10	OPD	100
10	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	425,000,000	430,559,800	387,029,434	97	100	Inspektorat Kab	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungli	4 Kali	4	kali	668	Laporan	16700
11	Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah	153,052,000	273,052,000	180,375,970	90	100	Inspektorat Kab	Jumlah sosialisasi untuk pengumpulan data dukung pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Penegakan Integritas	6 Kali	6	kali	1400	orang	100
12	Pembinaan reformasi birokrasi	59,603,750	59,603,750	57,127,832	66	100	Inspektorat Kab	Jumlah OPD yang dimonev pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8 OPD	8	OPD	2	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
13	Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	424,270,000	464,300,000	291,563,100	96	100	Inspektorat Kab	Jumlah Koordinasi dengan TP4D	8 kali	8	kali	3	kegiatan	100
14	Peningkatan Kapabilitas APIP	36,468,000	36,468,000	29,142,000	63	101	Inspektorat Kab	Jumlah telaah sejawat, Bimtek Penimgkatan Kapabilitas APIP	3 Kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100
15	Layanan Konsultasi	34,830,000	100,390,000	62,749,000	80	102	Inspektorat Kab	Jumlah pelayanan terhadap obrik inspektorat	50 Kali	51	kali	51	kali	100
IV	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**434,444,200**	**599,142,200**	**540,374,741**	**90**	**100**		**Peningkatan level Kapabilitas APIP**	60%	**3dc**	**Level**	**3dc**	**Level**	**100**
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	394,142,200	549,142,200	493,514,696	90	100	Inspektorat Kab	- Jumlah aparatur pengawasan daerah yang telah mengikuti Diklat yang dipersyaratkan - Jumlah pelaksanaan PKS	30 orang	30 42	Kegiatan	40 11	Kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	40,302,000	50,000,000	46,860,045	94	100	Inspektorat Kab	Jumlah Aparartur Pengawasan yang sudah dinilai Angka Kreditnya	33 Orang	36	Orang	36	Orang	100
V	**Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**29,999,850**	**39,999,850**	**33,729,791**	**84**	**100**	Inspektorat Kab	**prosentase pemeriksaan program tahunan**	60%	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	29,999,850	39,999,850	33,729,791	84	100	Inspektorat Kab	Tersusunnya dokumen program Kerja Pengawasan Tahunan	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100
	JUMLAH TOTAL	**5,700,000,000**	**7,455,000,000**	**6,211,234,968**	**83**	**100**								

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : PERENCANAAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH dan OPD LAIN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
B A P P E D A														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**660,000,000**	**798,000,000**	**753,080,962**	**94**	**100**	**Bappeda Kab Klaten**	**Prosentase pelayanan surat menyurat kantor**		**100**	**%**	**100**		**100**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	10,000,000	9,975,000	100	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis Penyediaan jasa surat menyurat	1,600	1,600	surat	3,371	surat	210
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	140,000,000	140,000,000	132,947,532	95	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis rekening Jasa Komunikasi terpenuhi	2	2	jenis	2	jenis	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10,000,000	10,000,000	5,525,000	55	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan jenis penyedia jasa administrasi keuangan	10	10	Orang	10	Orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000	40,000,000	39,999,300	100	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor	60	60	jenis	60	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000	20,000,000	16,913,100	85	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2	2	rekening	2	rekening	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	16,000,000	15,997,160	100	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Bappeda Klaten	11	11	jenis	11	jenis	100
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	10,000,000	20,000,000	19,837,040	99	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor	18	18	jenis	18	jenis	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,000,000	7,000,000	6,542,400	93	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	6	6	jenis	6	jenis	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000	40,000,000	23,668,000	59	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah jenis makan dan minum untuk rapat rapat dan jamuan tamu	1,000	1,000	buah	1,000	buah	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	340,000,000	440,000,000	439,912,334	100	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50	60	kali	60	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25,000,000	25,000,000	20,701,000	83	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	70	70	kali	70	kali	100
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	18,000,000	30,000,000	21,063,096	70	100	Bappeda Kab Klaten	Prosentase Pelayanan Administrasi kantor berjalan dengan baik	1	3	orang	3	orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**235,000,000**	**351,000,000**	**288,324,350**	**82**	**100**	**Bappeda Kab Klaten**	**Prosentase Sarana prasarana kantor dalam keadaan baik**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	30,000,000	146,000,000	121,911,400	84	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah peralatan kantor yang terbeli Bappeda Kab. Klaten	3	8	jenis	8	jenis	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	10,000,000	6,570,000	66	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik	1	1	unit	1	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60,000,000	60,000,000	49,142,950	82	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	35	35 unit	unit	35 unit	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	23,900,000	96	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah Peralatan gedung kantor dalam keadaan baik	3	3	jenis	3	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000,000	10,000,000	9,250,000	93	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah mebeleur dalam keadaan baik	4	4	jenis	4	jenis	100
6	Fasilitasi Pindahan kantor	100,000,000	100,000,000	77,550,000	78	100	Bappeda Kab Klaten	frekwensi pindahan kantor	1	1	Kegiatan	1	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	2,105,000,000	**2,780,000,000**	**2,242,381,983**	**81**	**100**	**Bappeda Kab Klaten**	**Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD,**		**100**	**%**	**94.5**	**%**	**95**
								Penjabran konsistensi program RKPD ke dalam APBD		**100**	**%**	**98.8**	**%**	**99**
1	Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	700,000,000	700,000,000	523,535,300	75	100	Bappeda Kab Klaten	Frekuensi kegiatan musrenbang RKPD yang dilaksanakan	1	1	Kegiatan	1	kegiatan	100
2	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	350,000,000	355,000,000	267,147,150	75	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	1	1 dokumen	Dokumen	1 dokumen	Dokumen	100
3	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)	350,000,000	350,000,000	267,221,300	76	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu	2	2 dokumen	dokumen	2 dokumen	dokumen	100
4	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)	350,000,000	350,000,000	274,476,900	78	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen KUPA & PPAS-P yang disusun dan disepakati tepat waktu	2	2 dokumen	dokumen	2 dokumen	dokumen	100
5	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	250,000,000	250,000,000	208,262,750	83	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1	1	dukumen	1	dukumen	100
6	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	100,000,000	100,000,000	50,145,400	50	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang diupdate	1	1	aplikasi	1	aplikasi	100
7	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bankeu Prov.)		375,000,000	360,553,083	96	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan yang disinkronisasi		6	Kegiatan	6	kegiatan	100
8	Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana		300,000,000	291,040,100	97	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah aparatur perencana yang meningkat kemampuannya		125	orang	125	orang	100
V	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**300,000,000**	**556,500,000**	**507,823,394**	**91**	**100**	**Bappeda Kab Klaten**	**Persentase konsistensi Perencanaan bidang ekonomi dengan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	300,000,000	556,500,000	507,823,394	91	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi		2	dokumen	2	dokumen	100
VI	**Program Perencanaan Sosial dan Budaya**	**300,000,000**	**550,000,000**	**469,979,808**	**85**	**100**	**Bappeda Kab Klaten**	**Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya**		**90**	**%**	**90**	**%**	**100**
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	300,000,000	550,000,000	469,979,808	85	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah Frekwensi koordinasi kebijakan bidang sosial budaya	48	48	kali	48	kali	100
VII	**Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**	**390,000,000**	**600,000,000**	**590,469,375**	**98**	**100**	**Bappeda Kab Klaten**	**Ketersediaan data dan informasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah**		**ada**	**%**	**ada**	**%**	**100**
								Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW		100	%	100	%	100
1	Koordinasi dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	390,000,000	600,000,000	590,469,375	98	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen rencana bidang IPW	12 kali	3	dokumen	3	dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
VIII	**Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah**		**490,400,000**	**417,316,023**	**85**	**100**	**Bappeda Kab Klaten**	**Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang	50,000,000	70,000,000	65,082,000	93	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen pengendalian dan efaluasi jangka panjang	1	1	dokumen	1	dokumen	100
2	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah	50,000,000	70,000,000	68,761,430	98	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen pengendalian dan efaluasi RPJMD	1	1	dokumen	1	dokumen	100
3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	140,000,000	220,200,000	167,371,340	76	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen pengendalian dan efaluasi rencana pembngunan tahunan	7 kali	4	okumen	4	okumen	100
4	Pelaporan pembangunan Daerah	50,000,000	130,200,000	116,101,253	89	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen pelaporan	10 kali	10	dokumen	6	dokumen	60
DINAS PENDIDIKAN														
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**150,000,000**	**196,900,000**	**174,974,800**	**88.86**	**100**								
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	100,000,000	146,900,000	127,452,150	86.76	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	47,522,650	95.05	100	Dinas Pendidikan	Jumlah monev dan pengendalian kegiatan	4	4	Triwulan	4	Triwulan	100
DINAS KESEHATAN														
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**135,000,000**	**135,000,000**	**87,936,947**	65.14%	**100**	Dinas Kesehatan	Persentase Kualitas perencanaan meningkat	100	100	%	100	%	100.00
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	105,000,000	105,000,000	70,686,447	67.32%	100	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Renja PD	6	5	dokumen	5	dokumen	100.00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	30,000,000	30,000,000	17,250,500	57.50%	100	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan renja PD yang disusun	1	1	dokumen	1	dokumen	100.00
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN**	**42,500,000.00**	**47,500,000.00**	**47,167,468.00**	**99.30**	**100**	**RSD Bagas Waras**	**Tersusunnya dokumen perencanaan**	**Tersusunnya dokumen perencanaan**	**Tersusunnya dokumen perencanaan**	**%**	**Tersusunnya dokumen perencanaan**	**%**	**100 %**
1	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	29,792,468.00	99.31	100	RSD Bagas Waras	Tersusunnya 6 dokumen perencanaan (Renja 2019, Renja Perubahan 2019, RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2019, DPA 2019)	Tersusunnya 6 (Renja 2019, Renja Perubahan 2019, RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2019, DPA 2019)	Tersusunnya 6 (Renja 2019, Renja Perubahan 2019, RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2019, DPA 2019)	dokumen	Tersusunnya 6 (Renja 2019, Renja Perubahan 2019, RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2019, DPA 2019)	dokumen	100 %
2	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian Porgram/Kegiatan Perangkat Daerah	12,500,000.00	17,500,000.00	17,375,000.00	99.29	100	RSD Bagas Waras	Terlaksananya monev dan pengendalian prog/kgtan RSD	1 monev pengendalian internal SKPD selama 12 bulan	1 monev pengendalian internal SKPD selama 12 bulan	dok/lap	1 monev pengendalian internal SKPD selama 12 bulan	dok/lap	100 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**10,000,000**	**10,000,000**	**8,195,000**	82%	100%	Kabupaten Klaten	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan**						
1	Penyusunan dan Evaluasi Renja OPD	6,000,000	6,000,000	5,675,000	95%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah laporan	6	6	laporan	6	laporan	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program OPD	4,000,000	4,000,000	2,520,000	63%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah laporan	4	4	laporan	4	laporan	100%
SATPOL PP														
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**28,000,000**	**47,000,000**	**46,662,450**										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	23,000,000	35,000,000	34,739,350	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD yang tersusun	7	7	dokumen	100	dokumen	100
2	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/ kegiatan SKPD	5,000,000	12,000,000	11,923,100	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	1	1	dokumen	1	dokumen	100
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB														
I	**Program peningkatan kualitas perencanaan**	**35,000,000**	**50,000,000**	**49,011,924**	**98.0**	**100**	Dinas Sosial, PP, PA dan KB							
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	30,000,000	45,000,000	44,603,424	**99.1**	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah (renja, renja perubahan, RKA, RKAP, DPA,DPAP) Dinas Sosial, PP, PA dan KB	6	6	dokumen	6	dokumen	**100**
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	5,000,000	5,000,000	4,408,500	**88.2**	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah laporan money dan pengendalian internal perangkat daerah (Fisik Keuangan dan Laba-laba, pengendalian renja, evaluasi renja)	4	4	laporan	4	laporan	**100**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN														
I	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN**	**21,400,000**	**21,400,000**	**4,146,300**				Tersusunnya dokumen perencanaan pada OPD					100%	
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	15,000,000	15,000,000	858,350	5.7%	100	DLHK	Jumlah dokumen perencanaan pada SKPD yang tersusun	10	10	buku	10	buku	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	6,400,000	6,400,000	3,287,950	51.4%	100	DLHK	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan	3	3	buku	3	buku	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
I	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**10,428,250**	**10,428,250**	**10,097,350**	**97**	**100**								**100**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,428,250	10,428,250	10,097,350	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja pemerintahaan	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
II	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**22,000,000**	**22,000,000**	**21,121,250**	**96**	**100**								**100**
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	12,000,000	12,000,000	11,643,500	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dokumen renja OPD	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	9,477,750	95	100	Kabupaten Klaten	Jumlah laporan monev dan pengendalian internaal OPD (tri wulan)	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
I	**PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN**	**15,000,000**	**15,000,000**	**9,874,000**										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	9,000,000	9,000,000	6,575,000	73	70	Dinas Kominfo	Jumlah jenis dokumen perencanaan (RKA, DPA, Renja, RKA P, DPA P, Renja P)	6	6	dokumen	6	dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	6,000,000	6,000,000	3,299,000	55	65	Dinas Kominfo	Jumlah jenis laporan (bulanan, triwulanan, semesteran)	3	3	laporan	3	laporan	100
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
I	**Program Peningkatan kualitas perencanaan**	**4,000,000**	**4,000,000**	**3,147,200**										
1	Penyusunan dan Evaluasi rencana kerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,555,000	46	85	DPMPTSP	Jumlah dokumen	3	3	Dokumen	3	Dokumen	85
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	2,000,000	2,000,000	1,592,200	32	85	DPMPTSP	Jumlah laporan	3	3	Laporan	3	Laporan	85
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN														
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**65,000,000**	**50,000,000**	**47,138,501**	**94.28**	**100.00**		**Tingkat kesesuaian antara Renja SKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD**	**85**	**85**	**%**			
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	25,000,000	25,000,000	22,461,300	89.85	100	DPKPP	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5	5	dokumen	5	dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/ kegiatan SKPD	40,000,000	25,000,000	24,677,201	98.71	100	DPKPP, Kabupaten Klaten	Jumlah laporan kegiatan yang tersusun	3	3	laporan	3	laporan	100
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**15,000,000**	**16,451,000**	**15,016,300**				Peningkatan kualitas perencanaan OPD						
1	Penyusunan dan evaluasi rencana strategis perangkat daerah	10,000,000	11,451,000	10,264,100	89.63	100	DISDAGKOP UKM	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun Dinas perdag koperasi UKM	3	3	dokumen	3	dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program /Kegiatan Perangkat daerah	5,000,000	5,000,000	4,752,200	95.04	100	DISDAGKOP UKM	Jumlah laporan yang didokumentasikan Dinas Dagkop UKM	1	1	laporan	1	laporan	100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA														
I	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**9,000,000**	**9,000,000**	**6,874,450**	76.38									
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,000,000	9,000,000	6,874,450	76.38	100	Disperinaker	Jumlah buku penilaian capaian kinerja	40	40	buku	40	buku	100
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH														
I	**Program peningkatan kualitas perencanaan**	**20,000,000**	**20,000,000**	**19,729,000**	**98.65**	**100**		**Prosentase fasilitasi terhadap kualitas perencanaan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,866,250	97.33	100		Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun dengan baik	8	8	Dokumen	8	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	15,000,000	15,000,000	14,862,750	99.09	100		Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
SEKRETARIAT DAERAH														
BAGIAN PEMBANGUNAN														
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**10,160,000**	**10,160,000**	**8,129,400**										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja	5,000,000	5,000,000	4,078,400	82	100	Bagian Pembangunan	Jumlah dokumen	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	5,160,000	5,160,000	4,051,000	79	100	Bagian Pembangunan	Jumlah dokumen	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
BAGIAN PEREKONOMIAN														
I	**Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**10,000,000**	**10,000,000**	**3,671,400**	**37**	**100**	**Bag. Perekonomian**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**	**22**	**22**	**dokumen**	**22**	**dokumen**	**100**
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	1,388,800	28	100	Bag. Perekonomian	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja	4	4	dokumen	4	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	2,282,600	46	100	Bag. Perekonomian	Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	18	18	dokumen	18	dokumen	100
BAGIAN UMUM														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**28,000,000.00**	**28,000,000.00**	**21,189,600.00**	**76%**	**100%**		**Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	25,000,000.00	25,000,000.00	18,769,600	75%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah dokumen	7	7	dok	7	dok	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	2,420,000	81%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah laporan	3	3	laporan	3	laporan	100%
BLP														
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**4,500,000**	**4,500,000**	**761,000**				**Prosentase Terselesaikan Perencanaan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah	2,000,000	2,000,000	357,100	17.86	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan BLP	2	2	Dokumen (renstra, renja)	2	Dokumen (renstra, renja)	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan Perangkat Daerah	2,500,000	2,500,000	403,900	16.16	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Laporan Monev BLP	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
I	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**2,500,000**	**2,500,000**	**756,300**				**Prosentase Terselesaikan Laporan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,500,000	2,500,000	756,300	30.25	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
BAGIAN PEMERINTAHAN														
I	**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**	**260,000,000**	**260,000,000**	**227,451,221**										
1	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	190,000,000	190,000,000	171,894,458	90%	93	Kab. Klaten dan Luar Kab. Klaten	Jumlah pilar batas daerah yang terpelihara / terpasang / termonitor	4 kegiatan	50	Pilar	90	Pilar	180%
2	Pembakuan Nama Rupa Bumi	70,000,000	70,000,000	55,556,763	79%	100	Kab. Klaten	Jumlah obyek rupa bumi yang teridentifikasi dan terbakukan	50	50	obyek	70	obyek	140%
SEKRETARIAT DPRD														
I	**Program Peningkatan Kualitas perencanaan**	**9,000,000**	**9,000,000**	**7,272,000**	**80.80**	**100**		**Persentase Pelaporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yangTepat Waktu (%)**	**10**	**10**		**10**		**100**
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,256,000	85.12	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Renja dan evaluasi SKPD	7	7	dokumen	7	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	4,000,000	4,000,000	3,016,000	75.40	100	Sekretariat DPRD	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	3	3	dokumen	3	dokumen	100
	KEC. KLATEN UTARA													
I	**program peningkatan kualitas perencanaan**	**7,000,000**	**7,000,000**	**5,224,900**			Kec.Klaten Utara	**jumlah dokumen perencanaan Renstra PD dan Renjaa PD disusun tepat waktu**						
1	Penyususnan dan evaluasi rencana kerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,349,900.00	87.00	70	Kec.Klaten Utara	Jumlah dokumen	2	2	Laporan/Dokumen	1	Laporan/Dokumen	50.0
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	2,000,000	2,000,000	875,000.00	43.75	60	Kec.Klaten Utara	Jumlah laporan monef dan bulanan oleh Triwulanan	4	4	Kegiata/Triwulan	3	Kegiata/Triwulan	75.0
	KEL. BARENG LOR													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,647,800**										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	3,000,000	3,000,000	2,998,650	99,96	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah dan jenis Dokumen rencana kerja SKPD	6	6	Dokumen	6	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	2,000,000	2,000,000	1,649,150	82,46	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
	KEL. GERGUNUNG													
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**7,000,000**	***7,000,000***	***6,999,750***	**100%**	**100%**								
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	4,500,000	4,500,000	4,499,800	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah dan jenis Dokumen rencana kerja SKPD	6	6	Dokumen	6	Dokumen	**100%**
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	2,500,000	2,500,000	2,499,950	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	1	1	Dokumen	1	Dokumen	**100%**
	KECAMATAN KLATEN TENGAH													
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**5,950,000**	**5,950,000**	**5,950,000**	100%	100%								
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja OPD	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja OPD	6	6	dok	3	dok	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan OPD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan OPD	3	3	dok	3	dok	100%
II	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1,200,000**	**1,200,000**	**900,000**										
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1,200,000	1,200,000	900,000	75%	75%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah laporan LAKIP	12	12	dok	3	dok	100%
	KECAMATAN NGAWEN													
I	**Program peningkatan kualitas perencanaan**	**6,000,000**	**6,000,000**	**5,999,900**	**100%**	100%								
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Renja SKPD	6	6	dokumen	6	dokumen	100%
2	Mnitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ kegiatan SKPD	2,500,000	2,500,000	2,499,900	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah program / kegiatan yang di evaluasi	1 dokmen(6 laporan)	1 dokmen(6 laporan)	dokumen	1 dokmen(6 laporan)	dokumen	100%
	KECAMATAN KEBONARUM													
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**6,975,000.00**	**100**	**100**	**Kec Kebonarum**	**Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan**						
1	Penyusunan dan Evaluasi Restra Kerja SKPD	2000000	2,000,000.00	1,975,000.00	99	100	Kec Kebonarum	Jumlah Dokumen	6	6.00	dokumen	6	dokumen	100
2	Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Program /kegiatan SKPD	5000000	5,000,000.00	5,000,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah dokumnen	4	4.00	dokumen	4	dokumen	100
	KEC. WEDI													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN**	**11,000,000**	**11,000,000**	**11,000,000**										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja perangkat Daerah	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dokumen perencanaan	8	8	Dokumen	8	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan perangkat daerah	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
	KECAMATAN JOGONALAN													
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,118,000**	**92.65**									
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,999,500	99.99	100	Kec. Jogonalan	Jml dokumen perencanaan	8	8	dokumen	8	dokumen	100
2	Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	7,000,000	7,000,000	6,118,500	87.41	100	Kec. Jogonalan	Jml laporan pengendalian prog/kgtn dan lap keuangan OPD	5	5	dokumen	5	dokumen	100
	KECAMATAN GANTIWARNO													
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,986,900**										
1	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/ Kegiatan Perangkat Desa	5,000,000	5,000,000	4,986,900	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya penyusunan dan evaluasi rencana SKPD	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
II	**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**4,000,000**	**4,000,000**	**3,996,850**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,000,000	4,000,000	3,996,850.00	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan kinerja SKPD	5	2	Dokumen	2	Dokumen	100
	KECAMATAN MANISRENGGO													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN**	**4,000,000**	**4,000,000**	**3,407,400**										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,971,000	98.55	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKA, DPA, KUA-PPAS, KAK dan Perubahan)	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	2,000,000	2,000,000	1,436,400	71.82	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,872,000**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,872,000	93.60	100		Jumlah dokumen laporan	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100
	KECAMATAN KEMALANG													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Peningkatan Kwalitas Perencaan**	**11,000,000.00**	**11,000,000.00**	**9,554,500.00**										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	7,500,000.00	7,500,000.00	7,439,500.00	99.19	**100**	**Kecamatan Kemalang**	Jumlah Dokumen yang tersusun	7	7	Dokumen	7	Dokumen	100%
2	Monitoring dan evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	3,500,000.00	3,500,000.00	2,115,000.00	60.43	**100**	**Kecamatan Kemalang**	Jumlah kegiatan yang di evaluasi	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
	KECAMATAN KARANGNONGKO													
I	**Program peningkatan kualitas perencanaan**	**5,000,000**	**5,500,000**	**5,414,940**	98.5	98.5	**Kec.Karangnongko**							
1	Penyusunan dan evaluasi rencana strategis perangkat daerah	2,500,000	3,000,000	2,914,940	97.2	97.2	**Kec.Karangnongko**	jumlah Penyusunan dan evaluasi rencana strategis perangkat daerah terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100.00%
2	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan perangkat daerah	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0	100.0	**Kec.Karangnongko**	jumlah Monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan perangkat daerah terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100.00%
	KECAMATAN JATINOM													
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**11,000,000**	**11,000,000**	**10,997,000**	99.97	100								
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100	Kec. Jatinom	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi renaca kerja kec. Jatinom	7	7	dokumen	7	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD	3,500,000	3,500,000	3,497,000		100	Kec. Jatinom	Terwujudnya kegiatan Monev program dan kegiatan SPKD	16	16	dokumen	16	dokumen	100
	KECAMATAN KARANGANOM													
I	**Program Peningkatan kualitas perencanaan**	**8,000,000**	**8,000,000**	**1,798,500**										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	1,798,500	36	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah dokumen tersusun	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	0	0	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	12	12	Laporan	12	Laporan	100
	KECAMATAN TULUNG													
I	**Program peningkatan kualitas perencanaan**	**11,000,000**	**11,000,000**	**9,479,400**										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	7,500,000	7,500,000	6,154,400	82	100	Kec Tulung	Jumlah dokumen tersusun		2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian progam/kegiatan SKPD	3,500,000	3,500,000	3,325,000	95	100	Kec Tulung	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan		12	Laporan	12	Laporan	100
	KECAMATAN DELANGGU													
I	**PROGRAM PENING.KWALITAS PERENCANAAN**	**5,700,000**	**5,700,000**	**5,504,200**										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	2,850,000	2,850,000	2,741,000	96.18	96	Kec. Delanggu	Jml. Dokumen yang dibuat kecamatan	1	1	paket	1	paket	100
2	Monitoring dan evaluasi dan Pengendalian program/keg	2,850,000	2,850,000	2,763,200	96.95	97	Kec. Delanggu	Jml. Laporan yang dibuat kecamatan	12	12	bulan	12	bulan	100
	KECAMATAN JUWIRING													
I	**Program peningkatan kualitas perencanaan**	**11,000,000**	**12,100,000**	**3,723,400**			Kec. Juwiring							
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja perangkat daerah	7,500,000	8,250,000	825,000	10%	70	Kec. Juwiring	jumlah dokumen renja	1	1	buah	1	buah	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	3,500,000	3,850,000	2,898,400	75%	75	Kec. Juwiring	jumlah kegiatan monev	2	12	kegiatan	12	kegiatan	100
II	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,196,800**			Kec. Juwiring							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,200,000	1,200,000	**1,196,800**	100%	**100**	Kec. Juwiring	jumlah dokumen laporan	1	1	buah	1	buah	100
	KECAMATAN WONOSARI													
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**12,067,000**	**12,067,000**	**9,400,600**										
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	7,584,000	7,584,000	5,310,000	70.0	100.0	Kec. Wonosari	Dokumen Evaluasi Kinerja Kegiatan SKPD	1	1	dokumen	1	dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	4,483,000	4,483,000	4,090,600	91.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Laporan Monev dan Pengendalian Kegiatan internal SKPD	3	3	dokumen	3	dokumen	100

	KECAMATAN CEPER													
I	**Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**9,000,000**	**9,000,000**	**8,979,000.00**										
1	Penyusunan dan evaluasi RKPD	6,000,000	6,000,000	5,979,000.00	99.65%	90	Kec Ceper	dokumen Renja dan Renstra	6	6	Dokumen	6	Dokumen	100
2	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/keg PD	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	100.00%	98	Kec Ceper	dokumen monev dan pengendalian program/kegiatan PD	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100
II	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,200,000.00**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	100.00%	70	Kab Klaten	jumlah dokumen LAKIP	1	1	dokumen	1	dokumen	100
	KECAMATAN PEDAN													
I	**Program peningkatan kualitas perencanaan**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**100**	**100**	Kecamatan Pedan							
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	100	Kecamatan Pedan	jumlah penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	6	6	dokumen	6	dokumen	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	100	Kecamatan Pedan	jumlah monitoring ,evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
	KECAMATAN KARANGDOWO													
I	**Program peningkatan kualitas perencanaan**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**3,838,000.00**	**63.97**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Peningkatan Kualitas Perencanaan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	2,923,000.00	97.43	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Penyusunan Evaluasi Dan Rencana Kerja Selama 1 Tahun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	915,000.00	30.50	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Program Kegiatan Selama 12 Bulan	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
II	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Realisasi Dokumen Selama 1 Tahun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
	KECAMATAN CAWAS													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN**	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**	**3,564,800.00**										
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	2,455,000.00	2,455,000.00	2,414,900.00	98	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja	6	6	laporan	6	6	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	1,225,000.00	1,225,000.00	1,149,900.00	94	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Dokumen Monev	6	6	dokumen	6	6	100%
	KECAMATAN TRUCUK													
I	**PROG. PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN.**	**11,000,000**	**11,000,000**	**11,000,000**										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah dokumen rencana kerja	6 dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan	1 dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100
	KECAMATAN BAYAT													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN**	***7,600,000***	***7,600,000***	***3,868,000***				***Prosentase Tingkat Kegiatan Kualitas perencanaan***	***100***	100	%	100	%	100
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	2,600,000	2,600,000	1,993,000	77	100	Kec. Bayat	Jumlah Dokumen penyusunan rencana kerja SKPD	5	5	dokumen	5	dokumen	100
2	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	1,875,000	38	100	Kec. Bayat	Jumlah laporan monev dan pengendalian program/kegiatan SKPD	10	10	laporn	10	laporan	100
	JUMLAH		**7,305,936,250**	**6,257,297,396**	**85.6**									

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : BIDANG KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
B ADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**	**1,459,242,000**	**1,664,900,000**	**1,597,687,213**	**96**	**100**	**BPKD Kab. Klaten**	**Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang baik**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	5,900,000	2,949,000	50	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah surat/SPJ terkirim	900	900	lembar/Surat	900	lembar/Surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	210,000,000	225,000,000	214,859,506	95	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah Jenis rekening terbayar	3	3	Jenis (Listrik, Internet, telp)	3	Jenis (Listrik, Internet, telp)	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	55,000,000	60,000,000	59,243,820	99	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah THL Jasa Administrasi keuangan	4	4	Orang	4	Orang	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	75,000,000	100,000,000	97,071,400	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis ATK tersedia	49	49	Jenis	49	Jenis	100
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	100,000,000	125,000,000	116,680,000	93	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	11	11	Jenis	11	Jenis	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	10,000,000	25,000,000	24,081,000	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis komponen alat listrik/penerangan tersedia	7	7	Jenis	7	Jenis	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman.	200,000,000	300,000,000	291,539,400	97	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi rapat, Jumlah jam lembur, banyakny tamu	60	100	kali	100	kali	100
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	300,000,000	300,000,000	299,661,375	100	100	Seluruh Indonesia	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas luar daerah	75	75	kali	75	kali	100
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	50,000,000	50,000,000	49,400,000	99	100	Kabupaten Klaten	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	100	kali	100	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	31,000,000	32,000,000	30,921,240	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah THL pengaman kantor GOR Gelarsena	2	2	Orang	2	Orang	100
11	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	31,000,000	32,000,000	30,672,840	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah THL dan Tenaga Kontrak pengemudi GOR Gelarsena	2	2	Orang	2	Orang	100
12	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	15,000,000	30,000,000	24,971,500	83	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan pengelolaan sampah	23	23	Jenis	23	Jenis	100
13	Asuransi Gdg Kantor & Rumah Dinas.	165,000,000	165,000,000	151,664,477	92	100	Kabupaten Klaten	Jumlah asuransi gedung kantor dan/rumah dinas	21	23	Unit	23	Unit	100
14	Asuransi Kendaraan Dinas	213,242,000	215,000,000	203,971,655	95	100	Kabupaten Klaten	Jumlah asuransi kendaraan dinas terbayar	63	63	Unit	63	Unit	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**	**2,373,400,000**	**19,603,640,000**	**18,702,541,530**	95	100	BPKD Kab. Klaten	**Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang siap pakai**	100	100	%	100	%	100
1	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasioanal	-	16,264,540,000	15,616,996,500	96	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kendaraan dinas yang di adakan	440	440	Unit	440	Unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	1,300,000,000	1,634,100,000	1,516,379,480	93	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis peralatan gedung kantor terbeli	75	92	Unit	92	Unit	100
3	Pengadaan Mebeleur	120,000,000	400,000,000	386,808,950	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah Mebeleur terbeli	42	218	Unit	218	Unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	180,000,000	380,000,000	340,316,000	90	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah unit gedung yang di pelihara	1	1	Unit	1	Unit	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	400,000,000	450,000,000	415,538,960	92	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	102	102	Unit	102	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	85,000,000	100,000,000	74,660,000	75	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	100	110	Unit	110	Unit	100
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	15,000,000	20,000,000	19,560,000	98	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis mebeleur terpelihara	6	6	Jenis	6	Jenis	100
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan gedung Non kantor	245,000,000	295,000,000	273,804,740	93	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan GOR Gelarsena dan jumlah jenis pemeliharaan gedung GOR gelarsena	7	8	Orang	8	Orang	100
9	Penataan Arsip	20,000,000	35,000,000	33,857,900	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah ruang arsip yang di tata	1	1	Ruang	1	Ruang	100
10	Pemeliharaan panggung Baliho dan Spanduk	8,400,000	25,000,000	24,619,000	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah titik panggung baliho/spanduk yang terpelihara	4	15	Titik	15	Titik	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,719,150**	**97**	**100**	**BPKD Kab. Klaten**	**Nilai LKJIP yang diperoleh**	**1**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**100**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000	10,000,000	9,719,150	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja yang di hasilkan ; Jumlah web yang di update	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	**11,082,358,000**	**15,739,178,000**	**12,017,803,240**	**76**	**100**	**BPKD Kab. Klaten**	**Tercapainya kegiatan yang mendukung peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Penyusunan standar satuan harga	325,000,000	325,000,000	298,695,750	92	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen yang dihasilkan	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	485,000,000	981,700,000	885,004,212	90	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah sisdur/SIM yang di gunakan	1	2	Sistem	2	Sistem	100
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	600,000,000	600,000,000	483,734,087	81	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah dokumen rancangan perda tentang APBD	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	112,000,000	112,000,000	95,768,000	86	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	600,000,000	600,000,000	512,861,800	85	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen rancangan perda perubahan APBD tersusun	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
6	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	152,000,000	182,000,000	141,548,940	78	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersusun	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
7	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	450,000,000	450,000,000	399,921,614	89	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersusun	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
8	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	54,000,000	170,000,000	97,348,230	57	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
9	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	800,000,000	800,000,000	694,401,223	87	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi diklat/bintek peningkatan manajemen aset	7	9	kali	9	kali	100
10	Penelitian DPA-SKPD	85,000,000	85,000,000	81,358,775	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah DPA yang diteliti	171	171	skpd	171	skpd	100
11	Penelitian DPA-SKPD Perubahan	85,000,000	85,000,000	81,381,600	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah DPA Perubahan yang di teliti	171	171	skpd	171	skpd	100
12	Penyusunan Surat Penyediaan Dana.	30,000,000	30,000,000	26,731,900	89	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah bendel SPD	156	156	Bendel	156	Bendel	100
13	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	25,000,000	25,000,000	19,296,750	77	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah dokumen Anggaran kas	61	61	Dokumen	61	Dokumen	100
14	Penerbitan SP2D	280,000,000	300,000,000	243,635,716	81	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah bandel SP2D BPKD Kab. Klaten	8,000	8,000	Bendel	8,000	Bendel	100
15	Pengelolaan Administrasi Kasda	125,000,000	143,000,000	42,616,801	30	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi pengelolaan administrasi kasda	12	12	Kali	12	Kali	100
16	Pengelolaan Administrasi Gaji	180,000,000	180,000,000	141,636,670	79	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah daftar gaji kab klaten	65,000	65,000	Bendel	65,000	Bendel	100
17	Pendataan Pajak Daerah	225,000,000	600,000,000	352,243,575	59	100	Kab. Klaten	Frekuensi pendataan serta jumlah Formulir BPHTB dan SPTPD	12	12	Kali	12	Kali	100
18	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	151,400,000	220,000,000	185,357,805	84	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi Update data pajak daerah	12	12	Bulan	12	Bulan	100
19	Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah	316,000,000	425,000,000	404,295,500	95	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah SPPT Kab. Klaten yang dicetak	635,000	635,000	Lembar	635,000	Lembar	100
20	Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)	37,000,000	95,000,000	66,243,650	70	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi penyuluhan Pendapatan Daerah (PBB dan Pajak)	12	12	Kali	12	Kali	100
21	Pemungutan pajak daerah	50,000,000	80,000,000	39,328,150	49	100	Kab. Klaten	Frekuensi pemungutan pajak daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
22	Pemeriksaan Pajak Daerah	40,000,000	150,000,000	40,464,607	27	100	Kab. Klaten	Frekuensi pemeriksaan pajak daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
23	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	125,000,000	150,000,000	149,446,550	100	100	Kab. Klaten	Frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
24	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	616,200,000	800,000,000	680,567,570	#REF!	100	Kab. Klaten	Jumlah cetakan STTS	9160	9160	lembar	9160	lembar	100
25	Pemberian Penghargaan Pajak Daerah	697,000,000	900,000,000	665,944,475	74	100	Kab. Klaten	Jumlah jenis hadiah penghargaan pajak daerah	7	7	Jenis	7	Jenis	100
26	Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD	140,000,000	270,000,000	249,221,250	92	100	Kab. Klaten	Frekuensi pembinaan Bendahara pengeluaran	2	2	Kali	2	Kali	100
27	Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame	27,500,000	50,000,000	39,382,550	79	100	Kab. Klaten	Frekuensi penertiban pemasangan dan penempatan reklame	12	12	Kali	12	Kali	100
28	Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	130,000,000	190,000,000	149,422,102	79	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah peraturan Bupati dan Raperda yang di susun	9	9	Dokumen	9	Dokumen	100
29	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	50,000,000	50,000,000	43,253,475	87	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi rapat/sosialisasi yang terealisasi	2	2	Kali	2	Kali	100
30	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	80,430,000	190,000,000	139,441,188	73	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi rapat koordinasi pengelolaan pendapatan daerah	12	12	Kali	12	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
31	Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten	116,000,000	120,000,000	86,818,625	72	100	Kab. Klaten	Frekuensi pengelolaan TPTGR	12	12	Kali	12	Kali	100
32	Rekonsiliasi Aset Daerah	200,000,000	330,700,000	238,478,500	72	100	Kab. Klaten	Rekonliasi Belanja Modal tiap Semester	891	1982	UPB	1982	UPB	100
33	Pengelolaan Aset Daerah	1,402,708,000	1,727,088,000	1,523,148,965	88	100	Kab. Klaten	Jumlah unit pengelola Barang (UPB) Aset Daerah	891	1982	UPB	1982	UPB	100
34	Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten	400,000,000	600,000,000	509,614,180	85	100	Kab. Klaten	Jumlah Sertifikat tanah Kab. Klaten	5	5	Unit	5	Unit	100
35	Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah	35,000,000	40,000,000	34,019,797	85	100	Kab. Klaten	Jumlah SPPT Kab. Klaten yang dicetak	244	244	Lembar	244	Lembar	100
36	Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA	50,000,000	50,000,000	47,814,750	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah aplikasi (SIM) BPKD Kab. Klaten	1	1	Sistem	1	Sistem	100
37	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	683,050,000	967,690,000	754,638,214	78	100	Kab. Klaten	Jumlah Pengurus barang Aset Tetap dan Pengurus Barang Persediaan	891	1982	Orang	1982	Orang	100
38	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah	145,000,000	145,000,000	133,262,350	92	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis Dokumen Laporan Semester dan Prognosis Daerah	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
39	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga	109,070,000	150,000,000	47,588,425	32	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah aplikasi (SIM) BPKD Kab. Klaten	1	1	Aplikasi	1	Aplikasi	100
40	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	249,000,000	250,000,000	129,831,082	52	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi pengelolaan keuangan Daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
41	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)	120,000,000	150,000,000	73,555,000	49	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah buku Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	300	300	Buku	300	Buku	100
42	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	45,000,000	380,000,000	24,817,900	7	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi Koordinasi Pengeloaan Piutang Pajak Daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
43	Pengelolaan Data Keuangan Daerah	55,000,000	90,000,000	80,842,862	90	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi Pengelolaan Data Keuangan	1	12	Kali	12	Kali	100
44	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	320,000,000	350,000,000	265,583,200	76	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah Aplikasi Pengembangan Sistem danProsedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	2	2	Aplikasi	2	Aplikasi	100
45	Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	79,000,000	150,000,000	82,963,875	55	100	Kab. Klaten	Frekuensi monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
46	Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah		1,000,000,000	534,271,000	53	100	Kab. Klaten	Luas tanah yang terbeli	0	350	M2	350	M2	100
	JUMLAH TOTAL	**14,925,000,000**	**37,017,718,000**	**32,327,751,133**	**87**	**100**								

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
I	**Program Penelitian dan Pengembangan**	**500,000,000**	**1,000,000,000**	**886,073,933**		**100**	**Bappeda Kab Klaten**	**Persentase inovasi yang diterapkan**						
1	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	175,000,000	200,000,000	185,238,145	93	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah hasil kegiatan kelitbangan yang dikoordinasikan /diseminarkan / diworkshopkan, dipublikasikan	8 Kali	10	kegiatan	11	kegiatan	110
2	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan daerah	225,000,000	500,000,000	464,696,673	93	100	Bappeda Kab Klaten	Meningkatnya jumlah (kuantitas) dan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah	10 Kali	12	kegiatan	15	keiatan	125
3	Penguatan sistem inovasi daerah	100,000,000	150,000,000	108,589,115	72	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dan perencanaan kebijakan	3 kegiatan	5	dokumen	5	dokumen	100
4	Penilaian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan Kab. Klaten		150,000,000	127,550,000	85	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah hasil penelitian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan di kabupaten Klaten		1	kegiatan	1	kegiatan	100
JUMLAH TOTAL		**500,000,000**	**1,000,000,000**	**886,073,933**	89	**100**	**100**							

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : BIDANG KEPEGAWAIAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH, BAGIAN ORGANISASI

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**456,000,000**	**576,000,000**	**570,100,080**	**99**	**100**		**Persentase Fasilitasi terhadap tupoksi**	**93**	**93**	**%**	**93**	**%**	**100**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000	20,000,000	19,525,000	98	100	BKPPD Kab	Jumlah Surat Masuk & Surat Keluar	8550	8850	Surat	8859	Surat	100
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46,000,000	46,000,000	45,542,100	99	100	BKPPD Kab	Jumlah Jenis ATK yang tersedia di BKPPD	71	71	Jenis	71	Jenis	100
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000	80,000,000	75,585,000	94	100	BKPPD Kab	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1	1	Paket	1	Paket	100
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	90,000,000	125,000,000	124,621,000	100	100	BKPPD Kab	Jumlah makanan minuman lembur dan jumlah makanan minuman rapat	50	310	Paket	310	Paket	100
5	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah	200,000,000	250,000,000	249,876,980	100	100	BKPPD Kab	Jumlah SPPD keluar daerah	12	100	Kali	100	Kali	100
6	Rapar-rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam Daerah	50,000,000	55,000,000	54,950,000	100	104	BKPPD Kab	Jumlah SPPD dalam daerah	12	130	Kali	135	Kali	104
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**232,000,000**	**277,000,000**	**257,587,809**	**93**	**100**		**Prosentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur**	**96.50**	**96.50**	**%**	**96.50**	**%**	**100**
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000	20,000,000	18,900,000	95	100	BKPPD Kab	Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan	2	2	Unit	2	Unit	100
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50,000,000	80,000,000	73,789,520	92	100	BKPPD Kab	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	5	7	Unit	7	Unit	100
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65,000,000	65,000,000	62,630,874	96	100	BKPPD Kab	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	19	19	Unit	19	Unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12,000,000	12,000,000	11,989,100	100	100	BKPPD Kab	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	15	15	Unit	15	Unit	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	85,000,000	100,000,000	90,278,315	90	100	BKPPD Kab	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	92	92	Unit	92	Unit	100
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,880,750**	**98**	**100**	BKPPD Kab	**Prosentase fasilitasi terhadap kinerja dan keuangan**	**82**	**82**	**%**	**82**	**%**	**100**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,880,750	98	100	BKPPD Kab	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
IV	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur**	**7,575,000,000**	**10,825,000,000**	**10,770,819,727**	**99**	**100**		**Prosentase ASN yang mengikuti diklat**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	4,650,000,000	6,800,000,000	6,777,513,000	100	100	BKPPD Kab	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	490	675	Orang	675	Orang	100
2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	2,050,000,000	2,050,000,000	2,041,488,020	100	98	BKPPD Kab	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat Pim	57	57	Orang	56	Orang	98
3	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	525,000,000	1,525,000,000	1,520,182,007	100	93	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	60	380	Orang	353	Orang	93
4	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah	350,000,000	350,000,000	347,738,450	99	780	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional	40	40	Pejabat Fungsional	312	Pejabat Fungsional	780

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Bintek Perundang-undangan Kepegawaian	-	100,000,000	83,898,250	84	109	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	0	58	PNS	63	PNS	109
V	**Program pembinaan dan pengembangan aparatur**	**3,062,000,000**	**5,500,000,000**	**3,776,110,192**	**69**	**100**		**Prosentase informasi kepegawaian yang akurat Prosentase Pengembangan Aparatur**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Seleksi Penerimaan Calon PNS	270,000,000	1,570,000,000	604,639,195	39	0	BKPPD Kab	Jumlah Formasi Yang Diisi	100	1427	Formasi	0	Formasi	0
2	Penempatan PNS	520,000,000	573,000,000	409,136,469	71	36	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Ditempatkan (Mutasi)	2000	2000	Orang	721	Orang	36
3	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	90,000,000	90,000,000	86,864,059	97	100	BKPPD Kab	Jumlah aplikasi yang dibuat	3	3	Aplikasi	3	Aplikasi	100
4	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	22,000,000	22,000,000	17,320,668	79	70	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana	150	150	Orang	105	Orang	70
5	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100,000,000	100,000,000	92,155,108	92	56	BKPPD Kab	Jumlah Kasus Yang Ditangani	32	32	Kasus	18	Kasus	56
6	Monitoring dan inspeksi mendadak PNS	30,000,000	40,000,000	23,297,615	58	100	BKPPD Kab	Jumlah Monitoring dan Sidak Yang Dilaksanakan	55	55	OPD	55	OPD	100
7	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	135,000,000	135,000,000	105,071,824	78	100	BKPPD Kab	Jumlah Arsip Yang Dikelola	2500	2500	File Arsip ASN	2500	File Arsip ASN	100
8	Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar	75,000,000	75,000,000	64,467,951	86	57	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang menyelesaikan tugas belajar & izin penggunaan gelar	290	290	Orang	165	Orang	57
9	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	120,000,000	120,000,000	114,698,433	96	100	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pembekalan	30	30	Orang	30	Orang	100
10	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	30,000,000	30,000,000	25,212,750	84	52	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	25	25	Orang	13	Orang	52
11	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	45,000,000	45,000,000	37,131,750	83	180	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian KP Penyesuaian Ijazah	50	50	Orang	90	Orang	180
12	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap	100,000,000	130,000,000	126,381,756	97	103	BKPPD Kab	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	1300	1300	Orang	1345	Orang	103
13	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	75,000,000	90,000,000	87,150,750	97	113	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Pensiun	750	750	Orang	851	Orang	113
14	Pengangkatan CPNS ke PNS	65,000,000	65,000,000	24,677,500	38	100	BKPPD Kab	Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjaringan gaji	2500	2500	SK	2495	SK	100
15	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	75,000,000	75,000,000	55,141,400	74	65	BKPPD Kab	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN	450	450	Dokumen	293	Dokumen	65
16	Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian	40,000,000	40,000,000	39,358,038	98	104	BKPPD Kab	Jumlah Kartu Identitas Kepegawaian Yang Diterbitkan	260	260	Kartu	271	Kartu	104
17	Evaluasi Kinerja Pegawai	70,000,000	370,000,000	329,362,671	89	100	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang di nilai	10591	55	OPD	55	OPD	100
18	Pemutakhiran Data Kepegawaian	175,000,000	605,000,000	568,843,149	94	100	BKPPD Kab	Jumlah Data PNS Yang Dimutakhirkan	10500	10500	Data	10500	Data	100
19	Penyusunan Formasi Kepegawaian	75,000,000	75,000,000	70,464,393	94	100	BKPPD Kab	Jumlah laporan formasi	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
20	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	125,000,000	125,000,000	101,506,641	81	100	BKPPD Kab	Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten	1	1	Laporan	1	Laporan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
21	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan	825,000,000	1,125,000,000	793,228,072	71	87	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	350	350	PNS	306	PNS	87
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)														
I	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**275,000,000**	**325,000,000**	**167,382,684**										
1	Peningkatan dan pengembangan budaya kerja	75,000,000	75,000,000	63,582,300	84.78	100	Bagian Organisasi	Jumlah OPD dalam peningkatan dan pengembangan budaya kerja	51	51	OPD	51 OPD	OPD	100
2	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	125,000,000	125,000,000	17,562,610	14.05	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun	1	1	Dokumen	0	Dokumen	30
3	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi	75,000,000	125,000,000	86,237,774	68.99	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen laporan reformasi birokrasi	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
II	**Program pembinaan dan pengembangan aparatur**	**159,000,000**	**209,000,000**	**152,050,840**										
1	Penyusunan Evaluasi Jabatan	150,000,000	200,000,000	145,516,440	72.76	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang disusun pembentukan draf Peraturan Bupati Tentang TPP	1	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Peningkatan Pengelolaan Aparatur	9,000,000	9,000,000	6,534,400	72.60	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen usulan administrasi kepegawaian dilingkungan setda	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
JUMLAH		**11,764,000,000**	**17,717,000,000**	**15,698,932,082**	**88.61**	**100**								

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG KELAUTAN & PERIKANAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN														
I	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**1,632,251,000**	**1,743,576,000**	**1,618,978,252**	**92.85**	**98.75**		**Produksi perikanan budidaya**	**30930**	**30930**	**ton**			**98.75**
1	Pengembangan bibit ikan unggul	100,000,000	100,000,000	99,595,900	99.60	100	UBI Ngrundul dan Somokaton	Jumlah lokasi penyediaan pakan untuk indukan dan operasional UBI	12550 kg	2 lokasi	kg / lokasi	2 lokasi	kg / lokasi	100
2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	40,000,000	76,325,000	70,225,900	92.01	100	Kawasan Minapolitan I, II dan Kab. Klaten	Jumlah peserta pelatihan teknis budidaya ikan dan temu lapang	100	200	orang	200	orang	100
3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	200,000,000	275,000,000	241,920,150	87.97	95	Kabupaten Klaten	Jumlah penerima bantuan benih ikan	460000 ekor	20 pokdakan	ekor / pokdakan	20 pokdakan	ekor / pokdakan	95
4	Pembangunan / Rehabilitasi sarana prasarana fisik kawasan budidaya air tawar (DAK-Bidang Kelautan dan Perikanan)	1,292,251,000	1,292,251,000	1,207,236,302	93.42	100	Kabupaten Klaten	Jumlah lokasi percontohan budidaya ikan di kolam	31	31	lokasi	31	lokasi	100
II	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**50,000,000**	**250,000,000**	**170,602,475**	**68.24**	**80**		**Produksi perikanan tangkap**	**526**	**526**	**ton**			**80**
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	50,000,000	250,000,000	170,602,475	68.24	80	Poknel tangkap Kec Kalikotes, Kec Bayat	Jumlah kelompok nelayan perikanan tangkap yang dibina	6	6	poknel	6	poknel	80
III	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	**150,000,000**	**150,000,000**	**136,519,825**	**91.01**	**100**		**Capaian konsumsi ikan**	**19.91**	**19.91**	**kg/kapita /tahun**			**100**
1	Pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	150,000,000	150,000,000	136,519,825	91.01	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan berbasis ikan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
	JUMLAH TOTAL	**1,832,251,000**	**2,143,576,000**	**1,926,100,552**	**89.85**	**92.92**								**92.92**

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG PARIWISATA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN KECAMATAN BAYAT

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
I	**Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran**	**811,000,000**	**838,000,000**	**803,828,638**	**96**	**100**	**Disparbudpora**	**Terlaksananya pelayanan adminitrasi perkantoran**						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	2,500,000	2,237,000	89	100	Disparbudpora	Persentase tercukupinya perlengkapan surat menyurat	4 Item	1000	surat	1000	Surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95,000,000	115,000,000	96,487,498	84	100	Kab.Klaten	Persentase tercukupinya kebutuhan jsa komunikasi, air, listrik, dan internet	4	4	rekening	4	rekening	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98,000,000	98,000,000	95,580,170	98	100	Disparbudpora	Persentase terwujudnya jasa kebesihan lingkungan kantor dan TIC Mandala Wisata	5	5	orang	5	orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	36,000,000	36,000,000	35,649,600	99	100	Disparbudpora	Persentase tercukupinya kebutuhan ATK	58	58	item	58	item	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36,000,000	40,000,000	38,749,900	97	100	Disparbudpora	Peersentase tercukupinya barang cetakan dan penggadaan	7	7	jenis	7	jenis	100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,000,000	6,000,000	4,420,000	74	100	Disparbudpora	persentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan buku perturan perundang-undangan	9	9	jenis	9	jenis	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	27,000,000	30,000,000	29,286,875	98	100	Disparbudpora	Persentase tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat	25	360	kali/ paket	360	kali/ paket	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350,000,000	335,000,000	334,982,253	100	100	Kabupaten/Provinsi lainnya	Persentase tercukupinya biaya untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah daerah	85	80	kali	80	kali	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40,000,000	55,000,000	54,916,500	100	100	Kab.Klaten	Persentase tercukupinya biaya untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah daerah	60	80	kali	80	kali	100
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor	87,500,000	87,500,000	78,919,188	90	100	Disparbudpora	Persentase terwujudnya jasa keamanan lingkungan kantor	5	5	orang	5	orang	100
11	Penyediaan jasa pengemudi kantor	16,000,000	16,000,000	15,599,904	97	100	Disparbudpora	Persentase tersedianya pengemudi kantor	1	1	orang	1	orang	100
12	Penyusunan perencanaan dan pelapo	17,000,000	17,000,000	16,999,750	100	100	Disparbudpora	Persentase terselesainya dokumen perencanaan dan pelaporan	10	11	Dok	11	Dok	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**295,000,000**	**391,250,000**	**373,777,226**	**96**	**100**		**terlaksananya sarana dan prasarana dalam kondisi baik**						
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75,000,000	136,600,000	127,018,240	93	100	Disparbudpora	Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	8	24	Unit	24	Unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	30,000,000	46,650,000	45,107,640	97	100	Disparbudpora	Persentase terpenuhinya Kebutuhan peralatan kantor	6	8	Unit	8	Unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,000,000	100,000,000	97,014,000	97	100	Disparbudpora	Persentase terpeliharanya bangunan gedung kantor	1	1	gedung	1	gedung	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,000,000	80,000,000	78,137,346	98	100	Disparbudpora	Persentase terpeliharanya Kendaraan dinas	22	22	Unit	22	Unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	25,000,000	28,000,000	26,500,000	95	100	Disparbudpora	Persentase terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga	41	41	Unit	41	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**32,000,000**	**32,000,000**	**31,142,450**	**97**	**100**		**Tersusunya dokumen perencanaan**						
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhitisar realisasi kinerja SKPD	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100	100	Disparbudpora	Persentase terselesainya laporan perkmebnagan fisik dan keuangan, triwulan dan akhir tahun	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
2	Monev Kegiatan SKPD	20,000,000	20,000,000	19,142,450	96	100	Disparbudpora	Persentase terlaksananya monev kegiatan	10	10	Kali	10	Kali	100
IV	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**1,766,438,000**	**2,028,438,000**	**1,967,859,910**	**97**	**100**		**Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan**						
1	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	200,000,000	220,000,000	217,280,958	99	100	Disparbudpora	Persentase tersedianya teknolohgi informasi yang digunakan sebagai bahan promosi	8	10	Jenis	10	Jenis	100
2	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	70,400,000	70,400,000	70,319,900	100	100	Disparbudpora	Persentase Terlaksananya kegiatan kerjasama	1	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
3	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	330,000,000	330,000,000	329,114,302	100	100	Kabupaten lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan promosi pariwisata	4	6	Kegiatan	6	Kegiatan	100
4	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	78,000,000	100,000,000	99,422,500	99	100	Disparbudpora	Persentase terlaksananya pembinan POKDARWIS dan terkirimnya lomba POKDARWIS dari Kab.Klaten ke Tk.Provinsi	20	23	Kelompok	23	Kelompok	100
5	Penyelenggaraan event pariwisata	175,000,000	395,000,000	393,672,550	100	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya event Pariwisata	3	6	Kegiatan	6	Kegiatan	100
6	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Pariwisata)	913,038,000	913,038,000	858,049,700	94	100	Kab.Klaten	Terciptanya SDM Pariwisata yang profesional dalam pengelolaan destinasi pariwisata dan usaha pariwisata	430	430	Orang	430	Orang	100
V	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**4,681,236,000**	**4,639,496,000**	**4,477,541,255**	**97**	**100**		**Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan**						
1	Pengembangan daerah tujuan wisata	445,000,000	445,000,000	421,475,670	95	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya opengembangan daerah tujuan wisata (desa wisata)	40	40	Lokasi	40	Lokasi	100
2	Pemeliharaan obyek wisata	830,000,000	675,000,000	619,351,000	92	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pemeliharaan obyek wisata	4	3	Lokasi	3	Lokasi	100
3	Operasional pengelolaan obyek wisata	213,600,000	326,860,000	307,882,785	94	100	Kab.Klaten	Persentase tercip[atanya pengelolaan obyek wisata yang profesional	11	11	Jenis	11	Lokasi	100
4	Penataan Obyek Wisata (DAK Bidang Pariwisata)	2,982,636,000	2,982,636,000	2,965,812,500	99	100	Kab.Klaten	Persentase terlakasananya pembangunan obyek wisata	1	1	Lokasi	1	Lokasi	100
5	Pengelolaan obyek wisata	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya kerjasama pemungutan retribusi obyek wisata di Kabupaten Klaten	1	1	Lokasi	1	Lokasi	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Penyusunan DED Destinasi Pariwisata	175,000,000	175,000,000	128,019,300	73	80	Kab.Klaten	Persentase tersusunya dokumen DED	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
VI	**Program Pengembangan Kemitraan**	**436,000,000**	**485,000,000**	**456,914,900**	**94**	**100**		**terlaksanya fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata**						
1	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	126,000,000	150,000,000	122,587,500	82	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata	3	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Pembinaan dan pengembangan ADWINDO	50,000,000	75,000,000	74,811,750	100	100	Kab.Klaten	Terkirimnya Dutra Wisata ke Kab/Kota di Jateng & Provinsi lainnya	26	50	kegiatan	50	kegiatan	100
3	Pemilihan Mas dan Mbak Klaten	200,000,000	200,000,000	199,898,750	100	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pemilihan Mas dan Mbak Klaten	90	90	peserta	90	peserta	100
4	Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi	60,000,000	60,000,000	59,616,900	99	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pembekalan dan pengiriman duta wisata ke tingkat provinsi	1	1	pasang	1	pasang	100
KECAMATAN BAYAT														
VI	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**4,500,000**	**4,500,000**	**4,390,600**	**98**	100		**Prosentase Jumlah Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata**		100	%	100	%	100
1	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	4,500,000	4,500,000	4,390,600	98	100	Kec. Bayat	Jumlah kegiatan pengembangan destinsi pariwisata		6	desa	4	desa	100
	JUMLAH TOTAL	**8,026,174,000**	**8,418,684,000**	**8,115,454,979**	**96**	**100**								**100**

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG PERTANIAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN), KECAMATAN JATINOM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN														
I	**Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1,306,954,000**	**1,106,954,000**	**928,599,370**	**83.89**	**90**		**Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran dan operasional DPKPP, UPT, UPT Wil/BP3K**	**90**	**90**	**%**			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9,000,000	9,000,000	4,125,000	45.83	90	DPKPP	Jumlah surat yang terkirim	5000	5000	surat	5000	surat	90
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200,000,000	200,000,000	126,945,383	63.47	100	DPKPP	Jumlah jenis rekening yang terbayar	41	41	jenis	41	jenis	100
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	24,000,000	24,000,000	19,056,526	79.40	100	DPKPP, BP3K	Jumlah jaminan barang milik daerah tersedia	12 unit	12 kali	unit / kali	12	kali	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63,767,000	63,767,000	54,400,446	85.31	100	DPKPP	Jumlah THL administrasi keuangan	4	4	orang	4	orang	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	214,337,000	214,337,000	187,777,733	87.61	100	DPKPP	Jumlah THL kebersihan kantor	11	11	orang	11	orang	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000	60,000,000	50,815,000	84.69	100	DPKPP, UPPT, UBT, UBI, RPH	Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia	50	50	jenis	50	jenis	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32,000,000	32,000,000	27,243,200	85.14	95	DPKPP	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	83300 lbr	3 jenis	lembar / jenis	3	lembar / jenis	95
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30,000,000	30,000,000	23,916,150	79.72	90	DPKPP, UPT dan BP3K	Jumlah dan jenis alat listrik	12	12	jenis	11	jenis	90
9	Penyediaan makanan dan minuman	65,000,000	65,000,000	61,524,000	94.65	100	DPKPP	Jumlah makanan dan minuman tersedia	3250 porsi	3250 paket	porsi / paket	3250	porsi / paket	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175,000,000	175,000,000	174,898,227	99.94	100	Jakarta, Jateng dan Provinsi lainnya	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	87	87	ok	87	ok	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	300	300	ok	300	ok	100
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	198,850,000	198,850,000	162,897,705	81.92	100	DPKPP	Jumlah THL pengamanan kantor	12	12	orang	12	orang	100
13	Penyediaan operasional UPTD	200,000,000	-	-	-	0	-	Jumlah UPT Pertanian/BP3K	7	0	unit	0	unit	-
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**975,491,000**	**995,491,000**	**908,685,000**	**91.28**	**99**		**Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan (peralatan gedung, perlengkapan gedung, perawatan gedung, perawatan lingkungan kantor dan operasional kendaraan dinas)**	**90**	**90**	**%**			
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	189,480,000	189,480,000	187,595,500	99.01	100	BP3K (Klaten Utara, Delanggu, Trucuk, Jogonalan, Jatinom, Karangdowo, Bayat) dan DPKPP	Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli	174	174	unit	174	unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	89,098,000	89,098,000	88,497,800	99.33	100	DPKPP	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	10	15	unit	15	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	163,500,000	163,500,000	150,630,000	92.13	100	DPKPP, Puskeswan Sajen, BP3K Klaten Utara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	3	unit	3	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90,000,000	110,000,000	75,019,000	68.20	100	DPKPP	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	293	293	unit	293	unit	100
5	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	70,000,000	70,000,000	47,697,700	68.14	100	DPKPP	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	38	38	unit	38	unit	100
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	199,664,000	199,664,000	191,354,000	95.84	100	BP3K (Jatinom, Jogonalan, Karangdowo, Bayat)	Jumlah gedung kantor terehabilitasi	3	4	unit	4	unit	100
7	Pengadaan papan informasi	20,000,000	20,000,000	17,274,000	86.37	95	DPKPP	Jumlah papan informasi terbeli	26 buah	26 unit	buah / unit	26	buah / unit	95
8	Penataan lingkungan kantor	153,749,000	153,749,000	150,617,000	97.96	100	DPKPP	Jumlah lingkungan kantor tertata	2 unit	2 paket	unit / paket	2	unit / paket	100
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**30,000,000**	**23,000,000**	**17,730,900**	**77.09**	**100**		**Peningkatan kinerja melalui ketepatan dan ketaatan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan**	**7**	**7**	**dokumen**			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	15,000,000	11,304,500	75.36	100	DPKPP	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	3	3	dokumen	3	dokumen	100
2	Pengembangan perencanaan teknis dan pengendalian kegiatan SKPD	15,000,000	8,000,000	6,426,400	80.33	100	DPKPP	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	3	4	dokumen	4	dokumen	100
IV	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**1,615,555,000**	**1,948,555,000**	**1,415,634,050**	**72.65**	**92**		**Persentase kelompok tani kelas madya dan utama**	**31.19**	**31.19**	**%**			
1	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	25,000,000	25,000,000	23,353,000	93.41	100	Kabupaten Klaten	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan dan temu karya pelaku agribisnis	100	100	orang	100	orang	100
2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	170,000,000	170,000,000	145,743,000	85.73	95	Kabupaten Klaten	Jumlah poktan/gapoktan dan KTNA yang dibina dan difasilitasi	240	240	kelompok	240	kelompok	95
3	Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	400,000,000	665,000,000	622,142,950	93.56	100	Ds Kebondalem Kidul Prambanan, Ds Sukorejo Wedi, Ds Ceporan Gantiwarno	Jumlah petani yang mengikuti paltihan agen hayati	50	50	orang	50	orang	100
4	Fasilitasi kelompok tani berbasis gender	52,000,000	70,000,000	63,846,500	91.21	100	Desa Sukorejo Kec. Wedi	Jumlah kelompok tani berbasis gender yang terbina dan tersosialisasi	1	1	KWT	1	KWT	100
5	Pengadaan alsintan	488,555,000	488,555,000	198,354,900	40.60	60	Kabupaten Klaten	Jumlah poktan yang menerima bantuan alsintan	22 unit	22 poktan	unit / poktan	22	unit / poktan	60
6	Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	30,000,000	30,000,000	29,975,000	99.92	100	Kabupaten Klaten	Jumlah unit pengelola jasa alsintan (UPJA) yang dibina	40	40	UPJA	40	UPJA	100
7	Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)	450,000,000	500,000,000	332,218,700	66.44	90	Kabupaten Klaten, NTT	Jumlah peserta pelatihan manajemen agribisnis tembakau dan pembinaan asosiasi pertembakauan	22 kelompok	264 orang	kelompok / orang	264	kelompok / orang	90
V	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**5,296,317,000**	**5,906,317,000**	**5,478,945,178**	**92.76**	**95**		**Luas panen (kedele, jagung, padi), produksi lada/biji kering dan kopi/wose**	**(2714 ha, 11081 ha, 66765 ha), 9.70 ton, 113.50 ton**	**(2714 ha, 11081 ha, 66765 ha), 9.70 ton, 113.50 ton**	**Ha / Ton**			

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	150,000,000	360,000,000	281,516,278	78.20	85	Kabupaten Klaten	Jumlah luasan lahan untuk pengembangan padi palawija	35	35	Ha	35	Ha	85
2	Pengembangan perbenihan/perbibitan	950,000,000	1,350,000,000	1,207,761,300	89.46	95	UBT Humo	Jumlah luasan penanaman padi, pengembangan benih padi rojolele dan hortikultura	7	8	Ha	8	Ha	95
3	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	200,000,000	200,000,000	174,998,000	87.50	95	Kec Kemalang (Ds Panggang, Ds Balerante) dan Kec Gantiwarno (Ds Muruh, Ds Sawit)	Jumlah lokasi penerima bantuan benih/bibit lada, kopi dan kelapa	1235 batang	10 lokasi	batang / lokasi	10 lokasi	batang / lokasi	95
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50,000,000	50,000,000	45,418,000	90.84	98	Kabupaten Klaten	Jumlah RDKK pupuk bersubsidi	26 kecamatan	26 kec/poktan	kecamatan / poktan	26 kec/poktan	kecamatan / poktan	98
5	Kegiatan Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi (DAK Bidang Pertanian)	3,946,317,000	3,946,317,000	3,769,251,600	95.51	100	Kabupaten Klaten	Jumlah jaringan irigasi tanah dangkal, embung, dam parit, jalan usaha tani dan lumbung pangan masyarakat yang terbangun	15	23	unit	23	unit	100
VI	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan**	**90,000,000**	**105,000,000**	**103,965,000**	**99.01**	**100**		**Promosi/bazar produk usaha pertanian**	**5**	**5**	**kali**			
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	90,000,000	105,000,000	103,965,000	99.01	100	Kab. Klaten dan Soropadan Kab. Temanggung	Jumlah promosi hasil produksi pertanian unggulan yang diikuti	5	5	kali	5	kali	100
VII	**Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan**	**2,259,000,000**	**2,750,000,000**	**2,211,041,967**	**80.40**	**99.5**		**Produksi tembakau rajang, produksi tembakau asepan, luas panen cabe**	**1091 ton, 1167 ton, 7480 ha**	**1091 ton, 1167 ton, 7480 ha**	**Ton / Ha**			
1	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DBHCHT)	300,000,000	300,000,000	226,082,750	75.36	100	Kec Gantiwarno, Trucuk, Ceper, Pedan, Manisrenggo dan Tulung	Jumlah penerima bantuan alsin pengolah lahan	11	11	unit	11	unit	100
2	Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	259,000,000	300,000,000	270,133,217	90.04	98	Kabupaten Klaten	Jumlah poktan hortikultura yang difasilitasi dan dibina	29	35	kelompok	35	kelompok	98
3	Pembangunan sarana infrastruktur pertanian	1,500,000,000	1,500,000,000	1,109,586,000	73.97	100	Trucuk, Kalikotes, Kebonarum, Bayat, Jogonalan, Karangnongko, Ceper, Tulung, Manisrenggo, Gantiwarno, Prambanan	Jumlah lokasi jaringan irigasi tersier di kawasan penghasil tembakau yang dibangun	18 desa/lokasi	18 lokasi	desa/lokasi	18 lokasi	desa/ lokasi	100
4	Penanganan pasca panen tembakau (DBHCHT)	200,000,000	650,000,000	605,240,000	93.11	100	Kec Trucuk, Tulung dan Manisrenggo	Jumlah penerima alat penanganan pasca panen tembakau	7 unit	22 kelompok	unit / kelompok	22 kelompok	unit / kelompok	100
VIII	**Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**	**228,000,000**	**560,000,000**	**535,864,572**	**95.69**	**100**		**Peningkatan kinerja penyuluh pertanian (PNS dan THL-TBPP)**	**192**	**182**	**orang**			
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	228,000,000	560,000,000	535,864,572	95.69	100	Kabupaten Klaten	Jumlah penyuluh dan petani yang mendapat pelatihan teknis	205	1282	orang	1282	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IX	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	**245,000,000**	**245,000,000**	**210,012,121**	**85.72**	**90**		**Rasio pelayanan kesehatan hewan terhadap jumlah ternak ruminansia dan unggas**	**89**	**89**	**%**			
1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	175,000,000	175,000,000	149,209,371	85.26	90	Kabupaten Klaten	Jumlah ternak yang mendapat vaksinasi anthrak dan pengawasan rabies	8000	8000	ekor	8000	ekor	90
2	Penanggulangan wabah penyakit AI	70,000,000	70,000,000	60,802,750	86.86	90	Kabupaten Klaten	Jumlah identifikasi, pemeriksaan penyakit AI dan surveilan AI	10	10	lokasi	10	lokasi	90
X	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	**1,350,000,000**	**1,450,000,000**	**1,378,854,900**	**95.09**	**98**		**Populasi sapi potong dan sapi perah, Populasi ternak ruminansia kecil kambing/domba**	**108628 ekor, 111844 ekor**	**108628 ekor, 111844 ekor**	**ekor**			
1	Pembibitan dan perawatan ternak	175,000,000	175,000,000	163,606,000	93.49	100	Pasar hewan (Prambanan, Jatinom, Pedan, Plembon, Wedi) dan Puskeswan (Ds Sajen Trucuk, Ds Jiwan Karangnongko, Ds Glagah Jatinom, Ds Tambakan Jogonalan)	Jumlah pemeriksaan status reproduksi ternak dan yankeswan	4 lokasi	9000 ekor	lokasi / ekor	9000 ekor	lokasi / ekor	100
2	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1,100,000,000	1,100,000,000	1,060,468,900	96.41	100	Ds Ketitang Juwiring, ds Demangan Karangdowo, Ds Gedong Tulung, Ds Jetis Tulung, Ds Bolopleret Juwiring, Ds Kaligawe Pedan	Jumlah bantuan bibit ternak domba dan ternak itik	27	27	kelompok	27	kelompok	100
3	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	75,000,000	175,000,000	154,780,000	88.45	95	Kec Jatinom, Tulung, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Karangnongko	Jumlah peternak yang dibina	400	1600	peternak	1600	peternak	95
XI	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**	**455,000,000**	**455,000,000**	**391,253,650**	**85.99**	**100.00**		**Pembinaan usaha peternakan rakyat**	**200**	**200**	**lokasi**			
1	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	70,000,000	70,000,000	50,820,000	72.60	100	Pasar tradisional di 26 kecamatan	Jumlah lokasi yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan produk pangan/bahan asal hewan	40	40	lokasi	40	lokasi	100
2	Pengembangan agribisnis peternakan	110,000,000	110,000,000	100,952,800	91.78	100	Usaha Peternakan Rakyat di 26 kecamatan	Jumlah usaha peternakan rakyat yang dibina	200	200	unit usaha	200	unit usaha	100
3	Pengembangan aneka pengolahan produk asal ternak	75,000,000	75,000,000	68,565,000	91.42	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang dibina	33	33	unit usaha	33	unit usaha	100
4	Peningkatan sarana prasarana rumah potong hewan ruminansia (RPH-R)	200,000,000	200,000,000	170,915,850	85.46	100	RPH Kota dan RPH Pedan	Jumlah RPH yang direhab sesuai standar	2	2	lokasi	2	lokasi	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Peningkatan Ketahanan Pangan**	**170,000,000**	**175,000,000**	**139,018,220**	**79**	**100**	Kab. Klaten, Prov. Jateng, DKI/Jabar	Alokasi Pupuk Bersubsidi	88,035	88,035	ton		ton	
								Penerimaan Pendapatan DBHCHT	15,039,015,000	15,039,015,000	rupiah	15,196,498,000	rupiah	101
1	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian	60,000,000	60,000,000	50,314,400	84	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Jumlah frekuensi koord, monitoring dan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi	51	51	kegiatan	57	kegiatan	112
2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau	110,000,000	115,000,000	88,703,820	77	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng, DKI/Jabar	Jumlah frekuensi koord, monitoring dan evaluasi keg DBHCHT	30	31	kegiatan	35	kegiatan	113
KECAMATAN JATINOM														
I	**Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.**	**125,000,000**	**125,000,000**	**123,455,000**	**99**	**100**								
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.	125,000,000	125,000,000	123,455,000	99	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya promosi hasil pertanian/perkebunan	1	1	paket	1	paket	100
	JUMLAH TOTAL	**14,146,317,000**	**15,845,317,000**	**13,843,059,928**	**87.4**	**97**								

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
I	**Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**	**31,600,000,000**	**49,800,000,000**	**44,570,037,708**	**89%**									
1	Pengadaan penerangan Jalan Umum (PJU)	4,950,000,000	4,950,000,000	4,913,191,850	99%	84	Kabupaten Klaten	jumlah titik PJU yang terpasang	350	350	titik	351	titik	100%
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1,650,000,000	1,850,000,000	1,292,169,793	70%	91	Kabupaten Klaten	Bahan pelengkap PJU yang diadakan	2	2	paket	2	paket	100%
3	Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)	25,000,000,000	25,000,000,000	20,724,217,065	83%	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pajak PJU yang dibayar	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
4	Pengadaan dan pemasangan PJU tenaga surya Kabupaten Klaten (Bankeu Provinsi)	-	18,000,000,000	17,640,459,000	98%	100	Kabupaten Klaten	Jumlah PJU terbangun	552	552	titik	552	titik	100%
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
I	**Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**	**110,000,000**	**110,000,000**	**61,144,250**	**56**	**100**	**Kab. Klaten, Prov. Jateng**	**Prosentase Laporan Penggunaan Energi Listrik dan Air**	**51**	**51**	**%**	**63**	**%**	**124**
1	Peningkatan Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi	110,000,000	110,000,000	61,144,250	56	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Jumlah frekuensi koordinasi dan monev dalam 1 tahun	48	48	kegiatan	52	kegiatan	108
	JUMLAH TOTAL	**31,710,000,000**	**49,910,000,000**	**44,631,181,958**	**89.4**									

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG PERDAGANGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM, SATPOL PP, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4,898,930,000**	**4,182,430,000**	**4,014,407,713**	**95.98**	**100**	**DisDagkop UKM**	**Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran**						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,932,000	97.73	100	DisDagkop UKM	Jumlah benda pos yang tersedia	585	585	buah	585	buah	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	414,800,000	430,800,000	374,342,032	86.89	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis rekening yang terbayar	4	4	jenis	4	jenis	100
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	3,000,000	3,000,000	2,397,308	79.91	100	DisDagkop UKM	Jumlah gedung yang memiliki rekening PBB	7	7	gedung	7	gedung	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,910,162,000	1,910,162,000	1,878,606,558	98.35	100	DisDagkop UKM	Jumlah tenaga harian lepas (THL)	139	139	org	139	org	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,665,500,000	734,100,000	707,629,050	96.39	100	DisDagkop UKM	Jumlah tenaga harian lepas (THL) kebersihan kantor	35	37	org	37	org	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	70,000,000	70,000,000	68,744,750	98.21	100	DisDagkop UKM	Jumlah ATK yang tersedia untuk dinas	46	46	jenis	46	jenis	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	215,635,000	265,635,000	262,358,000	98.77	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10	10	jenis	10	jenis	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,500,000	35,500,000	34,744,500	97.87	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis peralatan listrik yang tersedia	18	18	jenis	18	jenis	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,500,000	7,500,000	6,040,000	80.53	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis surat kabar yang tersedia	5	5	jenis	5	jenis	100
10	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000	75,000,000	50,231,200	66.97	100	DisDagkop UKM	Jumlah frekuensi rapat koordinasi	1266	1960	kali	1960	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	267,835,000	367,835,000	354,690,849	96.43	100	DisDagkop UKM	Jumlah frekuensi koordinasi ke luar daerah	250	350	kali	350	kali	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	75,000,000	75,000,000	74,750,000	99.67	100	DisDagkop UKM	Jumlah frekuensi koordinasi ke dalam daerah	412	412	kali	412	kali	100
13	Penyediaan jasa keamanan kantor	176,955,000	190,855,000	183,157,894	95.97	100	DisDagkop UKM	Jumlah tenaga harian lepas (THL) dan tenaga kontrak petugas keamanan	12	14	org	14	org	100
14	Penyediaan jasa pengemudi kantor	14,043,000	14,043,000	13,783,572	98.15	100	DisDagkop UKM	Jumlah THL pengemudi kantor	1	1	org	1	org	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1,536,000,000**	**2,297,349,000**	**2,072,896,776**	**90.23**		**DisDagkop UKM**	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik						
15	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	95,000,000	188,350,000	166,705,900	88.51	100	DisDagkop UKM	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	5	8	unit	8	unit	100
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	442,850,000	666,939,000	565,363,700	84.77	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	4	7	jenis	7	jenis	100
17	Pengadaan peralatan gedung kantor	231,150,000	258,310,000	251,409,200	97.33	100	DisDagkop UKM	Jumlah perlegkapan gedung kantor yang tersedia	3	4	jenis	4	jenis	
18	Pengadaan mebeleur	67,000,000	93,750,000	83,066,000	88.60	100	DisDagkop UKM	Jumlah mebelair yang tersedia	6	6	jenis	6	jenis	100
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	200,000,000	197,817,800	98.91	100	DisDagkop UKM	Jumlah gedung yang terpelihara	1	1	lokasi	1	lokasi	100
20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75,000,000	75,000,000	63,481,776	84.64	100	DisDagkop UKM	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	54	54	unit	54	unit	100
21	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	75,000,000	95,000,000	80,344,500	84.57	100	DisDagkop UKM	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4	4	jenis	4	jenis	100
22	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	20,000,000	19,069,000	95.35	100	DisDagkop UKM	Jumlah mebelair yang dipelihara	0	5	jenis	5	jenis	100
23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	500,000,000	500,000,000	447,361,400	89.47	100	DisDagkop UKM	Jumlah gedung yang direhab	1	1	unit	1	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
24	Penataan lingkungan kantor	-	200,000,000	198,277,500	99.14	100	DisDagkop UKM	Jumlah lingkungan kantor tertata	0	1	lokasi	1	lokasi	100
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**4,000,000**	**4,000,000**	**3,445,400**	**86.14**		**DisDagkop UKM**	Prosentase OPD yang menyusun LKPJ secara baik						
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,000,000	4,000,000	3,445,400	86.14	100	DisDagkop UKM	Jumlah dokumen laporan yang disusun	1	1	dokumen	1	dokumen	100
IV	**Program Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Perdagangan**	**765,000,000**	**1,075,000,000**	**788,143,137**	**73.32**			Prosentase UMKM yang mmiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal Persentase cakupan pelayanan UTTP						
34	Pensertifikasian hak merk	50,000,000	75,000,000	73,323,525	97.76	100	Kab. Klaten	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pengajuan hak merk	100	150	org	150	org	100
35	Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT)	65,000,000	100,000,000	79,373,012	79.37	100	Kab. Klaten	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pengajuan ijin PIRT	20	40	org	40	org	100
36	Pengawasan, pemantauan dan penyampaian informasi tembakau yang dilekati pita cukai palsu	-	150,000,000	128,834,000	85.89	100	Kab. Klaten	Jumlah orang yang mendapat peahaman tetang pita cukai palsu		200	org	200	org	100
37	Pengadaan sarana pendukung unit metrologi legal (DAK bid. Pasar)	650,000,000	750,000,000	506,612,600	67.55	100	Kab. Klaten	Tersedianya pendukung pelayanan tera berupa peralatan standar pelayanan tera	41	41	jenis	41	jenis	100
V	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**4,012,042,000**	**5,853,542,000**	**5,039,185,575**	**86.09**			Persentase pasar pemda yang di revitalisasi Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang Persentase pendapatan pasar terhadap PAD						
1	Pembinaan, pengawasan dan pengadilan usaha perdagangan	286,670,000	286,670,000	257,913,850	89.97	0.00	DisDagkop UKM	Jumlah pelaku usaha yang terbina	250	250	org	250	org	100
2	Penyelenggaraan pasar murah	48,500,000	60,000,000	48,419,600	80.70	100	DisDagkop UKM	jumlah penyelenggaraan pasar murah	6	8	kali	8	kali	100
3	Pembangunan pasar	500,000,000	500,000,000	482,899,125	96.58	100	Pasar Buah Sungkur	Jumlah kios pasar yang dibangun	25	25	unit	25	unit	100
4	Rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pasar	1,625,000,000	2,990,000,000	2,671,027,900	89.33	100	Pasar Sidoharjo Bayat, Masaran Cawas, Wedi, Gabus, Gayamprit, Puluhwatu, Srago, Ngepos dan pasar Klaten III Lantai, Pasar Hewan Prambanan, Jeblog, Minggiran, Taji, Tegalgondo, Juwiring, Kraguman, Jabung, Manisrenggo, Ngendo	Jumlah bangunan pasar yang direhab/dipelihara	9	19	pasar	19	pasar	100
5	Penataan lingkungan pasar	-	210,000,000	204,432,700	97.35	100	Pasar Buah Sungkur	Jumlah los terpasang pintu		48	petak	48	petak	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Penyusunan dokumen pembangunan pasar	-	200,000,000	94,450,400	47.23	100	Pasar Klaten III Lantai	Jumlah dokumen pembangunan pasar yang disusun		3	dokumen	3	dokumen	100
7	Revitalisasi pasar (DAK bid. Pasar)	1,426,872,000	1,326,872,000	1,073,112,050	80.88	100	Pasar Jatinom, Kecamatan Jatinom	Pembanguan kios pasar Jatinom	1	1	paket	1	unit	100
8	Pembinaan dan pengelolaan pendapatan pasar	100,000,000	230,000,000	206,929,950	89.97	100	Pasar di kab. Klaten	Jumlah tenaga pengelola pasar yang dibina	300	300	org	300	org	100
9	Penyelesaian status aset pasar	25,000,000	50,000,000	-	-	100	Pasar Delanggu dan Pasar Plasa	Jumlah DED pasar yang disusun	1	1	dokumen	-	dokumen	0
IX	**Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**	**200,000,000**	**410,000,000**	**394,312,760**	96.17		DisDagkop UKM	Prosentase PKL dan Asongan yang terdaftar						
48	Pembinaan dan pemberdayaan pedagang kakilima	200,000,000	410,000,000	394,312,760	96.17	100	Kec. Prambanan, Pedan, Delanggu, Cawas, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Klaten Utara, Jatinom	Jumlah PKL yang dibina dan didata Kabupaten Klaten	1120	1,120	org	1,120	0rg	100
SATPOL PP														
VII	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**100,000,000**	**100,000,000**	**90,611,050**				**Persentase konsumen yang terlindungi**	**100**	**100**				
1	Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	100,000,000	100,000,000	90,611,050	91	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai iklegal	20	20	kegiatan	Terlaksanan ya kegiatan operasi Cukai ilegal	kegiatan	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
V	**Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**175,000,000**	**175,000,000**	**97,377,000**	**56**	**100**		**Tingkat Inflasi Tahunan**	**(3,5+-1)**	**(3,5+-1)**	**%**		**%**	
1	Peningkatan Koordinasi dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Pokok	175,000,000	175,000,000	97,377,000	56	100	Kab. Klaten	Jumlah frekuensi koord di Prov. Jateng dan Pusat, koord TPID dan pemantauan distribusi LPG 3 kg	70	70	kegiatan	53	kegiatan	76
	JUMLAH TOTAL	**11,690,972,000**	**14,097,321,000**	**12,500,379,411**	**89**									

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG PERINDUSTRIAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN), KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**454,000,000**	**480,942,000**	**436,166,799**										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9,600,000	9,600,000	8,400,000	87.50	100	Disperinaker	Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik	24	24	kali	24	kali	100
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5,140,000	5,140,000	5,126,850	99.74	100	Disperinaker	Cakupan tertib administrasi keuangan yang optimal	12	12	kali	12	kali	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	20,000,000	19,086,200	95.43	100	Disperinaker	Jumlah jenis ATK tersedia	48	48	jenis	48	jenis	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13,600,000	13,600,000	13,537,000	99.54	100	Disperinaker	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	8	8	jenis	8	jenis	100
5	Penyediaan peralatan rumah tangga	11,900,000	11,900,000	11,700,500	98.32	100	Disperinaker	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	8	8	buah	8	buah	100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,560,000	4,560,000	4,560,000	100.00	100	Disperinaker	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	4	4	buah	4	buah	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	35,000,000	35,000,000	12,245,000	34.99	100	Disperinaker	Jumlah makanan dan minuman tersedia	53	53	paket	53	paket	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	183,800,000	195,000,000	194,442,318	99.71	100	Luar daerah Kab. Klaten	Jumlah frekwensi perjalanan luar daerah	180	190	kali	190	kali	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40,000,000	50,000,000	33,853,707	67.71	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekwensi perjalanan dalam daerah	150	160	kali	160	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	42,700,000	42,700,000	42,652,704	99.89	100	Disperinaker	Jumlah THL jasa pengamanan kantor	3	3	orang	3	orang	100
11	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	10,000,000	10,000,000	7,988,000	79.88	100	Disperinaker	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	60	4	Dokumen	4	Dokumen	100
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	77,700,000	83,442,000	82,574,520	98.96	100	Disperinaker	Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor	6	9	orang	9	orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**336,000,000**	**385,500,000**	**364,707,225**	94.61									
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	151,000,000	151,000,000	144,203,200	95.50	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	17	17	unit	17	unit	100
2	Pengadaan mebeleur	47,500,000	97,000,000	86,350,000	89.02	100	Kabupaten Klaten	Jumlah mebeleur terbeli	30	39	unit	39	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31,500,000	31,500,000	30,674,000	97.38	100	Disperinaker .Melikan dan Gergunung	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70,000,000	70,000,000	67,697,025	96.71	100	Disperinaker	Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara	19	19	unit	19	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36,000,000	36,000,000	35,783,000	99.40	100	Disperinaker	Jenis peralatan gedung kantor terpelihara	12	12	unit	12	unit	100
III	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**662,000,000**	**912,000,000**	**834,655,750**	91.52									

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri	100,000,000	200,000,000	194,360,500	97.18	100	Kemalang.Wedi, Jogonalan, Karanganom, Trucuk, Bayat, Polanharjo, Cawas, Wonosari	Jumlah pembinaan IKM Klaster Industri	300	750	orang	750	orang	100
2	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif	150,000,000	300,000,000	284,691,000	94.90	100	Cawas, Bayat, Wedi	Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi industri kreatif	120	240	orang	240	orang	100
3	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri	112,000,000	112,000,000	91,849,000	82.01	100	Kabupaten Klaten	Jumlah lokasi usaha industri di Kab. Klaten yang dipantau	300	300	orang	300	orang	100
4	Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian	100,000,000	100,000,000	87,027,500	87.03	100	KLaten Utara, Ceper, Prambanan, Polanharjo, Juwiring, Delanggu	Jumlah IKM yang disosialisasikan tentang Undang-undang Industri	300	300	orang	300	orang	100
5	Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM	200,000,000	200,000,000	176,727,750	88.36	100	Kab.Klaten	Jumlah data profil IKM yang divalidasi dan memiliki daya saing	1000	4	dokumen	4	dokumen	100
IV	**Program peningkatan kemampuan teknologi industri**	**125,000,000**	**225,000,000**	**189,619,500**	84.28									
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	125,000,000	125,000,000	96,412,500	77.13	100	Wedi	Jumlah IKM yang dibina untuk meningkatkan kualitas produk	150	150	orang	150	orang	100
2	Temu Kemitraan Usaha IKM Kab. Klaten	0	100,000,000	93,207,000	93.21	100	Kabupaten Klaten	Jumlah IKM yang diundang dalam temu kemitraan usaha IKM dan industri besar di Kab. Klaten	200	200	orang	200	orang	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
I	**Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**580,000,000**	**705,000,000**	**599,516,027**	**85**	**100**	**Kab. Klaten, Prov. Jateng, Luar Jawa, DKI Jakarta/Pusat**	**Jumlah Debitur Penerima KUR**	**30,700**	**30,700**	**orang**		**orang**	**0**
1	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian	580,000,000	705,000,000	599,516,027	85	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng, Luar Jawa, DKI Jakarta/Pusat	Jumlah frekuensi koord perindustrian, dekranasda, KUR dan TPAKD, keg. Dekranas	72	73	kegiatan	81	kegiatan	111
KEC. KLATEN UTARA														
I	**Program pengembangan industri kecil dan menegah**	5,000,000	5,000,000	4,975,000			Kec.Klaten Utara	**Program pengembangan industri kecil dan menegah**	5,000,000					
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	5,000,000	5,000,000	4,975,000.00	99.50	100	Kec.Klaten Utara	Pengembangan produk unggulan wilayah	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
KEC. KLATEN TENGAH														
I	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,904,000**	98%	98%	Kec.Klaten Selatan	Prosentase produk unggula						
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	5,000,000	5,000,000	4,904,000	98%	98%	Kec.Klaten Selatan	Jumlah pengembangan produk unggulan wilayah	1	1	kelompok	1	kelompok	100
KEC. NGAWEN														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,950,000**	**99%**	100%								
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	5,000,000	5,000,000	4,950,000	**99%**	100%	Kec. Ngawen	Jumlah desa wiasata yang terkuatan dan rintisan desa wisata yang semakin berkembang	**5**	5	**desa**	**5**	desa	100
KEC. KEBONARUM														
I	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**2,965,000.00**	**2,965,000.00**	**2,965,000.00**	**100**	**100**	**Kec Kebonarum**	**Prosentase Pengembangan Industri kecil dan menengah**						
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	2965000	2,965,000.00	2,965,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah UMKM	1	1.00	tim	1.00	tim	100
KEC. WEDI														
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**	7,500,000	7,500,000	6,549,500										
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	7,500,000	7,500,000	6,549,500	87.33	100	Kecamatan Wedi	Jumlah UMKM	19	19	kelompok	19	kelompok	100
KEC. JOGONALAN														
I	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**5,000,000**	**5,000,000**	4,207,000	**84.14**									
1	Pengembangan produk unggulan daerah	5,000,000	5,000,000	4,207,000	84.14	100	Kec. Jogonalan	Jumlah desa yg mengembangkan produk unggulan	18	18	desa	18	desa	100
KEC. GANTIWARNO														
I	**Program Pengembangan industri kecil dan menengah**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,997,500**										
1	Pengembangan Produk Unggulan wilayah	5,000,000	5,000,000	4,997,500	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya pengembangan produk unggulan wilayah mengembang	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
KEC. PRAMBANAN														
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**	**5,500,000**	**5,500,000**	**4,950,000**	**90%**	**100%**		**Prosentase pemenuhan pengembangan industri kecil dan menengah**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	5,500,000	5,500,000	4,950,000	90%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah desa wisata pengembangan produk unggulan	4	4	desa	4	desa	**100**

KECAMATAN MANISRENGGO														
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,999,000**										
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	5,000,000	5,000,000	4,999,000	99.98	100	Kec. Manisrenggo	jumlah fasilitasi produk unggulan wilayah	16	16	desa	16	desa	100

KECAMATAN KEMALANG

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Pengembangan Industri kecil dan menengah**	**5,000,000.00**	**6,500,000.00**	**5,668,000.00**	**87.20**	**100.00**								
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	5,000,000.00	6,500,000.00	5,668,000.00	87.20	**100**	Kecamatan Kemalang	Jumlah produk unggulan yang dikembangkan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
KECAMATAN KARANGNONGKO														
I	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**15,930,000**	**15,930,000**	**15,725,000**	98.71	98.71	Kec. Karangnongko							
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	10,930,000	10,930,000	10,800,000	98.81	98.81	Kec. Karangnongko	jumlah Pengembangan produk unggulan wilayah terpenuhi	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100.00%
2.	Peningkatan koordinasi,pembinaan dan pengembangan perindustrian	5,000,000.00	5,000,000	4,925,000	98.50	98.50	Kec. Karangnongko	jumlah Peningkatan koordinasi,pembinaan dan pengembangan perindustrian terpenuhi	5	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100.00%
KECAMATAN KARANGANOM														
I	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	3,000,000	3,000,000	426,000				**Persentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**						
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	3,000,000	3,000,000	426,000	14	20	Kecamatan Karanganom	Jumlah produk yang dikembangkan	3	3	Produk	0	Produk	0
KECAMATAN TULUNG														
I	**Program Pengembangan Indrustri Kecil dan Menengah**	**5,000,000**	**5,000,000**	**3,900,000**				**Persentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**						
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	5,000,000	5,000,000	3,900,000	78	100	Kec Tulung	Jumlah produk yang dikembangkan	3	3	Produk	3	Produk	100
KECAMATAN POLANHARJO														
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**	**6,000,000**	**6,000,000**	5,987,000	100%	100%								
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	6,000,000	6,000,000	5,987,000	100%	100%	Kec. Polanharjo	Jumlah Desa Wisata Yang dikembangkan	18	18	Desa	18	Desa	100%
KECAMATAN DELANGGU														
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,457,800**										
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	3,500,000	3,500,000	3,457,800	98.79	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang dibina kecamatan	2	2	desa	2	desa	100
KECAMATAN JUWIRING														
I	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**6,852,000**	**6,852,000**	**1,892,500**			Kec. Juwiring							
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	6,852,000	6,852,000	1,892,500	28%	40	Kec. Juwiring	jumlah desa yang berpotensi produk unggulan	19	19	desa	19	desa	100
KECAMATAN CEPER														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**20,000,000**	**20,000,000**	**9,420,000.00**										
1	pengembangan produk unggulan wilayah	20,000,000	20,000,000	9,420,000.00	47%	30	Kec Ceper	jumlah desa unggulan (pemintalan benang) desa jombor	1	1	desa	1	desa	100
KECAMATAN PEDAN														
I	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**100.00**	**100.00**	Kecamatan Pedan							
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah desa unggulan	14	14	desa	14	desa	100%
KECAMATAN KARANGDOWO														
I	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**2,985,500.00**	**99.52**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	3,000,000.00	3,000,000.00	2,985,500.00	99.52	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Produk Unggulan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
KECAMATAN TRUCUK														
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**	**4,500,000**	**4,500,000**	**4,500,000**										
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah pengembangan produk unggulan wilayah	19 kelompok	19	kelompok	19	kelompok	100
	JUMLAH	**2,278,247,000**	**2,833,689,000**	**2,527,124,101**	**89.2**									

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG TRANSMIGRASI

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA														
I	**Program pengembangan wilayah transmigrasi**	**218,000,000**	**218,000,000**	**177,255,850**	81.31									
1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	50,000,000	50,000,000	49,215,000.00	98.43	100	2 Kabupaten, 2 Provinsi	Jumlah MUO atau kerjasama antara Kabupaten / Provinsi yang dituju dengan Kabupaten Klaten	2	2	Lokasi	2	Lokasi	100
2	Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi	53,000,000	53,000,000	49,646,250.00	93.67	100	2 Kabupaten 2 Propinsi	Jumlah Kab/Prov lokasi penempatan transmigrans	2	2	lokasi	2	lokasi	100
3	Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran	115,000,000	115,000,000	78,394,600.00	68.17	70	2 Kabupaten, 2 Propinsi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	20	20	KK	14	KK	70
II	**Program Transmigrasi lokal**	**32,000,000**	**32,000,000**	**26,592,750**	83.10									
1	Penyuluhan transmigrasi lokal	32,000,000	32,000,000	26,592,750.00	83.10	100	Kabupaten Klaten	Jumlah penyuluhan calon transmigrasi	5	5	kali	5	kali	100
JUMLAH TOTAL		**250,000,000**	**250,000,000**	**203,848,600**	**81.5**	**100**								**93**

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG TENAGA KERJA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERINDUSTRIAN & TENAGA KERJA (DISPERINAKER)														
I	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**355,000,000**	**355,000,000**	**318,335,000**	**89.67**	**90**								**90**
1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	300,000,000	300,000,000	285,656,000	95.22	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pencari kerja Miskin yang dilatih otomotif	40	40	orang	40	orang	100
							Kabupaten Klaten	Jumlah pencari kerja miskin yang dilatih las	40	40	orang	40	orang	100
2	Pembinaan Tenaga Kerja AKAD	55,000,000	55,000,000	32,679,000	59.42	80	Kabupaten Klaten	Jumlah Tenaga Kerja AKAD yang dibina	200	200	orang	160	orang	80
II	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**312,000,000**	**327,000,000**	**263,282,920**	**80.51**	**100**								**100**
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	75,000,000	75,000,000	51,799,420	69.07	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	60,000,000	60,000,000	41,329,000	68.88	100	Kabupaten Klaten	Jumlah Pencari kerja yang disosialisasi	600	600	orang	600	orang	100
3	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	25,000,000	25,000,000	13,927,500	55.71	100	Kabupaten Klaten	Jumlah perusahaan yang dipantau jenis lowongan kerjanya	50	50	perusahaan	50	perusahaan	100
4	Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja	125,000,000	140,000,000	136,600,500	97.57	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pencari kerja yang ikut Job Market Fair	2,500	2,500	orang	2,500	orang	100
5	Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK	27,000,000	27,000,000	19,626,500	72.69	100	Kabupaten Klaten	Jumlah Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK	50	50	lembaga	50	lembaga	100
III	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**197,000,000**	**197,000,000**	**178,475,154**	**90.60**	**100**								**100**
1	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	19,000,000	19,000,000	18,497,400	97.35	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pengusaha dan pekerja yang ikut sosialisasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	60	60	orang	60	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja	16,000,000	16,000,000	15,434,900	96.47	100	Kabupaten Klaten	Jumlah serikat pekerja yang disosialisasi agar lebih meningkat SDM-nya	60	60	orang	60	orang	100
3	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	40,000,000	40,000,000	38,125,500	95.31	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pemerintah, pekerja dan pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis	60	60	orang	60	orang	100
4	Operasional Dewan Pengupahan	30,000,000	30,000,000	28,241,799	94.14	100	Kabupaten Klaten	Jumlah perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala upah	30	30	perusahaan	30	perusahaan	100
5	Sosialisasi Upah Minimum	22,000,000	22,000,000	20,340,305	92.46	100	Kabupaten Klaten	Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah Minimum	100	100	orang	100	orang	100
6	Penyelesaian Kasus PHI/PHK	12,000,000	12,000,000	10,528,000	87.73	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kasus PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja	15	15	orang	15	orang	100
7	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan	58,000,000	58,000,000	47,307,250	81.56	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pengusaha dan pekerja yang dilatih cara membuat Peraturan Perusahaan Jumlah pengusaha yang dilatih membuat struktur dan skala upah	160	160	orang	160	orang	100
JUMLAH TOTAL		**864,000,000**	**879,000,000**	**760,093,074**	**86.47**	**97**								**97**

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB														
I	**Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**120,000,000**	**180,000,000**	**170,441,070**	**94.7**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Produk kebijakan PUG dan Anak**	**3**	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	**100**
1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100,000,000	160,000,000	151,237,570	94.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait kesetaraan gender	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Advokasi Keadilan Restoratif	20,000,000	20,000,000	19,203,500	96.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah aparat penegak hukum yang menjadi peserta advokasi keadilan restoratif Dinas Sosial, PP,PA, dan KB	100	100	orang	100	orang	100
II	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**60,000,000**	**110,000,000**	**62,610,570**	**56.9**	**93.3**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender**	**19**	**19**	**OPD**	**19**	**OPD**	**100**
3	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	10,000,000	10,000,000	9,964,500	99.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah pusat pelayanan terpadu di tingkat Kabupaten yang mampu memfasilitasi 26 Kecamatan Dinsos P3AKB	26	26	PPT	26	PPT	100
4	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	40,000,000	90,000,000	43,111,320	47.9	80	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah OPD yang melaksanakan PUG dan PPRG di kabupaten Klaten	20	20	OPD	20	OPD	100
								Jumlah dokumen kebijakan pengarusutamaan gender	0	1	dokumen	0	dokumen	0
5	Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	10,000,000	10,000,000	9,534,750	95.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah OPD yang menyediakan data gender da anak OPD Kab Klaten	20	20	OPD	20	OPD	100
III	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**	**107,500,000**	**107,500,000**	**100,495,850**	**93.5**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan**	**60**	**60**	**indeks**	**60**	**indeks**	**100**
6	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	7,500,000	7,500,000	5,644,500	75.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah data/laporan korban kekerasan Dinas Sosial, PP,PA dan KB	60	60	laporan	60	laporan	100
7	Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak	100,000,000	100,000,000	94,851,350	94.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah sekolah SMP yang memahami deteksi dini kekerasan terhadap anak SMP Dinsos P3AKB	3	3	sekolah	3	sekolah	100
IV	**Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**202,500,000**	**297,500,000**	**282,329,090**	**94.9**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**jumlah forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan**	**20**	**20**	**forum anak**	**20**	**forum anak**	**100**
8	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak	100,000,000	120,000,000	115,758,190	96.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah peserta kegiatan koordinasi dan pemberdayaan forum anak	200	200	orang	200	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	25,000,000	25,000,000	22,534,400	90.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah pengembangan dan replikasi kelurahan/desa layak anak Dinas Sosial, PP, PA dan KB	15	15	Desa Layak Anak	15	Desa Layak Anak	100
10	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi	27,500,000	27,500,000	19,144,100	69.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kader perempuan yang mengikuti pelatihan tata rias rambut dan wajah di 26 kecamatan	52	52	kader	52	kader	100
11	Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita	50,000,000	125,000,000	124,892,400	99.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah organisasi wanita dharma wanita persatuan Kab Klaten	1	1	organisasi	1	organisasi	100
	JUMLAH TOTAL	**490,000,000**	**695,000,000**	**615,876,580**	**88.6**	**98**								**100**

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PANGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN														
I	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**1,290,000,000**	**1,436,150,000**	**1,324,289,220**	**92.21**	**100.00**								
1	Pengembangan cadangan pangan daerah	100,000,000	100,000,000	94,200,000	94.20	100	Desa rawan pangan di Kab. Klaten	Jumlah stok GKG di gudang cadangan pangan	11.25	11.25	ton	11.25	ton	100
2	Pembinaan dan pengembangan desa mandiri / rawan pangan	40,000,000	40,000,000	35,937,500	89.84	100	30 Desa di 6 kecamatan	Jumlah kelompok mandiri pangan/replika yang terbina	30 desa/kel	30 kelompok	desa / kel	30 kelompok	desa / kel	100
3	Pengembangan diversifikasi pangan	150,000,000	200,000,000	156,861,470	78.43	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	50	50	orang	50	orang	100
4	Pembinaan dan pengembangan lumbung pangan	90,000,000	136,150,000	133,846,000	98.31	100	Gapoktan Ds Tirtomarto Cawas, Gapoktan Ds Karangduren Kebonarum dan 29 desa di 10 kecamatan	Jumlah peserta pelatihan kelompok lumbung pangan	30 orang	30 kelompok	orang / kelompok	30 kelompok	orang / kelompok	100
5	Penyuluhan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan	70,000,000	70,000,000	61,528,700	87.90	100	Kabupaten Klaten	Jumlah produsen dan pelaku usaha pangan segar/olahan yang dibina	150	150	orang	150	orang	100
6	Peningkatan dan pemberdayaan dewan ketahanan pangan	50,000,000	50,000,000	45,652,700	91.31	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta lokakarya dewan ketahanan pangan Kab. Klaten	100	100	orang	100	orang	100
7	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	100,000,000	100,000,000	90,117,250	90.12	100	Ds Kemiri, Wonoboyo, Ngering, Joho, Geneng	Jumlah kelompok penerima bantuan pemanfaatan lahan pekarangan	6	5	kelompok	5	kelompok	100
8	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	110,000,000	110,000,000	108,948,100	99.04	100	Ds Karangjoho Karangdowo dan Ds Bener Wonosari	Jumlah gapoktan yang mengikuti pelatihan administrasi	2	2	gapoktan	2	gapoktan	100
9	Fasilitasi distribusi dan akses pangan	80,000,000	80,000,000	75,501,300	94.38	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pendampingan gerakan serap gabah petani	4	4	kali	4	kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
10	Pengembangan Rumah Pangan Lestari	500,000,000	550,000,000	521,696,200	94.85	100	Kabupaten Klaten	Jumlah KWT yang menerima bantuan pengembangan rumah pangan lestari	26	11	KWT	11	KWT	100
	JUMLAH TOTAL	**1,290,000,000**	**1,436,150,000**	**1,324,289,220**	**92.21**	**100**								**100**

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DPU DAN PR, KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN (DLHK)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**449,400,000**	**625,026,000**	**577,278,239**				Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD						99.2
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,550,000	2,550,000	2,541,000	99.6	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah surat yang dikirim	900	900	surat	900	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,800,000	60,800,000	44,555,159	73.3	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor yang terbayarkan	3	3	rekening	3	rekening	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	58,000,000	58,000,000	41,411,360	71.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah tenaga administrasi perkantoran/keuangan	3	3	orang	3	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34,000,000	34,000,000	32,880,740	96.7	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2	2	orang	2	orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	40,000,000	39,750,000	99.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah alat tulis kantor	55	55	Jenis	55	jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000	12,500,000	12,362,050	98.9	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah barang cetak dan penggandaan dokumen kantor	11	11	Jenis	11	Jenis	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	4,963,500	99.3	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	12	12	Jenis	12	Jenis	100%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,000,000	8,000,000	7,644,000	95.6	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan	8	8	macam	8	macam	100%
9	Penyediaan makanan dan minuman	26,550,000	43,725,000	36,806,000	84.2	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah rapat, rakor dan pertemuan pada Dinas LHK	30	30	kali	28	kali	93%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	150,000,000	243,951,000	240,189,350	98.5	100	Luar Daerah Kab Klaten	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	50	50	kali	50	kali	100%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	25,000,000	45,000,000	44,973,000	99.9	100	Kabupaten Klaten	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	45	45	kali	45	kali	100%
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	42,500,000	42,500,000	40,950,360	96.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah jasa keamanan kantor	3	3	orang	3	orang	100%
13	Penyediaan jasa pengemudi	17,000,000	17,000,000	16,431,120	96.7	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK	1	1	orang	1	orang	100%
14	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah		12,000,000	11,820,600	98.5	100	DLHK Kab Klaten		12	12	buah	12	buah	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	**153,000,000**	**569,500,000**	**530,432,236**	93.1			Persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran yang layak dan memadai						
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10,000,000	16,500,000	11,100,000	67.3	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah sarpras perlengkapan gedung kantor	5	5	Jenis	5	Jenis	100%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	10,000,000	5,300,000	53.0	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah sarpras kantor/aparatur pemerintah yang memadai (pengisian peralatan kantor ruang arsip/peralatan kerja, penataan sarpras kerja)	3	3	Jenis	3	Jenis	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	50,000,000	49,427,000	98.9	100	DLHK Kab Klaten	Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	12	12	bulan	12	bulan	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,000,000	100,000,000	74,753,236	74.8	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara	48	48	unit	48	unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18,000,000	18,000,000	17,955,000	99.8	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah pemeliharaan/servis peralatan kantor selama 1 tahun	30	30	kali	30	kali	100%
6	Pengadaan Papan Informasi		100,000,000	98,227,000	98.2	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah papan informasi yang terbeli	5	5	Jenis	5	Jenis	100%
7	Penataan Lingkungan Kantor		275,000,000	273,670,000	99.5	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah penataan lingkungan kantor	50	50	persen	50	persen	100%
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**15,000,000**	**15,000,000**	**13,750,000**	91.7			Tersedianya aparatur yang berkualitas dan profesional						
1	Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan	15,000,000	15,000,000	13,750,000	91.7	50	DLHK Kab Klaten	Jumlah aparatur/pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan dan kursus/pembelajaran singkat	2	2	orang	2	orang	100%
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**6,000,000**	**6,000,000**	**3,742,100**	62.4			Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kerja						
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	6,000,000	6,000,000	3,742,100	62.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersusun	10	10	buku	10	buku	100%
V	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**5,397,269,000**	**7,516,329,000**	**5,965,271,645**	79.4			Jumlah bank sampah aktif dan 3R						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	100,000,000	929,000,000	893,945,750	96.2	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan untuk fasum/fasos	3	3	jenis	3	jenis	100%
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1,982,445,000	2,062,455,000	1,293,749,077	62.7	85	DLHK Kab Klaten	Jumlah kelompok 3R yang mendapat pendampingan	27	27	bank sampah	27	bank sampah	100%
3	Pembinaan Bank Sampah	75,000,000	145,000,000	112,723,850	77.7	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah bank sampah aktif dan 3R	5	5	bank sampah	5	bank sampah	100%
4	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (DAK Bid. Lingkungan Hidup	329,824,000	329,874,000	268,001,978	#REF!	100	DLHK Kab Klaten	jumlah pembangunan bank sampah	1	1	unit	1	unit	100%
5	Pengolahan Sampah 3R	2,550,000,000	2,690,000,000	2,046,725,990	76.1	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah kelompok 3R beserta fasilitasnya	3	3	lokasi bank sampah	3	lokasi bank sampah	100%
6	Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Lingkungan Hidup	360,000,000	360,000,000	354,970,000	98.6	100	DLHK Kab Klaten	jumlah kendaraan alat angkut sampah yang terbeli	1	1	unit	1	unit	100%
7	Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Bidang Sanitasi)		1,000,000,000	995,155,000	99.5	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah gedung dan fasilitasvpengelolaan sampahskala desa	2	2	unit	2	unit	100%
VI	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**1,235,755,000**	**1,590,755,000**	**1,313,298,814**	82.6			Pengkajian pencemaran status mutu air						
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	400,200,000	500,200,000	452,847,064	90.5	100	DLHK Kab Klaten	Nilai capaian Adipura	75	75	angka	75	angka	100%
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	50,000,000	50,000,000	22,793,150	45.6	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah sampling titik pantau kualitas udara dan air	40	40	titik	40	titik	100%
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	50,000,000	50,000,000	40,229,550	80.5	80	DLHK Kab Klaten	Jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan	58	58	industri	58	industri	100%
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	15,000,000	15,000,000	10,258,450	68.4	100	DLHK Kab Klaten	jumlah alat pengumpul dan pengangkut sampah/limbah B3	5	5	unit	5	unit	100%
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	70,000,000	70,000,000	53,501,500	76.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	3	3	dokumen	3	dokumen	100%
6	Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan	45,000,000	45,000,000	21,748,800	48.3	100	DLHK Kab Klaten	jumlah pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan	50	50	usaha	50	usaha	100%
7	Operasional Laboratorium Lingkungan	165,655,000	220,655,000	168,960,940	76.6	100	DLHK Kab Klaten	Pengujian analisa kualitas air sungai/limbah	3	3	titik	3	titik	100%
8	Operasional perijinan	70,000,000	70,000,000	57,481,310	82.1	72	DLHK Kab Klaten	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan	600	600	pelaku usaha	600	pelaku usaha	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah	369,900,000	569,900,000	485,478,050	85.2	100	DLHK Kab Klaten	jumlah pengelolaan air limbah yang terbangun	1	1	unit	1	unit	100%
VII	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**590,000,000**	**790,000,000**	**652,358,450**	82.6			Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air						
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air	180,000,000	180,000,000	145,687,000	80.9	100	DLHK Kab Klaten	Cakupan luasan area penghijauan sekitar mata air	0.1	0.1	ha	0.1	ha	100%
2	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	110,000,000	110,000,000	101,274,250	92.1	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1	1	paket	1	paket	100%
3	Penghijauan Jalan Dalam Kota	300,000,000	500,000,000	405,397,200	81.1	100	DLHK Kab Klaten	Panjang ruas jalan yeng ditanami turus jalan kota	7	7	km	7	km	100%
VIII	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**110,000,000**	**110,000,000**	**87,905,150**	79.9			Jumlah data dan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat						100%
1	Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau	40,000,000	40,000,000	35,766,500	89.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah Buku Menuju Indonesia Hijau yang tersusun	10	10	buku	10	buku	100%
2	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	70,000,000	70,000,000	52,138,650	74.5	100	DLHK Kab Klaten	jumlah buku IKPLHD yang tersusun	10	10	buku	10	buku	100%
IX	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**992,000,000**	**1,422,400,000**	**1,367,840,447**	96.2			Jumlah penataan taman kota						100%
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	892,000,000	967,000,000	933,578,550	96.5	100	DLHK Kab Klaten	jumlah penataan taman kota/RTH	1	1	lokasi	1	lokasi	100%
2	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100,000,000	455,400,000	434,261,897	95.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah pemeliharaan RTH Kab. Klaten	3	3	lokasi	3	lokasi	100%
X	**Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**470,000,000**	**545,000,000**	**496,594,599**	91.1			Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup						
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	150,000,000	150,000,000	109,781,000	73.2	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa ramah lingkungan	26	26	desa/kelurahan	26	desa/kelurahan	100%
2	Peningkatan Sekolah Adiwiyata	220,000,000	270,000,000	262,117,700	97.1	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah siswa dan sekolah peduli dan berwawasan lingkungan	1000	1000	siswa/sekolah	5000	siswa/sekolah	100%
3	Pembinaan Saka Kalpataru	100,000,000	125,000,000	124,695,899	99.8	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah pramuka berwawasan lingkungan	300	300	pramuka	300	pramuka	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
I	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**18,450,000,000**	**18,450,000,000**	**15,170,958,809**	**-**									
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan	8,500,000,000	8,500,000,000	6,147,526,659	72.32%	92.75	Kabupaten Klaten	Jumlah TPA yang dioperasikan	1	1	lokasi	1	lokasi	100%
2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah	200,000,000	200,000,000	191,185,000	95.59%	77.26	Kabupaten Klaten	Jumlah TPS yang terpelihara	1	1	Lokasi	1	Lokasi	100%
3	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	8,000,000,000	8,000,000,000	7,272,877,950	90.91%	95.24	Troketon, Pedan, Klaten	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan TPA Troketon	1	1	Lokasi	1	Lokasi	100%
4	Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan	1,750,000,000	1,750,000,000	1,559,369,200	89.11%	98.52	DPU PR	Jumlah gerobak sampah yang dibeli	64	64	unit	64	unit	100%
II	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**9,100,000,000**	**10,900,000,000**	**9,068,900,239**										
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,500,000,000	6,200,000,000	5,091,493,700	82.12%	98.05	Kab. Klaten	Jumlha RTH terbangun	7	7	lokasi	6	lokasi	86%
2	Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	3,250,000,000	3,950,000,000	3,288,368,789	83.25%	96.58	Kab. Klaten	Jumlah RTH yang dipelihara	4	4	unit	4	unit	100%
3	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang terbuka Hijau (RTH)	350,000,000	750,000,000	689,037,750	91.87%	96.96	Kab. Klaten	jumlah Pengadaan alat kerja	2	2	paket	2	paket	100%
KLATEN UTARA														
Kelurahan Barenglor														
I	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**27,100,000**	**27,100,000**	**27,095,440**										
1	Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah	27,100,000	27,100,000	27,095,440	99,98	100	Kel. Bareng Lor	Kebersihan Lingkungan Kantor dan Seluruh Wilayah Kelurahan terpelihara dgn baik	tahun	1	tahun	1	tahun	100
II	**Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup**	**15,000,000**	**15,000,000**	**14,988,000**										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk.Kelurahan.	15,000,000	15,000,000	14,988,000	99,92	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3	kali	1	kali	1	kali	100
KEL. GERGUNUNG														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup**	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**										**#DIV/0!**
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk.Kelurahan.	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	KEL. GERGUNUNG	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3	14	14	Kegiatan	14	Kegiatan	**100.00%**
II	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**5,000,000**	***5,000,000***	***5,000,000***	**100%**	**100%**								**100.00%**
1	Penghijauan Jalan Dalam Kota	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	KEL. GERGUNUNG	Jumlah pohon yang ditanam	250	250	Kegiatan	250	Kegiatan	**100.00%**
KLATEN TENGAH														
KEL. KABUPATEN														
I	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00%	100%	Kel Kabupaten	- Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3 - Jenis lomba K3 Tk. Kelurahan	12	12	RW	12	RW	100.00%
KEL. KLATEN														
I	**Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup**	**23,550,000**	**23,550,000**	**21,500,000**	**91**	**100**								
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan.	23,550,000	23,550,000	21,500,000	91	100	Kelurahan Klaten	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3 dan tamanisasi	2	2	Jenis Lomba	2	Jenis Lomba	100%
KEL. TONGGALAN														
I	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**16,000,000**	**16,000,000**	**16,000,000**										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	100%	Kelurahan Tonggalan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba K2	2	2	kali	2	kali	100%
KEL. MOJAYAN														
I	**Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup**	**15,000,000**	**15,000,000**	**13,499,600**										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tingkat Kelurahan	15,000,000	15,000,000	13,499,600	90	100	Kel. Mojayan	Terlaksananya lomba k3 Tingkat kelurahan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
II	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**6,000,000**	**6,000,000**	**5,915,000**										
	Penghijauan Jalan Dalam Kota	6,000,000	6,000,000	5,915,000	99	100	Kel. Mojayan	Terlaksananya penghijauan jalan kelurahan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KEL. BUNTALAN														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	**Program Pengndalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**15,000,000**	**15,000,000**	**14,288,500**										
1	Pelaksanaan lomba K3 tingkat Kelurahan	15,000,000	15,000,000	14,288,500	95.26	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah peserta K3	12	12	RW	12	RW	100
KEL. BARENG														
I	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**14,895,800**	**14,895,800**	**14,892,100**										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	14,895,800	14,895,800	14,892,100	**99.98**	**100**	kel.bareng	- 9 Rw 9 rw tertib administrasi	1	1	**kegiatan**	1	**kegiatan**	**100**
KLATEN SELATAN														
KEL. GAYAMPRIT														
V	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,996,700**	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah pengendalian peenemaran dan perusakan lingkungan hidup						
1	Pelaksanaan Lomba K3 tingkat Kelurahan	12,000,000	12,000,000	11,996,700	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peserta lomba	9	9	RW	9	RW	100%
III	**Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,987,000**	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peningkatan Kinerja Pengelolaan sampah						
1	Bimtek teknis persampahan	5,000,000	5,000,000	4,987,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peserta Bimtek	40	40	Peserta Bimtek	40	Peserta Bimtek	100%
KECAMATAN GANTIWARNO														
I	**Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**20,000,000**	**20,000,000**	**19,999,800**										
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	20,000,000	20,000,000	19,999,800	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terlaksananya kegiatan desa ramah lingkungan	16	16	Desa	16	Desa	100
KECAMATAN PRAMBANAN														
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**13,500,000**	**13,500,000**	-	**0%**	**0%**								
1	Gerakan desa ramah lingkungan	13,500,000	13,500,000	-	0%	0%	Kecamatan Prambanan	Jumlah lomba penanaman pohon refugia	1	1	kegiatan	0	kegiatan	0
KEC. JATINOM														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
KELURAHAN JATINOM														
	Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup	**20,000,000**	**20,000,000**	**19,998,500**										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	20,000,000	20,000,000	19,998,500	99.99	99.9925	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan lomba K3	1	1	kali	1	kali	100
	KECAMATAN KARANGANOM													
I	**Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup**	16,600,000	16,600,000.00	16,598,550.00										
1	Gerakan desa ramah lingkungan	16,600,000	16,600,000	16,598,550	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah lomba refogia terlaksana	1	1	Kali	1	Kali	100
	KECAMATAN JUWIRING													
I	**Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**16,000,000**	**16,000,000**	**15,819,000**										
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	16,000,000	16,000,000	15,819,000	**99%**	100	Kec. Juwiring	Jumlah desa yang mengikuti lomba ramah lingkungan	19	19	desa	19	desa	100
	KECAMATAN WONOSARI													
I	**Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**15,906,000**	**15,906,000**	**15,607,000**										
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	15,906,000	15,906,000	15,607,000	98.1	100.0	Kec. Wonosari	jumlah Peserta lomba Desa Ramah Lingkungan	18	18	desa	18	desa	100
	KECAMATAN PEDAN													
I	**Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	**100**	**100**	Kecamatan Pedan							
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kecamatan Pedan	jumlah lomba revobia	14	14	desa	14	desa	100%
	KECAMATAN KARANGDOWO													
I	**Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**18,400,000.00**	**18,400,000.00**	**18,314,650.00**	**99.54**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	18,400,000.00	18,400,000.00	18,314,650.00	99.54	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Gerakan Desa Ramah Lingkungan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
	KECAMATAN CAWAS													
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**15,000,000**	**15,000,000**	**13,655,000**	91	100	Kecamatan Cawas							
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	15,000,000	15,000,000	13,655,000	91	100	Kecamatan Cawas	jumlah kegiatan lomba refugia	1	1	kegiatan	1	kegiatan	0.00
	KECAMATAN BAYAT													
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**14,000,000**	**14,000,000**	**12,581,000**				**Prosentase jumlah yang mengikuti lomba lingkungan hidup**	**100**	**100**	**%**	100		
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	14,000,000	14,000,000	12,581,000	90		Kec. Bayat	Jumlah desa yang mengikuti lomba	18	18	desa	18	desa	100
			42,883,961,800	**35,571,066,568**	**82.9**									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**527,726,000**	**549,326,000**	**511,384,790**	**93.09**									
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,000,000	20,000,000	8,146,800	41	100	Disdukcapil	jumlah dokumen surat masuk dan keluar kependudukan	184 surat	120 surat	surat	120	surat	100
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000	200,000,000	199,082,500	100	100	Disdukcapil	jumlah langganan air, listrik, telp dan internet	12 bulan (internet 15 Mgbs)	12 bulan (internet 15 Mgbs)	bulan	12	bulan	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	42,500,000	59,100,000	53,131,972	90	100	Disdukcapil	jumlah tenaga kontrak dan THL kebersihan	3 orang	6 orang	orang	6	orang	100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,000,000	15,000,000	14,539,100	97	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis peralatan kebersihan kantor yang tersedia	17 jenis	17 jenis	jenis	17	jenis	100
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,000,000	30,000,000	29,180,600	97	100	Disdukcapil	jumlah ATK yang tersedia	39 jenis	39 jenis	jenis	39	jenis	100
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,726,000	15,726,000	15,205,000	97	100	Disdukcapil	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	jenis	2	jenis	100
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000	7,000,000	6,692,100	96	100	Disdukcapil	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang tersedia	14 jenis	14 jenis	jenis	14	jenis	100
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000	4,000,000	3,084,000	77	100	Disdukcapil	jumlah bacaan yang tersedia	3 jenis (SM, Solo Pos, Joglo Pos)	3 jenis (SM, Solo Pos, Joglo Pos)	jenis	3	jenis	100
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100	100	Disdukcapil	jumlah BBM yang tersedia	150 liter	150 liter	liter	150	liter	100
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	52,000,000	72,000,000	56,114,250	78	100	Disdukcapil	jumlah lembur, rapat koordinasi dan tamu	45 kali	75 kali	kali	75	kali	100
11	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	80,000,000	80,000,000	79,878,968	100	100	Disdukcapil	jumlah perjalanan dinas luar daerah	25 kali	25 kali	kali	25	kali	100
12	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	40,000,000	45,000,000	44,829,500	99	100	Disdukcapil	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	85 kali	90 kali	kali	90	kali	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1,353,750,000**	**2,592,881,000**	**2,289,400,152**	**88.30**									
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	600,000,000	678,231,000	621,935,250	92	100	Disdukcapil	jumlah mobil pelayanan adminduk keliling	1 unit	1 unit	unit	1	unit	100
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	687,250,000	1,602,650,000	1,441,908,802	90	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	19 unit	40 unit	unit	40	unit	100
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	46,500,000	51,000,000	45,149,500	89	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 unit (24 motor, 6 mobil)	30 unit (24 motor, 6 mobil)	unit	30	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20,000,000	25,000,000	20,605,000	82	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis perawatan, peralatan kantor yang dipelihara	30 unit	30 unit	unit	30	unit	100
5	Fasilitasi Pindahan Kantor	0	236,000,000	159,801,600	68	100	Disdukcapil	pindahan kantor ke kompleks Disperinaker Kab. Klaten	1 unit	1 unit	unit	1	unit	100
III	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**24,000,000**	**24,000,000**	**15,964,850**	**66.52**									
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	24,000,000	24,000,000	15,964,850	67	100	Disdukcapil	jumlah peserta pelatihan tingkat desa dan kecamatan peningkatan kapasitas aparatur	40 orang	40 orang	orang	40	orang	100
IV	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**3,513,689,000**	**3,998,689,000**	**3,685,734,035**	**92.17**									
1	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	523,524,000	932,524,000	865,265,309	93	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan (60ribu KTP, 60ribu KIA dan 19 orang THL serta tambahan 5 orang THL)	12 bulan	12 bulan	bulan	12	bulan	100
2	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	41,000,000	41,000,000	39,786,862	97	100	Disdukcapil	jumlah perjalanan dinas dan honor tim untuk verifikasi calon jamaah haji dan verifikasi data adminduk	2 kegiatan	2 kegiatan	kegiatan	2	kegiatan	100
3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	80,000,000	116,000,000	109,667,460	95	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan (60ribu KTP, 60ribu KIA dan 19 orang THL serta tambahan 5 orang THL)	12 bulan	12 bulan	bulan	12	bulan	100
4	Kegiatan Penataan Arsip Kependudukan	60,000,000	100,000,000	91,692,880	92	100	Disdukcapil	jumlah dokumen arsip akta pencatatan sipil	1 dokumen (register akta lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian berikut dokumen pendukungnya)	1 dokumen (register akta lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian berikut dokumen pendukungnya)	dokumen	1	dokumen	100
5	Kegiatan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	15,000,000	15,000,000	11,762,700	78	100	Disdukcapil	jumlah buku dan CD laporan profil kependudukan	2 jenis (50 CD, 50 buku)	2 jenis (50 CD, 50 buku)	jenis	2	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu (DAK Non Fisik)	2,794,165,000	2,794,165,000	2,567,558,824	92	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	12 bulan	12 bulan	bulan	12	bulan	100
	JUMLAH TOTAL	**5,419,165,000**	**7,164,896,000**	**6,502,483,827**	**90.75**	**100**								100

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA, KECAMATAN & KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**535,148,050**	**680,148,050**	**641,912,457**	**91**	**100**								**100**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000	6,000,000	5,365,000	89	100	Kabupaten Klaten	Jumlah surat dinas yang dikirim	3,000	3,000	Surat	5,213	Surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42,000,000	42,000,000	32,891,685	78	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dan jenis rekening terbayar	4	4	Rupiah/ bulan	4	Rupiah/ bulan	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	84,464,800	84,464,800	71,413,366	85	100	Kabupaten Klaten	Jumlah THL kebersian kantor	3	3	Orang	3	Orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	34,083,250	34,083,250	29,801,000	87	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	30	30	bh	30	bh	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14,600,000	54,600,000	53,296,250	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dan jenis cetak dan pengandakan pendukung administrasi kantor	2	2	Lembar	2	Lembar	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18,000,000	18,000,000	12,815,000	71	100	Kabupaten Klaten	Jumlah jenis komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan	2	2	Meter	2	Meter	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,000,000	7,000,000	6,542,400	93	100	Kabupaten Klaten	Jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan	4	4	Surat	4	Surat	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000	55,000,000	53,968,500	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah koordinasi dan penerimaan tamu	30	30	Dos	60	Dos	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150,000,000	250,000,000	248,689,671	99	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah jawa	12	12	Orang	12	Orang	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	56,500,000	56,500,000	56,500,000	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	12	12	Orang	12	Orang	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	72,500,000	72,500,000	70,629,585	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah THL pengamanan kantor	5	5	Orang	5	Orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**361,664,000**	**551,664,000**	**535,042,477**	**96**	**100**								**100**
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40,000,000	40,000,000	38,050,000	95	100	Kabupaten Klaten	Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli	4	4	Unit	4	Unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	75,000,000	75,000,000	72,350,000	96	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	10	10	Unit	10	Unit	100
3	Pengadaan mebeleur	62,000,000	62,000,000	55,350,000	89	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	57	58	Unit	57	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	120,000,000	310,000,000	305,798,000	99	100	Kabupaten Klaten	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	2	Unit	1	Unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32,664,000	32,664,000	32,537,477	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kendaraan yang terpelihra	22	22	Unit	22	Unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	10,000,000	9,864,000	99	100	Kabupaten Klaten	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	15	15	Unit	15	Unit	100
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,000,000	12,000,000	11,768,000	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	20	20	Unit	20	Unit	100
8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000,000	10,000,000	9,325,000	93	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pemeliharaan mebeleur	25	25	Unit	25	Unit	100
III	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**788,214,582**	**848,214,582**	**738,537,184**	**87**	**100**		**Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna**	**64**	**64**	**%**	**64**	**%**	**100**
1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	394,104,088	394,104,088	334,069,271	85	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan DD dan ADD dalam 1 tahun	391	391	Orang	391	Orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	107,852,600	107,852,600	104,234,760	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa/kel yang melaksanakan gerakan gotong royong masyarakat setiap tahunnya	2	2	Orang	2	Orang	100
3	Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG	88,458,400	88,458,400	73,495,400	83	100	Kabupaten Klaten	Jumlah beserta pelatihan pemanfaatan TTG	110	5	Orang	110	Orang	100
4	Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	50,000,000	110,000,000	108,131,250	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dalam 1 tahun	391	391	Orang	391	Orang	100
5	Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan	60,261,600	60,261,600	48,597,000	81	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa yang dievaluasi dan penilaian perkembangan desa dan kelurahan	401	401	Desa	401	Desa	100
6	Fasilitasi sistem informasi desa/SID	87,537,894	87,537,894	70,009,503	80	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa yang tervasilitasi sistem informasi	391	391	Desa	391	Desa	100
IV	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	**394,500,000**	**394,500,000**	**319,845,051**	**83**	**100**		**Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes**	**70**	**70**	**%**	**77**	**%**	**100**
1	Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	165,000,000	165,000,000	146,679,451	89	100	Kabupaten Klaten	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat atau BUMDES	230	230	Orang	228	Orang	100
2	Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	20,000,000	20,000,000	19,999,350	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah BP-Spam yang dibina dalam 1 tahun	100	100	Lembaga	100	Lembaga	100
3	Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi	25,000,000	25,000,000	21,844,000	87	100	Kabupaten Klaten	jumlah posian teks yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan kabupaten klaten	2	2	kecamatan	2	kecamatan	100
4	Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG	109,500,000	109,500,000	91,386,500	83	100	provinsi bengkulu	jumlah event gelar TTG Nasional diprovinsi Bengkulu	1	1	Event	1	Event	100
5	Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan	75,000,000	75,000,000	39,935,750	53	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pembinaan dan pembentukan kawasan pedesaan yang difasilitasi Kabupaten Klaten	13	13	Orang	13	kawasan	100
V	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**310,995,242**	**884,995,242**	**840,595,105**	**92**	**100**		**Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat**	**33**	**33**	**%**	**33**	**%**	**100**
1	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	115,000,000	115,000,000	102,679,180	89	100	Kabupaten Klaten	Jumlah 3 desa lokasi TMMD dan karya bakti klaten besinar dalam satu tahun	6	6	Desa	6	Desa	100
2	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu	80,000,000	604,000,000	587,597,600	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah posyandu yang dibina kabupaten klaten	2,268	2,272	Posyandu	2,272	Posyandu	100
3	Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa	50,000,000	65,995,242	59,115,375	90	100	Kabupaten Klaten	Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan pembangunan desa kabupaten klaten	210	210	orang	210	orang	100
4	Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa	65,995,242	100,000,000	91,202,950	91	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial buaya masyarakat	210	391	orang	391	orang	100
VI	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	**100,000,000**	**100,000,000**	**94,170,275**	**94**	**100**		**Prosentase Peningkatan Administrasi Perencanaan Desa**	**100**	**100**	**%**	**95**	**%**	**100**
1	Peningkatan kualitas perencanaan desa	100,000,000	100,000,000	94,170,275	94	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta forum grup discussion perencanaan desa bagi kaur perencanaan desa	391	391	desa	391	desa	100
VII	**Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**	**656,000,000**	**901,000,000**	**874,958,316**	**99**	**100**		**Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD**	**65**	**65**	**%**	**65**	**%**	**100**
1	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	496,000,000	741,000,000	716,569,731	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan PKK dalam satu tahun	52	52	Desa	52	Desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong	40,000,000	40,000,000	39,909,800	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan yang tefasilitasi dengan pokja I 26 Kecamatan	52	52	desa	52	desa	100
3	Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi	40,000,000	40,000,000	39,999,900	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan yang tefasilitasi dengan pokja II 26 Kecamatan	52	52	Desa	52	Desa	100
4	Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga	40,000,000	40,000,000	39,978,985	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan yang terfasilitasi dengan pokja III 26 Kecamatan	52	52	Desa	52	Desa	100
5	Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup	40,000,000	40,000,000	38,499,900	96	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan yang terfasilitasi dengan pokja IV 26 Kecamatan	52	52	Desa	52	Desa	100
	KEC. KLATEN UTARA													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**		**4,500,000**	**4,400,000**			Kec.Klaten Utara							
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	-	4,500,000	4,400,000.00	97.8	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah desa yang menerima dana desa		6	Desa	6	Desa	100.0
	KELURAHAN BARENG LOR													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**10,000,000**	**27,000,000**	**25,098,500**										
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BBGRM)	10,000,000	10,000,000	8,999,250	89,99	100	Kel. Bareng Lor	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Bareng Lor yg semakin meningkat	1	1	kali	1	kali	100
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	0	17,000,000	16,099,250	94,70	100	Kel. Bareng Lor	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Bareng Lor yg semakin meningkat	1	1	kali	1	kali	100
	KELURAHAN GERGUNUNG													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**10,000,000**	**30,000,000**	***29,935,850***	99.8%	**100%**								
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BBGRM)dan peningkatan Masyarakat Pedesaan	10,000,000	30,000,000	29,935,850	99.8%	100%		Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Gergunung yg semakin meningkat	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.00%
	KEC. KLATEN TENGAH													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,700,000**				prosentae monitoring dana desa						
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	10,000,000	10,000,000	9,700,000	97%	97%	100%	Jumlah operasional penyampaian dana desa	3	3	desa	3	desa	100%
	Kelurahan Kabupaten													
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	**25,000,000**	**25,000,000**	**24,738,500**										
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	10,000,000	10,000,000	9,985,000	99.9%	100%	Kel Kabupaten	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Kabupaten yg semakin meningkat	1	1	keg	1	keg	100.00%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	15,000,000	15,000,000	14,753,500	98.4%		Kel Kabupaten	Tersedianya alat kesehatan	1	1	keg	1	keg	100.00%
	KELURAHAN KLATEN													
III	**Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**18,000,000**	**26,430,500**	**26,300,500**										
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	18,000,000	18,000,000	17,899,500	99	100	Kelurahan Klaten	Jumlah kegiatan BBGRM di Kelurahan Klaten	1	3	kegiatan	3	kegiatan	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	8,430,500	8,401,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi posyandu dan karang taruna	0	12	Bulan	12	Bulan	100%
	KELURAHAN TONGGALAN													
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN**	**15,000,000**	**115,500,000**	**74,226,792**			Kelurahan Tonggalan							
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (bbgrm)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Gotong Rotong se Kelurahan	4	4	kali	4	kali	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	100,500,000	59,226,792	59	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		9	kelompok	7	kelompok	78%
	KELURAHAN MOJAYAN													
IV	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**37,471,700**	**37,471,700**	**37,132,350**										
1	Peningkatan Implementasi Pemeberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	15,000,000	15,000,000	14,999,500	100	100	Kel. Mojayan	gotong-royong	1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	22,471,700	22,471,700	22,132,850	98	100	Kel. Mojayan	Jumlah karang taruna	1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
	KELURAHAN BUNTALAN													
III	**Program Peningktan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**55,104,625**	**55,104,625**	**54,225,000**										
1	Peningkatan implementasi pemberdayaan masyarkat pedesaan (BBGRM)	15,000,000	15,000,000	14,825,000	98.83	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi kegitan BBGRM	1	1	Kali	1	Kali	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU) Tambahan	40,104,625	40,104,625	39,400,000	98.24	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi Kegiatan	7	7	Kelompok	7	Kelompok	100%
	KELURAHAN BARENG													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	16,530,800	**16,530,800**	**16,522,300**										
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	16,530,800	16,530,800	16,522,300	**100**	**100**	kel.bareng	- 9 Organisasi pemuda RW Prosentasi Ketersediaan fasilitas kegiatan olahraga dan kepemudaan	9	9	rw	9	rw	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KEC. KLATEN SELATAN													
	KELURAHAN GAYAMPRIT													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**31,000,000**	**31,000,000**	**24,857,300**				Jumlah pemberdayaan masyarakat pedesaan						
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	13,000,000	13,000,000	12,750,000	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah warga yang melaksanakan gotong royong	360	360	Jumlah warga	360	Jumlah warga	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	18,000,000	18,000,000	12,107,300	67%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Rakor Gugus Tugas, BKR & Posyandu Remaja	3	3	Jumlah lembaga	3	Jumlah lembaga	100%
	KECAMATAN NGAWEN													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,949,000**	**99%**	**100%**								
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	10,000,000	10,000,000	9,949,000	99%	100%	Kec. Ngawen	jumlah fasilitasi Dana desa	13	13	desa	13	desa	100%
	KECAMATAN PRAMBANAN													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERDESAAN**	**14,000,000**	**14,000,000**	**13,840,000**										
1	Penunjang operasional penyampaian dana desa	14,000,000	14,000,000	13,840,000	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan fasilitasi penyampaian dana desa	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
	KECAMATAN MANISRENGGO													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN**	**10,000,000**	**10,000,000**	**8,048,300**										
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	10,000,000	10,000,000	8,048,300	80.48	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah Desa yang di sampaikan	16	16	desa	16	Desa	100%
	KECAMATAN KARANGNONGKO													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,865,000**										
1	Penunjang operasional penyampaian dana desa	10,000,000	10,000,000	9,865,000	98.65	98.7	Kec. Karangnongko	jumlah Penunjang operasional penyampaian dana desa terpenuhi	14	14	desa	14	desa	100%
	KECAMATAN JATINOM													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**15,000,000**	**15,000,000**	**14,949,700**	**99.66**	**100**								
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	15,000,000	15,000,000	14,949,700	99.66	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya penyampaian dana desa	17	17	desa	17	desa	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KELURAHAN JATINOM													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan**	**10,000,000**	**118,619,800**	**118,261,750**										
1	Peningkatan implementasi pemberdayaan masyarakat Pedesaaan(BBGRM)	10,000,000	10,000,000	9,965,250	99.7	100	KeL. Jatinom	Jumlah Frekuwensi Kegiatan BBGRM	1	1	kali	1	kali	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	108,619,800	108,296,500	99.7	100	KeL. Jatinom	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0	3	kegiatan	3	kegiatan	100%
II	**Program Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga**	**3,000,000**	**3,000,000**	**2,997,000**				Jumlah Kader Perberdayaan Pembinaan Kesejahteraan						
1	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	3,000,000	3,000,000	2,997,000	99.9	99.9		Keluarga yang dibayar	2	2	orang	2	orang	100%
	KECAMATAN KARANGANOM													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,949,200**										
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	10,000,000	10,000,000	9,949,200	99	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa yang menerima dana desa	19	19	Desa	19	Desa	100%
	KECAMATAN DELANGGU													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN**	**5,000,000**	**11,000,000**	**10,718,200**										
1	Penunjang Opersional Penyampaian Dana Desa	5,000,000	11,000,000	10,718,200	97.4	97	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang termonitor	16	16	desa	16	desa	100%
	KECAMATAN JUWIRING													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**13,350,000**	**13,350,000**	**13,347,500**										
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	13,350,000	13,350,000	13,347,500	100%	**100**	Kec. Juwiring	jumlah desa penerima dana desa	19	19	desa	19	desa	100
	KECAMATAN CEPER													
I	**Program peningkatan keberdayaan masy pedesaan**	15,000,000	15,000,000	**15,000,000**										
1	Penunjang operasional penyampaian dana desa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	90	kec ceper	jumlah fasilitasi penyampaian dana desa	18	18	Dokumen	18	dokumen	100%
	KECAMATAN KARANGDOWO													
I	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,973,000**										
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	5,000,000	5,000,000	4,973,000	99.46	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Di 19 Desa Selama 1 Tahun	19	19	Kali	19	Kali	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KECAMATAN TRUCUK													
I	**PROG. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN.**	**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**										
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan pemantauan	18 desa	18	desa	18	desa	100%
	TOTAL		**4,981,029,299**	**4,611,096,607**	**92.6**									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS SOS PP PA& KB														
I	**Program Keluarga Berencana**	**8,439,392,000**	**8,439,392,000**	**7,152,344,757**	**84.7**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Persentase KB Aktif**	**78.22**	**78.22**	**%**	**71.39**	**%**	**91**
1	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK Bid. Keluarga Berencana)	88,000,000	88,000,000	86,846,000	98.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah smartphone yang dibutuhkan untuk sarana kerja petugas lapangan KB	10	10	unit	10	unit	100
2	Pembangunan Gedung / Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Bid. Keluarga Berencana)	407,000,000	407,000,000	393,801,000	96.8	100	Kecamatan Karangnongko	Jumlah Balai KB Kecamatan	1	1	unit	1	unit	100
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bid. Keluarga Berencana)	120,000,000	120,000,000	113,576,400	94.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah tempat penyimpanan Alokon di Fasyankes	13	13	unit	13	unit	100
4	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	1,680,000,000	1,680,000,000	1,415,209,020	84.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah balai penyuluh KB yang mendapatkan operasional	19	19	balai kb	19	balai kb	100
5	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	121,500,000	121,500,000	22,441,000	18.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah Fasyankes yang mendapat distribusi alokon	81	81	faskes	81	faskes	100
6	Operasional Penggerakan Program KB (DAK Non Fisik)	2,470,000,000	2,470,000,000	1,814,703,600	73.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kampung KB di kecamatan yang mendapat operasional penggerakan Program KKbPK	26	26	kampung kb	26	kampung kb	100
7	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat (DAK Non Fisik)	2,406,000,000	2,406,000,000	2,334,751,800	97.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan operasional untuk melakukan pembinaan program KB bagi masyarakat	401	401	kader	401	kader	100
8	Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)	636,892,000	636,892,000	476,560,000	74.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	terfasilitasinya pengelolaan manajemen DAK dan dukungan media KIE	1	1	OPD	1	OPD	100
9	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (DAK Bid. Keluarga Berencana)	285,000,000	285,000,000	276,894,450	97.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah sarana KIE Kit dan Genre Kit	24	24	set	24	set	100
10	Pengadaan Sarana Pendataan (DAK Bid. Keluarga Berencana)	165,000,000	165,000,000	158,856,000	96.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah sarana pendataan untuk tingkat kabupaten dan Balai penyuluhan KB	4	4	set	4	set	100
11	Pengadaan Bina Keluarga Balita/BKB (DAK Bid. Keluarga Berencana)	60,000,000	60,000,000	58,705,487	97.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah alat peraga BKB Kit-Stunting	10	10	set	10	set	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**14,500,000**	**14,500,000**	**14,342,450**	**98.9**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun**	**11.42**	**11.42**		**35.4**		**-110**
12	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	9,000,000	9,000,000	8,967,950	99.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah remaja anggota BKR,PIK KRR yang disosialisasi Dinas Sosial PP,PA dan KB	78	78	orang	78	orang	100
13	Pemutaran Film KB	5,500,000	5,500,000	5,374,500	97.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Frekuensi/jumlah gerak pemutaran film KB Kab Klaten	12	12	gerak	12	gerak	100
III	**Program pelayanan kontrasepsi**	**88,687,000**	**146,287,000**	**130,942,484**	**89.5**	**81.25**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**DO KB**	**15**	**15**		**9.05**		**140**
							Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Unmet Need	9	9		15.91		**23**
14	Pelayanan KB Medis operasi	14,000,000	14,000,000	7,750,000	55.4	60	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah akseptor KB yang KB MOW dan MOP Faskes KB	75	75	akseptor	75	akseptor	100
15	Pengayoman KB	2,600,000	2,600,000	1,600,000	61.5	65	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah akseptor kasus komplikasi dan kegagalan pemakaian alkon yang terayomi Dinsos P3AKB	8	8	kasus	5	kasus	63
16	Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan	34,687,000	84,687,000	80,155,734	94.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Frekuensi/Jumlah gerak pelayanan KB dalam melakukan pelayanan KB Kab Klaten	15	15	gerak	15	gerak	100
17	Pelayanan KB dengan Mitra Kerja	37,400,000	45,000,000	41,436,750	92.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah akseptor pelayanan KB oleh mitra kerja (Muslimat NU, Milad Aisyah, Bhayangkara, Kodim, PKK) Kab Klaten	5	5	akseptor	5	akseptor	100
IV	**Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat**	**190,000,000**	**190,000,000**	**184,350,000**	**97.0**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Jumlah Kelompok Bina Keluarga**	**10**	**10**	**desa**	**10**	**desa**	**100**
18	Pembinaan kelangsungan hidup bayi dan anak (KHIBA) (DAK Non Fisik)	190,000,000	190,000,000	184,350,000	97.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan tentang materi pengasuhan 1000 HPK	10	10	desa	10	desa	100
V	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**251,640,000**	**521,640,000**	**443,081,500**	**84.9**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Jumlah peserta KB Mandiri**	**90**	**90**		**63.3**		**70**
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB	25,000,000	25,000,000	24,633,450	98.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah peserta yang terlibat dalam rapat koordinasi KB Dinas Sosial, PP, PA dan KB	1	1	keg	1	keg	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
20	Optimalisasi Kader PPKBD	226,640,000	496,640,000	418,448,050	84.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	jumlah kader PPKBD yang diberdayakan	401	401	kader	401	kader	100
VI	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**	**153,350,000**	**158,350,000**	**124,626,647**	**78.7**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Peserta KB Mandiri**	**90**	**90**		**63.3**		**70**
21	Peningkatan Mutu Pelaporan	5,100,000	5,100,000	5,099,866	100.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah petugas RR yang dilatih dalam rangka peningkatan mutu pelaporan rutin KB Dinas Sosial, PP, PA dan KB	80	80	orang	80	orang	100
22	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	72,000,000	72,000,000	42,718,781	59.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah petugas yang melakukan pendataan keluarga Dinas Sosial, PP, PA dan KB	2	2	orang	2	orang	100
23	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB	76,250,000	81,250,000	76,808,000	94.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kampung KB yang dibentuk/dicanangkan	2	2	kampung kb	2	kampung kb	100
VII	**Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**	**45,773,000**	**45,773,000**	**44,806,700**	**97.9**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Prosentase anggota kelompok BKB, BKL dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan**	**21**	**21**		**69.13**		**329**
24	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR	45,773,000	45,773,000	44,806,700	97.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Terbinanya kelompok BKB, BKL, BKR	3	3	kelompok	3	kelompok	100
VIII	**Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga**	**8,000,000**	**8,000,000**	**7,927,650**	**99.1**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Tenaga pendamping kelompok bina keluarga**						**#DIV/0!**
								BKB	**641**	**641**		**501**		
								BKR	**286**	**286**		**234**		
								BKL	**484**	**484**		**394**		
								UPPKS	**596**	**596**		**478**		
25	Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS	8,000,000	8,000,000	7,927,650	99.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kelompok UPPKS yang terbina	26	26	kelompok	26	kelompok	100
IX	**Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**	**10,150,000**	**10,150,000**	**10,150,000**	**100.0**	**100**	**Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten**	**Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS I**	**30**	**30**	**%**	**45.15**	**%**	**151**
26	Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	2,450,000	2,450,000	2,450,000	100.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah pertemuan anggota Fapsedu untuk menyusun program Dinas Sosial, PP, PA dan KB	1	1	kali	1	kali	100
27	Penyusunan Parameter Kependudukan	7,700,000	7,700,000	7,700,000	100.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah dokumen parameter kependudukan	1	1	dokumen	1	dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
I	**Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS**	**46,717,000**	**46,717,000**	**40,711,550**				**persentase kehadiran perserta**						
1	Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)	46,717,000	46,717,000	40,711,550	87	100	Pendopo Kabupaten Klaten	Jumlah peserta sarasehan	1 kegiatan	300 orang	orang	300	orang	100
	TOTAL	**9,248,209,000**	**9,580,809,000**	**8,153,283,738**	**85**									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PERHUBUNGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERHUBUNGAN														
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1,137,300,000**	**1,235,638,000**	**1,114,391,530**	**90.19**	**100**								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,500,000	5,500,000	5,499,000	99.98	100	Dishub Klaten	Jumlah surat keluar	3,500	3,500	surat keluar	3500	surat keluar	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200,000,000	250,000,000	194,309,718	77.72	100	Dishub Klaten	Jumlah jenis rekening terbayar	11	11	jenis	11	jenis	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91,800,000	91,800,000	86,722,965	94.47	100	Dishub Klaten	Jumlah THL administrasi perkantoran	5	5	orang	5	orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	136,000,000	154,338,000	148,734,179	96.37	100	Dishub Klaten	Jumlah THL kebersihan kantor	5	5	orang	5	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	75,000,000	75,000,000	72,508,000	96.68	100	Dishub Klaten	Jumlah alat tulis kantor	64	64	jenis	64	jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	102,000,000	102,000,000	97,205,250	95.30	100	Dishub Klaten	Jumlah barang cetakan	14	14	jenis	14	jenis	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000	25,000,000	14,867,500	59.47	100	Dishub Klaten	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11	11	jenis	11	jenis	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50,000,000	50,000,000	17,702,000	35.40	100	Dishub Klaten	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	5	5	buah	5	buah	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000	30,000,000	29,977,000	99.92	100	Dishub Klaten	jumlah makan dan minum tersedia	72	72	paket	72	paket	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	230,000,000	250,000,000	249,973,536	99.99	100	Luar Klaten	jumlah frekuensi perjalanan ke luar daerah	33	45	kali	45	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	90,000,000	90,000,000	89,900,000	99.89	100	Dalam Kab.Klaten	jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	104	104	kali	104	kali	100
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100,000,000	100,000,000	98,294,382	98.29	100	Dishub Klaten	jumlah THL pengamanan kantor	6	6	orang	6	orang	100
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	12,000,000	12,000,000	8,698,000	72.48	100	Dishub Klaten	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	8	8	dokumen	8	dokumen	
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**714,200,000**	**989,150,000**	**857,930,381**	**86.73**	**100**								**100**
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	105,400,000	72,698,000	68.97	100	Dishub Klaten	jumlah kendaraan dinas / operasional terbeli	0	2	unit	2	unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	94,500,000.0	236,450,000	228,714,700	96.73	100	Dishub Klaten	jumlah peralatan gedung kantor terbeli	4	34	unit	34	unit	100
3	Pengadaan mebeleur	222,300,000	252,300,000	172,980,200	68.56	100	Dishub Klaten	jumlah mebelair terbeli	8	121	unit	121	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	97,500,000	97,500,000	96,488,000	98.96	100	Dishub Klaten	jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	120,000,000	120,000,000	114,708,081	95.59	100	Dishub Klaten	jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara	1	28	unit	28	unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	45,000,000	55,000,000	54,911,500	99.84	100	Dishub Klaten	jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	21	21	unit	21	unit	100
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	24,400,000	12,000,000	9,750,000	81.25	100	Dishub Klaten	jumlah mebelair terpelihara	7	22	unit	22	unit	100
8	Pengadaan Papan Informasi	110,500,000	110,500,000	107,679,900	97.45	100	Kab. Klaten	jumlah papan informasi terbeli	104	104	unit	104	unit	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ**	**1,135,500,000**	**1,833,840,000**	**1,526,234,269**	**83.23**	**100**								**100**
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	100,000,000	168,500,000	166,342,700	98.72	100	Dishub Klaten	jumlah alat uji terpelihara	10	10	unit	10	unit	100
2	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	30,000,000	30,000,000	29,129,400	97.10	100	Kab. Klaten	jumlah terminal	1	1	lokasi	1	lokasi	100
3	Rehabilitasi dan pemeliharaan traffic light	100,500,000	100,500,000	85,012,272	84.59	100	Kab. Klaten	jumlah traffic light terpelihara	29	29	unit	29	unit	100
4	Rehabilitasi/pemeliharaan Marka Jalan	870,000,000	1,499,840,000	1,211,343,897	80.76	100	Kab. Klaten	jumlah marka jalan terpelihara	5,743	9,899	m2	9899	m2	100
5	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	35,000,000	35,000,000	34,406,000	98.30	100	Kab. Klaten	jumlah rambu lalu lintas terpelihara	76	76	unit	76	unit	100
IV	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**	**862,500,000**	**862,500,000**	**813,458,422**	**94.31**	**100**								**100**
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	460,000,000	460,000,000	422,586,772	91.87	100	Kab. Klaten	jumlah penguji terfasilitasi	8	8	orang	8	orang	100
2	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	65,000,000	65,000,000	63,113,600	97.10	100	Kab. Klaten	jumlah aplikasi SIM angkutan/dokumen tersusun	1	1	buah	1	buah	100
3	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	202,500,000	202,500,000	194,914,500	96.25	100	Kab. Klaten	jumlah posko terpasang	7	7	posko	7	posko	100
4	Fasilitasi mudik lebaran	75,000,000	75,000,000	74,551,100	99.40	100	Jakarta-Klaten	jumlah bus untuk menjemput pemudik dari Jakarta	4	4	bus	4	bus	100
5	Pemilihan awak kendaraan umum teladan	25,000,000	25,000,000	24,008,500	96.03	100	Kab. Klaten	jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan	3	3	orang	3	orang	100
6	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan	20,000,000	20,000,000	19,999,000	100.00	100	Kab. Klaten	jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	3	3	orang	3	orang	100
7	Penertiban dan pengawasan terminal	15,000,000	15,000,000	14,284,950	95.23	100	Kab. Klaten	Jumlah terminal tertib dan terawasi	7	7	terminal	7	terminal	100
V	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**	**3,778,500,000**	**4,724,595,000**	**4,512,942,202**	**95.52**	**100**								**100**
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	200,000,000	200,000,000	197,832,250	98.92	100	Kab. Klaten	jumlah rambu lalu lintas terpasang	227	227	unit	227	unit	100
2	Pengadaan Marka Jalan	-	274,723,000	240,773,900	87.64	100	SD Bareng Lor,SMP1Klt,SMP3Klt,SMP1Kr.anom,SMU MUH1 Klt	jumlah marka jalan		5	titik	5	titik	100
3	Pengamanan lalu lintas jalan	133,000,000	133,000,000	126,451,332	95.08	100	Kab. Klaten	jumlah THL pengamanan perlintasan sebidang terbayar	6	6	orang	6	orang	100
4	Operasional penertiban angkutan galian golongan C	160,000,000	160,000,000	159,744,950	99.84	100	Kab. Klaten	Jumlah operasi penertiban angkutan galian golongan C	96	96	kegiatan	96	kegiatan	100
5	Lomba tertib lalu lintas / wahana tata nugraha	50,000,000	50,000,000	49,476,000	98.95	100	Kab. Klaten	jumlah keikutsertaan dalam lomba WTN	1	1	piagam	1	piagam	100
6	Car Free Day Kabupaten	320,000,000	320,000,000	319,950,000	99.98	100	Kab. Klaten	jumlah CFD terlaksana	52	52	minggu	52	minggu	100
7	Koordinasi forum LLAJ	25,000,000	40,000,000	39,924,600	99.81	100	Kab. Klaten	Jumlah Koordinasi terlaksana	12	13	kegiatan	13	kegiatan	100
8	Pengadaan dan pemasangan guardrail	-	361,760,000	256,846,750	71.00	100	Kab. Klaten	Jumlah guardrail terpasang	0	200	biem	200	biem	100
9	Pengadaan dan pemasangan traffic light	1,370,000,000	1,370,000,000	1,345,921,500	98.24	100	Kab. Klaten	jumlah traffic light terpasang	1	2	unit	2	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
10	Pengendalian operasional lalu lintas	773,000,000	828,562,000	808,094,180	97.53	100	Kab. Klaten	jumlah THL Pengendalian Operasional LL	38	38	orang	38	orang	100
11	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan	56,500,000	147,500,000	141,427,140	95.88	100	Kab. Klaten	Jumlah cermin tikungan terpasang	11	41	buah	41	buah	100
12	Pengadaan dan pemasangan Lampu Kedip	66,000,000	66,000,000	55,091,000	83.47	100	Kab. Klaten	jumlah lampu kedip terpasang	2	2	buah	2	buah	100
13	Pengelolaan tempat parkir	625,000,000	773,050,000	771,408,600	99.79	100	Kab. Klaten	jumlah kapling terkelola	31	31	kapling	31	kapling	100
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR**	**1,082,000,000**	**1,082,000,000**	**763,849,378**	**70.60**	**100**								**100**
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	700,000,000	700,000,000	663,757,100	94.82	100	Dinas	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor tersedia	1	1	unit	1	unit	100
2	Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya	300,000,000	300,000,000	23,012,000	7.67	100	Kab. Klaten	Jumlah buku uji dan tanda uji tersedia	11,750	44,950	buah	950	buah	100
3	Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji	72,000,000	72,000,000	67,109,778	93.21	100	Kab. Klaten	Jumlah THL pengecatan	5	5	orang	5	orang	100
4	Pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang	10,000,000	10,000,000	9,970,500	99.71	100	Kab. Klaten	jumlah pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100
	JUMLAH TOTAL	**8,710,000,000**	**10,727,723,000**	**9,588,806,182**	**89.38**	**100**								**100**

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : KOMUNIKASI & INFORMATIKA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KOMINFO, BAGIAN HUMAS

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA														
I	**PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**380,000,000**	**555,000,000**	**511,835,481**	**92.2%**	**83**		**Persentase layanan administrasi kantor yang baik**		**100**	**%**	**100**	**%**	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	5,000,000	2,740,000	**54.8%**	80	Dinas Kominfo	Jumlah surat terkirim	2,500	2,500	surat	3,354	surat	134.16
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	30,000,000	29,957,740	**99.9%**	85	Dinas Kominfo	Jumlah THL	2	2	orang	2	orang	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	20,000,000	19,763,125	**98.8%**	100	Dinas Kominfo	Jumlah jenis ATK yang tersedia	31	31	jenis	31	jenis	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	15,000,000	14,795,000	**98.6%**	85	Dinas Kominfo	Jumlah jenis cetak penggandaan	4	4	jenis	4	jenis	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	10,000,000	10,000,000	5,577,000	**55.8%**	70	Dinas Kominfo	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	24	31	buah	31	buah	100
6	Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000	100,000,000	76,125,625	**76.1%**	80	Dinas Kominfo	Jumlah makanan dan minuman tersedia	610	3,040	paket	3,040	paket	100
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250,000,000	300,000,000	299,951,991	**100.0%**	100	Wilayah Indonesia	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	75	90	kali	181	kali	201
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30,000,000	75,000,000	62,925,000	**83.9%**	60	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	60	180	kali	777	kali	432
II	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**265,000,000**	**1,075,550,000**	**1,043,356,468**	**97.0%**	**73**		**Persentase peningkatan sarana dan prasarana dengan baik**		**100**	**%**	**100**	**%**	100
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	100,000,000	695,150,000	680,761,870	**97.9%**	80	Dinas Kominfo	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	**4**	44	unit	44	jenis	100
2	Pengadaan mebeleur	10,000,000	15,000,000	14,380,000	**95.9%**	100	Dinas Kominfo	Jumlah mebeleur terbeli	**2**	15	unit	15	macam	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	0	0		0	Dinas Kominfo	Jumlah gedung kantor terpelihara	**1**	0	unit	0		
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000	50,000,000	47,536,698	**95.1%**	80	Dinas Kominfo	Jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara	**2**	14	unit	14	kendaraan	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,000,000	22,000,000	21,800,000	**99.1%**	100	Dinas Kominfo	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	**6**	17	unit	17	peralatan	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi	50,000,000	250,000,000	236,316,500	**94.5%**	70	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah peralatan komunikasi dan informasi terpelihara	**1**	20	unit	20	OPD	100
7	Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor	33,000,000	43,400,000	42,561,400	**98.1%**	80	Dinas Kominfo	Jumlah ID Card tercetak	**2500**	3,500	buah	4,526	buah	129
III	**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**5,000,000**	**5,000,000**	**3,772,300**	**75.4%**			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		100	%	100	%	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	3,772,300	**75.4%**	100	Dinas Kominfo	Jumlah jenis dokumen (LKjIP, IKU, PK)	3	3	dokumen	3	dokumen	100
III	**PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA**	**3,565,000,000**	**7,020,950,000**	**6,479,848,505**	**92.3%**	**74**		**Persentase informasi sampai ke masyarakat**		**100**	**%**	**100**	**%**	**97**
1	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	2,915,000,000	4,996,950,000	4,630,343,144.00	**92.7%**	70	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah titik lokasi terakses internet	250	160	titik	161	titik	100.625
2	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	435,000,000	1,239,000,000	1,218,960,038	**98.4%**	70	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah sistem informasi	5	416	sistem informasi	416	sistem informasi	100
3	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	60,000,000	600,000,000	461,780,121	**77.0%**	60	Dinas Kominfo	Jumlah jenis dokumen (Review Masterplan e-Gov, Assesment jaringan, Perbub)	2	11	dokumen	9	dokumen	81.8
4	Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	70,000,000	100,000,000	94,109,720	**94.1%**	85	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah menara telekomunikasi yang terdata	232	226	unit	226	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet	10,000,000	10,000,000	7,917,000	**79.2%**	85	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah warnet yang terdata	100	105	unit	105	unit	100
6	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)	65,000,000	65,000,000	58,265,232	**89.6%**	90	Kabupaten Klaten	Jumlah KIM di tingkat kecamatan yang terdata	26	19	kelompok	19	kelompok	100
7	Penyusunan dokumen mikrocell menara telekomunikasi	10,000,000	10,000,000	8,473,250	**84.7%**	60	Kabupaten Klaten	Jumlah dokumen mikrocell	1	1	dokumen	1	dokumen	100
IV	**PROGRAM PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**	**300,000,000**	**580,000,000**	**486,580,950**	**83.9%**	**75**		**Persentase event kabupaten terpublikasi**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	300,000,000	580,000,000	486,580,950	**83.9%**	75	Dinas Kominfo	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi terlatih	120	535	orang	535	ORG	100
V	**KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA**	**540,000,000**	**1,051,000,000**	**1,027,080,383**	**97.7%**	**55**		**Persentase event kabupaten terpublikasi**		**100**	**%**	**100**	**%**	100
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	400,000,000	861,000,000	846,944,191	**98.4%**	60	Kabupaten Klaten	Jumlah informasi yang disebarluaskan	90	120	informasi	120	INFO	100
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	140,000,000	190,000,000	180,136,192	**94.8%**	50	Kabupaten Klaten	Persentase permintaan informasi publik terlayani/terjawab	59	65	persen	70	persen	108
VI	**INTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**		**100,000,000**	**76,599,931**	**76.6%**	**70**		**Persentase aduan masyarakat yang tertangani**		**100**	**%**	**82,5**	**%**	#VALUE!
1	Optimalisasi unit khusus penanganan pengaduan masyarakat		100,000,000	76,599,931	**76.6%**	70	Kabupaten Klaten	Jumlah aduan masyarakat yang masuk		120	aduan	120	aduan	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUMAS)														
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA**	**178,201,461**	**296,755,000**	**281,960,632**	**95.0%**	**100**	**RSPD Klaten**	**Meningkatnya Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**95%**	**95%**				0
1	Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	40,000,000	125,750,000	116,350,000	**92.5%**	100	RSPD Klaten	Jumlah Alat Studio Tersedia	3	3	Unit	3	Unit	100
2	Kegiatan Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	138,201,461	171,005,000	165,610,632	**96.8%**	100	RSPD Klaten	Jumlah Tenaga Operasional RSPD	9	9	Orang	9	Orang	100
II	**PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA**	**970,766,100**	**1,594,782,500**	**1,486,845,464**	**93.2%**	**100**	**Bagian Humas Setda Kab. Klaten**	**Meningkatnya Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media**	**95%**	**95%**				0
1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	406,185,000.0	858,385,000	770,290,500	**89.7%**	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Media Iklan Pembangunan Daerah Bagian Humas	23	23	Media	23	Media	100
2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	288,938,600.0	401,125,000	389,159,875	**97.0%**	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Dokumentasi Foto Pejabat, Album Dokumentasi, Seragam Liputan, Foto Presiden dan Wakil Presiden dan Tayangan Liputan Bagian Humas	13	13	Kegiatan	13	Kegiatan	100
3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	201,300,000.0	260,930,000	259,080,000	**99.3%**	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Dokumentasi Tersedia	1	1	Paket	1	Paket	100
4	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Mass Media	74,342,500.0	74,342,500	68,315,089	**91.9%**	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Koordinasi Antara Pemerintah Dengan Media Massa, Jumpa Pers, Hari Pers Nasional dan HUT RSPD Bagian Humas	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	JUMLAH TOTAL	6,203,967,561	12,279,037,500	11,397,880,114	92.8%									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM, KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM														
I	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**400,000,000**	**605,000,000**	**537,597,940**				Prosentase pertumbuhan UMKM						
1	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	0	175,000,000	159,904,000	91.37	100	KABUPATEN KLATEN	Jumlah orang yang dilatih		106	org	106	org	100
2	Pembinaan dan pemberdayaan UMKM	400,000,000	430,000,000	377,693,940	87.84	100	KABUPATEN KLATEN	jumlah pelaku usaha UMKM yang dibina dan diberdayakan	200	200	org	200	org	100
II	**Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM**	**200,000,000**	**375,000,000**	**333,278,500**				Prosentase promosi produk UKM						
1	Updating data usaha mikro kecil menengah	200,000,000	275,000,000	244,357,000	88.86	100	26 KECAMATAN	Jumlah data UMKM terupdate	1	55,066	pelaku usaha	55,066	pelaku usaha	100
2	Penyusunan kebijakan pengembangan usaha mikro kecil menengah	-	100,000,000	88,921,500	88.92	100	KABUPATEN KLATEN	jumlah penyelenggaraan pasar murah		5	dokumen	5	dokumen	100
III	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**340,900,000**	**430,000,000**	**399,524,387**				Prosentase koperasi aktif , Prosentase pertumbuhan koperasi, Prosentase manager koperasi yang bersertifikasi						
1	Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan koperasi	240,900,000	330,000,000	307,473,387	93.17	100	KABUPATEN KLATEN	Jumlah pengurus koperasi yang dibina dan dilakukan pengawasan	300	400	koperasi	400	koperasi	100
2	Penyelenggaraan pelatihan manajemen koperasi	100,000,000	100,000,000	92,051,000	92.05	100	KABUPATEN KLATEN	Jumlah manajer koprasi yang dilatih Kabupaten Klaten	60	60	org	60	koperasi	100
IV	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**700,000,000**	**865,000,000**	**705,716,734**				Prosentase promosi produk unggulan						
1	Penyelenggaraan pameran bagi usaha mikro kecil menengah	700,000,000	865,000,000	705,716,734	81.59	100	JAKARTA, SEMARANG, PALEMBANG, KLATEN, WIL. JAWA & LUAR JAWA	Jumlah event pameran yang diikuti	5	8	event	8	event	100
	KECAMATAN KLATEN SELATAN													
I	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**23,646,000**	**23,646,000**	**22,807,000**										
1	Pengembangan produk unggulan daerah	23,646,000	23,646,000	22,807,000	96.45	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah UMKM	1	1	keg	1	keg	100
	KECAMATAN NGAWEN													
I	**Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah**	**15,000,000**	**15,000,000**	**14,999,500**										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pelatihan penumbuhan usaha baru	15,000,000	15,000,000	14,999,500	100%	100%	kec. Ngawen	Jumlah desa yang dibina	13	13	desa	13	desa	100%
	KECAMATAN KEBONARUM													
I	**Program Pengembangan Kewirausahaab dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**0.00**	**20,000,000.00**	**19,790,600.00**										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	0	20,000,000	19,790,600	99	100	Kec Kebonarum	jenis pelatihan penumbuhan	-	1.00	kegiatan	1.00	kegiatan	100
	KECAMATAN PRAMBANAN													
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,694,500**										
1	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	12,000,000	12,000,000	11,694,500	97%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah RTM yang dilatih	125	125	orang	125	orang	**100**
	KECAMATAN KEMALANG													
I	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Konpetitif Usaha Kecil dan Menengah**	**35,000,000.00**	**35,000,000.00**	**0.00**										
1	Pelatiahan Penumbuhan Wirausaha Baru	35,000,000.00	35,000,000.00		0.00	**0**	Kecamatan Kemalang	jumlah peserta pelatihan	90	90	peserta			0%
	KECAMATAN KARANGNONGKO													
I	**Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,900,000**										
1	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	5,000,000	5,000,000	4,900,000	98.00	98.00	Kec.Karangnongko	jumlah wirausa baru terpenuhi	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00%
	KECAMATAN KARANGANOM													
I	**Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah**	16,000,000	16,000,000	15,998,200										
1	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	16,000,000	16,000,000	15,998,200	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah peserta pelatihan	50	50	Orang	50	Orang	100
	KECAMATAN TULUNG													
I	**Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah**	**15,000,000**	**15,000,000**	**-**						-	-	-	-	-
1	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah	15,000,000	15,000,000	0.00	0	**0**	Kec. Tulung	Jumlah desa yang menerima dana desa	18	18	Desa	0	Desa	0
	KECAMATAN POLANHARJO													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kec. Polanharjo	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Pelatihan WU Yang Dikembangkan	70	70	Peserta	30	Peserta	43%
	KECAMATAN JUWIRING													
I	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	28,823,432	13,845,436	12,975,900										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	28,823,432	13,845,436	12,975,900	94%	100	Kec. Juwiring	jumlah peserta latihan	60(orang)	19	desa	19	desa	100
	KECAMATAN KARANGDOWO													
I	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**12,414,750.00**										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	15,000,000	15,000,000	12,414,750	82.77	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pelatihan Wirausaha Baru	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
	KECAMATAN TRUCUK													
I	**PROG. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETOITIF USAHA KECIL MENENGAH.**	**14,500,000**	**14,500,000**	**13,658,000**										
1.	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru.	14,500,000	14,500,000	13,658,000	94.2	94	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan pelatihan	1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100
	KECAMATAN BAYAT													
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH**	***15,000,000***	***15,000,000***	***14,544,000***										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	15,000,000	15,000,000	14,544,000	97	100	Kec. Bayat	Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	30	30	peserta	30	peserta	100
	TOTAL		**2,489,991,436**	**2,134,900,011**										

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PENANAMAN MODAL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**647,130,000**	**805,395,000**	**765,199,477**		**96**								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,500,000	3,500,000	3,480,000	99	100	DPMPTSP	Frekuensi jumlah surat menyurat	766	766	Exp	766	Exp	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA,Listrik	110,000,000	110,000,000	99,732,217	82	92	DPMPTSP	Jumlah rekening	4	4	Jenis	4	Jenis	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41,000,000	41,000,000	39,534,328	85	92	DPMPTSP	Jumlah tenaga kebersihan dan jenis alat kebersihan	2 orang dan 47 jenis	2	Orang	2	orang	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	50,000,000	48,982,050	98	100	DPMPTSP	Jumlah jenis alat tulis kantor	60	60	Jenis	60	Jenis	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96,000,000	96,000,000	88,145,500	91	100	DPMPTSP	Jumlah jenis barang cetakan, jilid dan penggandaan	11 jenis,146410 lembar,50 buku	3	Jenis	3	Jenis	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	7,500,000	7,500,000	7,491,700	100	100	DPMPTSP	Jumlah jenis peralatan listrik	15	15	Jenis	15	Jenis	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,500,000	7,500,000	7,270,000	90	92	DPMPTSP	Jumlah jenis bahan bacaan	3	3	Jenis	3	Jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	10,000,000	25,000,000	19,916,500	75	100	DPMPTSP	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	50 kali rapat	50	Paket	50	Paket	100
9	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	121,735,000	250,000,000	245,021,441	92	92	DPMPTSP	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	275	200	Kali	200	Kali	100
10	Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,000,000	25,000,000	24,999,500	100	100	DPMPTSP	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	70	50	Kali	50	kali	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	45,000,000	45,000,000	42,653,092	79	92	DPMPTSP	Jumlah tenaga pengamanan dan alat	3 orang dan 4 alat	3	Orang	3	orang	100
12	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	15,550,000	15,550,000	15,253,364	83	92	DPMPTSP	Jumlah tenaga pengemudi	1 orang dan 2 jenis	1	Orang	1	orang	100
13	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	129,345,000	129,345,000	122,719,785	79	92	DPMPTSP	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	9 0rang dan 11 jenis	9	Orang	9	orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**	**159,000,000**	**324,000,000**	**306,178,215**		**96**								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	24,000,000	24,000,000.0	23,150,900.0	96	100	DPMPTSP	Jumlahjenis peralatan gedung kantor	2	3	Jenis	3	Jenis	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60,000,000	190,000,000.0	188,866,000.0	98	100	DPMPTSP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 keg	1	Jenis	1	Jenis	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45,000,000	55,000,000.0	40,261,315.0	70	85	DPMPTSP	Jumlah jenis kendaraan dinas yang terpelihara	20 unit	21.0	Jenis	21	Jenis	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30,000,000	55,000,000.0	53,900,000.0	96	100	DPMPTSP	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	60 unit	60.0	Jenis	60	Jenis	100
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,508,400**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,508,400.0	75	85	DPMPTSP	Jumlah jenis dokumen	3 jenis	3	Dokumen	3	Dokumen	100
III	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**240,500,000**	**648,950,000**	**528,840,840**		**95**								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	91,000,000	130,300,000	112,957,350	87	100	DPMPTSP	Jumlah even yang terlaksana	i buku dan 1 even	1	Event	1	Event	100
2	Koordinasi antara lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMD/PMA	49,500,000	49,500,000	41,388,480	84	100	DPMPTSP	Jumlah investor	50	50	Investor	50	Investor	100
3	Penyelenggaraan Promosi Investasi	100,000,000	469,150,000	374,495,010	39	85	Solo, Jkt dan Bali	Jumlah event yang terlaksana	1	4	Event	4	Event	100
IV	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**347,370,000**	**430,655,000**	**350,815,825**		**85**								
1	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	174,000,000	42,285,000	27,814,500	66	85	DPMPTSP	Jumlah jenis kegiatan	4 jenis	1	Kegiatan	1	kegiatan	100
2	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan	105,000,000	320,000,000	259,721,125	79	85	DPMPTSP	Jumlah jenis pelayanan perizinan	2.000.000 titik	5	Jenis	5	Jenis	100
3	Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	68,370,000	68,370,000	63,280,200	71	85	DPMPTSP	Jumlah izin yang dikendalikan	100	100	Izin	100	Izin	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
I	**Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**386,000,000**	**391,000,000**	**294,877,132**	**75**	**95**	**Kab. Klaten, Prov. Jateng, DKI Jakarta/Pusat**	**Prosentase Peningkatan Pendapatan BUMD**						
1	Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	11,000,000	11,000,000	112,500	1	90	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Jumlah frekuensi koordinasi PMA/PMDN, pemantauan investasi di Kab. Klaten	15	15	kegiatan	13	kegiatan	87
2	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	375,000,000	380,000,000	294,764,632	78	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng,	Jumlah frekuensi pembinaan BUMD, Koord direksi-karyawan BUMD, Koord intensifikasi PAD, Sosialisasi	82	82	kegiatan	90	kegiatan	110
JUMLAH TOTAL			**2,602,000,000**	**2,247,419,889**	**86.4**	**93**								

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, SETDA (BAGIAN KESRA), KECAMATAN, KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA														
I	**Program Peningkatan peran serta Kepemudaan**	**450,000,000**	**725,000,000**	**675,803,575**										
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	50,000,000	50,000,000	47,928,550	96	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan dalam 1 tahun	4	20	organisasi	20	organisasi	100
2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100,000,000	100,000,000	85,512,550	86	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100	100	orang	100	orang	100
3	Peningkatan dan pengembangan kepemudaan	300,000,000	575,000,000	542,362,475	94	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan kepemudaan	5	7	kegiatan	7	kegiatan	100
II	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	**250,000,000**	**250,000,000**	**238,283,000**										
1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	250,000,000	250,000,000	238,283,000	95	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pelatihan dan lomba kewirausahaan	100	100	peserta	100	peserta	100
III	**Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**	**75,000,000**	**75,000,000**	**61,576,900**										
1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	75,000,000	75,000,000	61,576,900	82	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba	660	100	orang	100	orang	100
IV	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**1,068,000,000**	**1,293,000,000**	**1,230,055,680**										
1	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	150,000,000	150,000,000	133,172,666	89	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berpartisipasi dan berdedikasi	100	100	orang	100	orang	100
2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga	70,000,000	220,000,000	205,281,100	93	100	Kab.Klaten	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan SDM olahraga	50	50	orang	50	orang	100
						100		lancarnya latihan cabang olahraga drumb band		1	set	1	set	100
3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	768,000,000	818,000,000	797,337,494	97	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya kompetisi olahraga POPDA, POR ABK, dan pengiriman kontingen ke solo raya dan Provinsi Jawa Tengah	100%	3200	orang	3200	orang	100
4	Pengiriman kontingen olahraga	80,000,000	105,000,000	94,264,420	90	100	Kab.Klaten	Persentase terkirimnya kontingen jarak jalan 28 km, sepakbola ASN,Lari marathon, dan olahraga tradisional	5	6	kontingen	6	kontingen	100
V	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**1,031,000,000**	**1,206,000,000**	**1,079,379,950**										
1	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	400,000,000	400,000,000	375,975,200	94	100	Kab.Klaten	Persentase terkirimnya regu paskibraka Kab.Klaten dan perwakilan seleksi Tingkat provinsi	70	70	orang	70	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	500,000,000	675,000,000	579,474,900	86	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pembinaan kegiatan olahraga untuk HUT RI, HUT Klaten, HUT Pemkab Klaten, Gerak Jalan Kepurun, Senam Car Free Day, dan Jombor 10K	7	9	kegiatan	9	kegiatan	100
3	Penyelenggaraan peringatan hari besar Kepemudaan dan Olahraga	131,000,000	131,000,000	123,929,850	95	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya sarasehan kepemudaan dan keolahrgaaan	200	200	orang	200	orang	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
VI	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**18,030,000**	**18,030,000**	**16,770,000**										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	18,030,000	18,030,000	16,770,000	93	93	Bagian kesra	Jumlah kegiatan senam jumat sehat di lingkungan pemda klaten	12 bulan	40 Kegiatan	kegiatan	40	kegiatan	93
KECAMATAN KLATEN UTARA														
I	**Program pembinaan pemuda dan olahraga**	**65,800,000**	**65,800,000**	**65,735,950**										
1	Fasilitas kegiatan olahraga tingkat kecamatan	30,800,000	30,800,000	30,796,000.00	99.99	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan dan jenis olahraga	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100.0
2	Fasilitas penylenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	35,000,000	35,000,000	34,939,950.00	99.83	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan upacara untuk menyambut HUT RI	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100.0
KELURAHAN BARENGLOR														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,999,100**										
1	Fasilitasi Kegiatan Olah raga	0	0											
2	Penyelenggaran Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	10,000,000	10,000,000	9,999,100	99,99	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah kegiatan olahraga	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KELURAHAN GERGUNUNG														
I	***Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga***	***10,000,000***	***10,000,000***	***9,999,900***										
1	Fasilitasi Kegiatan Olah raga	10,000,000	10,000,000	9,999,900	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah kegiatan fasilitasi olah raga	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	**100%**
KECAMATAN KLATEN TENGAH														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**35,000,000**	**35,000,000**	**34,999,900**										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	15,000,000	15,000,000	14,999,900	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat Kecamatan	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100%
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah penyelenggaraan peringatan Upacara HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KELURAHAN KABUPATEN														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan olahraga**	10,000,000	**10,000,000**	**9,961,000**										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Tk. Kec/Kel	10,000,000	10,000,000	9,961,000	99.61%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah kegiatan fasilitasi Olah Raga	1	1	keg	1	keg	100.00%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
KELURAHAN KLATEN														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,829,200**	97	100								
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	5,000,000	5,000,000	4,829,200	97	100	Kelurahan Klaten	Jumlah upacara Memperingati HUT RI	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
KELURAHAN TONGGALAN														
I	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**13,000,000**	**13,000,000**	**13,000,000**										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olah raga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	13,000,000	13,000,000	13,000,000	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan olahraga yang terselenggara	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KELURAHAN MOJAYAN														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olah raga**	**13,000,000**	**13,000,000**	**12,975,000**										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	13,000,000	13,000,000	12,975,000	100	100	Kel. Mojayan	Terwujudnya kegiatan olah raga	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		100
KELURAHAN BUNTALAN														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,050,000**										
1	Fasilitas kegiatan olahraga	10,000,000	10,000,000	9,050,000	90.50	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah kegiatan yang diadakan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
KELURAHAN BARENG														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**16,307,000**	**16,307,000**	**16,295,500**										
1	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga	16,307,000	16,307,000	16,295,500	**96.03**	**100**	kel.bareng	I Kegiatan Pemuda dan Olahraga	9	9	**rw**	9	**rw**	**100**
KECAMATAN KLATEN SELATAN														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**70,345,000**	**70,345,000**	**69,960,000**										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	33,916,000	33,916,000	33,531,000	98.86	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Olah Raga	3	3	keg	3	keg	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	36,429,000	36,429,000	36,429,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan HUT RI	3	3	keg	3	keg	100
KELURAHAN GAYAMPRIT														
I	**Program Pembinaan Pemuda & Olah Raga**	**Rp 11,000,000**	**11,000,000**	**11,000,000**										
1	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peserta lomba	9	9	RW	9	RW	100%
KECAMATAN KALIKOTES														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**36,650,000**	**53,650,000**	**50,909,300**										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	36,650,000	36,650,000	33,909,300	**93**	**100**	Kec.Kalikotes , Kec.Bayat, Kec.Manisrenggo	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	17,000,000	17,000,000	17,000,000	**100**	**100**	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan penyelenggaraan HUT RI	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
KECAMATAN NGAWEN														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**56,500,000**	**56,500,000**	**56,439,500**	**100%**	100%								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	31,500,000	31,500,000	31,492,500	100%	100%		Jumlah jenis kegiatan olah raga	1	1	paket	1	paket	100%
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	25,000,000	25,000,000	24,947,000	100%	100%		Jumlah penyelenggaraan Upacara	1	1	paket	1	paket	100%
KECAMATAN KEBONARUM														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga**	**19,674,333.00**	**19,674,333.00**	**19,674,300.00**										
1	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	5994333	5,994,333.00	5,994,300.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan olah raga yang terfasilitasi	1	1.00	KEG	1	KEG	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	13680000	13,680,000.00	13,680,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan upacara HUT RI	4	4.00	KEG	4	KEG	100
KECAMATAN WEDI														
I	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**45,000,000**	**45,000,000**	**43,749,500**										
1.	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,249,500	97.00	100	Kecamatan Wedi	Jumlah kegiatan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	20,000,000	20,000,000	19,500,000	97.00	100	Lapangan Desa Pasung	Jumlah kegiatan HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KECAMATAN JOGONALAN														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**40,000,000**	**40,000,000**	**37,690,600**										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	23,445,600	93.78	100	Kec. Jogonalan	Jumlah O R yang dilaksanakan	5	5	kgtn	5	kgtn	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	15,000,000	15,000,000	14,245,000	94.97	100	Kec. Jogonalan	Jumlah upacara HUT RI	2	2	kgtn	2	kgtn	100
KECAMATAN GANTIWARNO														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**57,000,000**	**57,000,000**	**56,967,500**										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/ Keluarahan	22,000,000	22,000,000	21,967,500	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasinya Kegiatan olahraga	12	15	Kali	15	Kali	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasinya Peny. Upacara HUT RI	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
KECAMATAN PRAMBANAN														
I	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**36,000,000**	**36,000,000**	**27,917,000**				**Prosentase pemenuhan pembinaan pemuda dan olahraga**						
1	Fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan	25,000,000	25,000,000	16,917,000	68%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan olahraga (gethek, gerak jalan kepurun, jomborton dan senam umum jumat)	4	4	kegiatan	4	kegiatan	**100**
2	Fasilitasi penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100%	100%		Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan HUT kemerdekaan RI Tk. Kecamatan Prambanan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	**100**
KECAMATAN MANISRENGGO														
I	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**34,000,000**	**34,000,000**	**33,916,200**										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	17,000,000	17,000,000	16,920,000	99.53	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah kegiatan Olah Raga (senam, Lomba Gethek, Jombor Thon dan Gerak Jalan Kepurun)	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Fasillitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	17,000,000	17,000,000	16,996,200	99.98	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis kegiatan Upacara	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
KECAMATAN KEMALANG														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahrag**	**37,500,000**	**42,500,000**	**37,788,500**										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	22,500,000	22,500,000	19,337,500	85.94	**100**	**Kecamatan Kemalang**	Jumlah kegiatan olahraga yang terselenggara	15	15	Kegiatan	15	Kegiatan	100%
2	Penyelenggaraan Upacara Periangatan Hari Ulang Tahun Republik Iepublik Indonesian (HUT RI)	15,000,000	20,000,000	18,451,000	92.26	**100**	**Kecamatan Kemalang**	Jumlah Kegiatan Upacara yang terselenggara	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
KECAMATAN KARANGNONGKO														
I	**Program pembinaan pemuda dam olahraga**	**55,000,000**	**67,000,000**	**66,925,000**	99.89	99.89	**Kec.Karangnongko**							
1	Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan	35,000,000.00	47,000,000	46,950,000	99.89	99.89	**Kec.Karangnongko**	jumlah Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
2	Penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun republik indonesia (HUT RI)	20,000,000	20,000,000	19,975,000	99.88	99.88	**Kec.Karangnongko**	jumlah Penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun republik indonesia (HUT RI) terpenuhi	1	1	Kali	1	Kali	100%
KECAMATAN JATINOM														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga :**	**55,000,000**	**45,000,000**	**44,920,700**	**99.82**	**100**								
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	20,000,000	20,000,000	19,990,000	99.95	100		Terwujudnya fasilitasi kegiatan olahraga	5	5	macam	5	macam	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara HUT RI	35,000,000	25,000,000	24,930,700	99.72	100		Terwujudnya fasilitasi Upacara HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KELURAHAN JATINOM														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**15,775,000**	**15,775,000**	**15,773,300**										
1	Fasilitasi kegiatan olahraga	15,775,000	15,775,000	15,773,300	99.99	100		Jumlah kegiatan olah raga yang dilaksanakan	2	2	Guru	2	Guru	100
KECAMATAN KARANGANOM														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**36,750,000**	**48,800,000**	**44,937,800**				**Persentase pembinaan pemuda dan olahraga**						
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	27,800,000	27,800,000	25,648,500	92	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah kegiatan olahraga terlaksana	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	8,950,000	21,000,000	19,289,300	92	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI	1	1	Kali	1	Kali	100
KECAMATAN TULUNG														
I	**Program pembinaan pemuda dan olahraga**	**53,300,000**	**53,300,000**	**21,473,900**				**Persentase pembinaan pemuda dan olahraga**						
1	Fasilitasi Kegiatan Olah raga tingkat Kecamatan	38,300,000	38,300,000	7,450,000	19	100	Kec Tulung	Jumlah kegiatan olahraga terlaksana	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
2	Fasiltasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	15,000,000	15,000,000	14,023,900	93	100	Kec Tulung	Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI	1	1	Kali	1	Kali	100
KECAMATAN POLANHARJO														
I	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDAAN OLAH RAGA**	**45,500,000**	**45,500,000**	45,001,500	99%	99%		**Prosentase Kenaikan Pemuda Yang Berprestasi dalam Peringatan Hari Besar Nasional**						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara HUT RI	15,500,000	15,500,000	15,482,000	100%	100%	Kec. Polanharjo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Upacara HUT RI	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
2	Fasilitasi Kegiatan Olahraga	30,000,000	30,000,000	29,519,500	98%	98%	Kec. Polanharjo	Jumlah Tim Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	3	3	TIM	3	TIM	100%
KECAMATAN DELANGGU														
I	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**41,500,000**	**41,500,000**	**40,331,100**										
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Tk Kec.	31,500,000	31,500,000	30,452,600	96.67	97	Kec. Delanggu	Jml. Kegiataan olah raga ditingkat kec.	4	4	bh	4	bh	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara HUT RI	10,000,000	10,000,000	9,878,500	98.79	99	Kec. Delanggu	Jml. Kegiatan uparaca HUT RI kecamatan	1	1	kali	1	kali	100
KECAMATAN JUWIRING														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**43,715,000**	**56,850,000**	**39,700,000**			Kec. Juwiring							
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	26,115,000	26,115,000	22,230,000	85%	90	Kec. Juwiring	jumlah event olahraga	4	5	kegiatan	5	kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	17,600,000	30,735,000	17,470,000	57%	75	Kec. Juwiring	jumlah peserta upacara	28 (instansi)	1500	peserta	1500	peserta	100
KECAMATAN WONOSARI														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**44,593,000**	**44,593,000**	**38,251,000**										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	30,563,000	30,563,000	25,341,000	82.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	6	6	kegiatan	6	kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	14,030,000	14,030,000	12,910,000	92.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah peserta Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	3000	3000	orang	3000	orang	100
KECAMATAN CEPER														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**71,500,000**	**71,500,000**	**63,192,600**										
1	Penyelenggaraan Kegiatan olahraga tk kecamatan	26,500,000	26,500,000	21,558,200.00	0.81	85	Kec Ceper	jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan	4	4	kali	4	kali	100
2	penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	45,000,000	45,000,000	41,634,400.00	0.93	95	Kec Ceper	jumlah peringatan penyelenggaraan upacara HUT RI	2	2	kali	2	kali	100
KECAMATAN PEDAN														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**71,500,000**	**71,500,000**	**71,100,000**	**99.44**	**99.44**	Kecamatan Pedan							
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	31,500,000	31,500,000	31,500,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jjumlah kegiatan olahraga Tk Kecamatan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	40,000,000	40,000,000	39,600,000	99.00	99.00	Kecamatan Pedan	jumlah penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KECAMATAN KARANGDOWO														
I	**Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**41,500,000**	**41,500,000**	**36,094,750**	86.98	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	31,500,000	31,500,000	28,230,500	89.62	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kegiatan Olahraga	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	10,000,000	10,000,000	7,864,250	78.64	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kegiatan HUT	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
KECAMATAN CAWAS														
I	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA**	**13,750,000**	**13,750,000**	**13,737,500**	100	100	Kecamatan Cawas							
1	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	13,750,000	13,750,000	13,737,500	100	100	Kecamatan Cawas	jumlah lomba olah raga yg di pertandingkan (lomba volley, lomba badminton)	2	2	lomba	2	lomba	100%
II	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**31,162,000**	**31,162,000**	**29,962,000**	96	100	Kecamatan Cawas							
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	19,547,000	19,547,000	18,697,000	96	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Olahraga (lomba gethek, gerak jalan kepurun, Jombor Ton)	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100%
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	11,615,000	11,615,000	11,265,000	97	100	Kecamatan Cawas	jumlah Kegiatan Fasilitasi HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KECAMATAN TRUCUK														
I	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**38,000,000**	**68,000,000**	**67,779,200**										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	22,000,000	22,000,000	21,999,500	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan olahraga	4 jenis	4	jenis	4	jenis	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT-RI	16,000,000	46,000,000	45,779,700	99.5	100	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan Upacara HUT RI	1 jenis	1	jenis	1	jenis	100
KECAMATAN BAYAT														
I	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**	***47,900,000***	***47,900,000***	***38,759,500***				***Prosentase Tingkat Jumlah Pembinaan pemuda dan Olahraga***	***100***	100	%	100	%	100
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Tingat Kecamatan	26,500,000	26,500,000	20,643,000	78	100	Kec. Bayat	Jumlah kegiatan / even olahraga yang difasilitasi	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	21,400,000	21,400,000	18,116,500	85	100	Kec. Bayat	Jumlah Penyelenggaraan upacara	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
	JUMLAH		**4,984,436,333**	**4,612,666,905**	**92.5**									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG STATISTIK

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
I	**PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/STATISTIK DAERAH**		**200,000,000**	**189,082,246**				Persentase dokumen statistik daerah yang tersedia		100	%	100	%	100
1	Penyusunan data statistik perencanaan daerah		200,000,000	189,082,246	95	60	Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen (KKDA, IHK, PDRB, IPM)		6	dokumen	6	dokumen	100
	TOTAL		**200,000,000**	**189,082,246**	**95**	**60**								**100**

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PERSANDIAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
I	**PROGRAM PENINGKATAN PERSANDIAN DAERAH**	**30,000,000**	**30,000,000**	**27,333,150**				Persentase event kabupaten terpublikasi	100	100	%	100	%	100
1	Identifikasi jenis informasi dan persandian	10,000,000	10,000,000	7,698,400	77	60	Kab. Klaten	Jumlah dokumen yang berisi informasi berklasifikasi sandi Kabupaten Klaten	1	1	dokumen	1	dokumen	100
2	Implementasi operasional persandian oleh Perangkat Daerah	20,000,000	20,000,000	19,634,750	98	65	Kab. Klaten	Jumlah sosialisasi informasi berklasifikasi sandi Kabupaten Klaten	2	2	kali	2	kali	100
	JUMLAH TOTAL	**30,000,000**	**30,000,000**	**27,333,150**	**91**									**100**

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG KEBUDAYAAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA, BAGIAN HUMAS, KECAMATAN, KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA														
I	**Program Pengembangan nilai budaya**	**185,000,000**	**185,000,000**	**160,626,500**	**87**	**100**		**Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah, kawasan cagar budaya, situs dan benda cagar budaya**						
1	Optimalisasi pengelolaan situs dan benda-benda cagar budaya	125,000,000	125,000,000	108,505,300	87	100	Kab.Klaten	Presentase terlaksananya verifikasi dan inventarisasi situs yang diduga cagar budaya	5	5	Obyek	5	Obyek	100
2	Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional	60,000,000	60,000,000	52,121,200	87	100	Kab.Klaten	Presentase terselenggaranya upaya pelestarian peninggalan sejarah dan nilai nilai tradisional melalui pelatihan jurnalistik dan lomba penulisan cagar budaya	150	150	Pelajar	150	Orang	100
II	**Program Pengelolaan Budaya**	**2,640,000,000**	**2,795,000,000**	**2,565,670,071**	**92**	**100**		**Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah, kawasan cagar budaya, situs dan benda cagar budaya**						
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan Budaya	25,000,000	25,000,000	21,974,650	88	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya rakor kebudayaan	100	100	Orang	100	Orang	100
2	Pengiriman tim kesenian	350,000,000	350,000,000	323,478,134	92	100	Kabupaten lainnya/provinsi/TMII	Persentase terselenggaranya kegiatan promosi kesenian ke daerah lain (TMII, Provinsi Jawa Tengah)	4	4	Tim	4	Tim	100
3	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	75,000,000	110,000,000	101,256,431	92	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
4	Kirab budaya dan pentas seni	1,420,000,000	1,615,000,000	1,523,128,703	94	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya berbagai macam pentas kesenian di kabupaten klaten	31	31	Kegiatan	31	Kegiatan	100
5	Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata	200,000,000	200,000,000	176,024,050	88	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya pengembangan seni budaya dan atraksi wiata	2	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
6	Pagelaran wayang kulit	500,000,000	425,000,000	378,881,800	89	100	Kab.Klaten	Persentase trerlaksananya pagelaran wayang kulit	3	3	Kali	3	Kali	100
7	Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah	70,000,000	70,000,000	40,926,303	58	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya penanyangan bioskop keliling	10	10	Kali	10	Kali	100
III	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**75,000,000**	**75,000,000**	**71,316,000**	**95**	**100**		**Terfasilitasinya keg Dialog antar Kel Aliran kepercayaan**						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	75,000,000	75,000,000	71,316,000	95	100	Kab.Klaten	Persentase terfasilitasinya dialog antar kelompok aliran kepercvayaan di kabupaten Klaten	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUMAS)														
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**355.200.000**	**465,000,000.00**	**464,600,000.00**	**100.00**	**100**	**Bagian Humas Setda Kab. Klaten**	**Meningkatnya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**8%**	**8%**				
1	Kegiatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	355.200.000	**465,000,000.00**	464,600,000.00	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Kegiatan Untuk Memfasilitasi Siaran Radio dan Pementasan Budaya Wayang, Kethoprak, Karawitan dan Drama RSPD	5	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100
	KECAMATAN KLATEN UTARA													
	KECAMATAN KLATEN UTARA													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**140,000,000**	**140,000,000**	**132,082,350**										
1	Fasilitas dan pengirim tim kesenian	30,000,000	30,000,000	25,682,900.00	85.61	90	Kec.Klaten Utara	Jumlah dan jenis tim yang dikirim	4	4	Jenis	4	Jenis	100.0
2	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	110,000,000	110,000,000	106,399,450.00	96.73	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kesenian yang dikelola dan dikembangkan	4	4	Jenis	4	Jenis	100.0
	KELURAHAN BARENG LOR													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**3,000,000**	**3,000,000**	**2,979,600**										
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	3,000,000	3,000,000	2,979,600	99,32	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kesenian	12	12	keg	12	keg	100
KECAMATAN KLATEN TENGAH														
	KECAMATAN KLATEN TENGAH													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**230,000,000**	**230,000,000**	**230,000,000**	100%	100%								
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah tim kesenian yang dikirim	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah kegiatan pengembangan dan kebudayaan daerah	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100%
3	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah penyelenggaraan ketoprak remaja	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
	KELURAHAN KLATEN													
I	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**15,000,000**	**15,000,000**	**14,995,750**	**100**	**100**								
1	Pelest. Peninggalan Sejarah dan Nilai2 Tradis.	15,000,000	15,000,000	14,995,750	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah Pemeliharaan Makam Kyai Melati (Pengecatan dan Pengembangan Taman)	2	2	Paket	2	Paket	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KECAMATAN KLATEN SELATAN													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**191,295,000**	**191,295,000**	**184,131,000**	**97.73**	**100**	Kec. Klaten Selatan							
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	28,635,000	28,635,000	28,585,000	99.83	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Tim Kesenian yang di Kirim	3	3	jenis	3	jenis	100
2	Pengembagan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	162,660,000	162,660,000	155,546,000	95.63	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Senibudaya yang dikembangkan dan even Kabupaten yang diikuti	3	5	jenis	3	jenis	100
	KECAMATAN KALIKOTES													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**139,669,000**	**155,669,000**	**145,319,600**	**93**	**100**	Kec.Kalikotes	**Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya**	**100**	**100**				
1	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	70,000,000	70,000,000	60,550,600	**87**	**87**	Desa Gemblegan	Jumlah pengiriman tim kesenian	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	69,669,000	85,669,000	84,769,000	**99**	**100**	Jln. Pemuda,Kec. Cawas, Kec.Kemalang	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
	KECAMATAN NGAWEN													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**115,000,000**	**115,000,000**	**106,438,450**	**93%**	100%								
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	21,893,450	73%	100%		Kesenian gejog lesung dan jathilan	2	2	keg	2	keg	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	85,000,000	85,000,000	84,545,000	99%	100%		Terwujudnya pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	4	4	keg	4	keg	100%
	KECAMATAN KEBONARUM													
I	**Program Pengembangan Kekayaan Budaya**	**139,500,000.00**	**139,500,000.00**	**139,500,000.00**										
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	89,500,000.00	89,500,000.00	89,500,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah tim kesenian yang dikirim	6	6	tim	6	tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah seni budaya yang dikembangkan	2	2	keg	2	keg	100
	KECAMATAN WEDI													
I	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**140,000,000**	**140,000,000**	**132,050,000**										
1	Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	22,820,000	76.07	100	Wil. Kab. Klaten	Jumlah tim kesenian	3	3	tim	3	tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	110,000,000	110,000,000	109,230,000	99.30	100	Wil. Kab. Klaten	Jumlah kegiatan	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100
	KECAMATAN JOGONALAN													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**140,000,000**	**140,000,000**	**135,917,200**	**97.08**									
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	29,311,300	97.70	100	Kec. Jogonalan	Jumlah pengiriman tim kesenian	4	4	tim	4	tim	100
2	Pengembagan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	110,000,000	110,000,000	106,605,900	96.91	100	Kec. Jogonalan	Jumlah pementasan kebudayaan dan kesenian	3	3	kgtn	3	kgtn	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KECAMATAN GANTIWARNO													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**15,000,000**	**15,000,000**	**13,003,250**										
1	Pengiriman Tim Kesenian	15,000,000	15,000,000	13,003,250	87	100	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasinya tim kesenian	2	2	Tim	2	Tim	100
I	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**85,000,000**	**85,000,000**	**83,750,000**										
1	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	85,000,000	85,000,000	83,750,000	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Terlaksanaya kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
	KECAMATAN PRAMBANAN													
I	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**483,200,000**	**483,200,000**	**468,352,300**	**97%**	**100%**		**Prosentase pemenuhan pengelolaan kekayaan budaya**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1	Pengiriman Tim Kesenian	26,400,000	12,829,000	11,835,000	92%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pengiriman tim kesenian tradisional (gejog lesung, jathilan dan tari gambyong)	3	3	kegiatan	3	kegiatan	**100**
2	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	106,800,000	106,800,000	100,337,500	94%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah	5	5	kegiatan	5	kegiatan	**100**
3	Kirab Budaya dan Pentas Seni	350,000,000	363,571,000	356,179,800	98%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan gerobak sapi, festival candi kembar dan festival candi sojiwan	3	3	even	3	even	**100**
	KECAMATAN MANISRENGGO													
I	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**240,370,056**	**275,000,000**	**261,667,750**										
1	Fasilitasi & Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	21,980,000	73.27	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah Tim Kesenian Terkirim	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
2	Pengembagan Kesenian & Kebudayaan Daerah	94,770,056	95,000,000	91,195,000	95.99	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan event Kab. Yang diikuti	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
3	Kirab Budaya dan Pentas Seni	100,000,000	100,000,000	98,494,650	98.49	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan event Kab. Yang diikuti	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
4	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	15,600,000	50,000,000	49,998,100	100.00	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan event Kab. Yang diikuti	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
	KECAMATAN KEMALANG													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**161,379,000.00**	**176,379,000.00**	**136,129,000.00**										
1	Pengiriman Tim Kesenian	25,000,000.00	25,000,000.00	12,999,500.00	52.00	**100**	Kecamatan Kemalang	Jumlah tim kesenian yang terkirim	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Buaya Daerah	36,379,000.00	36,379,000.00	32,680,000.00	89.83	**100**	Kecamatan Kemalang	Jumlah kesenian dan Budaya daerah yang dikembangkan	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
3	Fasiltasi Perayaan Tradisional	100,000,000.00	115,000,000.00	90,449,500.00	78.65	**100**	Kecamatan Kemalang	Jumlah perayaan tardisional yang terfasiltasi	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
	KECAMATAN KARANGNONGKO													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program pengelolaan kekayaan budaya**	**118,000,000**	**138,000,000**	**137,404,960**	99.57	99.57	Kec. Karangnongko							
1	Pengiriman tim kesenian	20,000,000	40,000,000	39,727,000	99.32	99.32	Kec. Karangnongko	jumlah Pengiriman tim kesenian terpenuhi	2	2	Tim Kesenian	2	Tim Kesenian	100.00%
2	Pengiriman tim kesenian dan kebudayaan daerah	98,000,000	98,000,000	97,677,960	99.67	99.67	Kec. Karangnongko	jumlah Pengiriman tim kesenian dan kebudayaan daerah terpenuhi	3	3	Even	3	Even	100.00%
KECAMATAN JATINOM														
	KECAMATAN JATINOM													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya :**	**219,554,500**	**281,954,500**	**277,950,400**	**98.58**	**100**								
1	Pengiriman Tim Kesenian	29,554,500	29,554,500	29,465,500	99.70	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya pengiriman Tim Kesenian	4	4	jenis	4	jenis	100
2	Pengembangan Tim Kesenian dan Kebudayaan Daerah	-	62,400,000	62,369,000	99.95	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya kirab budayadan pentas seni	-	3	jenis	3	jenis	100
3	Fasilitasi Perayaan Tradisional	190,000,000	190,000,000	186,115,900	97.96	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya Perayaan Tradisional	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
	KELURAHAN JATINOM													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**15,000,000**	**15,000,000**	**14,807,100**										
1	Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu	15,000,000	15,000,000	14,807,100	98.71	100	Kel. Jatinom	Jumlah Kegiatan Yaa Qowiyyu	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
	KECAMATAN KARANGANOM													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**230,000,000**	**230,000,000**	**229,687,950**				**Persentase pengelolaan kekayaan budaya**						
1	Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	29,829,650	99	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pengiriman tim kesenian	3	3	Tim	3	Tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	100,000,000	100,000,000	99,949,000	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kesenian yang dikembangkan	4	4	Kesenian	4	Kesenian	100
3	Kirab Budaya dan Pentas Seni	100,000,000	100,000,000	99,909,300	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah kirab seni budaya yang terselenggara	1	1	Kali	1	Kali	100
	KECAMATAN TULUNG													
I	**Program pengelolaan kekayaan Budaya**	**140,000,000**	**140,000,000**	**76,330,000**										
1	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	30,000,000	30,000,000	23,002,000	77	100	Kec Tulung	Jumlah pengiriman tim kesenian	3	3	Tim	3	Tim	100
2	Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah	110,000,000	110,000,000	53,328,000	48	100	Kec Tulung	Jumlah kesenian yang dikembangkan	4	4	Kesenian	4	Kesenian	100
	KECAMATAN POLANHARJO													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**126,000,000**	**126,000,000**	125,430,950	100%	100%		**Prosentasde Kenaikn Penyelenggaraan Seni dan budaya**						
1	Fasilitasi dan Pengiriman tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	29,845,000	99%	99%	Kec. Polanharjo	Jumlah Kegiatan Pengiriman Tim Gejok Lesung, Jathilan dan Gambyong	3	3	Kali	3	Kali	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	96,000,000	96,000,000	95,585,950	100%	100%	Kec. Polanharjo	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kebud Daerah	4	4	Kali	4	Kali	100%
	KECAMATAN DELANGGU													
I	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**140,000,000**	**125,754,000.00**	**123,277,300.00**										
1	Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	15,754,000	15,379,500	97.62	98	Kec. Delanggu	Jnl. Tim kesenian yang dikirim kkecamatan	3	3	tim	3	tim	100
2	Pegembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	110,000,000	110,000,000	107,897,800	98.09	98	Kec. Delanggu	Jml. Pengembangan kesenian di wilayah	5	5	bh	5	bh	100
	KECAMATAN JUWIRING													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**99,263,000**	**125,000,000**	**82,445,000**										
1	Pengiriman Tim Kesenian	14,263,000	25,000,000	11,430,000	46%	80	Kec. Juwiring	jumlah tim kesenian yang dikirim	3	5	tim	5	tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	85,000,000	100,000,000	71,015,000	71%	80	Kec. Juwiring	jumlah event kesenian yang diikuti	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
	KECAMATAN WONOSARI													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**152,688,000**	**142,098,000**	**112,541,500**										
1	Pengiriman Tim Kesenian	36,750,000	26,160,000	16,078,000	61.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tim Kesenian yang dikirim pada Even Tk Kabupaten Klaten	2	2	Tim	2	Tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	115,938,000	115,938,000	96,463,500	83.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Daerah tang terselenggara	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100
	KECAMATAN CEPER													
I	**Program pengelolaan kekayaan budaya**	**150,700,000**	**150,700,000**	**137,945,750.00**										
1	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	20,000,000	20,000,000	19,055,750.00	95%	95	Kab Klaten	jumlah tim kesenian terkirim	3	3	Tim	3	Tim	100
2	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	70,960,000	70,960,000	61,300,000.00	86%	90	Kab Klaten	jumlah/fekuensi event kesenian/kebudayaan	4	4	Kali	4	Kali	100
3	Penyelenggaraan festival sendang sinongko	59,740,000	59,740,000	57,590,000.00	96%	96	Kec Ceper	jumlah penyelengg. Festival sendang sinongko	2	2	Keg	2	Keg	100
	KECAMATAN PEDAN													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**155,000,000**	**155,000,000**	**153,900,000**	**99.29**	**99.29**	Kecamatan Pedan							
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	28,900,000	96.33	96.33	Kecamatan Pedan	jjumlah pengiriman kesenian tradisional	3	3	jenis	3	jenis	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	125,000,000	125,000,000	125,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	6	6	kegiatan	6	kegiatan	100%
	KECAMATAN KARANGDOWO													
I	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**139,750,000**	**139,750,000**	**130,316,500**	**93.24**	**100**	**Kecamatan Karangdowo**	**Jumlah Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	15,019,000	15,019,000	14,973,800	99.70	100	Kecamatan Karangdowo	jumlah kesenian	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	124,731,000	124,731,000	115,342,700	92.47	100	Kecamatan Karangdowo	jumlah pagelaran seni dan budaya tradisional jenis kesenian	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%
	KECAMATAN CAWAS													
I	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**290,924,000**	**290,924,000**	**254,112,250**	87	100	Kecamatan Cawas							
1	Pengiriman Tim Kesenian	27,705,000	27,705,000	23,950,000	86	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Pengiriman tim Kesenian(tim jathilan, tim gejok lesung)	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
2	Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	263,219,000	263,219,000	230,162,250	87	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Budaya dan Penyelenggaraan Kirab Satu Suro (Festival Lesung,Wayangan, lurik karnival, mobil hias, upacara hari jadi, Grebeg Pasar Cawas, kirab budaya, kirab satu suro)	6	6	Kegiatan	6	Kegiatan	100%
	KECAMATAN TRUCUK													
I	**PROG. PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**128,950,000**	**128,950,000**	**128,350,000**	99.5									
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian.	30,000,000	30,000,000	29,800,000	99.3	100	Kec. Trucuk	Jumlah pengiriman tim	2 jenis	3	jenis	3	jenis	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	98,950,000	98,950,000	98,550,000	99.6	100	Kec. Trucuk	Jumlah kesenian yang dikembangkan	5 jenis	5	jenis	5	jenis	100
	KECAMATAN BAYAT													
I	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	***302,000,000***	***302,000,000***	***271,343,100***				***Prosentase jumlah tingat capaian program pengelolaan budaya***	***100***	100	***%***	***%***	*100*	100
1	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	200,000,000	200,000,000	189,242,000	95	100	Kab.Klaten	Jumlah kegiatan pengembangan dan pariwisata	1	3	kegiatan	kegiatan	3	100
2	Pengiriman Tim Kesenian	22,000,000	22,000,000	8,803,100	40	100	Kab.Klaten	Jumlah kegiatan yang diikuti	3	3	tim	tim	3	100
3	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	80,000,000	80,000,000	73,298,000	92	100	Kab.Klaten	Jumlah kegiatan kesenian dan kebudayaan kecamatan bayat	4	4	Event	Event	4	100
	JUMLAH		**8,315,173,500**	**7,704,371,581**	**92.7**									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PERPUSTAKAAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN														
I	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**1,710,186,000**	**1,970,276,500**	**1,692,887,360**	**85.92**	**100%**								
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	356,810,000	356,810,000	319,276,520	89.48	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah kebutuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakan umum Kab klaten	12	12	bulan	12	bulan	100
2	Pengembangan minat dan budaya baca	82,376,000	203,466,500	108,356,250	53.26	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah kebutuhan baca dan pelatihan ketrampilan untuk masyarakat (perpustakaan seru)	12	12	bulan	12	Perpustakaan	100
3	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	71,000,000	210,000,000	197,003,890	93.81	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah bahan pustaka dinas arsip dan perpustakaan	1,081	2,050	judul/ eks	4,536	eks	221.26829
4	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan (DAK Bid. Pendidikan)	1,000,000,000	1,000,000,000	892,391,700	89.24	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah rehabiitasi gedung dan taman	2	2	lokasi	2	lokasi	100
5	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan (DAK Bid. Pendidikan)	200,000,000	200,000,000	175,859,000	87.93	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah peralatan komputer	20	20	unit	20	unit	100
	JUMLAH TOTAL	**1,710,186,000**	**1,970,276,500**	**1,692,887,360**	**86**	**100%**								

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG KEARSIPAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**551,499,000**	**799,779,000**	**677,992,140**	**85**									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah item perlengkapan jasa surat menyurat	1,200	1,200	surat	1,500	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56,000,000	135,000,000	86,783,835	64	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah Jasa komunikasi, sumber air, listrik, menabah daya listrik dan meningkatkan bandwith	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	14,000,000	14,000,000	13,600,772	97	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah tenaga harian lepas untuk tenaga administrasi dan keuangan	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70,728,000	70,728,000	68,321,288	97	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah tenaga harian lepas untuk kebersihan kantor	4	4	orang	4	orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	17,671,000	17,671,000	17,098,900	97	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah alat tulis kantor	1	1	paket	1	paket	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	40,000,000	30,441,000	76	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah blangko cetakan dan penggadaan	9	9	paket	9	paket	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,165,000	9,165,000	7,178,300	78	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah penerangan kantor dan pemasangan instalisasi listrik	1	1	paket	1	paket	100%
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	10,000,000	10,000,000	9,475,000	95	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	12	12	bulan	12	bulan	100%
9	Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000	60,000,000	41,176,000	69	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, tamu dan karyawan	1	1	paket	1	paket	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120,000,000	217,550,000	217,549,241	100	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah perjalankan dinas luar dalam 1 tahun	12	12	bulan	12	kegiatan	100%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30,000,000	30,000,000	29,988,500	100	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah perjalankan dinas dalam dalam 1 tahun	12	12	bulan	12	kegiatan	100%
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	88,450,000	88,450,000	54,541,464	62	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah THL Keamanan	4	4	orang	4	orang	100%
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	70,485,000	70,485,000	69,008,840	98	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Penyediaan pengemudi kantor dan perpustakaan	5	5	orang	5	orang	100%
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	10,000,000	26,730,000	22,829,000	85	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	7	7	dokumen	7	dokumen	100%
II	**Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**	**130,000,000**	**1,052,812,500**	**925,444,030**	**88**									
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	250,000,000	219,610,780	88	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	-	22	unit	22	unit	100%
16	Pengadaan mebeleur	-	422,812,500	364,873,600	86	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah mabeluer terbeli	-	129	unit	129	unit	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,000,000	100,000,000	94,055,150	94	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara	24	24	unit	24	unit	100%
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30,000,000	30,000,000	18,845,000	63	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung	1	1	paket	1	paket	100%
19	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	250,000,000	228,059,500	91	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah gedung kantor terehabilitasi	-	1	paket	1	paket	100%
III	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**27,340,000**	**27,340,000**	**18,861,880**	**69**									
20	Pembangunan data base informasi kearsipan	13,600,000	13,600,000	11,205,880	82	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah tenaga, peralatan dan server untuk sistem informasi	1	1	paket	1	paket	100%
21	Audit dan Pengawasan Kearsipan	13,740,000	13,740,000	7,656,000	56	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah OPD yang diaudit karsipan	7	5	OPD	5	OPD	100%
IV	**Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**	**202,714,000**	**308,681,000**	**261,331,000**	**85**									
22	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	130,268,000	212,505,000	197,671,600	93	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah dokumen inaktif dan statis milik OPD yang diserahkan ke dinas arsip dan perpustakaan 100 meter lari	100	100	meter lari	100	meter lari	100%
23	Pengambilan Arsip inaktif SKPD Kabupaten Klaten	-	8,730,000	7,430,500	85	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Adanya arsip penting di daerah rawan bencana yang harus diselamatkan	-	50	lari	50	lari	100%
24	Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten	19,461,000	19,461,000	18,192,300	93	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah hasil penilaian arsip	50	50	meter lari	50	meter lari	100%
25	Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten	52,985,000	67,985,000	38,036,600	56	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah pameran yang diikuti	1	1	kali	1	kali	100%
V	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	**128,261,000**	**156,111,000**	**134,915,388**	**86**									
26	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	128,261,000	156,111,000	134,915,388	86	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah OPD yang akan dibina kearsipan	30	30	OPD	30	OPD	100%
	JUMLAH TOTAL	**1,039,814,000**	**2,344,723,500**	**2,018,544,438**	**86**	**100%**								**100%**

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : BIDANG PENDIDIKAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PENDIDIKAN, TK NEGERI, SD NEGERI, SMP NEGERI, SKB CAWAS

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PENDIDIKAN														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1,317,000,000**	**1,338,396,000**	**1,168,798,583**	**87.33**	**100**								
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	285,000,000	285,000,000	160,022,753	56.15	100	Dinas Pendidikan	Jumlah jenis rekening terbayar langganan air, telpon, listrik	12	12	jenis	12	jenis	100
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	404,000,000	425,396,000	403,528,960	94.86	100	Dinas Pendidikan	Jumlah THL Adminstrasi Keuangan	29	36	orang	36	orang	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67,500,000	67,500,000	65,452,878	96.97	100	Dinas Pendidikan	Jumlah THL Kebersihan Kantor	3	3	orang	3	orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	45,000,000	45,000,000	44,819,050	99.60	100	Dinas Pendidikan	Jumlah ATK tersedia	48	48	jenis	48	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000	20,000,000	16,499,500	82.50	100	Dinas Pendidikan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	6	6	jenis cetakan	6	jenis cetakan	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14,000,000	14,000,000	12,652,500	90.38	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	komponen listrik	12	komponen listrik	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	45,000,000	45,000,000	44,881,000	99.74	100	Dinas Pendidikan	Jumlah makanan dan minuman tersedia	985	985	orang/ keg	985	orang/ keg	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	293,500,000	293,500,000	293,259,228	99.92	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Frekuensi perjalanan dinas luar daerah	275	275	perjalanan	275	perjalanan	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80,000,000	80,000,000	66,323,250	82.90	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	1051	1051	kegiatan	1051	kegiatan	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	63,000,000	63,000,000	61,359,464	97.40	100	Dinas Pendidikan	Jumlah THL pengamanan kantor	4	4	orang	4	orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**455,000,000**	**1,463,000,000**	**1,279,503,000**	**87.46**	**83.33**								
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	230,000,000	1,038,000,000	947,909,800	91.32	100	Dinas Pendidikan	Jumlah pengadaan peralatan kantor terbeli	1	4	Paket	4	Paket	100
12	Pengadaan mebeleur		200,000,000	184,976,000	92.49	100	Dinas Pendidikan	Jumlah meubelair yang dibeli	1	1	Paket	1	Paket	100
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	50,000,000	-	0.00	0	Dinas Pendidikan	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	Paket	1	Paket	100
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000	50,000,000	42,402,200	84.80	100	Dinas Pendidikan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara	7	7	Unit	7	Unit	100
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	24,236,000	96.94	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	1	1	Gedung	1	Gedung	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
16	Fasilitasi Pindahan Kantor	100,000,000	100,000,000	79,979,000	79.98	100	Dinas Pendidikan	Jumlah pindahan kantor terfasilitasi	1	1	Paket	1	Paket	100
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**50,000,000**	**50,000,000**	**46,544,500**	**93.09**	**100**								
17	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	50,000,000	50,000,000	46,544,500	93.09	100	Dinas Pendidikan	Jumlah ASN kapasitas pengelolaan keuangan	91	91	orang	91	orang	100
IV	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**210,000,000**	**210,000,000**	**176,975,730**	**84.27**	**100**								
18	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah	210,000,000	210,000,000	176,975,730	84.27	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta fasilitasi administrasi keuangan dan aset	797	797	orang	797	orang	100
V	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**722,000,000**	**722,000,000**	**576,773,886**	**79.89**	**100**								
19	Peningkatan Mutu pendidikan PAUD	185,000,000	185,000,000	155,740,750	84.18	100	Dinas Pendidikan	Jumlah guru PAUD/lembaga yang mengikuti workshop kurikulum PAUD	1250	1250	orang	1250	orang	100
20	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini	95,000,000	95,000,000	94,299,850	99.26	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti lombaajang kreativitas PAUD	468	468	anak	468	anak	100
21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD	200,000,000	200,000,000	132,147,400	66.07	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba ajang kreativitas PAUD	78	78	lembaga	78	lembaga	100
22	Fasilitasi kegiatan PAUD	200,000,000	200,000,000	152,654,521	76.33	100	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga yang mengikti Lomba Gugus PAUD	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
23	Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	42,000,000	42,000,000	41,931,365	99.84	100	TK Negeri Pembina	Jumlah TK Negeri yang memperoleh BOP PAUD	1	1	TKN	1	TKN	100
VI	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**23,057,436,000**	**27,151,950,500**	**22,874,027,146**	**84.24**	**90.70**								
24	Penambahan ruang kelas sekolah		230,000,000	223,275,250	97.08	100		Jumlah RKB SD yang dibangun		1	unit	1	unit	100
25	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	1,500,000,000	1,500,000,000	1,098,611,000	73.24	100	SMP N 2 Klaten	Jumlah Ruang Laboratorium terbangun	1	1	ruang	1	ruang	100
26	Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)		550,000,000	-	0.00	0	SMP Negeri	Jumlah Penataan Lingkungan Sekolah		3	SMP	0	SMP	0
27	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK Bidang Pendidikan)	945,000,000	945,000,000	701,226,975	74.20	100	SD Negeri	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa	10	10	paket	10	paket	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
28	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	200,000,000	200,000,000	189,266,600	94.63	100	SMP Negeri	Jumlah ruang kelas yang direhab	4	4	Ruang kelas	4	Ruang kelas	100
29	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah	120,000,000	120,000,000	-	0.00	0	SMP Negeri	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhab	2	2	ruang	0	ruang	0
30	Pelatihan Penyusunan kurikulum	50,000,000	50,000,000	43,441,400	86.88	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan	200	200	orang	200	orang	100
31	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	50,000,000	50,000,000	26,917,700	53.84	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta MBS SMP	115	115	orang	115	orang	100
32	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	115,000,000	115,000,000	88,295,000	76.78	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru SD dan SMP yang belum menguasai TIK	110	110	guru	110	guru	100
33	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	30,000,000	30,000,000	24,356,985	81.19	100	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan fasilitasi akreditasi	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
34	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan	1,415,000,000	1,415,000,000	1,090,022,440	77.03	100	SD N dan SMPN	Jumlah SD dan SMP yang terfasilitasi	93	93	sekolah	93	sekolah	100
35	Penggabungan SD Negeri	20,000,000	60,000,000	11,373,700	18.96	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SD yang digabung	30	30	sekolah	30	sekolah	100
36	Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)	9,496,966,000	9,496,966,000	9,462,587,575	99.64	100	SD Negeri	Jumlah ruang rusak SD yang direhabilitasi	123	123	Ruang kelas	123	Ruang kelas	100
37	Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP (DAK Bid. Pendidikan)	905,771,000	905,771,000	895,904,300	98.91	100	SMP Negeri	Jumlah ruang kelas yang di rehab	13	13	Ruang	13	Ruang	100
38	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	50,000,000	50,000,000	46,991,200	93.98	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah peserta workshop MBS SD	90	90	sekolah	90	sekolah	100
39	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD	440,000,000	440,000,000	307,811,350	69.96	100	Dinas Pendidikan	Jumlah lomba minat, bakat dan kreatifitas SD terlaksana	26	26	Lomba	26	Lomba	100
40	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP	615,000,000	615,000,000	508,166,500	82.63	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang berprestasi	2000	2000	Siswa	2000	Siswa	100
41	Pengembangan Kurikulum SD	100,000,000	100,000,000	96,255,644	96.26	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru/Kepala SD yang mengikuti diklat kurikulum	180	180	Orang	180	Orang	100
42	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD	40,000,000	40,000,000	39,152,500	97.88	100	Dinas Pendidikan	Jumlah pendampingan BSM SD	1	1	Tahun	1	Tahun	100
43	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP	30,000,000	30,000,000	13,528,500	45.10	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendampingan Program BSM Tingkat SMP	115	115	SMP	115	SMP	100
44	Pembangunan Sanitasi/MCK SD	150,000,000	150,000,000	141,843,275	94.56	100	SD Negeri	Jumlah sanitasi/MCK SD yang dibangun	6	6	Unit	6	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
45	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD	150,000,000	150,000,000	139,933,750	93.29	100	Dinas Pendidikan	Jumlah lomba MAPSI SD terlaksana	20	20	Lomba	20	Lomba	100
46	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP	75,000,000	75,000,000	73,453,000	97.94	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa SMP yang mengikuti lomba MAPSI	600	600	Siswa	600	Siswa	100
47	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD	40,000,000	40,000,000	32,632,427	81.58	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SD yang mengikuti lomba sekolah sehat	5	5	Sekolah	5	Sekolah	100
48	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	40,000,000	40,000,000	15,567,000	38.92	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Sehat dan Kader Kesehatan Sekolah Tingkat SMP	115	115	Sekolah	115	Sekolah	100
49	Penyelenggaran Ujian SD	500,000,000	500,000,000	403,369,855	80.67	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa SD peserta ujian	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
50	Penyelenggaran Ujian SMP	50,000,000	50,000,000	4,125,000	8.25	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa SMP peserta UN	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
51	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bid. Pendidikan)	1,435,000,000	1,435,000,000	1,431,697,500	99.77	100	SMP Negeri	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer SMP	5	5	SMP	5	SMP	100
52	Pembangunan sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)	414,270,000	414,270,000	413,262,500	99.76	100	SD Negeri	Jumlah sanitasi/MCK SD direhab	4	4	Unit	4	Unit	100
53	Pembangunan Ruang Belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)	1,121,566,000	1,121,566,000	1,119,322,100	99.80	100	SD Negeri	Jumlah ruang belajar terbangun	6	6	unit	6	unit	100
54	Pembangunan Ruang Belajar SMP (DAK Bidang Pendidikan)	495,131,000	495,131,000	487,966,800	98.55	100	SMP Negeri	Jumlah ruang belajar SMP terbangun	2	2	SMP	2	SMP	100
55	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang Pendidikan)	433,032,000	433,032,000	328,522,000	75.87	100	SD Negeri	Jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif terbangun	4	4	unit	4	unit	100
56	Rehabilitasi sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)	335,700,000	335,700,000	310,436,500	92.47	100	SD Negeri	Jumlah sanitasi/MCK SD direhab	40	40	unit	40	unit	100
57	Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD (DAK Bidang Pendidikan)	1,155,000,000	1,155,000,000	-	0.00	0	SD Negeri	Jumlah pengadaan buku koleksi perpustakaan	22	22	unit	0	unit	0
58	Pengadaan Buku Perpustakaan SDN (Bankeu Provinsi)	220,000,000	232,000,000	-	0.00	0	SD Negeri	Jumlah pengadaan buku perpustakaan SDN	22	22	paket	0	paket	0
59	Pengadaan Alat TIK SDN (Bankeu Provinsi)	120,000,000	124,000,000	121,665,270	98.12	100	SD Negeri	Jumlah pengadaan alat TIK SDN	4	4	paket	4	paket	100
60	Rehab Ruang Kelas Rusak SDN (Bankeu Provinsi)	200,000,000	250,000,000	237,676,500	95.07	100	SD Negeri	Jumlah ruang kelas direhab	5	5	Ruang kelas	5	Ruang kelas	100
61	Rehabilitasi sedang/ berat Bumi Perkemahan	-	230,000,000	224,951,250	97.80	100	Bumi Perkemahan Kepurun	Jumlah fasilitas bumi perkemahan yang direhab	0	1	Paket	1	Paket	100
62	Pembangunan Sarana Prasarana Bumi Perkemahan	-	230,000,000	226,098,250	98.30	100	Bumi Perkemahan Kepurun	Jumlah saran prasarana yang dibangun	0	1	Paket	1	Paket	100
63	Pembangunan Kantor Kwartir Cabang Pramuka	-	225,000,000	219,571,750	97.59	100	Kantor Kwartir Pramuka	Jumlah kantor yang dibangun	0	1	Unit	1	Unit	100
64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Silpa-DAK)	-	728,514,500	728,396,625	99.98	100	SD Negeri	Jumlah ruang kelas yang direhab	0	14	Ruang kelas	14	Ruang kelas	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
65	Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan	-	520,000,000	500,637,675	96.28	100	Korwil Pendidikan	Jumlah korwil pendidikan kecamatan	0	26	Korwil	26	Korwil	100
66	Penguatan Pendidikan Karakter melalui "Program Matur Jujur"	-	1,275,000,000	845,713,500	66.33	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa yang meningkat pendidikan karakternya	0	95065	Siswa	95065	Siswa	100
VII	**Program Pendidikan Non Formal**	**155,000,000**	**155,000,000**	**123,102,250**	**79.42**	**100**								
67	Pengembangan pendidikan keaksaraan	60,000,000	60,000,000	59,850,000	99.75	100	Dinas Pendidikan	Jumlah warga belajar mengikuti pendidikan keaksaraan	300	300	Orang	300	Orang	100
68	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	50,000,000	50,000,000	45,290,500	90.58	100	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi Dapodik	1130	1130	Lembaga	1130	Lembaga	100
69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45,000,000	45,000,000	17,961,750	39.92	100	Dinas Pendidikan	Jumlah LKP PKBM yang di monev	25	25	Lembaga	25	Lembaga	100
VIII	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**6,495,000,000**	**16,156,200,000**	**15,292,692,352**	**94.66**	**88.89**								
70	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	200,000,000	200,000,000	158,592,252	79.30	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	5500	5500	Guru	5500	Guru	100
71	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	75,000,000	75,000,000	24,967,000	33.29	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	300	300	Guru	300	Guru	100
72	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	80,000,000	80,000,000	55,353,500	69.19	100	Dinas Pendidikan	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kredit	8500	8500	Orang	8500	Orang	100
73	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas	205,000,000	205,000,000	-	0.00	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta seleksi calon kepala dan pengawas	25	25	KS	25	KS	100
74	Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta	150,000,000	150,000,000	116,288,500	77.53	100	Dinas Pendidikan	Jumlah pembinaan minat bakat dan kreativitas guru TK,SD, SMP dan OGN	250	250	Guru/KS	250	Guru/KS	100
75	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas	40,000,000	40,000,000	24,761,500	61.90	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas tenaga kependidikan	500	500	Orang	500	Orang	100
76	Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)	30,000,000	30,000,000	17,240,500	57.47	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta peningkatan tunjangan fungsional guru	635	635	GTT	635	GTT	100
77	Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan	250,000,000	250,000,000	160,114,500	64.05	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pengelolaan keprofesian berkelanjutan	300	300	Guru	300	Guru	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
78	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,465,000,000	15,126,200,000	14,735,374,600	97.42	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	1401	4601	Orang	4471	Orang	97
IX	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**120,000,000**	**120,000,000**	**97,650,600**	**81.38**	**100**								
79	Pengembangan minat dan budaya baca	70,000,000	70,000,000	54,228,100	77.47	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa TK, SD, SMP yang ikut lomba	350	350	Anak	350	Anak	100
80	Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa	50,000,000	50,000,000	43,422,500	86.85	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti worshop bahasas jawa	520	520	Orang	520	Orang	100
X	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**1,378,000,000**	**2,781,000,000**	**2,413,748,155**	**86.79**	**100**								
81	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	40,000,000	40,000,000	34,355,000	85.89	100	Dinas Pendidikan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
82	Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)	100,000,000	100,000,000	97,180,875	97.18	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah/Lembaga yang mengikuti kegiatan Jardiknas	294	294	Sekolah	294	Sekolah	100
83	Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan	46,000,000	61,000,000	54,636,500	89.57	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop/sosialisasi	293	293	Orang	293	Orang	100
84	Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah	47,000,000	47,000,000	34,979,250	74.42	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop UKS Sekolah	293	293	Orang	293	Orang	100
85	Penyusunan Data Pokok Pendidikan	100,000,000	100,000,000	90,677,950	90.68	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah/Lembaga yang mengikuti Sosialiasi Aplikasi Dapodik	916	916	Sekolah	916	Sekolah	100
86	Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan	260,000,000	-	-	0.00	0	Dinas Pendidikan		26					
87	Penerimaan Siswa Baru SMP Online	305,000,000	305,000,000	299,535,000	98.21	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SMP Negeri yang menerapkan PPDB Online	65	65	SMPN	65	SMPN	100
88	Operasional BOS Tingkat SD	250,000,000	1,828,000,000	1,544,880,330	84.51	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SD penerima dana BOS	703	703	SD	703	SD	100
89	Operasional BOS Tingkat SMP	100,000,000	170,000,000	141,226,500	83.07	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SMP penerima dana BOS	110	110	Sekolah	110	Sekolah	100
90	Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak	40,000,000	40,000,000	33,218,700	83.05	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen yang disusun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
91	Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu Provinsi)	90,000,000	90,000,000	83,058,050	92.29	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pendataan pendidikan	990	990	Orang	990	Orang	100
TK NEGERI (TK NEGERI PEMBINA KLATEN)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**9,200,000**	**9,200,000**	**7,157,428**	**77.80**	**100**								**100**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,961,000	4,961,000	3,020,628	60.89	100	TK Negeri	Jumlah jenis rekening terbayar langganan air, telpon, listrik	3	3	jenis	3	jenis	100
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	663,092	663,092	657,000	99.08	100	TK Negeri	Jumlah tenaga kebersihan	1	1	orang	1	orang	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	2,147,850	2,147,850	2,061,000	95.96	100	TK Negeri	Jumlah ATK tersedia	4	4	jenis	4	orang	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	728,058	728,058	727,800	99.96	100	TK Negeri	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	3	3	jenis cetakan	3	jenis	100
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	700,000	700,000	691,000	98.71	100	TK Negeri	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	3	kompone n listrik	3	jenis cetakan	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**50,800,000**	**50,800,000**	**48,935,750**	96.33	**100**								**100**
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	45,000,000	45,000,000	43,200,000	96.00	100	TK Negeri	Jumlah pengadaan peralatan kantor terbeli	1	1	paket	1	perjalana n	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3,800,000	3,800,000	3,735,750	98.31	100	TK Negeri	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	unit	1	kegiatan	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100	TK Negeri	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	4	4	jenis	4	orang	100
III	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**180,000,000**	**180,000,000**	**164,348,400**	**91.30**	**100**								**100**
1	Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)	85,000,000	85,000,000	73,918,500	86.96	100	TK Negeri	Jumlah Penataan Lingkungan Sekolah	1	1	Paket	1	Paket	100
2	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	35,000,000	35,000,000	34,729,900	99.23	100	TK Negeri	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1	2	Paket	2	Paket	100
3	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	60,000,000	60,000,000	55,700,000	92.83	100	TK Negeri	Jumlah sarana air berish dan sanitary yang direhab	1	1	Paket	1	Paket	100
SD NEGERI SE-KABUPATEN														
I	**Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**	**66,299,200,000**	**71,937,177,791**	**61,518,128,786**										
1	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri	**66,299,200,000**	**71,937,177,791**	**61,518,128,786**	**86%**	**100**	**SD Negeri**	Jumlah SD yang mendapat Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)	**703**	**679**	SD	**679**	SD	**100**
SMP NEGERI SE-KABUPATEN														
I	**Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**	**39,912,000,000**	**42,519,270,099**	**38,191,459,228**										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri	**39,912,000,000**	**42,519,270,099**	**38,191,459,228**	**90%**	**100**	**SMP Negeri**	Jumlah SMP yang mendapat Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)	**65**	**65**	SMP	65	SMP	**100**
SKB CAWAS														
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**98,798,000**	**123,936,000**	**105,060,197**										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	18,000,000	18,000,000	16,721,957	92.90	100.00	SKB	Jumlah dan Jenis Rekening yang terbayar	12	12	Jenis	12	Jenis	100
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30,662,000	42,962,000	34,402,780	80.08	100.00	SKB	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)	1	3	orang	3	orang	100
3	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	9,800,000	9,800,000	9,800,000	100.00	100.00	SKB	Jumlah dan Jenis perlatan	16	16	jenis	16	jenis	100
4	Penyediaan Alat tulis kantor	10,809,100	10,809,980	10,756,200	99.50	100.00	SKB	Jumlah dan jeis ATK	14	14	jenis	14	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,000,000	4,000,000	3,887,700	97.19	100.00	SKB	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan	2	2	Jenis	2	Jenis	100
6	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,555,000	2,555,000	2,555,000	100.00	100.00	SKB	Jumlah dan jenis alt listrik dan elektronika	3	3	Jenis	3	Jenis	100
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,550,900	2,550,900	2,528,000	99.10	100.00	SKB	Jumah dan jenis peralatan rumah tangga	5	5	Jenis	5	Jenis	100
8	penyediaan makanan dan minuman	5,607,000	5,607,000	5,606,400	99.99	100.00	SKB	jumlah dan jenis makanan dna minuman	192	192	orang	192	orang	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	SKB	Jumlah pegawai	40	40	orang	40	orang	100
10	Penyediaan Jasa pengaman kantor	13,814,000	26,651,120	17,802,160	66.80	100.00	SKB	Jumlah THL	1	2	orang	2	orang	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**47,194,000**	**47,194,000**	**46,593,800**	98.73									100
1	Pengadaan Komputer	9,519,000	9,519,000	**9,474,000**	99.53	100.00	SKB	Jumlah Komputer/laptop	2	2	Jenis	2	Jenis	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37,675,000	37,675,000	37,119,800	98.53	100.00	SKB	Jumlah pemeliharaan	1	1	Jenis	1	Jenis	100
	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	**45,016,000**	**45,016,000**	**42,996,900**	95.51									100
1	Penyelenggaraan Anak Usia Dini	15,000,000	15,000,000	**14,996,000**	99.97	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan PAUD	1	1	kelompok	1	kelompok	100
2	Pegadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK bidang Pendidikan)	20,000,000	20,000,000	18,987,000	94.94	100.00	SKB	Jumlah APE	21	21	Jenis	21	Jenis	100
3	Pengadaan buku koleksi PAUD (DAK Bid. Pendidikan)	10,016,000	10,016,000	9,013,900	90.00	100.00	SKB	Jumlah Buku	24	24	Jenis	24	Jenis	100
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	**3,401,777,000**	**3,476,777,000**	**3,425,780,330**	98.53									100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1,400,000,000	1,475,000,000	1,442,100,550	97.77	100.00	SKB	Jumlah dan jenis keterampilan Pedidikan Kecakapan Hidup	525	525	orang	525	orang	100
2	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP	15,000,000	15,000,000	14,997,000	99.98	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP	3	3	kelompok	3	kelompok	100
3	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	40,000,000	40,000,000	39,959,600	99.90	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	3	3	kelompok	3	kelompok	100
4	Layanan Pembelajaran Keliling	4,008,000	4,008,000	4,008,000	100.00	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Layanan Pembelajaran Keliling	1	1	kelompok	1	kelompok	100
5	Pembangunan prasaran belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)	73,355,000	73,355,000	72,005,000	98.16	100.00	SKB	Jumlah Pembangunan Jamban dan Sanitasinya	2	2	paket	2	paket	100
6	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)	883,027,800	883,027,800	880,677,800	99.73	100.00	SKB	Jumlah Rehabilitasi	3	3	paket	3	paket	100
7	Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)	615,886,200	615,886,200	606,499,280	98.48	100.00	SKB	Jumlah dan Jensi Sarana Belajar	3	3	paket	3	paket	100
8	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SMP (DAK Bid. Pendidikan)	73,500,000	73,500,000	71,715,400	97.57	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP	3	3	kelompok	3	kelompok	100
9	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU (DAK Bid. Pendidikan)	297,000,000	297,000,000	293,817,700	98.93	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	3	3	kelompok	3	kelompok	100
	JUMLAH		**168,536,917,390**	**147,600,277,021**	**88%**									

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : BIDANG KESEHATAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KESEHATAN, RSD BAGAS WARAS, PUSKESMAS, SETDA (BAGIAN KESRA), KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KESEHATAN														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**3,068,785,000**	**3,117,585,000**	**2,960,812,861**	**94.97%**	**99.1**		**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	12,750,000	11,022,500	86.45%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah surat terkirim	5000	5000	surat	7,959	surat	159.18
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik	411,000,000	411,000,000	323,932,788	78.82%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis rekening terbayar	3	3	jenis	3	jenis	100.00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	974,250,000	974,250,000	954,539,587	97.98%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah THL administrasi keuangan	71	71	orang	71	orang	100.00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	514,500,000	514,500,000	502,929,714	97.75%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah THL kebersihan kantor	37	37	orang	37	orang	100.00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	34,935,000	49,935,000	49,872,500	99.87%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (sebelum), jumlah perbaikan peralatan kerja (setelah)	5	2	unit (sebelum) kali (setelah)	2	kali	100.00
6	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	25,000,000	24,582,000	98.33%	99.1	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	15	15	jenis	15	jenis	100.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35,000,000	50,750,000	50,573,800	99.65%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3	3	jenis	3	jenis	100.00
8	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000	20,000,000	19,920,500	99.60%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah komponen instalasi listrik (sebelum), jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan (setelah)	3	10	paket (sebelum), jenis (setelah)	10	jenis	100.00
9	Penyediaan makanan dan minuman	59,700,000	65,000,000	64,283,200	98.90%	98.9	Dinas Kesehatan	Jumlah pertemuan/rapat selama satu tahun (sebelum), jumlah makanan dan minuman tersedia (setelah)	60	600	kali(sebelum) paket (setelah)	600	kegiatan	100.00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150,000,000	150,000,000	146,962,462	97.97%	98.0	Dinas Kesehatan	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	100	100	kali	94	kali	94.00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	75,000,000	85,000,000	69,240,500	81.46%	92.5	Dinas Kesehatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120	120	kali	120	kali	100.00
12	Penyedia jasa pengamanan kantor	648,950,000	648,950,000	634,896,734	97.83%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah THL Pengamanan kantor	47	47	orang	47	orang	100.00
13	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	110,450,000	110,450,000	108,056,576	97.83%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah THL pengemudi kantor	8	8	orang	8	orang	100.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**818,950,000**	**1,235,000,000**	**1,122,288,350**	**90.87%**	**91.3**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkat**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	199,750,000	315,000,000	281,379,680	89.33%	89.3	Dinas Kesehatan	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	42	42	unit	39	unit	92.86
2	Pengadaan Mebeleur	24,700,000	60,000,000	58,927,600	98.21%	98.2	Dinas Kesehatan	Jumlah mebelair terbeli	21	21	unit	21	unit	100.00
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.	434,500,000	700,000,000	647,115,520	92.45%	93.3	Dinas Kesehatan	Jumlah gedung kantor terpelihara	3	3	unit	3	unit	100.00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	160,000,000	160,000,000	134,865,550	84.29%	84.3	Dinas Kesehatan	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	47	47	unit	47	unit	100.00
III	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**80,265,000**	**80,265,000**	**76,383,500**	**95.16%**	**100.0**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Disiplin Aparatur meningkat**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
1	Pembinaan Administrasi Kepegawaaian	80,265,000	80,265,000	76,383,500	95.16%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah jenis kualitas SDMK (sebelum), jumlah ASN terbina administrasi kepegawaian	22	100	jenis (sebelum), orang (setelah)	100	orang	100.00
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**30,000,000**	**30,000,000**	**29,755,000**	99.18%	100.0	Dinas Kesehatan	**Persentase kualitas dokumen pelaporan meningkat**	100	100	%	100	%	100.00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,758,000	95.16%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1	1	dokumen	1	dokumen	100.00
2	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan Asset Daerah	25,000,000	25,000,000	24,997,000	99.99%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen keuangan dan asset	1	1	dokumen	1	dokumen	100.00
V	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**4,169,493,000**	**4,219,493,000**	**3,938,314,555**	93.34%	100.0	Dinas Kesehatan	**% obat generik berlogo dalam persediaan obat**	99	99	%	99	%	100.00
1	Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Bid.Kesehatan)	3,772,250,000	3,772,250,000	3,581,135,390	94.93%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan	2	2	jenis	2	jenis	100.00
2	Pengelola Manajemen Obat	30,000,000	80,000,000	73,877,977	92.35%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah manajemen obat di puskesmas yang dikelola	2	2	jenis	2	jenis	100.00
3	Distribusi Obat dan Logistik (DAK FISIK)	167,243,000	167,243,000	166,876,288	99.78%	100.0	Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapat distribusi obat	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100.00
4	Pengelolaan Manajemen Obat (DBHCHT)	200,000,000	200,000,000	116,424,900	58.21%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas terlaksana pengelolaan obat yang paripurna	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100.00
VI	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**10,398,000,000**	**11,051,770,531**	**7,377,244,447**	66.75%	94.4	Dinas Kesehatan	**Cakupan kunjungan ibu hamil K4**	**98**	**98**	%	**93.27**	%	95.17
								Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	**83**	**83**	%	**83.23**	%	100.28

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
								Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	**100**	**100**	%	**99.99**	%	99.99
								Cakupan pelayanan nifas	**96**	**96**	%	**97.55**	%	101.61
								Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani	**83**	**83**	%	**56.03**	%	67.51
								Cakupan kunjungan bayi	**96**	**96**	%	**98.07**	%	102.16
								Angka kelangsungan hidup bayi	**83**	**83**	%	**989.67**	%	1,192.37
								Cakupan pelayanan anak balita	**96**	**96**	%	**97.77**	%	101.84
								Cakupan peserta KB aktif	**992**	**992**	%	**78.73**	%	7.94
								Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten	**96**	**96**	%	**100**	%	104.17
1	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes	200,000,000	200,000,000	199,279,700	99.64%	100.0	Dinas Kesehatan	kegiatan penurunan AKI AKB	150	150	kegiatan	87	%	58.00
2	Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta	15,000,000	15,000,000	14,999,900	100.00%	99.0	Dinas Kesehatan	Jumlah fasyankes dibina	40	40	fasyankes	30	fasyankes	75.00
3	Penunjang Operasional PPPK	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.00%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan event PPPK	30	30	kegiatan	30	kegiatan	100.00
4	Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan	50,000,000	66,500,000	64,059,750	96.33%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah ijin bidang kesehatan	100	100	buah	100	buah	100.00
5	Akreditasi Puskesmas	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas terdampingi menuju akreditasi	7	7	puskesmas	7	puskesmas	100.00
6	Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi	200,000,000	200,000,000	154,068,900	77.03%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan terseleksi	9	9	nakes	9	nakes	100.00
7	Pembuatan Buku Profil Kesehatan	55,000,000	55,000,000	43,511,200	79.11%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah buku profil	80	80	buku	80	buku	100.00
8	Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan	600,000,000	620,000,000	492,483,770	79.43%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis reagensia laboratorium kesehatan dan alat laboratorium (sebelum), jumlah kunjungan pasien laboratorium (setelah)	79	3375	jenis(sebelum), pasien(setelah)	4159	orang	123.23

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Peningkatan manajemen puskesmas	150,000,000	150,000,000	113,812,500	75.88%	75.6	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah puskesmas dan kegiatan pendukungnya	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100.00
10	Peningkatan kinerja klinik	90,000,000	90,000,000	47,494,400	52.77%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang meningkat kinerjanya (sebelum), jumlah nakes (setelah)	34	34	puskesmas(sebelum), orang (setelah)	34	orang	100.00
11	Pembuatan buku KIA	10,000,000	10,000,000	9,699,800	97.00%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah Buku KIA	450	360	buku	360	buku	100.00
12	Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu	1,745,000,000	2,362,270,531	1,642,229,950	69.52%	90.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah wilayah kecamatan yang membutuhkan akses melalui SPGDT	26	26	kec	26	kec	100.00
13	Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	3,142,000,000	3,142,000,000	996,900,894	31.73%	40.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah ibu hamil miskin non PBI	500	500	orang	108	%	21.60
14	Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	510,000,000	510,000,000	438,431,580	85.97%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian akreditasi	7	7	puskesmas	7	puskesmas	100.00
15	Peningkatan Layanan Rujukan UKM Sekunder (DAK Non Fisik)	1,532,000,000	1,532,000,000	1,340,824,000	87.52%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan promotiv preventif sebagai upaya kesehatan sekunder	50	50	kegiatan	50	kegiatan	100.00
16	Peningkatan Manajemen Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	1,264,000,000	1,264,000,000	1,037,686,453	82.10%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah lokasi keg peningkatan manajemen operasional kesehatan dan jaminan persalinan	47	47	lokasi	85	%	180.85
17	Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (DAK Non Fisik)	750,000,000	750,000,000	696,761,650	92.90%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan penanggulangan stunting yang komprehensif, terpadu dan konvergen (20 kegiatan)	20	20	kegiatan	20	kegiatan	100.00
VII	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**100,000,000**	**100,000,000**	**97,129,700**	**97.13%**	**100.0**	**Dinas Kesehatan**	**% apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
								% sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
1	Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	50,000,000	50,000,000	48,979,900	97.96%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah fasilitas yang diawasi	160	160	lokasi	160	lokasi	100.00
2	Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	50,000,000	50,000,000	48,149,800	96.30%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah sekolah yang terawasi keamanan pangan jajanan sekolahnya	68	68	sekolah	68	sekolah	100.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
VIII	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**350,000,000**	**444,700,000**	**439,433,250**	**98.82%**	**100.0**	**Dinas Kesehatan**	**Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
								Cakupan desa siaga aktif	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
1	Penyuluhan Kesehatan masyarakat	75,000,000	169,700,000	165,960,050	97.80%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah petugas penyuluh kesehatan	170	170	orang	170	orang	100.00
2	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	75,000,000	75,000,000	74,499,400	99.33%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah UKBM terbina	51	51	UKBM	51	UKBM	100.00
3	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50,000,000	50,000,000	49,649,850	99.30%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah petugas, Desa PHBS, dan puskesmas	106	106	petugas	106	petugas	100.00
4	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (DBHCHT)	150,000,000	150,000,000	149,323,950	99.55%	100.0	Puskesmas	Jumlah petugas yang meningkat kapasitasnya dalam melakukan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	500	500	petugas	165	petugas	33.00
IX	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**410,900,000**	**410,900,000**	**400,875,550**	**97.56%**	**98.4**	**Dinas Kesehatan**	**Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
								% ibu hamil mendapat tablet Fe	**98**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**
								% bayi yang dapat ASI eksklusif	**77**	**77**	**%**	**82.58**	**%**	**107.25**
1	Upaya perbaikan gizi keluarga	195,000,000	195,000,000	191,151,750	98.03%	98.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan gizi	40	40	kegiatan	40	kegiatan	100.00
2	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	105,000,000	105,000,000	102,094,800	97.23%	97.2	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah petugas Puskesmas, Konselor ASI dan Fasilitator PMBA terbina	34	34	petugas	34	petugas	100.00
3	Upaya perbaikan gizi keluarga (DBHCHT)	110,900,000	110,900,000	107,629,000	97.05%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan SMART (Semangat Mencegah Anemia Remaja)		1	kegiatan	1	kegiatan	100.00
X	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**965,150,000**	**1,265,150,000**	**1,041,250,146**	**82.30%**	**97.0**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
								Cakupan desa *open defication free* (ODF)	**35**	**35**	**%**	**35**	**%**	**100.00**
								Persentase penggunaan jamban	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
								Persentase penggunaan air bersih	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
1	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	965,150,000	1,265,150,000	1,041,250,146	82.30%	97.0	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas dan desa terbina kesehatan lingkungan	100	100	lokasi	100	%	100.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
XI	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**1,476,530,000**	**1,961,530,000**	**1,233,545,666**	**62.89%**	**84.4**	**Dinas Kesehatan**	**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**	**42**	**42**	**%**	**20.1**	**%**	**47.86**
								Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
								Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
								Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunication* (UCI)	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
								Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
								Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	**148**	**148**	**%**	**102**	**%**	**68.92**
1	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	215,000,000	215,000,000	184,063,150	85.61%	85.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah kegiatan imunisasi, haji, surveylans dan penanggulangan KLB bencana	164	164	kegiatan	130.0	%	79.27
2	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular	822,680,000	822,680,000	716,037,316	87.04%	89.5	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis pengendalian penyakit(sebelum), jumlah kegiatan pengendalian (sebelum)	2	40	jenis(sebelum), kegiatan (sesudah)	40.0	kegiatan	100.00
3	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	192,850,000	192,850,000	117,565,000	60.96%	61.8	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis penyakit menular yang bersumber dari binatang (sebelum), jumlah kegiatan pengendalian (setelah)	2	225	jenis(sebelum), kegiatan (setelah)	179.0	kegiatan	79.56
4	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (DBHCHT)	36,000,000	36,000,000	35,200,000	97.78%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan pencegahan menular yang bersumber binatang		1	kegiatan	1.0	kegiatan	100.00
5	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (DBHCHT)	150,000,000	150,000,000	148,766,000	99.18%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih IVA		20	orang	20.0	orang	100.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) (DBHCHT)	60,000,000	545,000,000	31,914,200	5.86%	70.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah petugas terlatih penanganan KLB dan 1 unit kendaraan khusus penanggulangan bencana.		34	petugas + 1 unit	34.0	petugas	100.00
XII	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**25,000,000**	**60,000,000**	**23,103,700**	**38.51%**	**63.0**	**Dinas Kesehatan**	**Angka kesakitan**	**100**	**100**	**%**	**47.98**	**%**	**47.98**
1	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah	25,000,000	60,000,000	23,103,700	38.51%	63.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah pendampingan Puskesmas (sebelum), Jumlah kegiatan pembinaan (setelah)	34	72	Pusk(sebelum), kegiatan (stelah)	34	kegiatan	47.22
XIII	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	**15,699,317,500**	**24,767,172,625**	**17,217,203,931**	**69.52%**	**60.6**		**Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**	**5**	**5**	**%**	**11.6**	**%**	**232.00**
								Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	**98**	**98**	**%**	**59.45**		**60.66**
1	Pelayanan operasi katarak	10,000,000	10,000,000	6,949,900	69.50%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah penderita katarak yang teroperasi	20	20	orang	14	%	70.00
2	Visum at Repertum	9,000,000	9,000,000	375,000	4.17%	10.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah orang visum et repertum	25	34	orang	1	%	2.94
3	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)	15,680,317,500	24,048,172,625	16,983,532,800	70.62%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat termasuk difabel yang mendapat jaminan kesehatan	36900	100000	orang	76688	orang	76.69
4	Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Klaten	-	700,000,000	226,346,231	32.34%	32.3	Dinas Kesehatan	Jumlah penduduk yang didaftarkan Kabupaten Klaten dalam program JKN Non Pajak Rokok dan Jaminan Kesehatan Bagi PGOT, Penghuni Lapas, Panti KLB, KIPI dan Gizi Buruk		1000	orang	80	orang	8.00
XIV	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya**	**15,462,172,000**	**16,248,661,000**	**13,880,824,648**	**85.43%**	**98.9**	**Dinas Kesehatan**	**% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas**	**86**	**86**	**%**	**54.01**	**%**	**62.80**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	**100**	**100**	**%**	**45.72**	**%**	**45.72**
								Cakupan pelayanan Puskesmas Pembantu	**100**	**100**	**%**	**11.43**	**%**	**11.43**
								Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	**1**	**1**		**0.042**		**4.20**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pembangunan Puskesmas (DAK Bid. Kesehatan)	4,649,999,000	4,649,999,000	3,927,723,400	84.47%	100.0	Puskesmas Pedan dan Kemalang	Jumlah gedung puskesmas yang terbangun	2	2	lokasi	2	lokasi	100.00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	712,320,000	900,000,000	683,122,456	75.90%	100.0	Kabupaten Klaten	Jumlah prasarana dan alat kesehatan yang tersedia(sebelum), jumlah alkes yang dipenuhi (setelah)	1	33	paket(sebelum), unit (setelah)	33	unit	100.00
3	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	1,980,000,000	1,980,000,000	1,684,454,265	85.07%	100.0	Puskesmas Klaten Selatan dan Jogonalan I	Jumlah rehab gedung Puskesmas	2	2	puskesmas	2	puskesmas	100.00
4	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	814,598,000	814,598,000	796,121,595	97.73%	100.0	Pustu Tulas, Mrisen, Jambeyan, Randusari, dan Kedungampel	Jumlah gedung puskesmas pembantu yang direhab	5	5	pustu	5	pustu	100.00
5	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.	70,000,000	91,270,000	90,172,497	98.80%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah unit sistem informasi kesehatan (SIK) yang terbina dan dikembangkan	35	35	unit	35	unit	100.00
6	Penyediaan Alat Antropometri (DAK Bid. Kesehatan)	1,360,000,000	1,360,000,000	1,347,944,000	99.11%	100.0	34 Puskesmas	Jumlah alat Antropometri yang tersedia	170	170	paket	170	paket	100.00
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah (DAK FISIK)	2,987,999,000	2,987,999,000	2,845,931,400	95.25%	98.0	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di 34 puskesmas dan Dinas Kesehatan		92	unit	92	unit	100.00
8	Pengadaan Cryoterapy (DAK Bid.Kesehatan)	85,000,000	85,000,000	56,394,000	66.35%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah alat Cryoterapi yang tersedia	1	1	set	1	set	100.00
9	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan Hiv, CD4, dan Viraload (DAK Bid.Kesehatan)	707,209,896	707,209,896	82,706,800	11.69%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah bahan habis pakai pemeriksaan HIV dan Viraload yang tersedia	20250	20250	paket	20250	paket	100.00
10	Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit (DAK Bid. Kesehatan)	2,095,046,104	2,095,046,104	1,875,814,470	89.54%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah posbindu kit terbeli	118	118	kit	118	kit	100.00
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DBHCHT)	0	577,539,000	490,439,765	84.92%	90.0	Puskesmas Kemalang	jumlah alkes tersedia	1	1	paket	1	paket	100.00
		53,054,562,500	64,992,227,156											
RSD BAGAS WARAS														
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2,100,000,000**	**2,100,000,000**	**1,520,532,066**	**72.41**	**100**	**RSD Bagas Waras**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**%**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**%**	**100 %**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,100,000,000	1,100,000,000	803,388,775	73.04	100	RSD Bagas Waras	Tersedianya jasa kebersihan RSUD selama 1 tahun	30 tenaga kebersihan	30 tenaga kebersihan	orang	30 tenaga kebersihan	orang	100 %
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1,000,000,000	1,000,000,000	717,143,291	71.71	100	RSD Bagas Waras	Tersediannya kebutuhan keamanan kantor selama 1 tahun	30 tenaga keamanan	30 tenaga keamanan	orang	30 tenaga keamanan	orang	100 %
II	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**	**100**	**100**	**RSD Bagas Waras**	**Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja**	**Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja**	**Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja**	**%**	**Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja**	**%**	**100 %**
1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100	100	RSD Bagas Waras	Tersusunnya 1 dokumen LAKIP Tahun 2019	1 LAKIP 2019	1 LAKIP 2019	dokumen	1 LAKIP 2019	dokumen	100 %
III	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA**	**4,849,999,000**	**6,749,999,000**	**6,544,351,315**	**96.95**	**100**	**RSD Bagas Waras**	**Terlaksananya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS**	**Terlaksanaanya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS**	**Terlaksanaanya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS**	**%**	**Terlaksanaanya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS**	**%**	**100 %**
1	Kegiatan obat-obatan rumah sakit	2,850,000,000	2,850,000,000	2,836,592,603	99.53	100	RSD Bagas Waras	Tersedianya obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien	Tersedianya obat 250	Tersedianya obat 250	Jenis	Tersedianya obat 250	Jenis	100 %
2	Kegiatan Pengadaan Prasarana Rumah Sakit (DAK Bid. Kesehatan)	1,999,999,000	1,999,999,000	1,815,000,000	90.75	100	RSD Bagas Waras	Tersedianya genzet RS	Tersedianya 1 genzet RS	Tersedianya 1 genzet RS	unit	Tersedianya 1 genzet RS	unit	100 %
3	Kegiatan Pengadaan Obat-obatan (DAU)	-	1,900,000,000	1,892,758,712	99.62	100	RSD Bagas Waras	Tersedianya obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien	Tersedianya obat 210	Tersedianya obat 210	Jenis	Tersedianya obat 210	Jenis	100 %
V	**PROGRAM MANAJEMEN,INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN**	**-**	**200,000,000**	**156,996,372**	**78.50**	**100**	**RSD Bagas Waras**	**Terlaksananya manajemen, informasi dan regulasi kesehatan**	**Terlaksanaanya manajemen, informasi dan regulasi kesehatan**	**Terlaksanaanya manajemen, informasi dan regulasi kesehatan**	**%**	**Terlaksanaanya manajemen, informasi dan regulasi kesehatan**	**%**	**100 %**
1	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	-	200,000,000	156,996,372	78.50	100	RSD Bagas Waras	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	1 sistem informasi manajemen RS	1 sistem informasi manajemen RS	paket	1 sistem informasi manajemen RS	paket	100 %
VI	**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN**	**30,000,000,000**	**43,599,095,276.52**	**37,064,485,638.68**	**85.01**	**100**	**RSD Bagas Waras**	**% Pelayanan Kesehatan**	**% Pelayanan Kesehatan**	**% Pelayanan Kesehatan**	**hari**	**% Pelayanan Kesehatan**	**hari**	**100 %**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD	30,000,000,000	43,599,095,276.52	37,064,485,638.68	85.01	100	RSD Bagas Waras	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	%	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	%	100 %
	PUSKESMAS SE-KLATEN													
I	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	22,755,000,000	22,755,000,000	20,001,084,316										
1	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	22,755,000,000	22,755,000,000	20,001,084,316	88%		Puskesmas Kab. Klaten	Jumlah Puskesmas yang kegiatan operasional pelayanan kesehatannya lancar	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100
II	**Program Standarisasi pelayanan Kesehatan**	**59,002,471,000**	**73,972,517,015**	**62,361,586,356**										
1	Penunjang Operasional Puskesmas	59,002,471,000	73,972,517,015	62,361,586,356	84%		Puskesmas Kab. Klaten	Jumlah Puskesmas yang kegiatan operasionalnya lancar	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
I	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**93,634,000**	**93,634,000**	**75,642,950**				**persentase peserta sarasehan dan senam lansia**						
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	93,634,000	93,634,000	75,642,950	81	81	Bagian kesra	Jumlah peserta sarsehan dan senam lansia	500 peserta	500	peserta	500	peserta	100
KECAMATAN KLATEN UTARA														
I	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan**	**15,000,000**	**15,000,000**	**14,999,800**			Kec.Klaten Utara	**Prosentase Peserta Lomba Posyandu**						
1	Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat	15,000,000	15,000,000	14,999,800	100	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah Peserta Posyandu dan Pemenang Lomba Posyandu	3	3	Pemenang	3	Pemenang	100.0
KECAMATAN PRAMBANAN														
I	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan**	**14,000,000**	**14,000,000**	**13,880,000**	**99%**	**100%**		**Prosentase pemenuhan promosi kesehatan dan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	
1	Usaha kesehatan bersumber daya masyarakat	14,000,000	14,000,000	13,880,000	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah posyandu yang di lombakan	16	16	posyandu	16	posyandu	100
KECAMATAN BAYAT														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat**	**15,000,000**	**15,000,000**	**14,182,900**				**Prosentase tingkat promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**		100	%	100	%	100
1	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	15,000,000	15,000,000	14,182,900	95	100	Kec. Bayat	Jumlah Posyandu yang mengikuti Lomba	18	18	posyandu	18	posyandu	100
KECAMATAN CAWAS														
I	**Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat**	**14,600,000**	**14,600,000**	**13,848,600**	95	100	Kecamatan Cawas							
1	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	14,600,000	14,600,000	13,848,600	95	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Posyandu	20	20	desa	20	desa	**100%**
KECAMATAN KARANGNONGKO														
I	**Program promosi kesehatan dan pemberdayaaan masyarakat**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	19,880,000	99.40	99.40	**Kec.Karangnongko**							
1	Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	20,000,000	20,000,000	19,880,000	99.40	99.40	**Kec.Karangnongko**	jumlah Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat terpenuhi	14	14	Posyandu	14	Posyandu	100%
KECAMATAN CEPER														
I	**Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat**	**20,000,000**	**20,000,000**	**19,999,000**				**persentase desa yang mengikuti promosi kesehatan dan pemberdayaan**						
1	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	20,000,000	20,000,000	19,999,000	1.00	100	Kec Ceper	jumlah pemenang lomba posyandu tk kec	3	3	pemenang	3	pemenang	100
KECAMATAN PEDAN														
VIII	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	**100**	**100**	Kecamatan Pedan							
1	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kecamatan Pedan	jumlah pemenang lomba posyandu	3	3	desa	3	desa	100%
KECAMATAN KARANGDOWO														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**18,400,000.00**	**18,400,000.00**	**18,001,000**	**97.83**	**100**	**Kec. Karangdowo**	**Jumlah Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	18,400,000.00	18,400,000.00	18,001,000	97.83	100	Kec. Karangdowo	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
KECAMATAN JUWIRING														
I	**Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat**	**16,000,000**	**16,000,000**	**14,475,000**										
1	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	16,000,000	16,000,000	14,475,000	90%	100	Kec. Juwiring	jumlah peserta lomba posyandu	19	19	desa	19	desa	100
KECAMATAN POLANHARJO														
I	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**17,000,000**	**17,000,000**	**16,949,900**										
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	17,000,000	17,000,000	16,949,900	100%	100%		Jumlah Posyandu Yang Mengikuti Lomba	36	36	Posyandu	36	Posyandu	100%
KECAMATAN KARANGANOM														
I	**Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat**	**15,900,000**	**15,900,000**	**15,900,000**				**Persentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**						
1	Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	15,900,000	15,900,000	15,900,000	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah lomba posyandu terlaksana	1	1	Kali	1	Kali	100
KECAMATAN KEMALANG														
I	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdyaan Masyarakat**	**25,000,000.00**	**35,000,000.00**	**33,355,000**	**95.30**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**13.00**	**13.00**	**0.00**	**13.00**	**0.00**	**1.00**
1	Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat	25,000,000.00	35,000,000.00	33,355,000	95.30	**100**	**Kecamatan Kemalang**	Jumlah kesehatan masyarakat yang diupayakan	13	13	Desa	13	DESA	100%
KEC. GANTIWARNO														
I	**Program Promosi kesehatan**	**25,000,000**	**25,000,000**	**24,998,300**										
1	upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	25,000,000	25,000,000	24,998,300	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terselenggaranya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	16	16	Desa	16	Desa	100
	JUMLAH		**247,206,986,025.52**	**177,805,813,817.68**	**71.93%**									

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DPU & PR, DINAS PERWASKIM, KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG (DPU & PR)														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**3,320,000,000**	**3,586,000,000**	**2,725,862,786**										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	10,000,000	7,204,550	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah surat terkirim	2	2	surat	2	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	400,000,000	425,000,000	300,463,641	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah jenis rekening yang terbayar	4	4	rekening	4	rekening	100%
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	65,000,000	100,000,000	99,981,300	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	84	84	unit	84	unit	100%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	250,000,000	250,000,000	215,268,435	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	6	6	unit	6	unit	100%
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	685,000,000	685,000,000	383,507,507	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi keuangan	2	2	orang	2	orang	100%
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	170,000,000	170,000,000	118,166,736	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan kantor	3	3	orang	3	orang	100%
7	Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000	100,000,000	98,183,400	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	23	23	jenis	23	jenis	100%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60,000,000	60,000,000	57,239,600	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	2	2	jenis	2	jenis	100%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000	20,000,000	19,099,500	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	15	15	jenis	15	jenis	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	10,000,000	6,012,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2	2	jenis	2	jenis	100%
11	Penyediaan makanan dan minuman	85,000,000	85,000,000	82,129,500	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	144	144	kegiatan	144	kegiatan	100%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	324,000,000	450,000,000	410,447,655	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan keluar daerah	73	73	org / kegiatan	73	org / kegiatan	100%
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80,000,000	160,000,000	123,375,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah frekuensi perjalalan kedalam daerah	400	400	org/kegiatan	400	org/kegiatan	100%
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	445,000,000	445,000,000	285,005,894	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pengamanan kantor	3	3	orang	3	orang	100%
15	Penyediaan jasa pengemudi kantor	16,000,000	16,000,000	15,058,716	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pengemudi kantor	2	2	orang	2	orang	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
16	Penyediaan Operasional UPTD	600,000,000	600,000,000	504,719,352	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah dan jenis pembayaran operasional UPTD	4	4	Jenis	4	Jenis	100%
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2,251,450,000**	**2,520,000,000**	**2,117,077,000**										
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	354,700,000	354,700,000	319,886,800	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional terbeli	4	4	unit	4	unit	100%
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	933,550,000	933,550,000	818,072,550	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor terbeli	1	1	paket	1	paket	100%
3	Pengadaan mebeler	63,200,000	131,750,000	116,352,100	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah mebeleur terbeli	3	3	unit	3	unit	100%
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	400,000,000	600,000,000	548,932,300	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah bangunan gedung kantor yg terpelihara	2	2	unit	2	unit	100%
5	Pemeliharaan Alat Berat	500,000,000	500,000,000	313,833,250	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah alat berat yg terpelihara	31	31	unit	31	unit	100%
III	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**20,000,000**	**20,000,000**	**15,531,500**										
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	20,000,000	20,000,000	15,531,500	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah pakaian kerja lapangan DPU PR yg terbeli	60	60	paket	60	paket	100%
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**140,000,000**	**140,000,000**	**131,653,650**										
1	Peningkatan Kapasitas SDM	90,000,000	90,000,000	87,700,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah ASN terfasilitasi peningkatan kapasitas SDM	1	1	orang	1	orang	100%
2	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	50,000,000	50,000,000	43,953,650	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah ASN kapsitas pengelolaan keuangan meningkat	70	70	orang	70	orang	100%
V	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**60,000,000**	**60,000,000**	**53,557,000**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35,000,000	35,000,000	33,051,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	paket	1	paket	100%
2	Monev kegiatan SKPD	25,000,000	25,000,000	20,506,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah dokumen monev	1	1	paket	1	paket	100%
VI	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	**91,728,649,000**	**111,278,649,000**	**85,874,407,215**										
1	Perencanaan pembangunan jalan	-	50,000,000	48,225,700	1	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dokumen jalan yang disusun	2	2	dokumen	2	dokumen	100%
3	Pembangunan Jembatan	10,000,000,000	10,000,000,000	8,131,851,300	1	96	Kabupaten Klaten	Jumlah jembatan yang dibangun	3	3	unit	3	unit	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Peningkatan jalan ngemplaK SENENG-panggang (DAK bid jalan)	3,456,216,000	3,456,216,000	2,780,319,000	1	96	Kec. Manisrenggo	Panjang jalan yang ditingkatkan	0.91	0.91	km	0.91	km	100%
5	Peningkatan jalan prawatan-nangsri	4,500,000,000	4,500,000,000	3,673,534,000	1	91	Kec. Manisrenggo,jogonalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.14	1.14	km	1.14	km	100%
6	Peningkatan Jalan Kadilaju-manisrenggo	7,800,000,000	7,800,000,000	6,229,237,200	1	84	Kec. Manisrenggo	Panjang jalan yang ditingkatkan	3.9	3.9	km	3.9	km	100%
7	Peningkatan Jalan pasar kembang - dompol	5,100,000,000	5,100,000,000	3,575,291,250	1	85	Kec. Kemalang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.25	1.25	km	1.25	km	100%
8	Peningkatan Jalan Mipitan - kadilaju	4,600,000,000	4,600,000,000	3,681,453,250	1	93	Kec.karangnongko dan Kemalang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.3	1.3	km	1.3	km	100%
9	Peningkatan Jalan Mipitan - Karangnongko	9,000,000,000	9,000,000,000	6,585,930,000	1	89	Kec. Karangnongko	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.12	2.12	km	2.12	km	100%
10	Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol	500,000,000	500,000,000	446,987,800	1	89	Kec. Ceper	Panjang jalan yang ditingkatkan	0.6	0.6	km	0.6	km	100%
11	Peningkatan jalan polanharjo-karanglo	3,000,000,000	3,000,000,000	2,736,221,500	1	91	Kec. Polanharjo	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.43	1.43	km	1.43	km	100%
12	Peningkatan Jalan Jelobo - samben	9,500,000,000	9,500,000,000	6,813,135,100	1	87	Kec. Wonosari	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.33	2.33	km	2.33	km	100%
13	Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan	4,200,000,000	4,200,000,000	3,295,174,250	1	91	Kec. Juwiring	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.3	1.3	km	1.3	km	100%
14	Peningkatan Jalan Ngaran - telukan (DAK Bid Jalan)	8,616,217,000	8,616,217,000	6,272,740,000	1	96	Kec. Ceper dan trucuk	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.85	2.85	km	2.85	km	100%
		-	-	-				Jumlah dokumen jasa konsultasi pengawasan Peningkatan jalan	1	1	dokumen	1	dokumen	100%
15	Peningkatan Jalan Krakitan - mundu	3,500,000,000	3,500,000,000	2,916,352,250	1	91	Kec. Kalikotes dan wedi	Panjang jalan yang ditingkatkan	3.38	3.38	km	3.38	km	100%
16	Peningkatan Jalan Karangasem-jentir (DAK Bid jalan)	8,156,216,000	8,156,216,000	6,316,757,000	1	93	Kec. Bayat	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.18	2.18	km	2.18	km	100%
17	Peningkatan Jalan Karangturi - Kragilan	1,500,000,000	1,500,000,000	1,201,375,500	1	93	Kec. Gantiwarno	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.5	1.5	km	1.5	km	100%
18	Peningkatan Jalan Mlese - Ngandong - Serut	3,400,000,000	3,400,000,000	2,728,405,000	1	91	Kec. Gantiwarno	Panjang jalan yang ditingkatkan	3.58	3.58	km	3.58	km	100%
19	Peningkatan Jalan Kunto Wijoyodanu	3,500,000,000	3,500,000,000	2,860,647,750	1	93	Kec. Klaten Tengah dan Klaten Selatan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.74	1.74	km	1.74	km	100%
20	Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Bina Marga	250,000,000	250,000,000	162,192,850	1	65	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan yang ditunjang	8	8	kegiatan	8	kegiatan	100%
21	Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK	150,000,000	150,000,000	125,693,585	1	84	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan yang ditunjang	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%
22	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	1,000,000,000	1,000,000,000	692,576,380	1	95	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	16	16	kegiatan	16	kegiatan	100%
23	Peningkatan Jalan Gedung Pemda II	-	1,500,000,000	1,302,268,550	1	90	Kec. Klaten Selatan	Panjang jalan yang ditingkatkan	0	0.86	km	0.86	km	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
24	Peningkatan jalan gorosan-gemampir ds kanoman kec karangnongko (Bankeu Propinsi)	-	3,000,000,000	2,231,556,000	1	100	Kec. Karangnongko	Panjang jalan yang ditingkatkan	0	0.7	km	0.7	km	100%
25	Peningkatan jalan gemampir-jiwan ds gemampir kec karangnongko (Bankeu Propinsi)	-	11,000,000,000	8,278,439,000	1	100	Kec. Karangnongko	Panjang jalan yang ditingkatkan	0	3	km	3	km	100%
26	Peningkatan jalan Tegalmulyo-Surowono ds tlogowatu, tegalmulyo kec kemalang (Bankeu Propinsi)	-	4,000,000,000	2,788,043,000	1	100	Kec.Kemalang	Panjang jalan yang ditingkatkan	0	1	km	1	km	100%
VII	**Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan**	**7,000,000,000**	**8,500,000,000**	**7,004,431,627**										
1	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten	7,000,000,000	8,500,000,000	7,004,431,627	1	100	Kabupaten Klaten	Volume jalan yang dipelihara	17000	17000	m2	17000	m2	100%
VIII	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	**17,610,212,000**	**17,610,212,000**	**13,956,511,465**	**-**									
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	8,658,550,000	8,658,550,000	6,802,622,300	1	99	Kab. Klaten	Luas DI yang direhab/dipelihara	33	33	ha	33	ha	100%
2	Pendampingan DAK rehabilitasi Jaringan irigasi	250,000,000	250,000,000	92,922,854	0	100	Kab. Klaten	jumlah penunjang operasional kegiatan DAK irigasi Kab. Klaten	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
3	Operasi Irigasi	2,150,000,000	2,150,000,000	1,807,963,011	1	98	Kab. Klaten	jumlah dokumen Penyusunan pola tanam	1	1	dokumen	1	dokumen	100%
4	Perencanaan Jaringan Irigasi/bendung	440,000,000	440,000,000	432,670,600	1	100	Kab. Klaten	jumlah Penyusunan DED irigasi Kabupaten Klaten	3	3	dokumen	3	dokumen	100%
5	Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A	75,000,000	75,000,000	72,271,000	1	98	Kab. Klaten	jumlah pembinaan / penyuluhan teknis irigasi kepada P3A / GP3A	1	1	orang	1	orang	100%
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK. Bid. Irigasi)	6,036,662,000	6,036,662,000	4,748,061,700	1	98	Kab. Klaten	jumlah Jaringan irigasi yang direhab	12	12	DI	12	DI	100%
IX	**Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	**8,000,000,000**	**8,000,000,000**	**6,350,334,682**	**-**									
1	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	6,000,000,000	6,000,000,000	4,857,321,050	1	97	Kab. Klaten	jumlah embung yang direhab	1	1	unit	1	unit	100%
2	Operasi & Pemeliharaan (OPP) Sungai	1,450,000,000	1,450,000,000	1,050,784,832	1	98	Kab. Klaten	jumlah bahan pemeliharaan prasarana sungai	20	20	bendung	20	bendung	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Pengadaan bahan penanganan banjir	200,000,000	200,000,000	196,227,300	1	99	Kab. Klaten	jumlah pengadaan bronjong	500	500	buah	500	buah	100%
4	Rehabilitasi Kawasan Sumber Air	200,000,000	200,000,000	98,936,000	0	88	Kab. Klaten	Jumlah kawasan sumber air yan direhabilitasi	2	2	lokasi	1	lokasi	50%
5	Penyusunan Detail Enginering design (DED) Embung / Cek Dam	150,000,000	150,000,000	147,065,500	1	100	Kab. Klaten	jumlah penyusunan DED Embung	2	2	dokumen	2	dokumen	100%
X	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah**	**2,000,000,000**	**1,000,000,000**	**931,040,000**	**-**									
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK. Bid. Sanitasi)	2,000,000,000	1,000,000,000	931,040,000	1	100	DPU-PR	jumlah pengadaan truk tinja	2	2	unit	2	unit	100%
XII	**Program Penataan Trotoar Jalan**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**	**1,504,006,950**										
1	Penataan Trotoar jalan Kota Kabupaten	2,000,000,000	2,000,000,000	1,504,006,950	1	91	Kec. Klaten Utara	Luas trotoar yang dibangun	400	400	m	400	m	100%
XIII	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**1,575,000,000**	**1,600,000,000**	**1,254,562,852**	**-**									
1	Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang	450,000,000.00	450,000,000.00	333,712,575.00	74.16%	100	Delanggu, Prambanan, jatinom, Wedi, Ceper, Tulung	Jumlah Dokumen RDTR yang disusun	6	6	Dokumen	6	Dokumen	100%
2	Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang	375,000,000.00	400,000,000.00	310,869,152.00	77.72%	100	Kabupaten Klaten	jumlah koordinasi perencanaan penataan ruang daerah DPUPR	60	60	persen	60	persen	100%
3	Survei dan Pemetaan	350,000,000.00	350,000,000.00	266,422,750.00	76.12%	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peta peta tematik tersusun	4	4	peta tematik	4	peta tematik	100%
4	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang	400,000,000.00	400,000,000.00	343,558,375.00	85.89%	100	Delanggu, Prambanan, jatinom, Wedi, Ceper, Tulung	Jumlah dokumen KLHS RDTR tersusun	6	6	dokumen	6	dokumen	100%
XIV	**Program Pemanfaatan Ruang**	**400,000,000**	**400,000,000**	**250,002,607**	**-**									
1	Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang	200,000,000.00	200,000,000.00	146,940,597.00	73.47%	100	Kab. Klaten	jumlah dokumen rekomendasi tata ruang daerah	6	6	jenis	6	jenis	100%
2	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual pemanfaatan Ruang	200,000,000.00	200,000,000.00	103,062,010.00	51.53%	100	Kab. Klaten	jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan NSPK pemanfaatan ruang	546	546	orang	546	orang	100%
XV	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**150,000,000**	**150,000,000**	**148,304,925**	**-**									
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100,000,000.00	100,000,000.00	99,349,325.00	99.35%	100	Kab. Klaten	Jumlah frekuensi pengawasan pemanfaatan ruang se-Kabupaten Klaten	40	40	kali	40	kali	100%
2	Pembuatan Billboard/papan Reklame dan Sejenisnya	50,000,000.00	50,000,000.00	48,955,600.00	97.91%	100	Kab. Klaten	Jumlah Papan Informasi tata Ruang terpasang	19	19	buah	19	buah	100%
DINAS PERUMAHAN & KAWASAN														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong**	**1,600,000,000**	**1,600,000,000**	**1,231,058,505**										
1	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	500,000,000	500,000,000	294,758,650	58.95	100	masyarakat kab. Klaten	dokumen perencanaan saluran drainase /gorong-gorong	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Pembangunan saluran drainase/ Gorong - Gorong	450,000,000	450,000,000	317,146,555	70.48	100	masyarakat kab. Klaten	pembangunan drainase perkotaan kab.klaten	200	200	meter	200	meter	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong	650,000,000	650,000,000	619,153,300	95.25	100	masyarakat sekitar saluran drainase	pemeliharaan saluran drainase / gorong - gorong	3000	3000	meter	1163	meter	39
II	**Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung**	53,720,600,000	55,770,600,000	47,489,111,754										
1	Pembangunan Gedung Milik Daerah	51,520,600,000	51,520,600,000	43,764,515,466	84.95	100	masyarakat dan aparatur kab. Klaten	Pembangunan bangunan / gedung milik daerah	13	13	gedung	13	gedung	100
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah	2,100,000,000	3,400,000,000	2,920,666,888	85.90	100	masyarakat dan aparatur kab. Klaten	rehabilitasi bangunan gedung milik daerah	3	3	bangunan	3	bangunan	100
3	Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor	100,000,000	850,000,000	803,929,400	94.58	100	Kab. Klaten	pendataan bangunan gedung dengan aksesbilitas difabel kab klaten	1	1	dokumen	1	dokumen	100
II	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	**9,828,119,000**	**10,181,694,000**	**9,246,483,832**										
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Bid. Air Minum)	2,693,119,000	2,693,119,000	2,376,357,000	88.24	100	masyarakat kab. Klaten	jumlah sarana dan prasarana air minum	7	7	Desa	7	Desa	100
2	Pengembangan sistem distribusi air minum	2,625,000,000	2,625,000,000	2,310,034,699	88.00	100	masyarakat kab. Klaten	pembangunan jaringan air minum (HAMP), Penunjang operasional pembangunan jaringan air minum (HAMP)	12	12	Desa	12	Desa	100
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	610,000,000	610,000,000	574,421,915	94.17	100	masyarakat kab. Klaten	penunjang operasional DAK sanitasi kab.klaten	7	7	Desa	7	Desa	100
4	penunjang operasional pendampinganPAMSIMAS kab.klaten	200,000,000	200,000,000	63,685,764	31.84	100	masyarakat kab. Klaten	penunjang operasional pendampinganPAMSIMAS kab.klaten	26	26	Desa	26	Desa	100
5	Pendampingan dana alokasi khusus bidang insfrastruktur air minum	100,000,000	100,000,000	76,786,875	76.79	100	masyarakat kab. Klaten	penunjang operasional DAK air minum kab.klaten	7	7	Desa	7	Desa	100
6	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	100,000,000	20,000,000			100	masyarakat kab. Klaten	penunjang operasional kegiatan SANIMAS kab.klaten	8	8	Desa	8	Desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM) (DAK Bid. Sanitasi)	3,500,000,000	3,500,000,000	3,441,194,079	98.32	100	masyarakat kab. Klaten	jumlah sarana dan prasarana sanitasi	7	7	lokasi	7	lokasi	100
8	Penyediaan sarana dan prasrana air minum dan sanitasi (Silpa DAK Bid.air minum)		424,775,000	404,003,500	95.11	100	masyarakat kab. Klaten	pembangunan sarana dan prasarana air minum	1	1	lokasi	1	lokasi	100
								dokumen pendataan potensi dan permasalahan sanitasi komunal kab.klaten	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
								dokumen pendataan potensi dan permasalahan air minum kab.klaten	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
9	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi (silpa DAK sanitasi)		8,800,000.00				masyarakat kab. Klaten		1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
III	**Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan/perkotaan**	**150,000,000**	**150,000,000**	**91,934,750**										
1	BOP Pendampingan PNPM	150,000,000	150,000,000	91,934,750	61	61	masyarakat di kawasan kumuh	jumlah KOTAKU	212	212	Desa	212	Desa	100
IV	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**550,000,000.00**	**550,000,000.00**	**59,502,081.00**										
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100,000,000	100,000,000			100	masyarakat kab. Klaten	penyusunan dokumen UKL / UPL, DPLH dan perijinan pengambilan air tanah sumur bor di kab.klaten kab.klaten	2	2	dokumen	2	dokumen	100
2	Monitoring dan Pengendalian Bangunan	75,000,000	75,000,000	20,602,600	27.47	100	masyarakat pemilik bangunan di kab.klaten	monitoring dan pngendalian IMB di kab.klaten	26	26	kecamatan	26	kecamatan	100
3	Penunjang Operasional TIM SIUJK Kabupaten	375,000,000	375,000,000	38,899,481	10.37	100	masyarakat kab. Klaten	1. Penunjang operasional kegiatan tim SIUJK kab.klaten	60	60	rekomendasi	0	rekomendasi	0
								2. Penunjang operasional kegiatan tim SLF kab.klaten	30	30	rekomendasi	3	rekomendasi	10
KECAMATAN KLATEN UTARA														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KELURAHAN GERGUNUNG													
I	**Program Pembangunan Instrastuktur Perdesaan/Perkotaan**	**352,941,000**	**332,941,000**	**330,617,000**	**99%**	**99%**								
1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		332,941,000	330,617,000	99.30%	99.30%	Gergunung	Pemeliharaan Gedung dan Jalan di wilayah Kel.Gergunung dilaksanakan dgn baik		4	Macam	4	Macam	**100%**
2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
II	**Program Pengendalian Banjir**	**27,000,000**	**40,500,000**	**40,498,920**	**100%**	**100%**								
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	27,000,000	40,500,000	40,498,920	100%	100%	Kelurahan Gergunung	Pembersihan sungai di wilayah kelurahan gergunung oleh 2 orang THL	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100.00%**
	KELURAHAN BARENGLOR													
I	**Program Pembangunan Instrastuktur Perdesaan/Perkotaan**	**352,941,000**	**335,941,000**	**307,546,050**										
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		335,941,000	307,546,050	91,55	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah pembangunan infrastruktur kelurahan yang dibangun		9	titik	8	kali	88.88889
2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
II	**Program Pengendalian Banjir**	**27,800,000**	**27,800,000**	**27,772,440**										
1.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	27,800,000	27,800,000	27,772,440	99,90	100	Kel. Bareng Lor	Pembersihan sungai di wilayah kelurahan gergunung oleh 2 orang THL	1	1	tahun	1	tahun	100
KECAMATAN KLATEN TENGAH														
	KELURAHAN KABUPATEN													
I	**Program Pengendalian banjir**	**28,000,000**	**28,000,000**	**27,973,430**										
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali	28,000,000	28,000,000	27,973,430	#REF!	100%	Kel Kabupaten	Kebersihan Lingkungan sungai di wilayah Kel, Kabupaten	12	12	bln	12	bln	100.00%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	**Program Pembangunan Infra Struktur Pedesaan/Perkotaan**	**352,941,000**	**337,941,000**	**334,340,000**										
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		337,941,000	334,340,000.00	#REF!	100%	Kel Kabupaten	Tersedianya jembatan dan talud di wil. Kel Kabupaten		2 jembatan dan 1 talud	keg	2 jembatan dan 1 talud	keg	100.00%
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
	KELURAHAN KLATEN													
I	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan**	**-**	**344,510,500**	**342,244,500**	**99**	**100**								**0**
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		344,510,500	342,244,500	99	100	Kelurahan Klaten	Jumlah pembangunan pengerukan sungai, pemeliharaaan makam kyai melati, pembuatan talud, pengaspalan jalan, sarpras kelurahan		7	Kegiatan	7	Kegiatan	100
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
II	**Program Pengendalian Banjir**	**43,750,000**	**43,750,000**	**43,700,000**	**100**	**100**								**0**
1	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	43,750,000	43,750,000	43,700,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah THL dan sungai di wilayah kelurahan Klaten	2	2	Orang	2	Orang	100
	KELURAHAN TONGGALAN													
I	**PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN/PERKOTAAN**	**352,941,000**	**252,441,000**	**244,078,000**	**95**	**95**								
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		252,441,000	244,078,000	95	95	Kelurahan Tonggalan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		2	lokasi	2	lokasi	100
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
II	**PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR**	**30,000,000**	**30,000,000**	29,138,240.00	97%	97%								
1	Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/kali	30,000,000	30,000,000	29,138,240.00	97%	97%	Kel. Tonggalan	Jumlah THL pembersihan dan pengerukan sungai	2	2	orang	2	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KELURAHAN MOJAYAN													
I	**Program Pengendalian Banjir**	**30,000,000**	**30,000,000**	**29,999,640**										
1	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan sungai/kali	30,000,000	30,000,000	29,999,640	99.999	100	Kel. Mojayan	Jmlh tenaga kebersiha sungai dan alat kebersihan	2 THL , 8 alat kebersihan	2 THL , 8 alat kebersihan	2 THL , 8 alat kebersihan	100	thl , ALAT KEBERSIHAN	100
II	**Program Pembangunan infrastruktur pedesaan /perkotaan**	**352,941,000**	**330,469,300**	**325,195,300**										
1	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		330,469,300	325,195,300	98	100	Kel. Mojayan	Jumlah jalan dan jembatan		5	lokasi	5	lokasi	100
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
	KELURAHAN BUNTALAN													
I	**Program Pengendali Banjir**	**28,000,000**	**28,000,000**	**26,501,240**				**-**						
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali	28,000,000	28,000,000	26,501,240	94.65	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah tenaga pembersih Sungai	2	2	Orang	2	Orang	100
II	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/ Perkotaan**	**352,941,000**	**312,836,375**	**311,717,000**										
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU) Tambahan		312,836,375	311,717,000	99.64	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi Kegiatan	2	2	kali	2	kali	100
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
	KELURAHAN BARENG													
I	**Program Pengendalian Banjir**	**26,208,089**	**26,208,089**	**26,052,240**										
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	26,208,089	26,208,089	26,052,240	**99.41**	**100**	kel.bareng	Jumlah THL dalam pembersihan dan pengerukan sungai/kali	2	2	**THL**	**2**	**THL**	**100**
II	**program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan**	**352,941,000**	**352,941,000**	**349,237,500**		**100**								
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	352,941,000		-			kel.bareng							**100**
2	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan(DAU Tambahan)	-	352,941,000	349,237,500	**98.95**	**100**	kel.bareng	terpenuhi dan terpelihara bangunan fasilitas Umum		4	kegiatan	4	kegiatan	**100**
KECAMATAN KLATEN SELATAN														
	KELURAHAN GAYAMPRIT													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Pembangunan Infrstruktur Perdesaan/Kelurahan**	**352,941,000**	**Rp 334,941,000**	**Rp 331,044,000**	99%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan						
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		Rp 334,941,000	Rp 331,044,000	99%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah pemeliharaan jalan, Bank Sampah, pengadaan mesin pencacah, alat kesehatan posyandu, pembangunan gedung PAUD, Taman bermain anak		5	Gedung/lembaga	5	Gedung/lembaga	100%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	352,941,000												
KECAMATAN JATINOM														
	KELURAHAN JATINOM													
I	**Program Pengendalian Banjir**	**29,500,000**	**29,500,000**	**29,492,240**										
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	29,500,000	29,500,000	29,492,240	100	100	Kel. Jatinom	Jumlah Tenaga Kebersihan Sungai	2 / bl	2 / bl	orang	2 / bl	orang	100
II	**Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan/ Perkotaan**	**352,941,000**	**434,321,200**	**426,645,300**										
1	Pembangunan gedung/balai/kantor/ bangunan lainnya	0	190,000,000	189,395,000	100	100	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan Jalan Yang di bangun		1	lokasi	1	lokasi	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	244,321,200	237,250,300	97	100	Kel. Jatinom	Jumlah Kegiatan Sapras yang dibangun		4	lokasi	4	lokasi	100
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	352,941,000												
III	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	**98,725,000**	**98,725,000**	**97,124,000**										
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	98,725,000	98,725,000	97,124,000	98.38	100	Kel. Jatinom	Jumlah lokasi drainase yang di bangun	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
	JUMLAH TOTAL		**228,868,921,464**	**184,116,292,221**	**80.45**									

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : BIDAANG PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERWASKIM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PEMUKIMAN														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1,634,400,000**	**1,764,400,000**	**1,305,586,535**										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	450,000,000	550,000,000	305,628,122	55.57	100	karyawan DISPERWASKIM dan Penghuni Rusunawa	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet untuk kelancaran operasional kantor Disperwaskim	4	4	Rekening	4	Rekening	100
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100,000,000	100,000,000	63,928,000	63.93	100	Pejabat eselon DISPERWASKIM	jumlah pemeliharaan kendaraan kantor disperwaskim	11	11	unit	11	unit	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	335,253,528	335,253,528	275,831,450	82.28	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah jasa administrasi keuangan disperwaskim	23	23	Orang	23	Orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	166,400,000	166,400,000	105,620,740	63.47	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah tenaga pembersih kabupaten klaten	9	9	Orang	9	Orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	45,000,000	44,506,000	98.90	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah ATK disperwaskim	60	60	Jenis	60	Jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,000,000	40,000,000	39,859,500	99.65	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah barang cetakan dan penggandaan disperwaskim	10	10	Jenis	10	Jenis	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	10,000,000	9,427,000	94.27	100	karyawan DISPERWASKIM dan Penghuni Rusunawa	jumlah lampu dan peralatan listrik disperwaskim	14	14	Jenis	14	Jenis	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah bahan bacaan disperwaskim	4	4	Jenis	4	Jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	25,000,000	18,547,500	74.19	74.19	karyawan DISPERWASKIM	jumlah penyediaan makan dan minum disperwaskim	50	50	Kali	50	Kali	100
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175,000,000	175,000,000	171,653,723	98.09	90	karyawan DISPERWASKIM	jumlah koordinasi luar daerah disperwaskim	140	140	Kali	140	Kali	100
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	55,000,000	55,000,000	53,860,000	97.93	97.93	karyawan DISPERWASKIM	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah disperwaskim	400	400	Kali	400	Kali	100
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	217,746,472	217,746,472	174,369,760	80.08	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah tenaga pemgaman kantor disperwaskim	14	14	orang	14	orang	100
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	30,000,000	30,000,000	27,785,240	92.62	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah tenaga pengemudi kantor disperwaskim	2	2	orang	2	orang	100
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	10,000,000	10,000,000	9,569,500	95.70	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah dokumen perencanaan disperwaskim	5	5	jenis	5	jenis	100
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**345,000,000**	**749,000,000**	**697,379,600**										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	150,000,000	200,000,000	186,065,750	93.03	100	karyawan DISPERWASKIM dan Penghuni Rusunawa	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor di disperwaskim	7	7	jenis	7	jenis	100
2	Pengadaan mebeleur	100,000,000	100,000,000	81,423,850	81.42	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah meubelair di disperwaskim	7	7	jenis	7	jenis	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70,000,000	200,000,000	196,446,000	98.22	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah pemeliharaan gedung disperwaskim	1	1	gedung	1	gedung	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25,000,000	30,000,000	29,682,000	98.94	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor disperwaskim	20	20	unit	20	unit	100
5	Penataan lingkungan kantor		219,000,000	203,762,000	93.04	100	Dukcapil Kab.klaten	Jumlah dana	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**25,000,000**	**25,000,000**	**23,011,832**										
1	peningkatan kapasitas sumber daya manusia	15,000,000	15,000,000	13,500,000	90	90	karyawan DISPERWASKIM	jumlah fasilitasi SDM disperwaskim	6	6	orang	6	orang	100
2	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan	10,000,000	10,000,000	9,511,832	95.12	95.12	Kab. Klaten	jumlah kapasitas pengelolaan keuangan disperwaskim	3	3	jenis	3	jenis	100
IV	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**40,000,000**	**40,000,000**	**31,050,500**										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	15,000,000	12,799,000	85.33	85.33	DISPERWASKIM	jumlah laporan - laporan dinas disperwaskim	6	6	jenis	6	jenis	100
2	Monev kegiatan SKPD	25,000,000	25,000,000	18,251,500	73.01	73.01	DISPERWASKIM	jumlah monitoring kegiatan SKPD/OPD disperwaskim	1	1	dokumen	1	dokumen	100
V	**Program pengembangan perumahan**	**131,250,000**	**131,250,000**	**70,718,563**										
1	Biaya operasional pendampingan bantuan stimulan perumahan swadaya (DAK Bid. Perkim)	131,250,000	131,250,000	70,718,563	90	53.88	masyarakat kab. Klaten	jumlah rehab RTLH (DAK bid. Perumahan) kab.klaten	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
VI	**Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**2,315,094,162**										
1	Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	2,900,000,000	2,900,000,000	2,289,667,800	90	78.95	masyarakat kab. Klaten	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di kab .klaten (bankeu APBD Kab.)	2500	2500	unit rumah	2496	unit rumah	189%
								Rehab rumah swadaya RTLH (pendampingan DAK)			unit rumah	135	150 Unit	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
								Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di kab.klaten bankeu APBD Prov)			unit rumah	1173	unit rumah	
								Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di kab.klaten (BSPS)			unit rumah	925	unit rumah	
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100,000,000	100,000,000	25,426,362	90	25.43	masyarakat kab. Klaten	Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten Klaten	1	1	dokumen	1	dokumen	100
	JUMLAH TOTAL	**5,175,650,000**	**5,709,650,000**	**4,442,841,192**										

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : KESBANGPOL & SATPOL PP

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
KESBANGPOL														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**337,000,000**	**402,000,000**	**383,357,481**	95%	100%	Kabupaten Klaten	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**						
1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	4,000,000	4,000,000	3,432,000	86%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Surat Terkirim	750	750	surat	1141	surat	152%
2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20,000,000	20,000,000	12,544,652	63%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	48	48	tagihan	48	tagihan	100%
3	Kegiatan jasa Administrasi Keuangan	12,000,000	12,000,000	8,740,000	73%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan	4	4	laporan	4	laporan	100%
4	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	30,000,000	30,000,000	29,728,440	99%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah THL Kebersihan Kantor	2	2	orang	2	orang	100%
5	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	10,000,000	10,000,000	9,999,100	100%	100%	Kabupaten Klaten	Jenis ATK Tersedia	1	1	paket	1	paket	100%
6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,000,000	8,000,000	7,925,000	99%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	2	2	paket	2	paket	100%
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2,000,000	2,000,000	1,971,500	99%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	10	10	jenis	10	jenis	100%
8	Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6,000,000	6,000,000	5,906,400	98%	80%	Kabupaten Klaten	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan tersedia	883	883	eksemplar	883	eksemplar	100%
9	Kegiatan Penyediaan Penyediaan Makanan dan Minuman	5,000,000	5,000,000	4,982,000	100%	90%	Kabupaten Klaten	Jumlah makanan dan minuman tersedia	200	200	paket	200	paket	100%
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150,000,000	200,000,000	193,841,029	97%	95%	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	12	12	bulan	12	bulan	100%
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	50,000,000	65,000,000	64,925,000	100%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	12	12	bulan	12	bulan	100%
12	Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor	40,000,000	40,000,000	39,362,360	98%		Kabupaten Klaten	Jumlah THL Pengamanan Kantor	3	3	orang	3	orang	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**59,000,000**	**59,000,000**	**44,117,125**	75%	100%	Kabupaten Klaten	**Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**						
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	12,000,000	12,000,000	11,600,000	97%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah filling kabinet	4	4	unit	4	unit	100%
2	Pengadaan Peralatan Kantor	10,000,000	10,000,000	9,150,000	92%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Laptop dan printer	2	2	unit	2	unit	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	10,000,000	7,239,100	72%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung	2	2	unit	2	unit	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20,000,000	20,000,000	12,622,025	63%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas	7	7	unit	7	unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,000,000	2,000,000	775,000	39%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah AC Ruangan	5	5	unit	5	unit	100%
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	2,731,000	55%		Kabupaten Klaten	Jumlah Komputer printer dll	14	14	unit	14	unit	100%
III	**Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**997,000,000**	**1,390,000,000**	**1,104,226,450**	79%	100%	Kabupaten Klaten	**Terwujudnya Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**						
1	Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	972,000,000	1,365,000,000	1,081,967,550	79%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	12	12	kali	12	kali	100%
2	Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	25,000,000	25,000,000	22,258,900	99%		Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	1	1	kali	1	kali	100%
IV	**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal**	**200,000,000**	**270,000,000**	**219,361,700**	81%	100%	Kabupaten Klaten	**Terwujudnya Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal**						
1	Peningkatan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah	150,000,000	170,000,000	123,625,100	73%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	12	12	kali	12	kali	100%
2	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	50,000,000	100,000,000	95,736,600	96%		Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	500	500	orang	250	orang	50%
V	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**200,000,000**	**425,000,000**	**358,091,500**	84%	100%	Kabupaten Klaten	**Terwujudnya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**						
1	Pembinaan dan pemantapan kesadaran bela negara	125,000,000	150,000,000	136,906,600	91%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	1000	1000	orang	3	orang	0%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Dialog/ Forum Wawasan Kebangsaan	75,000,000	125,000,000	73,818,800	59%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	550	550	orang	275	orang	50%
3	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	150,000,000	147,366,100	98%		Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	1400	1400	orang	1400	orang	100%
VI	**Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik**	**345,000,000**	**425,000,000**	**379,895,000**	89%	100%	Kabupaten Klaten	**Terwujudnya Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik**						
1	Fasilitasi dan koordinasi forum-forum pembauran, kerukunan, kewarganegaraan dan kebangsaan	40,000,000	40,000,000	30,109,650	75%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	3	3	kali	3	kali	100%
2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan organisasi Masyarakat/Lembaga Swdaya Masyarakat/ Lembaga Nirlaba Lainnyaa	35,000,000	35,000,000	30,520,850	87%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	2	2	kali	1	kali	50%
3	Fasilitasi, koordinasi, dan Pembinaan Organisasi Politik	25,000,000	25,000,000	20,736,250	83%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	1	1	kali	1	kali	100%
4	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Nirlaba Lainnya /Organisasi Politik	15,000,000	15,000,000	10,915,000	73%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
5	Koordinasi Forum forum Diskusi Politik	20,000,000	100,000,000	95,909,250	96%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	750	750	orang	750	orang	100%
6	DESK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	210,000,000	210,000,000	191,704,000	91%		Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	1	1	kali	1	kali	100%
SATPOL PP														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**263,000,000**	**337,000,000**	**330,475,708**				**Presentase pelayanan administrasi perkantoran**	100	100				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,865,000	96	100	Satpol PP & damkar	Jumlah surat terkirim	2,000	2,000	surat	Tersediany a 2.000 surat	surat	100
2	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	35,000,000	47,000,000	42,692,862	91	100	Satpol PP & damkar	Jumlah Jenis rekening terbayar	4	4	jenis	Terbayarny a pajak sejumlah 4 jenis	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	10,000,000	15,000,000	14,804,250	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terselesaikan	7	7	orang	Terselesaikannya administrasi keuangan	orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,000,000	24,000,000	23,990,856	100	100	Satpol PP & damkar	Jumlah THL kebersihan kantor	1	2	orang	Terfasilitasinya tenaga 2 kebersihan	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	7,000,000	12,000,000	11,896,150	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah jenis ATK tersedia	14	14	jenis	Terpenuhinya kebutuhan ATK	jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,000,000	12,000,000	11,939,500	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	5	5	jenis	Terlaksananya cetak,penggandaan dan jilid	jenis	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,000,000	7,000,000	6,896,000	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	2 gedung	10	jenis	Tersedianya Peralatan pemeliharaan listrik	jenis	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prerundang-undangan	5,000,000	5,000,000	4,760,400	95	100	Satpol PP & damkar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	5	5	buah	Tersediany a 5 jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	32,000,000	31,989,000	100	100	Satpol PP & damkar	Jumlah makanan dan minuman tersedia	50 keg	905	paket	Tersediany a mamin kegiatan rapat-rapat kantor	paket	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120,000,000	150,000,000	149,672,940	100	100	Wilayah Indonesia	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	32	40	kali	Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi ke dalam daerah	25,000,000	30,000,000	28,968,750	97	100	Kab. Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	25	30	kali	Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah	kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	**Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**187,000,000**	**280,000,000**	**267,355,945**				**Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur**	100	100				
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	75,000,000	75,000,000	69,607,000	93	100	Satpol PP & damkar	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	25	25	unit	Terwujudnya peralatan HT	unit	100
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	20,000,000	20,000,000	19,470,500	97	100	Satpol PP & damkar	Jumlah gedung kantor terpelihara	2	2	unit	Terlaksananya Pengecatan ruang kantor, pagar dan eternit	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,000,000	125,000,000	121,042,750	97	100	Satpol PP & damkar	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	27	27	unit	Terpeliharanya 17 roda 2,10 mobil	unit	100
6	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	7,000,000	7,000,000	6,860,000	98	100	Satpol PP & damkar	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	5	5	unit	Terpeliharanya 5 unit printer,6 unit komputer, 2 AC	unit	100
7	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana pemadam kebakaran	20,000,000	53,000,000	50,375,695	95	100	Satpol PP & damkar	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran terpelihara	6	7	unit	Terpeliharanya sanpras Damkar	unit	100
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**110,000,000**	**110,000,000**	**104,581,000**				**Persentase kehadiran aparatur**	100	100				
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	110,000,000	110,000,000	104,581,000	95	100	Satpol PP & damkar	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedia	115	115	orang	Tersediany a seragam anggota	orang	100
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**64,000,000**	**64,000,000**	**62,697,423**				**Persentase capaian aparatur berkompeten**	100	100				
1	Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM	64,000,000	64,000,000	62,697,423	98	100	Satpol PP	Jumlah ASN terfasilitasi kapasitas SDM	65	75	orang	Terlaksananya Bintek anggota Satpol dan linmas	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**580,000,000**	**775,000,000**	**721,655,000**				**Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman**	100	100				
1	Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	30,000,000	50,000,000	49,841,000	100	100	Kab. Klaten	Jumlah Operasional penertiban pedagang kaki lima (PKL)	24	30	kegiatan	Terlaksananya kegiatan penertiban PKL	kegiatan	100
2	Patroli trantibum di wil. Kab. Klaten	25,000,000	70,000,000	69,778,400	100	100	Wilayah Kab. Klaten	Jumlah pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten klaten	40	60	kegiatan	Terlaksananya kegiatan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten klaten	kegiatan	100
3	Penertiban Reklame, spanduk dan baliho	20,000,000	35,000,000	34,974,400	100	100	Kab. Klaten	Jumlah pelaksanaaan penertiban dalam pemasangan reklame, sepanduk dan baliho.	10	15	kegiatan	Terlaksananya kegiatan penertiban dalam pemasangan reklame, sepanduk dan baliho	kegiatan	100
4	Fasilitasi dan Penunjang Operasional Kegiatan Polisi Pamong Praja	135,000,000	220,000,000	213,714,700	97	100	Satpol PP	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional siaga tugas satuan polisi pamong praja	8 personil/hari siaga 24 jam sebulan	8 personil/ hari siaga 24 jam	orang	Terlaksananya siaga 8 personil/hari siaga 24 jam sebulan	orang	100
5	Dukungan Penyelenggaraan pemilihan legeslatif/Presiden/Gubernur /Bupati dan Kepala Desa	370,000,000	400,000,000	353,346,500	88	100	Kab. Klaten	Jumlah personil pengamanan dalam pelaksanaan pemilihan legeslatif / presiden /gubernur/bupati/kepala desa	300	300	orang	Terlaksananya pengamanan Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
VI	**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**70,000,000**	**160,000,000**	**140,865,600**				**Prosentase Anggota korsik yang terlatih**	100	100				
1	Peningkatan dan Pembinaan Korp Musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	70,000,000	160,000,000	140,865,600	88	100	Kab. Klaten	Jumlah Frekwensi pelaksanaan korp musik Kabupaten Klaten,	10	29	kegiatan	Terlaksananya kegiatan korp musik Kabupaten Klaten	kegiatan	100
VII	**Progam Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**	**1,099,050,000**	**1,513,050,000**	**1,506,108,466**				**Cakupan pemberdayaan masyrakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan**	100	100				
1	Optimalisasi Pengamanan dan Penertiban Wilayah Kabupaten Klaten	998,950,000	1,288,050,000	1,281,252,716	99	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban umum dan ketentraman masyarakat	55/35	100/35	kegiatan/ THL	Trlaksanaanya kegiatan PAM even penting , kegiatan Carvriday / THL	kegiatan / THL	100
2	Pemantapan Keamanan Wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat	100,100,000	225,000,000	224,855,750	100	100	Kab. Klaten	Jumlah anggota linmas yang terlatih kemampuan dan ketrampilannya dalam mewujudkan keamanan wilayah	3	6	kegiatan	Terlatihnya anggota satlinmas dan siskamling	kegiatan	100
VIII	**Progam Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)**	**60,000,000**	**265,000,000**	**260,167,100**				**Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten**	100	100				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggar Perda	25,000,000	110,000,000	105,393,000	96	100	Kab. Klaten	Jumlah operasi penertiban dan penindakan pelanggaran perda	10	50	kegiatan	Terlaksananya kegiatan penindakan dan operasional disiplin aparatur 20 anggota	kegiatan	100
2	Pembinaan penegakan Perda/Perbup	10,000,000	55,000,000	54,913,250	100	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub.	5	15	kegiatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan kegiatan sosialisasi	kegiatan	100
3	Operasi PGOT, WTS, Miras,	25,000,000	100,000,000	99,860,850	100	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan operasi untuk menciptakan situasi kondusif di kabupaten klaten	8	30	kegiatan	Terlaksananya kegiatan operasi PGOT, WTS, Miras	kegiatan	100
IX	**Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran**	**105,000,000**	**155,000,000**	**148,668,400**				**Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih**	100	100				
1	Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran	30,000,000	80,000,000	77,601,900	97	100	Damkar	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional	29	29	orang	Terwujudnya anggota anggota damkar yang profesional	orang	100
	Penyususnan Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	75,000,000	75,000,000	71,066,500	95		Damkar	Jumlah dokumen Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang tersusun	1	1	dokumen	Terrsusunnya dokumen Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	dokumen	
	JUMLAH TOTAL	**4,676,050,000**	**6,630,050,000**	**6,031,623,898**	**90.97**									

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : SOSIAL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS SOSIAL, PP, PA & KB, SATPOL PP, BAGIAN KESRA, BPBD, KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS SOSIAL, PP, PA & KB														
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**283,500,000**	**477,000,000**	**422,983,684**	**88.7**	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	100	%	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000	2,000,000	1,613,100	80.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah surat keluar (jasa pengiriman), jumlah materai Dinas Sosial, PP,PA, dan KB	100	100	surat	100	surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35,000,000	100,000,000	64,215,241	64.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor yang terbayarkan Dinas sosial, PP,PA dan KB	3	3	jenis	3	jenis	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10,000,000	15,000,000	14,970,000	99.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah ajuan dokumen administrasi keuanganDinas sosial, PP,PA dan KB	12	12	dokumen	12	dokumen	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15,750,000	20,000,000	16,581,904	82.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Dinas sosial, PP,PA dan KB	1	1	orang	1	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	12,500,000	15,000,000	14,048,002	93.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah jenis alat tulis kantor Dinas sosial, PP,PA dan KB	50	50	jenis	50	jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000	11,750,000	11,118,000	94.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor Dinas Sosial, PP,PA dan KB	8	8	jenis	8	jenis	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	4,000,000	3,743,500	93.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/oenerangan Dinas Sosial,PP,PA dan KB	10	10	jenis	10	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,750,000	1,750,000	1,440,000	82.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan	3	3	jenis	3	jenis	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	22,500,000	35,000,000	33,719,000	96.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah rapat, rakor, dan pertemuan pada Dinas Sosial, PP,PA dan KB	30	30	kali	30	kali	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	126,750,000	200,000,000	199,942,396	100.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab Klaten	100	140	kali	140	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30,000,000	50,000,000	49,726,500	99.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kab Klaten	80	120	kali	120	kali	100
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	15,250,000	22,500,000	11,866,041	52.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor (THL)Dinas Sosial, PP, PA, dan KB	1	1	orang	1	orang	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**336,500,000**	**468,400,000**	**433,957,175**	**92.6**	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100
13	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor		60,000,000	58,423,750	97.4	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	0	2	jenis	2	jenis	100
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	89,000,000	101,900,000	97,848,050	96.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	1	3	jenis	3	jenis	100
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105,000,000	130,000,000	127,724,000	98.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah bangunan/gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Dinas Sosial, PP,PA dan KB	3	3	unit	3	unit	100
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80,000,000	104,000,000	83,920,675	80.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara	129	129	unit	129	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,500,000	22,500,000	18,340,700	81.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah pemeliharaan/servis peralatan kantor selama 1 tahun Dinas Sosial, PP,PA dan KB	40	40	kali	40	kali	100
17	Fasilitasi Pindahan Kantor	50,000,000	50,000,000	47,700,000	95.4	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Frekuensi pindahan kantor yang dilaksanakan	1	1	kali	1	kali	100
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,872,000**	**93.6**	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Tingkat akurasi data dan ketepatan pengiriman laporan	100	100	%	100	%	100
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,872,000	93.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah jenis buku penilaian capaian kerja Dinas Sosial, PP,PA dan KB	2	2	buku/dokumen	2	buku/dokumen	100
IV	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**50,000,000**	**115,000,000**	**98,689,800**	**85.8**	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	98	98	%	98	%	100
19	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	50,000,000	115,000,000	98,689,800	85.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Keluarga miskin anggota KUBE yang sudah ada Dinas Sosial, PP, PA dan KB	80	80	keluarga	80	keluarga	100
V	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**778,900,000**	**1,690,900,000**	**1,292,352,299**	**76.4**	89.2	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase (%) penyandang anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	32	32	%	32	%	100
20	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	206,500,000	206,500,000	193,242,597	93.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah penyandang masalah yang direhabilitasi Dinas Sosial, PP,PA dan KB	29	29	orang	29	orang	100
21	Penanganan mayat terlantar	20,000,000	20,000,000	6,545,050	32.7	35	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah mayat terlantar yang ditangani dalam 1 tahun Dinas Sosial, PP,PA dan KB	14	14	mayat	4	mayat	35

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
22	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	22,400,000	22,400,000	22,223,474	99.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah kegiatan AKRS dan upacara tabur bunga hari pahlawan taman makam pahlawan Ratna Bantala	2	2	keg	2	keg	100
23	Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	30,000,000	30,000,000	24,341,600	81.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah anak dan keluarga penyandang disabilitas yang dibina Dinas Sosial, PP, PA dan KB	250	250	keluarga	250	keluarga	100
24	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif	50,000,000	97,000,000	81,082,768	83.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah orang yang dibina Dinas Sosial, PP,PA dan KB	200	200	orang	200	orang	100
25	Pemutakhiran Data Fakir Miskin	450,000,000	1,315,000,000	964,916,810	73.4	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah kegiatan pemutakhiran (verifikasi dan validasi) data keluarga dan rumah tangga miskin Dinsos P3AKB	1	1	keg	1	keg	100
VI	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	**40,000,000**	**40,000,000**	**29,501,100**	**73.8**	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Cakupan penanganan PMKS						
26	Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	40,000,000	40,000,000	29,501,100	73.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah keluarga rentan yang dibina Dinas Sosial, PP, PA dan KB	200	200	orang	200	orang	100
VII	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**752,000,000**	**862,000,000**	**829,763,850**	**96.3**	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	100	100	%	100	%	100
27	Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	25,000,000	25,000,000	24,866,000	99.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah organisasi/lembaga sosial, HIPENCA dan DP2K3D Dinas Sosial, PP, PA dan KB	5	5	organisasi	5	organisasi	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
28	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	457,025,000	472,025,000	461,770,850	97.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 26 Kecamatan	26	26	orang	26	orang	100
29	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	109,975,000	184,975,000	180,387,900	97.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan dan operator PKH Dinas Sosial, PP, PA dan KB	200	200	orang	200	orang	100
30	Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)	10,000,000	10,000,000	7,868,500	78.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Replikasi Rehabilitasi bersumber daya masyarakat yang dibentuk mkab klaten	1	1	orang	1	orang	100
31	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	125,000,000	125,000,000	111,046,000	88.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Rapat Koordinasi dan operasional persiapan penyaliran bantuan sosial kepada penerima manfaat Dinas Sosial, PP, PA dan KB	5	5	kali	5	kali	100
32	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten	25,000,000	45,000,000	43,824,600	97.4	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah rapat koordinasi dan pelatihan dapur umum untuk TAGANA Dinas Sosial, PP, PA dan KB	5	5	kali	5	kali	100
SATPOL PP														
I	**Program Penanganan Darurat Bencana**	**908,950,000**	**1,083,950,000**	**1,035,882,793**										
1	Operasional pemadam kebakaran	908,950,000	1,083,950,000	1,035,882,793	96	100	Damkar	Jumlah anggota Pemadam kebakaran dan THL yang terfasilitasi..	29	29	orang	29	orang	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
I	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**23,336,000**	**23,336,000**	**19,301,000**										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	23,336,000	23,336,000	19,301,000	83	100	Makam kyai Melati dan makam Bupati pertama	Terselenggaranya ziarah ke makam kiai Mlati dan makam Bupati pertama Klaten	1 kegiatan	2	lokasi	2	lokasi	100%
II	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**9,440,000**	**9,440,000**	**300,000**										
1	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	9,440,000	9,440,000	300,000	3	15	Bagian kesra	Jumlah pemohon / organisasi yang difasilitasi	12 bulan (35 lembaga)	23	organisasi	23	organisasi	100%
III	**Program Peningkatan Keagamaan**	**5,129,895,000**	**5,271,895,000**	**3,960,071,610**										
1	Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji	1,218,199,000	1,218,199,000	1,078,433,579	89	89	Kabupaten Klaten	Terlaksananya pamitan, pemberangkatan, pemulangan dan tasyakuran	1200 orang	1,200	jamaah	901	jamaah	75%
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan	115,880,000	215,880,000	143,600,500	67	67	Kabupaten Klaten	jumlah juara qori/qoriah dan hafids/hafidzoh tingkat pelajar	3 kegiatan (2x provinsi, 1x kabupaten)	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
3	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	1,822,765,000	1,849,765,000	1,242,605,510	67	67	Kabupaten Klaten	jumlah hari-hari besar keagamaan di Kabupaten Klaten	23 kegiatan	23	kegiatan	23	kegiatan	100%
4	Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah	1,973,051,000	1,988,051,000	1,495,432,021	75	75	Masjid Al Aqsha dan Masjid Raya Klaten	Jumlah masjid Pemda yang terfasilitasi	62 THL(53 THL, 5 Imam, 4 Muadzin)	2	masjid	2	masjid	100%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)														
I	**Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**955,000,000**	**1,172,580,000**	**867,798,540**										
1	Pelatihan dan Simulasi Pegurangan Risiko Bencana	500,000,000	617,580,000	403,836,300.00	65.39	80	BPBD	Jumlah Peserta Pelatihan dan Simulasi Pegurangan Risiko Bencana	1.420 orang	1,420	orang		orang	-
2	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	50,000,000	50,000,000	46,731,500.00	93.46	100	BPBD	Jumlah Sekolah Siaga Bencana	50 Org/Guru	50	orang	50	orang	100
3	Peningkatan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana	50,000,000	50,000,000	42,119,800.00	84.24	100	BPBD	Jumlah Forum Penanggulangan Bencana	26 forum	26	forum	26	forum	100
4	Penyelenggaraan Sekolah Sungai	155,000,000	255,000,000	188,335,100.00	73.86	95	BPBD	Jumlah Komunitas Sekolah Sungai	3 Komunitas	3	komunitas	3	komunitas	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	100,000,000	100,000,000	91,523,840.00	91.52	100	BPBD	Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 desa	2	2 desa	2	2 desa	100
6	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	100,000,000	100,000,000	95,252,000.00	95.25	100	BPBD	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	2 dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100
II	**Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**	**16,007,600,000**	**16,043,150,000**	**13,775,569,007**	**85.87**									
1	Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	332,600,000	368,150,000	223,883,350.00	60.81	85	BPBD	Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	6 Kegiatan	6	kegiatan	6	kegiatan	100
2	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Hibah Rehap Rekon)	15,675,000,000	15,675,000,000	13,551,685,657.00	86.45	100	BPBD	Jumlah jembatan terehabilitasi dan terekonstruksi	2 Jembatan	2	jembatan	2	jembatan	100
III	**Program Penanganan Darurat Bencana**	**1,359,350,000**	**2,176,444,440**	**1,509,853,553**										
1	Koordinasi,Pemantauan dan Operasional Penanganan darurat Bencana	304,300,000	404,300,000	262,421,100.00	64.91	100	BPBD	Jumlah Koordinasi,Pemantauan dan Operasional Penanganan darurat Bencana	40 kegiatan	60	kegiatan	60	kegiatan	100
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	315,700,000	477,794,440	440,572,667.00	92.21	100	BPBD	Jumlah Koordinasi Pengembangan dan Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	40 kegiatan	60	kegiatan	60	kegiatan	100
3	Droping Air Bersih	200,000,000	200,000,000	175,318,186.00	87.66	100	BPBD	Jumlah Droping Air Bersih Wilayah Kabupaten Klaten	25 desa	25	desa	25	desa	100
4	Penyediaanan Dana Siap Pakai	539,350,000	539,350,000	111,000,000.00	20.58	100	BPBD	Jumlah Dana yang tersedia untuk penanganan darurat bencana	26 kecamatan	26	kecamatan		kecamatan	-
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana	-	555,000,000	520,541,600.00	93.79	100	BPBD	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanganan Bencana	-	8	jenis	8	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KEC. KLATEN UTARA													
I	**Program peningkatan keagamaan**	**18,000,000**	**18,000,000**	**15,999,400**										
1	Peningkatan dan pembinaan keagamaan	18,000,000	18,000,000	15,999,400.00	88.89	70	Kec.Klaten Utara	Jumlah Kegiatan Pengajian,Halal bihalal,Tarling,Buka Bersama	4	4	Kegiatan	3	Kegiatan	75.0
II	**program peningkatan pengelolaan logistik**	**6,000,000**	**6,000,000**	3,853,500.00			Kec.Klaten Utara							
1	pengadaan bahan logistik	6,000,000	6,000,000	3,853,500.00	64.23		Kec.Klaten Utara	Jumlah desa yang menerima bantuan logistik untuk korban bencana	8	8	Desa/Kelurahan	-	Desa/Kelurahan	0.0
	KEC. KLATEN TENGAH													
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	100%	100%		Prosentase Kegiatan Keagamaan						100%
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah peningkatan dan pembinaan keagamaan	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100%
II	**Program Peningkatan Pengelolaan Logistik**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	100%	100%								
1	Pengadaan Bahan Logistik	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pengadaan bahan logistik	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
	KEC. KLATEN SELATAN													
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**18,000,000**	**18,000,000**	**17,450,000**	**96.94**	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	18,000,000	18,000,000	17,450,000	96.94	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Keagamaan/Pengajian	8	8	keg	8	keg	100
II	**Program Peningkatan Pengelolaan Logistik**	**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**	**100.00**	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Pengadaan bahan logistik	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis Logistik	1	1	keg	1	keg	100
	KEC. KALIKOTES													
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**20,000,000**	**20,000,000**	**19,854,300**		100		**Prosentase Tingkat keagamaan**	100	100				
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	20,000,000	20,000,000	19,854,300	**99**	100	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan keagamaan	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KEC. NGAWEN													
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**22,000,000**	**22,000,000**	**21,080,000**	96%	100%								
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	22,000,000	22,000,000	21,080,000	96%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah pengajian dalam 1 tahun	12	12	kali	12	kali	100%
II	**Program peningkatan pengelolaan logistik**	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	**100%**	100%								
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah kebutuhan logistik untuk korban bencana alam	20	20	paket	20	paket	100%
	KEC. KEBONARUM													
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**8,842,400**	**8,842,400**	**7,842,300**	**89**	100								
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	8,842,400	8,842,400	7,842,300	89	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan pengajian	7	7.00	keg	7.00	keg	100
II	**Program Peningkatan Penglolaan Logistik**	**2,955,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**100**	100								
1	Pengadaan Bahan logistik	2,955,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kebutuhan logistik	3	3.00	paket	3.00	paket	100
	KEC. WEDI													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN**	**18,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**										
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah kegiatan	12	12	kali	12	kali	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK**	**10,000,000**	**10,000,000**	**1,951,000**										
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	1,951,000	19.51	100	Kecamatan Wedi	Jumlah jenis logistik bantuan	13	13	jenis	13	jenis	100
	KEC. JOGONALAN													
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**12,000,000**	**12,000,000**	9,134,000	**76.12**									
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	12,000,000	12,000,000	9,134,000	76.12	100	Kec. Jogonalan	Jumlah pelaksanaan pengajian	12	12	kgtn	9	kgtn	75
II	**Program Peningkatan Pengelolaan Logistik**	**8,000,000**	**8,000,000**	**-**	**0.00**									
1	Pengadaan bahan logistik	8,000,000	8,000,000	-	0.00	0	0	Jumlah bahan logistik	5	5	jenis	0	jenis	0
	KEC. GANTIWARNO													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**18,000,000**	**18,000,000**	**14,985,000**										
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	18,000,000	18,000,000	14,985,000.00	74	80	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasinya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan	13	12	Kali	10	Kali	80%
II	**Program Peningkatan Pengelolaan Logistik**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,187,800**										
1	Pengadaan Bahan Logistik	10,000,000	10,000,000	9,187,800.00	39	70	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya Bahan Logistik	20	20	Paket	14	Paket	70%
	KEC. PRAMBANAN													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN**	**15,000,000**	**15,000,000**	13,437,800	**90%**	100%		**Prosentase pemenuhan peningkatan keagamaan**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	100%
1	Peningkatan dan pembinaan keagamaan	15,000,000	15,000,000	13,437,800	90%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pembinaan keagamaan	9	9	kegiatan	9	kegiatan	100%
II	**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK**	**10,000,000**	**10,000,000**	1,761,000	**18%**	100%		**Prosentase pemenuhan peningkatan pengelolaan logistik**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	100%
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	1,761,000	18%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah jenis bahan logistik bantuan bencana	9	9	jenis	9	jenis	100%
	KEC. MANISRENGGO													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN**	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,580,500**										
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	12,000,000	12,000,000	11,580,500	96.50	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah kegiatan keagamaan	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK**	**8,000,000**	**8,000,000**	**-**										
1	Pengadaan Bahan Logistik	8,000,000	8,000,000	-	0	0	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis bahan logistik	10	10	Jenis			
	KECAMATAN KEMALANG													
I	**Program Pembinaan Keagamaan**	**19,002,500.00**	**19,002,500.00**	**13,800,000.00**	**72.62**	100.00								
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	19,002,500.00	19,002,500.00	13,800,000.00	72.62	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kegiatan Pembinan Keagamaan	12	12	Kali	12	Kali	100%
II	**Program Penangan Darurat Bencana**	**54,920,000.00**	**54,920,000.00**	**46,874,197.00**	**85.35**	100.00								
1	Droping air bersih	54,920,000.00	54,920,000.00	46,874,197.00	85.35	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Penanganan Darurat Bencana	200	200	Tangki	200	Tangki	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	**Proram Peningkatan Pengeloaan Logistik**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**2,898,000.00**	**28.98**	100.00								
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000.00	10,000,000.00	2,898,000.00	28.98	100	Kecamatan Kemalang	Terpenunya pengadaan bahan logistik	12	12	bulan	12	bulan	100%
KECAMATAN KARANGNONGKO														
I	**Program peningkatan keagamaan**	**21,600,000.00**	**21,600,000**	21,562,500	99.83	99.83	Kec.Karangnongko							
1	Peningkatan dan pembinaan kegiatan keagamaan	21,600,000.00	21,600,000	21,562,500	99.83	99.83	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan dan pembinaan kegiatan keagamaan terpenuhi	12	12	bulan	11.98	bulan	99.83%
II	**Program peningkatan pengelolaan logistik**	**5,000,000**	**5,000,000**	-	0.00	-	Kec.Karangnongko							
1	Pengadaan bahan logistik	5,000,000	5,000,000	-	0.00	-	Kec.Karangnongko	jumlah Pengadaan bahan logistik terpenuhi	0	0	jenis	-	jenis	0.00%
KECAMATAN JATINOM														
I	**Program Peningkatan Keagamaan :**	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,998,500**	**99.99**	100								
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	12,000,000	12,000,000	11,998,500	99.99	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya pembinaan keagamaan	12	12	kali	12	kali	100
II	**Program Peningkatan Pengelolaan Logistik**	**-**	**12,000,000**	**-**	0.00	100								
1	Pengadaan Bahan Logistik	-	12,000,000	-		100	Kec. Jatinom	Terwujudnya pengadaan bahan logistik	0	12	jenis	0	jenis	0
KECAMATAN KARANGANOM														
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**15,000,000**	**15,000,000**	**13,495,000**										
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	15,000,000	15,000,000	13,495,000	90	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah penyelenggaraan pengajian	12	12	Kali	12	Kali	100
II	**Program Peningkatan Pengelolaan Logistik**	**5,000,000**	**5,000,000**											
1	Pengadaan bahan logistik	5,000,000	5,000,000	0	0	0	Kecamatan Karanganom	Jumlah paket bantuan logistik	5	5	Paket	0	Paket	0
KECAMATAN TULUNG														
I	**Program peningkatan keagamaan**	**15,000,000**	**15,000,000**	**14,460,000**										
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	15,000,000	15,000,000	14,460,000.00	96%	100	Kec Tulung	Jumlah penyelenggaraan pengajian	12	12	Kali	12	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	**Program peningkatan pengelolan logistik**	**10,000,000**	**10,000,000**	0.00	0	0								
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	0.00	0	0		Jumlah paket bantuan logistik	5	5	Paket	0	Paket	0
KECAMATAN POLANHARJO														
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN**	**18,000,000**	**20,000,000**	**19,134,900**	96%	96%	Kec. Polanharjo							
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	18,000,000	20,000,000	19,134,900	96%	96%		Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	12	12	Kali	12	Kali	100%
II	**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,942,000**	99%	99%	Kec. Polanharjo							
1	Pengadaan Bahan Logistik	10,000,000	10,000,000	9,942,000	99%	99%		Jumlah Bantuan Logistik Bencana Alam	11	11	Paket	11	Paket	100%
KECAMATAN DELANGGU														
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN**	**20,000,000**	**15,000,000**	**14,569,700**										
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	20,000,000	15,000,000	14,569,700	97.13	97	Kec. Delanggu	Jml. Kegiatan keagamaan tk kec.	6	6	kali	6	kali	100
II	**PROGRAM PENGELOLAAN LOGISTIK**	**5,000,000**	**1,000,000**	**971,000**										
1	Pengadaan bahan logistik	5,000,000	1,000,000	971,000	97.10	97	Kec. Delanggu	Jml. Logistik bencana kecamatan	2	2	kali	2	kali	100
KECAMATAN JUWIRING														
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**15,380,000**	**21,318,000**	**18,043,200**			Kec. Juwiring							
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	15,380,000	21,318,000	18,043,200	85%	100	Kec. Juwiring	jumlah kegiatan pengajian yang dilaksanakan	200(orang)	12	kegiatan	12	kegiatan	100
II	**Program peningkatan pengelolaan logistik**	**10,000,000**	**10,000,000**				Kec. Juwiring							
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	-	0%	0	Kec. Juwiring	jumlah desa tercukupi logistik bencana	19	19	desa	0	desa	0
KECAMATAN WONOSARI														
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**16,185,000**	**16,185,000**	**16,089,500**										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	16,185,000	16,185,000	16,089,500	99.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Pembinaan keagamaan yang terlaksana	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100
II	**Program peningkatan pengelolaan logistik**	**5,839,000**	**5,839,000**	**1,831,000**										
1	Pengadaan bahan logistik	5,839,000	5,839,000	1,831,000	31.4	100.0	Kec. Wonosari	jumlah Desa yang menerima bantuan logistik	18	18	desa	18	desa	100
	KECAMATAN CEPER													
I	**Program peningkatan keagamaan**	**18,000,000.00**	**18,000,000.00**	**15,840,000.00**										
1	peningkatan dan pembinaan keagamaan tk kecamatan	18,000,000	18,000,000	15,840,000.00	88%	88	Kec Ceper	frekuensi pembinaan agama tingkat kecamatan , festival hadroh	12	12	kali	12	kali	100
II	**Program Peningkatan Pengelolaan Logistik**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**3,987,500.00**										
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	3,987,500.00	40%	40	Kec Ceper	jumlah logistik bantuan	50	50	paket	50	paket	100
	KECAMATAN PEDAN													
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	**100.00**	100.00	Kecamatan Pedan							
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pembinaan keagamaan tk kecamatan	1	1	bulan / kegiatan pengajian	1	bulan / kegiatan pengajian	100%
II	**Program peningkatan pengelolaan logistik**	**7,000,000**	**7,000,000**	**2,000,000**	**28.57**	28.57	Kecamatan Pedan							
1	Pengadaan bahan logistik	7,000,000	7,000,000	2,000,000	28.57	28.57	Kecamatan Pedan	jumlah kebutuhan tanggap bencana	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
	KECAMATAN KARANGDOWO													
I	**Program Peningkatan Keagamaan**	**17,200,000.00**	**17,200,000.00**	**14,082,600.00**	**81.88**	100	Kecamatan Karangdowo							
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	17,200,000.00	17,200,000.00	14,082,600.00	81.88	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pengajian Rutin Di Tingkat Kecamatan Selama 12 Bulan	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100%
II	**Program peningkatan pengelolaan logistik**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**9,933,000.00**	**99.33**	100	Kecamatan Karangdowo							
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000.00	10,000,000.00	9,933,000.00	99.33	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik	6	6	Jenis	6	Jenis	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KECAMATAN CAWAS													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN**	**11,500,000.00**	**11,500,000.00**	**7,219,900.00**	63	100	Kecamatan Cawas							
1	Peningkatan Dan Pembinaan keagamaan	11,500,000.00	11,500,000.00	7,219,900.00	63	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Frekuensi kegiatan pengajian di Kec. Cawas	10	10	kali	2	kali	20%
II	**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK**	**10,000,000.00**	**30,000,000.00**	**25,346,250.00**	84	100	Kecamatan Cawas							
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000.00	30,000,000.00	**25,346,250.00**	84	100	Kecamatan Cawas	Jumlah paket Logistik Bantuan	1	1	Paket Logistik	1	Paket Logistik	100%
	KECAMATAN TRUCUK													
I	**PROGAM PENINGKATAN KEAGAMAAN.**	**18,000,000**	**18,000,000**	18,000,000										
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan pengajian	12 bulan	12	bulan	12	bulan	100
II	**PROG. PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK**	**15,000,000**	**15,000,000**	9,000,000										
1	Pengadaan bahan logistik	15,000,000	15,000,000	9,000,000	60.0	60	desa - desa	Jumlah bahan logistik	11 jenis	7	jenis	7	jenis	100
	KECAMATAN BAYAT													
I	**PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN**	***20,000,000***	***20,000,000***	***16,731,500***										
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	20,000,000	20,000,000	16,731,500	84	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan keagamaan	12	12	kali	12	kali	100
II	**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK**	***10,000,000***	***10,000,000***	***9,956,250***										
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	9,956,250	100	0	Kec. Bayat	Jumlah jenis Bantuan Logistik yang tersalurkan	10	10	jenis	10	jenis	100
	TOTAL		**30,153,502,340**	**24,839,779,508**	**82.38**									

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT
Jalan Mayor Kusmanto No.23 Telp. 321040 Kode Pos 57415
K L A T E N

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Klaten, 18 Maret 2020

INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

JAJANG PRIHONO, S.STP
Pembina
NIP. 19810216 199912 1 001